DRIVING STABILITY TO SUSTAIN GROWTH



PT Solusi Tunas Pratama Tbk

2025 Laporan Tahunan
Annual Report

Disclaimer

Laporan Tahunan ini dapat dibaca secara bersamaan dengan Laporan Keberlanjutan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai komitmen, pendekatan, dan pelaksanaan program keberlanjutan. Dalam Laporan ini, setiap penyebutan "Perseroan" atau "Perusahaan" merujuk pada PT Solusi Tunas Pratama Tbk, sedangkan "Grup SMN" atau "Grup" merujuk pada PT Sarana Menara Nusantara Tbk selaku entitas induk beserta entitas anaknya, termasuk Perseroan.

This Annual Report may be read together with the Sustainability Report to provide a more comprehensive understanding of the sustainability commitments, approach, and program implementation. In this Report, any reference to the "Company" refers to PT Solusi Tunas Pratama Tbk, while the "SMN Group" or "Group" refers to PT Sarana Menara Nusantara Tbk as the parent entity together with its subsidiaries, including the Company.

DRIVING STABILITY TO SUSTAIN GROWTH

Di tengah lanskap industri yang terus berkembang, PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perseroan" atau "STP") terus mendorong stabilitas sebagai landasan untuk mempertahankan pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, Perseroan menunjukkan eksekusi yang fokus, menjaga kekuatan operasional, serta memperkuat fondasi bisnisnya melalui pengelolaan yang disiplin dan arah strategis yang terukur. Dengan kekuatan yang terarah dan komitmen terhadap keandalan, STP terus memperkokoh perannya dalam mendukung konektivitas yang semakin luas dan bernilai bagi para pemangku kepentingan.

Amid an evolving industry landscape, PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Company" or "STP") continues to drive stability as the foundation for sustaining healthy and long-term growth. Throughout 2025, the Company demonstrated focused execution, maintained operational strength, and reinforced its business foundation through disciplined management and measured strategic direction. With focused strength and a commitment to reliability, STP continues to strengthen its role in supporting broader and more valuable connectivity for stakeholders.

Pertumbuhan yang dicapai Perseroan tidak hanya mencerminkan ekspansi aset, tetapi juga menunjukkan kemampuan STP dalam menjaga stabilitas di tengah perubahan serta membangun nilai jangka panjang di seluruh portofolio menaranya. Melalui investasi strategis, kemitraan yang kuat, dan konsistensi dalam pelaksanaan, STP terus menghubungkan kekuatan fondasi dengan pertumbuhan yang berkesinambungan. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya menjaga momentum usaha, tetapi juga memperkuat konektivitas untuk menopang perkembangan di masa depan.

The Company's growth reflects not only asset expansion, but also STP's ability to preserve stability amid change while building long-term value across its tower portfolio. Through strategic investments, strong partnerships, and consistent execution, STP continues to connect the strength of its foundation with sustainable growth. In doing so, the Company not only maintains business momentum, but also strengthens connectivity to support future progress.

DAFTAR ISI
TABLE OF CONTENTS

IKHTISAR UTAMA
MAIN HIGHLIGHTS

Ringkasan Kinerja 2025 2025 Perfomance Highlights	6
Ikhtisar Keuangan Financial Highlights	8
Kinerja Saham Stock Performance	10
Aksi Korporasi Corporate Actions	12
Informasi Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Supension) dan/atau Penghapusan Pencatatan Saham (*Delisting*) Information on the Temporary Supension and/or Delisting	12
Ikhtisar Obligasi, Sukuk atau Obligasi Konversi Bonds, Sukuk or Convertion Bonds Highlights	12
Peristiwa Penting Event Highlights	13

LAPORAN MANAJEMEN
MANAGEMENT REPORT

Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' Report	18
Laporan Direksi Report of The Board of Directors	28

PROFIL PERUSAHAAN
COMPANY PROFILE

Identitas Perusahaan Corporate Identity	46
Visi, Misi & Nilai-Nilai Perseroan Vision, Mission & Corporate Value	48
Logo Perseroan The Company's Logo	50
Jejak Langkah Milestones	51
Riwayat Singkat Perusahaan Company in Brief	54
Perubahan Nama Change of the Company Name	56
Kegiatan Usaha Line of Business	56
Layanan Kami Our Service	57
Wilayah Operasional Operational Areas	58
Struktur Organisasi Organizational Structure	60
Keanggotaan Asosiasi Association Membership	62
Komposisi Dewan Komisaris Board of Commissioners Composition	63
Profil Dewan Komisaris Board of Commissioners Profile	64
Komposisi Direksi Board of Directors Composition	69
Profil Direksi Board of Directors Profile	70
Demografi Karyawan Employees Demography	74
Komposisi Pemegang Saham Shareholders Composition	76
Struktur Pemegang Saham Shareholders Structure	78
Informasi Entitas Anak Information on Subsidiaries	80
Kronologis Pencatatan Saham Stock Listing Chronology	83
Informasi Pencatatan Efek Lainnya Other Stock Listing Information	84
Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant and Public Accountant Firms	85
Lembaga & Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions & Professions	85
Penghargaan & Sertifikasi Awards & Certifications	86
Informasi Pada Website Perusahaan Corporate Website Information	87

ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN
MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Tinjauan Makroekonomi dan Industri Macroeconomics and Industry Review	90
Strategi Perusahaan Corporate Strategy	95
Aspek Pemasaran Marketing Aspect	100
Prospek Usaha Tahun 2026 Business Outlook for 2026	101
Tinjauan Operasional Segmen Usaha Business Segment Operational Review	102
Tinjauan Keuangan Financial Review	104
Sumber Daya Manusia Human Resources	122
Teknologi Informasi Information Technology	143

TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Commitment To Corporate Governance Practices	156
Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders	165
Dewan Komisaris Board of Commissioners	181
Direksi Board of Directors	199
Organ Penunjang Dewan Komisaris Board of Commissioners Supporting Organs	213
Komite Audit Audit Committee	213
Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee	221
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	227
Unit Audit Internal Internal Audit Unit	230
Akuntan Publik Public Accountant	236
Sistem Pengendalian Internal Internal Control System	237
Manajemen Risiko Risk Management	239
Permasalahan Hukum Litigation	246
Sanksi Administratif Administrative Sanctions	246
Akses Informasi & Data Perseroan Information Access & Corporate Data	246
Kebijakan Privasi Data dan Informasi Data and Information Privacy Policy	248
Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services	249
Pedoman Perilaku Code of Conduct	251
Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur Company Policy on Creditor's Rights	253
Kebijakan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy	254
Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi untuk Keterbukaan Informasi Policy on The Utilization of Information Technology for Information Transparency	255
Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen Employee and/or Management Shares Option Programs	256
Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistleblowing System	256
Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard	259
Daftar Indeks SEOJK16/2021 SEOJK Index List 16/2021	280
Laporan Keuangan Konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Anak Perusahaan Consolidated Financial Statements PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries	304


www
www

01
IKHTISAR UTAMA

MAIN HIGHLIGHTS

ADVANCING CONNECTIVITY THROUGH STRATEGIC GROWTH

STP terus memperkuat landasan bisnisnya melalui strategi yang berfokus pada optimalisasi aset, pengembangan jaringan, dan transformasi digital. Inisiatif tersebut mendukung stabilitas kinerja Perseroan sekaligus memperluas kapasitasnya dalam menjawab kebutuhan infrastruktur digital yang terus berkembang. Dengan demikian, STP menjaga kesinambungan pertumbuhan usahanya serta memperkuat kontribusinya bagi perkembangan ekosistem digital Indonesia.

STP continues to strengthen its business foundation through strategies focused on asset optimization, network development, and digital transformation. These initiatives support the stability of the Company's performance while expanding its capacity to address the evolving needs of digital infrastructure. In doing so, STP sustains business growth while reinforcing its contribution to the advancement of Indonesia's digital ecosystem.

RINGKASAN KINERJA 2025

2025 Perfomance Highlights

Pendapatan
Revenues

Rp **1,91** triliun trillion

Total pendapatan naik sebesar **5,13%** menjadi **Rp1,91** triliun di tahun 2025.

Total revenues increased by **5.13%** to **Rp1.91** trillion in 2025.

Laba Tahun Berjalan
Profit for the Year

Rp **1,32** triliun trillion

Laba tahun berjalan naik sebesar **35,94%** menjadi **Rp1,32** triliun di tahun 2025.

Profit for the year increased by **35.94%** to **Rp1.32** trillion in 2025.

EBITDA
EBITDA

Rp **1,79** triliun trillion

EBITDA tercatat sebesar **Rp1,79** triliun, naik sebesar **6,78%**.

EBITDA disbursement was recorded at **Rp1.79** trillion, an increased by **6.78%**.

Laba Usaha
Operating Profit

Rp **1,35** triliun trillion

Laba Usaha tercatat sebesar **Rp1,35** triliun, naik sebesar **7,68%**.

Operating Profit stood at **Rp1.35** trillion, an increased by **7.68%**.

Jumlah Aset
Total Assets

Rp **10,15** triliun
trillion

Jumlah aset naik sebesar **3,61%** menjadi **Rp10,15** triliun di tahun 2025.

Total assets an increased by **3.61%** to **Rp10.15** trillion in 2025.

Jumlah Ekuitas
Total Equity

Rp **8,02** triliun
trillion

Jumlah ekuitas sebesar **Rp8,02** triliun di tahun 2025, naik sebesar **19,79%.**

Total equity reached **Rp8.02** trillion in 2025, increased by **19.79%**.

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

Rp **2,13** triliun
trillion

Jumlah Liabilitas mencapai **Rp2,13** triliun, menurun sebesar **31,28%** di tahun 2025.

Total Liabilities reached **Rp2.13** trillion, decreased by **31.28%** in 2025.

IKHTISAR KEUANGAN
Financial Highlights

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Uraian	2023	2024	2025	Description
Jumlah Aset Lancar	946,2	776,9	272,5	Total Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	8.939,3	9.025,4	9.883,8	Total Non-Current Assets
Jumlah Aset	**9.885,5**	**9.802,3**	**10.156,3**	**Total Assets**
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3.363,7	2.648,6	1.944,0	Total Current Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	810,2	456,9	190,3	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas	**4.173,9**	**3.105,5**	**2.134,3**	**Total Liabilities**
Jumlah Ekuitas	**5.711,6**	**6.696,8**	**8.022,0**	**Total Equity**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	**9.885,5**	**9.802,3**	**10.156,3**	**Total Liabilities and Equity**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Uraian	2023	2024	2025	Description
Pendapatan	1.892,1	1.817,4	1.910,7	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	(465,2)	(473,4)	(495,9)	Cost of Revenues
Beban Usaha	(102,3)	(87,6)	(61,9)	Operating Expenses
Beban Lain-lain – Bersih	(177,2)	(269,4)	(132,6)	Other Expenses – Net
EBITDA	1.742,3	1.679,3	1.793,2	EBITDA
Laba Bruto	1.426,8	1.343,9	1.414,7	Gross Profit
Laba Usaha	1.324,6	1.256,4	1.352,9	Operating Profit
Laba Sebelum Beban Pajak Final dan Penghasilan	1.147,4	987,0	1.220,2	Profit before Final Tax and Income Tax Expense
Pajak (Manfaat)/ Beban - Pajak Final dan Penghasilan	(19,1)	(12,7)	104,2	Tax (Benefit)/ Expenses -Final and Income Tax
Laba Tahun Berjalan	1.128,3	974,3	1.324,5	Profit for the Year
Laba Penghasilan Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				**Income for the Year Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	1.128,3	974,3	1.324,5	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	0,005	0,003	0,008	Non-controlling Interests
Jumlah	**1.128,3**	**974,3**	**1.324,5**	**Total**
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				**Total Comprehensive Income Attributable to:**
Pemilik Entitas Induk	1.130,6	976,3	1.321,7	Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-Pengendali	0,005	0,003	0,008	Non-controlling Interests
Jumlah	**1.130,6**	**976,3**	**1.321,7**	**Total**
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	992	856	1.164	Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (in full amount)

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

dalam miliar Rupiah | in billion Rupiah

Uraian	2023	2024	2025	Description
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	1.639,2	1.425,2	1.666,8	Net Cash Provided by Operating Activities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(245,4)	(132,3)	(831,4)	Net Cash Used in Investing Activities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(1.391,0)	(1.279,8)	(802,4)	Net Cash Used in Financing Activities
Kenaikan Neto Kas dan Bank	2,9	13,0	33,0	Net Increase in Cash on Hand and in Banks
Dampak Neto Perubahan Selisih Kurs pada Kas dan Bank	(0,0)	(0,0)	(0,0)	Effects of Exchange Rate on Cash on Hand and in Banks
Kas dan Bank Awal Tahun	2,4	5,3	18,3	Cash on Hand and in Banks at Beginning of Year
Kas dan Bank Akhir Tahun	5,3	18,3	51,2	Cash on Hand and in Banks at End of Year

RASIO KEUANGAN PENTING
KEY RATIOS

Uraian	2023	2024	2025	Description
Marjin EBITDA	92,1%	92,4%	93,85%	EBITDA Margin
Marjin Laba Usaha	70,0%	69,1%	70,81%	Operating Income Margin
Marjin Laba Tahun Berjalan	59,6%	53,6%	69,32%	Profit for the Year Margin
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas	19,8%	14,5%	16,5%	Return on Equity
Rasio Laba terhadap Total Aset	11,4%	9,9%	13,0%	Return on Assets
Rasio Lancar (X)	0,3	0,3	0,1	Current Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X)	0,5	0,3	0,2	Net Debt to Equity Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X)	0,3	0,2	0,2	Net Debt to Asset Ratio (X)
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X)	1,4	1,1	0,9	Net Debt to LQA EBITDA* Ratio (X)

*) EBITDA Kuartal terakhir yang disetahunkan | Annualized latest quarter EBITDA

IKHTISAR OPERASIONAL
OPERATIONAL HIGHLIGHTS

Uraian	2023	2024	2025	Description
Site Portofolio Tower				**Tower Portfolio Site**
Jumlah Site Menara	6.851	6.831	7.809	Total Tower Site
Site Portofolio Non-Tower				**Non-Tower Portfolio Site**
Site Indoor DAS	15	13	12	Indoor DAS Site
Penyewaan Site Menara	12.954	13.378	13.636	Tower Site Tenancies
Rasio Penyewaan Menara	1,89×	1,96×	1,75×	Tower Tenancy Ratio
Penyewaan Portofolio Non-Tower				**Non-Tower Portfolio Tenancies**
Site Indoor DAS	26	15	16	Indoor DAS Site

KINERJA SAHAM
Stock Performance

Informasi Kinerja Saham

Hingga 31 Desember 2025, jumlah saham Perseroan tercatat sebanyak 1.137.579.698 lembar. Informasi mengenai saham Perseroan disajikan sebagai berikut:

Share Performance Information

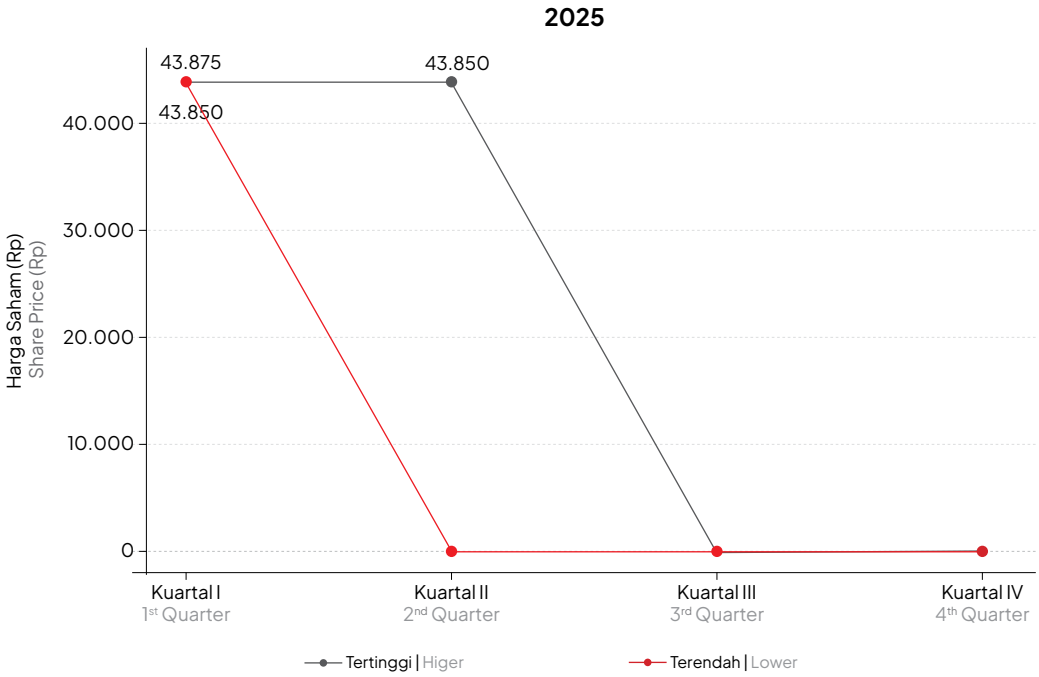
As of December 31, 2025, the total number of the Company's issued shares was 1,137,579,698 shares. The Company's share information is presented as follows:

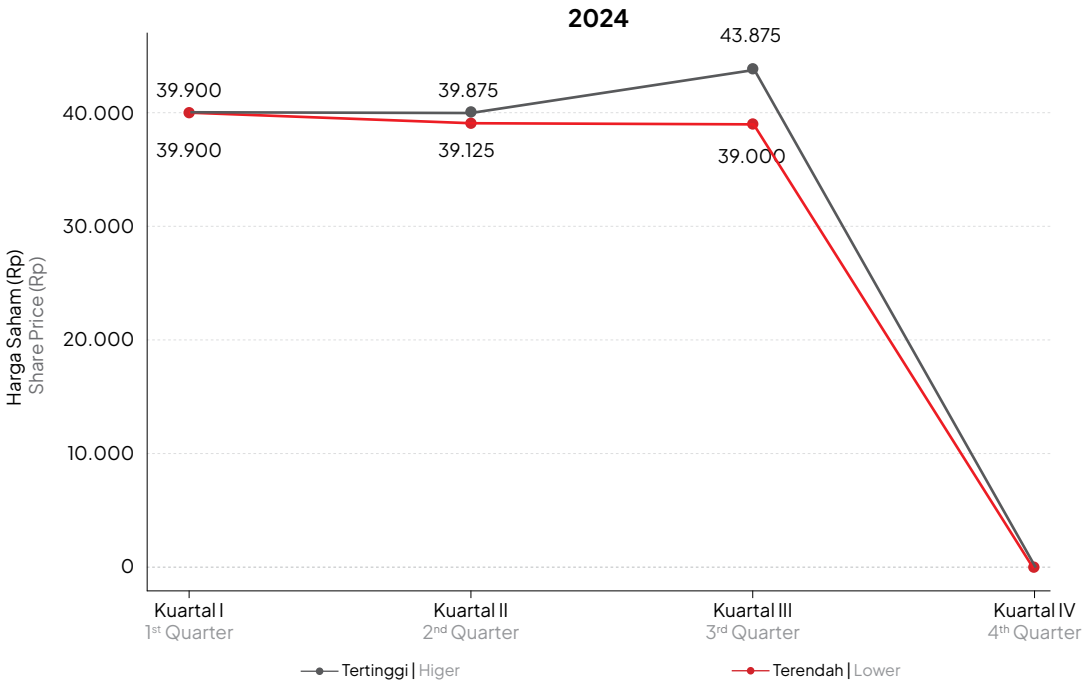
Harga, Volume, Nilai dan Kapitalisasi Saham 2025 & 2024
Share Price, Volume, Values and Market Capitalization in 2025 & 2024

2025						
Kuartal Quarter	**Tertinggi** Highest **(Rp)**	**Terendah** Lowest **(Rp)**	**Penutupan** Closing **(Rp)**	**Kapitalisasi Pasar Market** Capitalization **(Rp Juta |** Rp Million**)**	**Volume Perdagangan (Ribu Saham)** Transaction Volume (Thousand Shares)	**Nilai Perdagangan** Transaction Value **(Rp Juta |** Rp Million**)**
I	43.875	43.850	43.850	49.882.870	29.412	13
II	43.850	0	43.850	49.882.870	500	0
III	0	0	43.850	49.882.870	0	0
IV	0	0	43.850	49.882.870	0	0

2024						
Kuartal Quarter	**Tertinggi** Highest **(Rp)**	**Terendah** Lowest **(Rp)**	**Penutupan** Closing **(Rp)**	**Kapitalisasi Pasar Market** Capitalization **(Rp Juta |** Rp Million**)**	**Volume Perdagangan (Ribu Saham)** Transaction Volume (Thousand Shares)	**Nilai Perdagangan** Transaction Value **(Rp Juta |** Rp Million**)**
I	39.900	39.900	39.900	45.389.430	0	0
II	39.875	39.125	39.125	44.507.806	0	0
III	43.875	39.000	43.875	49.911.309	0	4,4
IV	0	0	43.875	49.911.309	4	0

Pergerakan Harga Saham (dalam Rupiah)
Share Price Movement (in Rupiah)





AKSI KORPORASI
Corporate Actions

Hingga akhir tahun 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi korporasi apa pun, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), pembagian dividen saham, penerbitan saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, maupun penambahan atau pengurangan modal.

By the end of 2025, the Company did not undertake any corporate actions such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus share issuances, changes in nominal share value, issuance of convertible securities, or capital increases and reductions.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (SUPENSION) DAN/ATAU PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (DELISTING)
Information on the Temporary Supension and/or Delisting

Berdasarkan (i) Pengumuman PT Bursa Efek Indonesia **("BEI")** No. Peng-S-00007/BEI.PLP/04-2025 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek mengenai Sanksi Pemenuhan Saham *Free Float* per 31 Maret 2025; dan (ii) Surat BEI kepada Perseroan No. S-04091/BEI.PLP/04-2025 tertanggal 30 April 2025 perihal sanksi Suspensi Efek atas tidak Dipenuhinya Ketentuan V.1.1. Peraturan BEI tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat **("Peraturan BEI I-A")**, Perseroan mendapatkan suspensi efek di Pasar Reguler dan Tunai efektif sejak sesi I tanggal 30 April 2025 sehubungan dengan belum dipenuhinya ketentuan V.1.1. Peraturan BEI I-A.

Based on (i) Indonesia Stock Exchange **("IDX")** Announcement No. Peng-S-00007/BEI.PLP/04-2025 regarding Temporary Suspension in relation to sanctions for non-compliance with the free float share requirement as of March 31, 2025; and (ii) IDX Letter to the Company No. S-04091/BEI.PLP/04-2025 dated April 30, 2025 regarding the sanction of Securities Suspension due to non-compliance with Provision V.1.1 of IDX Regulation on the Listing of Shares and Equity Securities Other than Shares Issued by Listed Companies **("IDX Regulation I-A")**, the Company's securities were suspended from trading on the Regular and Cash Markets effective from the first trading session on April 30, 2025, in connection with the Company's pending compliance with Provision V.1.1 of IDX Regulation I-A.

IKHTISAR OBLIGASI, SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI
Bonds, Sukuk or Convertion Bonds Highlights

Sampai dengan akhir tahun 2025, Perseroan tidak menerbitkan maupun mencatatkan obligasi, sukuk, obligasi konversi, atau efek lainnya di bursa efek mana pun.

By the end of 2025, the Company did not issue or list any bonds, sukuk, convertible bonds, or other securities on any stock exchange.

PERISTIWA PENTING
Event Highlights

23 April 2025
April 23, 2025

Perseroan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan *Publix Expose* Tahunan.

The Company holds the Annual General Meeting of Shareholders and Annual Public Expose.

20 Mei 2025
May 20, 2025

Penandatanganan Perubahan Pertama atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 22 Oktober 2024 (sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dari waktu ke waktu) dengan nilai maksimal sebesar Rp4.000.000.000.000, di mana sub-limit sebesar Rp1.400.000.000.000 dialokasikan untuk STP, antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Varnion Technology Semesta, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk dan PT Iforte Payment Infrastructure sebagai Peminjam, serta PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai Pemberi Pinjaman.

The signing of the First Amendment to the Facility Agreement dated 22 October 2024 (as amended and restated from time to time) with a maximum amount of Rp4,000,000,000,000, of which a sub-limit of Rp1,400,000,000,000 is allocated to STP, between PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek, PT Solusi Tunas Pratama Tbk, PT BIT Teknologi Nusantara, PT Varnion Technology Semesta, PT Inti Bangun Sejahtera Tbk and PT Iforte Payment Infrastructure as Borrowers, and PT Bank SMBC Indonesia Tbk as Lender.

15 September 2025
September 15, 2025

Pada 15 September 2025, Perseroan memperoleh penghargaan *Top 50 Big Capitalization Public Listed Companies* dalam acara *The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award* yang diselenggarakan oleh Indonesian *Institute for Corporate Directorship* (IICD).

In September 15, 2025, the Company received the Top 50 Big Capitalization Public Listed Companies award at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

1 Oktober 2025
October 1, 2025

Pada 1 Oktober 2025, Ibu Juliawati Gunawan Halim menerima penghargaan Indonesia Most Powerful Women 2025 kategori Infrastructure Industry Category dari Warta Ekonomi.

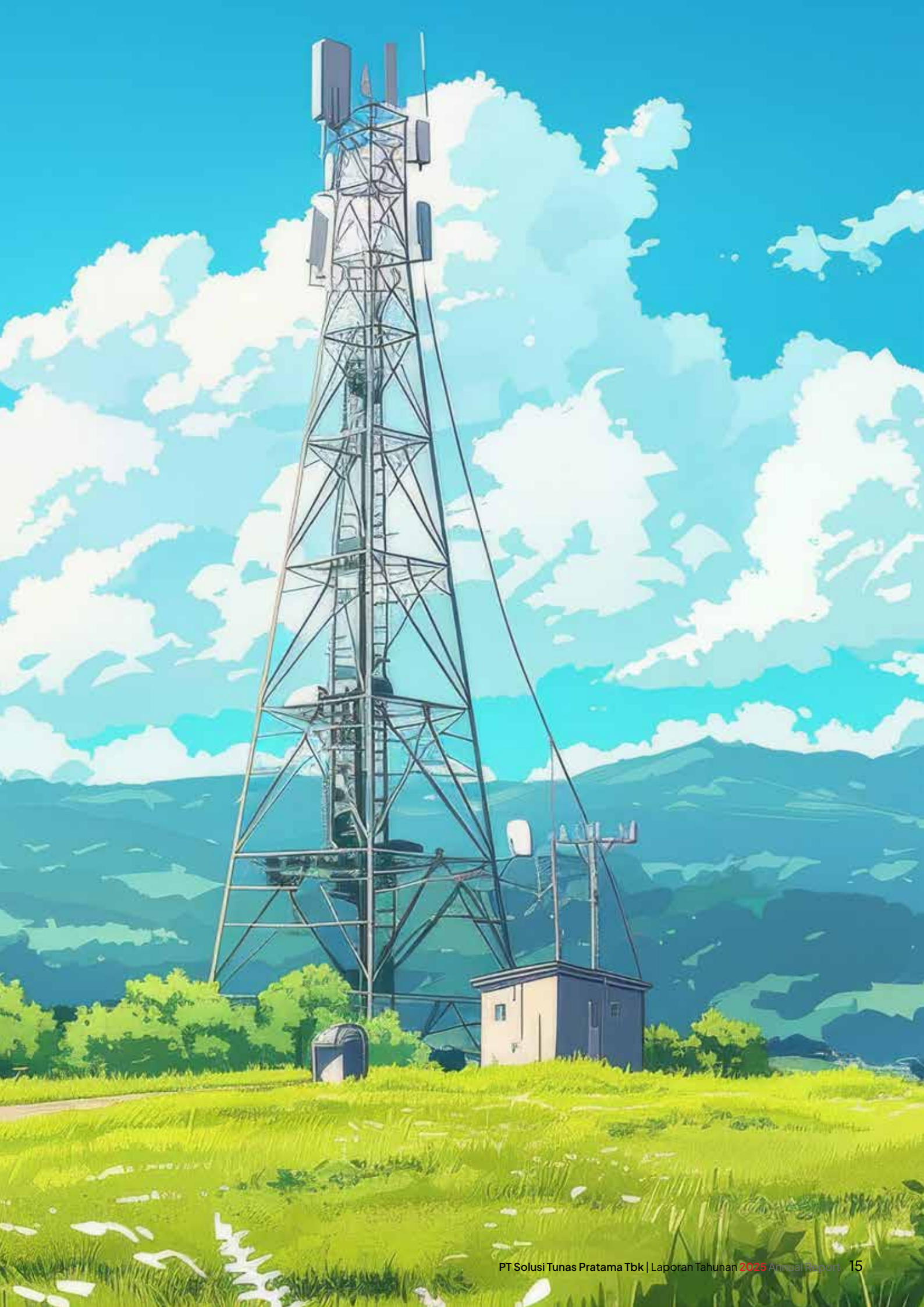
In October 1, 2025, Mrs. Juliawati Gunawan Halim received the Indonesia Most Powerful Women 2025 award in the Infrastructure Industry Category from Warta Ekonomi.

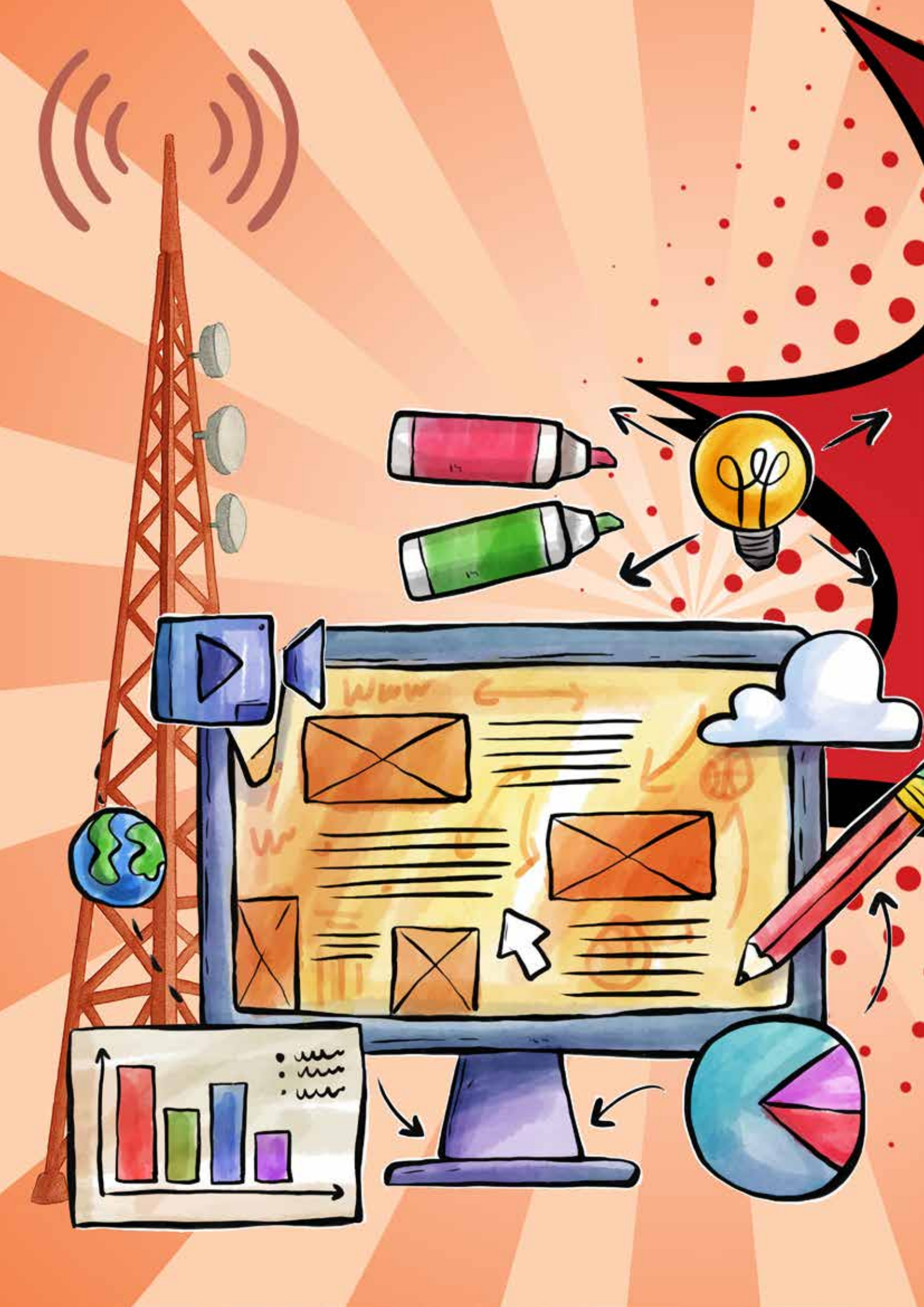
19 Desember 2025
December 19, 2025

Penandatanganan Perjanjian Perubahan atas Perjanjian Fasilitas tertanggal 12 Agustus 2024 (sebagaimana telah diubah dan dinyatakan kembali dari waktu ke waktu) senilai Rp2.500.000.000.000 antara PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek, STP dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk sebagai Peminjam dengan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta sebagai Pemberi Pinjaman.

The signing of an Amendment Agreement to the Facility Agreement dated 12 August 2024 (as amended and restated from time to time) in the amount of Rp2,500,000,000,000 between PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Iforte Solusi Infotek,STP and PT Inti Bangun Sejahtera Tbk as Borrowers, and MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch as Lender.







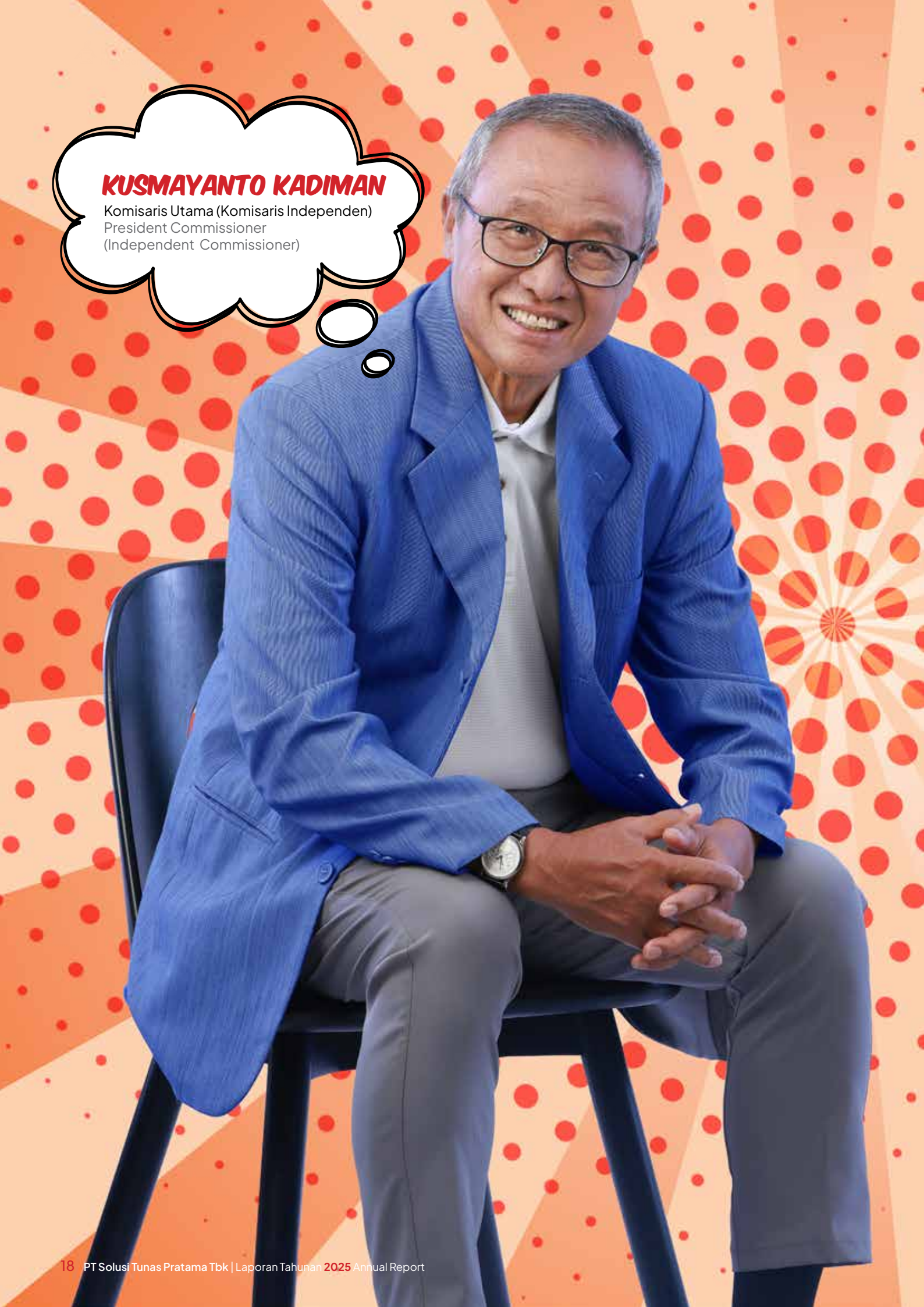
02
LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

STRENGTHENING NETWORK EXPANSION TO CAPTURE FUTURE OPPORTUNITIES

Perseroan secara konsisten melaksanakan inisiatif strategis melalui ekspansi infrastruktur menara telekomunikasi dan penguatan sewa kolokasi guna mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Pembangunan menara dilakukan di wilayah strategis, sesuai dengan kebutuhan penguatan jaringan dan ekspansi jaringan telekomunikasi.

The Company consistently implemented strategic initiatives through expansion of telecommunication tower infrastructure and strengthening of colocation leasing to optimize growth opportunities. Tower construction was carried out in strategic locations, in line with network strengthening needs and expansion of telecommunication networks.


KUSMAYANTO KADIMAN
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner
(Independent Commissioner)

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners' Report

Di tengah dinamika ketidakpastian global serta konsolidasi industri telekomunikasi yang masih berlangsung, Dewan Komisaris menilai bahwa sepanjang tahun 2025, Perseroan mampu mempertahankan penerapan kebijakan strategis secara disiplin dan mempertahankan fondasi operasional tetap tangguh. Melalui pengelolaan keuangan yang prudent, ekspansi infrastruktur yang berkelanjutan, serta komitmen yang konsisten terhadap tata kelola dan keberlanjutan, Perseroan menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi situasi konsolidasi industri dengan tetap memastikan pencapaian nilai tambah jangka panjang.

Amid the dynamics of global uncertainty and ongoing consolidation in the telecommunications industry, throughout 2025, the Board of Commissioners observes that the Company has maintained a disciplined strategic direction and a resilient operational foundation. Through prudent financial management, continued infrastructure expansion, and a consistent commitment to good governance and sustainability, the Company has demonstrated its capacity to navigate industry consolidation while preserving long-term value creation.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris secara konsisten melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis, kinerja operasional, serta pengelolaan risiko Perseroan. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap laporan Direksi dan berbagai forum evaluasi yang dilakukan sepanjang tahun, Perseroan mampu menjaga stabilitas kinerja di tengah dinamika konsolidasi industri telekomunikasi dan ketidakpastian ekonomi global. Pencapaian tersebut mencerminkan upaya Direksi dalam menjalankan strategi usaha secara disiplin, termasuk melalui penguatan fondasi operasional, optimalisasi pemanfaatan aset infrastruktur digital, serta pengelolaan keuangan yang *prudent*.

Dear Shareholders and Stakeholders,

During 2025, the Board of Commissioners consistently carried out its oversight function over the Company's strategic policy, operational performance, and risk management practices. Based on its review of the Board of Directors' reports and various evaluation forums conducted throughout the year, the Company was able to maintain stable performance amid the dynamics of telecommunications industry consolidation and global economic uncertainty. These achievements reflect the Board of Directors' efforts in executing business strategies in a disciplined manner, including strengthening operational foundations, optimizing the utilization of digital infrastructure assets, and maintaining prudent financial management.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris juga secara aktif mencermati perkembangan lingkungan bisnis yang mempengaruhi prospek dan kinerja Perseroan. Berbagai dinamika eksternal, mulai dari perubahan kondisi makroekonomi global hingga perkembangan industri telekomunikasi di dalam negeri, menjadi pertimbangan penting dalam menilai efektivitas kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh Direksi. Oleh karena itu, pemahaman atas konteks makroekonomi dan industri sepanjang tahun 2025 menjadi landasan penting dalam mengevaluasi kinerja Perseroan serta arah pengembangan usaha ke depan.

DINAMIKA MAKROEKONOMI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, pencapaian kinerja Perseroan sangat dipengaruhi oleh dinamika eksternal yang berkembang, disertai dengan mobilisasi sumber daya internal serta optimalisasi pemanfaatan peluang bisnis. Dalam konteks tersebut, Dewan Komisaris mencermati keputusan Direksi dalam menjawab perubahan lingkungan bisnis secara terukur dan konsisten.

Pada tataran global, perlambatan perekonomian dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, berlanjutnya konflik Rusia dan Ukraina, serta penerapan tarif perdagangan resiprokal oleh Pemerintah Amerika Serikat. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya rantai pasok global dan meningkatnya fragmentasi ekonomi antarnegara.

Di pasar keuangan global, volatilitas relatif tinggi terjadi sepanjang sebagian besar tahun sebelum mereda menjelang akhir tahun. Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Reserve*) menurunkan *Fed Funds Rate* sebanyak tiga kali, dengan penurunan terakhir pada 10 Desember 2025 ke kisaran 3,5%–3,75%, yang ditujukan untuk mendukung pasar tenaga kerja dan mengendalikan inflasi.

Pasar saham global secara umum menunjukkan tren penguatan, meskipun disertai kekhawatiran terhadap potensi gelembung pada saham-saham teknologi berkapitalisasi besar. Pasar saham di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, termasuk Indonesia, mencatatkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2025. Kondisi ini juga diiringi dengan meningkatnya eksposur terhadap aset lindung nilai, seperti logam mulia.

In performing this oversight role, the Board of Commissioners also actively observed developments in the business environment that influence the Company's performance and prospects. Various external dynamics, ranging from changes in global macroeconomic conditions to developments in the domestic telecommunications industry, formed important considerations in assessing the effectiveness of the strategic policies and actions taken by the Board of Directors. As such, an understanding of the macroeconomic and industry context throughout 2025 serves as an important foundation for evaluating the Company's performance and its future business direction.

MACROECONOMIC DYNAMICS IN 2025

Throughout 2025, the Company's performance achievements were significantly influenced by evolving external dynamics, alongside the mobilization of internal resources and the optimization of business opportunities. In this context, the Board of Commissioners observed the Board of Directors' decisions in responding to changes in the business environment in a measured and consistent manner.

At the global level, economic growth moderated amid escalating geopolitical tensions in the Middle East, the continued Russia–Ukraine conflict, and the implementation of reciprocal trade tariffs by the United States Government. These developments disrupted global supply chains and intensified economic fragmentation among countries.

Global financial markets experienced heightened volatility for most of the year before stabilizing toward year-end. The United States Federal Reserve reduced the Fed Funds Rate three times, with the final cut on December 10, 2025, bringing the rate to a range of 3.5%–3.75%. These measures were aimed at supporting labor market conditions and containing inflationary pressures.

Global equity markets generally recorded gains, notwithstanding concerns over potential valuation bubbles in large-cap technology stocks. Equity markets in the United States, Europe, and Asia, including Indonesia, posted positive performance throughout 2025. This trend was accompanied by increased exposure to hedging assets, such as precious metals.

Sejalan dengan dinamika tersebut, dalam laporan World *Economic Outlook Update* yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,3% pada tahun 2025, relatif sejalan dengan realisasi pertumbuhan global pada tahun sebelumnya, mencerminkan pemulihan ekonomi global yang tetap stabil namun masih moderat.

In line with these developments, the World Economic Outlook Update published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2026 reported that global economic growth reached 3.3% in 2025, broadly in line with the global growth recorded in the previous year, reflecting a global economic recovery that remained stable yet moderate.

Di tengah meningkatnya ketidakpastian global, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan yang relatif baik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan pada 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh hampir seluruh sektor usaha, kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi kontributor utama pertumbuhan. Terjaganya daya beli masyarakat seiring inflasi yang terkendali, serta berlanjutnya kebijakan hilirisasi, menjadi faktor pendukung bagi kinerja konsumsi dan investasi nasional.

Amid rising global uncertainty, Indonesia's economy demonstrated relative resilience. Based on data from Statistics Indonesia, the national economy grew by 5.11% year-on-year in 2025. Growth was supported by nearly all sectors, with the exception of mining, which experienced a contraction. On expenditure, household consumption and investment remained the primary contributors to economic growth. Sustained purchasing power, supported by controlled inflation, together with the continuation of downstream industrial policies, underpinned consumption and investment activity.

Secara sektoral, sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan di atas rata-rata, yaitu sebesar 8,35%. Pertumbuhan tersebut didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi dan keuangan digital, seiring dengan semakin meluasnya digitalisasi di berbagai sektor, termasuk transportasi, ritel, manufaktur, pendidikan, dan kesehatan.

On a sectoral basis, the information and communication sector recorded above-average growth of 8.35%, driven by the expansion of digital economic and financial activities. Digitalization has increasingly permeated various sectors, including transportation, retail, manufacturing, education, and healthcare.

Di pasar keuangan domestik, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 100 basis poin, dari 5,75% pada awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk menjaga stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah. Namun demikian, tekanan eksternal yang signifikan menyebabkan Rupiah tetap terdepresiasi sebesar 3,84% terhadap Dolar AS sepanjang tahun 2025.

In the domestic financial market, Bank Indonesia reduced the benchmark interest rate (BI Rate) by 100 basis points, from 5.75% at the beginning of the year to 4.75% at the end of 2025. The policy was aimed at maintaining inflation stability and supporting the Rupiah. Nevertheless, significant external pressures resulted in a depreciation of the Rupiah by 3.84% against the US Dollar during the year.

Di industri telekomunikasi, konsolidasi berlanjut melalui merger dua perusahaan besar. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fundamental industri, efisiensi operasional, serta kualitas layanan kepada pelanggan, meskipun konsolidasi tersebut juga memberikan tekanan terhadap tingkat sewa (*tenancy ratio*) menara telekomunikasi.

Within the telecommunications industry, consolidation continued through the merger of two major operators. The consolidation aimed to strengthen industry fundamentals, improve efficiency, and enhance service quality, while at the same time exerting pressure on tower tenancy ratios.

Seiring dengan itu, penyedia layanan telekomunikasi terus melakukan transformasi model bisnis menuju platform digital terintegrasi yang menyediakan *value-based services*, tidak terbatas pada penjualan kuota data dan pulsa. Transformasi ini menegaskan peran

Telecommunications providers also continued to transform their business models into integrated digital platforms offering value-based services beyond traditional data and voice products. Through this transformation, the telecommunications industry

industri telekomunikasi sebagai *enabler* utama bagi pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan digital.

Upaya pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil juga terus dilakukan oleh Pemerintah melalui penguatan regulasi dan pengembangan infrastruktur satelit. Peningkatan konektivitas tersebut dinilai berkontribusi dalam menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PANDANGAN ATAS KINERJA DIREKSI

Dalam menghadapi kondisi eksternal tersebut, Direksi Perseroan secara konsisten melaksanakan inisiatif strategis melalui ekspansi infrastruktur jaringan digital dan penguatan sewa kolokasi guna mengoptimalkan peluang pertumbuhan. Pembangunan menara baru dilakukan secara selektif di wilayah strategis, khususnya dalam rangka mengadopsi perkembangan teknologi 5G dan dinamika konsolidasi industri.

Strategi ekspansi tersebut didukung oleh kekuatan pendanaan internal dan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga. Perseroan juga memperkuat fundamental keuangan melalui strategi *deleveraging* untuk menurunkan beban utang guna memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan usaha. Dukungan dari induk perusahaan turut berperan dalam memperkuat struktur fundamental Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi efisiensi operasional dan optimalisasi aset melalui transformasi digital yang berkelanjutan telah berkontribusi terhadap penurunan beban usaha Perseroan. Penerapan teknologi digital dalam pengelolaan aset serta pemanfaatan sistem analitik berbasis data juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan efektivitas operasional.

Dewan Komisaris mengapresiasi pencapaian Perseroan dalam memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 sebagai standar keamanan informasi. Perolehan sertifikasi berstandar global ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, sejalan dengan agenda transformasi digital yang dijalankan.

Seiring dengan transformasi tersebut, Perseroan juga berhasil mempertahankan kepercayaan pelanggan

has reinforced its role as a fundamental enabler of the growing digital economy and financial ecosystem.

Efforts to expand connectivity to remote areas were further supported by government initiatives through regulatory reinforcement and the development of satellite infrastructure. Improved connectivity is expected to contribute to the creation of new economic opportunities and broader social welfare.

BOARD OF DIRECTORS' PERFORMANCE ASSESSMENT

Amid these external conditions, the Company's Board of Directors consistently implemented strategic initiatives through the expansion of digital infrastructure networks and the strengthening of colocation leasing to optimize growth opportunities. The construction of new towers was undertaken selectively in strategic areas, particularly to support the adoption of 5G technology and the dynamics of industry consolidation.

The expansion strategy was supported by strong internal funding and third parties' financing facilities. The Company strengthened its financial fundamentals through a deleveraging strategy aimed at reducing debt levels to provide greater flexibility for further business development. Support from the parent company also played a significant role in reinforcing the Company's financial position.

The Board of Commissioners observed that ongoing operational efficiency initiatives and asset optimization through digital transformation contributed to a reduction in operating expenses. The adoption of digital technologies in asset management and the use of data-driven analytics further enhanced productivity and operational effectiveness.

The Board of Commissioners acknowledged the Company's achievement in obtaining ISO/IEC 27001:2013 certification for information security management. This globally recognized certification reflects the Company's commitment to safeguarding customer and business partner trust as part of its digital transformation agenda.

In line with this transformation, the Company succeeded in maintaining the confidence of its key

utama di tengah konsolidasi industri telekomunikasi. Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjalankan komunikasi dan negosiasi yang efektif dengan pelanggan, sehingga tingkat *tenancy ratio* tetap terjaga pada level yang optimal.

customers amid industry consolidation. The Board of Commissioners noted the effectiveness of the Directors' communication and negotiation efforts, which helped sustain tenancy ratios at optimal levels.

Penguatan strategi operasional yang adaptif dan inovatif juga diiringi dengan komitmen terhadap keberlanjutan melalui integrasi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam strategi bisnis Perseroan. Dalam aspek lingkungan, Dewan Komisaris menilai bahwa efisiensi energi, pemasangan panel surya pada menara, serta penerapan standar ISO 55001:2014 dalam manajemen aset merupakan langkah yang tepat untuk mendukung pengurangan emisi karbon.

The strengthening of adaptive and innovative operational strategies was accompanied by a commitment to sustainability through the integration of environmental, social, and governance principles into the Company's business strategy. On environmental aspect, the energy efficiency initiatives, installation of solar panels on towers, and implementation of ISO 55001:2014 asset management standards were appropriate measures to support carbon emission reduction.

Dalam aspek sosial, Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial melalui berbagai program kepedulian kepada masyarakat serta perluasan akses telekomunikasi ke wilayah terpencil. Perseroan juga terus memfasilitasi lingkungan kerja yang aman dan kondusif.

On social aspect, the Company continued to fulfill its social responsibilities through community engagement programs and expansion of telecommunications access to remote areas. The Company also maintained a safe and conducive working environment.

Pada aspek kinerja keuangan, Perseroan mencatat pendapatan sebesar Rp1,91 triliun pada 2025, meningkat sebesar 5,13% secara *year to date* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sumber pendapatan Perseroan tetap berasal dari basis pelanggan yang terdiversifikasi.

In terms of financial performance, the Company recorded revenue of Rp1.91 trillion in 2025, increasing by 5.13% year to date compared to the same period in the previous year. The Company's revenue sources continued to be derived from a diversified customer base.

Dari sisi profitabilitas, Perseroan mencatatkan laba usaha sebesar Rp1,35 triliun pada 2025, naik sebesar 7,68% secara *year to date* dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sejalan dengan peningkatan pendapatan. Laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp1,32 triliun, meningkat sebesar 35,94% dibandingkan tahun sebelumnya.

In terms of profitability, the Company recorded operating profit of Rp1.35 trillion in 2025, up 7.68% year to date compared to the previous year. The increase was in line with the growth in revenue. Profit for the year was recorded at Rp1.32 trillion, increasing by 35.94% compared to the previous year.

Struktur keuangan Perseroan tetap menunjukkan penguatan, dengan jumlah aset tumbuh sebesar 3,61% secara *year to date* menjadi Rp10,15 triliun pada 2025. Pertumbuhan aset tersebut diiringi dengan penurunan liabilitas sebesar 31,28% menjadi Rp2,13 triliun. Penurunan liabilitas mencerminkan efektivitas strategi *deleveraging* dalam memperkuat fundamental keuangan Perseroan. Ekuitas tercatat sebesar Rp8,02 triliun, meningkat sebesar 19,79% dibandingkan tahun sebelumnya.

The Company's financial structure continued to show strengthening, with total assets growing by 3.61% year to date to Rp10.15 trillion in 2025. This asset growth was accompanied by a 31.28% decrease in liabilities to Rp2.13 trillion. The decline in liabilities reflects the effectiveness of the deleveraging strategy in strengthening the Company's financial fundamentals. Equity was recorded at Rp8.02 trillion, increasing by 19.79% compared to the previous year.

Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa kinerja Perseroan sepanjang tahun 2025 mencerminkan efektivitas dan keberhasilan

Overall, the Board of Commissioners considers that the Company's performance throughout 2025 reflects the effective and successful implementation

implementasi inisiatif strategis oleh Direksi. Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam menjaga kinerja Perseroan di tengah berbagai tantangan eksternal serta menilai bahwa Direksi telah menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan.

PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara menyeluruh, mulai dari tahap perumusan hingga implementasi strategi Perseroan. Dewan Komisaris secara aktif menelaah, mengkaji, dan mengevaluasi rumusan strategi yang diajukan oleh Direksi sebelum memberikan persetujuan. Persetujuan tersebut diberikan berdasarkan penilaian bahwa strategi yang dirumuskan telah sejalan dengan tujuan Perseroan, serta telah mempertimbangkan dinamika eksternal, kecukupan sumber daya internal, dan faktor-faktor risiko yang relevan.

Pada tahap implementasi, Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan melalui rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. Agenda rapat mencakup antara lain evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis, pencapaian kinerja, serta berbagai tantangan yang dihadapi Perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga melakukan pembahasan terkait penerapan praktik tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal.

Dalam pelaksanaan fungsi pengarahannya, Dewan Komisaris memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk melanjutkan transformasi digital secara terukur, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan analitik data guna mendukung pengambilan kebijakan yang lebih presisi. Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya menjaga tingkat kesehatan keuangan Perseroan serta penerapan manajemen risiko secara disiplin sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan aspek keberlanjutan turut menjadi perhatian Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mengarahkan Direksi untuk secara konsisten mengintegrasikan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan strategis dan operasional Perseroan. Direksi didorong untuk melanjutkan berbagai inisiatif keberlanjutan yang telah berjalan, termasuk efisiensi

of strategic initiatives by the Directors. The Board of Commissioners appreciates the Directors' efforts in navigating various external challenges and assesses that management has performed optimally in supporting the Company's sustainable business continuity.

BOARD OF COMMISSIONERS' OVERSIGHT ON STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

Throughout 2025, the Board of Commissioners carried out comprehensive oversight functions covering both the formulation and implementation of the Company's strategy. The Board of Commissioners reviewed, assessed, and evaluated the strategic proposals submitted by the Directors prior to approval. Such approval was granted based on the assessment that the proposed strategy was aligned with the Company's objectives and had taken into account external dynamics, the adequacy of internal resources, and relevant risk factors.

At the implementation stage, the Board of Commissioners exercised its oversight through internal meetings as well as joint meetings with the Directors. These meetings addressed, among other matters, the execution of strategic policies, performance achievements, and challenges encountered by the Company. The Board of Commissioners also reviewed governance practices and risk management as part of strengthening internal control mechanisms.

In fulfilling its advisory role, the Board of Commissioners provided guidance to the Directors to continue the Company's digital transformation in a measured manner, by leveraging advances in digital technology and data analytics to support more precise and informed decision-making. The Board of Commissioners also emphasized the importance of maintaining the Company's financial soundness and implementing disciplined risk management practices as a foundation for sustainable growth.

Oversight of sustainability practices also remains a key focus. The Board of Commissioners directs the Board of Directors to consistently integrate environmental, social, and governance principles into the Company's strategic and operational policies. The Board of Directors is encouraged to continue the sustainability initiatives that have been implemented, including energy efficiency, digitalization of asset

energi, digitalisasi manajemen aset, penguatan tata kelola, serta penguatan aspek sosial dan ekologis.

Dewan Komisaris menilai bahwa komitmen terhadap praktik keberlanjutan yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan dapat memperkuat penciptaan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendukung kesinambungan pertumbuhan Perseroan dalam jangka panjang.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA

Dewan Komisaris menilai bahwa kebutuhan terhadap infrastruktur digital di Indonesia akan terus berkembang seiring dengan percepatan transformasi digital di berbagai sektor ekonomi dan kehidupan masyarakat. Peningkatan konsumsi data, penguatan ekosistem layanan digital, serta pengembangan teknologi jaringan generasi terbaru diperkirakan akan terus mendorong kebutuhan terhadap ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang lebih luas dan andal, termasuk pembangunan menara baru dan peningkatan kapasitas jaringan yang telah ada.

Dalam menghadapi perkembangan tersebut, Perseroan berupaya untuk terus memperkuat perannya sebagai penyedia infrastruktur digital yang strategis bagi industri telekomunikasi nasional. Upaya ini diwujudkan melalui perluasan jaringan menara dan *fiber* optik grup secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan jangkauan layanan di wilayah-wilayah dengan potensi pertumbuhan jangka panjang, termasuk kawasan Indonesia bagian timur.

Momentum pengembangan teknologi jaringan generasi kelima juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan industri. Rencana penawaran spektrum frekuensi 5G yang diperkirakan berlangsung pada tahun 2026 dipandang dapat mempercepat peningkatan kapasitas jaringan serta mendukung integrasi layanan digital melalui konsep *fixed-mobile convergence*. Dalam konteks ini, kesiapan infrastruktur Perseroan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pengembangan ekosistem digital tersebut.

Komitmen terhadap keberlanjutan juga menjadi bagian penting dalam arah pengembangan usaha Perseroan ke depan. Berbagai inisiatif dilakukan untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon, termasuk melalui pemasangan sistem baterai

management, strengthening governance practices, as well as reinforcing social and ecological aspects.

The Board of Commissioners considers that a sustained commitment to consistent and continuous sustainability practices strengthens value creation for shareholders and other stakeholders, while supporting the Company's long-term sustainable growth.

VIEW ON BUSINESS OUTLOOK

The Board of Commissioners believes that demand for digital infrastructure in Indonesia will continue to expand in line with the accelerating pace of digital transformation across various economic sectors and communities. The growth of data consumption, the strengthening of digital service ecosystems, and the advancement of next-generation network technologies are expected to sustain demand for broader and more reliable telecommunications infrastructure, including the construction of new towers and the enhancement of existing network capacity.

In responding to these developments, the Company continues to strengthen its role as a strategic digital infrastructure provider supporting the national telecommunications industry. This commitment is reflected through the ongoing expansion of towers and group's fiber optic networks, while also enhancing service coverage in areas with long-term growth potential, including regions in Eastern Indonesia.

The advancement of fifth-generation network technology also presents new opportunities for industry growth. The planned 5G spectrum allocation expected in 2026 is anticipated to accelerate network capacity expansion and support the integration of digital services through fixed-mobile convergence. In this context, the Company's infrastructure readiness represents an important factor in supporting the development of the broader digital ecosystem.

Commitment to sustainability also remains an important element in the Company's future development strategy. Various initiatives are being undertaken to enhance energy efficiency and reduce carbon emissions, including the installation of battery

dan pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan pada lokasi menara. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung operasional yang lebih efisien sekaligus memperkuat kontribusi Perseroan terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, Dewan Komisaris menilai bahwa prospek usaha Perseroan tetap berada pada arah yang positif. Dewan Komisaris mendukung langkah-langkah strategis yang disusun oleh Direksi dan mendorong agar seluruh inisiatif pengembangan usaha dilaksanakan secara disiplin, terukur, dan selaras dengan visi jangka panjang Perseroan.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Dewan Komisaris menilai bahwa Perseroan terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan secara konsisten, sebagai bagian dari komitmen terhadap aspek keberlanjutan. Penguatan GCG tersebut tercermin antara lain dalam peningkatan integritas dan akuntabilitas melalui penerapan Kebijakan Anti Suap dan Anti Korupsi di seluruh tingkatan organisasi, serta penguatan dan optimalisasi fungsi *Whistleblowing System*. Atas penerapan tata kelola yang baik tersebut, Dewan Komisaris mengapresiasi bahwa Perseroan pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan Top 50 *Big Capitalization Public Listed Company* dari *The 16th* IICD *Corporate Governance Conference and Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh beberapa komite di bawahnya, yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Masing-masing komite telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna mendukung efektivitas pengawasan dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Guna memastikan penerapan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, Perseroan memperkuat disiplin pengelolaan risiko secara komprehensif, baik pada aspek operasional maupun keuangan, sebagai bagian dari sistem pengendalian internal.

systems and the adoption of more environmentally friendly energy solutions at tower sites. These initiatives are expected to support more efficient operations while strengthening the Company's contribution to sustainable development goals.

Taking these factors into account, the Board of Commissioners views the Company's business prospects as remaining positive. The Board fully supports the strategic initiatives established by the Board of Directors and encourages that all business development efforts be implemented in a disciplined and measured manner, aligned with the Company's long-term vision.

CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE ASSESSMENT

The Board of Commissioners of the Company recognizes that the Company continues to strengthen the implementation of good corporate governance through various initiatives carried out on a consistent basis, as part of its commitment to sustainability. These efforts are reflected, among others, in enhanced integrity and accountability through the implementation of Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy across all levels of the organization, as well as the strengthening and optimization of the Whistleblowing System. In recognition of its implementation of good corporate governance, the Board of Commissioners appreciates that in 2025, the Company received the Top 50 Big Capitalization Public Listed Company award at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

In carrying out its oversight function, the Board of Commissioners was supported by committees under its supervision, namely the Audit Committee, and Remuneration and Nomination Committee. Each committee discharged its duties and responsibilities in line with the Company's Articles of Association and prevailing laws and regulations, thereby strengthening the effectiveness of oversight and good corporate governance practices.

In ensuring the adoption of responsible and sustainable business practices, the Company has reinforced comprehensive risk management discipline across both operational and financial aspects as part of its internal control framework.

Penguatan praktik bisnis yang bertanggung jawab tercermin dari penerapan standar global yang berkelanjutan, antara lain ISO 27001:2013 untuk keamanan informasi dan ISO 55001:2014 untuk manajemen aset. Implementasi standar-standar tersebut mendukung peningkatan keandalan proses bisnis serta memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra strategis Perseroan.

The strengthening of responsible business practices is further demonstrated by the continued adoption of globally recognized standards, including ISO 27001:2013 for information security and ISO 55001:2014 for asset management. The implementation of these standards supports the reliability of business processes and contributes to strengthening the trust of customers and strategic partners.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengarahannya, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan. Dewan Komisaris menegaskan bahwa tata kelola tidak semata-mata ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulasi, namun telah menjadi kebutuhan fundamental bagi Perseroan dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, serta dalam mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha.

In fulfilling its oversight and advisory role, the Board of Commissioners provides guidance to the Directors to continuously enhance the quality of corporate governance implementation. The Board of Commissioners emphasizes that governance practices are not solely aimed at regulatory compliance but have become a fundamental requirement for safeguarding the interests of shareholders and other stakeholders, as well as supporting sustainable business growth.

APRESIASI

Atas nama Dewan Komisaris, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pemegang saham atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan. Kami juga menyampaikan penghargaan kepada Direksi atas pengelolaan usaha Perseroan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan konsisten sepanjang tahun 2025.

Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan atas dedikasi dan kerja keras yang telah berkontribusi pada tercapainya kinerja Perseroan yang stabil selama tahun berjalan. Kontribusi tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan operasional Perseroan. Kami turut menyampaikan terima kasih kepada para mitra strategis, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang berkelanjutan dalam mendukung kegiatan operasional Perseroan.

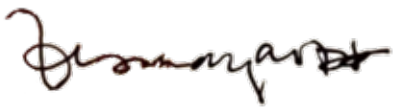
APPRECIATION

On behalf of the Board of Commissioners, we extend our appreciation and sincere gratitude to the shareholders for their continued support and confidence in the Company. We also acknowledge the Board of Directors for the responsible and consistent management of the Company's business throughout 2025.

We express our appreciation to all members of management and employees for their dedication and hard work, which contributed to the Company's stable performance during the year. Their contributions have been integral to sustaining the Company's operations. Our gratitude is also extended to strategic partners, customers, suppliers, government authorities, communities, and other stakeholders for their continued support and cooperation in the Company's operational activities.

Jakarta, 21 April 2026 | April 21, 2026

Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)


JULIAWATI
GUNAWAN HALIM
Direktur Utama | President Director

LAPORAN DIREKSI
Board of Directors Report

Sepanjang tahun 2025, Perseroan terus melaksanakan berbagai inisiatif strategis yang difokuskan pada ekspansi infrastruktur menara, penguatan kolokasi, penerapan harga sewa yang kompetitif, serta penguatan fundamental usaha. Di tengah konsolidasi industri telekomunikasi yang terus berlangsung, langkah-langkah tersebut memungkinkan Perseroan menjaga ketahanan operasional sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama serta mengoptimalkan sinergi dalam Grup Sarana Menara Nusantara. Melalui pengelolaan keuangan yang disiplin serta komitmen terhadap transformasi digital dan keberlanjutan, Perseroan tetap berfokus mendukung pertumbuhan industri infastruktur digital di Indonesia.

In 2025, the Company continued to implement strategic initiatives focused on expanding tower infrastructure, strengthening colocation, maintaining competitive leasing structures, and reinforcing its business fundamentals. Amid the ongoing consolidation of the telecommunications industry, these efforts enabled the Company to maintain operational resilience while strengthening long-term relationships with key customers and optimizing synergies within the Sarana Menara Nusantara Group. Through disciplined financial management and a continued commitment to digital transformation and sustainability, the Company remains focused on supporting Indonesia s growing digital infrastructure.

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan sejumlah inisiatif strategis yang difokuskan pada ekspansi pembangunan menara, penguatan kolokasi, penerapan harga sewa yang kompetitif, serta penguatan fundamental usaha. Inisiatif tersebut dijalankan dalam rangka memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama dan optimalisasi sinergi dalam Grup.

Dear Shareholders and Stakeholders,

Throughout 2025, the Company implemented a number of strategic initiatives focused on tower expansion, strengthening colocation, maintaining competitive lease pricing, and reinforcing business fundamentals. These initiatives were carried out to ensure continued cultivation of long-term relationships with key customers and the optimization of synergies within the Group.

Pelaksanaan strategi tersebut secara konsisten telah menopang pencapaian kinerja Perseroan di tengah proses konsolidasi industri telekomunikasi. Implementasi strategi dilakukan secara terukur untuk mendukung keberlanjutan usaha serta menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, Perseroan juga menegaskan komitmennya terhadap aspek keberlanjutan dengan mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan pengembangan usaha. Penerapan pilar-pilar keberlanjutan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, tetapi juga telah menjadi bagian integral dari kebutuhan dan praktik bisnis Perseroan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI

Pada tahun 2025, perekonomian global mengalami perlambatan yang dipengaruhi oleh eskalasi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, berlanjutnya konflik Rusia–Ukraina, serta penerapan tarif perdagangan resiprokal oleh Amerika Serikat. Kenaikan tarif impor tersebut turut memperkuat tren proteksionisme dalam perdagangan global.

Selain menguatnya proteksionisme, fragmentasi ekonomi antarnegara semakin meningkat, disertai dengan meningkatnya risiko fiskal di sejumlah negara. Perekonomian Amerika Serikat tetap menunjukkan pertumbuhan yang relatif solid dengan tren inflasi yang menurun, didukung oleh perbaikan konsumsi rumah tangga, penurunan impor, serta peningkatan investasi yang terkait dengan pengembangan kecerdasan buatan. Sebaliknya, perekonomian Tiongkok mengalami perlambatan, terutama akibat kontraksi pada sektor properti dan manufaktur.

Sejalan dengan dinamika tersebut, pasar keuangan global sepanjang tahun 2025 menghadapi tingkat volatilitas yang relatif tinggi. Secara umum, pasar saham global mencatat penguatan, meskipun disertai dengan kekhawatiran terhadap potensi *bubble* pada saham teknologi berkapitalisasi besar. Kondisi ini mendorong pergeseran portofolio global ke pasar yang dinilai lebih menarik dan relatif aman.

Dalam laporan *World Economic* Outlook yang dirilis pada Januari 2026, International Monetary Fund mencatat pertumbuhan ekonomi global sebesar

The consistent implementation of these strategies has supported the Company's performance achievements amid the ongoing consolidation of the telecommunications industry. The execution of these strategies has been carried out in a measured manner to foster business sustainability and create long-term value for shareholders and other stakeholders.

In parallel with its strategic direction, the Company reaffirmed its strong commitment to sustainability by integrating environmental, social, and governance considerations into its business development policies. The adoption of sustainability pillars is not only intended to meet applicable mandatory requirements but has also become an integral part of the Company's core business needs in supporting the achievement of sustainable development objectives.

MACROECONOMIC AND INDUSTRY OVERVIEW

In 2025, global economic growth moderated, influenced by escalating geopolitical tensions in the Middle East, the continued Russia–Ukraine conflict, and the implementation of reciprocal trade tariffs by the United States. The increase in import tariffs further reinforced the trend of protectionism in global trade.

In addition to growing protectionism, economic fragmentation among countries intensified, accompanied by elevated fiscal risks in several economies. The US economy continued to record relatively solid growth with easing inflation, supported by improving household consumption, declining imports, and increased investment related to artificial intelligence development. In contrast, China's economy decelerated, primarily due to contraction in the property and manufacturing sectors.

Against this backdrop, global financial markets experienced heightened volatility throughout 2025. Global equity markets generally recorded gains, although concerns emerged regarding the potential formation of a bubble in large-capitalization technology stocks. This volatility prompted global portfolios to shift toward markets perceived as more attractive and relatively safe.

The International Monetary Fund, in its World Economic Outlook released in January 2026 reported that global economic growth reached 3.3% in 2025,

3,3% pada tahun 2025, relatif sejalan dengan realisasi pertumbuhan global pada tahun sebelumnya.

Di tengah dinamika global tersebut, perekonomian nasional menunjukkan ketahanan dengan mencatat pertumbuhan yang positif. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan pada 2025, dengan pertumbuhan yang ditopang oleh konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, serta kinerja ekspor. Laju inflasi nasional tercatat sebesar 2,92% pada tahun 2025, dengan posisi cadangan devisa yang terjaga dan dinilai memadai dalam menghadapi tekanan eksternal. Di sisi lain, penguatan dolar Amerika Serikat berdampak pada depresiasi nilai tukar Rupiah sebesar 3,84% sepanjang tahun berjalan, dan ditutup pada level Rp16.782 per dolar AS pada 31 Desember 2025.

Dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar serta mendorong aktivitas perekonomian, Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan BI Rate sebesar 100 basis poin, dari 5,75% pada awal tahun menjadi 4,75% pada akhir tahun 2025. Kebijakan penurunan suku bunga ini dinilai mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah sekaligus mendorong aktivitas dunia usaha, termasuk di sektor telekomunikasi.

Di pasar modal, kinerja sepanjang tahun 2025 menunjukkan penguatan yang tercermin dari kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan sebesar 22,13% secara tahunan, dan ditutup pada level 8.646,94 pada 31 Desember 2025. Peningkatan kinerja pasar saham tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian domestik.

Dari sisi sektoral, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan sebesar 8,35%, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan keuangan digital. Digitalisasi telah menjadi bagian integral dari berbagai sektor, termasuk manufaktur, transportasi, dan ritel, yang mendorong pergeseran menuju masyarakat tanpa uang tunai serta peningkatan efisiensi ekonomi.

Penguatan digitalisasi tersebut berdampak pada peningkatan trafik data yang membutuhkan dukungan infrastruktur telekomunikasi digital yang andal, termasuk menara telekomunikasi, guna menjaga kualitas layanan dan pemerataan konektivitas. Dalam hal ini, pemerintah terus mendorong perluasan akses konektivitas hingga ke wilayah terpencil melalui penguatan regulasi dan pengembangan infrastruktur satelit.

broadly in line with the global growth recorded in the previous year.

Amid the global dynamics, Indonesia's economy demonstrated resilience by maintaining positive growth. Statistics Indonesia reported that Indonesia's economy grew by 5.11% year-on-year in 2025, supported by household consumption, investment, government spending, and export performance. Inflation remained contained at 2.92% in 2025, accompanied by foreign exchange reserves that were considered adequate to withstand external shocks. Meanwhile, the strengthening of the US dollar resulted in a depreciation of the Rupiah by 3.84% during the year, closing at Rp16,782 per US dollar as of December 31, 2025.

To maintain exchange rate stability and support economic activity, Bank Indonesia reduced the BI Rate by 100 basis points, from 5.75% at the beginning of the year to 4.75% at the end of 2025. This monetary policy stance was viewed as supportive in limiting further Rupiah depreciation while stimulating business activity, including in the telecommunications sector.

In the capital market, performance throughout 2025 strengthened, as reflected by a 22.13% year-on-year increase in the Indonesia Composite Index, which closed at 8,646.94 as of December 31, 2025. The improvement in equity market performance indicated sustained investor confidence in Indonesia's domestic economic prospects.

From a sectoral perspective, the information and communication sector grew by 8.35%, in line with the continued expansion of digital economic and financial activities. Digitalization has become embedded across various sectors, including manufacturing, transportation, and retail, supporting the transition toward a cashless society and improved economic efficiency.

The acceleration of digitalization has led to increased data traffic, requiring robust digital telecommunications infrastructure, including telecommunications towers, to maintain service quality and ensure broader connectivity coverage. In this regard, the government continues to promote equitable connectivity expansion to remote areas through strengthened regulation and satellite infrastructure development.

Dari aspek regulasi, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 dan Nomor 13 Tahun 2025 yang mengatur penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita 1,4 GHz. Regulasi tersebut menjadi landasan untuk perluasan jaringan *broadband* nasional serta persiapan transisi menuju teknologi 5G.

Industri telekomunikasi nasional menunjukkan kondisi yang semakin sehat dan berdaya saing, seiring dengan berlanjutnya konsolidasi melalui penggabungan dua operator besar. Konsolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan mendukung percepatan transformasi digital. Namun demikian, dinamika konsolidasi juga memberikan tekanan terhadap tingkat sewa menara, khususnya pada *tenancy ratio*.

STRATEGI TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025, Perseroan melaksanakan inisiatif strategis melalui ekspansi infrastruktur digital dengan pendekatan pembangunan menara *build-to-suit* yang dilakukan secara selektif. Pembangunan menara baru difokuskan pada wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi pertumbuhan, khususnya untuk mendukung percepatan adopsi jaringan 5G dan dinamika konsolidasi di industri. Ekspansi ini dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengembangan jaringan serat optik yang bersinergi dengan perusahaan afiliasi dalam Grup.

Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari bisnis menara, Perseroan memperkuat strategi kolokasi melalui penyewaan ruang pada menara yang ada, sebagai upaya meningkatkan efisiensi belanja modal. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menerapkan struktur biaya sewa menara yang kompetitif serta secara konsisten menjaga hubungan jangka panjang dengan perusahaan telekomunikasi sebagai pelanggan utama.

Perseroan juga mengimplementasikan inisiatif *one-stop solutions* melalui bekerja sama dengan anak perusahaan dalam Grup dengan menawarkan solusi terintegrasi yang memberikan efisiensi biaya bagi pelanggan. Pendekatan ini ditujukan untuk menjaga tingkat *tenancy ratio* tetap optimal sekaligus merespons dinamika industri telekomunikasi yang semakin terkonsolidasi.

From a regulatory standpoint, the government issued Minister of Communication and Digital Regulations No. 2 and No. 13 of 2025, governing the use of radio frequency spectrum in the 1.4 GHz band. These regulations provide a foundation for expanding broadband networks and preparing for the transition toward 5G technology.

The telecommunications industry continued to demonstrate improving fundamentals and competitiveness, supported by ongoing consolidation through the merger of two major operators. This consolidation aims to enhance service quality and support digital transformation. Nevertheless, the consolidation dynamics also exerted pressure on tower lease levels, particularly affecting tenancy ratios.

STRATEGY IN 2025

Throughout 2025, the Company implemented strategic initiatives focused on the expansion of digital infrastructure through a selective build-to-suit tower development approach. New tower construction was concentrated in strategic locations with strong growth potential, particularly to support the acceleration of 5G network adoption and industry consolidation. This expansion was carried out in an integrated manner alongside the development of fiber optic networks in synergy with affiliated companies within the Group.

To optimize revenue from the tower business, the Company strengthened its colocation strategy by leasing space on existing towers, thereby enhancing capital expenditure efficiency. In parallel, the Company applied competitive tower lease pricing while consistently maintaining long-term relationships with telecommunications operators as its core customers.

The Company also implemented a one-stop solutions initiative in collaboration with other subsidiaries in Group by offering integrated solutions that deliver cost efficiencies to customers. This approach was aimed at maintaining the tenancy ratio at an optimal level while addressing the challenges arising from an increasingly consolidated telecommunications industry.

Pelaksanaan strategi ekspansi infrastruktur telekomunikasi digital didukung oleh belanja modal yang memadai, yang bersumber dari kas internal Perseroan, fasilitas pinjaman dari lembaga pembiayaan, serta dukungan dari perusahaan induk. Struktur pendanaan tersebut memungkinkan Perseroan untuk merealisasikan pembangunan menara baru dan meningkatkan kapasitas menara eksisting guna mendukung kesinambungan usaha.

The execution of the digital infrastructure telecommunication expansion strategy was supported by adequate capital expenditure, funded through the Company's internal cash, financing facilities from financial institutions, and support from the parent company. This funding structure enabled the Company to develop new towers and enhance the capacity of existing towers to support sustainable business continuity.

Selain itu, Perseroan memperkuat fundamental keuangan melalui strategi pelunasan utang (*deleveraging*). Langkah ini mendukung upaya Grup dalam mempertahankan peringkat kredit pada level *investment grade* serta memperkuat daya tarik Perseroan bagi investor. Penurunan kewajiban keuangan juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengembangan usaha.

In addition, the Company strengthened its financial fundamentals through a debt repayment (deleveraging) strategy. This initiative supported the Group's efforts to maintain an investment-grade credit profile and enhance its attractiveness to investors. Reduced financial obligations also provided greater flexibility for further business development.

Untuk memenuhi permintaan konektivitas digital yang terus berkembang, Perseroan melanjutkan transformasi digital melalui pemanfaatan teknologi pada sistem manajemen aset yang terus dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan tingkat utilisasi aset.

To meet growing demand for digital connectivity, the Company continued its digital transformation initiatives by optimizing technology in its asset management systems to improve operational efficiency and asset utilization.

Optimalisasi teknologi digital juga diterapkan dalam pemantauan infrastruktur secara real-*time* guna memastikan keandalan layanan serta memitigasi risiko operasional pada infrastruktur digital. Penerapan teknologi ini turut mendukung peningkatan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

The optimization of digital technology was also applied to real-time infrastructure monitoring to ensure service reliability and mitigate operational risks associated with digital infrastructure. The use of digital technology further contributed to enhanced operational efficiency and more precise decision-making.

Pada aspek keberlanjutan, Perseroan merealisasikan komitmennya dengan mengintegrasikan prinsip Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola ke dalam seluruh aktivitas operasional. Pada aspek lingkungan, Perseroan menerapkan langkah-langkah efisiensi operasional yang juga berdampak pada efisiensi energi sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon dan mendukung transisi menuju energi bersih. Selain itu, Perseroan mengadopsi standar ISO 55001:2014 untuk memastikan efektivitas pengelolaan infrastruktur digital dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

From a sustainability perspective, the Company demonstrated its commitment by integrating Environmental, Social, and Governance principles into all operational activities. In terms of the environment, the Company implements operational efficiency measures that also impact energy efficiency as an effort to reduce carbon emissions and support the transition to clean energy. In addition, the Company adopted the ISO 55001:2014 standard to ensure effective digital infrastructure management while maintaining environmental stewardship.

PERAN DIREKSI DALAM PERUMUSAN DAN IMPLEMENTASI STRATEGI

Sesuai dengan tugas dan kewenangan yang melekat, Direksi Perseroan berperan aktif dalam proses perumusan strategi Perseroan. Perumusan strategi dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan tujuan jangka panjang Perseroan, dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan, serta mendukung keberlanjutan usaha.

Dalam tahap perumusan strategi, Direksi secara cermat mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika makroekonomi, perkembangan industri infrastruktur digital dan teknologi digital, tren industri telekomunikasi, perubahan regulasi, serta kebutuhan pelanggan. Strategi Perseroan dirancang secara komprehensif dengan pendekatan yang adaptif untuk merespons perubahan lingkungan usaha.

Selain faktor eksternal, Direksi juga memperhatikan kesiapan internal Perseroan, mencakup kecukupan sumber daya keuangan, kapabilitas sumber daya manusia, kesiapan dalam adopsi teknologi infrastruktur digital, serta budaya kerja yang mendukung inovasi dan efektivitas operasional.

Sebelum strategi diimplementasikan, Direksi membangun koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan unit-unit terkait guna memastikan keselarasan dalam pelaksanaan. Selanjutnya, Direksi melakukan pemantauan atas implementasi strategi melalui rapat internal yang diselenggarakan secara berkala.

Direksi memastikan bahwa inisiatif strategis Perseroan, termasuk ekspansi infrastruktur digital, peningkatan efisiensi operasional, penguatan fundamental usaha, transformasi digital, pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama, serta komitmen terhadap keberlanjutan, dapat dijalankan secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Direksi juga memberikan perhatian yang memadai terhadap penerapan manajemen risiko guna mendukung pelaksanaan strategi yang *prudent* dan terkendali.

ROLE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN STRATEGY FORMULATION AND IMPLEMENTATION

In accordance with its duties and authorities, the Board of Directors serves an active role in the formulation of the Company's strategy. The strategy formulation process is conducted in a comprehensive manner and aligned with the Company's long-term objectives, taking into account the interests of shareholders and stakeholders while supporting business sustainability.

During the strategy formulation stage, the Board of Directors carefully considers external dynamics, including macroeconomic conditions, developments in the digital infrastructure and digital technology sectors, telecommunications industry trends, regulatory changes, and customer requirements. The Company's strategy is designed comprehensively with sufficient flexibility to adapt to changes in the business environment.

In addition to external considerations, the Board also evaluates internal readiness, including the adequacy of financial resources, human capital capabilities, preparedness for digital infrastructure technology adoption, and an organizational culture that supports innovation and operational effectiveness.

Prior to implementation, the Board of Directors establishes effective coordination and communication with relevant units to ensure alignment in execution. The Board then monitors strategy implementation through regular internal meetings.

The Board of Directors ensures that the Company's strategic initiatives, including digital infrastructure expansion, operational efficiency initiatives, strengthening of business fundamentals, digital transformation, long-term relationship management with key customers, and sustainability commitments, are executed effectively. In parallel, the Board of Directors provides appropriate oversight of risk management to support prudent and well-controlled strategy implementation.

KINERJA TAHUN 2025 DAN PERBANDINGAN DENGAN TARGET

Pelaksanaan berbagai inisiatif strategis secara konsisten telah menopang kinerja operasional dan keuangan Perseroan sepanjang tahun 2025. Perseroan menjaga kualitas kinerja keuangan yang ditopang oleh struktur permodalan yang kuat. Pada saat yang sama, beban keuangan berhasil ditekan untuk menjaga tingkat kesehatan keuangan serta mempertahankan peringkat kredit Grup pada level *investment grade*.

Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp1,91 triliun pada 2025, mengalami peningkatan sebesar 5,13% secara *year-to-date* dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp1,82 triliun. Peningkatan pendapatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan *tenancy*.

EBITDA Perseroan tetap berada pada level positif, mencerminkan efektivitas pelaksanaan efisiensi operasional. Dari sisi pencapaian terhadap target, realisasi mencapai 107% dari target EBITDA sebesar 1,67 triliun.

Kinerja profitabilitas Perseroan tercermin dari laba tahun berjalan sebesar Rp1,32 triliun pada 2025, meningkat sebesar 35,94% secara *year-to-date* dibandingkan laba tahun berjalan tahun 2024 sebesar Rp974 miliar. Peningkatan laba tersebut diimbangi dengan pengelolaan beban operasional yang lebih efisien, yang tercermin dari peningkatan margin laba tahun berjalan menjadi 69,3% pada tahun 2025, dibandingkan 53,6% pada tahun sebelumnya.

Dukungan permodalan yang kuat tercermin dari peningkatan ekuitas sebesar 19,79% secara *year-to-date*, dari Rp6,70 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp8,02 triliun pada Desember 2025. Struktur permodalan yang kokoh tersebut memberikan dukungan yang memadai bagi pengembangan ekspansi infrastruktur digital Perseroan.

Secara struktur keuangan, jumlah aset tercatat sebesar Rp10,15 triliun, meningkat 3,61% secara *year-to-date* dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp9,80 triliun. Sementara itu, jumlah liabilitas menurun sebesar 31,28% secara *year-to-date*, dari Rp3,11 triliun pada tahun sebelumnya menjadi Rp2,13 triliun. Penurunan liabilitas tersebut mencerminkan efektivitas Perseroan dalam melaksanakan strategi *deleveraging*.

PERFORMANCE IN 2025 AND COMPARISON WITH TARGETS

The consistent execution of strategic initiatives supported the Company's operational and financial performance throughout 2025. The Company maintained sound financial performance underpinned by a strong capital structure. At the same time, financial expenses were reduced to preserve overall financial health and sustain its Group's investment-grade credit profile.

The Company's revenue was recorded at Rp1.91 trillion in 2025, representing an increase of 5.13% year-to-date compared to the same period in the previous year of Rp1.82 trillion. The increase in revenue was mainly attributable to higher tenancy.

The Company's EBITDA remained positive, reflecting the effective implementation of operational efficiency measures. In terms of target achievement, reached 107% of the full-year 2025 EBITDA target of Rp1.67 trillion.

The Company's profitability was reflected in profit for the year of Rp1.32 trillion in 2025, a 35.94% year-to-date increase compared with profit for the year of Rp974 billion in 2024. The increase in profit, operating expenses were managed more efficiently, as evidenced by the improvement in profit margin to 69.3% in 2025, compared with 53.6% in the previous year.

Strong capital support was evident from the 19.79% year-to-date increase in equity, rising from Rp6.70 trillion in 2024 to Rp8.02 trillion as of December 2025. This solid capital position provided adequate support for the Company's ongoing digital infrastructure expansion.

In terms of financial structure, total assets reached Rp10.15 trillion, a 3.61% year-to-date increase from Rp9.80 trillion in 2024. Total liabilities declined by 31.28% year-to-date, from Rp3.11 trillion in the prior year to Rp2.13 trillion. The reduction in liabilities reflected the effectiveness of the Company's deleveraging efforts.

Pencapaian kinerja keuangan tersebut didukung oleh kinerja operasional yang terjaga. *Tenancy ratio* menara tetap berada pada tingkat yang kompetitif di tengah konsolidasi industri telekomunikasi. Selain itu, Perseroan terus melaksanakan pembangunan menara baru secara selektif dengan fokus pada wilayah-wilayah strategis guna mendukung percepatan implementasi jaringan 5G.

The financial performance achieved during the year was supported by stable operational performance. Tower tenancy ratios remained competitive amid industry consolidation. In addition, the Company continued to develop new towers on a selective basis, prioritizing strategic locations to support the acceleration of 5G implementation.

TINJAUAN PENDUKUNG BISNIS

Perseroan memastikan bahwa pelaksanaan inisiatif strategis didukung secara menyeluruh oleh seluruh elemen pendukung bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital. Pada aspek sumber daya manusia, Perseroan secara berkelanjutan meningkatkan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan manajerial guna mendukung efektivitas operasional dan pencapaian tujuan usaha.

Perseroan memandang sumber daya manusia sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan. Upaya pengembangan tersebut difokuskan pada pembentukan karyawan yang adaptif terhadap perubahan, memiliki daya inovasi, serta kompeten dalam bidang infrastruktur digital.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan kompetensi, baik yang dilaksanakan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal. Program-program tersebut mencakup pelatihan teknis terkait manajemen infrastruktur telekomunikasi, penguatan keterampilan kepemimpinan bagi jajaran manajemen, serta peningkatan literasi digital bagi seluruh karyawan.

Pengembangan bisnis Perseroan juga didukung oleh pemanfaatan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan *Internet of Things*, dalam sistem pemantauan dan pengelolaan menara telekomunikasi. Penerapan teknologi tersebut berkontribusi pada peningkatan efisiensi operasional, deteksi dini potensi gangguan pada menara, serta penyediaan layanan yang andal bagi penyewa menara.

Transformasi digital yang berkelanjutan turut memperkuat posisi Perseroan di industri infrastruktur

BUSINESS SUPPORT OVERVIEW

The Company ensures that the implementation of its strategic initiatives is comprehensively supported by all business support elements, including human resource management and the utilization of digital technology. In terms of human resources, the Company continues to enhance technical, leadership, and managerial competencies to support operational effectiveness and the achievement of business objectives.

The Company views human resources as a key factor in supporting organizational success. Accordingly, the Company consistently strengthens employee capabilities through a range of training and development programs. These initiatives are focused on developing employees who are adaptive to change, innovative, and competent in the digital infrastructure sector.

Throughout 2025, the Company conducted various competency development programs, both internally and in collaboration with external parties. These programs included technical training related to telecommunications infrastructure management, leadership development programs for management, and initiatives to enhance digital literacy across the workforce.

The Company's business development is also supported by the adoption of digital technologies, including artificial intelligence and the Internet of Things, within its tower monitoring and management systems. The application of these technologies has contributed to improved operational efficiency, early detection of potential tower disruptions, and the delivery of reliable services to tower tenants.

Ongoing digital transformation has further strengthened the Company's position in the digital

digital, termasuk dalam aspek keamanan data dan informasi pelanggan serta mitra bisnis. Keandalan Perseroan dalam pengelolaan keamanan informasi tercermin dari perolehan sertifikasi ISO/IEC 27001:2013, sebagai standar internasional dalam penerapan sistem manajemen keamanan informasi.

Selain itu, Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 55001:2014 yang mencerminkan efektivitas dan keberlanjutan dalam penerapan sistem manajemen aset. Pemenuhan standar internasional tersebut menunjukkan kapabilitas Perseroan dalam mengelola aset secara andal dan berkelanjutan untuk mendukung operasional usaha.

Di samping penguatan SDM dan optimalisasi teknologi digital, dukungan pendanaan yang memadai merupakan faktor penting dalam pelaksanaan rencana bisnis Perseroan. Perseroan terus memperkuat kerja sama dengan institusi perbankan yang menyediakan fasilitas pinjaman. Dengan struktur pembiayaan dan tingkat suku bunga yang kompetitif, Perseroan dapat merealisasikan belanja modal guna mendukung pelaksanaan inisiatif strategis sesuai dengan rencana.

Untuk mendukung keberlanjutan pertumbuhan usaha, Perseroan juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk operator telekomunikasi sebagai pelanggan utama. Kemitraan strategis tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas jaringan konektivitas serta memperluas cakupan layanan. Selain itu, Perseroan meningkatkan sinergi dengan mitra penyedia teknologi guna memastikan penyediaan layanan yang konsisten dan berkualitas bagi pelanggan.

PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Perseroan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dalam seluruh aktivitas usahanya. Penerapan praktik tata kelola perusahaan yang baik ditujukan untuk memastikan proses bisnis yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Implementasi tata kelola perusahaan yang baik juga memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Perseroan, antara lain melalui peningkatan kepercayaan investor, penguatan pengelolaan risiko, serta penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Sejalan

infrastructure industry, including in the areas of data and information security for customers and business partners. The Company's reliability in safeguarding information is reflected in its achievement of ISO/IEC 27001:2013 certification, an international standard for information security management systems.

In addition, the Company has obtained ISO 55001:2014 certification, demonstrating its effectiveness and sustainability in implementing asset management systems. Compliance with these internationally recognized standards reflects the Company's capability to manage assets reliably and sustainably in support of its operations.

Apart from human resource development and digital technology optimization, adequate funding support serves a critical role in the execution of the Company's business plans. The Company continues to strengthen collaboration with banking institutions that provide financing facilities. Supported by competitive financing terms, the Company has been able to realize capital expenditure to support the implementation of its strategic initiatives as planned.

To support sustainable business growth, the Company also enhances collaboration with various stakeholders, including telecommunications operators as its key customers. These strategic partnerships are aimed at improving network connectivity quality and expanding service coverage. In addition, the Company strengthens synergies with technology partners to ensure the consistent delivery of high-quality services to customers.

GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

The Company consistently applies the principles of good corporate governance across all its business activities. The adoption of good corporate governance best practices is intended to ensure transparent, accountable, and sustainable operations. The implementation of good corporate governance also contributes positively to the Company's business, including enhanced investor confidence, more effective risk management, and the creation of long-term value for shareholders and other stakeholders. In this regard, the Company continues to strengthen the

dengan hal tersebut, Perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan kebijakan kepatuhan, manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.

Dalam pelaksanaan inisiatif strategis, Perseroan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak menghadapi perkara hukum yang secara material merugikan keberlangsungan usaha Perseroan, yang mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan regulasi. Selain itu, Perseroan melaksanakan kewajiban perpajakan secara tertib sebagai bagian integral dari penerapan tata kelola yang baik.

Di tingkat internal, Perseroan secara berkelanjutan menginternalisasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memperkuat budaya kepatuhan di seluruh organisasi. Direksi secara aktif melakukan penelaahan atas kebijakan dan prosedur operasional untuk memastikan keselarasan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta praktik yang wajar di industri. Perseroan juga secara konsisten menegaskan kepada seluruh manajemen dan karyawan untuk mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang telah ditetapkan. Atas penerapan tata kelola yang baik tersebut, Perseroan pada tahun 2025 mendapatkan penghargaan Top 50 *Big Capitalization Public Listed Company* dari *The* 16th IICD *Corporate Governance Conference and Award* yang diselenggarakan oleh *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD).

Selain penguatan budaya kepatuhan, Perseroan terus meningkatkan efektivitas sistem pelaporan pelanggaran yang tersedia bagi pihak internal. Sistem tersebut dilengkapi dengan mekanisme pengaduan, prosedur tindak lanjut, serta perlindungan bagi pelapor. Perseroan berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang diterima secara objektif dan sesuai dengan prosedur operasi standar yang berlaku.

TANTANGAN DAN UPAYA MENGATASINYA

Dalam pengembangan usaha, Perseroan menghadapi sejumlah tantangan yang berasal dari dinamika industri, termasuk berlanjutnya konsolidasi di industri telekomunikasi yang memberikan tekanan terhadap tingkat *tenancy ratio* menara. Kondisi tersebut

quality of its good corporate governance practices through the enhancement of compliance policies, risk management, and internal control systems.

In executing its strategic initiatives, the Company ensures full compliance with applicable laws and regulations. Throughout 2025, the Company was not involved in any legal proceedings that had a material adverse impact on its business continuity, reflecting adherence to applicable laws and regulations. The Company also fulfills its tax obligations in a timely and compliant manner as an integral component of sound corporate governance.

At the internal level, the Company continues to internalize good corporate governance principles and reinforce a culture of compliance throughout the organization. The Board of Directors actively reviews policies and operational procedures to ensure alignment with applicable laws and generally accepted industry practices. In addition, the Company consistently emphasizes to all levels of management and employees the importance of adhering to the Code of Ethics and Code of Conduct. In recognition of its implementation of good corporate governance, in 2025, the Company received the Top 50 Big Capitalization Public Listed Company award at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award organized by the Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD).

Alongside efforts to strengthen compliance culture, the Company continues to enhance the effectiveness of its internal whistleblowing system. This reporting mechanism is supported by established complaint procedures, follow-up processes, and protections for whistleblowers. The Company is committed to addressing all reports received in an objective manner and in accordance with its standard operating procedures.

CHALLENGES AND MITIGATION MEASURES

In the course of its business development, the Company encountered a number of challenges arising from industry dynamics, including ongoing consolidation within the telecommunications industry that exerted pressure on tower tenancy ratios.

memerlukan penyesuaian dalam pengelolaan aset dan hubungan dengan pelanggan.

Untuk merespons tantangan tersebut, Perseroan membangun komunikasi yang efektif dengan perusahaan telekomunikasi hasil penggabungan usaha. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, Perseroan mendukung proses penataan ulang lokasi menara serta penyesuaian layanan yang diberikan, guna memastikan kesinambungan operasional dan optimalisasi pemanfaatan aset.

Selain itu, tingkat persaingan di industri infrastruktur digital semakin meningkat dengan hadirnya entitas usaha baru yang menawarkan insentif harga kepada pelanggan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi utilisasi aset sebagai langkah untuk menjaga daya saing dan posisi Perseroan di industri.

KOMITMEN TERHADAP KEBERLANJUTAN

Perseroan telah mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola ke dalam kebijakan strategis sebagai bagian dari dukungan terhadap transformasi digital yang berkelanjutan. Sepanjang tahun 2025, penguatan aspek keberlanjutan terus dilakukan secara konsisten guna menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham serta memberikan manfaat yang berimbang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pada aspek lingkungan, Perseroan melanjutkan penerapan inisiatif efisiensi energi dalam kegiatan operasional. Upaya tersebut mencakup dukungan terhadap transisi energi bersih pada menara melalui pemanfaatan kapasitas panel surya di beberapa lokasi menara serta optimalisasi penggunaan baterai *lithium* sebagai pengganti generator diesel. Selain itu, penerapan standar ISO 55001:2014 dalam manajemen aset mencerminkan komitmen Perseroan terhadap pengelolaan aset yang efisien dan terstruktur.

Dari aspek sosial, Perseroan berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan. Di samping itu, Perseroan turut berkontribusi dalam peningkatan konektivitas di wilayah terpencil, yang memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

These conditions required adjustments in asset management and customer engagement.

To address these challenges, the Company established effective communication with telecommunications operators resulting from mergers. Through continued coordination, the Company supported the realignment of tower locations and the adjustment of service offerings to help maintain operational continuity and optimize asset utilization.

In addition, competition within the digital infrastructure industry intensified with the entry of new business players offering pricing incentives to customers. In response, the Company focused on enhancing service quality and improving asset utilization as part of its efforts to maintain competitiveness and a strong position within the industry.

COMMITMENT TO SUSTAINABILITY

The Company has integrated environmental, social, and governance principles into its strategic policies as part of its support for sustainable digital transformation. Throughout 2025, the Company continued to strengthen its sustainability practices across environmental, social, and governance aspects, with the objective of creating long-term value for shareholders while delivering balanced benefits to other stakeholders.

From an environmental perspective, the Company continued to implement energy efficiency initiatives across its operations. These efforts included supporting the clean energy transition at several tower sites through the utilization of solar panel capacity, as well as optimizing the use of lithium batteries to replace diesel generators. In addition, the implementation of ISO 55001:2014 for asset management reflects the Company's commitment to efficient and structured asset management practices.

From a social perspective, the Company actively contributed to improving community welfare through the implementation of various corporate social responsibility programs. Furthermore, the Company served a role in enhancing connectivity in remote areas, which contributed to local economic growth and improved community well-being.

Perseroan juga memberikan perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini diwujudkan melalui penerapan sistem remunerasi yang kompetitif, penyediaan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan nyaman, serta penerapan sistem pengembangan dan promosi karier yang objektif. Sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya manusia yang berkelanjutan, program pengembangan kompetensi karyawan dilaksanakan secara rutin setiap tahun.

The Company also places strong emphasis on employee welfare. This is reflected in the implementation of a competitive remuneration system, the provision of a safe, inclusive, and supportive working environment, and the application of objective career development and promotion systems. As part of its sustainable human capital management, employee competency development programs are conducted on a regular annual basis.

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Stabilitas pertumbuhan makroekonomi yang diproyeksikan serta perkembangan berkelanjutan industri telekomunikasi menjadi landasan bagi Perseroan dalam menilai prospek usaha pada tahun 2026 dan periode selanjutnya. Sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi di Indonesia, peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan digital terus mendorong pertumbuhan *traffic* data, yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan akan penyediaan infrastruktur digital.

BUSINESS OUTLOOK FOR 2026

Projected stable macroeconomic growth and the continued development of the telecommunications industry provide a basis for the Company in assessing its business outlook for 2026 and beyond. In line with the growth of Indonesia's telecommunications industry, increasing digital economic and financial activities continue to drive higher data traffic, which in turn elevates demand for digital infrastructure.

Selain itu, upaya Pemerintah dalam mendorong pemerataan konektivitas hingga ke wilayah terpencil serta percepatan komersialisasi jaringan 5G turut membentuk dinamika industri yang mendukung pengembangan digital infrastruktur. Kondisi tersebut menjadi faktor eksternal yang relevan dalam menilai peluang pertumbuhan usaha Perseroan.

In addition, Government initiatives aimed at expanding connectivity to remote areas and accelerating the commercialization of 5G networks further shape industry dynamics that support the development of digital infrastructure. These developments constitute relevant external factors in evaluating the Company's business opportunities.

Berdasarkan kondisi tersebut, Perseroan memandang terdapat peluang untuk melanjutkan pengembangan bisnis. Perseroan akan mengoptimalkan peluang tersebut melalui ekspansi infrastruktur menara dengan fokus pada wilayah-wilayah strategis dan area yang belum terlayani secara optimal. Di samping itu, Perseroan akan melanjutkan dukungan terhadap transisi energi bersih melalui pemasangan sistem baterai pada lokasi menara yang telah beroperasi.

Against this backdrop, the Company considers that opportunities remain available for continued business development. The Company will seek to optimize these opportunities through the expansion of tower particularly in strategic locations and areas that remain underserved. In parallel, the Company will continue to support the clean energy transition through the installation of battery systems at existing tower sites.

APRESIASI

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan nasihat yang diberikan dalam mendukung pengembangan usaha Perseroan. Penghargaan juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan yang telah menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan serta dalam upaya pencapaian target Perseroan.

Kepada para pemegang saham, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang berkelanjutan. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga kami sampaikan kepada para mitra strategis, pelanggan, vendor, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas kerja sama dan kontribusi yang telah terjalin. Seiring dengan prospek usaha Perseroan yang tetap terjaga, Perseroan berharap sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

APPRECIATION

We extend our appreciation and gratitude to the Board of Commissioners for their guidance and counsel in supporting the development of the Company's business. Our sincere appreciations are also conveyed to the entire management team and employees for their dedication and commitment in addressing challenges and striving to achieve the Company's targets.

We would also like to express our appreciation to shareholders for their continued trust and support. Our gratitude is further extended to strategic partners, customers, vendors, the community, and all other stakeholders for their cooperation and contributions. With the business outlook of the Company remaining constructive, the Company looks forward to strengthening synergy and collaboration with all stakeholders to support sustainable business growth.

Jakarta, 21 April 2026 | April 21, 2026

Atas Nama Direksi
On Behalf of the Directors



Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama
President Director

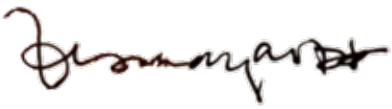
SURAT PERNYATAAN
ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025 PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi material dalam Laporan Tahunan PT Solusi Tunas Pratama Tbk Tahun Buku 2025 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 April 2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Kusmayanto Kadiman
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)



Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen
Independent Commissioner



Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris
Commissioner

STATEMENT LETTER OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2025 OF PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

We, the undersigned, hereby declare that all material information in the 2025 Annual Report of PT Solusi Tunas Pratama Tbk has been fully disclosed and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, April 21, 2026

Direksi
Board of Directors



Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama
President Director



Hartono Tanuwidjaja
Direktur
Director



Wong Tjin Tak
Direktur
Director



Wellington
Direktur
Director



03
PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

CONNECTING INDONESIA WITH PURPOSE

STP hadir sebagai bagian dari penggerak infrastruktur telekomunikasi Indonesia melalui solusi yang andal dan inovatif untuk mendukung konektivitas yang semakin luas. Seiring dengan penguatan kapabilitas dan perluasan jangkauan layanan, STP terus mempertegas perannya dalam memenuhi kebutuhan konektivitas di berbagai wilayah Indonesia.

STP serves as part of the driving force behind Indonesia's telecommunications infrastructure through reliable and innovative solutions that support wider connectivity. Along with strengthened capabilities and broader service reach, STP continues to reinforce its role in meeting connectivity needs across various regions of Indonesia.

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity

Nama Perusahaan
Company Name

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK

Informasi Perubahan Nama
Change of Name

Tidak Ada
None

Bidang Usaha | Type of Business

Perseroan bergerak di bidang usaha penyediaan layanan infrastruktur penunjang telekomunikasi independen yang antara lain meliputi penyediaan, pengelolaan dan penyewaan site telekomunikasi, baik secara langsung maupun melalui anak perusahaan.

The Company is an independent telecommunication infrastructure provider, which among others provides, manages and leases telecommunication sites, either directly or through subsidiaries.

Tanggal Pendirian
Establishment Date

27 September 2006
September 27, 2006

Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H. No. 5 tanggal 25 Juli 2006. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241/2007. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 10 tanggal 1 Maret 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022.

The Company was established based on Notarial Deed No. 5 of Ridjqi Nurdiani, S.H. dated July 25, 2006. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007. The Company's articles of association has been amended several times, the latest of which is covered by Notarial Deed No. 10 of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. dated March 1, 2022 concerning the changes of the Company's purposes and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision letter No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 10, 2022.

Kepemilikan Saham | Shares Ownership

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	PT Iforte Solusi Infotek	Masyarakat Public
97,33%	**2,58%**	**0,09%**

Susunan Permodalan | Capital Structure

Modal Capital	**Nominal Saham** Share Nominal @Rp100	**Jumlah (Rp)** Total (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital	**2.000.000.000**	**200.000.000.000**
Modal Ditempatkan dan Disetor Issued and Paid up Capital	**1.137.579.698**	**113.757.969.800**

Tanggal Pencatatan Saham di Bursa
Stock Listing Date

11 Oktober 2011
October 11, 2011

Tempat Pencatatan Saham
Stock Listing

Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange

Kode Saham
Stock Symbol

SUPR

Alamat Perseroan | Company Address

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Tanjung Karang Nomor 11, Kudus, Indonesia
Telp : +62 291 431905 | Fax : +62 291 431718

Kantor Cabang | Branch Office
Menara BCA, 49th Floor
Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310
Telp : +62 21 23585555 | Fax : +62 21 23586446

Kontak Alamat | Contact Address

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary : corporate.secretary@stptower.com
Pemasaran | Marketing : marketing@stptower.com
Alamat Situs Web | Website : www.stptower.com

VISI, MISI & NILAI-NILAI PERSEROAN
Vision, Mission & Corporate Value



VISI Vision

Menciptakan nilai dan membuat perbedaan.

To create value and make a difference.

MISI Mision

Mempertahankan pertumbuhan yang menguntungkan melalui inovasi, kualitas dan komitmen.

To sustain profitable growth through innovation, quality, and commitment.

Direksi bersama Dewan Komisaris telah meninjau kembali pernyataan Visi dan Misi Perseroan. Hasil dari evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Visi dan Misi yang berlaku saat ini masih selaras dan memadai untuk mendukung Perseroan dalam menghadapi perubahan dan perkembangan dinamika bisnis, baik pada kondisi saat ini maupun di masa mendatang.

The Board of Directors and the Board of Commissioners have reviewed the Company's Vision and Mission statements. The evaluation concluded that the current Vision and Mission remain relevant and appropriate to guide the Company in navigating the evolving business landscape, both in the present and in the future.

NILAI-NILAI INTI
Core Values

TERPERCAYA Trustworthy
Kita dapat diandalkan dan dipercaya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan.
We have to be reliable and credible in our thoughts, words and actions.

DINAMIS Dynamic
Kita terbuka kepada perubahan; bertindak dengan antusias dan percaya diri.
We embrace change; act with full enthusiasm and confidence.

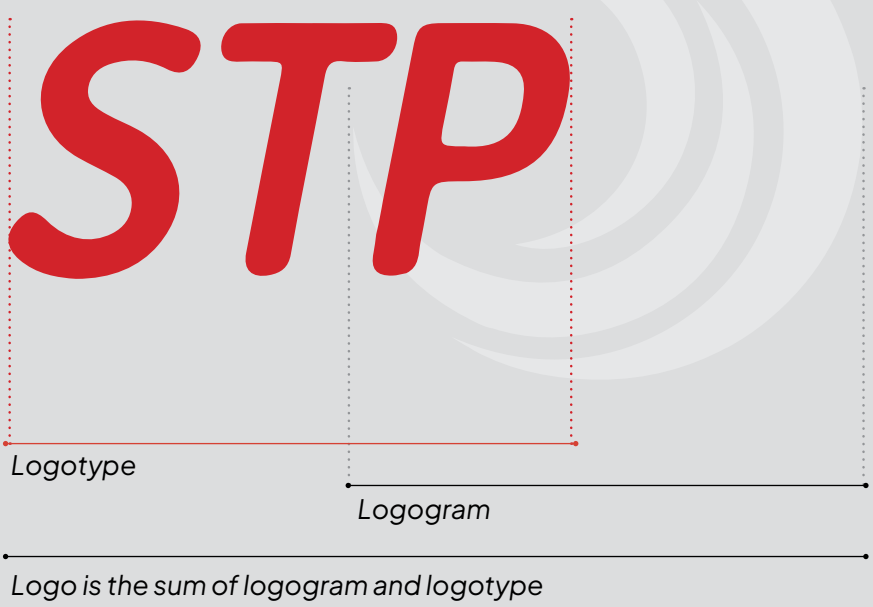
MENYENANGKAN Fun
Kami menciptakan suasana menyenangkan di pekerjaan kami.
We bring fun into work.

INOVATIF Innovative
Kita berinisiatif untuk selalu kreatif dalam mencari solusi paling efektif dalam segala yang kita lakukan.
We take initiative to always be creative in finding effective solutions in everything we do.

KERJASAMA TIM Teamwork
Kita berkolaborasi dan bersinergi untuk memiliki satu visi dan mencapai tujuan yang sama.
We collaborate and synergize to achieve common goals and a shared vision.

LOGO PERSEROAN

The Company's Logo



Logo Utama

Logotype STP memiliki arti bahwa Perseroan tidak hanya merangkul perubahan, tetapi bergerak maju, telah melakukan perubahan terdepan dengan inovasi canggih dan layanan terbaik. Logogram melambangkan peluang tak terbatas yang ingin diraih STP. Ini juga merupakan simbol sinyal sesuai dengan aktivitas bisnis STP sebagai perusahaan penyedia telekomunikasi. Secara keseluruhan logo STP bernuansa modern, praktis dan bersih. Pengaplikasian di semua material, dianjurkan untuk dapat menggunakan logo utama.

Logo STP terdiri dari dua elemen, *logotype* dan *logogram*. Setiap elemen dan keduanya, mendukung dan memperkuat logo secara keseluruhan. Warna yang digunakan untuk logo utama STP adalah STP *Red* dan STP *Grey*.

Main Logo

The STP logotype signifies that the Company not only embraces change but also moves forward, leading transformation through advanced innovation and excellent services. The logogram represents the limitless opportunities that STP aims to achieve. It also serves as a symbol of signals, aligning with STP's business activities as a telecommunications infrastructure provider. Overall, the STP logo conveys a modern, practical, and clean aesthetic. The use of the primary logo is recommended across all materials.

The STP logo consists of two elements: the logotype and the logogram. Each element, both individually and together, reinforces the overall strength of the logo. The primary colors used in the STP logo are STP Red and STP Grey.

JEJAK LANGKAH
Milestones

2006

Perseroan berdiri pada tanggal 27 September 2006 dengan nama PT Solusi Tunas Pratama.

The Company was established on September 27, 2006, under PT Solusi Tunas Pratama.

2007

Mengakuisisi 528 menara telekomunikasi dalam konstruksi yang kemudian disewakan secara tidak langsung kepada PT Axis Telecom.

Acquired 528 telecommunications towers, which then sub-leased indirectly to PT Axis Telecom.

2008

- Perseroan mulai beroperasi secara komersial.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (Master Lease Agreement/MLA) dengan PT Bakrie Telecom Tbk.
- The Company began its commercial operation.
- Signed a Master Lease Agreement (MLA) with PT Bakrie Telecom Tbk.

2009

- Mengakuisisi 543 portofolio menara dari PT Bakrie Telecom Tbk.
- Menandatangani Kontrak Sewa Jangka Panjang (*Master Lease Agreement* – "MLA") dengan PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Telekomunikasi Seluler.
- Acquired 543 towers portfolio from PT Bakrie Telecom Tbk.
- Signed Master Lease Agreement(s) with PT Indosat Tbk, PT Smart Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, and PT Telekomunikasi Seluler.

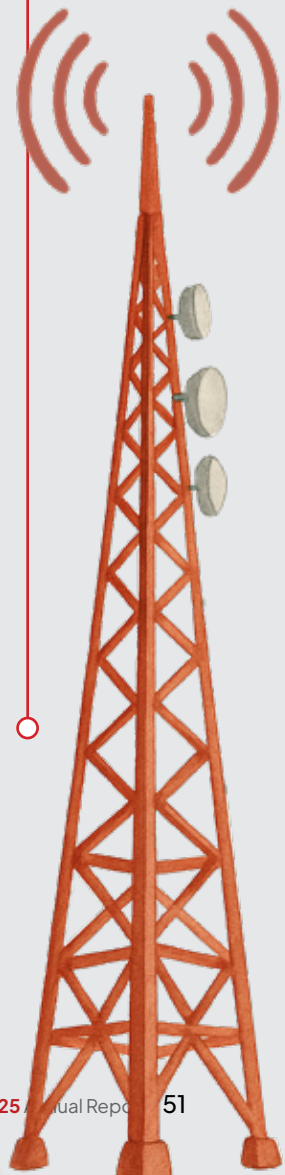
2010

Menandatangani MLA dengan PT Axis Telekom Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL), PT First Media Tbk, dan PT Hutchison 3 Indonesia (d/h PT Hutchison CP Telecommunications).

Signed MLA(s) with PT Axis Telekom Indonesia, PT XL Axiata Tbk (XL), PT First Media Tbk, and PT Hutchison 3 Indonesia (previously known as PT Hutchison CP Telecommunications).

2011

- Melakukan Penawaran Umum Perdana sejumlah 100 juta saham baru dengan harga Rp3.400 per saham. Jumlah keseluruhan perolehan dana (sebelum dikurangi harga emisi) berjumlah Rp340 miliar.
- Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia pada Oktober 2011.
- Mengakuisisi 100% penyertaan saham dalam PT Sarana Inti Persada, sebuah perusahaan penyedia menara independen di Bandung.
- Conducted an Initial Public Offering of 100 million new shares at Rp3,400 per share with total proceeds (prior to deduction on the price of issuance) of Rp340 billion.
- Listed its stocks on Indonesia Stock Exchange in October 2011.
- Acquired 100% ownership of PT Sarana Inti Persada, an independent tower provider company in Bandung.



Jejak Langkah
Milestones

2012

- Berekspansi dalam bisnis jaringan kabel serat optik dan microcell pole (Outdoor DAS).
- Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas I sejumlah 135 juta saham baru seharga Rp4.800 per saham dengan 59,4 juta waran yang melekat pada saham baru tersebut. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi harga emisi) dari penerbitan saham baru dan konversi waran adalah sebesar Rp933 miliar.
- Mengakuisisi 521 menara telekomunikasi dari PT Hutchison 3 Indonesia dan dari perusahaan penyedia menara independen.
- Expanded its business to optic fiber networks and microcell pole (Outdoor DAS).
- Conducted a Limited Public Offering I of 135 million new shares at Rp4,800 per share with 59.4 million warrants attachment. Total proceeds (prior to deduction on the price of issuance) of the new shares and conversion of warrants were Rp933 billion.
- Acquired 521 telecommunications towers from PT Hutchison 3 Indonesia and other independent tower providers.

2013

Berekspansi dalam bisnis Indoor Distributed Antenna System (Indoor DAS).

Expanded its business to Indoor Distributed Antenna System (Indoor DAS).

2014

- Perseroan mengakuisisi 3.500 menara telekomunikasi dari PT XL Axiata dan 142 menara telekomunikasi dari perusahaan menara independen.
- Perseroan mendapat Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 19 Desember 2014 untuk Penawaran Umum Terbatas II (PUT II) Perseroan.
- The Company acquired 3,500 telecommunications towers from PT XL Axiata and 142 telecommunications towers from independent tower companies.
- The Company received an Effective Statement from the Financial Service Authority on December 19, 2014, to conduct the Limited Public Offering II.

2015

- Melaksanakan Penawaran Umum Saham Terbatas II sejumlah 343.165.024 saham baru dengan harga Rp7.000 per saham. Jumlah perolehan keseluruhan dana (sebelum dikurangi biaya emisi) sebesar Rp2.402.155.168.000.
- Menerbitkan obligasi AS$300 juta 6,25% Senior Notes Due 2020 sebesar AS$300 juta yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).
- Conducted Limited Public Offering II of 343,165,024 new shares at Rp7,000 per share. Total proceeds (prior to deduction of emission charge) amounted to Rp2,402,155,168,000.
- Issued US$300,000,000 bonds of 6.25% Senior Notes Due 2020 amounted US$300 million, which listed on Singapore Stock Exchange (SGX).

2016

Sebagai bagian dari program transformasi Perseroan melalui pendekatan pembenahan menyeluruh, Perseroan melakukan penajaman Nilai Inti Perseroan dengan menambah 1 (satu) Nilai Inti menjadi: *Trustworthy*, *Dynamic*, *Fun*, *Innovative*, *Teamwork*.

As part of the Company's transformation program, through a total improvement approach, STP redesigned the Company's Core Values by adding 1 (one) new core value and now becomes: Trustworthy, Dynamic, Fun, Innovative, Teamwork.

2024

- Pada tanggal 25 November 2024, Perseroan menerima penghargaan TOP 50 Big Capitalization Public Listed Company dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) di ajang The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award. Penghargaan Ini merupakan salah satu pengakuan eksternal terhadap penerapan governansi korporat di Perseroan dan mendorong seluruh insan Perseroan untuk lebih meningkatkan kualitas governansi di Perseroan menjadi lebih baik lagi.
- Dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset secara strategis dan efisien, pada tahun 2024 Perseroan telah berhasil memperoleh sertifikasi ISO 55001: 2014 Asset Management System.

- On November 25, 2024, the Company received the TOP 50 Big Capitalization Public Listed Company award from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at The 15th IICD Corporate Governance Conference and Award. This recognition serves as an external acknowledgment of the Company's corporate governance practices and encourages all employees to further enhance governance quality within the Company.
- As part of its efforts to enhance strategic and efficient asset management, the Company successfully obtained ISO 55001:2014 Asset Management System certification in 2024.

2022

Pada tanggal 11 Februari 2022, Perseroan telah melakukan pengambilalihan 100% saham atau sejumlah 10.000 saham dari modal disetor PT Global Indonesia Komunikatama.

On February 11, 2022, the Company acquired PT Global Indonesia Komunikatama for a total of 10,000 shares, representing 100% of its paid-in capital.

2021

Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") telah melakukan pengambilalihan Perseroan dengan jumlah saham yang dibeli Protelindo adalah sejumlah 1.069.614.676 saham atau sebesar 94,03% dari modal disetor Perseroan.

On October 1, 2021, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") acquired the Company for a total of 1,069,614,676 shares, representing 94.03% of the Company's paid-in capital.

2025

- Pada tanggal 15 September 2025, Perseroan kembali meraih penghargaan tata kelola perusahaan, yaitu untuk kategori TOP 50 *Big Capitalization Public Listed Company dari The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* dalam ajang *The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award*.
- Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan melalui skema *group certification* bersama dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Sertifikasi ini memastikan penerapan sistem manajemen anti penyuapan yang konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan di seluruh entitas serta unit operasional dalam Grup.

- On September 15, 2025, the Company once again received a corporate governance award, namely in the TOP 50 Big Capitalization Public Listed Company category from The Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) at The 16th IICD Corporate Governance Conference and Award.
- The Company has obtained ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System certification through a group certification scheme together with PT Profesional Telekomunikasi Indonesia and PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. This certification confirms the implementation of a consistent, integrated, and sustainable anti-bribery management system across all entities and operational units within the Group.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Company in Brief

STP mengoperasikan jaringan menara telekomunikasi yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan padat penduduk wilayah Indonesia.

STP operates a broad telecommunications tower network spread across various strategic and densely populated locations throughout Indonesia.



PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP" atau "Perseroan") didirikan pada tahun 2006. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Juli 2006, dibuat dihadapan Ridjqi Nurdiani, S.H., Notaris di Bekasi dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W8-00259 HT.01.01- TH.2006 tanggal 27 September 2006 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090515156159 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kota Jakarta Pusat di bawah No.1187/BH.09.05/v/2007 tanggal 16 Mei 2007 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) No. 73 tanggal 11 September 2007, Tambahan No. 9241/2007.

Perseroan berfokus pada penyewaan menara telekomunikasi untuk penempatan antena dan perangkat pendukung lain kepada operator telekomunikasi, yang dikenal dengan base transceiver station (BTS), dengan skema perjanjian kontrak sewa jangka panjang yang rata-rata berjangka waktu sekitar 10 tahun.

Saat ini Perseroan dikenal sebagai penyedia menara telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dari segi jumlah menara telekomunikasi. Aset menara telekomunikasi milik Perseroan tersebar di berbagai lokasi strategis dan padat penduduk wilayah Indonesia dengan mayoritas 80% terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera.

Hingga 31 Desember 2025, Perseroan mencatat kepemilikan sebanyak 7.809 menara dengan total 13.636 penyewaan, menghasilkan rasio penyewaan menara sebesar 1,75. Selain itu, Perseroan juga mengelola dan mengoperasikan 12 jaringan Indoor DAS.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("STP" or "the Company") was established in 2006. The Company was founded based on Deed of Establishment No. 5 dated July 25, 2006, executed before Ridjqi Nurdiani, S.H., a Notary in Bekasi, and has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. W8-00259 HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 with Company Registration No. 090515156159 at the Central Jakarta Company Registration Office under No. 1187/BH.09.05/V/2007 dated May 16, 2007, and was announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia (BNRI) No. 73 dated September 11, 2007, Supplement No. 9241/2007.

The Company is primarily focused on leasing out spaces for antennas and supporting equipment for mobile telecommunications operators, also known as base transceiver stations (BTS), at its multi-tenant tower sites under long-term lease agreements with an average contractual period of ten years.

On the number of telecommunication towers, the Company is currently recognised as one of the leading independent tower companies in Indonesia. The Company's tower assets are strategically located across densely populated areas throughout Indonesia, with approximately 80% situated on the islands of Java and Sumatra.

As of December 31, 2025, the Company recorded ownership of 7,809 towers with a total of 13,636 leases, resulting in a tower tenancy ratio of 1.75. The Company also operates and manages 12 Indoor DAS networks.



PERUBAHAN NAMA
Change of the Company Name

STP belum pernah melakukan perubahan nama sejak pertama kali berdiri pada 27 September 2006 hingga saat ini. Perseroan berubah menjadi perusahaan publik sejak IPO pada 29 September 2011. Sejak itu, nama Perseroan menjadi PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

STP has never changed its name since it was first established on September 27, 2006 until the present. The Company became a public company following its IPO in September 29, 2011. Since then, the Company's name has been PT Solusi Tunas Pratama Tbk.

KEGIATAN USAHA
Line of Business

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, real estate yang dimiliki sendiri atau disewa dan aktivitas perusahaan holding. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

Kegiatan usaha utama Perseroan yaitu pengelolaan dan penyewaan bangunan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, Perseroan melaksanakan pengelolaan dan penyewaan menara dan sarana penunjang atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya secara langsung maupun melalui entitas anak.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its business activities involves in central telecommunication construction, self-owned or leased real estate and holding company activities. The Company started its commercial operations in March 2008.

The principal business activities of the Company, are the management and leasing of Base Transceiver Station (BTS) towers or telecommunications towers and other telecommunications facilities. As such, the Company carries out the management and leasing of towers and supporting infrastructure, as well as telecommunications towers and other telecommunications facilities, either directly or through subsidiaries.

LAYANAN KAMI

Our Service

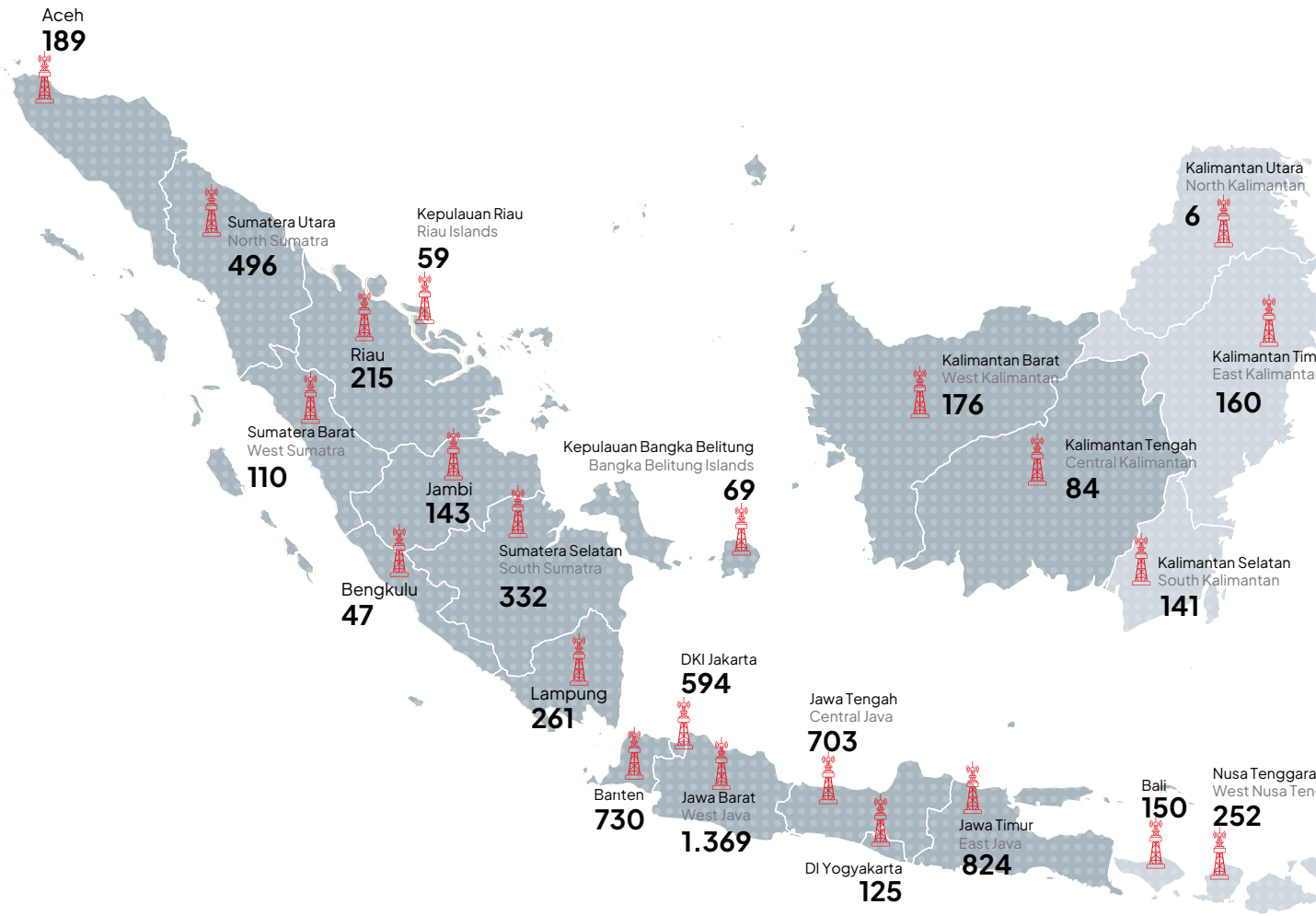
Pengelolaan, dan Penyewaan bangunan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) atau menara telekomunikasi serta sarana telekomunikasi lainnya.

Management, and Leasing of Base Transceiver Station (BTS) towers or telecommunications towers and other telecommunications facilities.

WILAYAH OPERASIONAL
Operational Areas

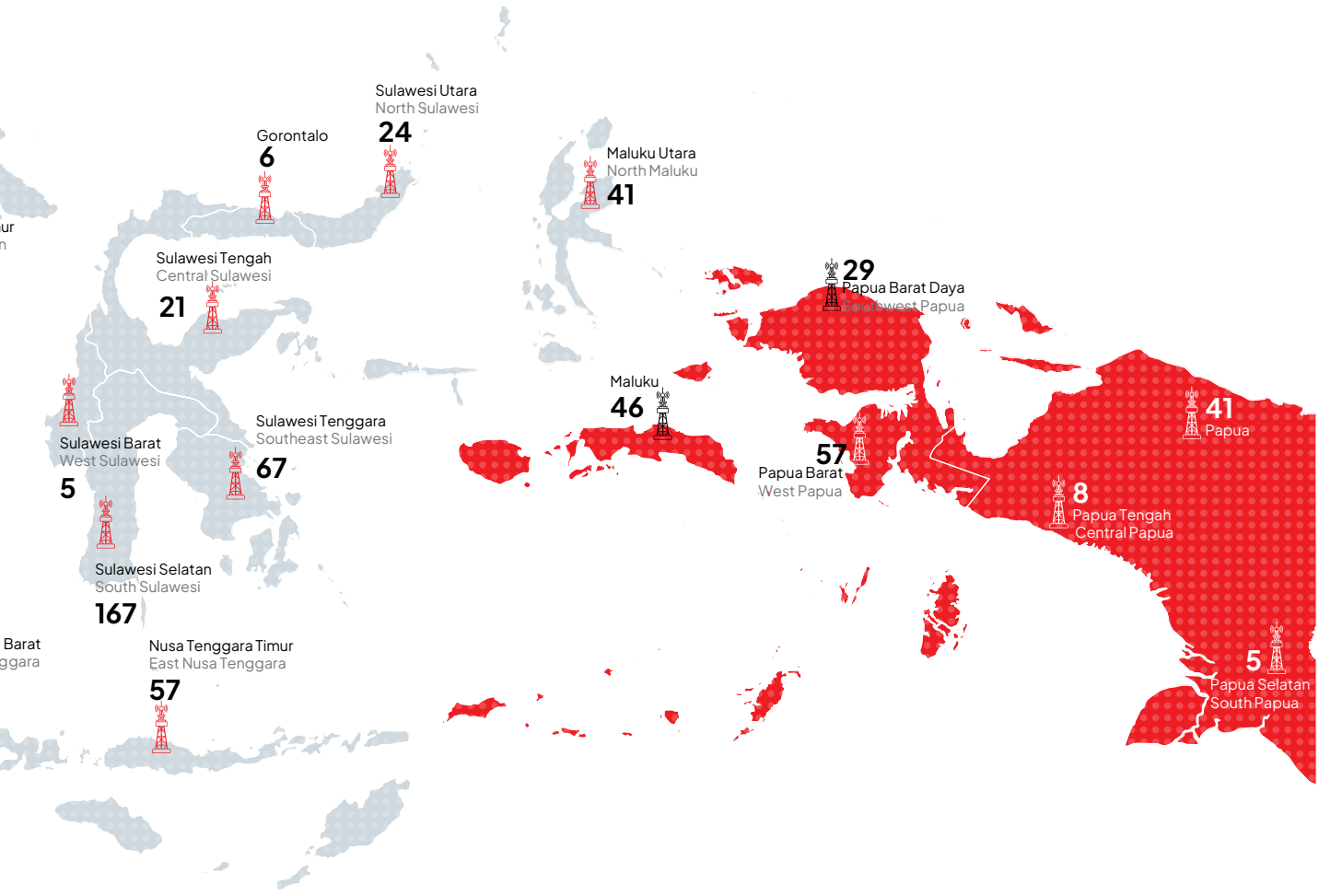
Secara geografis, area operasional Perseroan tercermin melalui portofolio menara yang dimiliki oleh STP Grup. Hingga akhir tahun 2025, STP mengelola sebanyak 7.809 menara yang tersebar di berbagai lokasi strategis dan berpenduduk padat di seluruh Indonesia.

Geographically, the Company's operational coverage is reflected in the tower portfolio owned by STP Group. By the end of 2025, STP managed a total of 7,809 towers located across various strategic and densely populated areas throughout Indonesia.



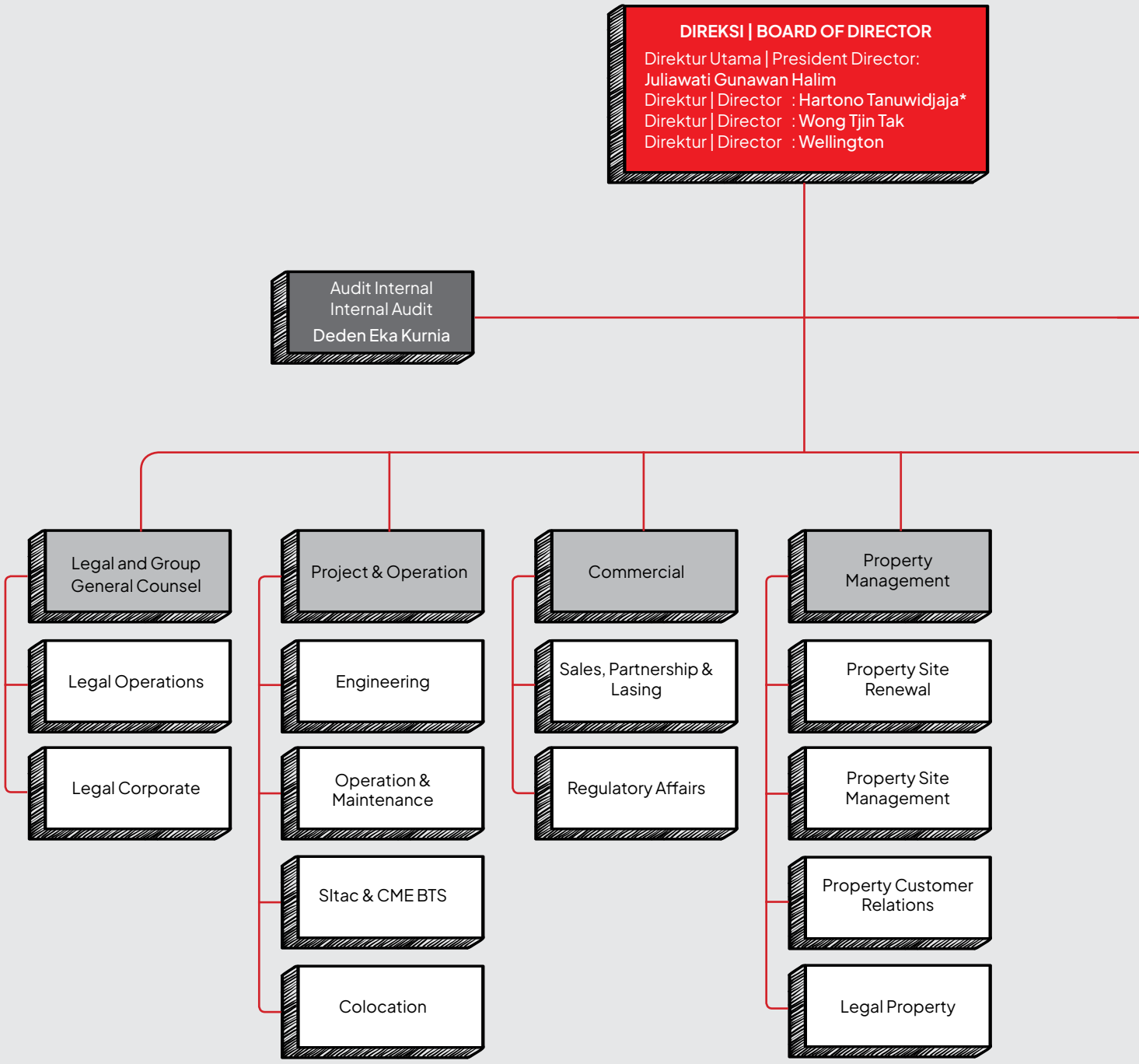
Grand Total

7.809 Menara
Tower

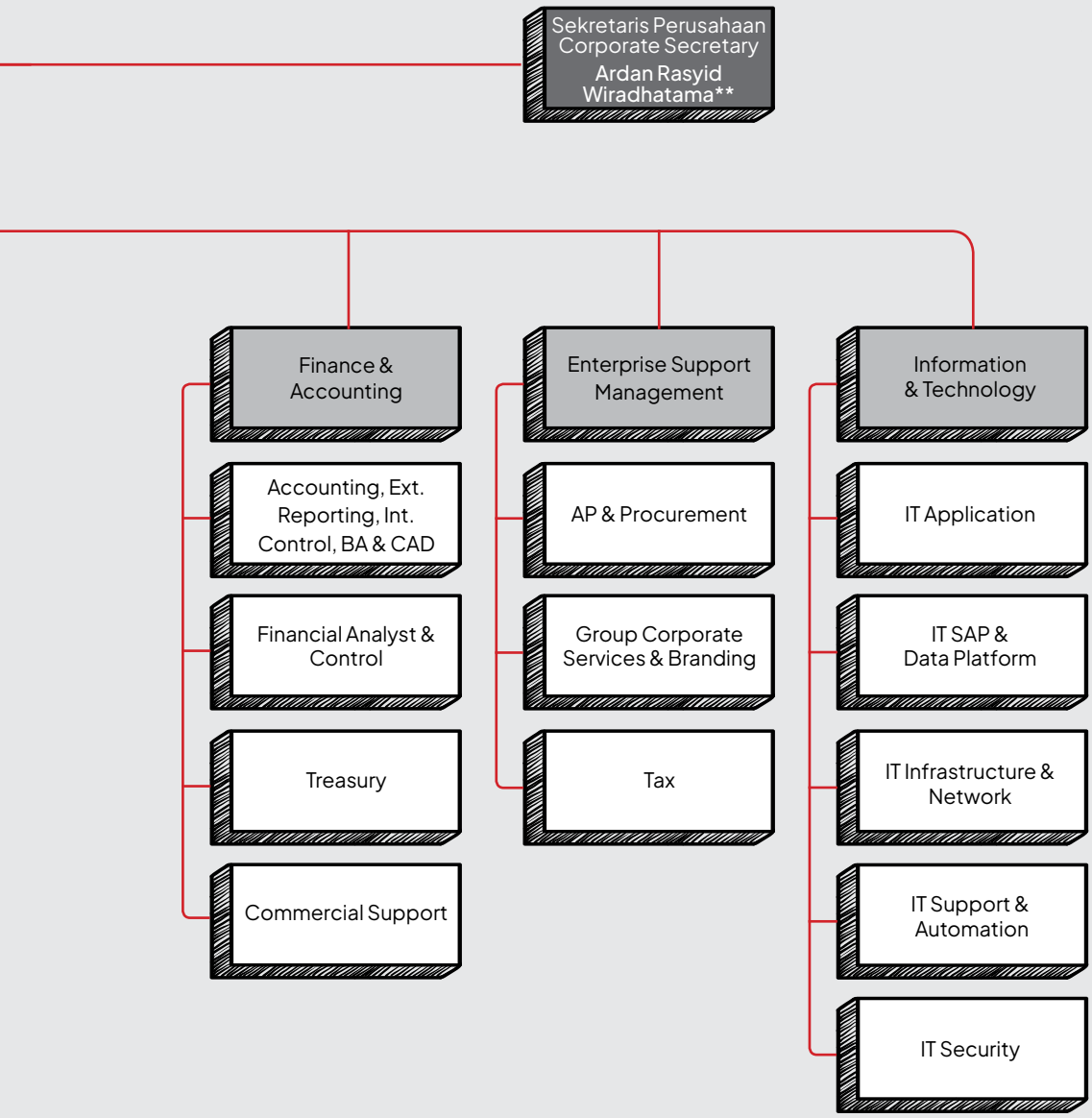


STRUKTUR ORGANISASI
Organizational Structure

Per 31 Desember 2025
as of December 31, 2025



Catatan | Note:
*menjabat juga sebagai Sekretaris Perusahaan sampai dengan 8 Januari 2026 | *also served as Corporate Secretary until January 8, 2026
**menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan sejak 8 Januari 2026 | **has served as Corporate Secretary since January 8, 2026


Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
Ardan Rasyid Wiradhatama**
Finance & Accounting
Accounting, Ext. Reporting, Int. Control, BA & CAD
Financial Analyst & Control
Treasury
Commercial Support
Enterprise Support Management
AP & Procurement
Group Corporate Services & Branding
Tax
Information & Technology
IT Application
IT SAP & Data Platform
IT Infrastructure & Network
IT Support & Automation
IT Security

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Association Membership

Asosiasi Association
Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menara Telekomunikasi Telecommunication Tower Infrastructure Developers Association
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)
Masyarakat Telematika Indonesia Indonesian Telematics Society



KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Composition

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Dengan demikian, komposisi Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah tetap sama sebagai berikut:

In 2025, no changes occurred to the composition of the Company's Board of Commissioners. As such, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, remains unchanged as follows:

Kusmayanto Kadiman
Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)

Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris
Commissioner

Harry Mozarta Zen
Komisaris Independen
Independent Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners Profile



KUSMAYANTO KADIMAN

Komisaris Utama (Komisaris Independen)
President Commissioner (Independent Commissioner)

Umur | Age : 71 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
» Meraih gelar Sarjana Teknik Fisika dari Institut Teknologi Bandung (1977)
» Meraih gelar Doktor Filsafat (PhD) dari Australian National University (1998)

Educational Background
» Earned a Physics Engineering Degree from Bandung Institute of Technology (1977)
» Doctor of Philosophy (PhD) from Australian National University (1988)

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali menjadi Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2021 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026.

Basis of Appointment
First appointed as President Commissioner (Independent Commissioner) based on Resolution of Extraordinary GMS dated 16 November 2021 and last reappointed based on the Resolution of the Annual GMS of the Company on May 5, 2023, for a term of office until the Company's Annual GMS in 2026.

Rangkap Jabatan
» Komisaris PT BFI Finance Tbk (2025–saat ini)
» Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2024–saat ini)
» Komite Remunerasi dan Nominasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2022–saat ini)
» Komisaris Independen PT Global Digital Niaga Tbk (2021–saat ini)
» Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan (2021 – saat ini)
» Komisaris Independen PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–saat ini)
» Komisaris Independen PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–saat ini)
» Komite Remunerasi dan Nominasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–saat ini)

Concurrent Positions
» Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2025–present)
» Audit Committee of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2024–present)
» Remuneration and Nomination Committee of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2022–present)
» Independent Commissioner of PT Global Digital Niaga Tbk (2021–present)
» Remuneration and Nomination Committee of the Company (2021–present)
» Independent Commissioner of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019–present)
» Independent Commissioner of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–present)
» Remuneration and Nomination Committee of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2017–present)

Pengalaman Kerja

» Komisaris Utama PT BFI Finance Tbk (2011–2025)
» International Advisory Board Komatsu Ltd (2019–2023)
» Komisaris PT Iforte Solusi Infotek (2016 – 2017)
» Komisaris Utama PT Setiabudi Investment Management (2016–2024)
» Komisaris PT Tamaris Hydro Lestari (2012 - 2024)
» Komisaris Independen PT Martina Berto Tbk (2012 – 2014)
» Wakil Komisaris Utama PT Adaro Power (2010–saat ini)
» Menteri Negara Riset dan Teknologi Indonesia (2004–2009)
» Sekretaris Rektor di Institut Teknologi Bandung (2001–2004)
» Direktur Pusat Penelitian Teknologi di Institut Teknologi Bandung (1996–1999)
» Direktur PT Alas Buana Raya (1992–1995)
» Dosen Institut Teknologi Bandung (1977–2008)

Work Experience

» President Commissioner of PT BFI Finance Tbk (2011–2025)
» International Advisory Board of Komatsu Ltd (2019–2023)
» Commissioner of PT Iforte Solusi Infotek (2016 – 2017)
» President Commissioner of PT Setiabudi Investment Management (2016–2024)
» Commissioner of PT Tamaris Hydro Lestari (2012 - 2024)
» Independent Commissioner of PT Martina Berto Tbk (2012 – 2014)
» Vice President Commissioner of PT Adaro Power (2010–present)
» The Minister of Research and Technology of the Republic of Indonesia (2004–2009)
» Rector Secretary at Bandung Institute of Technology (2001–2004)
» Director of Technology Research Center at Bandung Institute of Technology (1996–1999)
» Director of PT Alas Buana Raya (1992–1995)
» Lecturer of Institut Teknologi Bandung (1977–2008)

Pernyataan Independensi

Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen Perseroan dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Declaration of Independence

He has not served as the Company's Independent Commissioner for more than 2 (two) periods and has no financial, management, stock ownership, and/or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.

Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship

He has no affiliate realtionship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major and controlling shareholders of the Company, either directly or indirectly to individual owners and does not own any Company's shares.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



HARRY MOZARTA ZEN

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Umur | Age : 56 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
» Meraih gelar Sarjana Teknik Metalurgi dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Jakarta (1993)
» Meraih gelar MBA di Corporate Finance and Financial Institutions & Market dari the State University of New York, Buffalo (1996)

Educational Background
» Earned Bachelor's degree in Metallurgical Engineering from the Faculty of Engineering, University of Indonesia, Jakarta (1993)
» Holds an MBA in Corporate Finance and Financial Institutions & Markets from the State University of New York, Buffalo (1996)

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali menjadi Komisaris Independen Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 22 Juli 2020 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026.

Basis of Appointment
First appointed as Independent Commissioner based on Resolution of Annual GMS dated 22 July 2020 and last reappointed as Independent Commissioner of the Company based on the Resolution of the Annual GMS of the Company on May 5, 2023, for term of office until the Company's Annual GMS in 2026.

Rangkap Jabatan
Komite Audit Perseroan (2020 – saat ini)

Concurrent Positions
Audit Committee of the Company (2020–present)

Pengalaman Kerja
» Komisaris Maurel & Prom (2020 – 2024)
» Direktur Keuangan PT Pertamina Hulu Energi (2020–2024)
» Komisaris Utama PT Graha Sarana Duta (2016–2020)
» Komisaris PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2016–2020)
» Direktur Keuangan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2016–2020)
» Direktur Utama Credit Suisse Securities Indonesia (2008–2015)

Work Experience
» Commissioner Maurel & Prom (2020 – 2024)
» Finance Director of PT Pertamina Hulu Energi (2020–2024)
» President Commissioner of PT Graha Sarana Duta (2016–2020)
» Commissioner of PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) (2016–2020)
» Finance Director of PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (2016–2020)
» President Director of Credit Suisse Securities Indonesia (2008–2015)

» Direktur Barclays Capital (2007–2008)
» Co-Head Investment Banking Bahana Securities (2001–2007)
» Assistant Vice President Citibank - Global Corporate Banking (1996–2001)

» Director of Barclays Capital (2007–2008)
» Co-Head Investment Banking of Bahana Securities (2001–2007)
» Assistant Vice President of Citibank - Global Corporate Banking (1996–2001)

Pernyataan Independensi
Beliau belum menjabat lebih dari 2 (dua) periode sebagai Komisaris Independen Perseroan dan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Declaration of Independence
He has not served as the Company's Independent Commissioner for more than 2 (two) periods and has no financial, management, stock ownership, and/or second-degree family relationships with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Controlling Shareholders, or a relationship with the Company that could impair their ability to act independently.

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, pemegang saham utama dan pengendali Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship
He has no affiliate realtionship with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, major and controlling shareholders of the Company, either directly or indirectly to individual owners and does not own any Company's shares.

Profil Dewan Komisaris
Board of Commissioners Profile



EKO SANTOSO HADIPRODJO

Komisaris
Commissioner

Umur | Age : 54 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
» Meraih gelar *Bachelor of Arts*, Jurusan Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) YKPN, Yogyakarta. (1989–1994)
» Meraih *Magister Management*, Jurusan Keuangan, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1995–1996)

Educational Background
» Obtained a Bachelor of Arts degree, majoring in Accounting, YKPN College of Economics (STIE), Yogyakarta (1989–1994)
» Earned Master of Management, Department of Finance, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Jakarta (1995–1996)

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali menjadi Komisaris Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Maret 2022 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023, untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2026.

Basis of Appointment
Appointed as Commissioner of the Company based on Resolution of the Extraordinary GMS dated March 1, 2022 and last reappointed based on the Resolution of the Annual GMS of the Company on May 5, 2023, for term of office until the Company's Annual GMS in 2026.

Rangkap Jabatan
Direktur and *Chief of Enterprise Support Management* di PT Sarana Menara Nusantara Tbk dan Protelindo (2015 – saat ini)

Concurrent Positions
Director and Chief of Enterprise Support Management of PT Sarana Menara Nusantara Tbk and Protelindo (2015 – present)

Pengalaman Kerja
» *Head of Tax* di PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015)
» *Finance and Accounting General Manager* PT Grand Indonesia (Developer of Grand Indonesia Complex / ex Hotel Indonesia) (2002–2014)
» *Senior Associate* Pricewaterhouse Coopers, Jakarta (1996–2002)

Work Experience
» Head of Tax at PT Lippo Karawaci Tbk (2014–2015)
» Finance and Accounting General Manager of PT Grand Indonesia (Developer of Grand Indonesia Complex / ex Hotel Indonesia) (2002–2014)
» Senior Associate of Pricewaterhouse Coopers, Jakarta (1996–2002)

Hubungan Afiliasi
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship
He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company.

He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.

KOMPOSISI DIREKSI

Board of Directors Composition

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan anggota Direksi Perseroan. Dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan per 31 Desember 2025 adalah tetap sama sebagai berikut:

In 2025, no changes occurred in the composition of the Company's Board of Directors. As such, the structure of the Board of Directors as of December 31, 2025, remains unchanged as follows:

Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama | President Director

Hartono Tanuwidjaja
Direktur | Director

Wong Tjin Tak
Direktur | Director

Wellington
Direktur | Director

PROFIL DIREKSI
Board of Directors Profile



JULIAWATI GUNAWAN HALIM

Direktur Utama
President Director

Umur | Age : 55 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara (1993).

Educational Background
Obtained a Bachelor of Economics majoring in Accounting from Tarumanagara University (1993).

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Utama Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2021 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2026.

Basis of Appointment
First appointed as President Director of the Company based on Resolution of the Extraordinary GMS dated November 16, 2021 and last reappointed based on Resolution of the Annual GMS dated May 5, 2023 for term of office until the Annual GMS in 2026.

Rangkap Jabatan
» Wakil Direktur Utama PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (20 Januari 2026 – saat ini)
» Direktur PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2024 – 20 Januari 2026)

Concurrent Positions
» Vice President Director PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (20 January 2026 – present)
» Director PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2024 – 20 January 2026)

Pengalaman Kerja
» *Chief Financial Officer* PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023 – saat ini)
» Direktur PT Solusi Tunas Pratama Tbk (Juni 2011–2021)
» *Financial Controller* di PT Solusi Tunas Pratama (2009–Juni 2011)

Work Experience
» Chief Financial Officer PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2023 – present)
» Director of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (June 2011–2021)
» Financial Controller at PT Solusi Tunas Pratama (2009–June 2011)

Hubungan Afiliasi
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship
She has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company.

She has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.



HARTONO TANUWIDJAJA

Direktur
Director

Umur | Age : 57 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dari Universitas Tarumanagara.

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2021 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2026.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain.

Pengalaman Kerja
» Sekretaris Perusahaan PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2024–Januari 2026)
» Direktur PT Iforte Solusi Infotek (2019–saat ini)
» Chief of Finance PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–2023)
» Finance Manager Terex Indonesia (2000–2010)
» Finance Director Mantari Life Insurance (1995– 2000)
» VP Finance Ponderosa Group (1996–2000)
» Finance Manager Pizza Hut Indonesia (1993–1996)
» Budget Analyst Great River Industries (1992–1993)
» Chief Accountant Rodamas Timber Kalimantan (1990–1992)

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (pemegang saham utama dan Pengendali Perseroan), anggota Direksi Perseroan lainnya dan anggota Dewan Komisaris serta tidak memiliki saham Perseroan.

Educational Background
Earned a Bachelor degree in Faculty of Economic from University of Tarumanagara.

Basis of Appointment
First appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Extraordinary GMS dated November 16, 2021 and last reappointed based on the Resolution of the Annual GMS dated May 5, 2023 for term of office until the Annual GMS in 2026.

Concurrent Positions
Does not hold any concurrent position either as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or committee member in other issuer or public company.

Work Experience
» Corporate Secretary PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2024–January 2026)
» Director PT Iforte Solusi Infotek (2019–present)
» Chief of Finance PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021–2023)
» Finance Manager Terex Indonesia (2000–2010)
» Finance Director of Mantari Life Insurance (1995–2000)
» VP Finance of Ponderosa Group (1996–2000)
» Finance Manager of Pizza Hut Indonesia(1993–1996)
» Budget Analyst of Great River Industries (1992–1993)
» Chief Accountant of Rodamas Timber Kalimantan (1990–1992)

Affiliated Relationship
He has no affiliate relationship with PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (the Company's major and controlling shareholder), other members of the Company's Board of Directors and members of the Board of Commissioners and does not own any Company's shares.

Profil Direksi
Board of Directors Profile



WONG TJIN TAK
Direktur
Director

Umur | Age : 55 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana jurusan Teknik Kimia dari Universitas Indonesia (1995).

Educational Background
Obtained a Bachelor Degree in Chemical Engineering, University of Indonesia (1995).

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 16 November 2021 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan Perseroan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2026.

Basis of Appointment
First appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Extraordinary GMS dated November 16, 2021 and last reappointed based on Resolution of the Annual GMS dated May 5, 2023 for term of office until the Annual GMS In 2026.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain.

Concurrent Positions
Does not hold any concurrent position either as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or committee member in other issuer or public company.

Pengalaman Kerja
» *Chief of IT* di PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018–saat ini)
» *Co-owner* and Direktur di Kineto Strategic Visual Communication (2016–2018)
» *Managing Director* di Accenture (2009–2016)
» *Consultant* di Accenture (1995–2009)

Work Experience
» Chief of IT at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2018–present)
» Co-owner and Director at Kineto Strategic Visual Communication (2016–2018)
» Managing Director at Accenture (2009–2016)
» Consultant at Accenture (1995–2009)

Hubungan Afiliasi
Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama dan pengendali Perseroan.

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship
He has an affiliate relationship with the major and controlling shareholder of the Company.

He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.



WELLINGTON

Direktur
Director

Umur | Age : 47 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Riwayat Pendidikan
Meraih gelar Sarjana Teknik, Jurusan Teknik Sipil – Institut Sains dan Teknologi Nasional (2004).

Educational Background
Obtained a Bachelor of Engineering, Majoring in Civil Engineering – National Science and Technology Institute (2004).

Dasar Hukum Penunjukkan
Diangkat pertama kali sebagai Direktur Perseroan berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 1 Maret 2022 dan terakhir diangkat kembali berdasarkan Keputusan RUPS Tahunan tanggal 5 Mei 2023 untuk masa jabatan sampai dengan RUPS Tahunan tahun 2026.

Basis of Appointment
First appointed as Director of the Company based on the Resolution of the Extraordinary GMS dated March 1, 2022 and last reappointed based on the Resolution of the Annual GMS dated May 5, 2023 for term of office until the Annual GMS in 2026.

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite di emiten atau perusahaan publik lain.

Concurrent Positions
Does not hold any concurrent position either as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners and/or committee member in other issuer or public company.

Pengalaman Kerja
» *Chief Commercial* Perseroan (2013– 2022)
» *Manager Sales Enterprise, Presales* dan *Bisnis Development* di PT Moratelindo (2010–2012)
» *Professional Services Assistant Manager* PT Indosat Mega Media (2004–2010)
» *Customer Care Supervisor* PT Pasifik Satelit Nusantara (2002–2004)
» *Engineer* di PT Total Bangun Persada Jakarta Projek Pembangunan Gedung Fedex Lebak Bulus Jakarta (2000–2001)

Work Experience
» Chief Commercial of the Company (2013–2022)
» Manager Sales Enterprise, Presales dan Bisnis Development at PT Moratelindo (2010–2012)
» Professional Services Assistant Manager of PT Indosat Mega Media (2004–2010)
» Customer Care Supervisor of PT Pasifik Satelit Nusantara (2002–2004)
» Engineer at PT Total Bangun Persada Jakarta Projek Pembangunan Gedung Fedex Lebak Bulus Jakarta (2000–2001)

Hubungan Afiliasi
Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan sesama anggota Dewan Komisaris Perseroan lainnya dan seluruh anggota Direksi Perseroan serta tidak memiliki saham Perseroan.

Affiliated Relationship
He has no affiliate relationship with other members of the Board of Commissioners of the Company and all members of the Board of Directors of the Company and does not own any Company's shares.

DEMOGRAFI KARYAWAN
Employees Demography

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan beserta entitas anak memiliki sebanyak 138 karyawan tetap dan 9 karyawan kontrak. Adapun rincian demografi karyawan disajikan sebagai berikut:

As of December 31, 2025, the Company and its subsidiaries employed 138 permanent employees and 9 contract employees. The demographic breakdown of employees is presented as follows:

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Operational Area and Gender

Wilayah Operasional Operational Area	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Kantor Pusat – Kudus Head Office – Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Offices	126	64	190	112	60	172	90	57	147
Jumlah | Total	**126**	**64**	**190**	**112**	**60**	**172**	**90**	**57**	**147**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Employment Status and Gender

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
Permanen Permanent	111	57	168	100	57	157	84	54	138
Kontrak Contract	15	7	22	12	3	15	6	3	9
Jumlah | Total	**126**	**64**	**190**	**112**	**60**	**172**	**90**	**57**	**147**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Position and Gender

Level Jabatan Position Level	2023					2024					2025				
	L/M	%	P/F	%	Jumlah Total	L/M	%	P/F	%	Jumlah Total	L/M	%	P/F	%	Jumlah Total
Chief & VP (Executive Level)	3	1,58%	0	0,00%	3	2	1,16%	0	0,00%	2	2	1,36%	0	0,00%	2
General Manager (Senior Level)	3	1,58%	0	0,00%	3	3	1,74%	3	1,74%	3	3	2,04%	3	2,04%	3
Senior Manager & Manager (Middle Level)	18	9,47%	11	5,79%	18	17	9,88%	8	4,65%	17	16	10,88%	7	4,76%	16
Non-Manager (Entry Level)	102	53,68%	53	27,89%	102	90	52,33%	49	28,49%	90	69	46,94%	47	31,97%	69
Jumlah | Total	**126**	**66,32%**	**64**	**33,68%**	**126**	**112**	**65,12%**	**60**	**34,88%**	**112**	**90**	**61,22%**	**57**	**38,78%**	**90**

Catatan | Notes : L/M (Laki-laki/Male), P/F (Perempuan/Female)

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Age and Gender

Usia Age	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
18–25 tahun| years old	2	1	3	0	1	1	0	0	0
26–35 tahun| years old	22	28	50	18	21	39	13	18	31
36–45 tahun| years old	62	28	90	52	31	83	42	31	73
46–55 tahun| years old	36	7	43	38	6	44	33	8	41
>55 tahun| years old	4	0	4	4	1	5	2	0	2
Jumlah | Total	**126**	**64**	**190**	**112**	**60**	**172**	**90**	**57**	**147**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Employee Composition Based on Education and Gender

Pendidikan Education	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
S2 / Master	4	6	10	4	6	10	3	4	7
Perguruan Tinggi/Universitas College/University	95	57	152	86	53	139	83	53	136
SLTA Sederajat High School Equivalent	22	1	23	17	1	18	4	0	4
SMP Sederajat Junior High School Equivalent	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Jumlah | Total	**126**	**64**	**190**	**112**	**60**	**172**	**90**	**57**	**147**

Komposisi Karyawan Berdasarkan Wilayah dan Status Kepegawaian
Employee Composition by Region and Employment Status

Wilayah Operasional Operational Area	2023			2024			2025		
	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Jumlah Total	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Jumlah Total	Permanen Permanent	Kontrak Contract	Jumlah Total
Kantor Pusat – Kudus Head Office – Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Offices	168	22	190	160	12	172	138	9	147
Jumlah | Total	**168**	**22**	**190**	**160**	**12**	**172**	**138**	**9**	**147**

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
Shareholders Composition

Pemegang Saham yang Memiliki 5% atau Lebih Saham per 1 Januari* dan 31 Desember 2025
Shareholder Holding 5% or More of the Outstanding Shares as of January 1* and December 31, 2025

Pemegang Saham Shareholders	1 Januari 2025* | January 1, 2025*		31 Desember 2025 | December 31, 2025	
	Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.137.099.654	99,96%	1.107.187.889	97,33%
PT Iforte Solusi Infotek	-	-	29.411.765	2,58%
Masyarakat (<5%) Public (<5%)	480.044	0,04%	980.044	0,09%
Jumlah | Total	**1.137.579.698**	**100,00%**	**1.137.579.698**	**100,00%**

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024. | Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan per 1 Januari* dan 31 Desember 2025

Di luar informasi yang tercantum pada tabel berikut, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak memiliki kepemilikan saham tidak langsung di Perseroan.

Shares Ownership of the Board of Commissioners and Board of Directors as of January 1* and December 31, 2025

Apart from the information presented in the table below, all members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors hold no indirect ownership of the Company's shares.

Nama Name	Jabatan Position	1 Januari 2025* January 1, 2025*		31 Desember 2025 December 31, 2025	
		Jumlah Saham Total Shares	(%)	Jumlah Saham Total Shares	(%)
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	0	0%	0	0%
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	0	0%	0	0%
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	0	0%	0	0%
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	0	0%	0	0%
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	0	0%	0	0%
Wong Tjin Tak	Direktur Director	0	0%	0	0%
Wellington	Direktur Director	0	0%	0	0%

*Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024. | Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

Transaksi Jual Beli Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan per 1 Januari dan 31 Desember 2025

Sepanjang tahun 2025, tidak ada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi Perseroan yang melakukan transaksi jual atau beli saham Perseroan.

Shares Trading Transaction of the Board of Commissioners and Board of Directors as of January 1 and December 31, 2025

During 2025, none of the members of the Company's Board of Commissioners or Board of Directors engaged in any share trading transactions of the Company.

Jumlah Pemegang Saham Masyarakat dengan Kepemilikan <5% per 1 January* dan 31 Desember 2025
Shareholders Composition from the Public with Ownership <5% as of January 1* and December 31, 2025

Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Per 1 January 2025* | As of January 1, 2025*			
PEMODAL DOMESTIK | DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.021	0,025%	621
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	79	0,000%	2
PEMODAL ASING | FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	189.800	0.017%	2
Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025			
PEMODAL DOMESTIK | DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.021	0,025%	623
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	29.411.844	2,585%	3
PEMODAL ASING | FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	689.800	0.061%	3

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024. | Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

Pemegang Saham dan Persentase Kepemilikan Berdasarkan Klasifikasi per 1 Januari* dan 31 Desember 2025
Shareholders and Percentage Ownership Based on Classification as of January 1*, and December 31, 2025

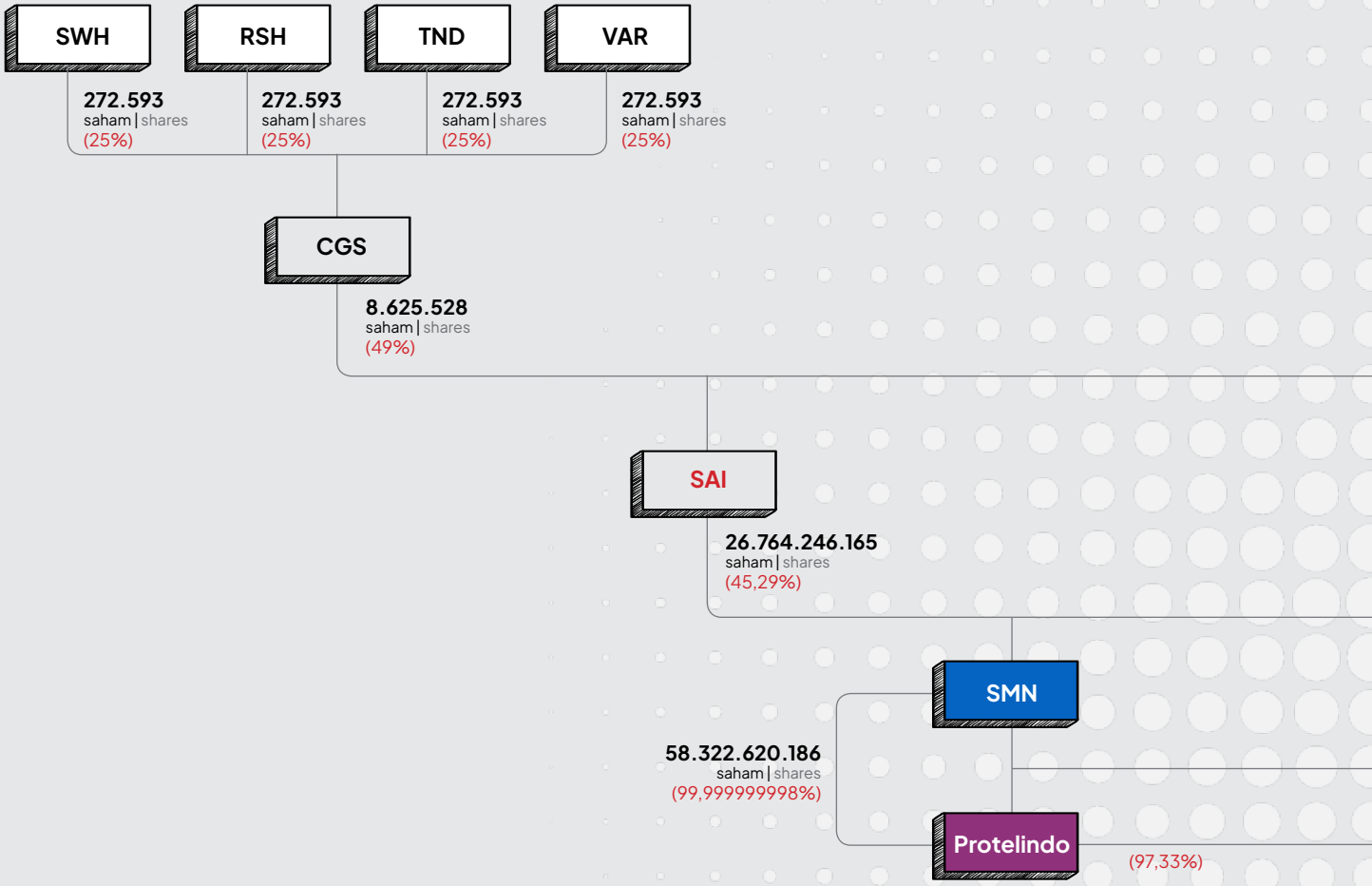
Kelompok Pemegang Saham Groups of Shareholders	Jumlah Saham Total Shares	Persentase Kepemilikan (%) Ownership Percentage (%)	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders
Per 1 January 2025* | As of January 1, 2025*			
PEMODAL DOMESTIK | DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.021	0,025%	621
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	1.137.099.733	99,958%	3
PEMODAL ASING | FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	189.800	0,017%	2
Per 31 Desember 2025 | As of December 31, 2025			
PEMODAL DOMESTIK | DOMESTIC SHAREHOLDERS			
Perorangan Domestik Domestic Retail	290.021	0,025%	623
Badan Usaha Domestik Domestic Institutions	1.136.599.733	99,914%	5
PEMODAL ASING | FOREIGN SHAREHOLDERS			
Perorangan Asing Foreign Retail	144	0,000%	2
Badan Usaha Asing Foreign Institutions	689,800	0.061%	3

* Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per 31 Desember 2024. | Based on the Company's Shareholders Register as of December 31, 2024.

STRUKTUR PEMEGANG SAHAM

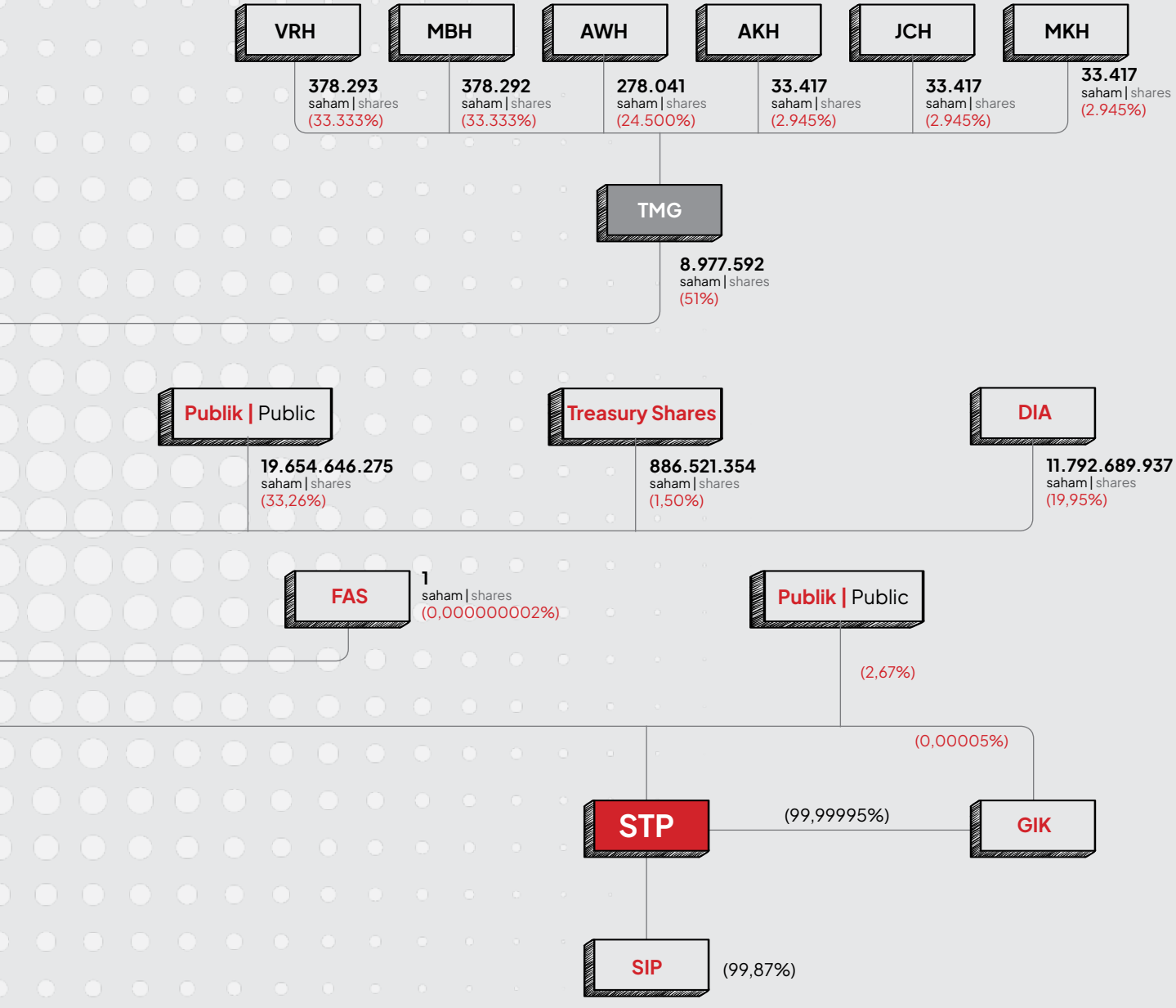
Shareholders Structure

per 31 Desember 2025 | as of December 31, 2025



SINGKATAN | ABBREVIATIONS :

SWH	: Stefanus Wijaya Hartono
RSH	: Roberto Setiabudi Hartono
TND	: Damayanti Hartono
VAR	: Vanessa Ratnasari Hartono
VRH	: Victor Rahmat Hartono
MBH	: Martin Basuki Hartono
AWH	: Armand Wahyudi Hartono
AKH	: Alicia Katrina Hartono
JCH	: Jacqueline Chiara Hartono
MKH	: Marco Krisna Hartono
CGS	: PT Caturguwiratna Sumapala
TMG	: PT Tricipta Mandhala Gumilang
SMN	: PT Sarana Menara Nusantara Tbk.
FAS	: Ferdinandus Aming Santoso
Protelindo	: PT Profesional Telekomunikasi Indonesia
SAI	: PT Sapta Adhikari Investama
SIP	: PT Sarana Inti Persada
GIK	: PT Global Indonesia Komunikatama
STP	: PT Solusi Tunas Pratama Tbk


VRH
MBH
AWH
AKH
JCH
MKH
378.293 saham | shares (33.333%)
378.292 saham | shares (33.333%)
278.041 saham | shares (24.500%)
33.417 saham | shares (2.945%)
33.417 saham | shares (2.945%)
33.417 saham | shares (2.945%)
TMG
8.977.592 saham | shares (51%)
Publik | Public
19.654.646.275 saham | shares (33,26%)
Treasury Shares
886.521.354 saham | shares (1,50%)
DIA
11.792.689.937 saham | shares (19,95%)
FAS
1 saham | shares (0,000000002%)
Publik | Public
(2,67%)
(0,00005%)
STP
(99,99995%)
GIK
SIP
(99,87%)

INFORMASI ENTITAS ANAK
Information on Subsidiaries

PEMILIKAN LANGSUNG | DIRECT OWNERSHIP

PT SARANA INTI PERSADA ("SIP")

Kantor Pusat | Head Office:
Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus,
Jawa Tengah, 59347

Jenis Usaha
» Konstruksi Sentral Telekomunikasi
» Instalasi Telekomunikasi
» Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
» Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang
» Real Estat yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
» Aktivitas Perusahaan Holding
» Aktivitas Telekomunikasi dengan Kabel
» Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Persentase Kepemilikan
PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**STP**") – 99,87%
PT Bit Teknologi Nusantara ("**BIT**") – 0,13%

Status Operasi
Dimulainya kegiatan komersial pada 6 Januari 2005.

Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam jutaan Rupiah) per 31 Desember 2025
122.958

Profil SIP
SIP adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 16 tanggal 12 Oktober 2004 dibuat di hadapan Leontine Anggasurya S.H., Notaris di Bandung. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. C-00383.HT.01.01. TH.2005 tanggal 6 Januari 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 16 September 2005 Tambahan No.9851. Anggaran Dasar SIP sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35, tanggal 25 Maret 2022, dibuat di hadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, mengenai perubahan domisili SIP.

Nature of Business
» Central Telecommunication Construction
» Telecommunication Installation
» Wholesale of Telecommunication Equipment
» Trading of a Great Variety of Goods
» Owned or Rental Real Estate
» Holding Company Activities
» Telecommunication with Cable Activities
» Other Management Consultation Activities

Percentage of Ownership
PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("**STP**") – 99.87%
PT Bit Teknologi Nusantara ("**BIT**") – 0.13%

Operational Status
Start of commercial operations on January 6, 2005.

Total Assets Before Eliminations (in million Rupiah) as of December 31, 2025
122,958

SIP's Profile
SIP is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 16 dated October 12, 2004 drawn up in the presence of Leontine Anggasurya S.H., Notary in Bandung. SIP's Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights through Letter No. C-00383.HT.01.01.TH.2005 dated January 6, 2005 and was published in State Gazette of the Republic of Indonesia No. 74 dated September 16, 2005, Supplement No. 9851. SIP's Articles of Association as contained in the above-mentioned deed of incorporation have been amended several times, the latest amendment of which was stated in the Deed of Statement of Shareholders' Resolution No. 35 dated March 25, 2022, drawn up in the presence

Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No. AHU-0021679. AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Maret 2022.

Pengurus Perusahaan
Komisaris: Juliawati Gunawan Halim
Direktur: Wong Tjin Tak

of Rini Yulianti, SH, Notary in East Jakarta, regarding the change domicile of SIP. This amendment of the Articles of Association was notified to the Minister of Law and Human Rights under Letter of Notification Acknowledgement No. AHU-0021679.AH.01.02. TAHUN 2022 dated March 25, 2022.

Management of the Company
Commissioner: Juliawati Gunawan Halim
Director: Wong Tjin Tak

PT GLOBAL INDONESIA KOMUNIKATAMA ("GIK")

Kantor Pusat | Head Office:
Jl. Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon, Jati, Kudus
Jawa Tengah, 59347

Jenis Usaha
» Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
» Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Persentase Kepemilikan
STP – 99,99%
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia – 0,01%

Status Operasi
Dimulainya kegiatan komersial pada 25 Februari 2010.

Jumlah Aset Sebelum Eliminasi (dalam jutaan Rupiah) per 31 Desember 2025
87.102

Profil GIK
GIK adalah suatu perseroan terbatas didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 39 tanggal 21 Januari 2010 dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 pada tanggal 25 Februari 2010. Anggaran Dasar GIK sebagaimana dimuat dalam akta pendirian tersebut di atas telah mengalami beberapa kali perubahan,

Nature of Business
» Wholesale of Telecommunication Equipment
» Other Management Consultation Activities

Percentage of Ownership
STP – 99.99%
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia – 0.01%

Operational Status
Start of commercial operations on February 25, 2010.

Total Assets Before Eliminations (in million Rupiah) as of December 31, 2025
87,102

GIK's Profile
GIK is a limited liability company established in Indonesia based on Deed of Establishment No. 39 dated Januari 21, 2010 drawn up in the presence of Netty Maria Machdar, S.H., Notary in Jakarta. GIK's Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice through Letter No. AHU-10428.AH.01.01 Tahun 2010 dated February 25, 2010.The Articles of Association of GIK, as contained in the aforementioned deed of establishment, have undergone several changes,

Informasi Entitas Anak
Information on Subsidiaries

terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham No. 02, tanggal 6 Desember 2023, dibuat di hadapan Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor GIK. Perubahan Anggaran Dasar tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Persetujuan No.AHU-0076900.AH.01.02 TAHUN 2023 tanggal 8 Desember 2023.

Pengurus Perusahaan
Komisaris: Popo Jatmiko
Presiden Direktur: Sandra Tantani
Direktur : Monalisa Irvianti Irawan

the last of which was with the Deed of Declaration of Shareholders' Resolution Outside the General Meeting of Shareholders No. 02, dated December 6, 2023, made before Caesaria Dhamayanti, S.H., M.Kn., a notary in Tangerang Regency, concerning the approval of the increase in GIK's authorized capital and issued and paid-up capital. This amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Approval Letter No. AHU-0076900.AH.01.02 YEAR 2023, dated December 8, 2023.

Management of the Company
Commissioner: Popo Jatmiko
President Director: Sandra Tantani
Director: Monalisa Irvianti Irawan

KRONOLOGIS PENCATATAN SAHAM
Stock Listing Chronology

Tanggal Date	Keterangan Description	Jumlah Saham Number of Shares
11 Oktober 2011 October 11, 2011	Penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia Initial public offering and listing of the Company's shares in Indonesia Stock Exchange	600.000.000
28 Agustus 2012 August 28, 2012	Penawaran Umum Terbatas I Limited Public Offering I	135.000.000
6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015 March 6, 2013 until August 28, 2015	Eksekusi Waran Seri I Execution of Series I Warrants	59.414.674
7 Januari 2015 January 7, 2015	Penawaran Umum Terbatas II Limited Public Offering II	343.165.024
Jumlah | Total		**1.137.579.698**

Penawaran Umum Perdana

Pada 29 September 2011, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. S-10636/BL/2011 untuk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana 100.000.000 lembar Saham Biasa kepada masyarakat dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp3.400 per saham. Seluruh saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penggunaan dana Hasil Penawaran Umum Perdana digunakan untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau *site* telekomunikasi dan modal kerja.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada 8 Agustus 2012, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Ketua Bapepam-LK No. S-9825/BL/2012 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 135.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp4.800 per saham dan sebanyak-banyaknya 59.400.000 waran. Harga pelaksanaan waran sebesar Rp4.800 dengan masa berlaku pelaksanaan 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015. Sampai dengan masa pelaksanaan berakhir, Perseroan menerbitkan 59.415.534 waran. Saham-saham dan waran ini tercatat pada BEI. Penggunaan dana hasil penawaran umum di atas untuk akuisisi, pembangunan menara dan/atau *site* telekomunikasi, dan modal kerja.

Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company received an Effective Statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam) No. S-10636/ BL/2011 to conduct Initial Public offering of 100,000,000 shares to the public with par value of Rp100 per shares and offering price of Rp3,400 per share. All the Company's shares are listed in Indonesia Stock Exchange. The proceeds from public offering were used for acquisition, construction of towers and/or telecommunication sites for working capital.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company received an Effective Statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam) No. S-9825/BL/2012 related to Limited Public Offering I for the issuance of Pre-emptive Rights (HMETD) with total 135,000,000 shares and par value of Rp100 per share with offering price of Rp4,800 per shares, and maximum 59,400,000 warrants. The exercise period for this warrant was from March 6, 2013, up to August 28, 2015. Up to the closing period of exercise, the Company issued 59,414,674 warrants. The shares and warrants have been listed in Indonesia Stock Exchange. The proceeds from public offerings were used for acquisition, constructions of tower and/or telecommunications sites and working capital.

Kronologis Pencatatan Saham
Stock Listing Chronology

Penawaran Umum Terbatas II
Pada 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh Surat Pernyataan Efektif dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-550/D.04/2014 sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Saham Terlebih Dahulu (HMETD) dengan jumlah sebanyak 343.165.024 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp7.000 per saham. Seluruh saham dari penawaran umum ini telah tercatat pada Bursa Efek Indonesia, pada bulan Januari 2015. Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas II (setelah perjumpaan antara pinjaman pemegang saham Perseroan kepada PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) dengan kewajiban KIE untuk penyetoran modal) digunakan untuk pembayaran sebagian fasilitas pinjaman dan modal kerja.

Limited Public Offering II
On December 19, 2014, the Company received an Effective Statement from Chief Executive of Capital Market Supervisory of Financial Service Authority No. S-550/D.04/2014 related to Limited Public Offering II to issue the Pre-emptive Rights of 343,165,024 ordinary shares with par value of Rp100 per shares with offering price of Rp7,000 per shares. All shares from the public offering have been listed in Indonesia Stock Exchange in January 2015. The proceeds from public offering (after setting off between the Company's shareholder loan to PT Kharisma Indah Ekaprima (KIE) with KIE's liability to pay the shares subscribed) were used for the payment of a portion of loan facility and for working capital.

INFORMASI PENCATATAN EFEK LAINNYA
Other Stock Listing Information

Pada tahun 2025, STP tidak melakukan pencatatan obligasi, sukuk atau obligasi konversi, maupun pencatatan efek lainnya di bursa efek manapun.

In 2025, STP did not executed any listing for bonds, sukuk or convertion bonds or other stock listing at any other stock exchanges.

AKUNTAN PUBLIK (AP) DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Public Accountant and Public Accountant Firms

Kantor Akuntan Publik of Public Accountant Firm	**Tjahjadi & Tamara**
Nama Akuntan Publik Nama of Public Accountant	Riani
Alamat Address	Centennial Tower 15F, Suite 15B Jl. Gatot Subroto Kav. 25, Jakarta 12930, Indonesia Telp | Phone: (62–21) 22958350
Jasa yang Diberikan Services Rendered:	Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk Tanggal 31 Desember 2025 dan Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut. Audit on Consolidated Financial Statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk as of December 31, 2025 and For The Year Then Ended.
Jasa Lain Other Service	-
Periode Penugasan Assignment Period:	2025
Biaya Jasa Fees	Rp350.000.000 (belum termasuk *out-of-pocket expenses*), untuk audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Rp350,000,000 (excluding out-of-pocket expenses) for the audit of the Consolidated Financial Statements for the year ending December 31, 2025.

LEMBAGA & PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions & Professions

Biro Administrasi Efek
Share Registrar

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, 2nd Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47–48, Jakarta 12930
Tel : (62–21) 2525666 ; Fax : (62–21) 2525028

PENGHARGAAN & SERTIFIKASI
Awards & Certifications

Nama Penghargaan Name of Awards	**Pemberi Penghargaan** Awarded by
50 Perusahaan Publik dengan Kapitalisasi Besar 50 Big Capitalization Public Companies Award	*Indonesian Institute for Corporate Director* Indonesian Institute for Corporate Director
Indonesia Most Powerful Women 2025 kategori *Infrastructure Industry Category* untuk Ibu Juliawati Gunawan Halim Indonesia Most Powerful Women 2025 category Infrastructure Industry Category for Mrs. Juliawati Gunawan Halim	Warta Ekonomi Warta Ekonomi

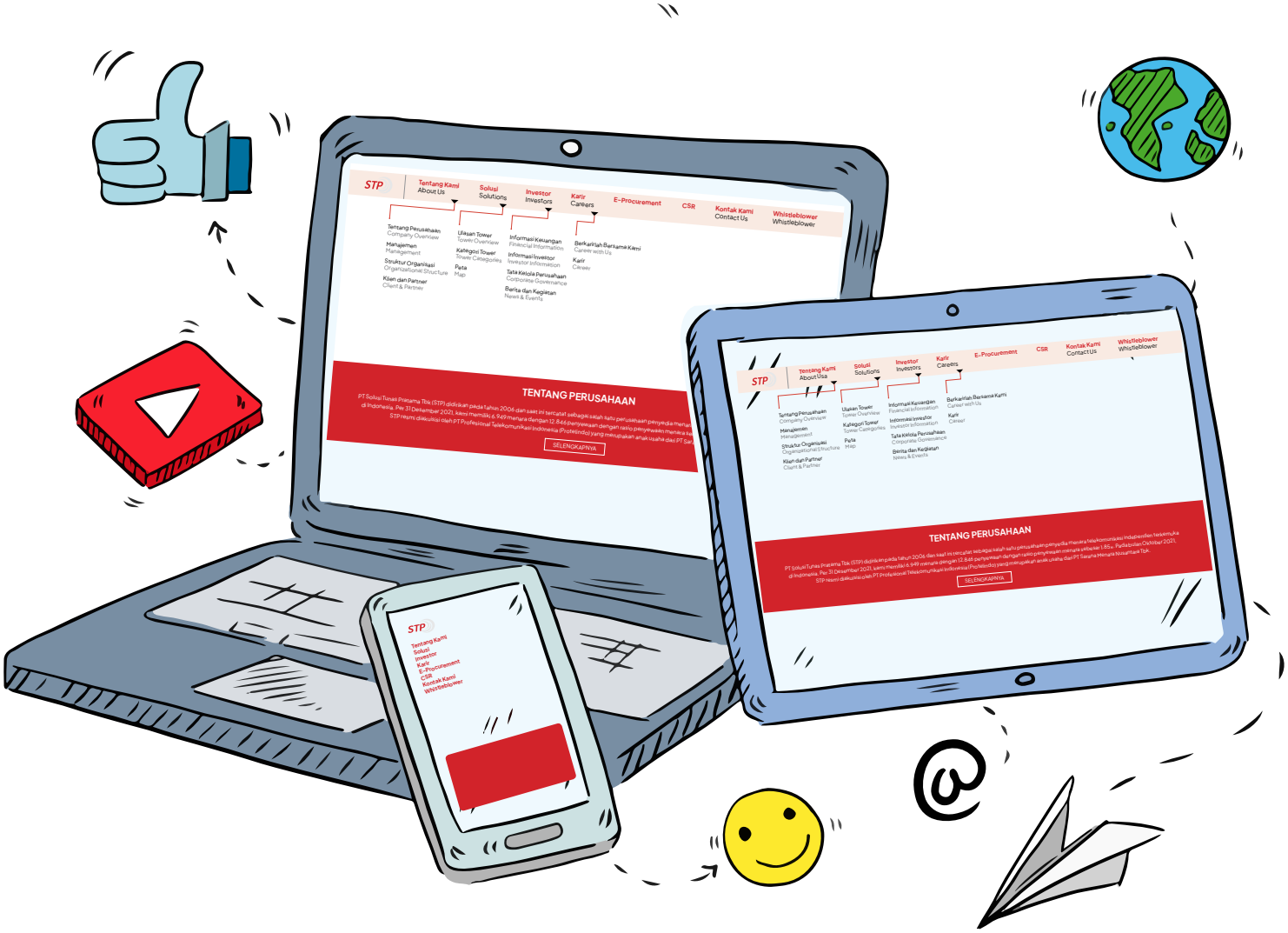
Nama Sertifikat Name of Certificate	**Diterbitkan Oleh** Issued By	**Masa Berlaku** Validity Period
ISO/IEC 27001:2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ISO/IEC 27001:2022 Information Security Management System	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	5 Maret 2029 March 5, 2029
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Quality Management System	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Sebelumnya ISO 18001:2007 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja) ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System (Previously ISO 18001:2007 Occupational Health and Safety Management System)	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2015 Environmental Management System	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	24 Maret 2027 March 24, 2027
ISO 55001:2014 Sistem Manajemen Aset ISO 55001:2014 Asset Management System	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	10 April 2027 April 10, 2027
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System	British Standards Institution (BSI) by Royal Charter	13 April 2028 April 13, 2028

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Corporate Website Information

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang situs web Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah memastikan kepatuhan penuh dengan memperbarui situs web korporasi yang dapat diakses di www.stptower.com. Situs web menyajikan informasi utama yang komprehensif dan mudah diakses, termasuk praktik tata kelola perusahaan, laporan keuangan, pembaruan operasional, dan pengungkapan yang penting bagi para pemangku kepentingan.

Pursuant to OJK Regulation No. 8/POJK.04/2015 concerning the websites of issuers or public companies, the Company has ensured full compliance by enhancing its corporate website, available at www.stptower.com. The website features comprehensive and easily accessible key information, including corporate governance practices, financial reports, operational updates, and disclosures essential for stakeholders.





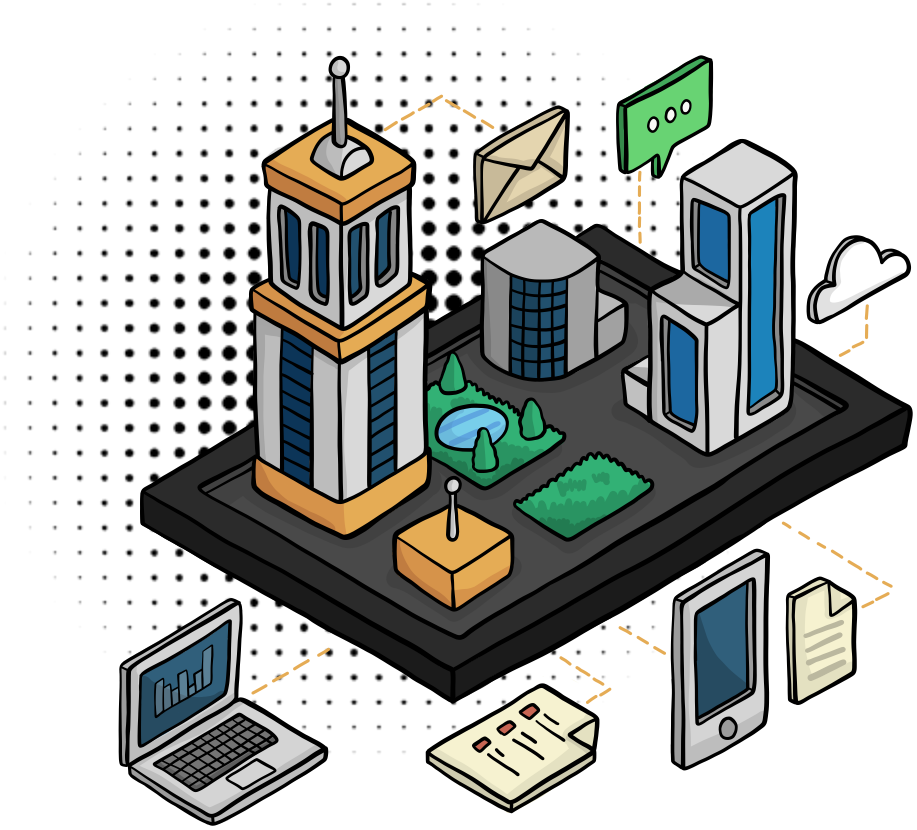
04
ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

Dengan fondasi aset yang kuat dan lokasi menara yang strategis, STP menjalankan strategi pertumbuhan secara terukur dan disiplin. Melalui pembangunan *build-to-suit* yang selektif dan optimalisasi kolokasi, Perseroan menjaga kesinambungan pendapatan dan memperkuat daya saing untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

Anchored by a strong asset foundation and strategically located tower portfolio, STP executes its growth strategy in a measured and disciplined manner. Through selective build-to-suit development and co-location optimization, the Company sustains revenue continuity while enhancing competitiveness to support long-term sustainable growth.

TINJAUAN MAKROEKONOMI DAN INDUSTRI
Macroeconomics and Industry Review



TINJAUAN PEREKONOMIAN DUNIA

Perekonomian global pada tahun 2025 bergerak dalam laju yang lebih moderat di tengah menguatnya proteksionisme dan semakin nyata fragmentasi ekonomi. Kebijakan tarif perdagangan baru yang diterapkan Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagang menekan aktivitas perdagangan internasional, sebagaimana tercermin pada perlambatan arus ekspor dan impor di berbagai kawasan. Perkembangan tersebut turut membatasi ekspansi ekonomi dunia sepanjang tahun.

Di saat yang sama, tingkat ketidakpastian global tetap tinggi seiring berlanjutnya dinamika geopolitik, termasuk ketegangan di Timur Tengah serta konflik Rusia–Ukraina. Berdasarkan World Economic Outlook Update yang diterbitkan International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2026, pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3% pada 2025, relatif stabil dibandingkan realisasi 2024 yang juga sebesar 3,3%. Negara maju membukukan pertumbuhan sekitar 1,7%, sedangkan negara berkembang utama tumbuh sekitar 4,1%, menegaskan peran emerging markets sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi global.

GLOBAL ECONOMIC OVERVIEW

In 2025, the global economy expanded at a more moderate pace amid intensifying protectionism and increasingly evident economic fragmentation. The implementation of new U.S. trade tariffs on several trading partners weighed on international trade activity, as reflected in slower export and import flows across various regions. These developments also constrained the pace of global economic growth throughout the year.

At the same time, global uncertainty remained elevated amid continuing geopolitical developments, including tensions in the Middle East and the ongoing Russia–Ukraine conflict. Based on the World Economic Outlook Update published by the International Monetary Fund (IMF) in January 2026, global economic growth reached 3.3% in 2025, relatively stable compared to the 2024 realization of 3.3%. Advanced economies recorded growth of around 1.7%, while major emerging economies grew by around 4.1%, underscoring the important role of emerging markets in sustaining global economic momentum.

Dalam kondisi tersebut, inflasi global menunjukkan tren penurunan menjadi sekitar 4,1% pada 2025 dibandingkan level yang lebih tinggi pada tahun sebelumnya, meskipun tekanannya masih berbeda antarnegara. Inflasi di negara maju berada pada kisaran 2,5%, sementara negara berkembang utama mencatat inflasi sekitar 5,0%. Di Amerika Serikat, inflasi masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan perdagangan dan dampak tarif terhadap harga konsumen, sementara beberapa negara Asia mengalami moderasi inflasi seiring perlambatan aktivitas ekonomi domestik dan penyesuaian kebijakan moneter. Perbedaan tersebut mencerminkan beragamnya tantangan kebijakan di masing-masing kawasan, sekaligus memengaruhi arah kebijakan moneter global.

(Sumber: www.imf.org) (www.worldbank.org)

TINJAUAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Di tengah dinamika ekonomi global yang melambat, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tetap menunjukkan kinerja yang solid. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,11% secara tahunan (year-on-year/YoY), didukung oleh kuatnya aktivitas domestik serta meningkatnya permintaan eksternal yang bersama-sama menjaga momentum pertumbuhan.

Dari sisi domestik, penguatan ekonomi tercermin pada meningkatnya konsumsi masyarakat. Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti) mencatat pertumbuhan konsumsi per kapita pada kelompok jasa makan minum dan akomodasi sebesar 5,76% YoY, serta kelompok barang dan jasa lainnya sebesar 7,49% YoY. Sejalan dengan itu, transaksi daring melalui *e-retail* dan marketplace meningkat 6,19% secara kuartalan (*quarter-on-quarter*/QoQ), yang menunjukkan pola konsumsi masyarakat yang semakin mengarah ke kanal digital.

Aktivitas transaksi keuangan digital juga terus bertumbuh, tercermin dari kenaikan nilai transaksi uang elektronik, kartu debit, dan kartu kredit sebesar 10,30% YoY. Perkembangan ini didukung oleh meningkatnya literasi digital serta perluasan ekosistem pembayaran digital yang melibatkan pemerintah dan pelaku usaha.

Against this backdrop, global inflation declined to around 4.1% in 2025 from a higher level in the previous year, although inflationary pressures continued to vary across countries. Inflation in advanced economies was in the range of 2.5%, while major emerging economies recorded inflation of around 5.0%. In the United States, inflation remained influenced by trade policy dynamics and the impact of tariffs on consumer prices, while several Asian countries experienced moderating inflation in line with slower domestic economic activity and monetary policy adjustments. These differing conditions reflect the varying policy challenges across regions and continued to shape the direction of global monetary policy.

INDONESIAN ECONOMIC OVERVIEW

Amid the moderation in the global economy, Indonesia's economy continued to demonstrate solid resilience in 2025. National economic growth reached 5.11% on a year-on-year (YoY) basis, supported by strong domestic activity and improving external demand, both of which helped sustain growth momentum.

From the domestic side, stronger economic activity was reflected in improving household consumption. The Quarterly Household Economic Survey (Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan or Seruti) recorded per capita consumption growth of 5.76% YoY in the food and beverage service and accommodation category, as well as 7.49% YoY in other goods and services. In line with this trend, online transactions through e-retail and marketplace platforms grew by 6.19% on a quarter-on-quarter (QoQ) basis, indicating an increasingly digital consumption pattern.

Digital financial transaction activity also continued to increase, as reflected in the 10.30% YoY growth in the value of electronic money, debit card, and credit card transactions. This development was supported by stronger digital literacy and the expansion of the digital payment ecosystem involving both the government and business sector.

Tinjauan Makroekonomi dan Industri
Macroeconomics and Industry Review

Penguatan konsumsi tersebut turut menopang aktivitas produksi. *Prompt Manufacturing Index* (PMI) Bank Indonesia berada pada level 51,66 atau masih dalam zona ekspansi, sementara penjualan listrik meningkat 3,49% YoY. Hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif, kecuali sektor pertambangan yang mengalami kontraksi sebesar 1,31%. Struktur perekonomian nasional tetap didominasi oleh Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi, sedangkan pertumbuhan tertinggi dicatatkan oleh sektor Jasa Transportasi dan Pergudangan, Jasa Lainnya, Infokom, serta Jasa Keuangan.

The strengthening in consumption also supported production activity. Bank Indonesia's Prompt Manufacturing Index (PMI) remained in the expansion zone at 51.66, while electricity sales increased by 3.49% YoY. Nearly all business sectors recorded positive growth, except for the mining sector, which contracted by 1.31%. The national economic structure continued to be dominated by Manufacturing, Agriculture, Trade, and Construction, while the highest growth was recorded in Transportation and Warehousing Services, Other Services, Information and Communication, and Financial Services.

Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen tumbuh positif sepanjang 2025. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama dengan pertumbuhan sebesar 5,11% dan kontribusi 53,63% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 30,02% terhadap perekonomian.

From the expenditure side, all components recorded positive growth throughout 2025. Household consumption remained the main driver, growing by 5.11% and contributing 53.63% to economic growth. Meanwhile, investment, or Gross Fixed Capital Formation (GFCF), contributed 30.02% to the economy.

Pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan kenaikan inflasi tahunan menjadi 2,65% pada 2025, dibandingkan 1,84% pada tahun sebelumnya, namun masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Kenaikan inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

This economic growth was accompanied by an increase in annual inflation to 2.65% in 2025, compared to 1.84% in the previous year, while remaining within the target range of 2.5±1%. The increase in inflation was mainly driven by the food, beverage, and tobacco category, as well as personal care and other services.

Dari sisi moneter dan eksternal, nilai tukar Rupiah tetap relatif terkendali di tengah ketidakpastian global. Pada akhir Desember 2025, cadangan devisa Indonesia mencapai USD156,5 miliar, meningkat dari USD150,1 miliar pada akhir November 2025. Posisi ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut memadai untuk mendukung ketahanan eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

From the monetary and external side, the Rupiah exchange rate remained relatively stable amid global uncertainty. At the end of December 2025, Indonesia's foreign exchange reserves stood at USD156.5 billion, up from USD150.1 billion at the end of November 2025. This level was equivalent to 6.4 months of imports or 6.3 months of imports and government external debt repayments, and remained well above the international adequacy standard of around three months of imports. Bank Indonesia considers these reserves sufficient to support external resilience and maintain macroeconomic and financial system stability.

Kondisi makroekonomi yang tetap kondusif juga ditopang oleh kebijakan moneter yang terjaga, dengan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) berada pada level 4,75%.

This relatively conducive macroeconomic environment was also supported by a prudent monetary policy stance, with Bank Indonesia's policy rate (BI Rate) maintained at 4.75%.

(sumber: www.bps.go.id) (www.bi.go.id)

TINJAUAN INDUSTRI TELEKOMUNIKASI

Sepanjang tahun 2025, industri telekomunikasi Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, didukung oleh sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, pelaku industri, dunia usaha, dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Kolaborasi tersebut mendorong perluasan konektivitas nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan digital di berbagai wilayah.

Dari sisi regulasi, pemerintah mempertegas arah pengembangan industri melalui penerbitan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital No. 2 dan No. 13 Tahun 2025 mengenai penggunaan spektrum frekuensi pita 1,4 GHz. Kebijakan ini menjadi fondasi penting bagi perluasan jaringan broadband nasional serta persiapan menuju implementasi teknologi 5G. Penguatan infrastruktur juga dilakukan melalui peluncuran Satelit Nusantara 5 (N5) pada 12 September 2025, yang ditujukan untuk memperluas akses internet, khususnya di wilayah terpencil dan tertinggal.

Satelit Nusantara 5 memiliki kapasitas 160 Gbps dan dilengkapi teknologi *Very High Throughput Satellite* (VHTS), dengan proyeksi mulai beroperasi secara komersial pada April 2026. Didukung oleh 101 *spot beam* dan 11 *gateway*, satelit ini diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kecepatan unduh hingga 16% pada 2029 serta pembangunan 8.000 BTS baru di wilayah dengan keterbatasan layanan. Sejalan dengan itu, kualitas layanan telekomunikasi terus membaik, tercermin dari rata-rata kecepatan internet nasional yang mencapai 61,90 Megabit per second (Mbps) untuk unduh dan 22,46 Mbps untuk unggah, berdasarkan pengukuran quality of service (QoS) di 156 kabupaten/kota. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan kinerja jaringan seluler yang berkelanjutan serta distribusi layanan yang semakin merata hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY OVERVIEW

Throughout 2025, Indonesia's telecommunications industry continued to advance, supported by stronger synergies among the government, industry players, businesses, and the public as service users. This collaboration contributed to broader national connectivity and greater utilization of digital services across the country.

From a regulatory perspective, the government reinforced its commitment to industry development through the issuance of Minister of Communication and Digital Affairs Regulations No. 2 and No. 13 of 2025 concerning the use of the 1.4 GHz frequency band. These regulations provide an important foundation for the expansion of the national broadband network and preparation for the transition toward 5G technology. Infrastructure strengthening was also marked by the launch of the Nusantara 5 (N5) Satellite on September 12, 2025, aimed at expanding internet access, particularly in remote and underserved areas.

The Nusantara 5 Satellite has a capacity of 160 Gbps and is equipped with Very High Throughput Satellite (VHTS) technology, with commercial operations projected to commence in April 2026. Supported by 101 spot beams and 11 gateways, the satellite is intended to strengthen education, healthcare, and public services. The government has also targeted an increase in download speeds of up to 16% by 2029, along with the addition of 8,000 new BTS sites in areas with limited service coverage. In parallel, service quality continued to improve, as reflected in the national average internet speed of 61.90 Megabits per second (Mbps) for downloads and 22.46 Mbps for uploads, based on quality of service (QoS) measurements across 156 regencies/cities. This improvement indicates sustained enhancement in cellular network performance and increasingly even service distribution, including in frontier, outermost, and underdeveloped regions.

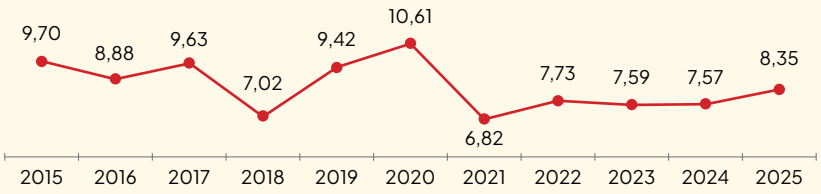
Tinjauan Makroekonomi dan Industri
Macroeconomics and Industry Review

Seiring dengan penguatan infrastruktur tersebut, sektor informasi dan komunikasi mencatat pertumbuhan sebesar 8,35% pada tahun 2025. Kinerja ini sejalan dengan meningkatnya trafik data dan aktivitas transaksi digital. Bank Indonesia juga mencatat bahwa transaksi ekonomi dan keuangan digital pada triwulan III 2025 terus tumbuh, ditopang oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal, termasuk melalui perbankan digital dan penggunaan QRIS, dengan stabilitas sistem pembayaran yang tetap terjaga.

Along with this infrastructure expansion, the information and communication sector recorded positive growth of 8.35% in 2025. This performance was in line with rising data traffic and digital transaction activity. Bank Indonesia also noted that digital economic and financial transactions continued to increase in the third quarter of 2025, supported by a payment system that remained secure, efficient, and reliable, including through digital banking and QRIS usage, while overall payment system stability was maintained.

(sumber: www.komdigi.go.id); (www.bps.go.id)

Perkembangan Sektor Informasi dan Komunikasi
Information and Communication Sector Development



STRATEGI PERSEROAN
Corporate Strategy

PERTUMBUHAN ORGANIK BERKELANJUTAN
Sustainable Organic Growth

Fokus mempertahankan pertumbuhan organik yang stabil
Focus on sustaining stable organic growth

Disiplin biaya melalui efisiensi operasional
Cost discipline through operational efficiency

OPTIMALISASI KEUNGGULAN KOMPETITIF
Leveraging Competitive Strengths

Portofolio menara di lokasi strategis mendukung peningkatan penyewa kolokasi
Strategically located tower portfolio supports higher co-location potential

BUILD-TO-SUIT & KOLOKASI STRATEGIS
Selective Build-to-Suit & Co-Location

Pembangunan menara secara selektif di lokasi strategis
Selective build-to-suit tower development in strategic locations

Penguatan strategi kolokasi untuk meningkatkan efisiensi modal kerja
Strengthening co-location strategy to enhance working capital efficiency

Pemeliharaan hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama
Maintaining long-term relationships with key customers

Perseroan berkomitmen untuk memperkuat daya saing di industri melalui penerapan strategi operasional yang efisien, pengelolaan modal kerja yang optimal, serta peningkatan profitabilitas yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Dalam mendukung tujuan tersebut, Perseroan terus meningkatkan sinergi dengan Grup guna memperluas pengembangan usaha dan memperkuat fokus bisnis jangka panjang secara terarah dan terukur.

The Company is committed to enhancing its competitiveness within the industry through the implementation of efficient operational strategies, optimized working capital management, and sustainable profitability for shareholders. To support these objectives, the Company continues to strengthen synergies within the Group to facilitate business development and reinforce a disciplined long-term business focus.

Strategi Perusahaan
Corporate Strategy

Pada tahun 2025, strategi Perseroan difokuskan pada upaya mempertahankan pertumbuhan organik yang berkesinambungan serta menjaga disiplin biaya melalui peningkatan efisiensi operasional. Pembangunan menara dengan skema *build-to-suit* dilakukan secara selektif pada lokasi-lokasi strategis, disertai dengan penguatan strategi kolokasi untuk meningkatkan efisiensi penggunaan modal kerja. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan terus memelihara hubungan jangka panjang dengan pelanggan utama guna memastikan keberlanjutan pendapatan.

In 2025, the Company's strategic priorities center on sustaining organic growth while maintaining cost discipline through improved operational efficiency. Build-to-suit tower development is undertaken selectively in strategic locations, complemented by an increased focus on co-location to enhance working capital efficiency. At the same time, the Company remains focused on maintaining long-term relationships with key customers to support revenue stability.

Perseroan secara konsisten mengoptimalkan keunggulan kompetitif yang dimilikinya. Portofolio aset menara Perseroan berada pada lokasi strategis yang memungkinkan peningkatan jumlah penyewa kolokasi, sehingga mendukung potensi pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan.

The Company consistently leverages its competitive strengths. Its tower asset portfolio is strategically positioned to accommodate higher co-location tenancy, supporting sustainable demand from customers.

Ke depan, aset menara Perseroan akan tetap menjadi elemen utama dalam mendukung pertumbuhan industri telekomunikasi dan memenuhi kebutuhan jaringan yang semakin kompleks. Perseroan berupaya memperkuat posisinya di industri melalui pembangunan menara, baik secara organik maupun melalui skema akuisisi strategis yang selektif, guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dengan tetap memperhatikan profil risiko dan disiplin keuangan.

Looking ahead, the Company's tower assets will continue to serve as a core component in supporting industry growth and addressing increasingly complex network requirements. The Company aims to strengthen its position in the telecommunications industry through tower development, both organically and through selective strategic acquisitions, while maintaining prudent risk management and financial discipline to support sustainable growth.

OPTIMISASI SEWA KOLOKASI PADA MENARA PERUSAHAAN

Strategi sewa kolokasi, yaitu pemanfaatan ruang yang tersedia pada menara eksisting untuk disewakan kepada lebih dari satu penyewa, terus dioptimalkan oleh Perseroan sebagai sumber pertumbuhan pendapatan. Skema ini memberikan nilai tambah bagi Perseroan mengingat sebagian besar biaya operasional menara bersifat tetap, sehingga penambahan penyewa baru hanya memerlukan tambahan biaya yang relatif terbatas. Di sisi pelanggan, model kolokasi sejalan dengan strategi asset-light yang diterapkan oleh operator telekomunikasi untuk mengendalikan belanja modal.

Dalam rangka mengoptimalkan peluang pertumbuhan tersebut, Perseroan secara aktif memasarkan layanan kolokasi kepada operator telekomunikasi. Selain itu, Perseroan secara berkelanjutan melakukan edukasi kepada pelaku industri, khususnya penyedia layanan seluler, mengenai manfaat kolokasi dalam meningkatkan efisiensi biaya dan mendukung fleksibilitas operasional. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat tingkat utilisasi aset dan menjaga keberlanjutan kinerja usaha Perseroan dalam jangka menengah hingga panjang.

PERTUMBUHAN MELALUI PEMBANGUNAN

Seiring dengan penerapan strategi *asset-light* oleh operator telekomunikasi, Perseroan mengembangkan usahanya melalui pembangunan menara dengan skema *Build-to-Suit* dan akuisisi strategis yang selektif. Pencapaian tersebut mencerminkan keandalan Perseroan dalam mengeksekusi pembangunan infrastruktur yang selaras dengan kebutuhan jaringan operator serta mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Dalam menjalankan strategi tersebut, Perseroan berfokus pada proyek-proyek yang memenuhi kriteria tingkat pengembalian minimum yang ditetapkan. Perseroan umumnya bekerja sama dengan operator telekomunikasi untuk membangun menara di lokasi yang ditentukan oleh operator, sesuai dengan spesifikasi desain jaringan yang dibutuhkan. Dalam skema ini, Perseroan bertindak sebagai pemilik aset menara yang dibangun, sehingga memiliki kendali atas pengelolaan dan pemanfaatan aset dalam jangka panjang.

OPTIMIZING CO-LOCATION LEASES ON COMPANY TOWERS

The co-location leasing strategy, which involves leasing available space on existing towers to multiple tenants, continues to be optimized as a key source of revenue growth. This model provides operational advantages, as the majority of tower operating costs are fixed in nature, requiring only relatively incremental costs to accommodate additional tenants. For customers, co-location aligns with the asset-light strategies adopted by telecommunications operators to manage capital expenditure.

To capture these growth opportunities, the Company actively markets its co-location services to telecommunications operators. In parallel, the Company continues to engage and educate industry participants, particularly mobile service providers, on the operational and cost-efficiency benefits of co-location. These initiatives are intended to enhance asset utilization and support the sustainability of the Company's operating performance over the medium to long term.

GROWTH THROUGH DEVELOPMENT

In line with the implementation of asset-light strategies by telecommunications operators, the Company has developed its business through Build-to-Suit tower development and selective strategic acquisitions. This achievement reflects the Company's capability to deliver reliable infrastructure development aligned with operators' network requirements and to support sustainable business growth.

In executing this strategy, the Company focuses on projects that meet its minimum return threshold. The Company typically collaborates with telecommunications operators to construct towers at locations designated by the operators, in accordance with their network design specifications. Under this arrangement, the Company retains ownership of the constructed towers, enabling long-term control over asset management and utilization.

Strategi Perusahaan
Corporate Strategy

Setelah proses konstruksi selesai, operator telekomunikasi berperan sebagai anchor tenant berdasarkan perjanjian sewa jangka panjang. Selanjutnya, Perseroan secara aktif memasarkan menara tersebut kepada operator lain untuk meningkatkan tingkat kolokasi dan optimalisasi utilisasi aset. Sebagian besar pembangunan infrastruktur baru dilakukan setelah Perseroan memperoleh komitmen sewa dari anchor tenant, sehingga mendukung visibilitas pendapatan dan mitigasi risiko investasi.

PERTUMBUHAN MELALUI AKUISISI

Selain pembangunan organik, akuisisi menara merupakan salah satu strategi utama yang mendukung posisi Perseroan sebagai pelaku utama dalam industri infrastruktur telekomunikasi. Perseroan secara selektif memanfaatkan peluang akuisisi yang memenuhi kriteria pengembalian minimum atau memungkinkan ekspansi ke wilayah layanan baru. Melalui pendekatan ini, Perseroan tidak hanya memperkuat portofolio aset yang telah ada, tetapi juga membuka potensi pengembangan sumber pendapatan baru.

Dalam melaksanakan strategi akuisisi, Perseroan menerapkan serangkaian kriteria evaluasi yang mencakup tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan, potensi permintaan kolokasi, tingkat tumpang tindih dengan portofolio menara eksisting, lokasi menara, utilisasi kapasitas yang tersedia, kepadatan penduduk, serta prospek pertumbuhan di masa mendatang. Selain pertimbangan ekonomi dan teknis, Perseroan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing wilayah,

FOKUS TERHADAP KUALITAS LAYANAN

Perseroan menerapkan strategi penjualan dan pemasaran yang terarah untuk meningkatkan tenancy ratio secara berkelanjutan. Sebagian besar pembangunan menara dirancang untuk mengakomodasi dua atau lebih penyewa, sehingga memungkinkan optimalisasi utilisasi aset sejak tahap perencanaan. Dalam mendukung strategi tersebut, Perseroan secara konsisten memelihara hubungan jangka panjang yang konstruktif dengan operator telekomunikasi.

Kemampuan Perseroan dalam mendukung operator untuk memperluas jangkauan operasional ke wilayah baru secara efisien, serta meningkatkan cakupan dan kapasitas jaringan yang telah ada, menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan tenancy ratio. Pendekatan ini memperkuat posisi Perseroan sebagai penyedia infrastruktur yang responsif terhadap kebutuhan jaringan yang terus berkembang.

Upon completion of construction, the telecommunications operator becomes the anchor tenant under a long-term site lease agreement. Thereafter, the Company actively markets the towers to other operators to generate co-location revenue and enhance asset utilization. The majority of new infrastructure development is undertaken after securing lease commitments from anchor tenants, thereby supporting revenue visibility and mitigating investment risk.

GROWTH THROUGH ACQUISITIONS

In addition to organic development, tower acquisitions represent a key strategic pillar supporting the Company's position as a leading player in the telecommunications infrastructure industry. The Company continues to pursue selective acquisition opportunities that meet its minimum return criteria or enable expansion into new service areas. Through this approach, the Company strengthens its existing asset portfolio while also capturing opportunities to develop alternative sources of revenue.

In executing acquisition strategies, the Company applies several criteria, covering returns on invested capital, potential co-location demand, overlap with the existing tower portfolio, tower location, available capacity utilization, population density, and long-term growth prospects. Beyond economic and technical considerations, the Company consistently ensures compliance with prevailing laws and regulations in each jurisdiction.

FOCUS ON SERVICE QUALITY

The Company implements a focused sales and marketing strategy to sustainably enhance its tenancy ratio. The majority of tower developments are designed to accommodate two or more tenants, enabling optimal asset utilisation from the outset. To support this strategy, the Company consistently maintains long-term, constructive relationships with telecommunications operators.

The Company's ability to support operators in expanding their operational reach into new areas efficiently, while enhancing network coverage and capacity, remains a key driver of tenancy ratio growth. This capability reinforces the Company's position as an infrastructure provider that is responsive to evolving network requirements.

Untuk memastikan efektivitas strategi, Perseroan memfokuskan pemasaran layanan sewa menara kepada operator telekomunikasi yang tengah melakukan ekspansi atau peningkatan infrastruktur jaringan, mengadopsi teknologi baru, serta memperluas cakupan geografis. Perseroan meyakini bahwa portofolio menara yang luas dan tersebar secara strategis merupakan fondasi yang solid untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang, khususnya melalui peluang kolokasi.

To ensure targeted execution, the Company focuses its tower leasing marketing efforts on telecommunications operators that are expanding or upgrading existing network infrastructure, deploying new technologies, and broadening geographic coverage. The Company believes that its extensive and strategically distributed tower portfolio provides a solid foundation for long-term growth, particularly through co-location opportunities.

Dalam pelaksanaan strategi penjualan dan pemasaran, Perseroan menerapkan pendekatan yang terukur, terarah, dan menjunjung tinggi prinsip etika bisnis. Perseroan berkomitmen untuk berperan sebagai mitra strategis yang andal dan terpercaya bagi operator telekomunikasi dalam jangka panjang.

In executing its sales and marketing strategy, the Company adopts a measured and disciplined approach while upholding high standards of business ethics. The Company remains committed to acting as a reliable and trusted long-term strategic partner for telecommunications operators.

KENALI PELANGGAN

Pemahaman yang mendalam terhadap pelanggan (*know your customer*) merupakan elemen penting dalam mendukung diversifikasi layanan serta memperkuat kapasitas keuangan Perseroan dalam memenuhi kebutuhan mitra usaha. Selama ini, integrasi antara wawasan pasar dan keahlian pemasaran yang dimiliki Grup telah mendukung terciptanya konektivitas yang optimal antara aset menara dan jaringan kabel serat optik.

KNOW YOUR CUSTOMER

A comprehensive understanding of customers (know your customer) is a key enabler in diversifying services and strengthening the Company's financial capacity to support partner requirements. To date, the integration of market insight and marketing expertise within the Group has facilitated seamless connectivity between tower sites and fiber optic infrastructure.

Pendekatan tersebut, yang didukung oleh cakupan layanan yang luas, memungkinkan Perseroan untuk memahami kebutuhan pelanggan secara lebih komprehensif. Dengan demikian, Perseroan dapat merespons secara tepat dan efektif terhadap dinamika pasar serta kebutuhan pelanggan yang semakin beragam, sekaligus menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan hubungan usaha.

This customer-centric approach, supported by broad service coverage, enables the Company to better understand customer needs. As a result, the Company is able to respond effectively and in a timely manner to evolving market dynamics and increasingly diverse customer requirements, while maintaining service quality and long-term business relationships.

KEBIJAKAN KEUANGAN YANG BERFOKUS PADA KEBERLANJUTAN

Perseroan secara konsisten menerapkan kebijakan keuangan dan sosial dengan perspektif keberlanjutan jangka menengah hingga panjang. Kebijakan tersebut mencakup pengelolaan struktur pendanaan dengan tingkat utang yang wajar, serta penerapan disiplin investasi modal yang selektif dan terukur.

FINANCIAL POLICIES FOCUSED ON SUSTAINABILITY

The Company consistently applies financial and social policies with a medium- to long-term sustainability perspective. These policies include maintaining debt levels at prudent levels and enforcing disciplined capital investment practices.

Seiring dengan peningkatan jumlah menara dan pengelolaan seluruh aset, Perseroan terus mengelola tingkat leverage secara prudent. Di samping itu, Perseroan berupaya menjaga efisiensi operasional, disiplin dalam pengelolaan modal kerja, serta peningkatan margin dan profitabilitas, guna mendukung ketahanan keuangan dan kinerja usaha yang berkelanjutan.

In line with the expansion of its tower portfolio and overall asset base, the Company continues to manage leverage prudently. In addition, the Company focuses on operational efficiency, disciplined working capital management, and the enhancement of margins and profitability, to support financial resilience and sustainable business performance.

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspects

RASIO TOWER LEASE
Tower Lease Ratio

Rasio Tower Lease:

1,75X

Tower Lease Ratio: 1.75×

INFRASTRUKTUR MENARA
Tower Infrastructure

7.809 menara telekomunikasi

7,809 telecommunications towers

13.636 penyewa menara

13,636 tower tenants

STRATEGI PEMASARAN

Dalam kerangka pengembangan fokus bisnis, Perseroan memperkuat kompetensi inti melalui pengembangan produk dan layanan yang berorientasi pada perluasan jaringan infrastruktur telekomunikasi. Penetapan harga layanan dilakukan secara *prudent* dengan mempertimbangkan etika bisnis, kondisi pasar, dan kebutuhan pelanggan, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini ditujukan untuk menjaga keberlanjutan hubungan jangka panjang dengan pelanggan sekaligus mendukung pertumbuhan yang menguntungkan.

Sejalan dengan itu, Perseroan menempatkan *service excellence* sebagai salah satu pilar utama strategi pemasaran guna meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Upaya ini didukung oleh peningkatan kompetensi karyawan melalui berbagai program pelatihan yang relevan, serta penyederhanaan dan standarisasi prosedur operasional (*Standard Operating Procedures*/SOP) untuk memastikan konsistensi kualitas layanan.

PANGSA PASAR

Perseroan merupakan salah satu penyedia infrastruktur telekomunikasi terbesar di Indonesia, dengan total 7.809 menara dan 13.636 penyewa menara. Per 31 Desember 2025, Perseroan mencatat *tower lease ratio* sebesar 1,75 kali. Skala dan cakupan aset tersebut menjadi fondasi yang kuat dalam memperkuat posisi pasar Perseroan serta mendukung peluang pertumbuhan jangka panjang.

MARKETING STRATEGY

As part of its business focus development, the Company strengthens its core competencies through the development of products and services aimed at expanding telecommunications infrastructure networks. Pricing decisions are undertaken prudently, with due consideration to business ethics, prevailing market conditions, customer requirements, and regulatory compliance. This approach is intended to preserve long-term customer relationships while supporting profitable growth.

In parallel, the Company places service excellence as a key pillar of its marketing strategy to enhance customer satisfaction and retention. These efforts are supported by continuous improvement in employee competencies through relevant training programs, as well as the simplification and standardisation of operational procedures (Standard Operating Procedures/SOP) to ensure consistent service quality.

MARKET SHARES

The Company is one of the largest telco infrastructure providers in Indonesia, operating a total of 7,809 towers with 13,636 tenants. As of December 31, 2025, the Company recorded a tower lease ratio of 1.75×. The scale and coverage of these assets form a strong foundation in reinforcing the Company's market position and supporting long-term growth opportunities.

PROSPEK USAHA TAHUN 2026

Business Outlook For 2026

Pada tahun 2026, industri telekomunikasi di Indonesia diproyeksikan tetap mencatatkan pertumbuhan yang positif sejalan dengan berlanjutnya peningkatan aktivitas ekonomi dan keuangan digital. Meskipun struktur industri semakin terkonsolidasi, kebutuhan pasar terhadap kapasitas jaringan yang andal diperkirakan tetap mendorong penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk melanjutkan pembangunan menara baru.

Perseroan berada pada posisi yang kuat untuk menangkap peluang pertumbuhan, khususnya dalam mendukung konvergensi *fixed-mobile* dan akselerasi implementasi teknologi 5G. Prospek usaha semakin menjanjikan seiring rencana pemerintah dalam melanjutkan alokasi dan potensi lelang frekuensi 5G, terutama pada pita 700 MHz dan 2,6 GHz, yang akan mendorong peningkatan kebutuhan infrastruktur menara dan jaringan pendukung. Selain itu, peluang pertumbuhan juga terbuka melalui pengembangan infrastruktur bawah laut, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang masih relatif kurang terlayani. Ke depan, Perseroan akan terus mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional, dengan tetap menjaga pengelolaan risiko yang prudent dan disiplin dalam investasi.

In 2026, Indonesia's telecommunications industry is projected to continue recording positive growth in line with the ongoing expansion of digital economic and financial activities. Despite increasing industry consolidation, market demand for reliable network capacity is expected to continue driving telecommunications infrastructure providers to develop new towers.

The Company is well-positioned to capture growth opportunities, particularly in supporting fixed-mobile convergence and the accelerated implementation of 5G technology. Business prospects are becoming increasingly promising in line with the government's plans to continue frequency allocation and potential auctions for 5G, especially in the 700 MHz and 2.6 GHz bands, which are expected to drive greater demand for tower infrastructure and supporting networks. In addition, growth opportunities are also emerging through the development of subsea infrastructure, particularly in eastern Indonesia where connectivity remains relatively underserved. Going forward, the Company will continue to optimize the use of artificial intelligence to enhance operational efficiency, while maintaining prudent risk management and disciplined investment practices.

TINJAUAN OPERASIONAL SEGMEN USAHA
Business Segment Operational Review

(Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah)

JUMLAH ASET SEGMEN
Total Segment Assets

2024: Rp9.802.339
2025: Rp10.156.321
Perubahan | Change: ▲ **+3,61%**

PENDAPATAN SEGMEN
Segment Revenue

2024: Rp1.817.387
2025: Rp1.910.682
Perubahan | Change: ▲ **+5,13%**

KOMPOSISI ASET 2025
Asset Composition 2025

Sewa Menara:
100% dari total aset segmen
Tower Leasing: 100% of total segment assets

Manajemen Perseroan, selaku pengambil keputusan operasional utama, memantau kinerja setiap unit bisnis secara terpisah sebagai dasar pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja. Kinerja segmen diukur berdasarkan laba atau rugi dan disajikan secara konsisten dengan laba atau rugi yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian. Pendapatan dan beban segmen mencakup transaksi antar segmen operasi dan dicatat berdasarkan nilai pasar.

Perseroan mengelola segmen penyewaan menara yang dievaluasi berdasarkan laba atau rugi yang dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Pendapatan dan beban segmen mencerminkan transaksi operasional yang dicatat sesuai dengan nilai pasar. Ringkasan kinerja untuk dua tahun terakhir, yaitu tahun 2024 dan 2025, disajikan sebagai berikut:

Management, as the Company's chief operating decision maker, monitors the operating results of each business unit separately for the purposes of resource allocation and performance evaluation. Segment performance is assessed based on profit or loss and is measured consistently with the profit or loss presented in the consolidated financial statements. Segment revenues and expenses include transactions between operating segments and are recorded at market value.

The Company manages its tower leasing segment, which is evaluated based on profit or loss as reported in the consolidated financial statements audited by a Public Accounting Firm. Segment revenues and expenses reflect operating transactions recorded at market value. A summary of performance for the last two years, 2024 and 2025, is presented as follows:

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024 Sewa Menara Tower Leasing	2025 Sewa Menara Tower Leasing
Pendapatan Revenues	1.817.387	1.910.682
Laba Usaha Operating Profit	1.256.386	1.352.875
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Tax	987.029	1.220.249
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	974.318	1.324.528
Jumlah Aset Segmen **Total Segment Assets**	**9.802.339**	**10.156.321**

Segmen usaha penyewaan menara tetap menjadi sumber pendapatan utama Perseroan. Pendapatan tercatat sebesar Rp1,91 triliun pada tahun 2025, naik dibandingkan dengan Rp1,82 triliun pada tahun 2024. Pada tahun 2025, segmen penyewaan menara mencatat laba usaha sebesar Rp1,35 triliun dan laba tahun berjalan sebesar Rp1,32 triliun. Perubahan kinerja tersebut mencerminkan dinamika operasional dan kondisi pasar yang memengaruhi kinerja segmen sepanjang periode pelaporan.

The tower leasing segment remained the Company's primary source of income. Revenue amounted to Rp1.91 trillion in 2025, an increase compared to Rp1.82 trillion in 2024. In 2025, the tower leasing segment recorded an operating profit of Rp1.35 trillion and a profit for the year of Rp1.32 trillion. The change in performance reflects operational developments and market conditions affecting the segment during the reporting period.

TINJAUAN KEUANGAN
Financial Review



Analisis dan Pembahasan Manajemen atas kinerja keuangan Perseroan disusun berdasarkan laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara (firma anggota jaringan global Morison Global) sesuai dengan Laporan Auditor Independen. Auditor menyatakan bahwa laporan keuangan konsolidasian telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Management's Discussion and Analysis of the Company's financial performance is based on the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk for the years ended December 31, 2025, and December 31, 2024. The financial statements have been audited by Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm (a member of the Morison Global network) in accordance with the Independent Auditor's Report. The auditor concluded that the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Company's consolidated financial position as of December 31, 2025, as well as its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Aset Lancar Current Assets	776.917	272.507	(504.410)	(64,92%)
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	9.025.422	9.883.814	858.392	9,51%
Jumlah Aset Total Assets	**9.802.339**	**10.156.321**	353.982	3,61%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2.648.598	1.943.920	(704.678)	(26,61%)
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	456.927	190.341	(266.586)	(58,34%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**3.105.525**	**2.134.261**	**(971.264)**	**(31,28%)**
Jumlah Ekuitas Total Equity	**6.696.814**	**8.022.060**	**1.325.246**	**19,79%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	**9.802.339**	**10.156.321**	**353.982**	**3,61%**

Pada tahun 2025, total aset Perseroan tercatat sebesar Rp10,15 triliun, meningkat sebesar 3,61% dibandingkan dengan Rp9,80 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan aset tidak lancar sebesar 9,51% menjadi Rp9,88 triliun, sejalan dengan strategi pengelolaan aset jangka panjang Perseroan. Sementara itu, aset lancar menurun sebesar 64,92% menjadi Rp272,51 miliar pada tahun 2025, mencerminkan perubahan struktur aset dan pengelolaan likuiditas.

In 2025, the Company's total assets amounted to Rp10.15 trillion, an increase of 3.61% compared with Rp9.80 trillion in the previous year. The increase was primarily attributable to a 9.51% increase in non-current assets to Rp9.88 trillion, in line with the Company's long-term asset management strategy. In contrast, current assets declined by 64.92% to Rp272.51 billion in 2025, reflecting changes in asset composition and liquidity management.

Total liabilitas Perseroan menurun sebesar 31,28% menjadi Rp2,13 triliun pada tahun 2025, dibandingkan dengan Rp3,11 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut berasal dari berkurangnya liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar 26,61% dan 58,34%. Liabilitas jangka pendek tercatat sebesar Rp1,94 triliun, sedangkan liabilitas jangka panjang sebesar Rp190,34 miliar pada tahun 2025, mencerminkan pengelolaan kewajiban yang lebih *prudent* dan terukur.

Total liabilities decreased by 31.28% to Rp2.13 trillion in 2025, from Rp3.11 trillion in the prior year. This reduction was driven by declines in both current and non-current liabilities of 26.61% and 58.34%, respectively. Current liabilities stood at Rp1.94 trillion, while non-current liabilities amounted to Rp190.34 billion in 2025, reflecting a more prudent and measured approach to liability management.

Seiring dengan penurunan liabilitas dan kinerja keuangan yang positif, ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp8,02 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 19,79% dibandingkan dengan Rp6,70 triliun pada

In line with the reduction in liabilities and positive financial performance, total equity increased to Rp8.02 trillion in 2025, a 19.79% increase from Rp6.70 trillion in 2024. The growth in equity was primarily

Tinjauan Keuangan
Financial Review

tahun 2024. Peningkatan ekuitas terutama didorong oleh profitabilitas Perseroan selama periode berjalan, yang memperkuat struktur permodalan dan ketahanan keuangan.

supported by the Company's profitability during the period, strengthening its capital structure and overall financial resilience.

ASET LANCAR

CURRENT ASSETS

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Kas dan bank Cash and Bank	18.272	51.230	32.958	180,37%
Kas yang dibatasi penggunaannya Restricted Cash	8	-	(8)	(100,00%)
Piutang Usaha - neto Trade Receivables - net	616.530	41.359	(575.171)	(93,29%)
Pendapatan yang Masih akan Diterima – Neto Income yet to be Received – Net	66.888	78.904	12.016	17,96%
Piutang Lain-lain Other Receivables	5.474	1.954	(3.520)	(64,30%)
Persediaan Inventories	2.458	2.946	488	19,85%
Beban Dibayar Dimuka-Jangka Pendek Short-Term Prepaid Expenses	1.833	1.636	(197)	(10,75%)
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	55.576	56.499	923	1,66%
Uang Muka Advances	9.878	8.583	(1.295)	(13,11%)
Piutang Derivatif-Jangka Pendek Derivative Receivables – Current	-	29.396	29.396	0,00%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	**776.917**	**272.507**	**(504.410)**	**(64,92%)**

Pada tahun 2025, aset lancar Perseroan tercatat sebesar Rp272.51 miliar, menurun sebesar 64,92% dibandingkan Rp776,92 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya piutang usaha sebesar 93,29% menjadi Rp41,36 miliar dari sebelumnya Rp616,53 miliar. Berkurangnya saldo piutang dagang tahun 2025 karena adanya perbedaan waktu penagihan sewa PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk **("XLS")** yang mundur dari kuartal empat 2025 ke kuartal pertama tahun 2026.

In 2025, the Company's current assets amounted to Rp272.51 billion, a decline of 64.92% compared with Rp776.92 billion in the prior year. This decrease was primarily attributable to a significant reduction in trade receivables of 93.29% to Rp41.36 billion from Rp616.53 billion previously. The decrease in trade receivables in 2025 was primarily attributable to a change in the billing timing for PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk **("XLS")** lease, which shifted from the fourth quarter of 2025 to the first quarter of 2026.

Piutang usaha dari pihak ketiga - neto tercatat sebesar Rp41,36 miliar pada tahun 2025. Penurunan piutang usaha terbesar berasal dari PT Indosat Tbk, XLS dan PT Telekomunikasi Selular, masing-masing sebesar Rp19,82 miliar, Rp9,69 miliar dan Rp9,36 miliar.

Trade receivables from third parties – net amounted to Rp41.36 billion in 2025. The most significant decreases in trade receivables were recorded from PT Indosat Tbk, XLS and PT Telekomunikasi Selular, amounting to Rp19.82 billion, Rp9.69 billion and Rp9.36 billion, respectively.

Perseroan telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha sebesar Rp2,47 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan tersebut memadai untuk menutup potensi kerugian yang mungkin timbul dari piutang usaha yang tidak tertagih. Selain itu, Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha kepada pihak ketiga.

The Company has recognized an allowance for impairment of trade receivables amounting to Rp2.47 billion. Management believes that the allowance is adequate to cover potential losses arising from uncollectible trade receivables. In addition, there is no significant concentration of credit risk associated with trade receivables from third parties.

Selain piutang usaha, penurunan aset lancar juga dipengaruhi oleh berkurangnya piutang lain-lain menjadi Rp1,95 miliar, saldo kas dan bank menjadi Rp51,23 miliar, serta beban dibayar di muka menjadi Rp1,63 miliar pada tahun 2025. Perubahan tersebut mencerminkan pengelolaan modal kerja dan likuiditas yang lebih terfokus.

In addition to trade receivables, the decline in current assets was also influenced by lower other receivables amounting to Rp1.95 billion, reduced cash and bank balances of Rp51.23 billion, and lower prepaid expenses of Rp1.63 billion in 2025. These movements reflect a more focused approach to working capital and liquidity management.

ASET TIDAK LANCAR

NON-CURRENT ASSETS

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Aset Tetap - Neto Fixed Assets - Net	7.757.970	8.406.769	648.799	8,36%
Aset Hak Guna – Neto Right-Of-Use Assets - Net	1.242.228	1.375.542	133.314	10,73%
Goodwill	17.257	17.257	0	0,00%
Aset tak Berwujud - Neto Intangible Assets - Net	7.334	6.286	(1.048)	(14,29%)
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	633	77.960	77.327	12.216,01%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	**9.025.422**	**9.883.814**	**858.392**	**9,51%**

Aset tidak lancar meningkat sebesar 9,51% menjadi Rp9,83 triliun pada tahun 2025, dibandingkan Rp9,03 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan aset tetap sebesar 8,36% menjadi Rp8,40 triliun dari Rp7,76 triliun pada tahun sebelumnya. Penambahan aset tetap merupakan bagian dari realisasi belanja modal untuk mendukung ekspansi dan keberlanjutan operasional Perseroan. Selain itu, aset hak guna juga meningkat sebesar 10,73% menjadi Rp1,38 triliun. Aset tidak lancar lainnya mengalami peningkatan signifikan dari Rp633 juta pada tahun 2024 menjadi Rp77,96 miliar pada tahun 2025, yang terutama disebabkan oleh penambahan pada pos aset tidak lancar lainnya selama periode berjalan pada tahun 2025.

Non-current assets increased by 9.51% to Rp9.83 trillion in 2025, compared with Rp9.03 trillion in 2024. The increase was mainly driven by a 8.36% increase in fixed assets to Rp8.40 trillion from Rp7.76 trillion in the previous year. Additions to fixed assets were part of capital expenditure realization to support the Company's business expansion and operational sustainability. In addition, right-of-use assets increased by 10.73% to Rp1.38 trillion in 2025. Other non-current assets increased significantly from Rp633 million in 2024 to Rp77.96 billion in 2025, primarily due to additions to other non-current assets during the year in 2025.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

LIABILITAS JANGKA PENDEK

CURRENT LIABILITIES

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities				
Utang Bank Bank Payables	1.846.000	1.534.644	(311.356)	(16,87%)
Utang Usaha Trade Payables	68.981	130.070	61.089	88,56%
Utang Lain-lain Other Payables	6.862	6.844	(18)	(0,26%)
Utang Pajak Tax Payables	50.851	3.312	(47.539)	(93,49%)
Beban Akrual Accrued Expenses	89.251	135.132	45.881	51,41%
Pendapatan Ditangguhkan Deferred Revenue	563.320	117.160	(446.160)	(79,20%)
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Pendek, Neto Short-Term Employee Benefits Liabilities, Net	23.333	16.751	(6.582)	(28,21%)
Utang Derivatif-Jangka Pendek Derivative Payable - Current	-	7	7	0,00%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	**2.648.598**	**1.943.920**	**(704.678)**	**(26,61%)**

Liabilitas jangka pendek Perseroan tercatat sebesar Rp1,94 triliun pada tahun 2025, menurun sebesar 26,61% dibandingkan Rp2,65 triliun pada tahun sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya utang bank menjadi Rp1,53 triliun, seiring dengan dilakukannya sebagian pembayaran kewajiban oleh Perseroan. Selain itu, utang pajak menurun sebesar 93,49% menjadi Rp3,31 miliar, sementara pendapatan ditangguhkan turun sebesar 79,20% menjadi Rp117,16 miliar.

Pendapatan ditangguhkan merupakan pendapatan yang diterima di muka dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan akan diakui sebagai pendapatan seiring dengan penyerahan jasa kepada pelanggan. Penurunan liabilitas jangka pendek juga dipengaruhi oleh turunnya liabilitas imbalan kerja jangka pendek-neto sebesar 28,21% menjadi Rp16,76 miliar, mencerminkan pengelolaan kewajiban jangka pendek yang lebih terukur.

The Company's current liabilities amounted to Rp1.94 trillion in 2025, a decrease of 26.61% compared with Rp2.65 trillion in the previous year. This decline was primarily attributable to a reduction in bank loans to Rp1.53 trillion, following partial repayments made by the Company. In addition, tax payables decreased by 93.49% to Rp3.31 billion, while deferred revenue declined by 79.20% to Rp117.16 billion.

Deferred revenue represents advance payments received from customers in relation to lease agreements and is recognized as revenue as the related services are rendered. The decrease in current liabilities was also influenced by a 28.21% reduction in net short-term employee benefit liabilities to Rp16.76 billion, reflecting more measured management of short-term obligations.

LIABILITAS JANGKA PANJANG

NON-CURRENT LIABILITIES

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities				
Provisi Jangka Panjang Long-Term Provisions	25.947	28.739	2.792	10,76%
Liabilitas Pajak Tangguhan, Neto Deferred Tax Liabilities, Net	406.618	131.519	(275.099)	(67,66%)
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Post-Employment Benefit Liabilities	24.362	30.083	5.721	23,48%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	**456.927**	**190.341**	**(266.586)**	**(58,34%)**

Liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp190,34 miliar, menurun sebesar 58,34% dibandingkan Rp456,93 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh berkurangnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 67,66% menjadi Rp131,52 miliar, dari Rp406,62 miliar pada tahun 2024, sejalan dengan perubahan basis pajak dan posisi keuangan Perseroan.

Long-term liabilities in 2025 amounted to Rp190.34 billion, a decrease of 58.34% from Rp456.93 billion in the prior year. This reduction was mainly driven by a 67.66% decline in deferred tax liabilities to Rp131.52 billion from Rp406.62 billion in 2024, in line with changes in the Company's tax position and financial profile.

EKUITAS

EQUITY

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Modal Saham - Modal Dasar Share Capital	113.758	113.758	0	0,00%
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	4.909.611	4.913.101	3.490	0,07%
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	19.076	16.304	(2.772)	(14,53%)
Saldo Laba Retained Earnings	1.654.363	2.978.883	1.324.520	80,06%
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	6	14	8	133,33%
Jumlah Ekuitas Total Equity	**6.696.814**	**8.022.060**	**1.325.246**	**19,79%**

Ekuitas Perseroan meningkat menjadi Rp8,02 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 19,79% dibandingkan Rp6,70 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ekuitas terutama didorong oleh pertumbuhan saldo laba sebesar 80,06% menjadi Rp2,98 triliun, yang mencerminkan profitabilitas Perseroan yang berkelanjutan dan memperkuat struktur permodalan.

The Company's equity increased to Rp8.02 trillion in 2025, up 19.79% from Rp6.70 trillion in the previous year. The increase in equity was primarily supported by an 80.06% increase in retained earnings to Rp2.98 trillion, reflecting the Company's continued profitability and a stronger capital structure.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Pendapatan Revenues	1.817.387	1.910.682	93.295	5,13%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(473.416)	(495.920)	(22.504)	4,75%
Laba Bruto Gross Profit	**1.343.971**	**1.414.762**	**70.791**	**5,27%**
Beban Penjualan dan Pemasaran Selling and Marketing Expenses	(3.070)	(3.381)	(311)	10,13%
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(84.515)	(58.506)	26.009	(30,77%)
Laba Usaha Operating Profit	**1.256.386**	**1.352.875**	**96.489**	**7,68%**
Pendapatan Keuangan Finance Income	661	447	(214)	(32,38%)
Biaya Keuangan Finance Costs	(132.536)	(88.690)	43.846	(33,08%)
Beban Lain-lain, Neto Other Expenses, Net	(137.482)	(44.383)	93.099	(67,72%)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	**987.029**	**1.220.249**	**233.220**	**23,63%**
Pajak (Manfaat)/Beban - Pajak Final dan Penghasilan Tax (Benefit)/Expense - Final and Income Tax	(12.711)	104.279	116.990	(920,38%)
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	**974.318**	**1.324.528**	**350.211**	**35,94%**
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	1.959	(2.772)	(4.731)	(241,50%)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	976.277	1.321.756	345.480	35,39%
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity	974.315	1.324.520	350.205	35,95%
Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali Profit for the Year Attributable to Non-Controlling Interests	3	8	5	166,67%
Total Penghasilan Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Comprehensive Income Attributable to Owners of the Parent Entity	976.274	1.321.748	347.433	35,39%
Total Penghasilan Komprehensif yang dapat Diatribusikan Kepada Kepentingan Non-Pengendali Total Comprehensive Income Attributable to Non-Controlling Interests	3	8	5	166,67%
Laba Per Saham Dasar dan Dilusian Basic and Diluted Earnings per Share	**856**	**1.164**	**308**	**35,98%**

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian mencerminkan kinerja profitabilitas Perseroan sepanjang tahun 2025. Uraian berikut disusun untuk memberikan penjelasan atas faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja keuangan selama periode pelaporan.

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income reflects the Company's profitability performance throughout 2025. The following discussion outlines the key factors affecting financial performance during the reporting period.

Pendapatan

Seluruh pendapatan Perseroan bersumber dari sewa menara. Pada tahun 2025, pendapatan tercatat sebesar Rp1,91 triliun, naik sebesar 5,13% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1,82 triliun. Basis pelanggan Perseroan tetap terdiversifikasi dengan baik dan terdiri dari sejumlah operator telekomunikasi utama di Indonesia. Kontribusi pendapatan terbesar berasal dari XLS sebesar 46%, PT Indosat Tbk sebesar 35%, dan PT Telekomunikasi Selular sebesar 18%.

Revenue

The Company's revenue is derived entirely from tower leasing activities. In 2025, revenue amounted to Rp1.91 trillion, a increase of 5.13% compared with Rp1.82 trillion in the previous year. The Company's customer base remains well diversified and consists of leading telecommunications operators in Indonesia. The largest revenue contributions were generated from XLS at 46%, PT Indosat Tbk at 35%, and PT Telekomunikasi Selular at 18%.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan terutama terdiri dari penyusutan aset hak guna dan penyusutan aset tetap, yang masing-masing mencapai Rp247,5 miliar dan Rp188,1 miliar pada tahun 2025. Secara tahunan, beban tersebut meningkat masing-masing sebesar 2,50% dan 7,37% dibandingkan tahun 2024. Porsi penyusutan aset hak guna dan aset tetap terhadap total beban pokok pendapatan masing-masing sebesar 56,71% dan 43,13%, sementara beban lainnya sebesar 0,16% pada tahun 2025.

Cost of Revenue

Cost of revenue primarily comprised depreciation of right-of-use assets and depreciation of fixed assets, amounting to Rp247.5 billion and Rp188.1 billion, respectively, in 2025. On a year-over-year basis, these expenses increased by 2.50% and 7.37% compared with 2024. Depreciation of right-of-use assets and fixed assets represented 56.71% and 43.13% of total cost of revenue, respectively, while other costs accounted for 0.16% in 2025.

Selain itu, beban pemeliharaan dan perbaikan meningkat sebesar 3,49% menjadi Rp39,74 miliar. Beban jasa keamanan dan beban lainnya juga meningkat sebesar 13,18% menjadi Rp19,81 miliar pada tahun 2025.

Other components of cost of revenue included maintenance and repair expenses, which increased by 3.49% to Rp39.74 billion, and security services and other expenses, which rose by 13.18% to Rp19.81 billion in 2025.

Laba Bruto

Perseroan membukukan laba bruto sebesar Rp1,41 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 5,27% dibandingkan Rp1,34 triliun pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan selama periode berjalan.

Gross Profit

The Company recorded gross profit of Rp1.41 billion in 2025, a increase of 5.27% from Rp1.34 trillion in the prior year, in line with increase revenue during the period.

Beban Operasional

Beban operasional yang terdiri dari beban penjualan dan pemasaran naik sebesar 10,13% dari Rp3,07 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,38 triliun pada tahun 2025, peningkatan ini mencerminkan aktivitas usaha yang lebih tinggi yang dilakukan Perusahaan yang dilakukan Perseroan. Beban umum dan administrasi juga menurun signifikan sebesar 30,77% dari Rp84,51 miliar menjadi Rp58, 50miliar.

Operating Expenses

Operating expenses, consisting of selling and marketing expenses, increase by 10.13% from Rp3.07 trillion in 2024 to Rp3.38 trillion in 2025, the increase was mainly driven by higher business activity of the Company. General and administrative expenses also decreased significantly by 30.77% from Rp84.51 billion to Rp58.50 billion.

Laba Usaha

Laba usaha Perseroan tercatat sebesar Rp1.35 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 7,68% dibandingkan Rp1,26 triliun pada tahun 2024. Kenaikan laba usaha tersebut sejalan dengan Kenaikan pendapatan, meskipun sebagian teredam oleh efisiensi biaya operasional.

Operating Profit

Operating profit amounted to Rp1.35 trillion in 2025, down 7.68% from Rp1.26 trillion in 2024. The increase in operating profit was consistent with increase revenue, partially offset by cost efficiency measures.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Laba Sebelum Pajak Final dan Pajak Penghasilan

Setelah memperhitungkan beban keuangan neto, pendapatan keuangan, serta pendapatan lain-lain neto, laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan mencapai Rp1,22 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 23,63% dibandingkan Rp987,03 miliar pada tahun 2024.

Profit Before Final Tax and Income Tax

After taking into account net finance costs, finance income, and other income (net), profit before final tax and income tax reached Rp1.22 trillion in 2025, a increase of 23.63% compared with Rp987.03 billion in 2024.

Laba Tahun Berjalan

Setelah memperhitungkan manfaat pajak final dan pajak penghasilan sebesar Rp104,27 miliar, laba tahun berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp1,32 triliun pada tahun 2025, naik sebesar 35,94% dibandingkan Rp974,32 miliar pada tahun sebelumnya.

Profit for the Year

After recognizing final tax and income tax benefits totalling Rp104.27 billion, profit for the year amounted to Rp1.32 trillion 2025, representing an increase of 35.94% from Rp974.32 billion the previous year.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Penghasilan komprehensif lain pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,78 miliar, sehingga total penghasilan komprehensif tahun berjalan mencapai Rp1,32 triliun. Jumlah ini naik sebesar 35,39% dibandingkan Rp976,28 miliar pada tahun 2024.

Total Comprehensive Income for the Year

Other comprehensive income for 2025 amounted to Rp2.78 billion, resulting in total comprehensive income for the year of Rp1.32 trillion. This represented a decrease of 35.39% compared with Rp976.28 billion in 2024.

Laba per Saham Dasar dan Dilusian

Laba per saham dasar dan dilusian Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1.164 per saham, dibandingkan Rp856 per saham pada tahun 2024.

Basic and Diluted Earnings per Share

Basic and diluted earnings per share for 2025 amounted to Rp1.164 per share, compared with Rp856 per share in 2024.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED OF STATEMENT CASH FLOW

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Provided by Operating Activities	1.425.170	1.666.867	241.697	16,99%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi Net Cash Used in Investing Activities	(132.345)	(831.439)	(699.094)	528,24%
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash Used in Financing Activities	(1.279.805)	(802.469)	477.336	(37,30%)
Kenaikan Neto Kas dan Bank Net Increase in Cash on Hand and in Bank	13.020	32.959	19.939	153,14%
Dampak Neto Perubahan Selisih Kurs pada Kas dan Bank Effect of Exchange Rate Changes on Cash on Hand and in Bank	(1)	(1)	0	0,00%
Kas dan Bank pada Awal Tahun Cash on Hand and in Banks at the Beginning of the Year	5.253	18.272	13.019	247,84%
Kas dan Bank pada Akhir Tahun Cash on Hand and in Banks at the End of the Year	18.272	51.230	32.958	180,37%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,66 triliun naik 16,99% dibandingkan pada tahun sebelumnya. Perolehan kas operasional tersebut

Cash Flows from Operating Activities

Net cash provided by operating activities amounted to Rp1.66 trillion in 2025, representing an increase of 16.99% compared to the previous year. Operating cash inflows were primarily supported by cash receipts

terutama didukung oleh penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp2,09 triliun. Arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan untuk pembayaran kepada pemasok, karyawan, serta kewajiban perpajakan, sejalan dengan aktivitas operasional Perseroan selama periode berjalan.

from customers totaling Rp2.09 trillion. Cash outflows from operating activities mainly related to payments to suppliers, employees, and tax obligations, in line with the Company's ongoing operations during the period

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp831,43 miliar, meningkat dibandingkan penggunaan kas sebesar Rp132,35 miliar pada tahun sebelumnya. Peningkatan penggunaan kas investasi terutama disebabkan oleh meningkatnya perolehan aset tetap, yang merupakan bagian dari realisasi belanja modal Perseroan untuk mendukung kegiatan usaha dan pengembangan aset jangka panjang.

Cash Flows from Investing Activities

Net cash used in investing activities totalled Rp831.43 billion in 2025, an increase compared with Rp132.35 billion in the prior year. The higher cash outflow was primarily attributable to increased acquisitions of fixed assets, reflecting the realization of capital expenditures to support business operations and long-term asset development.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp802,47 miliar, menurun dibandingkan Rp1,28 triliun pada tahun sebelumnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh penerimaan dari utang bank sebesar Rp7,44 triliun pada tahun 2025, yang lebih tinggi dibandingkan penerimaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp4,35 triliun, seiring dengan pengelolaan struktur pendanaan dan pembayaran kewajiban yang lebih terukur.

Cash Flows from Financing Activities

Net cash used in financing activities amounted to Rp802.47 billion in 2025, lower than Rp1.28 trillion in the previous year. This movement was influenced by bank loan proceeds of Rp7.44 trillion in 2025, which were higher than the Rp4.35 trillion received in the prior year, reflecting adjustments in the Company's funding strategy and liability repayments.

Kas dan Bank pada Akhir Tahun

Kas dan Bank Perseroan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp51,23 miliar, naik sebesar 180,37% dibandingkan posisi akhir tahun 2024 sebesar Rp18,27 miliar. Perubahan tersebut mencerminkan dinamika arus kas selama periode pelaporan, khususnya terkait aktivitas investasi dan pendanaan.

Cash on Hand and in Banks at the End of the Year

Cash on Hand and in Banks at the end of 2025 totalled Rp51.23 billion, an increase of 180.37% compared with Rp18.27 billion at the end of 2024. This position reflects the combined impact of operating, investing, and financing activities during the reporting period.

RASIO KEUANGAN UTAMA

Kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya dievaluasi menggunakan sejumlah rasio keuangan utama. Rasio-rasio tersebut digunakan untuk menilai profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, serta efisiensi operasional Perseroan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan pengelolaan risiko keuangan.

KEY FINANCIAL RATIOS

The Company's financial performance in 2025, as compared with the previous year, is assessed using key financial ratios. These ratios provide an analytical basis to evaluate profitability, liquidity, solvency, and operational efficiency as part of management's overall performance and financial risk assessment.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian Description	2024	2025
Marjin EBITDA EBITDA Margin	92,40%	93,85%
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	69,10%	70,81%
Marjin Laba Tahun Berjalan Net Profit Margin	53,60%	69,32%
Rasio Laba terhadap Total Ekuitas Return on Equity (ROE)	14,50%	16,51%
Rasio Laba terhadap Total Aset Return on Assets (ROA)	9,90%	13,0%
Rasio Lancar (X) Current Ratio (X)	0,3	0,1
Rasio Utang Neto terhadap Ekuitas (X) Net Debt to Equity Ratio (X)	0,3	0,2
Rasio Utang Neto terhadap Aset (X) Net Debt to Total Assets Ratio (X)	0,2	0,2
Rasio Utang Neto terhadap LQA EBITDA* (X) Net Debt to EBITDA Ratio (X)	1,1	0,9

*) EBITDA kuartal terakhir yang disetahunkan.
*) Last quarter's annualized EBITDA.

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Likuiditas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek diukur melalui rasio lancar. Pada tahun 2025, rasio lancar tercatat sebesar 0,1×. Hal ini mencerminkan dinamika operasional Perseroan sebagai penyedia infrastruktur digital, khususnya menara telekomunikasi, yang memerlukan belanja modal dalam jumlah signifikan untuk mendukung pengembangan aset dan kapasitas jaringan. Dalam konteks tersebut, pendanaan melalui utang tetap menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mendukung ekspansi usaha.

Perseroan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pendanaan dan pemenuhan kewajiban keuangan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pendekatan ini dilakukan untuk memastikan fleksibilitas likuiditas tetap terjaga seiring dengan kebutuhan investasi yang berkelanjutan.

Profitabilitas yang solid menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga kesehatan likuiditas Perseroan. Kinerja ini didukung oleh pertumbuhan industri informasi dan komunikasi yang secara konsisten berada di atas pertumbuhan Produk Domestik Bruto

SOLVENCY AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY

Liquidity

The Company's ability to meet short-term obligations is assessed using the current ratio. In 2025, the current ratio stood at 0.1×. This reflects the operational dynamics of the Company as a digital infrastructure provider, particularly in telecommunications towers, which requires significant capital expenditures to support asset expansion and network capacity. In this context, debt financing remains one of the strategies employed to support business development.

The Company consistently applies prudent principles in maintaining a balance between funding requirements and financial obligations, both in the short and long term. This approach is intended to preserve liquidity flexibility amid ongoing investment needs.

Solid profitability remains a key supporting factor in maintaining the Company's liquidity profile. This performance is supported by growth in the information and communication industry, which continues to outpace national gross domestic product (GDP)

(PDB) nasional, sehingga menciptakan peluang berkelanjutan bagi ekspansi usaha dan penguatan struktur keuangan Perseroan.

growth, thereby creating sustained opportunities for business expansion and strengthening the Company's financial structure.

Solvabilitas

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dievaluasi menggunakan sejumlah rasio keuangan utama, yaitu rasio utang neto terhadap ekuitas, rasio utang neto terhadap aset, dan rasio utang neto terhadap LQA EBITDA. Pada tahun 2025, masing-masing rasio tersebut tercatat sebesar 0,2×, 0,2×, dan 0,9×, yang mencerminkan struktur permodalan yang sehat serta kemampuan yang memadai dalam memenuhi kewajiban keuangan.

Solvency

The Company's ability to meet both short-term and long-term obligations is evaluated using several key financial ratios, namely net debt to equity, net debt to assets, and net debt to LQA EBITDA. In 2025, these ratios stood at 0.2×, 0.2×, and 0.9×, respectively, reflecting a sound capital structure and adequate capacity to fulfil financial obligations.

Dari sisi pendanaan, Perseroan memiliki struktur pendanaan yang terdiversifikasi. Selain memiliki fleksibilitas dalam memperoleh pinjaman dari berbagai bank terkemuka, baik domestik maupun internasional, entitas anak juga mengoptimalkan sumber pendanaan melalui penerbitan obligasi dalam mata uang Rupiah maupun mata uang asing. Strategi pendanaan ini mendukung pengelolaan struktur permodalan yang kuat dan berimbang dalam rangka mendukung rencana bisnis jangka menengah dan panjang.

From a funding perspective, the Company maintains a diversified financing structure. In addition to flexibility in obtaining loans from various leading domestic and international banks, subsidiaries also optimize funding sources through the issuance of bonds in both Rupiah and foreign currencies. This strategy supports a balanced and resilient capital structure to underpin the Company's medium- to long-term business plans.

Kolektibilitas Piutang

Dalam pengelolaan piutang usaha, Perseroan menerapkan pemantauan yang ketat sebagai bagian dari pengelolaan risiko kredit. Piutang usaha Perseroan tidak dijamin dan tidak berbunga, dengan jangka waktu pelunasan rata-rata antara 30 hingga 60 hari. Untuk mengantisipasi potensi risiko ketidaktertagihan, Perseroan membentuk cadangan kerugian kredit ekspektasian sebagai langkah mitigasi yang *prudent*.

Receivables Collectability

In managing trade receivables, the Company applies strict monitoring as part of its credit risk management framework. Trade receivables are unsecured and non-interest bearing, with average settlement terms ranging from 30 to 60 days. To mitigate the risk of uncollectible receivables, the Company establishes an allowance for expected credit losses as a prudent risk mitigation measure.

Melalui pembentukan cadangan tersebut, manajemen meyakini bahwa potensi kerugian dari piutang usaha yang tidak tertagih dapat tertutup secara memadai. Selain itu, Perseroan tidak memiliki konsentrasi risiko kredit yang signifikan terhadap pihak ketiga, sehingga eksposur risiko kredit tetap berada dalam batas yang dapat dikelola.

Management believes that the allowance provides adequate coverage for potential losses arising from uncollectible receivables. In addition, there is no significant concentration of credit risk with respect to third-party receivables, ensuring that overall credit exposure remains manageable.

Tingkat kolektibilitas piutang diukur menggunakan rasio periode penagihan (hari). Pada tahun 2025, periode penagihan piutang usaha tercatat selama 95 hari, yang mencerminkan efektivitas Perseroan dalam proses penagihan piutang.

Receivables collectability is measured using the days sales outstanding metric. In 2025, the collection period for trade receivables was 95 days, reflecting the effectiveness of the Company's receivables collection process.

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Uraian Description	2024	2025
Periode Penagihan (hari) Billing Period (days)	124	95

Informasi lebih lanjut mengenai umur piutang usaha serta upaya pengelolaannya disajikan pada tabel berikut:

Further details on the aging of trade receivables and related management efforts are presented in the table below:

Dalam Milliar Rupiah | In Billions of Rupiah

Uraian Description	2024	2025	Pertumbuhan | Growth	
			Nominal	%
Belum Lewat Jatuh Tempo Not Yet Due	601.651	41.257	(560.394)	(93,14%)
Lewat Jatuh Tempo | Past Due:				
1–30 hari | 1–30 days	8.792	-	(8.792)	(100,00%)
31–60 hari | 31–60 days	6.002	-	(6.002)	(100,00%)
61–90 hari | 61–90 days	-	-	-	-
Lebih dari 90 hari | Over 90 days	2.555	2.572	17	0,67%
Sub jumlah | Subtotal	619.000	43.829	(575.171)	(92,92%)
Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Allowance for Expected Credit Losses	(2.470)	(2.470)	0	0,00%
Jumlah Piutang–Bersih Net Trade Receivables	**616.530**	**41.359**	**(575.171)**	**(93,29%)**

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen Struktur Modal

Pengelolaan struktur modal Perseroan ditujukan untuk menjaga keseimbangan yang sehat antara ekuitas dan utang, guna mendukung kesinambungan usaha serta menciptakan imbal hasil yang berkelanjutan bagi pemegang saham. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan profil risiko, kondisi pasar, serta kebutuhan pendanaan jangka pendek dan jangka panjang.

Sebagai bagian dari strategi keuangan, Direksi secara berkala melakukan peninjauan atas komposisi modal dan utang Perseroan untuk memastikan keselarasan dengan tujuan strategis Grup. Evaluasi struktur permodalan dilakukan setiap tahun dengan mempertimbangkan dinamika operasional dan kondisi bisnis, serta sebagai langkah mitigasi terhadap potensi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Capital Management Policy

The Company's capital management policy aims to maintain a sound balance between equity and debt in order to support business continuity and deliver sustainable returns to shareholders. This policy is implemented with due consideration to the Company's risk profile, market conditions, and short- and long-term funding requirements.

As part of its financial strategy, the Board of Directors periodically reviews the composition of the Company's capital and debt to ensure alignment with the Group's strategic objectives. This evaluation is conducted annually to adapt the capital structure to evolving business conditions and to mitigate potential risks that could affect financial stability.

Struktur Permodalan

Struktur permodalan Perseroan terdiri atas utang berbasis bunga dan ekuitas. Utang berbasis bunga berasal dari pinjaman bank dan utang obligasi sebagai berikut:

Capital Structure

The Company's capital structure consists of interest-bearing debt and equity. Interest-bearing debt comprises bank loans and outstanding bonds as follows:

Dalam Milliar Rupiah | In Billion Rupiah

Uraian Description	2024		2025	
	Nominal	Porsi (%)	Nominal	Porsi (%)
Jumlah Pinjaman Total Borrowings	1.846,00	21,6%	1.534,64	16,06%
Jangka Pendek Short-Term	1.846,00	21,6%	1.534,64	16,06%
Jangka Panjang Long-Term	-	-	-	-
Ekuitas Equity	6.696,81	78,3%	8.022,06	83,94%
Jumlah Modal yang Diinvestasikan Total Invested Capital	**8.542,81**	**100,0%**	**9.556,70**	**100,0%**

Berdasarkan struktur tersebut, pada tahun 2025 permodalan Perseroan didominasi oleh ekuitas sebesar 83,94%, dengan porsi pinjaman sebesar 16,06%. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya porsi pinjaman tercatat sebesar 21,6% dan ekuitas sebesar 78,3%. Perubahan komposisi ini mencerminkan penguatan struktur permodalan serta pengelolaan *leverage* yang lebih *prudent*.

Based on this structure, equity accounted for 83.94% of total capitalization in 2025, while borrowings stood at 16.06%. In the prior year, borrowings accounted for 21.6% and equity for 78.3%. The shift in composition reflects a strengthening of the capital base and a more prudent approach to leverage management.

IKATAN MATERIAL UNTUK BELANJA MODAL

Sampai dengan 31 Desember 2025, Perseroan tidak memiliki komitmen material terkait investasi barang modal. Dengan demikian, informasi mengenai tujuan investasi, sumber pendanaan, denominasi mata uang, serta strategi mitigasi risiko atas eksposur mata uang asing tidak disajikan.

MATERIAL COMMITMENTS FOR CAPITAL EXPENDITURE

As of December 31, 2025, the Company had no material commitments related to capital investments. Accordingly, information regarding investment objectives, funding sources, currency denomination, and foreign exchange risk mitigation strategies is not applicable.

REALISASI BELANJA MODAL

Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan belanja modal sebesar Rp878 miliar. Belanja modal tersebut dialokasikan untuk mendukung ekspansi bisnis Perseroan, khususnya dalam kegiatan penyewaan menara telekomunikasi dan usaha terkait lainnya. Realisasi belanja modal ini sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan serta kebutuhan pengembangan aset jangka panjang. Informasi lebih lengkap terkait belanja modal yang direalisasikan di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

CAPITAL EXPENDITURE REALIZATION

During 2025, the Company realized capital expenditures totaling Rp878 billion. Capital expenditure was allocated to support business expansion, primarily in telecommunications tower leasing and other related business activities. This level of investment is consistent with the Company's growth strategy and long-term asset development requirements as follows:

Tinjauan Keuangan
Financial Review

Dalam Juta Rupiah | In Million Rupiah

Uraian Description	2024	2025
Menara dan Sarana Penunjang | Towers and Support Facilities	1.789	2.907
Menara Bergerak | Mobile Towers	1.145	557
Peralatan dan Perabotan Kantor | Office Equipment and Furniture	792	738
Kendaraan Bermotor | Motor Vehicles	1.244	650
Aset dalam Penyelesaian | Assets under Construction	142.658	873.422
Jumlah | Total	**147.628**	**878.274**

INFORMASI DAN/ATAU FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, selain dari informasi atau fakta material yang telah diungkapkan oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Peraturan Pasar Modal.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Kebijakan Dividen

Dalam menetapkan kebijakan dividen, Perseroan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain kondisi keuangan, tingkat profitabilitas, kebutuhan biaya operasional, serta rencana investasi yang sedang dan akan dilaksanakan. Penetapan besaran dan waktu pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan. Pembagian dividen ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

Dividen Tahun Buku 2024

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 23 April 2025, Perseroan memutuskan untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba tahun buku 2024. RUPS menetapkan seluruh laba bersih tahun buku 2024 sebagai saldo laba untuk mendukung pembiayaan kegiatan usaha dan kebutuhan operasional Perseroan.

INFORMATION AND/OR MATERIAL FACTS AFTER THE DATE OF THE AUDITOR'S REPORT

There were no material information and/or facts occurring after the date of the auditor's report, other than the information or material facts that have been disclosed by the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, particularly the Capital Market regulations.

DIVIDEND AND DIVIDEND POLICY

Dividend Policy

In determining its dividend policy, the Company considers various factors, including financial condition, profitability levels, operating cost requirements, and current and planned investment programs. The amount and timing of dividend distributions are subject to resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and are carried out in accordance with prevailing laws and regulations.

The Company may distribute interim dividends before the end of the Company's financial year, taking into account the projected profit and the Company's financial capability. The distribution of dividends is determined based on a resolution of the Board of Directors after obtaining the approval of the Board of Commissioners.

Dividend for Fiscal Year 2024

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on April 23, 2025, the Company resolved not to distribute dividends to shareholders for fiscal year 2024. The GMS approved the retention of the entire net profit for fiscal year 2024 as retained earnings to support the Company's business activities and operating requirements.

Dividen Tahun Buku 2023

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada tanggal 24 Juni 2024, Perseroan juga tidak membagikan dividen kepada pemegang saham atas laba tahun buku 2023. Laba bersih tahun tersebut dibukukan sebagai saldo laba atau laba ditahan guna mendukung pelaksanaan rencana bisnis Perseroan.

Dividend for Fiscal Year 2023

Based on the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders held on June 24, 2024, the Company also did not distribute dividends to shareholders for fiscal year 2023. Net profit for the year was recorded as retained earnings to support the Company's business plans.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Selama tahun buku 2025, Perseroan tidak melakukan penawaran umum saham maupun obligasi, serta tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana. Oleh karena itu, Perseroan tidak mengungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum dalam Laporan Tahunan ini.

USE OF PROCEEDS FROM PUBLIC OFFERINGS

During fiscal year 2025, the Company did not conduct any public offerings of shares or bonds and, accordingly, was not required to report on the use of proceeds. As such, no disclosure regarding the utilization of proceeds from public offerings is presented in this Annual Report.

INFORMASI MATERIAL ANTARA LAIN MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Selama tahun 2025, tidak terdapat informasi material mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi atau restrukturisasi utang/modal.

MATERIAL INFORMATION INCLUDING INFORMATION ON INVESTMENT, EXPANSION, DIVESTMENT, MERGER/CONSOLIDATION, ACQUISITION, OR DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

During 2025, there was no material information regarding investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, or debt/capital restructuring.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI AFILIASI, DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, Perseroan tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Guna memastikan transaksi pihak berelasi (transaksi afiliasi) Perseroan dijalankan secara wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum *(arm's length),* Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

(i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
(ii) Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
(iii) Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan; dan

MATERIAL INFORMATION REGARDING MATERIAL TRANSACTIONS, AFFILIATED TRANSACTIONS, AND CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS

During 2025, the Company did not carry out any material transactions involving conflicts of interest.

To ensure that the Company's related party transactions (affiliated transactions) are conducted fairly and in accordance with generally accepted business practices (arm's length), the Company refers to the prevailing laws and regulations, including:

(i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies;
(ii) OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities;
(iii) OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions; and

(iv) Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00087/BEI/12-2025 tentang Perubahan Peraturan No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan No. 34 atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, melakukan penelaahan dan memastikan bahwa setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi ambang batas tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang wajar serta berdasarkan prinsip *arm's length*, sebagaimana halnya transaksi dengan pihak ketiga yang tidak berelasi.

(iv) Decree of the Board of Directors of the Indonesia Stock Exchange No. Kep-00087/BEI/12-2025 concerning Amendments to Regulation No. I-E regarding Information Submission Obligations.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in Note No. 34 to the Company's Financial Statements for the year ended December 31, 2025.

The Board of Commissioners, based on the recommendation of the Audit Committee, reviews and ensures that every transaction with related parties meeting certain thresholds in accordance with the prevailing laws and regulations is carried out on fair terms and conditions and based on the arm's length principle, as would be the case for transactions with unrelated third parties.

TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025, SERTA PROYEKSI TAHUN 2026

Perseroan telah menyusun dan menetapkan target kinerja tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis tahun 2025. Evaluasi atas realisasi kinerja tahun 2025 serta proyeksi kinerja tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja dan perencanaan ke depan. Realisasi dan proyeksi tersebut mencerminkan asumsi manajemen atas kondisi operasional, dinamika industri, serta kapasitas keuangan Perseroan sebagai berikut:

2025 TARGETS AND REALIZATION, AS WELL AS 2026 OUTLOOK

The Company established its performance targets for 2025 as set out in the 2025 Business Plan. An assessment of the actual performance achieved in 2025 and the outlook for 2026 is conducted as part of management's ongoing performance monitoring and forward planning. The actual results and projections reflect management's assumptions regarding operating conditions, industry dynamics, and the Company's financial capacity as follows:

Dalam Miliaran Rupiah | In Billions Rupiah

Uraian Description	2025			**Proyeksi 2026** 2026 Projection
	Target	**Realisasi** Realization	**Pencapaian (%)** Achievement (%)	
Pendapatan | Revenue	1.813	1.911	105	1.842
EBITDA	1.675	1.793	107	1.716
Laba (Rugi) | Profit (Loss)	1.186	1.325	112	920
Struktur Modal | Capital Structure	10.004	9.557	96	9.830

PERUBAHAN PERATURAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat perubahan peraturan pemerintah maupun ketentuan otoritas pasar modal yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, atau kinerja operasional Perseroan.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan sejumlah amandemen atas standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2025, antara lain:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Penerapan amandemen standar akuntansi tersebut tidak mengakibatkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian, baik pada tahun berjalan maupun periode sebelumnya.

CHANGES IN REGULATIONS WITH A SIGNIFICANT IMPACT ON THE COMPANY

Throughout 2025, there were no changes in government regulations or capital market authority requirements that had a significant impact on the Company's business activities, financial condition, or operating performance.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

The Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK IAI) issued amendments to financial accounting standards that became effective on or after January 1, 2025, including:

- PSAK 117: Insurance Contracts; and
- Amendments to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

New financial accounting standards and amendments that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on January 1, 2025, and for which early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure"; and
- PSAK 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements".

The adoption of these amendments did not result in any substantive changes to the Group's accounting policies and did not have a material impact on the consolidated financial statements for the current or prior periods.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Sebagai Perseroan yang terus berkembang di sektor teknologi dan telekomunikasi, STP memandang peran SDM sebagai salah satu penopang utama dalam mendukung pelaksanaan strategi bisnis, pertumbuhan usaha, dan inovasi perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan terus memperkuat kesiapan internal melalui rekrutmen yang selektif, pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, penguatan budaya kerja, serta penyediaan lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif guna membangun tim yang solid, adaptif, dan kompeten.

As a company that continues to grow in the technology and telecommunications sector, STP views HR as one of the key pillars supporting the execution of business strategy, business growth, and corporate innovation. Accordingly, the Company continues to strengthen its internal readiness through selective recruitment, continuous competency development, the reinforcement of work culture, and the provision of an inclusive and collaborative work environment in order to build a solid, adaptive, and competent team.



STRATEGI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan strategi manajemen SDM yang unggul, mandiri, kompetitif, dan profesional, STP berfokus pada pengembangan SDM yang mampu mengidentifikasi peluang dan mengimplementasikannya guna menghasilkan manfaat optimal bagi Perseroan. SDM yang dibutuhkan di masa depan harus memiliki kriteria yang selaras dengan visi, misi, dan budaya perusahaan, serta mampu mendukung kesiapan internal Perseroan dalam menjalankan strategi bisnis. Oleh karena itu, kompetensi yang relevan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, penguatan inovasi, serta kesiapan mendukung transformasi digital menjadi prioritas, agar setiap karyawan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan komitmen untuk mencapai hasil terbaik dengan tetap berlandaskan pada budaya perusahaan, nilai etika, dan peraturan yang berlaku.

Dalam pengelolaan SDM, STP menerapkan kebijakan yang berlandaskan pada prinsip kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh individu. Sebagai wujud komitmen terhadap keberagaman dan inklusi, Grup SMN secara tegas melarang segala bentuk diskriminasi maupun pelecehan yang berkaitan dengan ras, warna kulit, agama, keyakinan politik, kebangsaan, status sosial, kondisi fisik, status perkawinan, kehamilan, maupun jenis kelamin.

STP juga berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu, termasuk dalam pemberian remunerasi dan manfaat lainnya, tanpa membedakan status maupun latar belakang apa pun. Kebijakan ini disusun untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, seimbang, serta mendorong peningkatan kinerja karyawan secara menyeluruh.

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI MANAJEMEN SDM

REKRUTMEN

Untuk mendukung visi dan misi perusahaan serta mewujudkan kinerja yang optimal, STP menempatkan pengelolaan SDM yang unggul dan kompeten sebagai prioritas. Perseroan melaksanakan proses rekrutmen secara transparan dan selektif dengan menjunjung prinsip kesetaraan, sehingga seluruh calon karyawan memperoleh kesempatan yang sama berdasarkan kualifikasi yang telah ditetapkan tanpa adanya

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES

To realize an HR management strategy that is excellent, independent, competitive, and professional, STP focuses on developing HR capable of identifying opportunities and implementing them in order to generate optimal benefits for the Company. The HR needed in the future must meet criteria aligned with the Company's vision, mission, and corporate culture, while also supporting the Company's internal readiness in executing its business strategy. Accordingly, relevant competencies, adaptability to change, stronger innovation, and readiness to support digital transformation are prioritized so that each employee can carry out their duties and responsibilities with a commitment to achieving the best results, while remaining guided by the corporate culture, ethical values, and applicable regulations.

In managing Human Resources, STP implements policies based on the principles of equality and equal opportunity for all individuals. As part of its commitment to diversity and inclusion, the SMN Group strictly prohibits all forms of discrimination or harassment related to race, skin color, religion, political belief, nationality, social status, physical condition, marital status, pregnancy, or gender.

STP is also committed to providing equal opportunities for every individual, including in the provision of remuneration and other benefits, without distinction of any status or background. This policy is designed to create a fair and balanced work environment and to encourage the overall improvement of employee performance.

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT POLICIES AND IMPLEMENTATION

RECRUITMENT

To support the Company's vision and mission and to achieve optimal performance, STP prioritizes the management of excellent and competent Human Resources. The Company carries out recruitment in a transparent and selective manner by upholding the principle of equality, thereby providing equal opportunities for all candidates based on the established qualifications without discrimination.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

diskriminasi. Proses rekrutmen ini dilakukan untuk memastikan bahwa talenta terbaik, yaitu individu yang memiliki potensi dan prestasi, ditempatkan pada posisi yang tepat serta selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan.

This recruitment process is conducted to ensure that the best talent, namely individuals with potential and achievement, is placed in the right position and aligned with the Company's long-term objectives.

Dalam pelaksanaan rekrutmen karyawan baru, STP membaginya ke dalam 2 (dua) kategori utama, yaitu:
1. Rekrutmen profesional yang memiliki keahlian di bidang tertentu; dan
2. Rekrutmen *fresh graduate* yang siap untuk dikembangkan.

In recruiting new employees, STP classifies the process into 2 (two) main categories, namely:
1. Recruitment of professionals with expertise in specific fields; and
2. Recruitment of fresh graduates who are ready to be developed.

Sumber rekrutmen yang digunakan berasal dari dua jalur utama, yaitu internal dan eksternal. Sumber internal mencakup karyawan yang telah bekerja di Perseroan, baik dengan status karyawan tetap, alih daya, maupun magang. Sumber eksternal terdiri dari calon karyawan yang belum bekerja di Perseroan, yang diperoleh melalui pencarian individu dengan kualifikasi khusus yang dapat memperkuat citra perusahaan.

The recruitment sources used come from two main channels: internal and external. Internal sources include employees already working for the Company, whether permanent employees, outsourced personnel, or interns. External sources consist of candidates who have not yet worked for the Company and are obtained through the search for individuals with specific qualifications who can strengthen the Company's image.

Untuk mendukung hal tersebut, STP melaksanakan rekrutmen melalui beberapa program, di antaranya *Campus Hiring*. Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan talenta sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan saat ini, sekaligus memastikan ketersediaan talenta yang dipersiapkan untuk menjadi *leaders* di masa mendatang.

To support this effort, STP conducts recruitment through several programs, including Campus Hiring. The implementation of this program is intended to ensure the availability of talent in accordance with the Company's current business needs, while also ensuring the availability of talent prepared to become leaders in the future.

Pemenuhan kebutuhan karyawan STP dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya:
1. LinkedIn
2. Jobstreet
3. *Career Page*

STP fulfills its employee needs through several channels, including:
1. LinkedIn
2. Jobstreet
3. Career Page



Sepanjang tahun 2025, Perseroan tidak melakukan kegiatan perekrutan karyawan baru. Informasi perekrutan berdasarkan kategori usia dan wilayah operasional adalah sebagai berikut:

Throughout 2025, the Company did not conduct any new employee recruitment. Information on recruitment by age category and operational area is as follows:

Kepegawaian Employment	2023				2024				2025			
	Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees				Karyawan Masuk Recruited Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F
Karyawan Berdasarkan Usia | Employees by Age												
18 - 25 tahun | years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 tahun | years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 - 45 tahun | years old	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 - 55 tahun | years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
>55 tahun | years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah | Total	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional | Employees by Operational Area												
Kantor Pusat – Kudus Head Office - Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah | Total	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Tingkat Perekrutan Karyawan (%) Employee Recruitment Rate (%)	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Selain itu, berikut informasi karyawan yang keluar selama tahun 2025. Data tersebut menunjukkan jumlah karyawan yang berhenti bekerja dari STP:

In addition, the following presents information on employee exits in 2025. The data indicates the number of employees who exited STP:

Kepegawaian Employment	2023				2024				2025			
	Karyawan Keluar Exited Employees				Karyawan Keluar Exited Employees				Karyawan Keluar Exited Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F
Karyawan Berdasarkan Usia | Employees by Age												
18 - 25 tahun | years old	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - 35 tahun | years old	1	0	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0
36 - 45 tahun | years old	2	2	1	1	3	0	0	1	10	2	0	0
46 - 55 tahun | years old	2	1	0	0	3	0	0	0	7	0	0	0

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Kepegawaian Employment	2023				2024				2025			
	Karyawan Keluar Exited Employees				Karyawan Keluar Exited Employees				Karyawan Keluar Exited Employees			
	Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract		Permanen Permanent		Kontrak Contract	
	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F	L/M	P/F
>55 tahun | years old	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Jumlah | Total	**8**	**3**	**4**	**3**	**6**	**0**	**1**	**1**	**19**	**2**	**3**	**0**
Karyawan Berdasarkan Wilayah Operasional | Employees by Operational Area												
Kantor Pusat – Kudus Head Office - Kudus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kantor Cabang – Menara BCA, Menara Pertiwi dan Kantor Representatif Branch Offices – Menara BCA, Menara Pertiwi and Representative Office	8	3	4	3	6	0	1	1	19	2	3	0
Jumlah | Total	**8**	**3**	**4**	**3**	**6**	**0**	**1**	**1**	**19**	**2**	**3**	**0**
Tingkat Karyawan Keluar (%) Employee Resignation Rate (%)	**44.4%**	**16.7%**	**22.2%**	**16.7%**	**75%**	**0%**	**12.5%**	**12.5%**	**79,2%**	**8,3%**	**12,5%**	**0,0%**

Turnover Karyawan
Employee Turnover

Uraian Description	2023			2024			2025		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total	Laki-laki Male	Perempuan Female	Total
Jumlah Karyawan Masuk Total New Recruited Employees	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Karyawan Keluar | Exited Employees									
Atas Permintaan Sendiri Own Request	4	1	5	5	0	5	1	0	1
Diberhentikan oleh Perseroan Terminated by the Company	2	2	4	1	0	1	20	2	22
Pensiun Pension	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Habis Kontrak Contract Expiration	5	3	8	1	1	2	1	0	1
Lain-lain Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah | Total	**12**	**6**	**18**	**7**	**1**	**8**	**22**	**2**	**24**
Tingkat Turn Over Karyawan (%) Employee Turnover Rate (%)	**2,4%**	**0,6%**	**3,0%**	**3,0%**	**0%**	**3,0%**	**0,7%**	**0,0%**	**0,7%**

KEBERAGAMAN KARYAWAN

Dalam pengelolaan SDM, STP terus berupaya membangun lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung keberagaman. Berikut disajikan tabel keberagaman karyawan:

EMPLOYEE DIVERSITY

In managing HR, STP seeks to foster an inclusive work environment that supports diversity. The following table presents employee diversity:

Proporsi Proportional	2023		2024		2025	
A. Dewan Komisaris dan Direksi | Board of Commissioners and Board of Directors						
Berdasarkan Usia | By Age						
18 - 25 tahun | years old	0	0%	0	0%	0	0%
26 - 35 tahun | years old	0	0%	0	0%	0	0%
36 - 45 tahun | years old	0	0%	1	14%	0	0%
46 - 55 tahun | years old	5	71%	5	72%	5	71%
>55 tahun | years old	2	29%	1	14%	2	29%
Berdasarkan *Gender* | By Gender						
Laki-laki | Male	6	86%	6	86%	6	86%
Perempuan | Female	1	14%	1	14%	1	14%
B. Karyawan | Employees						
Berdasarkan Usia | By Age						
18 - 25 tahun | years old	3	2%	1	1%	0	0%
26 - 35 tahun | years old	50	26%	39	23%	31	21%
36 - 45 tahun | years old	90	47%	83	48%	73	50%
46 - 55 tahun | years old	43	23%	44	25%	41	28%
>55 tahun | years old	4	2%	5	3%	2	1%
Berdasarkan *Gender* | By Gender						
Laki-laki | Male	126	66%	112	65%	90	61%
Perempuan | Female	64	34%	60	35%	57	39%

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Untuk mendukung peningkatan kompetensi karyawan dan efektivitas operasional, STP menyediakan berbagai program pelatihan dan pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan pegawai dan perusahaan. Divisi HR telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendidikan dan Pelatihan yang mencakup penyusunan silabus berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan (*Training Need Analysis*). Program pelatihan tersebut dirancang untuk dilaksanakan sepanjang tahun guna terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan karyawan, termasuk dalam memperkuat kompetensi teknis, kepemimpinan, manajerial, serta literasi digital sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan.

COMPETENCY DEVELOPMENT

To support employee competency enhancement and operational effectiveness, STP provides various training and development programs tailored to employee and Company needs. The HR Division has established the Standard Operating Procedure (SOP) for Education and Training, which includes syllabus development based on Training Need Analysis. These training programs are designed to be carried out throughout the year to continuously improve employee skills and knowledge, including strengthening technical, leadership, managerial, and digital literacy competencies in line with the Company's business needs.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Perseroan juga menerapkan inovasi dalam pengembangan kompetensi karyawan melalui pemanfaatan aplikasi *Learning Management System* (LMS) bernama *MyLearning*. Seiring dengan upaya optimalisasi proses pembelajaran, Perusahaan kemudian melakukan transisi ke *platform LinkedIn Learning.*

The Company also implements innovation in employee competency development through the use of a Learning Management System (LMS) application called MyLearning. As part of efforts to optimize the learning process, the Company subsequently transitioned to the LinkedIn Learning platform.

Platform ini memungkinkan karyawan untuk mengakses pelatihan kapan saja dan di mana saja, sehingga memperluas jangkauan serta meningkatkan fleksibilitas pembelajaran. Selain itu, fitur *artificial intelligence* dan otomasi yang tersedia pada *LinkedIn Learning* turut mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses *learning and development*. Topik pelatihan yang difokuskan melalui platform ini meliputi keterampilan kepemimpinan, manajerial, perilaku, serta teknis yang mendukung kinerja Perusahaan. Selain pemanfaatan platform e-*learning,* Perseroan juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan tatap muka, baik secara internal maupun bekerja sama dengan pihak ketiga, untuk semakin meningkatkan kemampuan teknis dan operasional karyawan.

This platform enables employees to access training anytime and anywhere, thereby expanding reach and enhancing learning flexibility. In addition, the artificial intelligence and automation features available on LinkedIn Learning support improved operational efficiency and effectiveness in the learning and development process. The training topics delivered through this platform focus on leadership, managerial, behavioral, and technical skills that support the Company's performance. Apart from the use of e-learning platforms, the Company also regularly conducts face-to-face training, both internally and in collaboration with third parties, to further enhance employees' technical and operational capabilities.

Melalui pendekatan tersebut, Perseroan mendorong terbentuknya karyawan yang adaptif terhadap perubahan, inovatif, serta memiliki kompetensi yang relevan untuk mendukung.

Through this approach, the Company fosters the development of employees who are adaptive to change, innovative, and equipped with relevant competencies to support the Company's sustainable growth.

Secara keseluruhan, jumlah pelatihan yang diselenggarakan pada tahun 2025, baik secara *online* maupun *offline* oleh *inhouse* maupun eksternal, tercatat sebanyak 81 pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 127 peserta. Pelatihan ini disesuaikan dengan level jabatan karyawan, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini, antara lain:

In total, the number of training programs conducted in 2025, both online and offline, by in-house and external providers, amounted to 81 programs with a total of 127 participants. These training programs were tailored to employee position levels, as indicated in the table below, including:

Pengembangan Kompetensi untuk Level *Non-Manager*
Competency Development for Non-Manager Level

Nama Pelatihan Training Name	**Jumlah Peserta** Total Participants	**Bidang Kompetensi** Areas of Competence	**Tujuan** Purpose
Peran Internal Audit dalam Proses *Due Diligence* dan Aspek Keuangan Vendor The Role of Internal Audit in the Due Diligence Process and Vendor Financial Aspects	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan internal auditor untuk melakukan *due diligence* dan aspek keuangan vendor. To enhance internal auditors' capability in conducting due diligence and assessing vendor financial aspects.
Analyzing & Visualizing Data with Power BI	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan analisa menggunakan Power BI. To improve data analysis skills using Power BI.
6 Critical Practices Every Leader Needs	2	*Managerial*	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan. To develop leadership competencies.

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Active Listening	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan mendengar aktif untuk mendukung komunikasi. To improve active listening skills for better communication.
Analyzing Data and Provide Insight	3	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan analisa data. To improve data analysis skills.
Building Adaptibility and Resilience for Growth	8	*Core*	Mengembangkan kemampuan adaptasi dan resiliensi. To develop adaptability and resilience skills.
Charismatic & Impactful Communication	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. To improve effective and impactful communication skills.
Collaborative Innovation	7	*Core*	Meningkatkan kompetensi kolaborasi dan inovasi. To enhance collaboration and innovation competencies.
Communication: Dealing with Clients	3	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan hubungan dengan klien. To improve communication and client relationship skills.
Designing Impactful Excel Dashboards	4	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan menggunakan Excel Dashboard. To improve skills in creating Excel dashboards.
Driving Result Through Performance Management Essentials	1	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan mengelola kinerja. To improve performance management skills.
Effective Communication	3	*Behavioral*	Meningkatkan keterampilan komunikasi profesional. To improve professional communication skills.
English Report and Presentation	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan keterampilan bahasa Inggris dalam laporan dan presentasi. To improve English skills in reporting and presentations.
Enhancing Fundamental Excel Functions	8	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan menggunakan Microsoft Excel. To improve Microsoft Excel skills.
ESG *Awareness: ESG 101 Paving the Sustainability Journey of SMN Group*	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman terkait ESG. To enhance understanding of ESG.
Focus, Measure, Execute: A Practical Guide to 4DX	1	*Core*	Meningkatkan kemampuan eksekusi kerja yang optimal. To improve execution performance skills.
Growth Mindset	10	*Behavioral*	Mengembangkan pola pikir untuk terus maju. To develop a growth mindset.
Harrison *Assessments Talent Solution* (HATS)	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan menggunakan Harrison Assessment. To improve the use of Harrison Assessment tools.
HR *Cycle for Everyday Work*	4	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman fungsi HR dalam pekerjaan sehari-hari. To enhance understanding of HR functions in daily work.
Incident Investigation	9	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan investigasi insiden. To improve incident investigation skills.
Innovation	6	*Core*	Meningkatkan kompetensi inovasi. To enhance innovation competencies.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
ISO 22301 (*Business Continuity Management System*)	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman *business continuity*. To enhance understanding of business continuity management.
ISO 55001 *Awareness*	15	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman ISO 55001. To improve understanding of ISO 55001.
Know Your Customer	6	*Core*	Meningkatkan kompetensi *Know Your Customer*. To enhance Know Your Customer competencies.
LinkedIn *Learning*	19	*Behavioral*	Meningkatkan pengetahuan teknis dan non-teknis secara e-*learning*. To enhance both technical and non-technical knowledge through e-learning.
Mastering Business Negotiation	4	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan negosiasi bisnis. To improve business negotiation skills.
Optimizing Data Processing with Advanced Features in Excel	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan analisa data menggunakan Excel. To improve advanced Excel data processing skills.
Optimizing Leadership Readiness	1	*Managerial*	Mengembangkan kesiapan kepemimpinan. To develop leadership readiness.
Pelatihan Dasar K3 Umum General OHS Basic Training	5	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang K3. To enhance understanding of occupational health and safety.
Practice to Dealing with Difficult People	7	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan menghadapi orang sulit. To improve interpersonal skills in handling difficult people.
Project Management Essentials for Execution Excellence	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman dasar project management. To improve basic project management skills.
Public Speaking & Presentation Skill	5	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan public speaking dan presentasi. To enhance public speaking and presentation skills.
Responsive & Rational Problem Solving	8	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. To improve problem-solving skills.
Self Learning	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan belajar mandiri. To improve self-learning competencies.
The 7 Habits: Leader Implementation	3	*Managerial*	Mengembangkan kemampuan kepemimpinan. To develop leadership effectiveness.
The Art of Leading Up	5	*Managerial*	Meningkatkan komunikasi dengan atasan. To improve communication with superiors.
The Essentials of Project Management	7	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman dasar *project management*. To improve basic project management knowledge.
Veeam Data *Cloud* (VDC)	7	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kompetensi Veeam Data Cloud. To improve knowledge of Veeam Data Cloud.
Workshop KUHP 2023 2023 Criminal Code Workshop	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman KUHP terbaru. To enhance understanding of the updated Criminal Code.

Pengembangan Kompetensi untuk Level *Manager*

Competency Development for Manager Level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
[Sharing Session] Peran Internal Audit dalam Proses *Due Diligence* dan Aspek Keuangan Vendor [Sharing Session] The Role of Internal Audit in the Due Diligence Process and Vendor Financial Aspects	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan internal auditor untuk melakukan *due diligence* dan aspek keuangan vendor. To enhance internal auditors' capability in conducting due diligence and assessing vendor financial aspects.
6 Critical Practices Every Leader Needs Batch 2	2	*Managerial*	Mengembangkan kompetensi kepemimpinan. To develop leadership competencies.
Aligning Business Strategy & Operational Implementation	4	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman bisnis dan operasional. To improve understanding of business strategy and operations.
Annual Budget Planning (ABP) *for Competitive Advantage*	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan membuat rencana anggaran yang strategis. To improve skills in strategic budget planning.
Business Acumen *Batch 2*	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang *business* acumen. To enhance understanding of business acumen.
Coaching Skills for Effective Leadership	3	*Managerial*	Mengembangkan kemampuan pemimpin untuk melakukan *coaching*. To develop leaders' coaching capabilities.
Collaborative Innovation	1	*Core*	Meningkatkan kompetensi kolaborasi dan inovasi. To enhance collaboration and innovation competencies.
Communication: Dealing with Clients	4	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan dengan klien. To improve communication and client relationship skills.
Develop High Performance Behaviour (7 Habits)	1	*Managerial*	Mengembangkan kemampuan menunjukkan kinerja yang baik. To develop high-performance behavior.
Driving Result Through Performance Management Essentials	3	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan untuk mengelola kinerja. To improve performance management skills.
ESG *Awareness:* ESG 101 *Paving the Sustainability Journey of SMN Group*	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman terkait ESG. To enhance understanding of ESG.
Finance Fundamentals for Better Leadership	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang keuangan. To improve financial knowledge for leadership.
Growth Mindset	2	*Behavioral*	Mengembangkan pola pikir untuk terus maju. To develop a growth mindset.
HR *Insights for* Non-HR *Professionals*	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang fungsi HR untuk para pemimpin. To improve understanding of HR functions for non-HR professionals.
HR Management for Non *HR Leaders*	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang fungsi HR dan penerapannya dalam pekerjaan sehari-hari. To improve understanding of HR functions in daily work.
Incident Investigation	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan investigasi insiden. To improve incident investigation skills.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Innovative Problem Solving	3	*Behavioral*	Meningkatkan kompetensi inovasi dengan pengambilan keputusan. To enhance innovation and decision-making skills.
Internal Audit ISO 9001, ISO 45001 & ISO 14001	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman peserta terkait ISO 9001, ISO 45001 & ISO 14001. To improve understanding of ISO standards.
ISO 22301 (*Business Continuity Management System*)	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman peserta terkait ISO 22301. To enhance understanding of business continuity management.
ISO 55001 *Awareness*	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman peserta terkait ISO 55001. To improve understanding of ISO 55001.
ISO: 19011 (*The standard that sets forth guidelines for auditing management systems*)	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman peserta terkait ISO 19011. To enhance knowledge of auditing management systems.
LinkedIn *Learning*	13	*Behavioral*	Meningkatkan pengetahuan teknis dan non-teknis secara e-*learning*. To enhance technical and non-technical knowledge through e-learning.
Optimizing Data Processing with Advanced Features in Excel	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan analisa data menggunakan Excel. To improve advanced Excel data processing skills.
Optimizing Leadership Readiness	2	*Managerial*	Mengembangkan kesiapan kepemimpinan. To develop leadership readiness.
Optimizing Team Performance & Building Trust	2	*Core*	Meningkatkan kemampuan mengelola tim. To improve team performance and trust-building.
Project Management: Leading Multi Project Delivery	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang project management yang lebih kompleks. To improve advanced project management skills.
Public Speaking & Presentation Skill	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan kemampuan public speaking dan presentasi. To enhance public speaking and presentation skills.
Strategic & Transformational Problem Solving	3	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan membuat keputusan yang strategis. To improve strategic decision-making skills.
Strategic Business Planning & Analysis	3	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan membuat rencana dan analisa bisnis. To improve business planning and analysis skills.
Strategic Planning Through Critical Thinking	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. To enhance critical thinking skills.

Pengembangan Kompetensi untuk Level General Manager
Competency Development for General Manager Level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Aligning Strategic Relationship Management in the Workplace Batch	5	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan berhubungan dengan orang lain secara strategis. To enhance strategic relationship management skills.
Business Acumen	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang business acumen. To enhance understanding of business acumen.
Charismatic & Impactful Communication	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan komunikasi untuk pemimpin. To improve communication skills for leaders.
Communication: Dealing with Clients	4	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan dengan klien. To improve communication and client relationship skills.
Driving Result Through Performance Management Essentials	1	*Managerial*	Meningkatkan kemampuan untuk mengelola kinerja. To improve performance management skills.
HR Insights for Non-HR Professionals	3	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang fungsi HR untuk para pemimpin. To improve understanding of HR functions for non-HR professionals.
LinkedIn Learning	3	*Behavioral*	Meningkatkan pengetahuan teknis dan non-teknis secara e-*learning*. To enhance technical and non-technical knowledge through e-learning.
Optimizing Team Performance & Building Trust	2	*Core*	Meningkatkan kemampuan mengelola tim. To improve team performance and trust-building.
Strategic & Transformational Problem Solving	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan membuat keputusan yang strategis. To improve strategic decision-making skills.

Pengembangan Kompetensi untuk Level Chief/VP
Competency Development for Chief/VP Level

Nama Pelatihan Training Name	Jumlah Peserta Total Participants	Bidang Kompetensi Areas of Competence	Tujuan Purpose
Business Acumen	2	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang *business* acumen. To enhance understanding of business acumen.
Communication: Dealing with Clients	1	*Behavioral*	Meningkatkan kemampuan komunikasi dan membangun hubungan dengan klien. To improve communication and client relationship skills.
HR Insights for Non-*HR Professionals*	1	*Technical/ Functional*	Meningkatkan pemahaman tentang fungsi HR untuk para pemimpin. To improve understanding of HR functions for non-HR professionals.
LinkedIn Learning	1	*Behavioral*	Meningkatkan pengetahuan teknis dan non-teknis secara e-*learning*. To enhance technical and non-technical knowledge through e-learning.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Pelatihan untuk Purnabakti

STP juga menyediakan program pelatihan yang tidak hanya berfokus pada pengembangan kapabilitas karyawan selama masa kerja, tetapi juga bagi karyawan yang akan memasuki masa purnabakti. Program yang disusun secara menyeluruh ini ditujukan untuk membekali karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat menjalani masa purnabakti dengan lebih sejahtera dan produktif, termasuk membantu karyawan menghadapi masa pensiun dengan kesiapan yang lebih baik dari sisi psikologis, kesehatan, maupun keuangan.

Pada tahun 2025, program pelatihan purnabakti yang telah diselenggarakan oleh STP adalah sebagai berikut:

1. Muda Cuan, Masa Depan Aman – 4 Juni 2025
   Pembicara: Liawina Hananto
   Sesi ini membahas investasi serta pentingnya mempersiapkan masa depan keuangan sejak dini. Melalui topik tersebut, karyawan memperoleh pemahaman mengenai langkah-langkah pengelolaan keuangan yang lebih bijak guna membangun masa depan yang aman dan terencana.

2. Strong Today, Steady Tomorrow – 11 Juni 2025
   Pembicara: dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K
   Pada sesi ini, pembahasan difokuskan pada aspek kesehatan sebagai landasan dalam menjaga kualitas hidup saat ini maupun di masa mendatang. Materi yang disampaikan membantu karyawan memahami pentingnya menjaga kondisi fisik dan kesehatan secara berkelanjutan agar tetap kuat dan produktif.

3. Smart In, Wise Out: Persiapan Finansial Pensiun – 3 September 2025
   Pembicara: Vita Sabrina
   Sesi ini membahas persiapan finansial menjelang pensiun, termasuk cara mengelola pemasukan dan pengeluaran secara bijak. Melalui topik ini, karyawan memperoleh wawasan mengenai strategi perencanaan keuangan yang lebih matang untuk menghadapi masa pensiun secara aman dan nyaman.

Biaya Pengembangan Kompetensi

Pada tahun 2025, total biaya yang dikeluarkan untuk program pelatihan dan pengembangan mencapai Rp360,32 juta, yang mencerminkan realisasi yang lebih optimal dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp405,87 juta. Hal ini sejalan dengan

Retirement Training Program

STP also provides training programs that focus not only on developing employee capabilities during their employment period, but also on employees who are approaching retirement. This comprehensively designed program is intended to equip employees with the skills and knowledge needed to undergo retirement more prosperously and productively, including helping employees face retirement with better preparedness from psychological, health, and financial perspectives.

In 2025, the pre-retirement training programs organized by STP were as follows:

1. Muda Cuan, Masa Depan Aman – June 4, 2025
   Speaker: Liawina Hananto
   This session discussed investment and the importance of preparing for one's financial future from an early stage. Through this topic, employees gained an understanding of wiser financial management measures to build a secure and well-planned future.

2. Strong Today, Steady Tomorrow – June 11, 2025
   Speaker: dr. Dion Haryadi, PN1, CHC, AIFO-K
   This session focused on health aspects as the foundation for maintaining quality of life both today and in the future. The material presented helped employees understand the importance of maintaining physical condition and health on an ongoing basis in order to remain strong and productive.

3. Smart In, Wise Out: Persiapan Finansial Pensiun – September 3, 2025
   Speaker: Vita Sabrina
   This session discussed financial preparation ahead of retirement, including ways to manage income and expenses wisely. Through this topic, employees gained insight into more comprehensive financial planning strategies to face retirement in a secure and comfortable manner.

Competency Development Cost

In 2025, the total cost incurred for training and development programs amounted to Rp360.32 million, reflecting a more optimized realization compared to Rp405.87 million in the previous year. This was in line with the Company's approach

pendekatan Perseroan dalam menerapkan program pengembangan kompetensi yang lebih terfokus dan efisien, sekaligus terus memperkuat kapabilitas karyawan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

to implementing more focused and efficient competency development programs, while continuing to strengthen employee capabilities in support of sustainable business growth.

Biaya Pengembangan Kompetensi
Competence Development Cost

Uraian Description	Satuan Unit	2023	2024	2025
Biaya Pelatihan Training Costs	Rp-Juta Rp-Million	180,98	405,87	360,32

PENGEMBANGAN KARIR

STP merancang program pengembangan karier untuk menyiapkan, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan agar dapat memberikan kontribusi optimal, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Saat ini, Perusahaan memiliki program pengembangan karier yang tersusun secara terstruktur dan berjenjang, mulai dari tingkat jabatan awal hingga eksekutif, yang disiapkan untuk mengisi posisi-posisi kosong sesuai kebutuhan organisasi. Pengembangan karier tersebut didasarkan pada dua aspek utama, yaitu kompetensi yang diukur melalui penilaian berkala dan kinerja individu yang dinilai melalui sistem yang terstandarisasi.

Pelaksanaan pengembangan karier berlaku bagi seluruh karyawan tanpa diskriminasi, baik untuk promosi vertikal maupun horizontal, dengan mengacu pada kompetensi dan persyaratan jabatan yang telah ditetapkan. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Evaluasi administratif yang meliputi kinerja, lama bekerja, histori pekerjaan, dan usia;
2. Penilaian potensi dan kinerja berdasarkan standar kompetensi yang berlaku di industri serta evaluasi pencapaian kinerja yang terstandarisasi;
3. Penilaian manajerial yang melibatkan masukan dari pihak pengambil keputusan strategis.

Setiap karyawan yang memenuhi kriteria akan dikelompokkan ke dalam kategori yang sesuai dengan nilai potensi dan kompetensinya. Unit SDM akan melaksanakan proses kategorisasi tersebut serta mempertimbangkan kesesuaian profil jabatan dengan kebutuhan unit terkait.

CAREER DEVELOPMENT

STP designs career development programs to prepare, develop, and retain employees so that they can make optimal contributions, both now and in the future. Currently, the Company has a structured and tiered career development program, ranging from entry-level to executive positions, designed to fill vacant roles in accordance with organizational needs. Such career development is based on two main aspects, namely competencies measured through periodic assessments and individual performance evaluated through a standardized system.

The implementation of career development applies to all employees without discrimination, for both vertical and horizontal promotion, with reference to the established competencies and job requirements. Assessments are conducted based on three main dimensions, namely:

1. Administrative evaluation covering performance, length of service, work history, and age;
2. Potential and performance assessment based on competency standards applicable in the industry, as well as standardized performance achievement evaluation;
3. Managerial assessment involving input from strategic decision-makers.

Each employee who meets the criteria will be grouped into a category that corresponds to their potential and competency values. The HR unit will carry out the categorization process and consider the suitability of the position profile with the needs of the relevant unit.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Program pengembangan karier dijalankan sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi dan proyeksi posisi yang kosong. Pada tahun 2025, sebanyak 15 karyawan telah mengikuti program ini.

Evaluasi kinerja juga dilaksanakan secara berkala untuk menilai pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja dilakukan oleh atasan langsung dan difasilitasi oleh unit kerja SDM dengan mengacu pada tiga prinsip utama, yaitu:

1. Setiap karyawan memiliki target: Tugas dan tanggung jawab karyawan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan, yang berhubungan langsung dengan tujuan Perseroan.
2. Target harus terukur: Setiap karyawan diharapkan mencapai target dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati bersama atasan dan diformulasikan dalam format yang terukur.
3. Evaluasi kinerja berkala: Pencapaian target dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun melalui proses formal, meskipun tinjauan informal juga dilakukan melalui diskusi berkelanjutan untuk memastikan karyawan tetap terdepan dalam menghadapi dinamika bisnis.

STP telah menggunakan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai dasar penilaian yang objektif atas kinerja setiap karyawan. Unit SDM berperan sebagai fasilitator untuk memastikan seluruh proses penilaian kinerja berjalan dengan baik, mulai dari komunikasi, persiapan administrasi, hingga koordinasi terkait pemberian *reward* dan *punishment*. Hasil evaluasi kinerja tersebut menjadi dasar pengembangan karyawan, termasuk pelatihan, promosi, dan pembinaan lanjutan.

Pada tahun 2025, STP telah melakukan evaluasi terhadap 124 karyawan, sedikit menurun dibandingkan tahun 2024 yang melibatkan 172 karyawan. Sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut, hingga 31 Desember 2025 sebanyak 15 karyawan memperoleh promosi jabatan. Rincian hasil penilaian karyawan dapat dilihat pada tabel berikut:

The career development program is implemented in accordance with the needs of the organizational structure and the projection of vacant positions. In 2025, a total of 15 employees participated in this program.

Performance evaluations are also conducted periodically to assess the achievement of established targets. Performance assessments are carried out by direct supervisors and facilitated by the HR unit based on three main principles, namely:

1. Every employee has targets: Employee duties and responsibilities are aligned with established targets that are directly related to the Company's objectives.
2. Targets must be measurable: Each employee is expected to achieve targets within a specified period, as agreed with their supervisor and formulated in a measurable format.
3. Periodic performance evaluation: Achievement of targets is evaluated at least once a year through a formal process, although informal reviews are also conducted through ongoing discussions to ensure employees remain at the forefront in responding to business dynamics.

STP has used Key Performance Indicator (KPI) as an objective basis for assessing each employee's performance. The HR unit acts as a facilitator to ensure that the entire performance assessment process runs properly, from communication and administrative preparation to coordination related to the provision of rewards and punishments. The results of this performance evaluation serve as the basis for employee development, including training, promotion, and further coaching.

In 2025, STP conducted evaluations of 124 employees, slightly lower than in 2024, which involved 172 employees. As a follow-up to the results of such assessments, as of December 31, 2025, a total of 15 employees received promotions. Details of the employee assessment results can be seen in the following table:

Penilaian Karyawan
Employee Appraisals

Level Pegawai Employee Level	2023						2024					
	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development			Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development		
	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion
Manager	24	11	35	2	N/A	N/A	14	10	24	0	N/A	N/A
Asisten Manager	10	3	13	2	N/A	N/A	10	4	14	7	N/A	N/A
Supervisor	32	9	41	5	N/A	N/A	33	9	42	8	N/A	N/A
Staff	40	39	79	3	N/A	N/A	36	36	72	0	N/A	N/A
Non-Staff	23	0	23	0	N/A	N/A	20	0	20	0	N/A	N/A

Level Pegawai Employee Level	2025					
	Jumlah Karyawan yang Mendapatkan Penilaian Number of Employees Assessed			Hasil Penilaian dan Relevansi Pengembangan Karier Assessment Results and Relevance of Career Development		
	L/M	P/F	Total	Promosi Promotion	Mutasi/ Rotasi Mutation/ Rotation	Demosi Demotion
Manager	9	4	13	2	N/A	N/A
Asisten Manager	11	4	15	3	N/A	N/A
Supervisor	33	14	47	9	N/A	N/A
Staff	24	25	49	1	N/A	N/A
Non-Staff	0	0	0	0	N/A	N/A

Catatan | Notes : L/M (Laki-laki/Male), P/F (Perempuan/Female)

REMUNERASI

Dalam menjaga hubungan profesional yang sehat antara karyawan dan Perseroan, STP menerapkan sistem remunerasi berbasis kinerja. Melalui pendekatan ini, kompensasi dan manfaat yang diterima karyawan ditentukan berdasarkan pencapaian kinerja yang baik, baik secara individu maupun organisasi. Dengan demikian, Perseroan dapat mempertahankan posisinya sebagai organisasi dengan kinerja tinggi (*high performance organization*).

Sebagai bagian dari upaya untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik serta meningkatkan daya saing di pasar tenaga kerja, STP berkomitmen

REMUNERATION

To maintain a healthy professional relationship between employees and the Company, STP implements a performance-based remuneration system. Through this approach, the compensation and benefits received by employees are determined based on strong performance achievements, both individually and organizationally. Accordingly, this enables the Company to maintain its standing as a high performance organization.

As part of its efforts to attract and retain the best talent and enhance competitiveness in the labor market, STP is committed to maintaining a remuneration system

Sumber Daya Manusia
Human Resources

untuk senantiasa menjaga sistem remunerasi yang selaras dengan perkembangan industri. Kesesuaian remunerasi terus dipantau dan dijaga dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan karyawan untuk mempertahankan tingkat retensi karyawan secara optimal, serta kondisi Perseroan guna memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Sistem remunerasi karyawan diterapkan secara kompetitif sesuai dengan tingkat upah minimum yang berlaku di wilayah operasional sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Untuk semakin memastikan tidak adanya diskriminasi, khususnya diskriminasi *gender*, Grup menerapkan *gender pay* gap nol persen antara remunerasi pekerja laki-laki dan perempuan. Artinya, Perseroan menerapkan kondisi di mana karyawan laki-laki dan perempuan menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama atau pekerjaan yang memiliki nilai yang sama (*equal pay for equal work*) guna mewujudkan kesetaraan upah berdasarkan gender.

Sebagai langkah tambahan, Perseroan juga secara berkala melakukan audit gaji dan benchmarking untuk memastikan bahwa upah yang diberikan kepada karyawan tetap kompetitif dibandingkan dengan pelaku usaha sejenis di Indonesia, termasuk memastikan nilai kesetaraan upah antara karyawan laki-laki dan perempuan di seluruh jajaran karyawan Perseroan. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjaga transparansi dan keadilan dalam pemberian remunerasi.

KESEJAHTERAAN PEGAWAI

STP memberikan paket tunjangan dan kesejahteraan yang kompetitif untuk mendukung kesejahteraan seluruh karyawan. Perseroan juga berupaya menciptakan lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung agar setiap karyawan dapat bekerja secara optimal. Tunjangan dan kesejahteraan karyawan yang disediakan Perseroan meliputi tunjangan kesehatan jasmani dan rohani melalui berbagai fasilitas, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, sesuai dengan regulasi pemerintah. Selain itu, Perseroan juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa penggantian biaya kesehatan yang tidak ditanggung oleh BPJS sesuai dengan tingkat jabatan karyawan, dengan sistem plafon manfaat, seperti rawat inap, rawat jalan, perawatan gigi, pembuatan kacamata, dan perawatan kelahiran.

that remains aligned with industry developments. Remuneration appropriateness is continuously monitored and maintained by taking into account the evolving needs of employees to sustain an optimal level of employee retention, as well as the Company's condition to ensure long-term business sustainability.

The employee remuneration system is applied competitively in accordance with the applicable minimum wage levels in the operational areas, as stipulated by prevailing laws and regulations. To further ensure the absence of discrimination, particularly gender discrimination, the Group applies a zero percent gender pay gap between the remuneration of male and female employees. This means that the Company applies a condition in which male and female employees receive equal pay for equal work or work of equal value (equal pay for equal work) in order to achieve gender-based pay equality.

As an additional measure, the Company also regularly conducts salary audits and benchmarking to ensure that the wages provided to employees remain competitive with those offered by similar businesses in Indonesia, while also ensuring wage equality between male and female employees across all levels of the Company's workforce. This is carried out as part of the Company's commitment to maintaining transparency and fairness in the provision of remuneration.

EMPLOYEE WELFARE

STP provides a competitive benefits and welfare package to support the well-being of all employees. The Company also seeks to create a safe, inclusive, and supportive work environment so that each employee can perform optimally. The employee benefits and welfare provided by the Company include physical and mental health benefits through various facilities, one of which is BPJS Kesehatan, in accordance with government regulations. In addition, the Company also provides healthcare facilities in the form of reimbursement for medical expenses not covered by BPJS, based on employee grade levels, through a benefit ceiling system, such as inpatient care, outpatient care, dental treatment, eyeglasses, and maternity care.

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Sebagai bagian dari komitmen Perusahaan dalam memastikan efektivitas berbagai inisiatif serta memahami pengalaman karyawan secara menyeluruh, Perusahaan melaksanakan Survei Kepuasan Pegawai. Pelaksanaan survei ini juga sejalan dengan partisipasi Perusahaan dalam *HR Asia Award* 2025.

Survei ini dirancang untuk mengukur pengalaman dan tingkat keterikatan (*employee engagement*) karyawan melalui tiga dimensi utama, yaitu CORE, SELF, dan GROUP, yang mencerminkan fondasi organisasi, pengalaman individu, serta dinamika kerja tim. Penilaian mencakup aspek kepemimpinan dan budaya kerja, kesejahteraan dan motivasi karyawan, serta tingkat kolaborasi dan efektivitas tim dalam mendukung kinerja Perusahaan.

Hasil survei tahun 2025 menunjukkan tingkat kepuasan karyawan sebesar 4,2 dari skala 1–5, yang mencerminkan persepsi positif terhadap berbagai program, inisiatif, serta lingkungan kerja yang dihadirkan oleh Perusahaan. Selain itu, Survei Kepuasan Pelatihan mencatat skor 3,55 dari skala 1–4, yang berada di atas rata-rata pasar. Capaian ini menjadi indikator penting bagi manajemen dalam mengevaluasi kualitas pelaksanaan berbagai inisiatif, sekaligus sebagai landasan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan berkelanjutan terhadap program-program yang berfokus pada karyawan.

Survei ini memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak, baik karyawan maupun Perusahaan, antara lain:

Bagi Karyawan:
1. Menjadi wadah untuk menyampaikan aspirasi, umpan balik, dan harapan secara konstruktif.
2. Mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan karyawan.

Bagi Perusahaan:
1. Memperoleh insight yang lebih komprehensif terkait kebutuhan dan ekspektasi karyawan dalam pengembangan kompetensi dan pengalaman kerja.
2. Mendukung peningkatan employee engagement yang berdampak pada produktivitas dan kinerja organisasi.

EMPLOYEE ENGAGEMENT SURVEY

As part of the Company's commitment to ensuring effectiveness of various initiatives and gaining a comprehensive understanding of employee experience, the Company conducted an Employee Satisfaction Survey. Survey implementation is also aligned with the Company's participation in HR Asia Award 2025.

The survey is designed to measure employee experience and engagement through three key dimensions, namely CORE, SELF, and GROUP, which reflect organizational foundations, individual experience, and team dynamics. The assessment covers aspects of leadership and workplace culture, employee well-being and motivation, as well as the level of collaboration and team effectiveness in supporting the Company's performance.

The 2025 survey results indicate an employee satisfaction score of 4.2 on a scale of 1–5, reflecting a positive perception of the various programs, initiatives, and work environment provided by the Company. In addition, the Training Satisfaction Survey recorded a score of 3.55 on a scale of 1–4, which is above the market average. These achievements serve as important indicators for management in evaluating the quality of the implementation of various initiatives, as well as a foundation for continuous improvement and development of employee-focused programs.

This survey provides added value for both employees and the Company, as follows:

For Employees:
1. Serves as a platform to express aspirations, feedback, and expectations in a constructive manner.
2. Encourages the creation of a more open and responsive work environment to employee needs.

For the Company:
1. Provides more comprehensive insights into employee needs and expectations in developing competencies and work experience.
2. Supports the enhancement of employee engagement, which contributes to productivity and organizational performance.

3. Memperkuat loyalitas karyawan serta membangun citra positif Perusahaan sebagai tempat kerja yang unggul.

BUDAYA KERJA

STP menerapkan budaya kerja yang dirancang untuk mendorong setiap karyawan memberikan kontribusi terbaik pada setiap aspek pekerjaannya. Selain berfokus pada pencapaian target dan tanggung jawab, karyawan juga didorong untuk terus menerapkan nilai-nilai budaya kerja yang menekankan kinerja, kreativitas, inovasi, serta kepatuhan terhadap nilai etika dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menginternalisasi budaya kerja secara berkala agar setiap karyawan dapat menaati dan menerapkan budaya kerja Perseroan secara konsisten.

Pada tahun 2025, untuk memastikan penerapan budaya kerja yang konsisten, Perseroan melaksanakan sosialisasi budaya kerja melalui serangkaian kegiatan, yaitu diseminasi informasi melalui email kepada seluruh karyawan, serta program orientasi atau pelatihan bagi karyawan baru.

SARANA DAN UNIT PENUNJANG LAYANAN HR

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan untuk mempermudah kegiatan operasional bisnis, Divisi HR Perseroan telah meluncurkan Portal HR, yaitu platform digital berbasis *website* yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan layanan bagi karyawan. Portal ini menyediakan berbagai informasi penting, termasuk berita terkini, agenda diklat, informasi kegiatan, polling, serta akses ke aplikasi-aplikasi terkait lainnya.

Perseroan juga menyediakan kemudahan dalam pengurusan administrasi bagi karyawan melalui sejumlah aplikasi, seperti aplikasi informasi kebijakan HR, pengelolaan cuti, dan aplikasi lainnya yang mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas administratif. Selain itu, unit kerja umum juga mengelola mobilitas karyawan serta fasilitas gedung yang menunjang operasional sehari-hari.

Selain itu, Perseroan turut mendukung karyawan agar dapat bekerja secara maksimal melalui berbagai fasilitas, sarana, dan prasarana kerja sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban. Fasilitas tersebut mencakup layanan internet, intranet, dan aplikasi lainnya yang memudahkan aktivitas karyawan.

3. Strengthens employee loyalty while reinforcing the Company's positive image as an employer of choice.

WORK CULTURE

STP implements a work culture designed to encourage each employee to deliver their best contribution in every aspect of their work. In addition to focusing on target achievement and responsibilities, employees are also encouraged to continuously apply work culture values that emphasize performance, creativity, innovation, and compliance with ethical values and applicable provisions. Accordingly, the Company continuously internalizes its work culture on a regular basis so that each employee can consistently comply with and apply the Company's work culture.

In 2025, to ensure consistent implementation of the work culture, the Company carried out work culture socialization through a series of activities, namely information dissemination via email to all employees, as well as orientation or training programs for new employees.

HR SERVICE SUPPORT FACILITIES AND UNITS

In line with technological developments and to facilitate business operational activities, the Company's HR Division has launched the HR Portal, a website-based digital platform that serves as a communication and service channel for employees. The portal provides various important information, including the latest news, training agendas, activity information, polling, and access to other related applications.

The Company also provides administrative convenience for employees through a number of applications, such as the HR policy information application, leave management application, and other applications that support employees in carrying out administrative tasks. In addition, the general work unit also manages employee mobility and building facilities that support daily operations.

Furthermore, the Company supports employees in working optimally through various work facilities, infrastructure, and supporting tools in accordance with their positions and responsibilities. These facilities include internet access, intranet, and other applications that facilitate employee activities.

Bagi karyawan yang menjalankan *Work From Home* (WFH), Perseroan menyediakan akses layanan *Virtual Private Network* (VPN) serta menerapkan sistem approval dokumen secara online melalui aplikasi, sehingga karyawan tetap dapat bekerja secara maksimal meskipun berada di luar kantor.

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sebagai sarana komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh, STP telah membentuk Lembaga Kerja Sama Bipartit yang telah terdaftar pada instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Pembentukan lembaga ini mencerminkan komitmen Perseroan dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja serta memperkuat saluran komunikasi dengan karyawan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja. Selain itu, lembaga ini ditujukan untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan saling menguntungkan bagi seluruh pihak.

Di samping itu, STP juga menyediakan saluran komunikasi lain yang dapat diakses oleh karyawan, seperti portal MyHR, untuk menjaga hubungan yang baik dan efektif antara Perseroan dan tenaga kerja. Melalui saluran komunikasi tersebut, Perseroan berupaya memastikan bahwa setiap permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan baik. Perseroan menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk komitmen terhadap hak-hak karyawan. Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga terus mendorong terciptanya hubungan kerja yang harmonis dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, Kode Etik, dan Code of Conduct yang berlaku di lingkungan Perseroan.

STRUKTUR PENGELOLA HR

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan serta keberhasilan jangka panjang, STP memerlukan SDM dengan kapabilitas unggul agar mampu bersaing di industri layanan dan jasa telekomunikasi, baik pada tingkat nasional maupun global. Oleh karena itu, pengembangan individu dan tim, serta pembentukan budaya perusahaan yang kuat, senantiasa menjadi prioritas utama dalam strategi bisnis Grup untuk memastikan pencapaian hasil terbaik.

For employees carrying out Work From Home (WFH), the Company provides access to Virtual Private Network (VPN) services and implements an online document approval system through applications, enabling employees to work optimally even while outside the office.

INDUSTRIAL RELATIONS

As a forum for communication and consultation between the employer and the labor union/workers union, STP has established a Bipartite Cooperation Institution that has been registered with the authority responsible for labor affairs. The establishment of this institution reflects the Company's commitment to providing protection to the workforce and strengthening communication channels with employees, particularly in relation to the fulfillment of their rights in accordance with Company Regulations and Employment Agreements. In addition, this institution is intended to create harmonious and mutually beneficial industrial relations for all parties.

In addition, STP also provides other communication channels that can be accessed by employees, such as the MyHR portal, to maintain good and effective relations between the Company and the workforce. Through these communication channels, the Company seeks to ensure that any issues that arise can be resolved properly. The Company guarantees employees' freedom of association in accordance with applicable laws and regulations as a form of commitment to employee rights. In its implementation, the Company also continues to promote harmonious employment relations while upholding compliance with the applicable Company Regulations, Employment Agreements, Code of Ethics, and Code of Conduct within the Company.

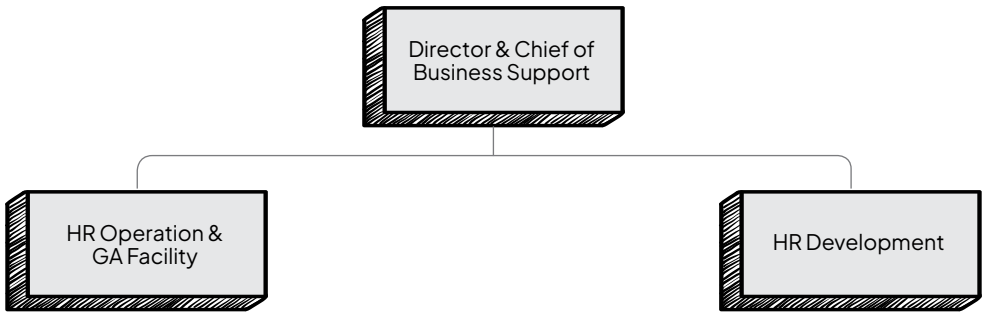
HR MANAGEMENT STRUCTURE

To support the achievement of the Company's vision and mission as well as its long-term success, STP requires HR with strong capabilities in order to compete in the telecommunications services industry at both the national and global levels. As such, the development of individuals and teams, as well as the establishment of a strong corporate culture, has consistently been a key priority in the Group's business strategy to ensure the achievement of the best results.

Sumber Daya Manusia
Human Resources

Perseroan telah memiliki organisasi pengelolaan HR yang berada di bawah supervisi langsung Direktur SDM. Organisasi pengelolaan HR di STP dijalankan oleh Divisi HR yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan terkait SDM serta berperan dalam operasionalisasi kebijakan tersebut, termasuk dalam pengembangan kapabilitas pegawai. Divisi HR dipimpin oleh Head of Director & Chief of Business Support. Divisi ini terdiri atas Sub HR Operation & GA Facility dan HR Development. Subdivisi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang kompeten dan memiliki nilai budaya perusahaan yang tinggi.

The Company has established an HR management organization under the direct supervision of the Director of HR. The HR management organization at STP is managed by the HR Division, which is authorized to establish policies related to HR and also serves a role in operationalizing such HR policies, including employee capability development. The HR Division is led by the Head of Director & Chief of Business Support. This Division consists of Sub HR Operation & GA Facility and HR Development. These subdivisions are expected to produce employees who are competent and who uphold strong corporate culture values.



TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Untuk mendukung penciptaan nilai tambah dan akselerasi pertumbuhan bisnis, STP mengembangkan serta menerapkan teknologi yang tepat guna melalui kebijakan strategis di bidang Teknologi Informasi. Sejalan dengan transformasi digital yang dijalankan Perseroan, pengelolaan dan pengembangan TI pada tahun 2025 difokuskan pada otomasi proses melalui pemanfaatan *robotic process automation* dan *artificial intelligence*, serta penguatan integrasi data untuk mendukung efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih akurat.

To support value creation and accelerate business growth, STP develops and implements fit-for-purpose technology through strategic policies in the field of Information Technology. In line with the Company's ongoing digital transformation, IT management and development in 2025 were focused on process automation through the utilization of robotic process automation and artificial intelligence, as well as stronger data integration to support operational efficiency and more accurate decision-making.



Teknologi Informasi
Information Technology

KEBIJAKAN TEKNOLOGI INFORMASI

STP memahami bahwa pemanfaatan teknologi informasi ("**TI**") secara optimal dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dan tantangan dalam perkembangan bisnis, yang pada akhirnya mendorong percepatan pertumbuhan.

Sistem TI yang diterapkan di STP dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi berbagai proses, memperkuat daya saing, dan menciptakan keunggulan kompetitif. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan inovasi yang berkelanjutan, seiring dengan penyesuaian berkelanjutan terhadap kebutuhan operasional dan fungsional perusahaan.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, STP telah menetapkan berbagai kebijakan terkait teknologi informasi, termasuk Kebijakan Keamanan Teknologi Informasi ("**Kebijakan TI**"). Kebijakan TI ini ditetapkan untuk memastikan proses bisnis berjalan secara efisien, memungkinkan perusahaan memberikan pelayanan yang optimal kepada pelanggan, serta menyediakan informasi bisnis yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan strategis manajemen.

Komponen utama dalam Kebijakan TI meliputi:
- Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perusahaan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
- Penyediaan komunikasi rutin untuk membangun kesadaran pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perusahaan, serta meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perusahaan dari ancaman keamanan siber.
- Tanggung jawab pengguna dalam melindungi data rahasia Perusahaan dengan melaksanakan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain melalui kepatuhan terhadap pedoman keamanan TI, menjaga keamanan data rahasia perusahaan, melindungi perangkat yang digunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dan lain-lain.
- Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
- Klasifikasi data beserta penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data sangat rahasia, dan data non-rahasia, termasuk ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data sangat rahasia yang harus dijaga dengan tingkat kerahasiaan paling ketat, dengan akses yang

INFORMATION TECHNOLOGY POLICY

STP recognizes that the optimal use of information technology ("**IT**") can improve productivity, competitiveness, and the ability to adapt to changes and challenges in business development, which ultimately drives accelerated growth.

The IT systems implemented at STP are designed to improve operational efficiency through the automation of various processes, strengthen competitiveness, and create competitive advantage. This is carried out by prioritizing continuous innovation while continuously aligning with the Company's operational and functional needs.

As part of this commitment, STP has established a series of policies related to information technology, including the Information Technology Security Policy ("**IT Policy**"). This IT Policy is intended to ensure that business processes operate efficiently, enable the Company to provide optimal service to customers, and provide accurate business information as a basis for management's strategic decision-making.

The main components of the IT Policy include:
- The implementation of general IT security to protect the Company's confidential data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
- The provision of regular communication to build awareness among IT users regarding the importance of IT security to the Company's business operations, while also enhancing users' roles and contributions in protecting the Company from cybersecurity threats.
- User responsibility to protect the Company's confidential data by carrying out work activities responsibly, including complying with IT security guidelines, maintaining the security of confidential company data, protecting the devices used in daily work activities, and others.
- Procedures and management of data storage.
- Data classification and its explanation, including personal data, highly confidential data, and non-confidential data, as well as provisions regarding the storage of personal data and highly confidential data that must be maintained with the strictest level of confidentiality, with access

diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol domain Perusahaan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
- Penjelasan mengenai kemampuan untuk semakin mengamankan infrastruktur Perusahaan, aplikasi bisnis, data, serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, virus, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada *multi factor authentication*, PAM (*Privillege Access Management*), *firewall*, VPN, anti virus, teknologi web-filter, email *security*, serta *Security Operations* Center ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
- Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan infrastruktur TI Perusahaan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, serta jejak audit dari akses tersebut.

STRATEGI TI

Strategi TI STP diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional dengan fokus utama sebagai berikut:
- Sentralisasi IT *capabilities* untuk mengembangkan kapabilitas yang dapat dipergunakan bersama (*shared*).
- *Process automation* untuk meningkatkan akurasi dan mempercepat proses bisnis.
- *Continuous improvement* pada IT *security*.
- Penerapan teknologi baru yang relevan, termasuk eksplorasi penerapan teknologi *Artificial Intelligence* secara terukur, agar dukungan aplikasi tetap memadai seiring pertumbuhan bisnis.
- Pengembangan personel TI yang juga memahami konteks bisnis.

Strategi ini diterapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis Perseroan, dengan tujuan utama menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan pasar.

Untuk mendukung pelaksanaannya, pengelolaan TI di Perusahaan dilakukan oleh Divisi TI, yang terdiri dari:
- Departemen Infrastruktur TI, yang berfokus pada pengelolaan dan pemeliharaan perangkat jaringan, server, serta keamanan sistem untuk memastikan kelancaran operasional teknis yang stabil.

granted on a need-to-know basis and maintained within the Company's domain control system. New access requirements or modifications may be made by submitting a request to the IT administrator through the approval of each respective division head.
- An explanation of the capability to further secure the Company's infrastructure, business applications, data, and end-user devices from potential cybersecurity threats, including malware, viruses, and other threat actors. The measures implemented include the adoption of and investment in multi factor authentication, PAM (Privillege Access Management), firewalls, VPN, anti virus, web-filter technology, email security, and a Security Operations Center ("SOC") for cybersecurity threat monitoring.
- Provisions regarding the Company's business applications and IT infrastructure equipped with password-protected access, as well as the audit trail of such access.

IT STRATEGY

STP's IT strategy is focused on improving operational effectiveness and efficiency, with the following main priorities:
- Centralization of IT capabilities to develop capabilities that can be used on a shared basis.
- Process automation to improve accuracy and accelerate business processes.
- Continuous improvement in IT security.
- Adoption of relevant new technologies, including exploration on selective implementation of Artificial Intelligence, to ensure that application support remains adequate in line with business growth.
- The development of IT personnel who also understand the business context.

This strategy is implemented to enhance the effectiveness and efficiency of the Company's business operations, with the primary objective of creating systems that are more integrated and responsive to market needs.

To support this, IT management within the Company is carried out by the IT Division, which consists of:
- IT Infrastructure Department, focused on the management and maintenance of network devices, servers, and system security to ensure stable technical operations.

Teknologi Informasi
Information Technology

- Departemen TI *Support* & *Automation*, yang memberikan dukungan teknis dan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengguna (*users*), serta melakukan otomasi proses untuk meningkatkan efisiensi.
- Departemen TI *Applications*, yang mengembangkan dan mengelola aplikasi bisnis yang relevan, yang secara langsung mendukung kegiatan operasional serta membantu meningkatkan produktivitas dan fleksibilitas dalam menjalankan bisnis sehari-hari.
- Departemen Keamanan TI bertanggung jawab melindungi aset digital dan infrastruktur organisasi melalui pemantauan ancaman serta mitigasi risiko siber. Fokus utamanya adalah menjaga integritas data, memastikan kepatuhan regulasi, dan mengelola respons insiden untuk mencegah akses yang tidak sah.

- IT Support & Automation Department, which provides technical support and solutions for issues faced by users, while also automating processes to improve efficiency.

- IT Applications Department, which develops and manages relevant business applications that directly support operational activities and help improve productivity and flexibility in carrying out daily business activities.

- IT Security Department is responsible for protecting organizational digital assets and infrastructure through threat monitoring and cyber risk mitigation. Its primary focus is maintaining data integrity, ensuring regulatory compliance, and managing incident response to prevent unauthorized access.

INISIATIF PROGRAM TI BERKELANJUTAN

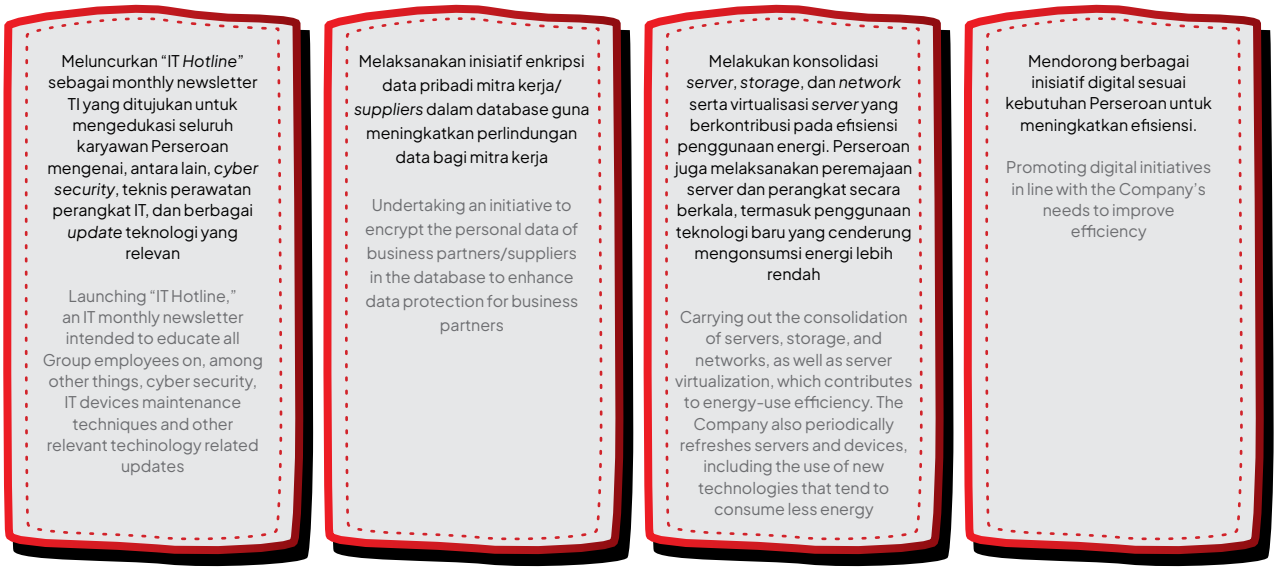
Inovasi di bidang Teknologi Informasi mencakup penciptaan dan penerapan solusi, pendekatan, atau teknologi baru yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kinerja sistem informasi. Hal ini meliputi berbagai bentuk, seperti pengembangan perangkat lunak yang lebih canggih, integrasi teknologi terbaru, serta penerapan konsep baru dalam manajemen data dan perlindungan keamanan informasi.

Pada tahun 2025, inovasi yang dikembangkan oleh Divisi TI dalam rangka akselerasi bisnis adalah sebagai berikut:

SUSTAINABLE IT PROGRAM INITIATIVES

Innovation in the field of Information Technology involves the creation and implementation of new solutions, approaches, or technologies aimed at improving efficiency, productivity, and the performance of information systems. This includes various forms, such as the development of more advanced software, the integration of the latest technologies, and the application of new concepts in data management and information security protection.

In 2025, the innovations developed by the IT Division to accelerate business were as follows:



Selama satu tahun terakhir, fokus pengembangan aplikasi di Perseroan diarahkan pada otomasi proses melalui pemanfaatan *robotic process automation* (RPA) dan *artificial intelligence* (AI). Pendekatan ini memungkinkan transaksi dijalankan secara lebih efisien, cepat, dan akurat, sekaligus memperkuat integrasi proses untuk meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Penguatan integrasi proses dan peningkatan akurasi data tersebut turut mendukung pengembangan *dashboard* operasional yang berfungsi sebagai portal dalam pengelolaan transaksi bisnis. *Dashboard* ini memungkinkan identifikasi masalah secara lebih cepat, penanganan yang lebih proaktif, serta memudahkan manajemen memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi operasional pada waktu tertentu. Optimalisasi teknologi digital juga diterapkan dalam sistem manajemen aset dan pemantauan infrastruktur secara real-*time* untuk mendukung efisiensi operasional, meningkatkan utilisasi aset, menjaga keandalan layanan, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.

INISIATIF PENGEMBANGAN APLIKASI DIGITAL

Sejalan dengan komitmen Perseroan untuk memperkuat efektivitas operasional dan meningkatkan kualitas layanan, Perseroan terus mengembangkan berbagai solusi digital yang mendukung proses bisnis secara lebih terintegrasi, efisien, dan andal. Pengembangan ini mencakup aplikasi yang menunjang pencatatan transaksi, penyusunan laporan, integrasi data internal dan eksternal, serta otomasi proses yang mempercepat pelaksanaan transaksi bisnis. Melalui inisiatif tersebut, Perseroan berupaya memperkuat operasional, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan menjaga kelancaran koordinasi antarunit kerja maupun dengan para pemangku kepentingan terkait.

Dalam dua belas bulan terakhir, pengembangan aplikasi digital di lingkup Perseroan difokuskan pada sejumlah inisiatif utama sebagai berikut:

a. Transformasi platform data yang memungkinkan pengguna menyusun laporan dan melakukan analisis data secara lebih menyeluruh, mandiri, dan terotomasi. Pengembangan ini juga memperkuat kemampuan manajemen dalam memantau perkembangan usaha dan aktivitas operasional Perseroan secara lebih komprehensif.

Over the past year, the Company's application development efforts were directed toward process automation through the use of robotic process automation (RPA) and artificial intelligence (AI). This approach enabled transactions to be carried out more efficiently, quickly, and accurately, while also strengthening process integration to improve overall operational efficiency.

Improved process integration and greater data accuracy also supported the development of an operational dashboard serving as a portal for managing business transactions. This dashboard enables faster issue identification, more proactive handling, and allows management to obtain a comprehensive view of operational conditions at a given time. The optimization of digital technology has also been applied to the asset management system and real-time infrastructure monitoring to support operational efficiency, improve asset utilization, maintain service reliability, and support more accurate decision-making.

DIGITAL APPLICATION DEVELOPMENT INITIATIVES

As part of the Company's commitment to strengthening operational effectiveness and enhancing service quality, the Company continued to develop various digital solutions to support more integrated, efficient, and reliable business processes. These developments include applications that support transaction recording, report generation, internal and external data integration, as well as process automation to accelerate business transactions. Through these initiatives, the Company seeks to reinforce its operations, improve customer experience, and maintain smooth coordination across business units and with relevant stakeholders.

Over the past twelve months, the Company's digital application development focused on the following key initiatives:

a. Transformation of the data platform to enable users to generate reports and conduct more comprehensive, independent, and automated data analysis. This development also enhances management's ability to monitor the Company's business progress and operational activities more holistically.

b. Perseroan akan secara selektif mengevaluasi dan menerapkan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) pada fungsi-fungsi operasional yang memiliki nilai strategis tinggi. Pendekatan ini diarahkan pada identifikasi *use case* yang mampu memberikan nilai tambah nyata, termasuk dalam mendukung otomasi proses bisnis.
c. Penguatan tata kelola akses, arsitektur infrastruktur IT, dan program edukasi untuk meningkatkan kapabilitas keamanan IT secara berkelanjutan. Inisiatif ini antara lain mencakup implementasi *Privileged Access Management* (PAM), peningkatan segmentasi jaringan IT, penguatan resiliensi data melalui penerapan *immutable storage* untuk data *back-up*, serta berbagai upaya peningkatan *awareness* karyawan terhadap keamanan IT melalui pelatihan, simulasi *phishing*, dan penyempurnaan materi pada IT *Hotline*.

INFRASTRUKTUR TI

STP telah memperkuat keamanan informasi melalui implementasi:
1. Sertifikasi ISO 27001 untuk *Information Security Management System*
2. Kebijakan Perlindungan Data (IT *Security Policy*)

TATA KELOLA TI

Tata kelola TI merupakan rangkaian proses yang digunakan untuk memantau, mengendalikan, dan memastikan bahwa keputusan terkait kapabilitas teknologi informasi dapat mendukung penyampaian nilai kepada seluruh *stakeholder* perusahaan. Tata kelola TI yang efektif menjadi elemen penting dalam pencapaian tujuan bisnis karena mampu menyelaraskan strategi TI dengan visi dan misi organisasi. Oleh karena itu, tata kelola TI yang baik memerlukan keseimbangan antara tiga pilar utama, yaitu *People*, *Process*, dan *Technology*, yang saling mendukung dalam menciptakan *value* yang berkelanjutan.

STP menerapkan tata kelola TI melalui tiga proses inti yang masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Pertama, proses pengelolaan perangkat jaringan, server, dan sistem keamanan yang memastikan infrastruktur TI berfungsi secara optimal dan aman. Kedua, proses otomasi yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pengguna secara

b. The Company will selectively assess and implement Artificial Intelligence (AI) technologies in operational functions with high strategic value. This approach is focused on identifying use cases capable of delivering meaningful added value, including business process automation.

c. Strengthening access governance, IT infrastructure architecture, and educational programs to continuously enhance IT security capabilities. These initiatives include the implementation of Privileged Access Management (PAM), improved IT network segmentation, stronger data resilience through the adoption of immutable storage for back-up data, as well as various efforts to raise employee awareness of IT security through training, phishing simulations, and enriched materials on the IT Hotline.

IT INFRASTRUCTURE

STP strengthened information security through the implementation of:
1. ISO 27001 certification for the Information Security Management System
2. Data Protection Policy (IT Security Policy)

IT GOVERNANCE

IT governance is a series of processes used to monitor, control, and ensure that decisions related to information technology capabilities can support the delivery of value to all company stakeholders. Effective IT governance is an important element in achieving business objectives because it aligns IT strategy with the organization's vision and mission. Therefore, sound IT governance requires a balance among three main pillars, namely People, Process, and Technology, which support one another in creating sustainable value.

STP implements IT governance through three core processes, each of which plays an important role in supporting the Company's operational continuity. First, the process of managing network devices, servers, and security systems ensures that the IT infrastructure functions optimally and securely. Second, the automation process is intended to provide support and resolve issues faced by users more efficiently. Third, the process of developing

lebih efisien. Ketiga, proses pengembangan dan pengelolaan aplikasi bisnis yang mendukung berbagai kegiatan operasional perusahaan, termasuk transaksi dan manajemen data.

and managing business applications supports various Company operational activities, including transactions and data management.

Pada proses pertama, yang berkaitan dengan pengelolaan perangkat jaringan, server, dan sistem keamanan, Perseroan memiliki kebijakan yang jelas mengenai perlindungan data. Kebijakan tersebut tercantum dalam IT *Security Policy* yang bertujuan untuk menjaga keamanan data perusahaan, data pribadi karyawan, serta data milik pemasok dan mitra bisnis. Kebijakan ini mencakup pengaturan akses data yang ketat, di mana hanya pihak yang berwenang berdasarkan fungsi bisnis yang diberikan akses sesuai persetujuan manajemen. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan data dan menjaga integritas informasi.

In the first area, relating to the management of network devices, servers, and security systems, the Company has established a clear policy regarding data protection. This policy is set out in the IT Security Policy, which is intended to safeguard Company data, employees' personal data, as well as data belonging to suppliers and business partners. This policy includes strict data access controls, under which only authorized parties based on business function are granted access subject to management approval. This is important to prevent data misuse and maintain information integrity.

Lebih lanjut, IT *Security Policy* juga mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap potensi ancaman siber yang dapat merugikan perusahaan. Sebagai bagian dari upaya perlindungan tersebut, Perseroan telah mengimplementasikan berbagai teknologi keamanan yang mampu mendeteksi, mencegah, dan menangani ancaman dari *cybercrime*. Pendekatan ini mencakup penggunaan *firewall* canggih, enkripsi data, serta pemantauan berkelanjutan terhadap potensi serangan siber, sehingga data dan sistem TI tetap terlindungi dari ancaman eksternal maupun internal.

Furthermore, the IT Security Policy also includes protective measures against potential cyber threats that could harm the Company. As part of these protection efforts, the Company has implemented various security technologies capable of detecting, preventing, and addressing threats arising from cybercrime. This approach includes the use of advanced firewalls, data encryption, and continuous monitoring of potential cyberattacks, ensuring that data and IT systems remain secure from both external and internal threats.

Dengan demikian, tata kelola TI di STP tidak hanya berfokus pada pengelolaan teknologi, tetapi juga pada penyusunan kebijakan yang memitigasi risiko, meningkatkan efisiensi, dan mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara menyeluruh.

Accordingly, IT governance at STP does not focus solely on technology management, but also on the establishment of policies that mitigate risks, improve efficiency, and support the achievement of the Company's objectives in a holistic manner.

Keamanan Informasi

Sebagai bagian dari komitmennya dalam melindungi data perusahaan dan pelanggan, STP terus mengedepankan penguatan sistem keamanan siber. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013, yang menjadi acuan dalam mengelola dan melindungi informasi dengan standar internasional yang ketat.

Information Security

As part of its commitment to protecting Company and customer data, STP continues to prioritize the strengthening of its cybersecurity system. One of the main steps taken was obtaining ISO 27001:2013 certification, which serves as a reference for managing and protecting information under strict international standards.

Melalui penerapan ISO 27001:2013, Perseroan dapat memastikan perlindungan maksimal terhadap informasi yang dimiliki, baik yang bersifat digital, berbentuk hardcopy, maupun yang disimpan di cloud. Sertifikasi ini juga memungkinkan Perseroan untuk mengantisipasi potensi serangan siber dan mengelola

Through the implementation of ISO 27001:2013, the Company is able to ensure maximum protection of the information it holds, whether in digital form, hardcopy, or stored in the cloud. This certification also enables the Company to anticipate potential cyberattacks and manage risks related to information system

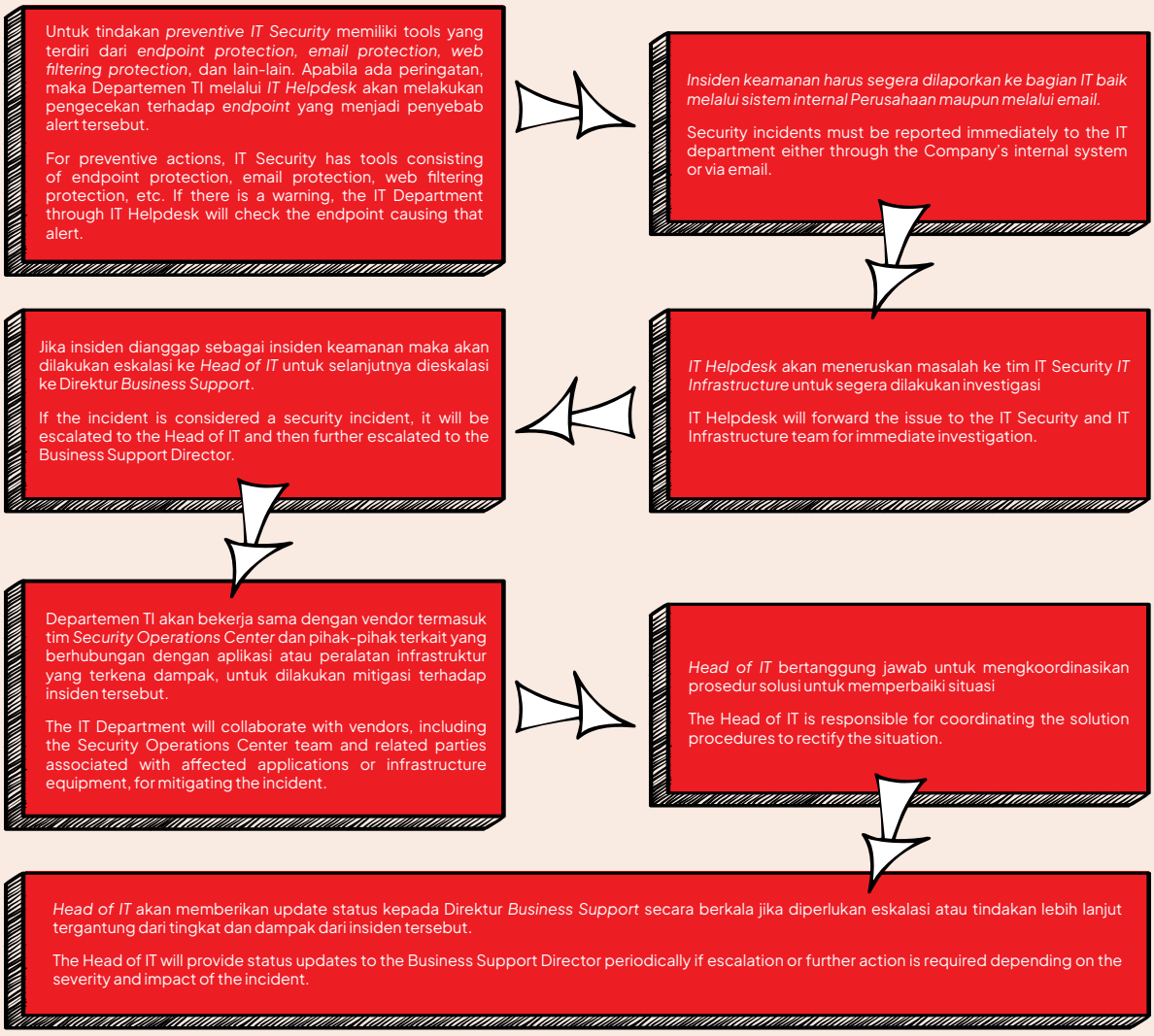
risiko terkait keamanan sistem informasi secara lebih tepat dan efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap keandalan pengelolaan keamanan informasi Perseroan.

security in a more precise and effective manner, while strengthening the trust of customers and business partners in the reliability of the Company's information security management.

PROSEDUR ESKALASI ATAS INSIDEN TI
IT INCIDENT ESCALATION PROCEDURE

Departemen TI telah menetapkan prosedur atau mekanisme tata Kelola keamanan informasi dan proses eskalasi jika terjadi kejahatan siber. Adapun prosedur tersebut adalah:

The IT department has established procedures or mechanisms for information security governance and escalation processes in the event of cybercrime. These procedures include:



IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI TAHUN 2025

Sebagai bagian dari komitmen Perseroan terhadap perbaikan berkelanjutan dalam manajemen keamanan informasi, berbagai langkah strategis terus dilakukan untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan keandalan sistem keamanan siber, antara lain:

1. Mengimplementasikan *software* antivirus pada seluruh perangkat laptop dan desktop *users*.
2. Mengimplementasikan *multi factor authentication* untuk akses ke seluruh internal *system*.
3. Mengimplementasikan PAM (*Privilleged Access Management*) untuk memperbaiki kontrol akses ke dalam internal *system*.
4. Mengaktifkan *firewall*, *webfilter*, dan anti-spam.
5. Menugaskan *team* SOC (*Security Operation Center*) untuk memonitor, mengidentifikasi, dan melakukan mitigasi apabila terdapat risiko atau aktivitas mencurigakan pada jaringan Perusahaan.

PENGEMBANGAN SDM TI

Untuk mendukung pencapaian rencana strategis TI, peningkatan kompetensi SDM di bidang TI menjadi aspek yang sangat penting. Dalam kaitan tersebut, Perseroan telah merancang dan melaksanakan program pengembangan kompetensi bagi pegawai TI secara terstruktur dan terencana melalui sejumlah inisiatif berikut:

1. Pengembangan kompetensi teknis yang relevan dengan teknologi yang diimplementasikan di Perusahaan.
2. Pengembangan kompetensi manajerial melalui program pengembangan yang dikoordinasikan oleh Divisi HRD.
3. Pengembangan diri melalui *Learning by Doing*, untuk mengembangkan pengetahuan karyawan atas dinamika dan proses bisnis Perusahaan.

INFORMATION SECURITY MANAGEMENT IMPLEMENTATION IN 2025

As part of the Company's commitment to continuous improvement in information security management, various strategic measures have continued to be undertaken to strengthen resilience and enhance the reliability of its cybersecurity system, including the following:

1. Implementing antivirus software on all user laptop and desktop devices.
2. Implementing multi factor authentication for access to all internal systems.
3. Implementing PAM (Privilleged Access Management) to improve access controls within the internal systems.
4. Activating firewall, webfilter, and anti-spam.
5. Assigning the SOC (Security Operation Center) team to monitor, identify, and mitigate any risks or suspicious activities within the Company's network.

IT HR DEVELOPMENT

To support the achievement of the IT strategic plan, enhancing the competency of HR in the IT field is a highly important aspect. In this regard, the Company has designed and implemented a structured and well-planned competency development program for IT employees through the following initiatives:

1. Development of technical competencies relevant to the technologies implemented within the Company.
2. Development of managerial competencies through development programs coordinated by the HRD Division.
3. Self-development through Learning by Doing, to develop employees' understanding of the Company's business dynamics and processes.

Pada tahun 2025, pegawai TI telah mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan berikut:

In 2025, IT employees participated in the following series of education and training programs:

Tanggal Date	**Nama Pelatihan** Trainings	**Jumlah Peserta** Total Participants	**Penyelenggara** Organizers
30 Januari 2025 January 30, 2025	*Growth Mindset*	1	Internal HR
25 April 2025 April 25, 2025	*Sharing Knowledge Privileged Access Management*	14	Delinea
25 April 2025 April 25, 2025	*Sharing Knowledge Data Backup & Replication*	14	Veeam
5–9 Mei 2025 May 5–9, 2025	Microsoft *Power Platform Developer*	4	Metrodata
24 Juni 2025 June 24, 2025	*Business Acumen*	1	Internal HR
1–2 Juli 2025 July 1–2, 2025	UiPath Studio : Web & *Mobile Automation*	10	Next Generation Wave
8 Agustus 2025 August 8, 2025	*Sharing Knowledge* CI/CD *Pipeline*	10	MII
20 Agustus 2025 August 20, 2025	*Effective Communication*	1	Internal HR
25 Agustus 2025 August 25, 2025	*Snowflake World Tour*	8	Snowflake
8–9 September 2025 September 8–9, 2025	Microsoft PowerApps	8	Metrodata
1 Oktober 2025 October 1, 2025	ISO22301 *Business Continuity Management*	1	Internal QHSE
12 November 2025 November 12, 2025	*Optimizing Team Performance & Building Trust*	1	Internal HR

RENCANA KERJA TI 2026

Memasuki tahun 2026, Perseroan menetapkan fokus pengembangan TI untuk memperkuat fondasi data, meningkatkan kesiapan integrasi sistem, serta memastikan keamanan digital yang semakin andal seiring dinamika bisnis yang terus berkembang. Inisiatif ini dirancang agar fungsi TI dapat terus mendukung kebutuhan operasional, pengambilan keputusan, dan pengembangan usaha secara lebih adaptif dan berkelanjutan.

Prioritas pengembangan TI pada tahun 2026 meliputi beberapa agenda utama sebagai berikut:

a. Melanjutkan transformasi platform data yang telah dimulai pada tahun 2025, dengan memperluas akses dan pemahaman pengguna terhadap analisis data serta keterhubungan data di sepanjang value chain Perseroan. Pengembangan platform ini juga membuka peluang bagi penerapan sistem artificial intelligence yang relevan.

IT WORK PLANS FOR 2026

Consistency in execution is a key factor in achieving Entering 2026, the Company has set its IT development focus on strengthening its data foundation, enhancing system integration readiness, and ensuring more robust digital security in line with evolving business dynamics. These initiatives are designed to enable the IT function to continue supporting operational needs, decision-making, and business development in a more adaptive and sustainable manner.

The main IT development priorities for 2026 include the following initiatives:

a. Continuing the data platform transformation that began in 2025 by broadening user access and improving understanding of data analysis and data interconnectivity across the Company's value chain. The development of this data platform also creates opportunities for the implementation of relevant artificial intelligence systems.

b. Sejalan dengan semakin luasnya kapabilitas analisis data, implementasi Artificial Intelligence akan dilakukan secara selektif dan terukur, dengan mempertimbangkan kesesuaian terhadap kebutuhan Perseroan serta potensi nilai tambah yang dapat dihasilkan.
c. Seiring pertumbuhan Perseroan dan semakin tingginya konvergensi antar lini usaha, akan dilakukan pengembangan mekanisme integrasi yang menjadi pola standar bagi integrasi antar aplikasi internal maupun dengan pihak eksternal.

d. Penguatan berkelanjutan pada aspek IT security tetap menjadi salah satu prioritas utama pengembangan TI pada tahun 2026, yang antara lain mencakup peningkatan kapabilitas Security Operations Center, implementasi platform untuk simulasi phishing, penyempurnaan mekanisme back-up system, serta kelanjutan pengembangan segmentasi jaringan TI Perseroan.

Secara keseluruhan, rencana kerja TI tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kesiapan sistem dan kapabilitas digital Perseroan agar tetap selaras dengan perkembangan bisnis infrastruktur digital yang semakin dinamis. Melalui penguatan platform data, penerapan AI, otomasi, pengembangan platform integrasi sistem, dan peningkatan keamanan sistem, Perseroan berupaya memastikan bahwa fungsi TI dapat terus memberikan dukungan yang andal bagi pertumbuhan usaha di masa mendatang.

b. In line with broader data analytics capabilities, the implementation of Artificial Intelligence will be carried out in a measured and selective manner, taking into account its relevance to the Company's needs and the aspects that can generate added value for the Company.
c. Alongside the Company's growth and the increasing convergence across business lines, the Company will develop integration mechanisms that will serve as a standard model for integration among internal applications as well as with external parties.
d. Ongoing enhancement of IT security will remain a key priority of IT development in 2026, including improvements in Security Operations Center capabilities, the implementation of a phishing simulation platform, enhancements to back-up system mechanisms, and the continuation of the development of the Company's IT network segmentation.

Overall, the 2026 IT work plan is directed toward strengthening the Company's system readiness and digital capabilities so that they remain aligned with the increasingly dynamic development of the digital infrastructure business. Through stronger data platforms, AI implementation, automation, system integration platform development, and improved system security, the Company seeks to ensure that the IT function can continue to provide reliable support for the Company's future business growth.



05
TATA KELOLA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

GOVERNANCE THAT STRENGTHENS TRUST AND SUSTAINS VALUE

Tata kelola yang kuat merupakan fondasi utama keberlanjutan usaha. Melalui pengawasan yang transparan, kepemimpinan yang akuntabel, dan pengambilan keputusan yang disiplin, Perseroan menjaga kepercayaan, mengelola risiko secara bertanggung jawab, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Strong governance is the cornerstone of sustainable business. Through transparent oversight, accountable leadership, and disciplined decision-making, the Company ensures that trust is preserved, risks are managed responsibly, and long-term value is created for all stakeholders.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Commitment to Corporate Governance Practices

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip *GCG* secara konsisten di seluruh kegiatan usaha dan tingkatan organisasi. Komitmen ini menjadi landasan dalam menjalankan usaha secara bertanggung jawab, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mendukung kinerja yang berkelanjutan melalui penerapan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap keputusan strategis dan operasional.

The Company is committed to embedding *GCG* principles across all business activities and organisational levels. This commitment guides responsible conduct, ensures regulatory compliance, and supports sustainable performance by aligning integrity, accountability, and transparency in every strategic and operational decision.

STP berkomitmen untuk menjadikan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai landasan utama dalam seluruh aktivitas usaha Perseroan. Komitmen ini diwujudkan melalui upaya berkelanjutan untuk memperkuat praktik tata kelola di seluruh tingkatan organisasi, sehingga setiap keputusan dan kegiatan operasional dijalankan secara berintegritas, akuntabel, dan transparan. Melalui penerapan tata kelola yang disiplin, STP memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Perseroan memandang GCG sebagai kerangka penting dalam memastikan pengawasan yang efektif, pengambilan keputusan yang seimbang, serta penciptaan nilai jangka panjang. Dengan menyelaraskan struktur dan proses tata kelola

STP is firmly committed to upholding Good Corporate Governance (GCG) as a core foundation of its business conduct. This commitment is reflected in the Company's continuous efforts to strengthen governance practices across all levels of the organisation, ensuring that every decision and operation is carried out with integrity, accountability, and transparency. Through disciplined governance implementation, STP reinforces stakeholder confidence while supporting sustainable and responsible business growth.

The Company recognises GCG as a vital framework that guides effective oversight, balanced decision-making, and long-term value creation. By aligning governance structures and processes with stakeholder interests, STP safeguards shareholder value, ensures regulatory compliance, and enhances

dengan kepentingan para pemangku kepentingan, STP melindungi nilai pemegang saham, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, dan meningkatkan ketahanan organisasi di tengah dinamika lingkungan usaha.

Sebagai perwujudan nyata dari komitmen tersebut, STP secara konsisten mengembangkan dan menerapkan praktik terbaik GCG yang selaras dengan perkembangan regulasi dan standar industri. Penerapan ini mendukung kesinambungan usaha, meningkatkan nilai Perseroan, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kompetitif dan berkelanjutan, sehingga Perseroan mampu memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

organisational resilience amid an evolving business landscape. This governance approach enables the Company to respond prudently to risks while maintaining strategic focus and operational excellence.

As a tangible expression of this commitment, STP consistently refines and applies GCG best practices in line with regulatory developments and industry standards. These practices support business continuity, strengthen corporate value, and foster a competitive yet sustainable operating environment, positioning the Company to deliver enduring value for all stakeholders.

DASAR HUKUM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan tata kelola perusahaan di Perseroan mengacu pada dasar hukum dan peraturan berikut:

LEGAL BASIS FOR CORPORATE GOVERNANCE PRACTICES

The Company's corporate governance practices refer to the following legal references and regulations:

No.	Peraturan	Regulations
1.	Undang-Undang Republik Indonesia terkait Pasar Modal dan Perseroan Terbatas	Laws of the Republic of Indonesia relating to the Capital Market and Limited Liability Companies
2.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("**SEOJK**") yang terkait dengan penerapan tata kelola	Financial Services Authority Regulations ("**OJK Regulation**") and Financial Services Authority Circular Letters ("**OJK Circular Letter**") relating to the implementation of governance
3.	*Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia yang dikeluarkan OJK.	Indonesia's Corporate Governance Roadmap issued by OJK.
4.	*ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum* (ACMF)	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) issued by ASEAN Capital Market Forum (ACMF)
5.	Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi	The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) issued by the National Governance Policy Committee
6.	Anggaran Dasar Perseroan	The Company's Articles of Association
7.	Peraturan dan kebijakan Tata Kelola Perusahaan	Corporate Governance Regulations and Policies

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Corporate Governance Practices

PENERAPAN PRINSIP GCG

Perseroan menerapkan GCG sesuai dengan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 sebagaimana diperbarui oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang berlandaskan pada prinsip Perilaku Beretika, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keberlanjutan.

IMPLEMENTATION OF GCG PRINCIPLES

The Company implements GCG in accordance with the 2021 Indonesian Corporate Governance Guidelines (PUGKI), as updated by the National Committee on Governance Policy (KNKG), which are founded on the principles of Ethical Conduct, Accountability, Transparency, and Sustainability.

Prinsip-prinsip GCG GCG Principles	Penjelasan Explanation
Perilaku Beretika Ethical Conduct	Dalam melaksanakan kegiatannya, Perseroan senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan *(fairness)* dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. In carrying out its activities, the Company always prioritizes honesty, treats all parties with respect, fulfills commitments, builds and maintains moral values and beliefs consistently. The company pays attention to the interests of shareholders and other stakeholders based on the principles of fairness and is managed independently, hence, each organ of the company does not dominate each other and cannot be intervened by other parties.
Akuntabilitas Accountability	Perseroan dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Perseroan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. The Company can account for its performance transparently and reasonably. As such, the Company must be managed correctly, measurably and in accordance with company interests while taking into account the interests of shareholders and stakeholders. Accountability is a necessary prerequisite for achieving sustainable performance.
Transparansi Transparency	Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. To maintain objectivity in conducting business, the company provides material and relevant information in a way that is easily accessible and understood by stakeholders. The Company takes the initiative to disclose not only issues required by laws and regulations, but also those that are important for decision-making by shareholders, creditors and other stakeholders.
Keberlanjutan Sustainability	Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. The Company complies with laws and regulations and is committed to carrying out its responsibility towards society and the environment in order to contribute to sustainable development through cooperation with all relevant stakeholders to improve community lives in a way that is in line with business interests and the sustainable development agenda.

KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI GCG

Sebagai bagian dari Grup SMN, penerapan tata kelola perusahaan dikelola secara terpusat di tingkat Grup, sehingga seluruh kebijakan dan upaya peningkatan berkelanjutan diimplementasikan secara konsisten di seluruh entitas anak.

Sejalan dengan arah strategis tersebut, STP secara proaktif terus memperkuat kualitas penerapan tata kelola perusahaan melalui berbagai inisiatif yang terukur dan berkelanjutan. Upaya ini diwujudkan antara lain melalui pelaksanaan *benchmarking* dan *gap analysis* untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penyempurnaan serta penguatan komunikasi internal guna memastikan koordinasi yang efektif dan implementasi prinsip GCG yang optimal di seluruh lini organisasi.

Perseroan secara berkala melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan GCG, dengan hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan kebijakan dan prosedur tata kelola. Melalui proses yang berkelanjutan ini, STP terus mengadopsi praktik terbaik tata kelola perusahaan dan memperkuat kerangka tata kelola yang solid dan berkelanjutan.

STP bersama dengan Grup telah mengembangkan berbagai kebijakan GCG yang menjadi panduan dalam operasional Perseroan, antara lain:
1. Pedoman Perilaku
2. Piagam Dewan
3. Piagam Komite Penunjang Dewan Komisaris
4. Kebijakan Whistleblowing Pelaporan Pelanggaran
5. Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi
6. Kebijakan Nominasi dan Remunerasi
7. Pedoman Kebijakan Manajemen Risiko
8. Kebijakan lainnya yang mendukung penerapan GCG secara konsisten dan berkelanjutan

STP juga memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut diperbarui secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan bisnis, praktik terbaik industri, serta perubahan regulasi yang berlaku.

Implementasi GCG Tahun 2025

Sebagai bagian dari Grup SMN, Perseroan turut mengimplementasikan berbagai program dan inisiatif tata kelola perusahaan yang dijalankan secara terpusat, terintegrasi, dan konsisten di seluruh entitas dalam Grup.

GCG POLICY AND IMPLEMENTATION

As part of the SMN Group, the implementation of corporate governance is managed centrally at the Group level, ensuring that all policies and continuous improvement efforts are implemented consistently across all subsidiaries.

In line with this strategic direction, STP continues to proactively strengthen the quality of its corporate governance implementation through various measurable and sustainable initiatives. These efforts are reflected, among others, in the conduct of benchmarking and gap analysis to identify areas requiring improvement, as well as the enhancement of internal communication to ensure effective coordination and the optimal implementation of GCG principles throughout the organization.

The Company regularly evaluates the effectiveness of GCG implementation, with assessment results serving as a basis for continuous improvements to governance policies and procedures. Through this ongoing process, STP consistently adopts best practices in corporate governance and further reinforces a robust and sustainable governance framework.

STP and the Group has developed various GCG policies that serve as guidelines for the Company's operations, including:
1. Code of Conduct
2. Board Charter
3. Charter of the Committees Supporting the Board of Commissioners
4. Whistleblowing Policy
5. Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy
6. Nomination and Remuneration Policy
7. Risk Management Policy Guidelines
8. Other policies supporting the consistent and sustainable implementation of GCG

STP also ensures that these policies are regularly updated to remain relevant to business developments, industry best practices, and changes in applicable regulations.

GCG Implementation in 2025

As part of the SMN Group, the Company also implements various corporate governance programs and initiatives that are carried out centrally, in an integrated manner, and consistently across all entities within the Group.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Corporate Governance Practices

Sepanjang tahun 2025, fokus utama diarahkan pada penguatan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan **("OJK")** dan Bursa Efek Indonesia **("BEI")** guna menjaga kepercayaan pasar, serta penyelarasan praktik tata kelola dengan agenda keberlanjutan melalui adopsi standar global. Di saat yang sama, Perseroan juga secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan praktik GCG melalui penilaian internal dan *benchmarking*, yang dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan. Upaya tersebut didukung oleh berbagai program internal berkelanjutan, termasuk pembaruan regulasi, penguatan nilai-nilai perusahaan, serta peningkatan budaya integritas dan anti-korupsi di seluruh organisasi.

PENILAIAN PENERAPAN GCG

Pentingnya penerapan GCG diakui sebagai pilar utama dalam memperkuat kualitas tata kelola di STP. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi untuk menilai dan meningkatkan efektivitas penerapan GCG, termasuk melalui *self-assessment* sebagai bagian dari penelaahan internal atas praktik tata kelola perusahaan.

Pada tahun 2025, STP melakukan *gap assessment* penerapan GCG melalui 2 (dua) model *gap assessment*, yaitu:
1. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan OJK.
2. Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard.*

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Ketentuan OJK

Sebagai perusahaan terbuka, STP mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh OJK serta berkomitmen untuk terus melakukan penyempurnaan guna menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Secara khusus, Perseroan mematuhi Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka **("POJK 21/2015"),** sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 **("SEOJK 32/2015")**. Pedoman tersebut mencakup 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip, dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi yang menjadi dasar penerapan GCG.

Throughout 2025, the main focus was directed toward strengthening compliance with the provisions of the Financial Services Authority ("**OJK**") and the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**") in order to maintain market confidence, as well as aligning governance practices with the sustainability agenda through the adoption of global standards. At the same time, the Company also periodically evaluates and enhances its GCG practices through internal assessments and benchmarking, which are utilized to improve the effectiveness of oversight and decision-making. These efforts are supported by various ongoing internal programs, including regulatory updates, the strengthening of corporate values, and the enhancement of a culture of integrity and anti-corruption throughout the organization.

GCG ASSESSMENTS

The importance of GCG practices is recognised as a fundamental pillar in strengthening the quality of governance at STP. Accordingly, the Company conducts regular evaluations to assess and enhance the effectiveness of GCG implementation, including self-assessments as part of internal reviews of governance practices.

In 2025, STP has carried out GCG assessment through 2 (two) assessment models, as follows:

1. GCG Assessment Based on OJK Regulations.
2. GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters.

GCG Assessment Based on OJK Regulations

As a public company, STP complies with all regulations issued by the OJK and remains committed to continuous improvement to create added value for shareholders and stakeholders. In particular, the Company complies with OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 dated November 16, 2015 on the Implementation of Public Company Governance Guidelines (**"OJK Regulation 21/2015"**), as further elaborated in OJK Circular No. 32/SEOJK.04/2015 dated November 17, 2015 ("**OJK Circular Letter 32/2015**"). These guidelines comprise 5 (five) aspects, 8 (eight) principles, and 25 (twenty-five) recommendations that form the foundation of GCG implementation.

Pemenuhan Rekomendasi Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
Fulfillment of Public Company Governance Guidelines Recommendations

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
A	**HUBUNGAN PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN PEMEGANG SAHAM DALAM MENJAMIN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM** RELATIONSHIP OF PUBLIC COMPANY WITH THE SHAREHOLDERS IN ENSURING THE SHAREHOLDERS' RIGHTS	
1.	**Prinsip 1 |** Principle 1 **Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)** Improving the Value of General Meeting of Shareholders (GMS) Convention	
1.1	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham. Public company has technical procedures for opened or closed voting that promote independency and shareholders' interests.	Terpenuhi Comply
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan. All Members of the Directors and Board of Commissioners are present at Annual GMS.	Terpenuhi Comply
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun. Summary of GMS Minutes is available on public company's Website by no less than 1 (one) year.	Terpenuhi Comply
2.	**Prinsip 2 /** Principle 2 **Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor** Improving Communication Quality of Public Company with Shareholders or Investors	
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau Investor. Public company has a communication policy with shareholders or investors.	Terpenuhi Comply
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs Web. Public company discloses its communication policy with shareholders or investors in Website.	Terpenuhi Comply
B	**FUNGSI DAN PERAN DEWAN KOMISARIS** THE FUNCTIONS AND ROLES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS	
3.	**Prinsip 3 |** Principle 3 **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris** Strengthening the Membership and Composition of Board of Commissioners	
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka. Determination of number of Board of Commissioners' members shall consider the conditions of Public Company.	Terpenuhi Comply
3.2	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Composition of Board of Commissioners' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
4.	**Prinsip 4 |** Principle 4 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris** Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Commissioners	
4.1	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris. Board of Commissioners has self assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners.	Terpenuhi Comply
4.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self Assessment policy to assess the performance of Board of Commissioners is disclosed in Annual Report of Public Company.	Terpenuhi Comply
4.3	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Commissioners has a policy with respect to the resignation of the member of the Board of Commissioners if such member is involved in financial crime.	Terpenuhi Comply
4.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi. Board of Commissioners or Committee that conduct the Nomination and Remuneration functions arrange succession policy in nomination process of members of Board of Directors.	Terpenuhi Comply

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Corporate Governance Practices

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
C.	**FUNGSI DAN PERAN DIREKSI** BOARD OF DIRECTORS' FUNCTIONS AND ROLES	
5.	**Prinsip 5 |** Principle 5 **Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi** Strengthening the Membership and Composition of the Board of Directors	
5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi perusahaan terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan. Determination of number of Board of Directors' members considers the condition of public company and the effectiveness of decision-making.	Terpenuhi Comply
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Determination of Board of Directors' members considers the variety of expertise, knowledge, and experiences required.	Terpenuhi Comply
5.3	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi. Member of Board of Directors who is liable for accounting or finance has accounting expertise and/ or knowledge.	Terpenuhi Comply
6.	**Prinsip 6 /** Principle 6 **Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi** Improving the Quality of Job and Responsibility Performance of Board of Directors	
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi. Board of Directors has self assessment policy to assess performance of Directors.	Terpenuhi Comply
6.2	Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkap melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka. Self-assessment policy to assess the performance of Board of Directors is disclosed in Annual Report of public company.	Terpenuhi Comply
6.3	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan. Board of Directors has a policy related to resignation of Board of Directors' members involved in financial crimes.	Terpenuhi Comply
D.	**PARTISIPASI PEMANGKU KEPENTINGAN** PARTICIPATION OF STAKEHOLDERS	
7.	**Prinsip 7 /** Principle 7 **Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan** Improving corporate governance aspect through participation of stakeholders	
7.1	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*. Public Company has a policy to prevent insider trading.	Terpenuhi Comply
7.2	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan *anti fraud*. Public company has anti corruption and anti fraud policy.	Terpenuhi Comply
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor. Public company has a policy concerning selection and capability improvement of suppliers and vendors.	Terpenuhi Comply
7.4	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur. Public company has a policy concerning the fulfillment of creditors' rights.	Terpenuhi Comply
7.5	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan *Whistleblowing System*. Public company has a policy of Whistleblowing System.	Terpenuhi Comply
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan. Public company has long-term incentive policy for the Board of Directors and employees.	Terpenuhi Comply

	Rekomendasi Recommendation	Keterangan Description
E.	**KETERBUKAAN INFORMASI** INFORMATION DISCLOSURE	
8.	**Prinsip 8 /** Principle 8 **Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan** Improving the Implementation of Information Disclosure	
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi. Public Company leverages various information technology platforms beyond its website to enhance the timeliness, accessibility, and reach of public disclosures.	Terpenuhi Comply
8.2	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan dan pengendali. Annual Report of public company discloses beneficial owner in share ownership of public company of at least 5% (five percent), other than disclosure of beneficial owner in share ownership of public company through major controlling shareholders.	Terpenuhi Comply

Penilaian Penerapan GCG Berdasarkan Parameter ASEAN *Corporate Governance Scorecard*

ASEAN *Corporate Governance Scorecard* (ACGS) merupakan instrumen penilaian kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan perusahaan terbuka di kawasan ASEAN terhadap pedoman tata kelola perusahaan berdasarkan praktik terbaik internasional, khususnya prinsip tata kelola perusahaan yang diterbitkan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Dalam konteks ini, STP berkomitmen untuk terus memperkuat praktik tata kelola perusahaan melalui pelaksanaan penilaian GCG dengan menggunakan ACGS sebagai kerangka benchmarking guna mendukung perbaikan berkelanjutan dan keselarasan dengan standar global.

GCG Assessment Based on ASEAN Corporate Governance Scorecard Parameters

The ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) is a quantitative assessment tool used to evaluate the compliance of public companies in ASEAN with corporate governance guidelines based on international best practices, particularly the corporate governance principles issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). In this context, STP is committed to continuously strengthening its corporate governance practices by conducting GCG assessments using the ACGS as a benchmarking framework to support ongoing improvement and alignment with global standards.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

STP telah membentuk struktur tata kelola perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas **("UUPT 40/2007")**. Struktur GCG STP terdiri dari beberapa organ utama, masing-masing dengan peran dan tanggung jawab yang jelas:

- **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**
  RUPS merupakan organ tertinggi dalam tata kelola perusahaan yang mewakili kepentingan pemegang saham dalam menentukan arah strategis perusahaan, menyetujui laporan keuangan, serta mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

STP has established a corporate governance structure in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies **("Law 40/2007").** The GCG structure consists of the following key governance bodies, each with distinct roles and responsibilities:

- **General Meeting of Shareholders (GMS)**
  The GMS serves as the highest decision-making body, representing shareholders in determining strategic directions, approving financial reports, and appointing members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan
Commitment to Corporate Governance Practices

- **Dewan Komisaris**
  Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan serta memberikan arahan strategis kepada Direksi untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, sekaligus melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

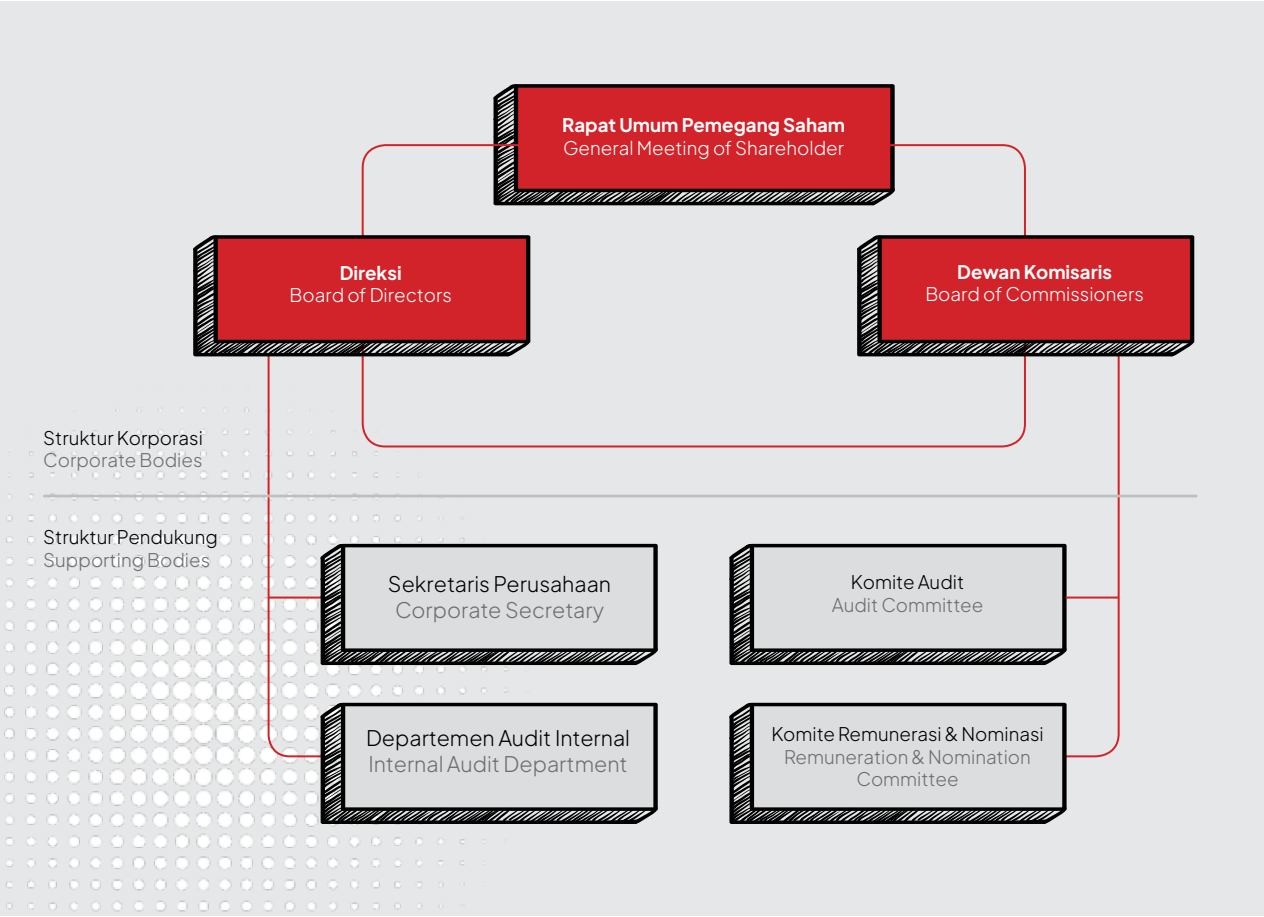
- **Direksi**
  Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan strategi bisnis, serta memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan penciptaan nilai bagi perusahaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Dalam melaksanakan fungsi manajemennya, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan dan Departemen Audit Internal.

- **Board of Commissioners**
  The Board of Commissioners supervises and provides strategic guidance to the Board of Directors, ensuring compliance with regulations and corporate policies while safeguarding shareholders' and stakeholders' interests.

- **Board of Directors**
  The Board of Directors is responsible for managing the company's operations in accordance with corporate governance principles, executing business strategies, and ensuring sustainable growth and value creation.

In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners is assisted by the Audit Committee and the Nomination and Remuneration Committee. In performing its management function, the Board of Directors is supported by the Corporate Secretary and the Internal Audit Department.



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perusahaan, yang menjadi forum utama bagi pemegang saham untuk menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan strategis dan fundamental terkait keberlanjutan jangka panjang Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RUPS juga menjadi sarana bagi pemegang saham untuk melaksanakan hak-haknya, termasuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi yang relevan dengan agenda rapat, dengan setiap keputusan yang diambil senantiasa ditujukan untuk mendukung kepentingan dan tujuan usaha jangka panjang Perseroan.

RUPS terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
1. RUPS Tahunan **("RUPST")** – Diselenggarakan satu kali dalam setahun untuk membahas dan menyetujui berbagai aspek penting, seperti laporan keuangan serta kebijakan tata kelola perusahaan.
2. RUPS Luar Biasa **("RUPSLB")** – Diadakan sewaktu-waktu apabila diperlukan untuk membahas keputusan mendesak di luar agenda RUPS Tahunan.

DASAR HUKUM

Dasar hukum pelaksanaan RUPS Perseroan mengacu pada beberapa peraturan sebagai berikut:
1. UUPT 40/2007.
2. POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka **("POJK 15/2020").**
3. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**").
4. Anggaran Dasar Perseroan.

HAK DAN WEWENANG PEMEGANG SAHAM

Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang secara sah memiliki saham Perseroan. Sesuai dengan POJK, pemegang saham secara sendiri atau bersama-sama yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 dari jumlah seluruh saham Perseroan atau Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPSLB. Permintaan tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body within the Company's corporate governance structure, serving as the primary forum through which shareholders exercise their authority to make strategic and fundamental decisions related to the Company's long-term sustainability, in accordance with the Articles of Association and applicable regulations. The GMS also provides shareholders with a platform to exercise their rights, including expressing views and obtaining relevant information related to the meeting agenda, with all resolutions adopted being directed toward supporting the Company's long-term business objectives and overall interests.

The GMS is categorized into two types:
1. Annual General Meeting of Shareholders **("AGMS")** – Held once a year to review and approve key corporate matters, including financial performance and governance reports.
2. Extraordinary General Meeting of Shareholders **("EGMS")** – Convened as needed to address urgent or specific matters beyond the scope of the AGMS.

LEGAL BASIS

The legal basis for the GMS implementation of the Company's refers to several regulations as follows:
1. Law 40/2007.
2. OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Planning and Conduct of General Meetings of Shareholders of Public Companies **("OJK Regulation 15/2020").**
3. OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies **("OJK Regulation 16/2020").**
4. The Company's Articles of Association.

RIGHTS AND AUTHORITY OF SHAREHOLDERS

Shareholders are individuals or legal entities that lawfully own shares in the Company. In accordance with OJK Regulation, shareholders individually or collectively representing at least 1/10 of the total shares of the Company, or the Board of Commissioners, may request the Board of Directors to convene and hold an EGMS. Such request must be submitted in writing to the Company's Board of

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Direksi Perseroan dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan disertai alasannya dan memenuhi ketentuan-ketentuan lain sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Wewenang yang dimiliki pemegang saham melalui RUPS diantaranya meliputi:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris;
3. Penunjukan kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan;
4. Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Hak-hak pemegang saham dalam RUPS antara lain:
1. Hak untuk menghadiri dan memberikan suara pada RUPS serta hak untuk memberikan kuasa kepada pihak lain apabila pemegang saham berhalangan hadir dalam RUPS. Formulir surat kuasa tersedia pada situs web Perseroan;
2. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS dan kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;
3. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi terkait mata acara rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Hak untuk bertanya di setiap pembahasan agenda dan setiap putusan agenda RUPS;
5. Menerima bagian dari keuntungan Perseroan yang diperuntukkan bagi pemegang saham dalam bentuk dividen dan pembagian keuntungan lainnya sesuai ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.
6. Pemegang Saham juga memiliki hak lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, antara lain (i) mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, (ii) melakukan evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, (iii) memberhentikan sementara anggota Direksi, (iv) menyetujui perubahan Anggaran Dasar, (v) menyetujui laporan tahunan, (vi) menyetujui remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi, dan (vii) menyetujui usulan

Directors, stating the matters to be discussed along with the reasons therefor, and must satisfy other requirements as stipulated in the Company's Articles of Association.

The authority of shareholders through the GMS includes:
1. Approve amendments to the Company's Articles of Association;
2. Appoint and dismiss members of the Directors, and members of the Commissioners;
3. Appointment of a public accounting firm that will provide audit services on annual historical financial information;
4. Other matters duly submitted in the GMS are in accordance with the provisions of the Articles of Association.

The rights of shareholders in the GMS include:
1. The right to attend and vote at the GMS and the right to authorize other parties if shareholders are unable to attend the GMS. The proxy form is available on the Company's website;
2. The right to propose the agenda of the GMS and candidates for members of the Board of Commissioners and Board of Directors by 1 (one) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights;
3. At the time of the GMS, shareholders are entitled to obtain information related to the agenda of the meeting in accordance with prevailing laws and regulations;
4. The right to ask questions in every discussion of the agenda and every decision on the GMS agenda;
5. Receive part of the Company's profits intended for shareholders in the form of dividends and other profit distribution in accordance with prevailing laws and regulations.
6. Shareholders also have other rights, in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, among others (i) appoint and dismiss members of the Board of Commissioners and Board of Directors, (ii) evaluate the performance of the Commissioners and Directors, (iii) suspend members of the Board of Directors, (iv) approve amendments to the Articles of Association, (v) approve the annual report, (vi) approve the remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors, and (vii) approve the proposed

alokasi penggunaan laba Perseroan, termasuk pembagian dividen.

Hak Pemegang Saham Independen

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan **("POJK 42/2020")**, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Pemegang Saham Independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal Perseroan melakukan transaksi afiliasi yang (i) mengandung benturan kepentingan, (ii) nilainya memenuhi batasan nilai transaksi material yang wajib memperoleh persetujuan RUPS; (iii) dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan dan/atau (iv) berdasarkan pertimbangan OJK memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, secara rinci diatur mengenai hak, wewenang, dan tanggung jawab Pemegang Saham

PRAKTIK UNTUK MENDORONG KETERLIBATAN PEMEGANG SAHAM DI LUAR RUPS

Praktik untuk mendorong keterlibatan pemegang saham di luar RUPS adalah aspek penting untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dan membangun kepercayaan dengan investor serta memastikan akses informasi yang setara, tepat waktu, dan efisien bagi seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan pasar. Praktik-praktik ini bertujuan untuk mendorong dialog yang transparan, inklusif, dan berkelanjutan antara Perseroan dan pemegang saham, memastikan bahwa Pemegang Saham memiliki informasi yang baik dan terlibat aktif dalam Perseroan di luar formalitas RUPST atau RUPSLB. Berikut adalah beberapa strategi dan praktik yang diadopsi Perseroan untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Pelaporan yang Transparan
   Lebih dari persyaratan pelaporan minimum untuk memberikan penjelasan rinci tentang strategi, risiko, dan peluang Perseroan, antara lain: laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan keberlanjutan.
2. Penggunaan Teknologi
   Memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi kehadiran virtual di rapat, pemungutan suara real-time, dan partisipasi dalam diskusi. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan tingkat partisipasi, terutama di kalangan investor internasional atau nasional yang mungkin tidak dapat hadir secara langsung.

allocation of the use of company profits, including dividend distribution.

Rights of Independent Shareholders

In accordance with the provisions of OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions **("OJK Regulation 42/2020"),** the Company is required to obtain approval from Independent Shareholders at a General Meeting of Shareholders if the Company carries out an affiliated transaction that (i) contains a conflict of interest, (ii) has a value that meets the threshold for a material transaction requiring GMS approval, (iii) may result in a disruption to the continuity of the Company's business, and/or (iv) based on OJK's consideration requires approval from Independent Shareholders.

In the Company's Articles of Association, details are set forth regarding the rights, authorities, and responsibilities of Shareholders.

PRACTICES TO ENCOURAGE SHAREHOLDER ENGAGEMENT BEYOND GENERAL MEETINGS

Practices to encourage shareholder engagement beyond general meetings is a vital aspect of enhancing corporate governance, building trust with investors and ensure equal, timely, and cost-efficient access to information. These practices aim to foster a transparent, inclusive, and continuous dialogue between the Company and its shareholders, ensuring the shareholder the latter are well-informed and actively involved in the Company's affairs beyond the formalities of AGMS or EGMS. Here are several strategies and practices that the Company adopts to achieve this goal:

1. Transparent Reporting
   Going beyond the minimum reporting requirements to provide detailed explanations of the Company's strategies, risks, and opportunities. This includes annual reports, financial statements, and sustainability reports.
2. Use of Technology
   Leveraging technology to facilitate virtual attendance at meetings, real-time voting, and participation in discussions. This can help to increase participation rates, especially among international or retail investors who might not be able to attend in person.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

3. Komunikasi antar Pemegang Saham
   Perseroan memberikan kebebasan bagi pemegang saham untuk saling berkomunikasi atau berkonsultasi satu dengan lainnya maupun dengan Perseroan tanpa adanya batasan

PROSEDUR RUPS

Sebagaimana diatur dalam POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan, untuk tujuan memaksimalkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS dan melindungi kepentingan mereka, Perseroan mengumumkan RUPS dan mata acara RUPS dalam: (i) situs web e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI"),** (ii) situs web BEI dan (iii) situs web Perseroan (www.stptower.com). Bahan Rapat dan tata tertib RUPS dapat diunduh oleh pemegang saham melalui situs web Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.

Secara umum, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% dari jumlah saham yang diterbitkan oleh Perseroan. Keputusan dalam RUPS diutamakan untuk diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Namun, apabila kesepakatan tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara setuju lebih dari 50% dari total saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Untuk keputusan tertentu, seperti penggabungan dan/atau peleburan Perseroan, diberlakukan persyaratan kuorum dan pemungutan suara yang lebih tinggi, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN 2026

Untuk pelaksanaan RUPS Tahunan 2026 yang akan diselenggarakan di bulan Mei 2026, Perseroan telah menunjuk menunjuk Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Raya Saham Registra sebagai pihak independen untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam RUPS.

PELAKSANAAN RUPS SEPANJANG TAHUN 2025

Di tahun 2025, Perseroan melaksanakan 1 (satu) kali RUPS, yaitu RUPST yang dihadiri oleh pemegang saham secara fisik dan elektronik.

Rapat diselenggarakan pada hari Rabu, 23 April 2025 di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl.

3. Communication Among Shareholders
   The Company grants shareholders the freedom to communicate and consult with one another without any restrictions.

GMS PROCEDURES

As stipulated in OJK Regulation 15/2020 and the Company's Articles of Association, for the purpose of maximizing shareholder participation in the GMS and protecting their interests, the Company announces the GMS and the agenda of the GMS on: (i) the e-GMS website provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia **("KSEI"),** (ii) the IDX website, and (iii) the Company's website (www.stptower.com). The Meeting Materials and the rules of conduct for the GMS may be downloaded by shareholders through the Company's website from the date of the GMS notice until the GMS is convened.

In general, the GMS can proceed if attended by shareholders representing more than 50% of the Company's total issued shares. Decisions are ideally made through deliberation and consensus. However, if consensus cannot be reached, resolutions are adopted by a majority vote, requiring more than 50% approval of the shares with voting rights present at the meeting. For specific matters such as mergers and/or consolidations, the GMS applies higher quorum and voting requirements, as stipulated in the Articles of Association.

IMPLEMENTATION OF THE 2026 ANNUAL GMS

For the implementation of the 2026 Annual GMS, which will be held in May 2026, the Company has appointed Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., and PT Raya Saham Registra as independent parties to conduct and validate the vote counting at the GMS.

IMPLEMENTATION OF GMS IN 2025

In 2025, the Company held 1 (one) GMS, namely the AGMS attended by shareholders physically and electronically.

The meeting was held on Wednesday, April 23, 2025, at the Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta,

M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310, pada pukul 11.30 – 11.55 WIB.

Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik, Perseroan menyediakan fasilitas secara elektronik melalui fasilitas penyedia e-RUPS KSEI *Electronic General Meeting System* ("eASY.KSEI"), sehingga Pemegang saham yang hadir secara online tetap mempunyai hak yang sama untuk dapat menyampaikan hak suaranya.

Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng,Central Jakarta, 10310, at 11:30 – 11:55 a.m. Western Indonesian Time.

For shareholders attending electronically, the Company provides electronic facilities through the e-RUPS provider, the KSEI Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"), thereby ensuring that shareholders attending online have the same rights to exercise their voting rights.

Proses Penyelenggaraan RUPST tanggal 23 April 2025
Implementation Process of the AGMS on April 23, 2025

Tanggal dan Waktu Date and Time	Rabu, 23 April 2025 11.30 – 11.55 WIB.	Wednesday, April 23, 2025 11.30 – 11.55 Western Indonesian Time
Lokasi Location	Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310	
Kuorum Quorum	RUPST Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.137.100.657 saham atau 99,958% dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.	The Company's AGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing 1,137,100,657 shares or 99.958% of 1,137,579,698 shares constituting all shares issued by the Company.
Pimpinan Rapat Meeting Chairman	Rapat dipimpin oleh Bapak KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Utama (Komisaris Independen) Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.	The Meeting was chaired by Mr. KUSMAYANTO KADIMAN as President Commissioner (Independent Commissioner) of the Company as appointed by the Board of Commissioners
Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Attendance of BOC and BOD	RUPST Perseroan dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: **Direksi:** Direktur Utama: Ibu Juliawati Gunawan Halim Direktur: Bapak Hartono Tanuwidjaja Direktur: Bapak Wong Tjin Tak Direktur: Bapak Wellington **Dewan Komisaris:** Komisaris Utama / Komisaris Independen: Bapak Kusmayanto Kadiman Komisaris Independen: Bapak Harry Mozarta Zen Komisaris: Bapak Eko Santoso Hadiprodjo	The Company's AGMS was attended by all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, namely: **Board of Directors:** President Director : Mrs. Juliawati Gunawan Halim Director: Mr. Hartono Tanuwidjaja Director: Mr. Wong Tjin Tak Director: Mr. Wellington **Board of Commissioners:** President Commissioner / Independent Commissioner: Mr. Kusmayanto Kadiman Independent Commissioner: Mr. Harry Mozarta Zen Commissioner: Mr. Eko Santoso Hadiprodjo
Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat Opportunity to Ask Questions and/or Opinions	Dalam pelaksanaan RUPST, Perseroan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan yang terkait dengan mata acara Rapat untuk selanjutnya dijawab atau ditanggapi oleh Perseroan. Pemegang Saham dan kuasa/wakil Pemegang Saham yang akan mengajukan pertanyaan kepada Perseroan dalam Rapat yang dilaksanakan secara elektronik dapat dilakukan melalui aplikasi eASY. KSEI. Selanjutnya proses tanya jawab ini dicatat dan dituangkan dalam Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang ditunjuk Perseroan.	In the AGMS' execution, the Company provides an opportunity for Shareholders and the proxies/ representatives of Shareholders present to submit questions related to the agenda items of the Meeting, which will then be answered or addressed by the Company. Shareholders and the proxies/ representatives of Shareholders who wish to ask questions to the Company in the Meeting conducted electronically are able to do through the eASY.KSEI application. Subsequently, this question-and-answer process is recorded and included in the Minutes of the AGM prepared by a Notary appointed by the Company.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat Number of Shareholders who ask questions and/ or gave opinions at the Meeting	Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.	There is no shareholders and proxies of the shareholders raised question and/or opinion.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat Decision-Making Mechanism during the Meeting	Pengambilan keputusan mata acara RUPST dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.	Decision-making on the agenda items of the AGMS is conducted based on deliberation to reach a consensus. In the event that consensus is not achieved, decisions are made through voting.
Pihak Independen untuk melakukan perhitungan kuorum dan pemungutan suara keputusan Rapat Independent parties to carry out quorum calculations and Meetings' resolution votes	Dalam upaya menjaga independensi, Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dan PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek Perseroan untuk melakukan dan memvalidasi perhitungan suara dalam rapat.	In an effort to maintain independence, the Company has appointed independent parties, namely Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., and PT Raya Saham Registra as the Company's Securities Administration Bureau, to conduct and validate the vote counting at the meeting.
Proses Pemungutan dan Perhitungan Suara Voting Process and Vote Counting	Proses pemungutan suara RUPST Perseroan secara elektronik menggunakan eASY.KSEI. eASY KSEI adalah sistem atau sarana elektronik yang disediakan oleh KSEI yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS, serta penggunaan hak suara dalam RUPS oleh pemegang saham. Pemungutan suara dalam RUPST Perseroan diambil dari: • suara elektronik dari e-*voting* pada aplikasi eASY.KSEI, yang diajukan oleh pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI; • suara elektronik dari pemberi kuasa e-proxy pada aplikasi eASY.KSEI; • suara dari pemegang saham yang hadir di tempat Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan; • suara dari kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang Rapat, yang diajukan pada saat pemungutan suara untuk mata acara yang bersangkutan;	The voting process at the Company's AGMS was conducted electronically using eASY.KSEI. eASY KSEI is a system or electronic facility provided by KSEI that is used to support the provision of information, the implementation and reporting of the GMS, as well as the exercise of voting rights at the GMS by shareholders. Voting at the Company's AGMS is derived from: • electronic votes from e-voting on the eASY. KSEI application, submitted by shareholders attending electronically and registered on the eASY.KSEI application; • electronic votes from e-proxy grantors on the eASY.KSEI application; • votes from shareholders attending the Meeting venue, submitted at the time of voting for the relevant agenda item; • votes from shareholder proxies other than e-proxy who are present in the Meeting room, submitted at the time of voting for the relevant agenda item;

Pemungutan suara dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: • pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-*proxy* yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas Perseroan akan membagikan lembar formulir untuk diisi. • pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-*proxy* yang tidak mengangkat tangan maupun yang meninggalkan ruang Rapat pada saat pemungutan suara, dianggap memberikan suara setuju. • pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi eASY.KSEI, memberikan dan memasukkan pilihan suaranya untuk setiap mata acara Rapat, baik suara setuju, suara tidak setuju maupun abstain (suara blanko), melalui aplikasi eASY.KSEI, dan apabila tidak memberikan atau memasukkan pilihan suaranya maka oleh aplikasi eASY.KSEI dianggap abstain.	Voting was conducted in accordance with the following procedures: • shareholders or shareholder proxies other than e-proxy who cast dissenting votes will be asked to raise their hands, and the Company's officers will distribute form sheets to be completed. • shareholders or shareholder proxies other than e-proxy who do not raise their hands or who leave the Meeting room at the time of voting shall be deemed to have cast approving votes. • shareholders attending electronically and registered on the eASY.KSEI application shall cast and submit their votes for each Meeting agenda item, whether approving, dissenting, or abstaining (blank vote), through the eASY.KSEI application, and if they do not cast or submit their vote, the eASY.KSEI application shall deem such vote as abstaining.
pemungutan suara langsung secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI, untuk setiap mata acara Rapat, akan dilangsungkan selama 30 detik (*voting time*).	Direct electronic voting through the eASY.KSEI application, for each Meeting agenda item, will be conducted for 30 seconds (voting time).
Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan (atau kuasa pemegang saham selain e-proxy) hanya dapat memberikan 1 (satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya.	Each share entitles its holder to cast 1 (one) vote. If a shareholder or his/her lawful proxy owns or represents more than 1 (one) share, then such person (or shareholder proxy other than e-proxy) may only cast 1 (one) vote and shall be deemed to represent the shares owned or represented by him/her.
Pengungkapan prosedur e-voting dilakukan di tempat RUPST telah secara lengkap dituangkan dalam Tata Tertib RUPST yang diumumkan/diunggah dalam situs web Perseroan bersamaan dengan Pemanggilan RUPST pada tanggal 25 Maret 2025.	The disclosure of the e-voting procedures at the AGMS venue has been fully set out in the Rules of Conduct of the AGMS, which were announced/uploaded on the Company's website simultaneously with the Notice of the AGMS on March 25, 2025.
Tata tertib pelaksanaan RUPST yang mencakup prosedur pemungutan dan perhitungan suara juga telah disampaikan kepada pemegang saham sebelum RUPST dimulai atau dibuka.	The rules of conduct for the AGMS, including the voting and vote-counting procedures, were also conveyed to shareholders before the AGMS commenced or was opened.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Tahapan Penyelenggaraan RUPST tanggal 23 April 2025
Stages of AGMS held on April 23, 2025

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Pemberitahuan Mata Acara RUPS Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. **Notification of GMS Agenda** The Company is required to first submit notification of the GMS agenda to the OJK no later than 5 (five) business days prior to the announcement of the GMS, excluding the date of the GMS announcement.	3 Maret 2025 March 3, 2025	Pemberitahuan mata acara Rapat telah disampaikan kepada OJK pada 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman Rapat, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman Rapat. The notification of the Meeting agenda was submitted to the OJK 5 (five) business days prior to the announcement of the Meeting, excluding the date of the Meeting announcement.
Pengumuman RUPS Pengumuman RUPS disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan. **GMS Announcement** The GMS announcement shall be submitted no later than 14 (fourteen) days prior to the date of the GMS invitations without taking into account the announcement date and the date of invitation.	10 Maret 2025 March 10, 2025	Pengumuman telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) serta dipublikasikan di situs Perseroan pada 14 (empat belas) hari sebelum Pemanggilan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris The announcement has been submitted to the Financial Services Authority, Indonesia Stock Exchange, and the Website of Electronic General Meeting System facility provider PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI) and published on the Company's website on 14 (fourteen) days prior to the Invitation in Indonesian and English Laporan pengumuman disampaikan ke OJK dan BEI pada hari yang sama (*hardcopy dan e-reporting* via SPE-OJK & IDX-net). The announcement report is submitted to OJK and IDX on the same day (hardcopy and e-reporting via SPE-OJK & IDX-net).
Recording Date Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS Recording Date of Shareholders List entitled to be present in the GMS	24 Maret 2025 March 24, 2025	Tercatat 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan RUPST. At 1 (one) working day prior to the AGMS Invitations.
Pemanggilan RUPS Pemanggilan RUPS disampaikan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.	25 Maret 2025 March 25, 2025	Pemanggilan RUPS telah disampaikan ke OJK, BEI, dan Situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY. KSEI) serta dipublikasikan di situs web Perseroan pada 28 (dua puluh delapan) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dokumen-dokumen yang disampaikan Perseroan pada saat Pemanggilan RUPST yaitu termasuk bahan mata acara dan penjelasan masing-masing agenda RUPST, tata tertib pelaksanaan RUPST, Laporan Tahunan 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2024 dan Formulir Surat Kuasa untuk Pemegang Saham yang tidak dapat hadir secara fisik maupun melalui eASY. KSEI agar memberikan kuasa dan suaranya melalui Biro Administrasi Efek yang telah ditunjuk.

Kegiatan Activities	Tanggal Pelaksanaan Date	Keterangan Remarks
Notice of the General Meeting of Shareholders (GMS) The notice of the GMS is issued no later than 21 (twenty-one) days before the date of the GMS, excluding the date of the notice and the date of the GMS itself.		The Notice of the GMS was submitted to the OJK, IDX, and the website of KSEI's Electronic General Meeting System facility provider (eASY.KSEI), and was published on the Company's website 28 (twenty-eight) days prior to the convening of the GMS in Indonesian and English. The documents submitted by the Company at the time of the Notice of the AGMS included the agenda materials and explanation of each AGMS agenda item, the rules of conduct for the AGMS, the 2024 Annual Report, the 2024 Consolidated Financial Statements, and the Power of Attorney Form for Shareholders who were unable to attend physically or through eASY.KSEI to authorize and cast their votes through the appointed Securities Administration Bureau.
Pelaksanaan RUPS **GMS Implementation**	23 April 2025 April 23, 2025	Rapat diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan memperhatikan POJK 16/2020 serta ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. Seluruh peserta yang hadir secara fisik maupun elektronik dapat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam RUPST. The Meeting was held physically and electronically using the eASY.KSEI Application and with due regard to OJK Regulation 16/2020 and the provisions of the Company's Articles of Association. All participants attending physically and electronically were able to follow and actively participate in the AGMS.
Penyampaian Ringkasan Risalah RUPS Ringkasan Risalah RUPS diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPS. **Submission of GMS Minutes Summary** Summary of GMS Minutes shall be announced to the public no later than 2 (two) working days after the date of the GMS.	24 April 2025 April 24, 2025	Ringkasan Risalah RUPST telah disampaikan ke OJK, BEI, dan Situs web penyedia fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) serta dipublikasikan di situs web Perseroan pada 1 (satu) hari kerja setelah pelaksanaan RUPST. The Summary of Minutes of the AGMS was submitted to the OJK, IDX, and the website of KSEI's Electronic General Meeting System facility provider (eASY.KSEI), and was published on the Company's website 1 (one) business day after the implementation of the AGMS.
Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPS Risalah/Berita Acara RUPS disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan RUPS. **Submission of GMS Minutes/Deeds** Minutes of GMS shall be submitted no later than 30 (thirty) days after the GMS date.	22 Mei 2025 May 22, 2025	Penyampaian Risalah/Berita Acara RUPST kepada OJK pada 29 hari setelah penyelenggaraan RUPST melalui surat Perseroan No. 033/DIR-STP/V/2025 tanggal 22 Mei 2025. The submission of the Minutes/Official Report of the AGMS to the OJK was made 29 days after the implementation of the AGMS through the Company's letter No. 033/DIR-STP/V/2025 dated May 22, 2025.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Hasil RUPST tanggal 23 April 2025
Resolutions of the 2025 AGMS held on April 23, 2025

Mata Acara Rapat Pertama First Agenda of the Meeting				
Mata Acara Meeting Agenda	Persetujuan dan Pengesahan atas: (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024; dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *(acquit et decharge)*. Approval and ratification of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2024 (acquit et de charge).			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting.			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** Affirmative	**Tidak Setuju** Negative	**Abstain** Abstain	**Total Setuju (Setuju+Abstain)** Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.137.100.657 saham/shares	0 saham/shares	0 Saham/shares	1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Pertama The Resolution of the First Agenda	Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 *(acquit et de charge)*. To approve and ratify of (i) the Annual Report of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Company's yearly activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ended December 31, 2024, and (ii) the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, including the Balance Sheet and Profit/Loss Statements of the Company for the financial year ended December 31, 2024, along with the granting of full release and discharge of responsibilities to the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for their supervision and actions during the financial year ended December 31, 2024 (acquit et de charge).			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Kedua Second Agenda of the Meeting				
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Appropriation of the Company's profits for the financial year ended December 31, 2024.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting.			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** Affirmative	**Tidak Setuju** Negative	**Abstain** Abstain	**Total Setuju (Setuju+Abstain)** Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.137.100.657 saham/shares	0 saham/shares	0 saham/shares	1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Kedua The Resolution of the Second Agenda	Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2024 sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan. To approve not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2024, and book the entire net profit for the financial year 2024 as retained earnings, to finance the business activities and operational costs of the Company.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Ketiga Third Agenda of the Meeting	
Mata Acara Meeting Agenda	Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024. Determination of the remuneration and allowance for members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance for Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2025 and tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the financial year of 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** Affirmative	**Tidak Setuju** Negative	**Abstain** Abstain	**Total Setuju (Setuju+Abstain)** Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.137.100.657 saham/shares	0 saham/shares	0 saham/shares	1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.
Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga The Resolution of the Third Agenda	Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Granted authority to the controlling shareholder of the Company, namely PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, to determine remuneration and allowance to the members of the Board of Directors and remuneration or honorarium and allowance to the members of the Board of Commissioners of the Company for financial year 2025 and tantiem for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for the financial year 2024, by taking into account the recommendation from the Company's Board of Commissioners and the Company's Remuneration and Nomination Committee.			
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.			

Mata Acara Rapat Keempat Fourth Agenda of the Meeting				
Mata Acara Meeting Agenda	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ended December 31, 2025.			
Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat Number of Shareholders who ask questions and/or gave opinions	Tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat (nihil). There were no shareholders who were asking questions and/or gave their opinions at the Meeting (none).			
Hasil Pemungutan Suara Voting Results	**Setuju** Affirmative	**Tidak Setuju** Negative	**Abstain** Abstain	**Total Setuju (Setuju+Abstain)** Total Affirmative Votes (Agree+Abstain)
	1.137.100.657 saham/shares	0 saham/shares	0 saham/shares	1.137.100.657 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. 1,137,100,657 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes casted in the Meeting.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat The Resolution of the Fourth Agenda	1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025. Appointed Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each as Public Accountant and Public Accounting Firm which registered in OJK, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025, or to appoint other Public Accountant within the same Public Accounting Firm, in the event that the relevant person is permanently unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025. 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: Granted power and authority to the Board of Commissioners to: a) menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan; determine the amount of honorarium and other terms and conditions related to the appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm as described in number 1 above, by taking into account the recommendation from the Company's Audit Committee; b) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025; dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: a. mempunyai reputasi internasional; b. terdaftar pada OJK; dan c. syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan. To appoint replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including the determination of the amount of honorarium and other terms) taking into account input and recommendation from the Company's Audit Committee, in the event that : (i) the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 cannot be completed; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in number 1 are unable to carry out or complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025 with the following criteria and limitations: a. have an international reputation; b. registered on the OJK; and c. fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners, by taking into account suggestion and consideration from the Audit Committee of the Company.
Realisasi Realization	Telah direalisasikan. Has been realized.

KEPUTUSAN & REALISASI RUPS SEPANJANG TAHUN 2024

Perseroan menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2024.

Seluruh keputusan RUPS sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan dan penjelasan atas setiap mata acara adalah sebagai berikut:

RESOLUTIONS & REALIZATION OF GMS THROUGHOUT 2024

The Company held 1 (one) AGMS on June 26, 2024.

All GMS resolutions throughout 2024 have been implemented, and the explanation for each agenda item is as follows:

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

KEPUTUSAN & REALISASI RUPST TANGGAL 26 JUNI 2024
RESOLUTIONS & REALIZATION OF THE AGMS DATED JUNE 26, 2024

MATA ACARA RAPAT PERTAMA
FIRST AGENDA OF THE MEETING

Mata Acara
Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda
Approval and ratification of (i) the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023, including the Company's activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023, and (ii) the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the same period, as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervision and management actions carried out during the financial year ending December 31, 2023.

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah suara tidak setuju	:	- suara
Jumlah suara abstain (blanko)	:	- suara
Jumlah suara setuju	:	1.137.100.008 suara
Sehingga total suara setuju	:	1.137.100.008 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Voting Results

Negative votes	:	- vote
Abstentions	:	- vote
Affirmative votes	:	1,137,100,008 votes
Total affirmative votes	:	1,137,100,008 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes cast in the Meeting.

.

Keputusan Mata Acara Pertama
Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Resolutions of the First Meeting
Approved and ratified (i) the Company's Annual Report for the financial year ending December 31, 2023, including the Company's activity report and the supervisory report of the Board of Commissioners for the financial year ending December 31, 2023, and (ii) the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2023, including the Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the same period, as well as granted full release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Commissioners and the Board of Directors for the supervision and management actions carried out during the financial year ending December 31, 2023.

Realisasi di tahun 2024
Telah direalisasikan.

Realization in 2024
Has been realized.

MATA ACARA RAPAT KEDUA
SECOND AGENDA OF THE MEETING

Mata Acara
Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Agenda
Appropriation of the Company's profits for the financial year ended 31 December 2023.

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah suara tidak setuju	:	- suara
Jumlah suara abstain (blanko)	:	- suara
Jumlah suara setuju	:	1.137.100.008 suara
Sehingga total suara setuju	:	1.137.100.008 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Voting Results

Negative votes	:	- vote
Abstentions	:	- vote
Affirmative votes	:	1,137,100,008 votes
Total affirmative votes	:	1,137,100,008 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes cast in the Meeting.

Keputusan Mata Acara Kedua
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2023 sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan.

Resolutions of the Second Agenda
Approved the decision not to distribute dividends for the financial year ending December 31, 2023, and to record the entire net profit for the 2023 financial year as retained earnings to finance the Company's business activities and operational expenses.

Realisasi di tahun 2024
Telah direalisasikan.

Realization in 2024
Has been realized.

MATA ACARA RAPAT KETIGA
THIRD AGENDA OF THE MEETING

Mata Acara
Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

Agenda
Determination of the salaries and allowances for members of the Board of Directors and the salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners for the 2024 financial year, as well as the tantiem for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 financial year.

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah suara tidak setuju	:	- suara
Jumlah suara abstain (blanko)	:	- suara
Jumlah suara setuju	:	1.137.100.008 suara
Sehingga total suara setuju	:	1.137.100.008 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Voting Results

Negative votes	:	- vote
Abstentions	:	- vote
Affirmative votes	:	1,137,100,008 votes
Total affirmative votes	:	1,137,100,008 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes cast in the Meeting.

Keputusan Mata Acara Ketiga
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Resolutions of the Third Agenda
Approved the authorization and delegation of power to the Company's controlling shareholder, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, to determine the salaries and allowances for members of the Board of Directors, as well as the salaries or honorariums and allowances for members of the Board of Commissioners for the 2024 financial year, and the tantiem for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for the 2023 financial year, taking into account the recommendations from the Board of Commissioners and the Company's Remuneration and Nomination Committee.

Realisasi di tahun 2024
Telah direalisasikan.

Realization in 2024
Has been realized.

Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
FOURTH AGENA OF THE MEETING

Mata Acara
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Hasil Pemungutan Suara

Jumlah suara tidak setuju	:	- suara
Jumlah suara abstain (blanko)	:	- suara
Jumlah suara setuju	:	1.137.100.008 suara
Sehingga total suara setuju	:	1.137.100.008 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara Keempat

1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
   a. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroan;
   b. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti (termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan, dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat dilakukan; atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2024, dengan kriteria dan batasan sebagai berikut:
      a) mempunyai reputasi internasional;
      b) terdaftar pada OJK; dan
      c) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan

Agenda
Appointment of a Registered Public Accounting Firm (including a Registered Public Accountant affiliated with the Registered Public Accounting Firm) to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the financial year ending December 31, 2024.

Voting Results

Negative votes	:	- vote
Abstentions	:	- vote
Affirmative votes	:	1,137,100,008 votes
Total affirmative votes	:	1,137,100,008 votes, or equal to 100%, or more than 1/2 of total valid votes cast in the Meeting.

Resolutions of the Fourth Agenda

1. Appointed Riani and Public Accounting Firm Tjahjadi & Tamara, both registered with the OJK as a Public Accountant and a Public Accounting Firm, respectively, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year. In the event that the appointed Public Accountant is permanently unable to perform the audit, another Public Accountant from the same Public Accounting Firm may be appointed to conduct the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year;
2. Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to:
   a. determined the amount of honorarium and other terms related to the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in point 1 above, while taking into account the recommendations of the Company's Audit Committee;
   b. appointed a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm (including determining the amount of honorarium and other terms) while considering the input and recommendations of the Company's Audit Committee, in the event that, for any reason (i) the appointment of the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in point 1 cannot be carried out; or (ii) the Public Accountant and/or Public Accounting Firm as referred to in point 1 is unable to perform or complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2024 financial year, with the following criteria and limitations:
      a) have an international reputation;
      b) registered on the OJK; and
      c) Fulfill other terms and conditions that are deemed appropriate by the Company's Board of Commissioners by taking into account suggestion and consideration of the Company's Audit Committee

Realisasi di tahun 2024
Telah direalisasikan.

Realization in 2024
Has been realized.

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Dewan Komisaris adalah organ pengawas yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan Perseroan, memberikan arahan strategis kepada Direksi, serta memastikan bahwa seluruh kegiatan usaha dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip GCG. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memantau kinerja Perseroan, menelaah efektivitas manajemen risiko, serta menjunjung tinggi standar hukum dan etika guna melindungi kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

The Board of Commissioners is the supervisory body responsible for overseeing the management of the Company, providing strategic guidance to the Board of Directors, and ensuring that business activities are conducted in compliance with applicable regulations and GCG principles. In carrying out its responsibilities, the Board of Commissioners monitors corporate performance, reviews the effectiveness of risk management, and upholds legal and ethical standards to safeguard the interests of shareholders and other stakeholders.

DASAR HUKUM

Dasar pengangkatan Dewan Komisaris:
1. UUPT 40/2007.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**").

LEGAL BASIS

Basis of appointment of the Board of Commissioners:
1. Law 40/2007.
2. The Company's Articles of Association.
3. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 33/2014**").

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris STP terdiri dari 3 (tiga) anggota yang meliputi satu Komisaris Utama yang sekaligus merupakan Komisaris Independen, 1 (satu) Komisaris dan 1 (satu) Komisaris Independen. Dengan komposisi tersebut, susunan Dewan Komisaris STP telah memenuhi ketentuan POJK 33/2014 di mana komposisi Dewan Komisaris paling sedikit 30% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang berasal dari kalangan di luar Perseroan yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Perseroan. Sehingga susunan Dewan Komisaris per 31 Desember 2025 adalah tetap sama sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

The composition of STP's Board of Commissioners consists of 3 (three) members, comprising 1 (one) President Commissioner, who also serves as an Independent Commissioner, 1 (one) Commissioner, and one Independent Commissioner. With this structure, the composition of STP's Board of Commissioners complies with OJK Regulation 33/2014 which requires that at least 30% of the Board of Commissioners consist of Independent Commissioners who are external to the Company, as determined in their appointment decision.

In 2025, no changes occurred to the composition of the Company's Board of Commissioners. As such, the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, remains unchanged as follows:

Nama Name	**Jabatan** Position	**Dasar Pengangkatan** Basis of Appointment	**Periode** Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 16 November 2021 First Appointment: EGMS November 16, 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioners	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 1 Maret 2022 First Appointment: EGMS March 1, 2022 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPST 22 Juli 2020 First Appointment: AGMS July 22, 2020 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026

MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS.

Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris diputuskan melalui RUPS dengan mengacu pada UUPT 40/2007, POJK 33/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila:
1. Tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
2. Tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.
3. Melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan Perseroan.
4. Dipidana karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan fungsi pengawasan.
5. Merangkap jabatan yang dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Meninggal dunia.
7. Mengundurkan diri.

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebelum berakhirnya masa jabatan dilakukan melalui RUPS dengan menyebutkan alasan pemberhentian, setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BOARD OF COMMISSIONERS TERM OF OFFICE

In accordance with the Company's Articles of Association, members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the GMS. Such appointment becomes effective from the date determined at the GMS at which they are appointed and ends at the closing of the 3rd (third) Annual GMS following the date of their appointment, unless otherwise determined by the GMS.

The resignation of a member of the Board of Commissioners is resolved through the GMS with reference to Law 40/2007, OJK Regulation 33/2014, and the Company's Articles of Association.

Members of the Board of Commissioners may be dismissed before the end of their term if they:
1. Fail to perform their duties and responsibilities properly.
2. Do not comply with prevailing laws and regulations and/or the Articles of Association.
3. Engage in actions that cause losses to or harm the Company.
4. Are convicted of a criminal offense related to their supervisory duties.
5. Hold prohibited concurrent positions under applicable regulations.
6. Pass away.
7. Resign.

Early dismissal of a member of the Board of Commissioners must be resolved by the GMS by stating the reason for dismissal, after providing the concerned member with the opportunity to present a defence in accordance with applicable regulations.

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan mematuhi POJK 33/ 2014 dalam mengatur rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Piagam Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai:

1. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perseroan Publik lain; dan
2. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perseroan Publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris Perseroan yang merangkap lebih dari lima jabatan, baik sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada perusahaan/institusi/organisasi lain selama tahun 2025 disajikan dalam Bab Profil Perusahaan pada bagian profil Dewan Komisaris.

KRITERIA PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Kriteria pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan POJK 33/2014, yaitu:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;
2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

BOARD OF COMMISSIONERS CONCURRENT POSITIONS

The Company complies with OJK Regulation 33/ 2014 in regulating concurrent positions held by members of the Board of Commissioners, as further stipulated in the Board of Commissioners Charter. Accordingly, members of the Board of Commissioners may concurrently serve as:

1. A member of the Board of Directors in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies; and
2. A member of the Board of Commissioners in a maximum of 2 (two) other Issuers or Public Companies.

If a member of the Board of Commissioners does not concurrently serve as a member of the Board of Directors, the relevant member of the Board of Commissioners may concurrently serve as a member of the Board of Commissioners in a maximum of 4 (four) other Issuers or Public Companies.

As of the date of this Annual Report, none of the members of the Company's Board of Commissioners holds concurrent positions exceeding five positions, whether as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners in other issuers or public companies. Further information regarding the concurrent positions of members of the Board of Commissioners in other companies/institutions/ organizations during 2025 is presented in the Company Profile chapter under the profile of the Board of Commissioners section.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT CRITERIA

The criteria for the Board of Commissioners appointment are as set forth under OJK Regulation 33/2014 as follows:

1. having good moral and integrity as well as legal capacity to take any legal action;

2. within the past five (5) years prior to appointment and during the course of directorship:
   a. has never been declared bankrupt;
   b. has never been performed as former member of the Board of Commissioners or Board of Directors which was declared guilty causing a bankruptcy of a company;
   c. has never been sentenced for a crime causing financial loss to the country and/or financial sector; and

d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
   i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
   ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
   iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada Otoritas jasa keuangan.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Dewan Komisaris kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan. Selanjutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Dewan Komisaris yang telah ditetapkan. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kriteria, akan diusulkan dalam untuk disetujui dan diangkat dalam RUPS Perseroan.

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

Piagam Dewan Komisaris berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan Dewan Komisaris, serta memberikan arahan yang jelas atas fungsi pengawasan sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. STP telah menetapkan Piagam Dewan Komisaris yang disahkan dan disetujui oleh Dewan Komisaris pada 16 Desember 2022 dan tetap berlaku hingga akhir periode pelaporan pada 31 Desember 2025. Piagam tersebut memuat antara lain ketentuan mengenai tugas dan

d. has never been performed as former member of Board of Commissioners or Board of Directors whereby during each directorship:
   i. has never been convened an Annual General Meeting of Shareholders,
   ii. his/her accountability, management and supervisory report rejected by the General Meeting of Shareholders or failed to submit his accountability report as a member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders, and;
   iii. caused a company that had already obtained licenses, approvals or registered with the OJK to not fulfill its obligations to submit annual reports and/ or financial reports to the Financial Service Authority;
3. has a strong commitment to obey and comply with the prevailing regulations; and
4. has a good knowledge and/or competence required by the issuer or public company.

NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In accordance with the Company's Articles of Association, 1 (one) shareholder or more representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights may submit a proposed candidate for the Board of Commissioners to the Company's Remuneration and Nomination Committee through the Corporate Secretary. The Remuneration and Nomination Committee will then review the proposed candidate in accordance with the established criteria for the appointment of members of the Board of Commissioners. Upon completion of such review, the proposed candidate for the Board of Commissioners who meets the criteria will be proposed for approval and appointment at the Company's GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER

The Board of Commissioners Charter serves as a guideline for the implementation of the duties, responsibilities, and authority of the Board of Commissioners, and provides clear direction on the supervisory function in accordance with the Articles of Association and applicable laws and regulations. STP has established a Board of Commissioners Charter that was ratified and approved by the Board of Commissioners on December 16, 2022, and remained in effect through the end of the reporting period on December 31, 2025. The Charter includes,

kewenangan, penyelenggaraan rapat, nilai-nilai, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta larangan-larangan tertentu.

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya bertindak independen antara lain dengan cara-cara sebagaimana tertuang dalam Piagam Dewan Komisaris. Dewan Komisaris senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi dan mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan sendiri. Sesuai dengan POJK 33/2014, Komisaris Independen yang masa jabatannya melebihi 2 (dua) periode wajib menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS sebelum diangkat kembali dalam RUPS.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, lingkup pekerjaan Dewan Komisaris didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan antara lain:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS.
- Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS.

- Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.

among others, provisions concerning duties and authority, the conduct of meetings, values, reporting and accountability mechanisms, as well as certain prohibitions.

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners, in carrying out its duties and responsibilities, acts independently, including by adhering to the methods outlined in the Board of Commissioners Charter. The Board of Commissioners consistently upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company over personal interests. In accordance with OJK Regulation 33/2014, an Independent Commissioner who has served for more than two (2) terms is required to declare their continued independence to the GMS before being reappointed in the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Commissioners' scope of activities are based on prevailing laws and regulations and the Company's Articles of Association, comprises the following duties and responsibilities:

- To supervise and be responsible for the supervision on management policies, general management, both of the Company and its businesses, and provide advices to the Board of Directors.

- To approve the annual business plan of the Company, at the latest prior to the commencement of the following fiscal year.
- To perform duties specifically granted to it under the Articles of Association, the applicable laws and regulations and/or pursuant to General Meeting of Shareholders resolutions.
- To perform duties, authorities and responsibilities in accordance with the terms of the Company's Articles of Association and General Meeting of Shareholders resolutions.
- To examine and review of annual reports prepared by the Board of Directors as well as to execute such annual reports.
- To comply with the Articles of Association as well as the laws and regulations, as well as has to implement professionalism, efficiency, transparency, independency, accountability, responsibility, as well as fairness.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, antara lain meliputi:
  a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
  b. Pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perseroan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.
- Menelah secara berkala struktur modal dan utang Perseroan agar sesuai dengan tujuan strategis dan selera risikonya.
- Atas rekomendasi dari Komite Audit, meninjau dan memastikan setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi batasan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan dengan prinsip *arm's length*, seperti halnya transaksi dilakukan dengan pihak ketiga lainnya.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan di atas, maka Dewan Komisaris berkewajiban untuk:
- Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan dan melaporkan kegiatan pengawasan tersebut kepada RUPS;
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan;
- Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
- Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
- Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan

- Ensuring the implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Company at all levels or tiers of the organization, including:
  a. The execution of duties and responsibilities of the and the Directors;
  b. The performance of duties by committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control, legal compliance, and conflict of interest.
- Reviews on an annual basis that the Company's capital and structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite.
- Review and ensure that each transaction with related parties that meets a certain value threshold, in accordance with applicable laws and regulations, is conducted under fair terms and conditions and follows the arm's length principle, similar to transactions with third parties, based on the recommendation of the Audit Committee.

To support the effective performance of such duties and responsibilities, the Board of Commissioners must establish and determine the composition of an audit committee in accordance with prevailing laws and regulations, as well as Capital Market regulations, and is also required to evaluate the performance of such committees at the end of each fiscal year of the Company.

In reverence to the aforementioned duties, the Board of Commissioners shall:

- Supervise the implementation of the Company's annual work plan and reporting its oversight to the GMS;
- Follow the progress of the Company's activities;
- Provide opinions and advices to the General Meeting of Shareholders of any other matters that are deemed material for the management of the Company;
- Performing other supervisory duties as determined by the GMS; and
- Provide feedback to the Board of Directors' periodic reports and at any time necessary regarding the Company's developments.

PEMBAGIAN TUGAS DAN PENDELEGASIAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di antara anggota, namun demikian fokus bidang pengawasan masing-masing anggota Dewan Komisaris mengacu pada perannya sebagai bagian dari Komite Penunjang Dewan Komisaris sesuai kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.

Komisaris utama memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
2. Dapat memberikan usulan untuk mengadakan rapat Dewan Komisaris, termasuk mengusulkan agenda rapat.
3. Melakukan panggilan dan memimpin rapat Dewan Komisaris.
4. Menyampaikan laporan pengawasan untuk mendapatkan persetujuan RUPST atas pelaksanaan tugas dan pengawasan Dewan Komisaris.

Beberapa anggota Dewan Komisaris merangkap jabatan sebagai ketua dari komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris, sesuai dengan kompetensi dan bidangnya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

DISTRIBUTION OF DUTIES AND DELEGATION OF AUTHORITY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners independently determines the division of work among its members. However, each member's supervisory focus is aligned with their role as part of the Supporting Committees of the Board of Commissioners, based on their competencies and experience.

The President Commissioner has the following duties and responsibilities:
1. Coordinating the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners.
2. Providing proposals for convening Board of Commissioners meetings, including suggesting meeting agendas.
3. Calling and presiding over Board of Commissioners meetings.
4. Presenting the supervisory report for approval at the AGMS regarding the execution of the duties and supervision of the Board of Commissioners.

Several members of the Board of Commissioners concurrently serve as chairpersons of committees under the Board of Commissioners, in accordance with their respective competencies and fields, with the following details:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Chairman
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Remuneration and Nomination Committee Member
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman

KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen sebagaimana disyaratkan dalam POJK 33/2014, diantaranya:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen.

INDEPENDENT COMMISSIONER

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who meets the requirements to serve as an Independent Commissioner as stipulated in OJK Regulation Regulation 33/2014, including:
- Not a person who has worked for or had the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities in the last six (6) months, except for reappointment as an Independent Commissioner.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

- Does not own shares, either directly or indirectly, in the Company.
- Does not have a business relationship, either directly or indirectly, related to the Company's business activities.
- Does not have an affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's Controlling Shareholders.

Pernyataan Independensi Anggota Dewan Komisaris Independen

Pernyataan independensi masing-masing Komisaris Independen selaras dengan yang tertuang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) POJK 33/2014 sebagai berikut:

Statement of Independence of Members of the Independent Board of Commissioners

The statement of independence of each Independent Commissioner is in line with the provisions of Article 25 paragraph (1) OJK Regulation 33/2014, as follows:

Kriteria Komisaris Independen Independent Commissioner Criteria	Pemenuhan Aspek Independensi Fulfillment of Independence Aspects	
	Kusmayanto Kadiman	Harry Mozarta Zen
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months.	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan . Does not own shares either directly or indirectly in the Company.	√	√
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan , anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan . Has no affiliation with the Company, other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors or Controlling Shareholders of the Company.	√	√
Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan . Does not have financial relationships, management relationships, share ownership relationships, family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or Controlling Shareholders of the Company.	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company's business activities.	√	√

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, tata tertib Rapat Dewan Komisaris telah diatur sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS MEETINGS

Pursuant to the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners Meetings are stipulated as follows:

Frekuensi Rapat:

Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali setiap 2 (dua) bulan, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Meeting Frequency:

Meetings of the Board of Commissioners are conducted at least once every 2 (two) months, as stipulated in the Company's Articles of Association.

Pemberitahuan Rapat:
Pemberitahuan rapat disampaikan melalui surat elektronik terdaftar atau diserahkan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat, tidak termasuk tanggal pemberitahuan dan tanggal pelaksanaan rapat.

Kehadiran Rapat:
Rapat dapat dihadiri secara fisik maupun virtual. Kehadiran virtual difasilitasi melalui telekonferensi, konferensi video, atau platform media elektronik lainnya. Jika seorang anggota tidak dapat hadir, anggota tersebut dapat menunjuk anggota Dewan Komisaris lainnya sebagai perwakilan dengan memberikan kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

Persyaratan Kuorum:
Sesuai dengan Piagam Dewan Komisaris, rapat dinyatakan sah dan berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah total anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

Proses Pengambilan Keputusan:
Keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diutamakan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Jadwal Rapat Tahun 2025:
Dewan Komisaris harus menyusun jadwal rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi (Rapat Gabungan) untuk tahun buku berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. Jadwal Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan untuk tahun 2025 telah disusun pada akhir tahun 2024.

Selama tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris.

Meeting Notification:
Notices for the meetings are sent via registered electronic mail or delivered directly to each member of the Board of Commissioners. Notifications must be issued at least 3 (three) days prior to the meeting, excluding the notification and meeting dates.

Meeting Attendance:
Meetings can be attended either physically or virtually. Virtual attendance is facilitated through teleconference, video conference, or other electronic media platforms. If a member is unable to attend, they may appoint another member of the Board of Commissioners as their proxy for the meeting.

Quorum Requirements:
According to the Board of Commissioners' Charter, a meeting is deemed valid and authorized to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total members of the Board of Commissioners are present or legally represented.

Decision-Making Process:
Decisions in the Board of Commissioners meetings shall be prioritized to be made through deliberation to achieve consensus. If consensus cannot be reached, decisions are determined by voting, requiring more than 1/2 (one-half) of the total valid votes cast in the meeting.

Meeting Schedule for 2025:
The Board of Commissioners must prepare the schedule of Board of Commissioners meetings and Board of Commissioners meetings by inviting the Board of Directors (Joint Meetings) for the following financial year before the end of the current financial year. The schedule of Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings for 2025 had been prepared at the end of 2024.

Throughout 2025, the Board of Commissioners held 6 (six) meetings attended by members of the Board of Commissioners.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Rapat Dewan Komisaris
Board of Commissioners Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	6	6	100
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	6	6	100
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi

Sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris Bersama Direksi wajib menyelenggarakan rapat gabungan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Direksi tahun 2025 telah diagendakan sebelum tahun berjalan yang dituangkan dalam program kerja Dewan Komisaris tahun 2024.

Pada tahun 2025, Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi telah dilakukan sebanyak 6 (enam) kali yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors

In reference with the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners with the Board of Directors must hold periodic joint meetings at least once in 4 (four) months. The 2025 Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors has been scheduled before the current year as outlined in the 2024 work program of the Board of Commissioners.

In 2025, the Joint Meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors was held 6 (six) times which was attended by members of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris Bersama Dengan Direksi
Joint Meeting of Board of Commisioner and Board of Director

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Utama (Komisaris Independen) President Commissioner (Independent Commissioner)	6	6	100%
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	6	6	100%
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	6	6	100%
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris | BOC Average Attendance				**100%**
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	6	6	100%
Wong Tjin Tak	Direktur | Director	6	6	100%
Hartono Tanuwidjaja	Direktur | Director	6	6	100%
Wellington	Direktur | Director	6	6	100%
Rata-rata Kehadiran Direksi | BOD Average Attendance				**100%**
Rata-rata Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi | BOC and BOD Average Attendance				**100%**

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyelenggarakan program induksi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai kegiatan usaha Perseroan, arah strategis, pedoman kerja, serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Untuk mendukung efektivitas program tersebut, Perseroan juga menyediakan berbagai dokumen referensi, antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, serta Rencana Jangka Panjang Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program induksi karena tidak terdapat perubahan dalam susunan Dewan Komisaris dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company conducts an induction program for newly appointed members of the Board of Commissioners, organised by the Corporate Secretary. The program aims to provide a comprehensive understanding of the Company's business activities, strategic direction, work guidelines, and the roles and responsibilities of the Board of Commissioners in performing its oversight and advisory functions. To further support this process, the Company provides reference materials, including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, the Articles of Association, and the Long-Term Plan.

In 2025, the Company did not conduct an induction program, as there were no changes in the composition of the Board of Commissioners compared to the previous year.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Perseroan memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas wawasan melalui berbagai program pengembangan. Pada tahun 2025, program pelatihan dan pengembangan yang diikuti oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The Company provides opportunities for the Board of Commissioners to enhance its competencies and broaden its insights through various development programs. In 2025, the training and development programs attended by the Board of Commissioners were as follows:

No.	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Pelatihan Training	Lokasi Location
1	28 Oktober 2025 October 28, 2025	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Indonesian Financing Companies Association	Seminar Nasional *Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction* National Seminar on Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction	Jakarta

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS TAHUN 2025

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas kegiatan operasional Perseroan, di antaranya:

- Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN 2025

In 2025, the Board of Commissioners has carried out supervisory duties over the Company's operational activities, including:

- Supervised and be responsible for supervising management policies, the course of management in general, both regarding the Company and the Company's business, and providing advice to the Board of Directors.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

- Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan.
- Meneliti dan menelaah laporan tahunan dan laporan keuangan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
- Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta tugas komite komite dan satuan kerja di bawah Dewan Komisaris, termasuk fungsi pengendalian internal Perseroan, kepatuhan hukum, dan benturan kepentingan.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015, dimana POJK 21/2015 lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris Perseroan ("Kebijakan Penilaian"). Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Kebijakan Penilaian ini adalah pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Dewan Komisaris.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegial Dewan Komisaris. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

a. Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:
   1. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
   2. Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kegiatan pengurusan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi;
   3. Pelaksanaan fungsi pemberian persetujuan dan masukkan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan; dan

- Provided approval for the Company's annual work plan.
- Researched and review the annual report and financial statements prepared by the Board of Directors and sign the annual report.
- Ensured the implementation of Good Corporate Governance, among others, assessing the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors as well as the duties of committees and units under the Board of Commissioners, including the Company's internal control functions, legal compliance, and conflicts of interest.

BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT POLICY

In the context of implementing good corporate governance as required under OJK Regulation 21/2015, which is further regulated under OJK Circular Letter 32/2015, the Company has prepared a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Commissioners ("Assessment Policy"). The Assessment Policy has been reviewed and approved by the Company's Board of Commissioners. This Assessment Policy serves as a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Commissioners.

According to the Assessment Policy, the performance of the Board of Commissioners is assessed annually by each member of the Board of Commissioners using a self-assessment method on their individual and collegial performance. With this self-assessment, it is expected that each member of the Board of Commissioners can contribute to continuously improving the performance of the Board of Commissioners.

a. The implementation of performance assessment by each member of the Company's Board of Commissioners is carried out with reference to aspects or assessment criteria, including:
   1. Implementation of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners, which include, among others:
   2. Execution of supervisory functions over the management activities of the Company carried out by the Board of Directors;
   3. Execution of functions for giving approvals and input on the Company's annual work plans and budgets; and

b. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
c. Pelaksanaan pengawasan atas penerapan kepatuhan dan tata Kelola perusahaan yang baik.
d. Tingkat kehadiran Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan bersama dengan Direksi
e. Pelaksanaan fungsi pengawasan atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja yang dilakukan melalui proses *self-assessment* menjadi dasar bagi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan dalam memberikan rekomendasi terkait skema remunerasi dan insentif bagi anggota Dewan Komisaris, serta sebagai bahan pertimbangan bagi Pemegang Saham Perseroan dalam menetapkan pengangkatan atau pencalonan anggota Dewan yang bersangkutan.

Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris akan disampaikan melalui Laporan Dewan Komisaris (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam RUPST Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap Komite Pendukung, baik secara individual maupun kolektif, berdasarkan kriteria penilaian yang mencakup kehadiran dalam rapat, kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi secara aktif, integritas, pemahaman atas visi, misi, dan rencana strategis Perseroan, serta kualitas saran dan rekomendasi yang diberikan untuk mendukung program kerja masing-masing komite. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perpanjangan masa jabatan anggota Komite Pendukung untuk tahun berikutnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh 2 (dua) Komite, yaitu Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

b. Execution of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.
c. Oversight of the implementation of compliance and good corporate governance.
d. Attendance level of Commissioners in the Board of Commissioners Meetings and Joint Meetings with the Board of Directors.
e. Oversight of the performance of committees under the Board of Commissioners.

The performance assessment results conducted through the self-assessment process serve as a basis for the Company's Remuneration and Nomination Committee in providing recommendations on the compensation and incentive schemes for members of the Board of Commissioners, and a reference for the Company's Shareholders in determining the appointment or nomination of the relevant Board members.

The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Commissioners will be conveyed through the Board of Commissioners Report (as part of the Annual Report) which will then become one of the agenda items discussed and approved in the Company's AGMS.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING COMMITTEE

The Board of Commissioners conducts an annual performance assessment of the Supporting Committees, both individually and collectively, based on assessment criteria that include attendance at meetings, the ability to work collaboratively and communicate actively, integrity, understanding of the Company's vision, mission, and strategic plans, as well as the quality of advice and recommendations provided to support each committee's work program. The results of such assessment are used as a basis for consideration in extending the term of office of Supporting Committee members for the following year.

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is supported by 2 (two) Committees, which are the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Komite Audit mendukung Dewan Komisaris dalam memperkuat efektivitas fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan Perseroan. Dukungan tersebut mencakup pemberian rekomendasi terkait pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab fungsi audit internal dan audit eksternal, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Remunerasi dan Nominasi mendukung Dewan Komisaris dalam melakukan evaluasi kebijakan remunerasi, menelaah proses nominasi dan perencanaan suksesi, serta menilai kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Melalui pelaksanaan fungsi tersebut, Komite memastikan bahwa struktur remunerasi diterapkan secara wajar, kompetitif, dan selaras dengan kinerja, sekaligus mendukung efektivitas kepemimpinan, praktik tata kelola yang baik, dan kepentingan jangka panjang Perseroan.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris melakukan penilaian menyeluruh terhadap kinerja masing-masing komite berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Hasil penilaian menyimpulkan bahwa sepanjang tahun 2025, seluruh komite telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, termasuk dalam aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan dukungan terhadap proses pengambilan keputusan strategis Perseroan.

REMUNERASI BAGI DEWAN KOMISARIS

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan keputusan RUPS, besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh pemegang saham pengendali Perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Dalam penetapan remunerasi tersebut, sejumlah faktor menjadi pertimbangan, antara lain:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan

The Audit Committee supports the Board of Commissioners in strengthening the effectiveness of oversight over the Company's financial reporting process. This includes providing recommendations on the appointment, replacement, and performance of duties of the internal and external audit functions, as well as ensuring compliance with applicable laws and regulations.

The Remuneration and Nomination Committee supports the Board of Commissioners in evaluating remuneration policies, reviewing nomination and succession planning processes, and assessing the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Committee ensures that remuneration structures are fair, competitive, and aligned with performance, while supporting effective leadership, sound governance practices, and the long-term interests of the Company.

In 2025, the Board of Commissioners conducted a comprehensive assessment of the performance of each committee based on established criteria. The assessment concluded that throughout 2025, all committees effectively fulfilled their duties and responsibilities in accordance with the criteria set by the Board of Commissioners, including compliance with applicable regulations and support for the Company's strategic decision-making process.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

Board of Commissioners Remuneration Procedures

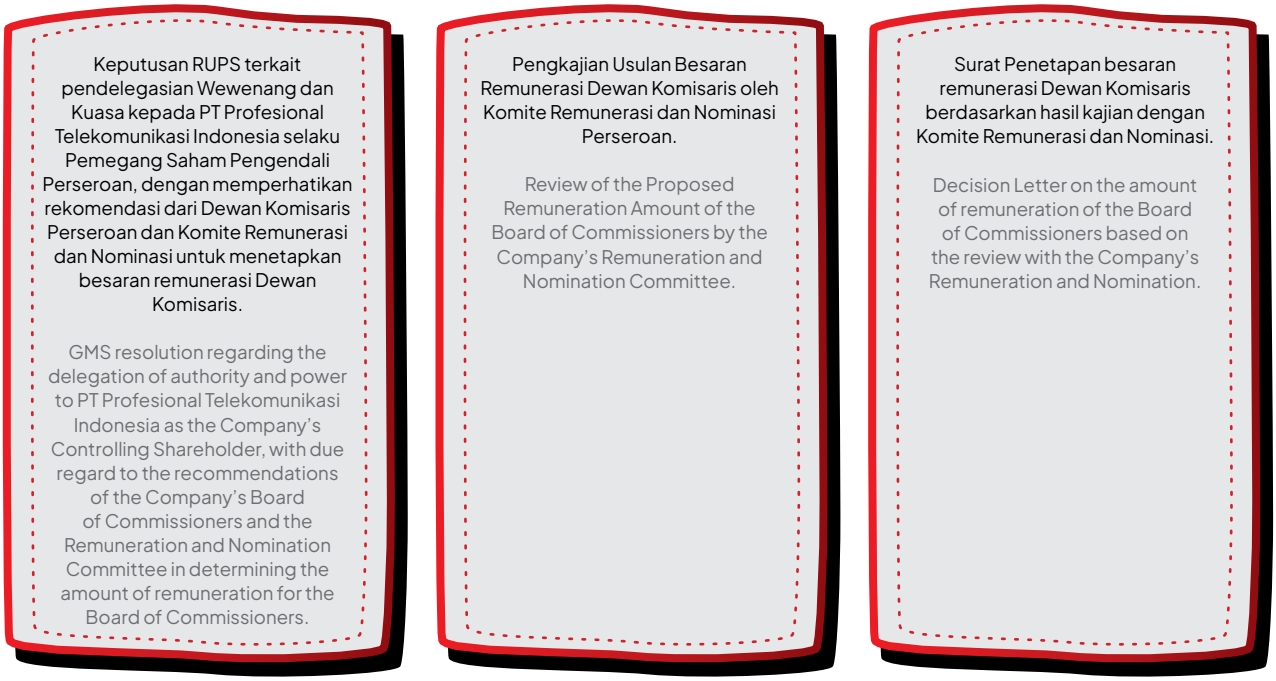
Based on the GMS resolution, the amount of remuneration for the Board of Commissioners is determined by the Company's controlling shareholder, namely PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, taking into account the recommendations of the Company's Board of Commissioners and the Company's Remuneration and Nomination Committee. In determining such remuneration, a number of factors are taken into consideration, including:

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Board of Directors and Board of Commissioners; and

4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Proses Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris
Board of Commissioners Remuneration Determination Process



Struktur Remunerasi Dewan Komisaris

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2025 adalah sebesar Rp15,3 milliar.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, adalah sebagai berikut:

Board of Commissioners' Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Commissioners for fiscal year 2025 was Rp15.3 billion.

The remuneration structure indicating the Remuneration component for the Board of Commissioners in 2025 is as follows:

Nama Name	**Gaji** Salary	**Tunjangan*** Allowance*					**Jumlah Remunerasi/Tahun (*Gross*)*** Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	**Kepemilikan Kendaraan** Car Ownership Program	**Pajak** Tax	**Tunjangan Hari Raya** Religious Holiday Allowance	**Tunjangan lain** Other Allowances	**Di bawah 1 miliar Rupiah** Under 1 billion Rupiah	**Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah** Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	**Di atas 2 miliar Rupiah** Above 2 billion Rupiah
Kusmayanto Kadiman	√	-	-	√	√	√	-	-	√
Harry Mozarta Zen	√	-	-	√	√	√	√	-	-
Eko Santoso Hadiprodjo	√	-	-	√	√	√	-	-	√

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Dewan Komisaris, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Commissioners including their other positions in the other entities within the Company Group (as relevant)

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib untuk memberitahukan kepada OJK apabila terjadi perubahan kepemilikan atas saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya perubahan kepemilikan akan saham Perseroan.

Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Sesuai dengan POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka **("POJK 4/2024")**, Surat Edaran OJK Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyampaian Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik **("SEOJK 10/2025")** dan Pedoman Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan dan Pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham, Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya kepada OJK melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kepemilikan hak suara atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DEWAN KOMISARIS APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014, OJK mengeluarkan POJK 21/2015, dimana POJK 21/2015 lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015. POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran

BOARD OF COMMISSIONERS SHARE OWNERSHIP POLICY

All members of the Board of Commissioners are required to notify the OJK if there is a change in ownership of the Company's shares, either directly or indirectly, no later than 3 (three) working days after the change of ownership of the Company's shares.

Throughout 2025, there are no members of the Board of Commissioners who own shares of the Company, either directly or indirectly.

Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

In accordance with OJK Regulation No. 4 of 2024 concerning Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares in Public Companies **("OJK Regulation 4/2024"),** OJK Circular Letter No. 10 of 2025 concerning the Electronic Submission of Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership of Public Companies and Reports on Pledging Activities of Shares in Public Companies **("OJK Circular Letter 10/2025"),** and the Guidelines for Reporting Share Ownership or Any Changes in Ownership and Reporting Pledging Activities of Shares, the Company has established a policy requiring members of the Board of Directors and Board of Commissioners to report any changes in their ownership of the Company's shares to OJK through the electronic system provided by KSEI immediately, no later than 3 (three) business days from the date of acquiring voting rights or any change in ownership of voting rights over the Company's shares.

RESIGNATION PROCEDURE FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS WHO ARE INVOLVED IN FINANCIAL

Law 40/2007 and OJK Regulation 33/2014 stipulate, among the requirements for the appointment of members of the Board of Commissioners, that they must never have been convicted of a criminal act that causes loss to state finances and/or relates to the financial sector. In line with the Law 40/2007 and OJK Regulation 33/2014, OJK issued OJK Regulation 21/2015, which is further regulated under OJK Circular Letter 32/2015. Among other things, OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015 recommend that public companies have a policy

diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang.

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK.
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggung jawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan saat ini mencerminkan keberagaman keahlian, latar belakang, dan pengalaman industri, yang mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan. Informasi mengenai keberagaman Dewan Komisaris disajikan dalam profil masing-masing anggota Dewan Komisaris pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

regarding the resignation of members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, as well as the criminal act of money laundering.

In order to comply with the provisions of OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015, the Company has established a resignation policy for members of the Board of Commissioners who are involved in financial crimes.

The resignation procedure for the members of the Board of Commissioners are as follows:
1. A member of the Board of Commissioners shall resign from their position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;

2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK.

3. The Company shall convey a GMS to approve the resignation of such Commissioner within a maximum period of 90 (ninety) days after receiving his resignation letter; The members of the Board of Commissioners who resigned shall be held liable from the date of their appointment to their position until the date of resignation as approved by the GMS.

4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit it to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF COMMISSIONERS DIVERSITY

The current composition of the Company's Board of Commissioners reflects a diverse range of expertise, backgrounds, and industry experience, which supports the effectiveness of its supervisory function over the Company's management. Information on the diversity of the Board of Commissioners is presented in the profile of each Commissioner in the Company Profile chapter of this Annual Report.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DEWAN KOMISARIS

Perseroan memastikan bahwa apabila terdapat pemberian pinjaman kepada anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait transaksi afiliasi, benturan kepentingan, dan transaksi material, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip kewajaran (*arm's length*) sebagaimana transaksi dengan pihak ketiga lainnya. Untuk menjamin penerapan prinsip kewajaran tersebut, setiap pemberian pinjaman wajib melalui proses analisis dan memperoleh persetujuan dari Komite Audit Perseroan.

POLICY ON LOANS TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Company ensures that any loans provided to members of the Board of Commissioners are granted in compliance with applicable laws and regulations, particularly those governing affiliated transactions, conflicts of interest, and material transactions, and are conducted on an arm's length basis comparable to transactions with other third parties. To uphold the arm's length principle, any such loans are subject to prior analysis and approval by the Company's Audit Committee.

DIREKSI
Board of Directors

Direksi bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengelola seluruh kegiatan operasional dan usaha Perseroan, dengan kewenangan penuh dalam menerapkan prinsip GCG di seluruh organisasi. Sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Direksi berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, baik dalam perkara hukum maupun di luar pengadilan. Meskipun setiap Direktur memiliki kewenangan pengambilan keputusan sesuai dengan fungsi masing-masing, pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara kolektif. Seluruh anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, memiliki tanggung jawab dan kedudukan yang setara dalam menjalankan tugasnya.

The Board of Directors is responsible for directing and managing the Company's operations and business activities, with full authority to implement GCG principles throughout the organisation. As stipulated in the Company's Articles of Association, the Board of Directors is authorised to act for and on behalf of the Company, both in judicial and non-judicial matters. While each Director is entrusted with decision-making authority within their respective functions, the overall management of the Company is carried out collectively. All members of the Board of Directors, including the President Director, share equal responsibility and standing in performing their duties.

DASAR HUKUM

Penunjukan Direksi berdasarkan ketentuan:
1. UUPT 40/2007.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. POJK 33/2014.

LEGAL BASIS

Appointment of the Board of Directors refers to:
1. Law 40/2007.
2. Articles of Association of the Company.
3. OJK Regulation 33/2014.

SUSUNAN DAN KOMPOSISI DIREKSI

Pada tahun 2025, tidak terdapat perubahan dalam susunan Direksi, dengan demikian, komposisi Direksi Perseroan hingga 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE AND COMPOSITION

In 2025, there were no changes in the composition of the Board of Directors. Accordingly, the composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 16 November 2021 Basis of First Appointment: EGMS November 16, 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Basis of Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026
Wong Tjin Tak	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 16 November 2021 Basis of First Appointment: EGMS November 16, 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Basis of Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026
Hartono Tanuwidjaja	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 16 November 2021 Basis of First Appointment: EGMS November 16, 2021 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Basis of Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026
Wellington	Direktur Director	Dasar Pengangkatan Pertama kali: RUPSLB 1 Maret 2022 Basis of First Appointment: EGMS March 1, 2022 Dasar Pengangkatan Terakhir: RUPST 5 Mei 2023 Basis of Last Appointment: AGMS May 5, 2023	2023–2026

Direksi
Board of Directors

MASA JABATAN DIREKSI

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana mereka diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPST ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut wajib diputuskan oleh RUPS dengan memperhatikan ketentuan UUPT 40/2007, POJK 33/2014, dan Anggaran Dasar Perseroan.

RANGKAP JABATAN DIREKSI

Perseroan mengatur rangkap jabatan yang dijabat oleh anggota Direksi sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014. Berdasarkan ketentuan tersebut, anggota Direksi diperkenankan untuk merangkap jabatan sebagai:

a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau
c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Laporan Tahunan ini, seluruh anggota Direksi Perseroan telah mematuhi ketentuan yang berlaku dan tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki lebih dari dua rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi maupun Dewan Komisaris pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Informasi mengenai rangkap jabatan anggota Direksi pada perusahaan, lembaga, atau organisasi lain selama tahun 2025 disajikan dalam Bab Profil Perusahaan, pada bagian Profil Anggota Direksi.

KRITERIA PENGANGKATAN DIREKSI

Pengangkatan Direksi berdasarkan kriteria POJK 33/2014 adalah:

1. Memiliki akhlak, moral yang baik dan integritas yang baik serta cakap melakukan perbuatan hukum;

BOARD OF DIRECTORS TENURE

Members of the Board of Directors are appointed and dismissed by the GMS, and such appointment shall take effect from the date determined at the GMS at which they are appointed and shall end at the closing of the 3rd (third) AGMS following the date of their appointment. Members of the Board of Directors whose term of office has expired may be reappointed by the General Meeting of Shareholders.

In the event that a member of the Board of Directors resigns, the resignation must be decided by the GMS allowing for the provisions of Law 40/2007, OJK Regulation 33/2014, and the Company's Articles of Association.

BOARD OF DIRECTORS CONCURRENT POSITIONS

The Company regulates concurrent positions held by members of the Board of Directors in accordance with the provisions of OJK Regulation 33/2014. Based on such provisions, members of the Board of Directors are permitted to concurrently serve as:

a. a member of the Board of Directors in a maximum of 1 (one) other Issuer or Public Company;
b. a member of the Board of Commissioners in a maximum of 3 (three) other Issuers or Public Companies; and/or
c. a member of a committee in a maximum of 5 (five) committees in an Issuer or Public Company where the relevant person also serves as a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners.

As of the date of this Annual Report, all members of the Company's Board of Directors have complied with the applicable provisions, and there are no members of the Board of Directors who hold more than two concurrent positions, whether as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners in other issuers or public companies. Information regarding the concurrent positions of members of the Board of Directors in other companies, institutions, or organizations during 2025 is presented in the Company Profile chapter, under the Profile of the Board of Directors section.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT CRITERIA

The Company's Board of Directors has fulfilled the following criteria as stipulated by POJK 33/2014:

1. have good morals and integrity as well as capable of doing legal action;

2. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
   d. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan komisaris yang selama menjabat:
      i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
      ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan komisaris kepada RUPS; dan
      iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan dan/ atau Laporan keuangan kepada OJK.
3. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
4. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.

PROSEDUR NOMINASI DAN PENGANGKATAN DIREKSI

1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat menyampaikan usulan kandidat anggota Direksi kepada Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan melalui Sekretaris Perusahaan. Jika diperlukan, Perseroan dapat menggunakan jasa dari pihak ketiga yang independen untuk terlibat dalam proses pemilihan kandidat anggota Direksi. Selanjutnya, Komite Remunerasi dan Nominasi akan memeriksa usulan kandidat sesuai dengan kriteria pengangkatan Direksi yang telah disebutkan di atas. Setelah pemeriksaan selesai, usulan kandidat anggota Direksi yang memenuhi kriteria, akan diusulkan untuk disetujui dan diangkat dalam RUPS Perseroan.

2. within 5 (five) years before appointment and during the term of office:
   a. has never been declared bankrupt;
   b. has never been a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners that is found guilty of causing a company to be declared bankrupt;
   c. has never been punished for committing criminal acts that are detrimental to state finances and/or relating to the financial sector; and
   d. has never been a member of the Board of Directors and/or any member of the Board of Commissioners during his tenure:
      i. has never convened an annual GMS;
      ii. his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners has not been accepted by the GMS or has not granted responsibility as a member of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders; and
      iii. has never caused a company obtaining permit, approval or registration from the OJK fails to fulfill the obligation to submit the Annual Report and/or Financial Statement to the OJK.
3. have a commitment to comply with laws and regulations; and
4. have knowledge and/or expertise in the field.

NOMINATION AND APPOINTMENT PROCEDURE FOR THE BOARD OF DIRECTORS

One (1) or more shareholders representing at least 1/20 (one-twentieth) of the total shares with voting rights may submit a candidate proposal for the Board of Directors to the Company's Remuneration and Nomination Committee through the Corporate Secretary. If necessary, the Company may engage the services of an independent third party to participate in the selection process for Board of Directors candidates. Subsequently, the Remuneration and Nomination Committee will review the proposed candidate based on the appointment criteria for the Board of Directors as mentioned above. Once the review is completed, the proposed candidate who meets the criteria will be nominated for approval and appointment at the Company's GMS.

Direksi
Board of Directors

INDEPENDENSI DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi bertindak secara independen sebagaimana diatur dalam Piagam Direksi. Direksi senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi serta mengutamakan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi maupun individu.

PIAGAM DIREKSI

Piagam Direksi atau Pedoman Kerja Direksi berfungsi sebagai acuan bagi Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sekaligus memastikan koordinasi yang efektif dalam pengelolaan kegiatan usaha Perseroan. Piagam Direksi ini antara lain memuat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Direksi, penyelenggaraan rapat, nilai-nilai, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, serta larangan-larangan tertentu. Piagam tersebut ditinjau secara berkala agar tetap selaras dengan perkembangan peraturan serta kebutuhan Perseroan. Piagam Direksi yang berlaku saat ini telah ditelaah dan disetujui oleh Direksi pada 16 Desember 2022 dan tetap berlaku hingga akhir tahun pelaporan pada 31 Desember 2025.

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Direksi tertuang dalam Anggaran Dasar dan Piagam Direksi, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin dan mengambil tindakan yang terkait dengan manajemen Perseroan demi mencapai kepentingan terbaik Perseroan dan sasaran Perseroan yang terdiri dari:
   a. Menjaga dan mengelola aset Perseroan; dan
   b. Berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dan operasional Perseroan.
2. Secara sah mewakili dan mengikat Perseroan, termasuk dalam pengadilan yang telah tercantum dalam hukum dan peraturan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan- keputusan yang disepakati oleh pemegang saham.

Wewenang Direksi, antara lain mewakili Perseran di dalam dan di luar Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan

INDEPENDENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Directors acts independently as stipulated in the Board of Directors Charter. The Board of Directors consistently upholds the principle of independence and prioritizes the interests of the Company over personal or individual interests.

THE BOARD OF DIRECTORS' CHARTER

The Board of Directors' Charter or Work Guidelines serves as a reference for the Board of Directors in carrying out their duties and responsibilities, while ensuring effective coordination in managing the Company's business activities. The Board of Directors' Charter sets out, among others, the duties and authorities of the Board of Directors, meeting arrangements, values, reporting mechanisms, responsibilities, and prohibited acts. The Charter is subject to periodic review to remain aligned with regulatory developments and the evolving needs of the Company. The current Boards' Charter was reviewed and approved by the Board of Directors on December 16, 2022 and remains effective until the end of the reporting year on December 31, 2025.

BOARD OF DIRECTORS DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors has the collective duty and responsibility in managing the Company. The Articles of Association and the Board of Directors' Board Manual outline its duties and responsibilities, as follows:

1. To lead and take actions in relation to the management of the Company in the best interests of the Company and to further the Company's objectives, which include:
   a. Maintaining and managing the Company's assets; and
   b. Seeking to improve the efficiency and effectiveness of the Company's employees and operations.
2. To officially represent and bind the Company, including in a court of law, as provided for in the laws and regulations, the Articles of Association and/or resolutions adopted by the shareholders.

The authority of the Board of Directors includes, among other things, representing the Company both internally and externally, binding the Company with

baik mengenai pengurusan maupun kepemilikan dengan memperhatikan batasan-batasan tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

Selain daripada itu, tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan dari pemegang saham, terutama:

1. Mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari ½ bagian dari jumlah kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 tahun buku;
2. Menjadikan jaminan utang (kebendaan) yang jumlahnya lebih dari ½ bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Tanggung Jawab Individual dan Bersama Direksi

Direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara individual dan kolektif atas kerugian Perseroan apabila terbukti bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan kecurangan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, salah satu anggota Direksi ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penerapan dan pemantauan GCG di lingkungan Perseroan.

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Tanggung jawab Masing-Masing Anggota Direksi

Untuk tujuan pengelolaan Perseroan secara lebih efektif dan efisien, setiap anggota Direksi memiliki peran dan tanggung jawab khusus yang dijabarkan dalam uraian peran masing-masing, yaitu sebagai berikut:

other parties, and carrying out all actions related to management and ownership, while adhering to certain limitations as outlined in the Company's Articles of Association and complying with the laws and regulations applicable in the Indonesian Capital Market sector.

In addition, actions by the Board of Directors that require approval from shareholders, particularly:

1. Transferring or releasing rights amounting to more than ½ of the Company's total assets, whether in one transaction or multiple independent or interrelated transactions within one fiscal year;

2. Pledging assets as debt collateral amounting to more than ½ of the Company's total net assets or representing the entire assets of the Company, whether in one transaction or multiple independent or interrelated transactions;

Board of Directors Joint and Individual Responsibility

The Board of Directors is required to perform its duties in good intentions and with full responsibility. Each member of the Board of Directors is individually and collectively liable for any losses incurred by the Company if it is proven that such losses arise from fraud or negligence in the performance of their duties, in accordance with prevailing laws and regulations. To strengthen the implementation of good corporate governance, one member of the Board of Directors is appointed to be responsible for overseeing and monitoring GCG application in the Company.

Scope of Work and Responsibilities of Each Member of the Board of Directors

For the purpose of more effective and efficient management of the Company, each Board Member has a specific role and responsibility, which is outlined in their respective job descriptions, as follows:

Direksi
Board of Directors

Nama & Jabatan Name & Position	Pembagian Tugas Segregation of Duties
Juliawati Gunawan Halim Direktur Utama President Director	Bertanggung jawab atas seluruh arah kebijakan dan strategi pengembangan bisnis Perseroan, serta mengkoordinasikan Direktur lainnya dalam melaksanakan rencana strategis Perseroan untuk meningkatkan pendapatan, profitabilitas, pertumbuhan, dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik. Responsible for the overall direction of policies and business development strategies of the Company, as well as coordinating with other Directors in implementing the Company's strategic plans to enhance revenue, profitability, growth, and the implementation of good corporate governance.
Hartono Tanuwidjaja Direktur Director	Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas operasional, antara lain yang berkaitan dengan pengembangan bisnis Perseroan. Responsible for planning, coordinating, directing, controlling, executing, and evaluating operational tasks, including those related to the Company's business development.
Wong Tjin Tak Direktur Director	Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas operasional, antara lain yang berkaitan dengan atas bidang teknologi informasi Responsible for planning, coordinating, directing, controlling, executing, and evaluating operational tasks, including those related to information technology.
Wellington Direktur Director	Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, melaksanakan dan mengevaluasi tugas-tugas operasional, antara lain yang berkaitan dengan atas bidang *commercial support*. Responsible for planning, coordinating, directing, controlling, executing, and evaluating operational tasks, including those related to commercial support.

RAPAT DIREKSI

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, rapat Direksi telah diatur dengan tata tertib sebagai berikut:

Frekuensi Rapat:
Rapat Direksi harus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan atau sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun. Selain itu, rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan untuk membahas hal-hal tertentu atau mendesak.

Pemberitahuan Rapat:
Pemberitahuan rapat Direksi dikirimkan melalui surat elektronik terdaftar atau disampaikan langsung kepada setiap anggota. Pemberitahuan harus diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal pelaksanaan rapat.

Kehadiran Rapat:
Rapat Direksi dapat diadakan secara fisik maupun non-fisik. Kehadiran non-fisik difasilitasi melalui telekonferensi, konferensi video, atau platform komunikasi elektronik lainnya. Jika seorang anggota tidak dapat hadir, anggota tersebut dapat menunjuk anggota Direksi lainnya untuk mewakilinya dengan memberikan kuasa khusus yang diberikan untuk tujuan tersebut.

BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Directors' meetings are stipulated as follows:

Meeting Frequency:
The meetings of the Board of Directors shall be convened at least once a month or 12 (twelve) times a year. Additional meetings may be held as needed to address specific requirements or urgent matters.

Meeting Notification:
Notifications for Board of Directors meetings are sent via registered electronic mail or delivered directly to each member. These notifications must be issued at least 7 (seven) days prior to the meeting date, excluding the date of notification and the date of the meeting itself.

Meeting Attendance:
Board meetings can be conducted with either physical or non-physical attendance. Non-physical meetings are facilitated through teleconference, video conference, or other electronic communication platforms. If a member is unable to attend, they may appoint another Board member to represent them by granting a specific proxy for this purpose.

Persyaratan Kuorum:
Sesuai dengan Piagam Direksi, rapat dinyatakan sah dan berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam rapat.

Proses Pengambilan Keputusan:
Keputusan dalam rapat Direksi diutamakan diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara yang membutuhkan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari total suara sah yang diberikan dalam rapat.

Jadwal Rapat Tahun 2025:
Jadwal rapat Direksi untuk tahun 2025 telah disusun sebelumnya dan dimasukkan ke dalam program kerja Direksi tahun 2024.

Selama tahun 2025, Rapat internal Direksi telah dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali yang dihadiri oleh anggota Direksi.

Quorum Requirements:
According to the Board of Directors' Charter, a meeting is considered valid and authorized to make binding decisions if more than 1/2 (one-half) of the total Board members are present or legally represented during the meeting.

Decision-Making Process:
Decisions in Board of Directors meetings shall be prioritized to be made through deliberation to achieve consensus. If consensus cannot be reached, decisions are determined by a vote, requiring more than 1/2 (one-half) of the total valid votes cast during the meeting.

Meeting Schedule for 2025:
The schedule for the 2025 Board of Directors meetings was prepared in advance and incorporated into the 2024 Board of Directors work program.

During 2025, internal meetings of the Board of Directors have been held 12 (twelve) times attended by members of the Board of Directors.

Rapat Direksi
Board of Directors Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Juliawati Gunawan Halim	Direktur Utama President Director	12	12	100
Wong Tjin Tak	Direktur | Director	12	12	100
Hartono Tanuwidjaja	Direktur | Director	12	12	100
Wellington	Direktur | Director	12	12	100

PROGRAM PENGENALAN PERUSAHAAN UNTUK DIREKSI

Perseroan menyelenggarakan program induksi bagi anggota Direksi yang baru diangkat, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Perusahaan. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kegiatan usaha Perseroan, rencana strategis, pedoman kerja, serta peran dan tanggung jawab Direksi. Selain paparan dari manajemen, Direksi juga dibekali berbagai dokumen referensi, antara lain Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, Anggaran Dasar, Rencana Jangka Panjang Perseroan, serta dokumen pendukung lainnya guna meningkatkan pemahaman dan efektivitas pelaksanaan tugas.

COMPANY INDUCTION PROGRAM FOR DIRECTORS

The Company provides an induction program for newly appointed members of the Board of Directors, organised by the Corporate Secretary. The program is designed to provide a comprehensive understanding of the Company's business activities, strategic plans, work guidelines, and the roles and responsibilities of the Board of Directors. In addition to presentations delivered by management, Directors are also provided with key reference documents, including the Annual Report, the Company's Work Plan and Budget, the Articles of Association, the Company's Long-Term Plan, and other relevant supporting materials to enhance their understanding and effectiveness.

Direksi
Board of Directors

Pada tahun 2025, Perseroan tidak menyelenggarakan program induksi bagi Direksi karena tidak terdapat pengangkatan Direksi baru sepanjang tahun tersebut.

In 2025, the Company did not conduct an induction program for the Board of Directors, as there were no new appointments to the Board during the year.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Pada tahun 2025, Direksi Perseroan mengikuti program pendidikan atau pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

In 2025, the Board of Directors of the Company attended the following educational program or training related to the business activities of the Company:

No.	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Pelatihan Training	Lokasi Venue
1.	28 Agustus 2025 August 28, 2024	Snowflake	Snowflake World Tour	Jakarta

Sepanjang tahun 2025, Bapak Wong Tjin Tak juga menjadi narasumber pada beberapa seminar dan pelatihan, antara lain sebagai berikut:

Throughout 2025, Mr. Wong Tjin Tak also served as a speaker at several seminars and training programs, including the following:

No.	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Pelatihan Training	Lokasi Venue
1.	8 April 2025 April 8, 2025	Snowflake	D4B – Virtual Seminar	Online
2	21 Mei 2025 May 21, 2025	Internal	Comprehensive Development Program	Jakarta

KEBIJAKAN SUKSESI DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Sesuai dengan ketentuan dalam POJK 33/2014 usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi dalam RUPS harus mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. STP memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi yang berperan penting dalam menyiapkan kepemimpinan Perseroan, khususnya untuk memastikan bahwa anggota Direksi merupakan individu yang profesional, berintegritas, berdedikasi, serta memiliki kompetensi dalam mengelola kegiatan operasional Perseroan.

Berdasarkan hal tersebut, Komite Remunerasi dan Nominasi menetapkan kebijakan suksesi Direksi yang mengatur persyaratan pencalonan anggota Direksi yang akan ditetapkan dalam RUPS. Kebijakan ini disusun dengan mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan serta POJK 33/2014.

SUCCESSION POLICY OF THE BOARD OF DIRECTORS (INCLUDING THE PRESIDENT DIRECTOR)

Pertaining to OJK Regulation 33/2014 proposals for the appointment, dismissal, and/or replacement of members of the Board of Directors at the GMS must consider recommendations from the Board of Commissioners or the committee responsible for the nomination function. STP has a Remuneration and Nomination Committee that serves a key role in preparing the Company's leadership, particularly in ensuring that members of the Board of Directors are professional, with integrity, are dedicated, and have the necessary competencies to manage the Company's operations.

Based on this, the Remuneration and Nomination Committee has established a Board of Directors succession policy that outlines the qualifications for director candidates to be appointed at the GMS. This policy is formulated by referring to the Company's Articles of Association and OJK Regulation 33/2014.

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGUNG JAWAB DIREKSI TAHUN 2025

Pada Tahun 2025, Direksi telah melaksanakan tugas yang bersifat strategis, antara lain sebagai berikut:

1. Memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud tujuan yang ditetapkan oleh anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk kepentingan Perseroan dan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
2. Mengendalikan, memelihara dan mengelola aset Perseroan; dan
3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan.
4. Menyusun laporan tahunan.
5. Menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan Perseroan.

Perbuatan Direksi yang Memerlukan Persetujuan Tertulis dari Dewan Komisaris

Tindakan Direksi yang perlu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, antara lain:

1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan pada Bank);
2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
3. Memberikan jaminan perusahaan sehubungan dengan pembiayaan yang diperoleh anak usaha maupun induk usaha dari lembaga bank.

KEBIJAKAN TENTANG PENILAIAN KINERJA DIREKSI (TERMASUK DIREKTUR UTAMA)

Dalam rangka penerapan tata kelola Perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015 dimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015, Perseroan telah menyusun Kebijakan Penilaian Kinerja Direksi Perseroan **("Kebijakan Penilaian")**. Kebijakan Penilaian telah diperiksa dan disetujui oleh Direksi Perseroan. Kebijakan Penilaian ini menjadi pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi.

Berdasarkan Kebijakan Penilaian, penilai kinerja setiap anggota Direksi, termasuk Direktur Utama, dilakukan pada setiap tahun buku oleh masing-

IMPLEMENTATION OF DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025

In 2025, the Board of Directors has carried out strategic duties, including the following:

1. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the objectives set by the articles of association and the provisions of the prevailing laws and regulations, as well as for the benefit of the Company and strives to make efforts to improve the efficiency and effectiveness of the Company.
2. Controlling, maintaining and managing the Company's assets.
3. Develop an annual work plan containing the Company's annual budget.
4. Develop an annual report.
5. Apply GCG principles in every activity of the Company.

Board of Directors Actions that Require Written Approval from the Board of Commissioners

Actions of the Board of Directors that require approval from the Board of Commissioners include, among others:

1. Borrowing or lending money in the name of the Company (excluding withdrawing the Company's funds from a bank);
2. Establishing a new business or participating in another company, whether domestically or abroad;
3. Providing corporate guarantees in connection with financing obtained by subsidiaries or the parent company from banking institutions.

BOARD OF DIRECTORS PERFOMANCE ASSESSMENT POLICY (INCLUDING PRESIDENT DIRECTOR)

In the context of implementing good corporate governance as required under OJK Regulation 21/2015, which is further regulated under OJK Circular Letter 32/2015, the Company has prepared a Performance Assessment Policy for the Company's Board of Directors **("Assessment Policy")**. The Assessment Policy has been reviewed and approved by the Company's Board of Directors. This Assessment Policy serves as a guideline used as a form of accountability for the performance assessment of the Board of Directors.

According to the Assessment Policy, the performance evaluation of each member of the Board of Directors, including the President Director, is conducted annually

Direksi
Board of Directors

masing Direksi dengan menggunakan metode *self-assessment* atas kinerja individual dan kolegial Direksi. Dengan adanya *self-assessment* ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan.

Pelaksanaan penilaian kinerja oleh masing-masing Direksi Perseroan, termasuk Direktur Utama akan dilakukan dengan mengacu kepada aspek-aspek atau kriteria penilaian, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi yang mencakup hal-hal, antara lain sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan fungsi memimpin, mengelola, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan;
   b. Peningkatan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
   c. Pengendalian, pemeliharaan dan pengelolaan aset Perseroan;
   d. Penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris; dan
   e. Pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Anggaran Dasar, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau keputusan RUPS
2. Pemenuhan dan pencapaian *Company Shared Key Performance Indicators* (KPI) atau target, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota Direksi, yang telah disusun dan disepakati sebelumnya.
3. Penerapan kepatuhan *(compliance)* dan tata Kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).*
4. Tingkat kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi dan Rapat Gabungan bersama dengan Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja melalui proses self-assessment untuk selanjutnya akan disampaikan kepada Direktur Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penentuan skema kompensasi/ insentif bagi Direksi dan pertimbangan dasar bagi Pemegang Saham Perseroan untuk menentukan penunjukan atau pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan masukkan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab Direksi akan disampaikan melalui Laporan Direksi (sebagai bagian dari Laporan Tahunan) yang

by each Director using a self-assessment method on their individual and collegial performance. This self-assessment aims to help each Director contribute continuously towards improving the performance of the Board of Directors.

The implementation of performance assessment by each Director of the Company, including the President Director, will be based on various aspects or evaluation criteria, including the following:

1. Execution of functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors, which includes:
   a. Leading, managing, and controlling the Company in accordance with the Company's objectives;
   b. Enhancing the efficiency and effectiveness of the Company;
   c. Control, maintenance, and management of the Company's assets;
   d. Preparation of the Company's annual work plan and budget to be submitted to the Board of Commissioners; and
   e. Fulfillment of functions, duties, and responsibilities in accordance with the Articles of Association, prevailing laws and regulations, and/or decisions of the GMS.
2. Fulfillment and achievement of Company Shared Key Performance Indicators (KPIs), or targets, according to the duties and functions of each member of the Board of Directors, which have been previously arranged and agreed upon.
3. Implementation of compliance and good corporate governance.
4. Attendance level of the Directors in the Board Meetings and Joint Meetings with the Board of Commissioners.

The performance assessment results through the self-assessment process will subsequently be presented to the President Director, who serves an integral part in determining compensation/ incentive schemes for the Board of Directors and serves as a fundamental consideration for the Company's Shareholders to decide on the appointment or nomination of the respective Directors, taking into account inputs from the Company's Remuneration and Nomination Committee. The entire execution of the functions, duties, and responsibilities of the Board of Directors will be reported through the Directors' Report (as part of the Annual Report), which will then become one

kemudian akan menjadi salah satu mata acara/agenda yang dibahas dan disetujui dalam RUPST Perseroan.

PENILAIAN KINERJA KOMITE-KOMITE YANG MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan fungsi eksekutif Perseroan, Direksi didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Audit Internal dan Manajemen Risiko serta dibantu oleh masing-masing Kepala Departemen yang memberikan laporan secara rutin dalam kegiatan usaha sehari-hari. Laporan kepada Direksi tersebut menjadi bahan diskusi dengan Direksi lainnya dalam Rapat Direksi.

Penilaian terhadap hasil kerja termasuk hasil atas penanggulangan masalah yang dihadapi oleh masing-masing Kepala Departemen pada setiap tahun buku dievaluasi oleh Direksi dan secara akumulatif disampaikan kepada masing-masing Kepala Departemen dalam penilaian kinerja tahunan karyawan Perseroan pada awal tahun buku berikutnya.

REMUNERASI BAGI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi bagi Direksi

Berdasarkan keputusan RUPS, Perseroan telah memberikan kuasa dan wewenang kepada pemegang saham pengendali Perseroan, yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia untuk menentukan besaran gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi dengan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Laporan dari konsultan tenaga kerja independen;
2. Perusahaan lain yang memiliki bisnis yang sama atau mirip dengan Perseroan;
3. Klasifikasi dan porsi kerja dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
4. Biaya hidup untuk saat ini di Jakarta yang didasarkan pada, namun tidak terbatas pada, tingkat inflasi nasional.

of the agenda items discussed and approved at the Company's AGMS.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

In performing its duties, responsibilities and executive function of the Company, the Board of Directors has been supported by Corporate Secretary, Internal Audit and Risk Management as well as an assistance from each Department Head in daily activities. Such reports became one of the agenda during the Board of Directors' meeting.

Assessment on the tasks results including the result of countermeasures against work issues encountered by each of Head Department on one financial year, will be evaluated by the Director and accumulatively conveyed to each Head Department in the employee performance appraisal on the next early financial year.

REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

Remuneration Procedure for the Board of Directors

Based on the resolution of the GMS, the Company has granted authority and power to its controlling shareholder, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, to determine the salaries or honoraria and allowances of the members of the Board of Directors, taking into consideration the proposals from the Company's Board of Commissioners based on the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Several factors to be considered in determining the remuneration are as follows:

1. Reports from independent manpower consultants;
2. Other companies that have the same or similar business as the Company;
3. Classification and portion of work of each member of the Directors and Commissioners; and
4. The current cost of living in Jakarta is based on, but not limited to, the national inflation rate.

Direksi
Board of Directors

Proses Penetapan Remunerasi Direksi
Board of Directors Remuneration Determination Process

Keputusan RUPS terkait pendelegasian Wewenang dan Kuasa kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia selaku Pemegang Saham Pengendali Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi

GMS resolution regarding the delegation of authority and power to PT Profesional Telekomunikasi Indonesia as the Company's Controlling Shareholder to determine the amount of remuneration for the Board of Directors, with due regard to the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee.

Pengkajian Usulan Besaran Remunerasi direksi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

Review of the Proposed Remuneration Amount of the Board of Directors by the Company's Remuneration and Nomination Committee.

Dewan Komisaris mengirimkan surat usulan besaran Remunerasi Direksi kepada PT Profesional Telekomunikasi Indonesia selakun Pemegang Saham Pengendali Perseroan yang mendapatkan wewenang dan kuasa untuk menetapkan besaran remunerasi Direksi.

The Board Commissioners sent a letter of proposal for the amount of Remuneration of the Board of Directors to PT Professional Telekomunikasi Indonesia as the Controlling Shareholder of the Company who has the authority and power to determine the amount of remuneration of the Board of Directors.

Struktur Remunerasi Direksi

Jumlah remunerasi untuk seluruh anggota Direksi Perseroan tahun buku 2025 adalah sebesar Rp17,7 miliar.

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen Remunerasi untuk Direksi selama tahun buku 2025, adalah sebagai berikut:

Board of Directors Remuneration Structure

The total remuneration for all members of the Board of Directors for the financial year of 2025 is Rp17.7 billion.

The remuneration structure indicating the Remuneration component for the Board of Directors during 2025 fiscal year is as follows:

Nama Name	**Gaji** Salary	**Tunjangan*** Allowance*					**Jumlah Remunerasi/Tahun (Gross)*** Total Remuneration/Year (Gross)*		
		Transportasi Transportation	**Kepemilikan Kendaraan** Car Ownership Program	**Pajak** Tax	**Tunjangan Hari Raya** Religious Holiday Allowance	**Tunjangan lain** Other Allowances	**Di bawah 1 miliar Rupiah** Under 1 billion Rupiah	**Di atas 1 miliar Rupiah < 2 miliar Rupiah** Above 1 billion Rupiah < 2 billion Rupiah	**Di atas 2 miliar Rupiah** Above 2 billion Rupiah
Juliawati Gunawan Halim	√	√	√	√	√	√	-	-	√
Wong Tjin Tak	√	√	√	√	√	√	-	-	√
Hartono Tanuwidjaja	√	√	√	√	√	√	-	-	√
Wellington	√	√	√	√	√	√	-	-	√

*) Tunjangan dan Remunerasi yang diterima oleh Anggota Direksi, termasuk untuk jabatan yang bersangkutan pada entitas lain di seluruh Grup Perseroan (sepanjang relevan) | Allowance and Remuneration received by the Members of the Board of Directors, including their other position in the other entities within the Company Group (as relevant).

KEBIJAKAN KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan dengan hak suara baik langsung maupun tidak langsung wajib menyampaikan laporan kepemilikan hak suara atas saham dan setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan kepada OJK paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya kepemilikan hak suara atas saham atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan. Sepanjang tahun 2025, tidak terdapat anggota Direksi yang memiliki saham Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan Pengungkapan Informasi Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Sesuai dengan POJK 4/2024, SEOJK 10/2025 dan Pedoman Pelaporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan dan Pelaporan Aktivitas Menjaminkan Saham, Perseroan telah memiliki kebijakan yang mengatur agar anggota Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan yang dimilikinya kepada OJK melalui sistem elektronik yang disediakan oleh KSEI segera paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya kepemilikan hak suara atau setiap perubahan kepemilikan hak suara atas saham Perseroan.

TATA CARA PENGUNDURAN DIRI DIREKSI APABILA TERLIBAT KEJAHATAN KEUANGAN

UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014 mengatur salah satu persyaratan pengangkatan anggota Direksi yaitu tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Sejalan dengan UUPT 40/2007 dan POJK 33/2014, OJK mengeluarkan POJK 21/2015, dimana POJK 21/2015 lebih lanjut diatur dalam SEOJK 32/2015. POJK 21/2015 dan SEOK 32/2015 isinya antara lain memberikan rekomendasi kepada perusahaan publik untuk memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan. Kejahatan keuangan yang dimaksud seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta tindakan pidana pencucian uang. Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam POJK 21/2015 dan SEOJK 32/2015 tersebut, Perseroan telah menyusun kebijakan pengunduran diri bagi anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan.

BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP POLICY

Members of the Board of Directors who own the Company's shares with voting rights, either directly or indirectly, are required to submit a report on the ownership of voting rights in shares and any changes in ownership of voting rights in the Company's shares to the OJK no later than three (3) working days from the date of acquiring voting rights in shares or any changes in ownership of voting rights in the Company's shares. Throughout 2025, there are no members of the Board of Directors who own shares of the Company, either directly or indirectly.

Disclosure of Share Ownership of Members of the Board of Directors

In accordance with OJK Regulation 4/2024, OJK CIrcular Letter 10/2025, and the Guidelines for Reporting Share Ownership or Any Changes in Ownership and Reporting Pledging Activities of Shares, the Company has established a policy requiring members of the Board of Directors and Board of Commissioners to report any changes in their ownership of the Company's shares to OJK through the electronic system provided by KSEI immediately, no later than 3 (three) business days from the date of acquiring voting rights or any change in ownership of voting rights over the Company's shares.

RESIGNATION PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS WHO ARE INVOLVED IN A FINANCIAL CRIME

The Law 40/2007 and OJK Regulation 33/2014 stipulate, among the requirements for the appointment of members of the Board of Directors, that they must never have been convicted of a criminal act that causes loss to state finances and/or relates to the financial sector. In line with the Law 40/2007 and OJK Regulation 33/2014, OJK issued OJK Regulation 21/2015, which is further regulated under OJK Circular Letter 32/2015. Among other things, OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015 recommend that public companies have a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors who are involved in financial crimes. Such financial crimes include manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, as well as the criminal act of money laundering. In order to comply with the provisions of OJK Regulation 21/2015 and OJK Circular Letter 32/2015, the Company has established a resignation policy for members of the Board of Directors who are involved in financial crimes.

Direksi
Board of Directors

Tata cara pengunduran diri bagi anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran dirinya kepada Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya;
2. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan pengunduran diri tersebut dan menyampaikannya kepada OJK;
3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan pengunduran diri anggota Direksi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut; Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam RUPS.
4. Perseroan wajib mengumumkan hasil RUPS tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS tersebut.

KEBERAGAMAN DIREKSI

Komposisi anggota Direksi Perseroan saat ini mencerminkan keragaman keahlian, latar belakang, pengetahuan, dan pengalaman industri yang luas. Kombinasi ini merupakan faktor penting dalam memastikan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi dalam mengelola Perseroan, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis, perencanaan bisnis, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Informasi lebih lanjut mengenai keberagaman Direksi, termasuk latar belakang pendidikan dan pengalaman profesional masing-masing anggota, dapat dilihat pada bagian Profil Direksi dalam Bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

KEBIJAKAN PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DIREKSI

Perseroan memastikan bahwa setiap pemberian pinjaman kepada anggota Direksi dituangkan dalam perjanjian tertulis dengan syarat dan ketentuan yang wajar, menerapkan prinsip kewajaran (*arm's length*), serta dikenakan tingkat suku bunga yang sesuai dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku pada saat pinjaman diberikan. Untuk menjamin penerapan prinsip kewajaran tersebut, setiap pemberian pinjaman wajib melalui proses analisis dan memperoleh persetujuan dari Komite Audit Perseroan serta mematuhi ketentuan POJK 42/2020.

The resignation procedure for the members of the Board of Directors are as follows:

1. The member of the Board of Directors shall resign from his position and submit a resignation letter to the Company no later than 60 (sixty) days before the effective date of the resignation;
2. The Company shall publish the disclosure information to the public regarding such resignation and submit the information to OJK;
3. The Company is required to hold a GMS to decide on the resignation of a member of the Board of Directors no later than 90 (ninety) days after receiving the resignation letter. The resigning member of the Board of Directors may still be held accountable for their actions from the date of their appointment until the date of their resignation, as determined in the GMS.
4. The Company shall disclose the result of the GMS and submit the result to the OJK no later than 2 (two) working days after the GMS.

BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY

The current composition of the Company's Board of Directors reflects a diverse range of expertise, backgrounds, knowledge, and extensive industry experience. This diversity serves a critical role in ensuring the effective execution of the Board's duties in managing the Company, including strategic decision-making, business planning, and the implementation of good corporate governance principles. Further details on the diversity of the Board of Directors, including their educational backgrounds and professional experience, are presented in the Board of Directors' Profile section under the Company Profile chapter of this Annual Report.

POLICY ON LOANS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Company ensures that any loans granted to members of the Board of Directors are formalised through written agreements with fair terms and conditions, apply the arm's length principle, and impose interest rates in line with prevailing market rates at the time the loans are extended. To uphold the arm's length principle, any such loans are subject to prior analysis and approval by the Company's Audit Committee and must comply with OJK Regulation 42/2020.

ORGAN PENUNJANG DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Supporting Organs

Sesuai peraturan perundang-undangan, Dewan Komisaris dapat membentuk komite untuk mendukung fungsi pengawasannya. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris STP memiliki dua Komite Penunjang, yaitu Komite Audit serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap komite diketuai oleh anggota Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab yang diatur dalam pedoman kerja masing-masing. Pembentukan komite ini berlandaskan pada:

1. SEOJK 32/2015;
2. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**";
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**");
4. Anggaran Dasar Perseroan.

In accordance with applicable regulations, the Board of Commissioners may establish committees to support its supervisory function. In 2024, the STP Board of Commissioners has two Supporting Committees: the Audit Committee and the Remuneration and Nomination Committee. Each committee is chaired by a member of the Board of Commissioners, with duties and responsibilities outlined in their respective charters. The establishment of these committees is based on:

1. OJK Circular Letter 32/2015;
2. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Work Implementation of the Audit Committee ("**OJk Regulation 55/2015**");
3. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Nomination and Remuneration Committee of Issuers or Public Companies ("**OJK Regulation 34/2014**");
4. The Company's Articles of Association.

KOMITE AUDIT

Audit Committee

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan mendorong praktik pengelolaan Perseroan yang sehat sesuai dengan prinsip GCG serta memastikan efektivitas kerangka pengendalian internal Perseroan. Komite Audit juga berperan dalam menjaga integritas dan kualitas pelaporan keuangan melalui penelaahan atas ruang lingkup, akurasi, independensi, dan objektivitas Akuntan Publik. Selain itu, Komite Audit memberikan masukan dan rekomendasi terkait penerapan pengendalian internal dan fungsi audit perusahaan, menyusun laporan tertulis atas penugasan Dewan Komisaris, serta menyampaikan laporan kegiatan dan capaian kinerja Komite Audit.

The Audit Committee is formed to support the Board of Commissioners in exercising its oversight responsibilities by promoting sound management practices in line with GCG principles and ensuring the effectiveness of the Company's internal control framework. The Committee also serves a role in safeguarding the integrity and quality of financial reporting through reviews of the scope, accuracy, independence, and objectivity of public accountants. Furthermore, the Audit Committee provides input and recommendations on internal control and corporate audit implementation, prepares written reports on matters assigned by the Board of Commissioners, and reports on its activities and performance.

DASAR HUKUM

Komite Audit Perseroan dibentuk berdasarkan:

1. Surat keputusan ("**SK**") Dewan komisaris tanggal 5 Mei 2023;
2. POJK 55/2015;
3. Peraturan BEI No. I-A;
4. Anggaran Dasar Perseroan.

KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT

Sesuai dengan POJK 55/2015, Komite Audit Perseroan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen (Ketua Komite), dan pihak dari luar Perseroan (anggota) yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Susunan Komite Audit Perseroan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

LEGAL REFERENCES

The Company's Audit Committee was established based on:
1. the Board of Commissioners' Decree ("Decree") dated May 5, 2023;
2. OJK Regulation 55/2015;
3. IDX Regulation No. I-A;
4. the Company's Articles of Association.

AUDIT COMMITTEE MEMBERSHIP

In accordance with OJK Regulation 55/2015, the Company's Audit Committee consists of 3 (three) members comprising an Independent Commissioner (as Chairman of the Committee) and parties from outside the Company (as members), who are appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The composition of the Company's Audit Committee as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan Komite Audit Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Harry Mozarta Zen	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	2023 – 2026
Stefanus Ginting	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	2023 – 2026
Jennywati Soewito	Pihak Independen Independent Party	Anggota Member	SK Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023 BOC Decree of the Company dated 5 May 2023	2023 – 2026

Profil Anggota Komite Audit
Audit Committee Member Profiles

HARRY MOZARTA ZEN

Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee
Periode | Period: 2023–2026 (Periode kedua | Second period)

Profil Harry Mozarta Zen sebagai Ketua Komite Audit sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Harry Mozarta Zen's profile as Chairman of the Audit Committee and Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.



STEFANUS GINTING

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
Periode | Period: 2023–2026

Umur | Age : 73 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizen : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile : Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023

Appointment Basis
Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 5, 2023

Riwayat Pendidikan
Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1978

Educational Background
He earned a Bachelor's degree majoring in Economics from Gadjah Mada University in 1978

Rangkap Jabatan
Tidak memiliki rangkap jabatan baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di Perseroan maupun di emiten atau perusahaan publik lain.

Concurrent Position
Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or committee member, as well as other positions, either in the Company or in other issuers or public companies.

Pengalaman Kerja
- Ketua Umum Perkumpulan Gagasan & Semangat Frans Seda (2024 – saat ini)
- Wakil Ketua Umum Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (2019 – saat ini)
- Chief Executive Officer PT SAT Inti Konsultama (2018 – saat ini)
- Chairman PT Map Tiga Indonesia pada tahun (2016– 2021)
- Wakil Ketua Yayasan Frans Seda (2013 – saat ini)
- Chairman PT Indo Eksplorasi Media (2010 – saat ini)
- Direktur PT Baskara Utama Sedaya (2009–2013)
- Anggota Komite Audit PT BFI Finance Tbk (2006–2016)
- Direktur Proyek PT Lintas Marga Sedaya (2005–2013)
- Chairman PT AJN Solusindo (1996 – saat ini)
- Direktur PT Siwani Trimitra Tbk (1993–2004)
- Penasihat Senior di Hastin International Bank (1993–1995)
- Junior Director Bank Summa (1990–1992)
- Offshore Business Manager Banque Indosuez (1988–1989)
- Senior Officer Credit and Marketing HSBC (1982–1988)
- Credit and Marketing Officer di Bank Central Asia (1979–1982)

Professional Background
- Chairman of Perkumpulan Gagasan & Semangat Frans Seda (2024 – present)
- Vice Chairman of the Indonesian Association of Private Higher Education Organizing Bodies (ABPPTSI) (2019 – present)
- Chief Executive Officer of PT SAT Inti Konsultama (2018 – present)
- Chairman of PT Map Tiga Indonesia (2016 – 2021)
- Vice Chairman of the Frans Seda Foundation (2013 – present)
- Chairman of PT Indo Eksplorasi Media (2010 – present)
- Director of PT Baskara Utama Sedaya (2009 – 2013)
- Member of the Audit Committee of PT BFI Finance Tbk (2006 – 2016)
- Project Director of PT Lintas Marga Sedaya (2005 – 2013)
- Chairman of PT AJN Solusindo (1996 – present)
- Director of PT Siwani Trimitra Tbk (1993 – 2004)
- Senior Advisor at Hastin International Bank (1993 – 1995)
- Junior Director at Bank Summa (1990 – 1992)
- Offshore Business Manager at Banque Indosuez (1988 – 1989)
- Senior Officer in Credit and Marketing at HSBC (1982 – 1988)
- Credit and Marketing Officer at Bank Central Asia (1979 – 1982)

Sertifikasi
- Harvard Business School Online: Disruptive Strategy by Prof Clayton Christensen.
- Oxford Said Business School: Fintech Program.
- MIT Sloan Business School: Dynamic Work Design.
- Erasmus University: Driving business towards Sustainable Development Goals.

Certifications
- Harvard Business School Online: Disruptive Strategy by Prof Clayton Christensen.
- Oxford Said Business School: Fintech Program.
- MIT Sloan Business School: Dynamic Work Design.
- Erasmus University: Driving business towards Sustainable Development Goals.

Komite Audit
Audit Committee



JENNYWATI SOEWITO

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee
Periode | Period: 2023–2026

Umur | Age : 59 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizen : Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukkan
Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 5 Mei 2023

Appointment Basis
Decree of the Board of Commissioners of the Company dated May 5, 2023

Riwayat Pendidikan
Beliau memperoleh gelar Sarjana jurusan Akuntansi dari Universitas Trisakti

Educational Background
She earned a Bachelor's degree majoring in Accounting from Trisakti University

Rangkap Jabatan
- Anggota Komite Audit PT Chandra Daya Investasi Tbk (sejak 2025 - saat ini)
- Anggota Komite Audit PT Barito Renewable Energy Tbk (2023 – saat ini)

Concurrent Position
- Member of the Audit Committee of PT Chandra Daya Investasi Tbk (since 2025 – present)
- Member of the Audit Committee of PT Barito Renewable Energy Tbk (2023 – present)

Pengalaman Kerja
- Anggota Komite Audit PT Barito Pacific Tbk (2019 – 2025)
- Senior Partner KJPP Ruky, Safrudin dan rekan (2019 - saat ini)
- Anggota Komite Audit PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011–2017)
- Partner KJPP Jennywati, Kusnanti dan rekan (2009 - 2018)
- Direktur PT Infinity Capital (2008 – saat ini)
- Pendiri PT Infinity Consulting
- Non-Equity Partner Ernst & Young (Juli 2002 - Desember 2007). Sebelum bergabung dengan Ernst & Young, beliau bekerja dengan Arthur Andersen Indonesia (1988 – 2002)

Professional Background
- Member of the Audit Committee of PT Barito Pacific Tbk (2019 – 2025)
- Senior Partner at KJPP Ruky, Safrudin dan Rekan (2019 – present)
- Member of the Audit Committee of PT Solusi Tunas Pratama Tbk (2011–2017)
- Partner at KJPP Jennywati, Kusnanti dan Rekan (2009 – 2018)
- Director of PT Infinity Capital (2008 – present)
- Founder of PT Infinity Consulting
- Non-Equity Partner at Ernst & Young (July 2002 – December 2007). Prior to joining Ernst & Young, she worked at Arthur Andersen Indonesia (1988 – 2002)

Sertifikasi
Memiliki sertifikat profesi sebagai Akuntan dari Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Anggota MAPPI (Masyarakat Profesi Penilai Indonesia), Anggota Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dan Anggota Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI).

Certifications
Have a professional certificate as an Accountant from the Accounting Professional Education University of Indonesia. She is also a Member of MAPPI (Indonesian Society of Professional Appraisals), Member of the Indonesian Institute of Accountants (IAI), Member of the Indonesian Institute of Public Accountants (IAPI), and Member of the Indonesian Institute of Management Accountants (IAMI).

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

INDEPENDENCE OF AUDIT COMMITTEE

All members of the Audit Committee are independent parties, not having financial, management, share ownership and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or Controlling Shareholders or business relationships with the Company that may affect the ability to act independently.

Pernyataan Independensi	Harry Mozarta Zen	Stefanus Ginting	Jennywati Soewito
Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir. Not a person in the Public Accountant Firm, Legal Consultant Firm, Public Appraisal Service Office or other parties who provide insurance services, non-insurance services, appraisal services and/or other consulting services to the Company within the last 6 (six) months.	√	√	√
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir (kecuali Komisaris Independen);. Not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 (six) months (except for Independent Commissioners).	√	√	√
Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung di Perseroan. Does not have direct or indirect shares in the Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan. Has no affiliation with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or Major Shareholders of the Company.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Does not have a business relationship either directly or indirectly related to the Company business activities.	√	√	√

Keterangan: √= Ya |x=Tidak | Description: √= Yes |x=No.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang disusun dan ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam ini memastikan bahwa Komite Audit dapat bekerja secara independen, objektif, mandiri, dan transparan. Perseroan secara berkala meninjau piagam tersebut agar tetap selaras dengan praktik terbaik terkini. Kajian terakhir telah disetujui oleh anggota Komite Audit pada 15 April 2016 dan telah dipublikasikan di situs web Perseroan.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Audit Committee has an Audit Committee Charter, formulated and approved by the Board of Commissioners' resolution, serving as a guideline for carrying out its duties and responsibilities. This charter ensures that the Audit Committee operates independently, objectively, autonomously, and transparently. The Company periodically reviews the charter to align with the latest best practices. The most recent review was approved by Audit Committee members on April 15, 2016, and has been published on the Company's website.

Komite Audit
Audit Committee

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Berdasarkan piagam Komite Audit, tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan atau pergantian auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Direksi;
7. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perseroan .
9. Meninjau dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas setiap transaksi dengan pihak berelasi yang memenuhi batasan nilai tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibuat dengan syarat dan kondisi yang wajar dan dengan prinsip *arm's length*, seperti halnya transaksi dilakukan dengan pihak ketiga lainnya.

Kewenangan Komite Audit

1. Komite Audit memiliki akses yang tidak terbatas atas informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawabnya.

AUDIT COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Based on the Audit Committee charter, the duties and responsibilities of the Company's Audit Committee are as follows:

Duties and responsibilities of the Audit Committee

1. To review the financial information issued by the Company to the public.
2. To review the Company's compliance with laws and regulations related to the Company's business activities.
3. To provide an independent opinion in the event of a difference of opinion between management and the external auditor regarding the services rendered.
4. To provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment or replacement of the external auditor based on independence, scope of assignment, and fee.
5. To review the implementation of audits conducted by the internal auditor and oversee the follow-up actions taken by the Board of Directors on the findings of the internal auditor.
6. To review the implementation of risk management and internal control activities carried out by the Board of Directors.
7. To review and report to the Board of Commissioners on complaints related to the Company, including but not limited to complaints relating to the Company's accounting processes and financial reporting.
8. To review and provide advice to the Board of Commissioners regarding any potential conflict of interest involving the Issuer or the Company.
9. To review and provide recommendations to the Board of Commissioners on every related party transaction that meets a certain value threshold in accordance with the prevailing laws and regulations, is made on reasonable terms and conditions, and follows the arm's length principle, as if the transaction were conducted with other third parties.

Authority Audit Committee

1. The Audit Committee has unrestricted access to information about the Company's employees, funds, assets, and other resources related to the implementation of its duties.
2. Communicate directly with employees including the Board of Directors and parties in charge of the functions of internal audit, risk management, and accountants on their duties and responsibilities.

3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta bantuan tenaga ahli dan/atau konsultan untuk membantu Komite Audit.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

RAPAT KOMITE AUDIT

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota dan dipimpin oleh Ketua Komite Audit. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference, video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat mengundang pihak manajemen yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat Komite Audit.

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat Komite Audit dengan kehadiran anggota Komite Audit sebagai berikut:

3. If necessary, with the written approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee may request the assistance of experts and/or consultants to assist the Audit Committee.
4. Perform other authorities granted by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE MEETING

Referring to the Audit Committee Charter, the Audit Committee must hold periodic meetings at least once in 3 (three) months. Audit Committee meetings can be held if attended by more than 1/2 (one half) of the number of members and chaired by the Chairman of the Audit Committee Chairman. Meetings can be held physically and non-physically through teleconference, video conference or other electronic media facilities. If deemed necessary, the Audit Committee may invite management related to the meeting material to attend the Audit Committee meeting.

In 2025, 5 (five) Audit Committee meetings have been held with the following attendance of the Audit Committee members:

Rapat Komite Audit
Audit Committee Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Harry Mozarta	Ketua/Komisaris Independen Chairman/Independent Commissioner	5	5	100
Stefanus Ginting	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	5	5	100
Jennywati Soewito	Anggota/Pihak Independen Member/Independent Party	5	5	100

Komite Audit
Audit Committee

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE AUDIT

Program pelatihan yang diikuti oleh Komite Audit sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The training programs attended by the Audit Committee throughout 2025 were as follows:

Tanggal Date	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Penyelenggara Organization
15 Januari 2025 Januari 15, 2025	Refleksi dan Resolusi MAPPI dalam Akselerasi dan Harmonisasi Kebijakan Organisasi Reflections and Resolutions of MAPPI in the Acceleration and Harmonization of Organizational Policies	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia ("**MAPPI**") Indonesian Society of Appraisal Professionals ("**MAPPI**")
5 Februari 2025 February 5, 2025	Pelatihan Bidang IKNB – Prinsip Tata Kelola Perusahaan dan Industri Keuangan Non Bank Training in the Non-Bank Financial Industry Sector – Principles of Corporate Governance and the Non-Bank Financial Industry	MAPPI
6 Februari 2025 February 6, 2025	Pelatihan Bidang Pasar Modal Capital Market Training	MAPPI
20 Februari 2025 February 20, 2025	Pelatihan Lingkup Penugasan dari Aspek Hukum Periatan Perdata, Pidana dan SPI Training on the Scope of Engagement from the Legal Aspects of Civil Obligations, Criminal Law, and Internal Control Systems	MAPPI
20 Mei 2025 May 20, 2025	Indonesia Valuation Act International Seminar (IVAIS) Indonesia Valuation Act International Seminar (IVAIS)	MAPPI
26 November 2025 November 26, 2025	Pelatihan Wajib Penilai Publik 2025 Mandatory Training for Public Appraisers 2025	MAPPI
1 Desember 2025 December 1, 2025	Pelatihan PSAK dan Perpajakan PSAK and Taxation Training	KAP Liana Ramon Xena dan Rekan (Deloitte) KAP Liana Ramon Xena dan Rekan (Deloitte)

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Piagam Komite Audit serta Program Kerja Komite Audit Tahun 2025. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit di tahun 2025, diantaranya:

1. Pembahasan hasil audit laporan keuangan tahun 2024 dengan eksternal auditor.
2. Pembahasan rencana kerja audit internal untuk tahun 2025.
3. Pembahasan hasil kerja audit internal setiap kuartal.
4. Pembahasan manajemen risiko dengan manajemen dan divisi audit internal.
5. Pembahasan performa dan laporan keuangan setiap kuartal dengan manajemen.
6. Pembahasan perencanaan audit laporan keuangan tahun 2025 dengan auditor eksternal.
7. Evaluasi kinerja dan rekomendasi Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.

IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE DUTIES

The Audit Committee has carried out its duties and responsibilities in accordance with the Audit Committee Charter and Work Programs for 2025. Realization of the implementation of the Audit Committee's duties in 2025 is as follows:

1. Discussion of the results of the 2024 financial report audit with the external auditor.
2. Discussion of the internal audit work plan for 2025.
3. Discussion of internal audit work results every quarter.
4. Discussion of risk management with management and the internal audit division
5. Discussion of performance and financial reports every quarter with management.
6. Discussion of planning for the 2025 financial report audit with external auditors.
7. Performance evaluation and recommendations from Public Accountants and Public Accounting Firms.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Remuneration and Nomination Committee

Komite Remunerasi dan Nominasi membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan remunerasi serta proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun, menelaah, dan merekomendasikan kerangka remunerasi berbasis kinerja yang selaras dengan kepentingan Perseroan dan prinsip GCG. Selain itu, Komite Remunerasi dan Nominasi memantau dan mendukung proses seleksi dan pengangkatan melalui penetapan kriteria yang jelas serta mendorong kesinambungan kepemimpinan yang sejalan dengan visi dan arah strategis jangka panjang Perseroan.

The Remuneration and Nomination Committee assists the Board of Commissioners in carrying out oversight and decision-making related to remuneration policies and the nomination of members of the Directors and Commissioners. The Remuneration and Nomination Committee develops, reviews, and recommends a remuneration framework that is performance-oriented, aligned with the Company's objectives, and with GCG principles. In addition, the Remuneration and Nomination Committee monitors and supports the selection and appointment process by establishing clear criteria and promoting leadership succession that supports the Company's long-term vision and strategic direction.

DASAR HUKUM

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan dalam RUPS. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk dengan mengacu pada:

1. POJK 34/2014; dan
2. Surat Keputusan ("**SK**") Dewan Komisaris tanggal 28 April 2022; dan
3. SK Dewan Komisaris tanggal 5 Mei 2023.

LEGAL REFERENCES

Members of the Remuneration and Nomination Committee are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported at the GMS. The Committee establishment refers to:

1. OJK Regulation 34/2014; and
2. Board of Commissioners' Decree ("**Decree**") dated April 28, 2022; and
3. Board of Commissioners' Decree dated May 5, 2023.

KOMPOSISI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Sesuai dengan POJK 34/2014 tentang Komite Remunerasi dan Nominasi Emiten atau Perusahaan Publik, Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang diketuai oleh Komisaris Independen, dan anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, dan pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. Berikut susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025:

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE STRUCTURE

In accordance with OJK Regulation 34/2014 concerning the Remuneration and Nomination Committee of Issuers or Public Companies, the Company's Remuneration and Nomination Committee consists of at least 3 (three) members chaired by an Independent Commissioner, while the other members may be drawn from members of the Board of Commissioners and parties holding managerial positions under the Board of Directors in charge of human resources. The composition of the Company's Nomination and Remuneration Committee as of December 31, 2025, was as follows:

Nama Name	Jabatan di Perseroan Position in the Company	Jabatan di Komite Position in the Committee	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Period
Kusmayanto Kadiman	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ketua Chairman	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026
Eko Santoso Hadiprodjo	Komisaris Commissioner	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026
Doni Wilaga Kusuma	-	Anggota Member	SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023 BOC Decree May 5, 2023	2023 - 2026

Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

Profil Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Member Profiles

KUSMAYANTO KADIMAN

Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi
Chairman of Remuneration and Nomination Committee
Periode | Period: 2023– 2026

Profil Kusmayanto Kadiman sebagai Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris Independen dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Kusmayanto Kadiman's profile as Chairman of the Remuneration and Nomination Committee as well as Independent Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.

EKO SANTOSO HADIPRODJO

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of Remuneration and Nomination Committee
Periode | Period: 2023– 2026

Profil Eko Santoso Hadiprodjo sebagai Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sekaligus Komisaris dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Eko Santoso Hadiprodjo's profile as a Member of the Remuneration and Nomination Committee as well as Commissioner is presented in the Profile of the Company's Board of Commissioners in the Company Profile Chapter of this Annual Report.



DONI WILAGA KUSUMA

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi
Member of Remuneration and Nomination Committee
Periode | Period: 2023– 2026

Umur | Age : 47 Tahun | Years Old
per 31 Desember 2025 | of December 31, 2025
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukkan
SK Dewan Komisaris 5 Mei 2023

Appointment Basis
Board of Commissioners Decree in May 5, 2023

Riwayat Pendidikan
Beliau meraih gelar Sarjana jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia pada tahun 2008 dari Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

Educational Background
Earned Bachelor Degree in Human Resources Management in 2008 from Asian Banking Finance & Informatics (ABFI) Institute PERBANAS.

Rangkap Jabatan
- Komite Remunerasi dan Nominasi PT Remala Abadi Tbk (2025 - saat ini)
- Direktur PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2024 – saat ini)
- Komite Remunerasi dan Nominasi PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014–saat ini)
- Komite Remunerasi dan Nominasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – saat ini)

Concurrent Position
- Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Remala Abadi Tbk (2025 – present)
- Director of PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (2024 – present)
- Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – present)
- Member of the Remuneration and Nomination Committee of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2014 – present)

Pengalaman Kerja
- Kepala Divisi Grup Sumber Daya Manusia dan General Affairs PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021 – saat ini)
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia dan General Affairs PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019 – 2021)
- Kepala Divisi Sumber Daya Manusia PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – 2019)
- Manajer Divisi Sumber Daya Manusia PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 – 2014)
- Supervisor Sumber Daya Manusia PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008 – 2010)
- HR Supervisor PT Cakrawala Andalas Televisi (2006 – 2008)
- HR Supervisor PT GE Finance Indonesia (2000 – 2006)

Professional Background
- Head of Group Human Resources and General Affairs Division at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2021 – present)
- Head of Human Resources and General Affairs Division at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2019 – 2021)
- Head of Human Resources Division at PT Sarana Menara Nusantara Tbk (2014 – 2019)
- Human Resources Division Manager at PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2010 – 2014)
- Human Resources Supervisor at PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2008 – 2010)
- HR Supervisor at PT Cakrawala Andalas Televisi (2006 – 2008)
- HR Supervisor at PT GE Finance Indonesia (2000 – 2006)

Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

INDEPENDENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi bekerja secara independen dan diketuai oleh salah satu Komisaris Independen Perseroan. Komisaris Independen tidak memiliki saham di Perseroan dan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Komisaris lain, Direktur atau pemegang saham utama Perseroan atau anak perusahaan.

PIAGAM KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan menjalankan fungsinya berdasarkan Piagam Komite yang menjadi pedoman resmi dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta tata cara rapat Komite. Piagam tersebut memastikan bahwa Komite menjalankan perannya secara efektif dan sesuai dengan prinsip GCG, serta diselaraskan dengan piagam komite induk yang disahkan di tingkat Grup SMN guna menjaga konsistensi praktik tata kelola di seluruh Grup. Piagam Komite ditinjau secara berkala agar tetap relevan dengan perkembangan peraturan dan praktik tata kelola perusahaan yang baik.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur atas remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang akan menjadi bagian dari Laporan Dewan Komisaris untuk kemudian disampaikan dan kemudian ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan Direksi dan Dewan Komisaris, (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
d. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

INDEPENDENCE OF REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee works independently and is chaired by one of the Company's Independent Commissioners. The Independent Commissioner does not own shares in the Company and has no affiliation with other Commissioners, Directors, or the Company's major shareholders or subsidiaries.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE CHARTER

The Company's Remuneration and Nomination Committee operates under a Committee Charter that serves as a formal guideline in carrying out its duties, responsibilities, and meeting procedures. The Charter ensures that the Committee performs its functions effectively and in accordance with GCG principles, and is aligned with the overarching committee charter ratified at the SMN Group level to promote consistency in governance practices across the Group. The Charter is periodically reviewed to ensure its continued relevance to regulatory developments and best corporate governance practices.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Remuneration and Nomination Committee are as follows:

a. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the policy, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners which will be part of the Board of Commissioners' Report to be submitted and then determined at the General Meeting of Shareholders;
b. Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of each member of the Directors and members of the Commissioners;
c. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding: (i) the composition of the Directors and Commissioners, (ii) policies and criteria needed in the nomination process for members of the Directors and Commissioners, and (iii) performance assessment policies for members of the Directors and Commissioners;
d. Assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of members of the Board of Directors and Board of Commissioners based on benchmarks that have been prepared as evaluation material;

e. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
f. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan dan disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham; dan
g. Melaksanakan tugas-tugas lain, selain yang disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Komite Remunerasi dan Nominasi melaporkan kepada Dewan Komisaris dan harus bertindak secara independen dalam menjalankan tugasnya.

RAPAT KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi wajib melakukan rapat secara berkala paling kurang sekali dalam 4 (empat) bulan, yang dipimpin oleh Ketua Remunerasi dan Nominasi. Rapat hanya dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota komite yang salah satunya merupakan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi. Rapat dapat diadakan secara fisik dan non fisik melalui *teleconference, video conference* atau fasilitas media elektronik lainnya.

Pada tahun 2025, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali dengan tingkat kehadiran anggota sebagai berikut:

e. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity building programs for Directors and Commissioners;
f. Provide proposals for candidates who meet the requirements as members of the Board of Directors and/or Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted and approved at the General Meeting of Shareholders; and
g. Carry out other duties, other than those mentioned above given by the Board of Commissioners in accordance with their functions and duties from time to time as needed.

The Remuneration and Nomination Committee reports to the Board of Commissioners and must act independently in carrying out its duties.

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE MEETING

The Remuneration and Nomination Committee is required to hold meetings on a regular basis at least once every 4 (four) months, chaired by the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee. Meetings may only be convened if attended by a majority of the total committee members, one of whom must be the Chairman of the Remuneration and Nomination Committee. Meetings may be held physically or non-physically through teleconference, video conference, or other electronic media facilities.

In 2025, the Remuneration and Nomination Committee held 3 (three) meetings with the following attendance rate of members:

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee Meeting

Nama Name	Jabatan di Komite Position in the Committee	Jumlah Rapat Total Meeting	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) Kehadiran (%) Attendance
Kusmayanto Kadiman	Ketua Chairman	3	3	100
Eko Santoso Hadiprodjo	Anggota Member	3	3	100
Doni Wilaga Kusuma	Anggota Member	3	3	100

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Komite Remunerasi dan Nominasi sepanjang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE COMPETENCY DEVELOPMENT

The competency development programs attended by the Remuneration and Nomination Committee throughout 2025 were as follows:

Komite Remunerasi dan Nominasi
Remuneration and Nomination Committee

Tanggal Date	Pelatihan/Pendidikan Training/Education	Penyelenggara Organization
Juli 2025 July 2025	*Managing Organizational Change for Managers (2018)*	LinkedIn
Agustus 2025 August 2025	*Fundamentals of Agentic AI: Business Implications and Ethical Insights*	LinkedIn
September 2025	*Annual Budget Planning (ABP) for Competitive Advantage*	Bester & Co
Oktober 2025 October 2025	Seminar Nasional *Resilience and Turnaround: Indonesia's Economic Direction*	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia Indonesian Financing Companies Association
November 2025	*Coaching Skills for Leaders and Managers*	LinkedIn
November 2025	*Learning Design Thinking*	LinkedIn

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan di awal tahun. Berikut uraian singkat pelaksanaan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2025:

1. Terkait dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan evaluasi atas kinerja dan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan, besaran, dan struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris;

2. Merumuskan prinsip dasar dalam menentukan kebijakan remunerasi dengan mempertimbangkan:
   - Posisi dan persaingan dalam industri Perseroan;
   - Klasifikasi dan kompleksitas tugas yang dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris; dan
   - Biaya hidup saat ini termasuk indikator inflasi nasional.
3. Merumuskan prinsip dasar untuk menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan:
   - Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   - Kualifikasi personal dari para kandidat; dan
   - Persyaratan dari Perseroan.

IMPLEMENTATION OF DUTIES OF THE REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

The Remuneration and Nomination Committee has carried out its duties and responsibilities in line with the work program set at the beginning of the year. The following is a brief description of the Remuneration and Nomination Committee activities in 2025:

1. Regarding the appropriateness of the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee has conducted an evaluation of performance and the suitability of remuneration received by each member of the Directors and/or Commissioners and provided recommendations to the Board of Commissioners with regards to policies, amount, and structure of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;
2. Formulated basic principles in setting remuneration policy by considering:
   - Positioning and competitiveness in the Company's industry;
   - Classification and complexity of work performed by the Board of Directors and the Board of Commissioners; and
   - Current cost of living including the national inflation indicators.
3. Formulated the basic principles for nominating members of the Board of Directors and the Board of Commissioners by considering:
   - The Articles of Association of the Company and prevailing laws and regulations;
   - Personal qualifications of the candidates; and
   - Requirements of the Company.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai penghubung strategis yang mendukung hubungan kerja yang efektif antara Direksi dan Dewan Komisaris, sekaligus memfasilitasi komunikasi yang terintegrasi baik di internal Perseroan maupun dengan para pemangku kepentingan eksternal, termasuk otoritas pasar modal, regulator, pemegang saham, dan investor. Dalam menjalankan perannya, Sekretaris Perusahaan juga mengelola fungsi kesekretariatan perusahaan, mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang baik, serta memastikan terselenggaranya komunikasi yang transparan dan efektif. Selain itu, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan nasihat kepada Direksi terkait aspek kepatuhan dan perkembangan regulasi, khususnya di bidang pasar modal.

The Corporate Secretary serves as a strategic liaison that supports an effective working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, while also facilitating integrated communication both internally within the Company and with external stakeholders, including capital market authorities, regulators, shareholders, and investors. In carrying out this role, the Corporate Secretary also manages the corporate secretarial function, promotes the implementation of good corporate governance, and ensures the conduct of transparent and effective communication. In addition, the Corporate Secretary is responsible for ensuring the Company's compliance with prevailing laws and regulations, as well as providing advice to the Board of Directors regarding compliance aspects and regulatory developments, particularly in the capital market sector.

DASAR HUKUM

Mengacu pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**"), perusahaan terbuka wajib memiliki fungsi Sekretaris Perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengangkat Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Sekretaris Perusahaan, efektif sejak 25 Juni 2024.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2026, Perseroan telah mengangkat Bapak Ardan Rasyid Wiradhatama sebagai Sekretaris Perusahaan yang baru, terhitung sejak tanggal tersebut.

LEGAL BASIS

Referring to OJK Regulation No. 35/POJK.04/2014 concerning the Corporate Secretary of Issuers or Public Companies ("OJK Regulation 35/2014"), public companies are required to have a Corporate Secretary function. In this regard, the Company appointed Mr. Hartono Tanuwidjaja as Corporate Secretary, effective June 25, 2024.

Subsequently, on January 8, 2026, the Company appointed Mr. Ardan Rasyid Wiradhatama as the new Corporate Secretary, effective as of that date.

Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile

HARTONO TANUWIDJAJA*

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Profil Bapak Hartono Tanuwidjaja sebagai Sekretaris Perusahaan sekaligus Direktur Perseroan dapat dilihat pada Profil Direksi Perseroan pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of Mr. Hartono Tanuwidjaja as the Corporate Secretary and Director of the Company can be seen in the Profile of the Company's Board of Directors in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

*masa jabatan berakhir efektif tanggal 8 Januari 2026 | *term of office ended effective January 8, 2026

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary



ARDAN RASYID WIRADHATAMA**

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Umur | Age : 29 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile: Indonesia | Indonesian

Dasar Hukum Penunjukkan Diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan tanggal 8 Januari 2026.	**Legal Basis of Appointment** Appointed as the Company's Corporate Secretary based on the Company's Board of Directors Decree dated January 8, 2026.
Riwayat Pendidikan Sarjana Hukum Universitas Diponegoro, Semarang	**Educational Background** Bachelor of Law degree from Diponegoro University, Semarang.
Pengalaman Kerja • Corporate Secretary & Sustainability Lead, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2023 – 2025) • Corporate Secretary Analyst, PT Astra International Tbk (2021 – 2023) • Associate Corporate Secretary, Capital Market Compliance & Corporate Action, PT XL Axiata Tbk (2021) • GCG Analyst, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2018 – 2021) • Legal Analyst, PT Astra International Tbk (2017 – 2018)	**Work Experience** • Corporate Secretary & Sustainability Lead, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (2023 – 2025) • Corporate Secretary Analyst, PT Astra International Tbk (2021–2023) • Associate Corporate Secretary, Capital Market Compliance & Corporate Action, PT XL Axiata Tbk (2021) • GCG Analyst, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2018–2021) • Legal Analyst, PT Astra International Tbk (2017–2018)

**masa jabatan efektif sejak tanggal 8 Januari 2026 | **term of office started effective January 8, 2026

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Berdasarkan struktur Organisasi Perseroan, Divisi Sekretaris Perusahaan berada di bawah Direktur Utama.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan adalah:
1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan

CORPORATE SECRETARY ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Based on the Company's Organizational Structure, the Corporate Secretary Division is under the President Director.

CORPORATE SECRETARY DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the Corporate Secretary are:
1. Update the development of the capital market in particular the capital markets laws and regulations;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with the prevailing capital market laws and regulations;
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company in implementing the principles of Good Corporate Governance; and

4. Sebagai penghubung antara Perseroan dan pemegang saham, OJK dan pemangku kepentingan lainnya.

4. As a liaison between the Company and shareholders, OJK and other stakeholders.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI SEKRETARIS PERUSAHAAN

Pengembangan kompetensi yang diikuti Sekretaris Perusahaan dan tim sepanjang tahun 2025, adalah sebagai berikut:

CORPORATE SECRETARY COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

The competency development programs attended by the Corporate Secretary and the team throughout 2025 were as follows:

Tanggal Date	*Workshop* atau Seminar Workshop or Seminar
28 Februari 2025 February 28, 2025	Sosialisasi terkait Pemenuhan Ketentuan *Free Float* dan Jumlah Pemegang Saham Socialization on Compliance with Free Float and Number of Shareholders Requirements
15 Juni 2025 June 15, 2025	*Compliance Refreshment* Juni 2025 Compliance Refreshment June 2025
19 Juni 2025 June 19, 2025	Sosialisasi POJK Nomor 9 Tahun 2025 tentang Dematerialisasi Efek Bersifat Ekuitas dan Pengelolaan Aset yang Tidak Diklaim di Pasar Modal Socialization of POJK No. 9 of 2025 concerning the Dematerialization of Equity Securities and the Management of Unclaimed Assets in the Capital Market
10 September 2025 September 10, 2025	*Merger* & *Acquisition* pada Perusahaan Terbuka: Strategi, Regulasi, dan Peran *Corporate Secretary* Merger & Acquisition in Public Companies: Strategy, Regulation, and the Role of the Corporate Secretary
26 November 2025 November 26, 2025	Sosialisasi terkait Pemenuhan Ketentuan *Free Float* dan Jumlah Pemegang Saham Socialization on Compliance with Free Float and Number of Shareholders Requirements
15 Desember 2025 December 15, 2025	Sosialisasi *Compliance Refreshment* Desember 2025 Compliance Refreshment December 2025
19 Desember 2025 December 19, 2025	Sosialisasi Kewajiban Penyampaian Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham serta Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Secara Elektronik Socialization on the Obligation to Submit Reports on Share Ownership or Any Changes in Share Ownership as well as Reports on Share Pledging Activities Electronically

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya selama tahun 2025, antara lain sebagai berikut:

1. Mengatur pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham dan *Public Expose*;
2. Melakukan keterbukaan informasi ke publik atau pelaporan kepada OJK yang memadai dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Mengelola komunikasi dengan: OJK, *Self-Regulatory Organization* (BEI, KSEI, Biro Administrasi Efek (BAE), dan institusi lainnya yang terkait;
4. Mengorganisir dan turut serta dalam penyusunan Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan;
5. Mengorganisir semua rapat yang dilakukan untuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit serta membuat risalah rapat;
6. Membuat dan mempersiapkan prosedur dan kebijakan yang relevan sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan oleh OJK; dan
7. Mengelola situs web Perseroan.

CORPORATE SECRETARY DUTIES PERFORMANCE

The Corporate Secretary has carried out its duties during 2025, as follows:

1. Organized the implementation of the General Meeting of Shareholders and Public Expose;
2. Made adequate and timely public disclosures or reports to the OJK in accordance with the applicable regulations;
3. Managed communication with the OJK, Self-Regulatory Organizations (IDX, KSEI, Securities Administration Bureau (BAE)), and other related institutions;
4. Organized and participated in the preparation of the Company's Annual Report and Sustainability Report;
5. Organized all meetings held for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Audit Committee, and prepared the minutes of meetings;
6. Developed and prepared relevant procedures and policies as stipulated in the Corporate Governance Guidelines issued by the OJK; and
7. Managed the Company's website.

UNIT AUDIT INTERNAL
Internal Audit Unit

Unit Audit Internal merupakan fungsi independen yang dibentuk untuk mendukung Direksi melalui penyediaan jasa assurance dan konsultasi atas kecukupan serta efektivitas pengendalian internal, tata kelola perusahaan, dan manajemen risiko. Unit ini memberikan penilaian yang profesional, independen, dan objektif kepada Direktur Utama terkait kegiatan dan operasional Perseroan, serta berperan penting dalam memperkuat fungsi pengendalian yang terintegrasi guna mendukung efisiensi proses bisnis dan peningkatan nilai Perseroan. Sebagai unit independen yang terpisah dari fungsi operasional lainnya, Unit Audit Internal melapor langsung kepada Direktur Utama untuk memastikan objektivitas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

The Internal Audit Unit is an independent function established to support the Board of Directors by providing assurance and consulting services on the adequacy and effectiveness of internal control, corporate governance, and risk management. The Unit delivers professional, independent, and objective assessments to the President Director regarding the Company's activities and operations, and serves a key role in strengthening integrated control mechanisms to support efficient business processes and enhance corporate value. As an independent unit separate from other operational functions, the Internal Audit Unit reports directly to the President Director to ensure objectivity in the execution of its duties.

Profil Kepala Unit Audit Internal
Internal Audit Unit Head Profile



DEDEN EKA KURNIA

Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Umur | Age : 46 Tahun | Years Old
Kewarganegaraan | Citizenship : Indonesia | Indonesian
Domisili | Domicile: Indonesia | Indonesian

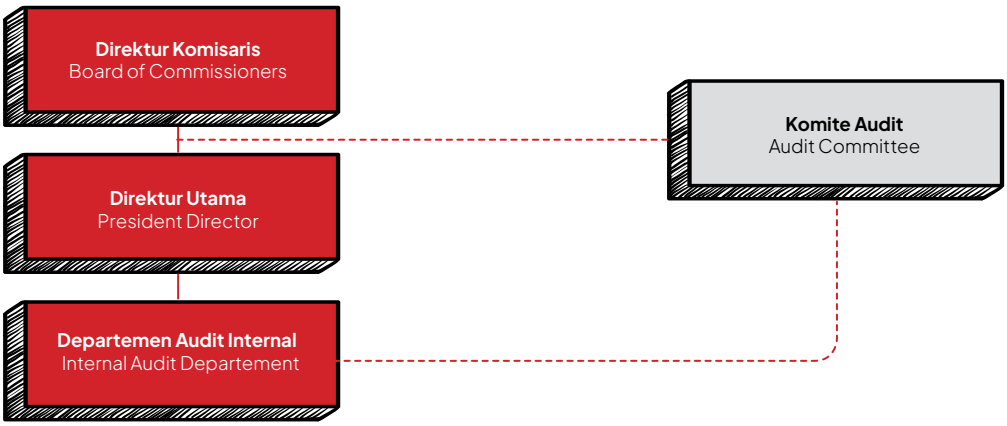
Dasar Hukum Penunjukkan Diangkat menjadi Kepala Unit Audit Internal Perseroan oleh Direktur Utama Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan No. 522/DIR-STP/IX/2021 tanggal 6 September 2021 atas persetujuan Dewan Komisaris tanggal 6 September 2021	**Legal Basis of Appointment** Appointed as Head of the Company's Internal Audit Unit by the President Director through the President Director's Decree No. 522/DIR-STP/IX/2021 dated September 6, 2021, with the approval of the Board of Commissioners on the same date.
Riwayat Pendidikan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari STIE PERBANAS, Jakarta (2002)	**Educational Background** Bachelor's degree in Economics, majoring in Accounting, from STIE PERBANAS, Jakarta (2002).
Pengalaman Kerja • Division Head Internal Audit & Risk Management PT Solusi Tunas Pratama, Tbk (2021–saat ini) • Senior Manager Risk Management di PT ABM Investama, Tbk (2017–2021) • Manager Risk Management di PT Bumi Serpong Damai, Tbk - Sinarmas Land (2013–2017) • Assistant Manager Risk Management di PT OTP Geothermal (2012–2013) • Assistant Manager Internal Audit & Risk Management di PT Pam Lyonnaise Jaya - PALYJA (2008–2012)	**Work Experience** • Division Head Internal Audit & Risk Management PT Solusi Tunas Pratama, Tbk (2021–present) • Senior Manager Risk Management PT ABM Investama, Tbk (2017–2021) • Manager Risk Management PT Bumi Serpong Damai, Tbk - Sinarmas Land (2013–2017) • Assistant Manager Risk Management PT OTP Geothermal (2012–2013) • Assistant Manager Internal Audit & Risk Management PT Pam Lyonnaise Jaya - PALYJA (2008–2012)
• Assistant Manager Internal Audit di PT Tirta Investama, Tbk - Danone AQUA (2004–2008) • Internal Auditor di PT Gubah Bumi Selaras (2003–2004) • External Auditor di KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2002–2003)	• Assistant Manager Internal Audit PT Tirta Investama, Tbk - Danone AQUA (2004–2008) • Internal Auditor PT Gubah Bumi Selaras (2003–2004) • External Auditor KAP Husni, Mucharam & Rasidi (2002–2003)

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AUDIT INTERNAL

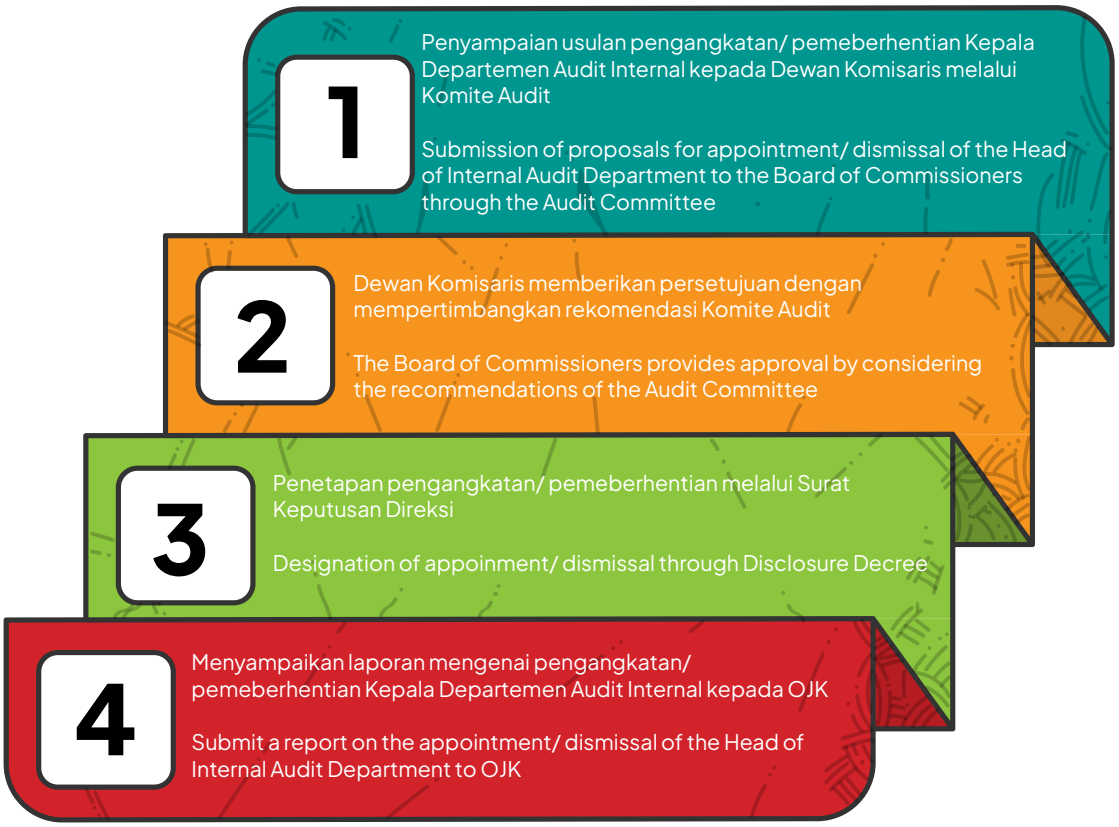
Struktur dan kedudukan Unit Audit Internal STP adalah sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF INTERNAL AUDIT UNIT

The structure and position of STP's Internal Audit Department are as follows:



Alur Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Departemen Audit Internal
Flow of Appointment/Dismissal of Head of Internal Audit Departement



Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

SUMBER DAYA MANUSIA DAN SERTIFIKASI PROFESI UNIT AUDIT INTERNAL

Hingga akhir Desember 2025, struktur keanggotaan Unit Audit Internal terdiri dari 3 (tiga) personel, yaitu 1 (satu) Kepala Unit Audit Internal dan 2 (dua) anggota yang mendukung pelaksanaan audit internal. Kepala Unit Audit Internal bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan audit, serta memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan manajemen risiko Perseroan. Anggota Audit Internal berperan dalam mendukung proses pemeriksaan, analisis, dan evaluasi terhadap kepatuhan serta efisiensi operasional sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Berikut sertifikasi profesional di bidang audit yang dimiliki personel Audit Internal STP:

HUMAN RESOURCES AND PROFESSIONAL CERTIFICATION INTERNAL AUDIT UNIT

As of the end of December 2025, the Internal Audit Unit consists of 3 (three) members: the Head of Internal Audit and 2 (two) supporting members responsible for conducting internal audits. The Head of Internal Audit oversees planning, supervision, and execution of audits while ensuring the effectiveness of the Company's internal control system and risk management framework. The Internal Audit members assist in conducting audits, analyzing findings, and evaluating compliance and operational efficiency based on the Company's policies.

The following are professional audit certifications of STP Internal Audit personnel:

No.	**Sertifikasi Profesi** Profession Certifcation	**Dikeluarkan oleh** Published by	**Jumlah Personil yang memiliki Sertifikasi Profesi** Total Personel with Profession Certifications
1.	*Qualified Chief Risk Officer* (QCRO)	Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) – Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS) Center for Risk Management and Sustainability (CRMS) – Professional Certification Institute – Mitra Kalyana Sejahtera (LSP MKS)	1
2.	*Certified* Internal Control *Professional* (CICP)	Hikmah Awdit	2
3.	*Certified* GRC *Professional* (CGRCP)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	1
4.	*Certified* Internal Audit *Professional* (CIAP)	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) National Professional Certification Agency (BNSP)	1

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG UNIT AUDIT INTERNAL

Tugas dan tanggung jawab unit audit intenal antara lain:
1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;

INTERNAL AUDIT UNIT DUTIES, AUTHORITIES, AND RESPONSIBILITIES

The duties and responsibilities of the internal audit unit include:
1. Formulate and implement yearly internal audit plan;
2. Testing and evaluating the implementation of internal controls and risk management systems in accordance with the Company's policies;
3. Conduct examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and other activities;
4. Providing recommendations and objective information about the activities under review at all levels of management;

5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal;
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Unit Audit Internal mempunyai wewenang antara lain:
1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;

3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Unit Audit Internal berpedoman pada Piagam Audit Internal (PAI), yang disusun berdasarkan POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**"). Piagam ini menetapkan prinsip dan pedoman kerja bagi Unit Audit Internal, mencakup struktur dan kedudukan, kualifikasi, ruang lingkup kerja, pedoman pelaporan, wewenang, tanggung jawab, standar profesional, hubungan dengan auditor eksternal, kode etik, serta prinsip independensi dan objektivitas Auditor Internal.

Untuk memastikan kesesuaian dengan praktik terbaik dan perkembangan regulasi, PAI dikaji secara berkala. PAI terbaru telah ditetapkan melalui Keputusan Dewan Komisaris pada 26 Juli 2022 dan telah dipublikasikan di situs web Perseroan.

KODE ETIK AUDITOR INTERNAL

Kode etik auditor internal Perseroan mengacu pada Kode Etik dari *The Institute of Internal Auditors* yang memuat standar perilaku sebagai pedoman bagi seluruh Auditor Internal dalam menjalankan praktik audit internal.

5. Create and submit audit reports to the President Director and the Board of Commissioners;

6. Monitor, analyze and report on the management's follow-up of audit recommendations;

7. Working together with the Audit Committee
8. Establish a program to evaluate the quality of internal audit activities;
9. Conducting special audit(s) as needed.

The Internal Audit Unit has the following authorities:
1. Access all relevant information about the Company related to its duties and functions;
2. Communicate directly with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee;
3. Hold regular and incidental meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee; and
4. Coordinating its activities with the activities of external auditors.

INTERNAL AUDIT CHARTER

In carrying out its duties and responsibilities, the Internal Audit Unit adheres to the Internal Audit Charter, which is formulated based on POJK No. 56/POJK.04/2015 on the Establishment and Guidelines for the Preparation of the Internal Audit Unit Charter ("**POJK 56/2015**"). This charter provides a framework for the Internal Audit Unit, covering its structure and position, qualifications, scope of work, reporting guidelines, authority, responsibilities, professional standards, relationships with external auditors, code of ethics, and the principles of independence and objectivity of Internal Auditors.

To ensure alignment with best practices and regulatory developments, the Charter is reviewed periodically. The most recent version was approved by the Board of Commissioners on July 26, 2022, and has been published on the Company's website.

INTERNAL AUDITOR CODE OF ETHICS

The Company's internal auditor code of ethics refers to the Code of Ethics of The Institute of Internal Auditors which contains standards of conduct as guidelines for all Internal Auditors in carrying out internal audit practices.

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

INTEGRITAS Integrity

Menunjukkan kejujuran, obyektivitas, dan Kesungguhan dalam melaksanakan tugas, serta taat hukum dan etika Perseroan.

Demonstrate honesty, objectivity, and Sincerity in carrying out duties, as well as obeying the law and ethics of the Company.

OBJEKTIVITAS Objectivity

Tidak melakukan kegiatan yang dapat berpotensi/ menimbulkan konflik dengan kepentingan Perseroan, tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari auditee dan pihak lain yang terkait dengan pekerjaan audit, mengungkapkan semua fakta penting dan material serta tidak menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

Not doing activities that can potentially/cause conflict with the Company's interests, not accepting anything in any form from the auditee and other parties related to audit work, disclosing all important and material facts and not covering up the existence of unlawful practices.

KERAHASIAAN Concealment

Bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh, selalu menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang dapat menimbulkan kerugian Perseroan.

Be careful and prudent in using the information obtained, always maintain the confidentiality of data and information related to the implementation of its duties and do not use information for personal or group benefits that can cause losses to the Company.

KOMPETENSI Competence

Melaksanakan setiap penugasan dengan menggunakan pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan kompetensi profesional yang dimiliki, senantiasa meningkatkan kompetensi serta efektivitas dan kualitasnya secara berkelanjutan.

Carry out each assignment using their knowledge, expertise, experience, and professional competence, always improving their competence and effectiveness and quality on an ongoing basis.

METODOLOGI AUDIT

Unit Audit Internal menerapkan metodologi audit berbasis risiko *(Risk Based Audit)* yang diterapkan mulai dari tahap perencanaan audit tahunan, pelaksanaan audit sampai dengan pelaporan. Penilaian risiko dilakukan secara menyeluruh, baik pada unit kerja di kantor pusat maupun unit bisnis.

RAPAT UNIT AUDIT INTERNAL

Selama tahun 2025, Unit Audit Internal telah melakukan Rapat sebanyak 1 (satu) kali dengan Direksi, 2 (dua) kali dengan Dewan Komisaris dan 2 (dua) kali dengan Komite Audit.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI UNIT AUDIT INTERNAL

Pada tahun 2025, personel Unit Audit Internal mengikuti berbagai program pendidikan dan/atau pelatihan untuk peningkatan kompetensi, sebagai berikut.

AUDIT METHODOLOGY

The Internal Audit Unit applies a risk-based audit methodology that is applied starting from the annual audit planning stage, audit implementation to reporting. Risk assessment is carried out thoroughly, both in work units at the head office and business units.

INTERNAL AUDIT UNIT MEETING

Throughout 2025, the Internal Audit Unit has held 1 (one) meetings with the Board of Directors, 2 (two) times with the Board of Commissioners and 2 (two) times with the Audit Committee.

COMPETENCY DEVELOPMENT OF INTERNAL AUDIT UNIT

In 2025, members of the Internal Audit Unit have participated in various education and/or training programs for competency improvement, as follows.

No.	Tanggal Date	Penyelenggara Facilitator	Pelatihan Training	Lokasi Location
1.	28–30 April 2025 April 28–30, 2025	Lembaga Pengembangan *Fraud Auditing* (LPFA) Fraud Auditing Development Institute (LPFA)	Audit Forensik Forensic Audit	Jakarta
2.	10 Juni 2025 June 10, 2025	*The* Indonesia Internal Audit *Community* (IIAC)	GRC 360 Audit Internal, Legal & HR	Jakarta
3.	20 Juni 2025 June 20, 2025	LPFA	*Fraud Risk Assessment*	Jakarta
4.	8 September 2025 September 8, 2025	Indonesia *Professional Development Center* (IPDC)	*6 Critical Practices Every Leader Needs*	Jakarta
5.	10 Oktober 2025 October 10, 2025	Internal	K3 Umum General K3	Jakarta
6.	19 November 2025 November 19, 2025	Internal	*Financial Due Diligence*	Jakarta

PELAKSANAAN KEGIATAN UNIT AUDIT INTERNAL

Unit Audit Internal telah melaksanakan kegiatan audit pada tahun 2025 di area sebagai berikut:

1. Direktorat *Commercial Tower*
2. Direktorat *Sales* & *Marketing* Non-*Tower*
3. Direktorat *Project* & *Operation Tower*
4. Direktorat *Technology*, *Operation* & *Project* Non-*Tower*
5. Direktorat *Property Management*
6. Direktorat *Finance* & *Accounting*
7. Direktorat *Enterprise Support Management*
8. *Information* & *Technology*

IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT UNIt ACTIVITIES

The Internal Audit Unit conducted audit activities in 2025 in the following areas:

1. Commercial Tower Directorate
2. Sales & Marketing Non-Tower Directorate
3. Project & Operation Tower Directorate
4. Technology, Operation & Project Non-Tower Directorate
5. Property Management Directorate
6. Finance & Accounting Directorate
7. Enterprise Support Management Directorate
8. Information & Technology

AKUNTAN PUBLIK
Public Accountant

Berdasarkan RUPST yang diselenggarakan pada 23 April 2025, Perseroan telah memutuskan kriteria dan batasan dalam menunjuk jasa Kantor Akuntan Publik (KAP), yaitu:
1. Mempunyai reputasi internasional;
2. Terdaftar pada OJK; dan
3. Syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.

Atas dasar tersebut, Perseroan telah menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Tjahjadi & Tamara, yang masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025, atau menunjuk Akuntan Publik lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2025.

Berikut adalah KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya dalam 5 (lima) tahun terakhir:

Pertaining to the AGMS held on April 23, 2025, the Company has decided on the criteria and limitations in appointing the services of a Public Accounting Firm (KAP), as follows:
1. Have an international reputation;
2. Registered to OJK; and
3. Other terms and conditions deemed good by the Company's Board of Commissioners by taking into account the input and consideration from the Company's Audit Committee.

On this basis, the Company has appointed Riani and Tjahjadi & Tamara Public Accounting Firm, each as Public Accountant and Public Accounting Firm which registered in OJK, to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025, or to appoint other Public Accountant within the same Public Accounting Firm, in the event that the relevant person is permanently unable to audit the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2025.

The following are KAP that audited the consolidated finansial statements of the Company and its subsidiaries in the last 5 (five) years:

Tahun Year	**Kantor Akuntan Publik** Public Accountant Firm	**Akuntan Publik** Public Accountant
2025	Tjahjadi & Tamara	Riani
2024	Tjahjadi & Tamara	Riani
2023	Tjahjadi & Tamara	Riani
2022	Tjahjadi & Tamara	Riani
2021	Tjahjadi & Tamara	Junarto Tjahjadi

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL
Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal dirancang dan diterapkan oleh manajemen untuk mendukung pencapaian tujuan Perseroan, dengan pengawasan serta penelaahan berkala yang dilakukan oleh Komite Audit. Sistem ini merupakan suatu proses terstruktur yang melibatkan Dewan Komisaris, Direksi, manajemen, dan seluruh karyawan, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan mekanisme *check and balance* yang memadai. Sistem ini mempertimbangkan berbagai risiko, termasuk risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan, serta diterapkan melalui model three lines yang melibatkan fungsi manajemen, manajemen risiko, dan fungsi Audit Internal.

Untuk memastikan keselarasan dengan tujuan dan arah strategis Perseroan, Sistem Pengendalian Internal dievaluasi secara berkala dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris, serta didukung oleh Komite Audit, guna menjaga efektivitas dan kemampuan adaptasinya.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Efektivitas Sistem Pengendalian Internal merupakan hal penting dalam memastikan pencapaian tujuan Perseroan dan keberlangsungan usaha. Oleh karena itu, Perseroan melakukan evaluasi tahunan atas Sistem Pengendalian Internal dengan melibatkan Direksi dan Dewan Komisaris. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal telah berjalan secara efektif, yang tercermin dari diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian dari auditor independen eksternal. Kerangka pengendalian internal yang kuat ini memberikan keyakinan yang memadai kepada manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan mengenai keandalan operasional dan kesinambungan usaha Perseroan. Ke depan, Perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat Sistem Pengendalian Internal agar tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan bisnis dan standar regulasi yang berlaku.

The Internal Control System is designed and implemented by management to support the achievement of the Company's objectives, with oversight and periodic reviews conducted by the Audit Committee. It represents a structured process involving the Board of Commissioners, Board of Directors, management, and all employees, aimed at ensuring operational effectiveness and efficiency, the reliability of financial reporting, compliance with applicable laws and regulations, and the implementation of effective check-and-balance mechanisms. The system considers various risks, including financial, operational, and compliance risks, and is implemented through the three lines model involving management functions, risk management, and the Internal Audit function.

To ensure continued alignment with the Company's goals and strategic direction, the Internal Control System is regularly evaluated with the involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners, supported by the Audit Committee, to maintain its effectiveness and adaptability.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

The effectiveness of the Internal Control System is key to ensuring the achievement of the Company's objectives and the sustainability of its business. Accordingly, the Company conducts an annual evaluation of its internal control system with the involvement of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The evaluation results indicate that the internal control system operates effectively, as evidenced by the issuance of an unqualified opinion by the independent external auditor. This strong internal control framework provides reasonable assurance to management, shareholders, and stakeholders regarding the reliability of operations and business continuity. Going forward, the Company remains committed to continuously strengthening its internal control system to ensure ongoing alignment with evolving business needs and regulatory requirements.

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

PERNYATAAN KECUKUPAN PENGENDALIAN INTERNAL

Kecukupan pengendalian internal merupakan pilar utama dalam komitmen Perseroan untuk menerapkan GCG sebagai landasan pencapaian visi dan misi Perseroan. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif guna mendukung pencapaian tujuan Perseroan, sementara Dewan Komisaris, dengan dukungan Komite Audit, melakukan pengawasan atas pelaksanaannya, termasuk pemantauan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi terkait pengendalian internal.

Sistem pengendalian internal dirancang untuk mengelola dan memitigasi risiko secara efektif, sehingga seluruh aktivitas dan transaksi dilaksanakan selaras dengan tujuan Perseroan. Sistem ini mencakup efektivitas dan efisiensi operasional, penyusunan laporan keuangan dan manajemen yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi berkala, sistem pengendalian internal Perseroan dinilai memadai untuk mendukung pencapaian tujuan secara efektif, memastikan kepatuhan, dan menjaga keunggulan operasional.

STATEMENT OF ADEQUACY OF INTERNAL CONTROL

The adequacy of internal control is a cornerstone of the Company's commitment to implementing GCG as a foundation for achieving its vision and mission. The Board of Directors is responsible for establishing and maintaining an effective internal control system to support the achievement of the Company's objectives, while the Board of Commissioners, with the support of the Audit Committee, oversees its implementation, including monitoring policies issued by the Board of Directors related to internal control.

The internal control system is designed to manage and mitigate risks effectively, ensuring that all activities and transactions are carried out in line with the Company's objectives. It covers the efficiency and effectiveness of operations, the preparation of accurate, complete, and timely financial and management reports, and compliance with applicable laws and regulations. Based on the results of periodic evaluations, the Company's internal control system has been assessed as adequate to support the effective achievement of objectives, ensure compliance, and maintain operational excellence.

MANAJEMEN RISIKO
Risk Management

Manajemen risiko merupakan kerangka kerja yang proaktif dan terintegrasi yang diterapkan oleh Perseroan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi potensi risiko secara efektif dan efisien, sehingga mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan kegiatan usaha. Dengan mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses bisnis, Perseroan berkomitmen untuk menjaga kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola perusahaan.

Untuk memberikan arah yang jelas dalam pengawasan dan pengelolaan risiko, Perseroan telah menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko yang komprehensif. Kebijakan ini memastikan bahwa pertimbangan risiko diintegrasikan secara sistematis di seluruh tingkatan manajemen serta tertanam dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan, sehingga tercipta pendekatan manajemen risiko yang konsisten dan disiplin di seluruh organisasi.

Kerangka manajemen risiko Perseroan difokuskan pada mitigasi risiko inheren dalam kegiatan operasional, termasuk risiko terkait perubahan iklim. Dalam menghadapi risiko iklim seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, Perseroan menerapkan kerangka *Business Continuity Management* (BCM) yang memberikan pendekatan terstruktur dalam pengelolaan gangguan dan memastikan ketahanan operasional. Melalui pendekatan ini, Perseroan menjaga kesinambungan usaha, memperkuat resiliensi, serta mendukung penciptaan nilai yang berkelanjutan di tengah lanskap risiko yang terus berkembang.

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RISIKO

Perseroan menjalankan manajemen risiko dengan mengacu pada Kebijakan Manajemen Risiko yang bertujuan untuk:

1. Menggabungkan pendekatan yang konsisten untuk manajemen risiko ke dalam budaya dan proses perencanaan strategis organisasi yang mendukung pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya di tingkat operasional dan strategis.
2. Menerapkan pendekatan yang konsisten terhadap manajemen risiko untuk mendukung tanggung jawab tata kelola organisasi untuk inovasi dan pengambilan risiko yang bertanggung jawab, pengembangan kebijakan, program, dan tujuan. Dalam semua kasus, langkah-langkah yang tepat akan dilakukan untuk mengatasi dampak yang tidak menguntungkan dari risiko dan manfaat yang menguntungkan dari peluang.

Risk management is a proactive and integrated framework implemented by the Company to identify, manage, and mitigate potential risks in an effective and efficient manner, thereby supporting the sustainability and growth of its business operations. By embedding risk management into all aspects of its processes, the Company is committed to safeguarding its economic, social, environmental, and governance performance.

To provide clear direction for risk oversight and management, the Company has established a comprehensive Risk Management Policy. This policy ensures that risk considerations are systematically integrated across all levels of management and embedded within business processes and decision-making, enabling a consistent and disciplined approach to risk management throughout the organisation.

The Company's risk management framework focuses on mitigating inherent operational risks, including those related to climate change. To address climate-related risks such as extreme weather events and natural disasters, the Company applies a Business Continuity Management (BCM) framework that provides a structured approach to managing disruptions and ensuring operational resilience. Through this approach, the Company maintains business continuity, strengthens resilience, and supports sustainable value creation amid an evolving risk landscape.

RISK MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM

The Company carries out risk management by referring to Risk Management Policy with the following objectives:

1. Incorporate a consistent approach to risk management into an organization's strategic planning culture and processes that support decision-making and resource allocation at operational and strategic levels.
2. Apply a consistent approach to risk management to support organizational governance responsibilities for innovation and responsible risk-taking, policy development, programs, and objectives. In all cases, appropriate measures will be taken to address the unfavorable impact of the risks and the beneficial benefits of the opportunity.

Manajemen Risiko
Risk Management

3. Mengelola pendekatan yang transparan terhadap risiko melalui komunikasi dan pemantauan yang terbuka dan bermakna terhadap semua risiko utama yang menyeimbangkan biaya pengelolaan risiko dengan manfaat yang diantisipasi.

Lingkup Kebijakan Manajemen Risiko Perseroan mencakup semua rencana, aktivitas, proses bisnis, kebijakan, prosedur dan individu yang tergabung dalam Grup SMN.

Dalam mengelola risikonya berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko, Perseroan menerapkan ISO 31000:2018 sebagai acuan dalam melakukan proses manajemen risiko.

Kebijakan Manajemen Risiko juga ditinjau secara berkala sesuai dengan antara lain perkembangan usaha Grup dan sebagai akibat dari perubahan hukum dan undang-undang.

PERAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Efektivitas sistem manajemen risiko STP tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditunjukkan melalui pengesahan Kebijakan Manajemen Risiko oleh Direksi serta pembahasan manajemen risiko secara berkala dalam rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, dan rapat gabungan. Perseroan juga melakukan evaluasi sistem manajemen risiko secara berkala di seluruh tingkatan organisasi, mulai dari fungsi dan unit kerja hingga manajemen senior, dengan manajemen risiko secara konsisten menjadi agenda rutin dalam rapat Direksi guna memastikan efektivitas penerapannya.

RISIKO UTAMA, MITIGASI DAN TINJAUAN RISIKO

Perseroan, melalui Departemen Manajemen Risiko, telah melakukan kajian serta analisa untuk mengidentifikasi risiko utama, mitigasi serta tinjauan atas risiko sebagaimana diuraikan di bawah ini:

3. Manage a transparent approach to risk through transparent and meaningful communication and monitoring of all key risks that balance the costs of managing risk with anticipated benefits.

The scope of the Company's Risk Management Policy covers all plans, activities, business processes, policies, procedures, and individuals incorporated in the SMN Group.

In managing its risks pursuant to the Risk Management Policy, the Company applies ISO 31000:2018 as a reference in carrying out the risk management process.

The Policy is also reviewed regularly in accordance with, among others, the business development of the Group and as a result of legal or statutory change.

BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS ROLES ON RISK MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS

The effectiveness of STP's risk management system is underpinned by the strong commitment of the Directors and Commissioners, as demonstrated through the ratification of the Risk Management Policy by the Board of Directors and regular discussion of risk management matters in meetings of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and joint meetings. The Company also conducts periodic evaluations of its risk management system across all organisational levels, from functions and work units to senior management, with risk management consistently forming part of the regular agenda of Board of Directors meetings to ensure its ongoing effectiveness.

KEY RISKS, MITIGATION AND RISK REVIEW

The Company, through Risk Management Department, has conducted review and analysis to identify key risks, mitigation as well as risk review as provided below:

Risiko Utama Main Risks	Penjelasan Description	Mitigasi dan Tinjauan Risiko Mitigation and Risk Review
Kredit Pelanggan Customer Credit	Risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa infrastruktur. This refers to the risk that a counterparty will fail to meet its financial obligations based on financial instruments or customer contracts, resulting in financial loss. The Company is exposed to credit risk from operational activities related to infrastructures leasing.	Risiko kredit pelanggan dikelola sesuai kebijakan Perseroan, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit. Customer credit risk is managed according to the Company's policies, procedures, and established controls related to credit risk management.
Regulasi dan perizinan Regulations and Licensing	Adanya perubahan peraturan dan kebijakan Pemerintah, kesulitan mendapatkan ijin dan persetujuan, pencabutan, atau tidak diperpanjang ijin yang diperlukan untuk infrastruktur, penolakan dari masyarakat setempat terhadap beberapa lokasi infrastruktur. This involves changes in government regulations and policies, difficulties in obtaining permits and approvals, revocation, or non-renewal of necessary permits for infrastructures, and rejection by local communities of certain infrastructures locations.	Perseroan memantau perkembangan lokasi infrastruktur yang akan dibangun, diakuisisi maupun yang telah ada. Selain itu, Perseroan menjaga, membina dengan regulator dan masyarakat setempat agar kelangsungan sewa tanah, pembangunan lokasi infrastruktur, dan akuisisi lahan Perseroan secara aktif bertemu dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi manfaat ekonomis dari infrastruktur kepada masyarakat sekitarnya. The Company monitors the development of infrastructures locations to be built, acquired, or already existing. The Company also maintains and nurtures relationships with regulators and local communities to ensure the continuity of land leases, infrastructures site development, and land acquisition. The Company actively engages with the community to educate them about the economic benefits of infrastructures to the surrounding area.
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Health and Safety	Adanya risiko pekerja vendor mengalami kecelakaan kerja, baik selama proses pembangunan maupun *maintenance* infrastruktur dan non infrastruktur, seperti: A risk of vendor workers experiencing work accidents, both during infrastructures and non-infrastructures construction and maintenance processes, such as: 1. Jatuh dari ketinggian Falling from heights 2. Tersengat listrik Electric shocks 3. Tertimpa material Struck by materials 4. Tertabrak Crash accidents 5. Mengangkat beban berat, terkilir Lifting heavy loads, spraining 6. Tersambar petir Struck by lightning 7. Dan risiko lainnya And other risks.	Perseroan memiliki sistem dan aturan keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dijalankan oleh vendor. Sistem dan aturannya meliputi persyaratan penggunaan APD, sertifikasi bekerja di ketinggian, serta persyaratan dokumen K3 seperti: *Job Safety Analysis*, QHSE *briefing*, *Permit Letter*, dll. The Company has a system and rules for occupational health and safety that must be followed by vendors. The system and rules include requirements for using Personal Protective Equipment (PPE), certification for working at heights, and OHS document requirements such as Job Safety Analysis, QHSE briefing, Permit Letter, etc. Aturan tersebut diatas dan kebijakan K3 yang lain diinfokan/disosialisasikan kepada vendor melalui email blast QHSE setiap bulan. The above rules and other OHS policies are communicated to vendors via monthly QHSE email blasts. Selain itu, Perseroan juga melakukan monitoring terhadap implementasi yang dijalankan oleh vendor melalui *random* HSE *inspection*, ISO internal audit, ISO *external* audit, *emergency site drill*, dll. The Company also monitors the implementation by vendors through random HSE inspections, internal ISO audits, external ISO audits, emergency site drills, etc.

Manajemen Risiko
Risk Management

Risiko Utama Main Risks	Penjelasan Description	Mitigasi dan Tinjauan Risiko Mitigation and Risk Review
Likuiditas **Liquidity**	Risiko apabila Perseroan mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo. This risk occurs when the Company encounters difficulties in meeting financial obligations when they become due.	Perseroan mempertahankan kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Selain itu Perseroan menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank untuk mengelola risiko likuiditas. The Company maintains adequate cash and bank balances to support business activities in a timely manner. The Company also maintains a balance between the continuity of accounts receivable collection and through the flexibility of using bank loans to manage liquidity risk. Perseroan juga menggunakan alat perencanaan likuiditas untuk memonitor risiko likuiditas. The Company also utilizes liquidity planning tools to monitor liquidity risk.
Bencana Alam **Natural Disaster**	Bencana Alam muncul tanpa diduga dan bisa mengganggu keberlanjutan bisnis, yang berpotensi akan kehilangan revenue, berdampak pada sumber daya Perseroan dan mengganggu pemberian pelayanan kepada pelanggan. Kejadian seperti ini juga akan menyebabkan kerusakan fisik pada infrastruktur Menara dan Non-Menara, yang berakibat pada jaringan dan kemampuan operasional. Natural disasters occurs unexpectedly and can disrupt business continuity, result in potential revenue loss, impact the Company's human resources, and interrupt services to customers. Such events may also cause physical damage to both tower and non-tower infrastructure, affecting network availability and operational reliability.	Perseroan menggunakan Asuransi untuk meng-cover semua Menara dan Non-Menara, dan juga kebijakan self-insured. Company use insurance to coverage all tower and non-tower, also policy self-insured. Perencanaan Tanggap Darurat dan Manajemen Krisis telah diperkuat melalui update pembentukan Tim Tanggap Darurat, *On-Site Drils*, program *awareness health & safety,* dan implementasi program IT *Disaster Recovery*. Sebagai tambahan, saat ini Perseroan juga sedang dalam proses pengembangan Keberlanjutan Usaha (*Business Continuity*) untuk menambah ketahanan operasional Perseroan. Emergency Response and Crisis Management plans have been strengthened through the establishment of Emergency Response Teams, on-site drills, health and safety awareness programs, and the implementation of an IT Disaster Recovery Program. In addition, the Company is currently in the process of developing a Business Continuity Plan to further enhance operational resilience.
Perubahan Iklim **Climate Change**	Resiko muncul dikarenakan perubahaan yang signifikan pada pola cuaca global dan temperatur dimana dapat mempengaruhi operasional, keuangan dan reputasi Perseroan. This risk occurs due to significant changes in global weather patterns and temperatures that can affect company's operations, finances, and reputation. Ini juga termasuk resiko diantara para pekerja kontraktor yang mengalami kecelakaan kerja, karena kondisi cuaca ekstrim (seperti: terpapar cahaya, hujan deras, perubahaan cuaca ekstrim), keduanya termasuk proses pembangunan dan perawatan infrastruktur menara dan non-menara. This involve risk among contractor workers experiencing work accidents, due to extreme weather conditions (such as: exposed to sunlight, heavy rain, extreme climate change), both during tower and non-tower infrastructure construction and maintenance processes.	Perseroan telah memasukan resiko cuaca ekstrim kedalam HIRADC, termasuk penggunaan dari alat pelindung diri (helm safety, sepatu safety, baju pelindung panjang), peralatan hidrasi, penggunaan sunscreen, dan penghentian pekerjaan jika kondisi cuaca ekstrim. *Awareness* Kesehatan & Keselamatan Kerja terus dilakukan kepada Karyawan dan pekerja kontraktor untuk mengurangi resiko operasional dan keselamatan. The Company has incorporated extreme weather risks into its HIRADC, including the use of appropriate PPE (safety helmets, safety shoes, long-sleeved clothing), hydration practices, sunscreen usage, and work stoppage during adverse weather conditions. Health and safety awareness is continuously promoted among employees and contractor workers to minimize operational and safety risks.

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Untuk meningkatkan efektivitas dan pencapaian tujuan penerapan manajemen risiko, Departemen Manajemen Risiko secara aktif memperkuat komitmen pimpinan Perseroan agar memberikan dukungan dan keterlibatan penuh dalam pelaksanaan manajemen risiko. Selain itu, Departemen Manajemen Risiko mendorong terbentuknya budaya kesadaran risiko di seluruh proses Perseroan dengan menanamkan prinsip bahwa manajemen risiko merupakan tanggung jawab bersama, yang didukung melalui kegiatan sosialisasi dan pembelajaran berkelanjutan.

TINJAUAN ATAS EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO *(RISK MATURITY LEVEL)*

Risk Maturity Level mengacu pada sejauh mana Perseroan mengidentifikasi, memahami, mengelola, dan mengintegrasikan praktik manajemen risiko ke dalam operasi dan budayanya. Berikut Tahapan *Risk Maturity Level* di Perseroan:

Inisial (Ad-hoc): Pada tahap ini, manajemen risiko bersifat informal dan reaktif. Proses belum secara standar, dan respons terhadap risiko biasanya bersifat ad-hoc dan tidak terkoordinasi.

Berkembang: Perseroan mulai menyadari pentingnya manajemen risiko. Beberapa proses dikembangkan, namun belum secara konsisten diterapkan di seluruh organisasi.

Didefinisikan: Proses manajemen risiko secara formal ditetapkan dan didokumentasikan. Ada pendekatan yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, tetapi integrasi ke dalam perencanaan strategis namun masih terbatas.

Dikelola: Manajemen risiko diintegrasikan ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan. Perseroan secara proaktif mengelola risiko dan mengambil pendekatan yang lebih strategis terhadap manajemen risiko.

Dioptimalkan: Pada tingkat tertinggi ini, manajemen risiko tertanam dalam budaya Perseroan dan proses perencanaan strategis. Perseroan terus meningkatkan praktik manajemen risiko dan menggunakan informasi risiko untuk mendapatkan keuntungan strategis dan mendorong kinerja.

RISK CULTURE IMPROVEMENTS

To enhance the effectiveness and achievement of risk management objectives, the Risk Management Department actively strengthens leadership commitment to provide full support and engagement in the implementation of risk management. At the same time, the Department promotes a strong risk awareness culture across the Company by embedding the principle that risk management is a shared responsibility, supported through ongoing socialisation and continuous learning initiatives.

REVIEW OF THE EFFECTIVENESS OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM (RISK MATURITY LEVEL)

Risk Maturity Level refers to the degree to which the Company identifies, understands, manages, and integrates risk management practices into its operations and culture. The following are stages of Risk Maturity in the Company:

Initial (Ad-hoc): At this stage, risk management is informal and reactive. Processes are not standardized, and responses to risks are typically ad-hoc and uncoordinated.

Developing: The Company begin to recognize the importance of risk management. Some processes are developed, but they may not be consistently applied across the organization.

Defined: Risk management processes are formally established and documented. There is a more systematic approach to identifying and assessing risks, but integration into strategic planning may still be limited.

Managed: Risk management is integrated into business processes and decision-making. The Company proactively manages risks and takes a more strategic approach to risk management.

Optimized: At this highest level, risk management is deeply embedded in the Company's culture and strategic planning processes. The Company continuously improves its risk management practices and uses risk information to gain strategic advantage and drive performance.

Manajemen Risiko
Risk Management

Efektivitas *Risk Maturity Level* di Perseroan

Perseroan telah memahami dan menilai Tingkat Kematangan Risiko Perseroan untuk mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memandu pengembangan strategi manajemen risiko yang lebih canggih. Tingkat kematangan yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Perseroan lebih siap untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan, membuatnya lebih tangguh dan mampu mencapai tujuannya.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE AUDIT ATAS KECUKUPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Untuk memastikan kecukupan manajemen risiko, Direksi dan Dewan Komisaris memberikan perhatian yang kuat terhadap efektivitas pengawasan, dengan dukungan dari Komite Audit. Sistem manajemen risiko ditelaah secara tahunan untuk menilai secara menyeluruh penerapannya serta keselarasan dengan tujuan Perseroan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris, melalui Komite Audit, menyimpulkan bahwa sistem manajemen risiko Perseroan dinilai memadai, yang tercermin dari efektivitas penerapannya dalam mendukung keberlangsungan usaha dan pencapaian tujuan Perseroan.

DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Untuk mendukung pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara efektif, Perseroan membentuk Departemen Manajemen Risiko. Departemen ini bertanggung jawab untuk mengoordinasikan proses identifikasi, penilaian, pemantauan, dan mitigasi risiko di seluruh organisasi, serta dipimpin oleh:

Effectiveness of Risk Maturity Level in the Company

The Company has understood and assessed the Company's Risk Maturity Level to identify areas for improvement and guide the development of more sophisticated risk management strategies. A higher maturity level indicates that the Company is better prepared to address uncertainties and challenges, making it more resilient and capable of achieving its objectives.

STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR AUDIT COMMITTEE ON THE ADEQUACY OF THE RISK MANAGEMENT SYSTEM

To ensure the adequacy of risk management, the Board of Directors and the Board of Commissioners place strong emphasis on effective oversight, supported by the Audit Committee. The risk management system is subject to an annual review to comprehensively assess its implementation and alignment with the Company's objectives. Based on the results of these evaluations, the Board of Directors and the Board of Commissioners, through the Audit Committee, have concluded that the Company's risk management system is deemed adequate, as reflected in its effective operation and its ability to support business continuity and the achievement of corporate objectives.

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

To enhance effective implementation of the Company's risk management function, the Company has established a Risk Management Department. This department is responsible for coordinating risk identification, assessment, monitoring, and mitigation across the organisation, and is chaired by:

Profil Kepala Departemen Manajemen Risiko
Profile of Head of Risk Management Department

DEDEN EKA KURNIA

Kepala Departemen Manajemen Risiko
Head of Risk Management Department

Profil Deden Eka Kurnia sebagai Kepala Departemen Risiko dapat dilihat pada Profil Kepala Departemen Audit Internal Perseroan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

The profile of Deden Eka Kurnia as Head of the Risk Department is presented in the profile of the Head of the Internal Audit Department in the Corporate Governance chapter of this Annual Report.

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

1. Bertanggungjawab atas pengembangan, koordinasi, dan sosialisasi Kerangka Kerja Manajemen Risiko termasuk pelatihan dan sistem yang mampu mengidentifikasi, memantau dan melaporkan risiko baru atau yang muncul yang terdokumentasi
2. Bertanggungjawab untuk meninjau proses Manajemen Risiko, memantau dan melaporkan risiko strategis utama.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEPARTEMEN MANAJEMEN RISIKO

Dalam upaya meningkatkan kualitas personel Departemen Manajemen Risiko agar selaras dengan kebutuhan pelaksanaan tugas manajemen risiko, pada tahun 2024, personel manajemen risiko telah memperoleh sertifikasi *Qualified Chief Risk Officer* ("**QCRO**") dari Center for Risk Management and Sustainability – Lembaga Sertifikasi Profesi – Mitra Kalyana Sejahtera.

ROLES AND RESPONSIBILITIES OF THE RISK MANAGEMENT DEPARTMENT

1. Responsible for developing, coordinating, and disseminating, the Risk Management Framework, including training and systems capable of identifying, monitoring, and reporting documented new or emerging risks.

2. Responsible for reviewing the Risk Management process, monitoring and reporting on key strategic risks.

RISK MANAGEMENT DEPARTMENT COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

To enhance the quality of personnel in the Risk Management Department in alignment with the requirements for risk management implementation, in 2024, risk management personnel have obtained Qualified Chief Risk Officer ("**QCRO**") certification from the Center for Risk Management and Sustainability – Professional Certification Institute – Mitra Kalyana Sejahtera.

PERMASALAHAN HUKUM
Litigation

Tidak terdapat perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Perseroan, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2025.

No legal cases that have a material impact faced by the Company, its subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Company's Board of Commissioners during 2025.

SANKSI ADMINISTRATIF
Administrative Sanctions

Selama tahun 2025, tidak terdapat sanksi administratif yang signifikan dan bersifat material yang dikenakan kepada Perseroan, oleh pihak regulator atau otoritas (OJK, Bank Indonesia, BEI, dan otoritas lainnya) kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi.

Throughout 2025, there were no significant and material administrative sanctions imposed on the Company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors by regulators or authorities (OJK, Bank Indonesia, IDX, and other authorities).

AKSES INFORMASI & DATA PERSEROAN
Information Access & Corporate Data

Perseroan memastikan penerapan prinsip GCG dengan menyediakan akses yang mudah terhadap informasi dan data yang lengkap, relevan, dan terkini bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas. Pengungkapan informasi dilakukan oleh pejabat atau unit kerja yang berwenang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta ketentuan yang berlaku. Informasi terkait Perseroan disampaikan melalui:

The Company ensures the implementation of GCG principles by providing shareholders and other stakeholders with easy access to complete, relevant, and up-to-date information and data, as part of its commitment to transparency and accountability. Information disclosure is carried out by authorised officials or work units in accordance with their respective duties, responsibilities, and applicable regulations. Information related to the Company is disclosed through the following channels:

RUPS: Media pengambilan keputusan tertinggi Perseroan
GMS: The Company's highest decision-making media.

Laporan Tahunan | AnnualReport:
Perseroan menyajikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan yang diterbitkan dalam dua Bahasa baik dalam bentuk fisik maupun soft file
The Company presents Annual Reports and Financial Statements published two languages, both in physical and soft files.

Website:
Melalui situs | Through
https://stptower.com/

yang mengacu pada website | which refers to
POJK No. 8/POJK.04/2015

Layanan Pelanggan | Customer Services:
Perseroan menyediakan Layanan Pelanggan untuk menyampaikan keluhan melalui fasilitas "Kontak Kami" di situs web manapun melalui saluran telepon di
The Company provides Customer Service to submit complaints through the "Contact Us" facility on the website or through telephone lines at
+6221- 23585555 dan | and **faksimili** | facsimile **+6221-23586446**

Media Massa | Mass Media
Perseroan menyediakan alamat surat menyurat melalui | The Company provides correspondence addresses through:

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
Telepon | telephone + 62 2-2358 5555
Fax: +62 21-2358 6446
Email: corporate.secretary@stptower.com
Website: www.stptower.com

Investor Relation |Investor Relations,
Investor, analis dan pemegang saham dapat menghubungi Hubungan Investor secara langsung dengan mengirimkan surat elektronik ke |
Investors, analysts and shareholders may contact Investor Relations directly by emailing to: **corporate.secretary@stptower.com** atau
telepon | or telephone : **(+62 21) 2358 5555**

KEBIJAKAN PRIVASI DATA DAN INFORMASI

Data and Information Privacy Policy

Perusahaan memiliki serangkaian kebijakan privasi data dan informasi yang dijalankan oleh Divisi Teknologi Informasi, yang telah diatur dalam Kebijakan TI sebagai berikut:

1. Penerapan keamanan TI secara umum untuk melindungi data rahasia Perusahaan, aplikasi bisnis, dan infrastruktur TI lainnya dari ancaman keamanan siber.
2. Penyediaan komunikasi rutin untuk menciptakan kesadaran bagi pengguna TI mengenai pentingnya keamanan TI bagi operasi bisnis Perusahaan, serta berupaya meningkatkan peran dan kontribusi pengguna dalam melindungi Perusahaan dari ancaman keamanan siber.
3. Tanggung jawab pengguna untuk melindungi data rahasia Perusahaan dengan melakukan aktivitas kerja secara bertanggung jawab, antara lain dengan mengikuti pedoman keamanan TI, menjaga dan menjaga keamanan data rahasia perusahaan, melindungi perangkat yang mereka gunakan dalam pekerjaan sehari-hari, dll.
4. Prosedur dan pengelolaan penyimpanan data.
5. Klasifikasi data dan penjelasannya, antara lain mengenai data pribadi, data yang sangat rahasia dan data non-rahasia. Ketentuan mengenai penyimpanan data pribadi dan data yang sangat rahasia yang harus disimpan dengan kerahasiaan yang paling ketat, dimana akses terhadap data tersebut akan diberikan berdasarkan kebutuhan dan dipelihara dalam sistem pengontrol domain Perusahaan. Persyaratan akses baru atau modifikasi dapat dilakukan dengan menyampaikan permohonan kepada administrator TI melalui persetujuan kepala divisi masing-masing.
6. Penjelasan mengenai kemampuan untuk lebih mengamankan infrastruktur Perusahaan, aplikasi bisnis dan data serta perangkat pengguna akhir dari potensi ancaman keamanan siber, termasuk *malware*, virus, dan pelaku ancaman lainnya. Hal yang diterapkan mencakup penerapan dan investasi pada firewall, VPN, anti virus, teknologi *web-filter, email security* serta *Security Operations Center* ("SOC") untuk pemantauan ancaman siber.
7. Ketentuan mengenai aplikasi bisnis dan Infrastruktur TI Perusahaan yang dilengkapi dengan akses yang dilindungi kata sandi, dan jejak audit dari akses tersebut.

The Company has a set of data privacy policies and information managed by the Information Technology Division, which are outlined in the IT Policy as follows:

1. General implementation of IT security to protect confidential Enterprise data, business applications, and other IT infrastructure from cybersecurity threats.
2. Regular communications to create awareness for IT users on the importance of IT security to the Company's business operations, as well as to increase the role and contribution of users in protecting the Company from cybersecurity threats.
3. The responsibility of users to protect the Company's confidential data by carrying out work activities responsibly, among others by following IT security guidelines, maintaining and maintaining the security of the Company's confidential data, protecting the devices they use in their daily work, etc.
4. Data storage procedures and management.
5. Data classification and explanation, among others, regarding personal data, highly confidential data and non-confidential data. Provisions regarding the storage of personal data and highly confidential data that must be kept at the strictest confidentiality, whereby access to such data will be provided on an as-needed basis and maintained in the Company's domain controller system. New or modified access requirements can be made by submitting an application to the IT administrator through the approval of the respective division head.
6. Explanation of the ability to better secure Enterprise infrastructure, business applications and end-user data and devices from potential cybersecurity threats, including malware, virus, and other threats. This includes implementing and investing in firewalls, VPNs, anti-virus, web-filter technologies, security email and Security Operations Center ("SOC") for cyber threat monitoring.
7. Provisions regarding business application and Enterprise IT Infrastructure equipped with password-protected access, and an audit trail of such access.

PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement of Goods and Services

STP memiliki Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang dirancang untuk memastikan kualitas, ketepatan waktu, dan kesesuaian sumber pengadaan dalam pengelolaan rantai pasok Perseroan. Kebijakan ini didukung oleh perencanaan strategis, proses pengadaan yang efektif, serta mekanisme pengendalian yang memadai, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Seluruh kegiatan pengadaan dilakukan melalui proses yang terstruktur dan independen, bebas dari benturan kepentingan, serta berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sebagai dasar pengambilan keputusan pengadaan di Perseroan.

STP has a Goods and Services Procurement Policy designed to ensure quality, timeliness, and appropriate sourcing across its supply chain. The policy is supported by strategic planning, effective procurement processes, and robust control mechanisms, and is implemented in compliance with applicable laws and regulations in Indonesia. Procurement activities are conducted through a structured and independent process, free from conflicts of interest, and guided by the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness, which form the basis for all procurement-related decisions within the Company.

Untuk mendukung praktik pengadaan yang berkelanjutan, STP menerapkan proses seleksi pemasok yang terstruktur guna menjamin transparansi, profesionalisme, dan ketepatan dalam setiap kegiatan pengadaan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan telah menetapkan Pedoman Proses Operasional Pengadaan dan Manajemen Vendor yang mengatur secara rinci prosedur pengadaan dan pengelolaan pemasok, termasuk metode pengadaan dan pelaksanaannya, strategi efisiensi biaya, serta pengelolaan dan evaluasi kinerja pemasok berdasarkan parameter kinerja yang terukur.

To support sustainable procurement practices, STP applies a structured supplier selection process that promotes transparency, professionalism, and accuracy in all procurement activities. In this regard, the Company has established Operational Procurement Process and Vendor Management Guidelines, which set out detailed provisions on procurement procedures and supplier management, including procurement methods and their implementation, cost efficiency strategies, as well as supplier performance management and evaluation based on measurable performance parameters.

Untuk menyeleksi pemasok, pada tahap awal Perseroan memiliki persyaratan tertentu yang harus diinformasikan oleh calon pemasok, diantaranya informasi mengenai:

1. Perusahaan calon pemasok, termasuk lingkup kerjanya;
2. Kinerja keuangan pemasok;
3. Peralatan kerja yang dimiliki pemasok;
4. Untuk pemasok yang mengerjakan *project* tertentu, pengalaman kerja pada *project* sejenis sebelumnya;
5. Kemampuan dan kapasitas kerja pemasok;
6. Kompetensi pemasok; dan
7. Pekerja dan tim yang dimiliki, termasuk tenaga ahli.

To select suppliers, at the initial stage, the Company has specific requirements that must be informed by potential suppliers, including information on:

1. Company of prospective supplier, including scope of work;
2. Financial performance;
3. Work equipment;
4. On specific projects, supplier shall provide similar work experience on previous projects;
5. Working ability and capacity;
6. Competence; and
7. Manpower and teams, including expert personnel.

Setelah dilakukan penunjukan, Perseroan juga mewajibkan pemasok untuk menandatangani surat pernyataan kepatuhan dan integritas. Melalui pernyataan ini, Perseroan mewajibkan pemasok untuk berkomitmen agar melakukan kegiatan

Upon appointment, the suppliers shall sign a compliance and integrity statement, by which the Company requires the commitment of suppliers to

Pengadaan Barang Dan Jasa
Procurement of Goods and Services

operasionalnya sesuai dengan konteks keberlanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Praktik tanggung jawab sosial yang mencakup aspek bisnis yang beretika, termasuk kepatuhan pemasok dalam ketentuan anti korupsi, pencucian uang maupun penyuapan dan gratifikasi,
2. Pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja,
3. Pengembangan sumber daya manusia,
4. Menjunjung tinggi hak-hak pekerja dan menghindari diskriminasi terhadap pekerja dan eksploitasi tenaga kerja serta mematuhi larangan penggunaan tenaga kerja di bawah umur, dan
5. Melakukan pekerjaan dengan selalu mempertimbangkan faktor lingkungan hidup maupun perubahan iklim.

Penilaian Pemasok

Untuk menjamin produk dan/atau jasa yang berkualitas, Perseroan secara berkala melakukan evaluasi kinerja mitra kerja yang aktif pada periode evaluasi tersebut. Evaluasi ini dilakukan kepada pemasok bisnis tower dengan tujuan diantaranya untuk memastikan bahwa pemasok bekerja sesuai dengan *Key Performance Indicators* dan *Service Level Agreement* yang telah disepakati. Pengukuran kinerja pemasok dilakukan berdasarkan parameter penilaian yang terdiri dari ketepatan waktu, kualitas, kepatuhan administratif, penganggaran dan dukungan yang diberikan kepada Perseroan.

Untuk meningkatkan keterlibatan pemasok/ *vendor engagement*, Perseroan juga memberikan penghargaan, *performance improvement program*, maupun *punishment* kepada pemasok sesuai dengan hasil evaluasi kinerjanya.

conduct operational activities in accordance with the context of sustainability, including but not limited to:

1. Social responsibility practices that include ethical business aspects, including supplier compliance with anti-corruption, money laundering and bribery and gratuity provisions,
2. Management of occupational health and safety,
3. Human resource development,
4. Uphold workers' rights and avoid discrimination against workers and labour exploitation and comply with prohibitions on the use of underage labour, and
5. Considering environmental factors and climate change during working.

Supplier Assessment

To ensure quality products and/or services, the Company regularly evaluates the performance of active business partners during the evaluation period. This evaluation is conducted for tower business suppliers with goals including ensuring that suppliers work in accordance with the Key Performance Indicators and Service Level Agreements that have been agreed upon. Supplier performance measurement is based on assessment parameters consisting of timeliness, quality, administrative compliance, budgeting, and support provided to the Company.

To enhance supplier/vendor engagement, the Company also awards, implements performance improvement programs, or imposes punishments on suppliers according to the results of their performance evaluations.

PEDOMAN PERILAKU
Code of Conduct

Kode Etik merupakan instrumen penting yang mencerminkan komitmen STP dalam menjunjung tinggi etika bisnis serta menjadi landasan perilaku di seluruh lingkungan Perseroan. Kode Etik memberikan pedoman bagi seluruh insan STP dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak, baik dalam interaksi bisnis maupun hubungan kerja. Penerapan Kode Etik berlandaskan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, serta dilaksanakan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan ketentuan peraturan eksternal yang berlaku.

Kode Etik berlaku bagi seluruh insan STP, termasuk anggota Direksi, Dewan Komisaris, komite pendukung, serta seluruh karyawan di setiap tingkatan organisasi. Penerapannya merupakan tanggung jawab bersama di seluruh organisasi, dengan Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab dalam menegakkan standar etika Perseroan, serta didukung oleh unit terkait untuk memastikan kepatuhan dan pelaksanaan yang efektif.

ISI PEDOMAN PERILAKU

Pedoman Perilaku merupakan komitmen yang terdiri dari etika usaha perseroan dan etika perilaku setiap personil STP yang disusun untuk mempengaruhi, membentuk, mengatur dan melakukan kesesuaian perilaku berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga tercapai keluaran yang konsisten yang sesuai dengan budaya kerja dalam mencapai visi dan misinya.

Secara garis besar isi pedoman perilaku STP antara lain mengatur:

1. Visi, Misi, Nilai-Nilai Perseroan, Tujuan Kode Etik dan Ruang Lingkup Kode Etik;
2. Kepatuhan dan Manajemen Risiko;
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif (yang meliputi Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan, saling menghargai dan menghormati sesama, saling terbuka & percaya, menjaga privasi & rahasia individu, loyal & bertanggung jawab, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan lain sebagainya);
4. Hubungan dengan Pemegang Saham, Pelanggan dan Pemangku Kepentingan lainnya (yang meliputi Hubungan dengan Pelanggan, Hubungan dengan Rekanan, Hubungan dengan Regulator, Penyuapan dan Korupsi, Pemberian dan Penerimaan Hadiah, dan Anti Pencucian Uang);

Code of Conduct is an important instrument that reflects STP's commitment to upholding business ethics and serves as the foundation for ethical behaviour across the Company. The Code provides guidance for all STP personnel in their attitudes, conduct, and actions, both in business interactions and workplace relationships. Its implementation is grounded in the Company's vision, mission, and values, and is carried out in compliance with applicable internal policies and external regulations.

The Code of Conduct applies to all STP personnel, including members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, supporting committees, and employees at all levels. Its implementation is a shared responsibility throughout the organisation, with the Board of Commissioners and the Board of Directors accountable for enforcing ethical standards, supported by relevant units to ensure consistent compliance and effective execution.

CONTENT OF THE CODE OF CONDUCT

The Code of Conduct is a commitment consisting of corporate business ethics and behavioural ethics of each STP personnel which is prepared to influence, form, regulate and conform behaviour based on the principles of good corporate governance so as to achieve consistent output in accordance with the work culture in achieving its vision and mission.

In general, the contents of the STP code of conduct include:

1. Vision, Mission, Corporate Values, Objectives of the Code of Conduct and Scope of the Code of Conduct;
2. Compliance and Risk Management;
3. Creating a Favourable Work Environment (which includes Fair Treatment to All Employees, mutual respect and respect for others, mutual transparency & trust, maintaining individual privacy & confidentiality, loyal & responsible, avoiding conflicts of interest, and so forth);
4. Relationships with Shareholders, Customers and other Stakeholders (which includes Relationships with Customers, Relationships with Associates, Relationships with Regulators, Bribery and Corruption, Gift Giving and Acceptance, and Anti-Money Laundering);

Pedoman Perilaku
Code of Conduct

5. Penegakkan Kode Etik (yang meliputi Peran dan Tanggung Jawab, Pelanggaran Terhadap Kode Etik).

Perseroan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG dan terus mengoptimalkan penerapannya guna mencapai skema praktik terbaik. Perseroan terus meningkatkan kualitas penerapan GCG dengan memperkuat etika dan budaya kerja yang mengutamakan integritas tinggi, profesionalisme dan kepatuhan terhadap peraturan di seluruh level manajemen dan karyawan.

Perseroan telah melakukan sosialisasi Kode Etik melalui email pengumuman kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik melalui sistem *Human Resources* Perseroan.

Upaya Penegakan Kode Etik

Kode Etik berlaku bagi seluruh karyawan termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Perseroan terus berupaya dalam proses penegakkan Kode Etik sebagai salah satu langkah penerapan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku karyawan yang sesuai standar etika. Langkah-langkah upaya antara lain dengan dilakukannya sosialisasi Kode Etik melalui email pengumuman kepada seluruh karyawan dan karyawan memberikan tanggapan berupa penerimaan dan pelaksanaan Kode Etik dengan sebaik- baiknya. Penyampaian Kode Etik juga dilakukan pada saat *Induction Program* bagi karyawan eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik, sementara sosialisasi pengkinian akan terus dilakukan secara berkala. Perseroan memberikan sanksi tegas bagi setiap penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran Kode Etik.

Selama tahun 2025, tidak terdapat pelanggaran atas Pedoman Perilaku Perseroan dan sanksi diberikan kepada karyawan yang melanggar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Enforcement of the Code of Conduct (which includes Roles and Responsibilities, Violations of the Code of Conduct).

The Company upholds the principles of GCG and continues to optimize its implementation to achieve best practice scheme. The Company continues to improve the quality of GCG implementation by strengthening work ethics and culture that prioritize high integrity, professionalism, and regulatory compliance at all levels of management and employees.

The Company has disseminated the Code of Ethics through an announcement email to all employees and employees provide responses in the form of acceptance and implementation of the Code of Ethics through the Company's Human Resources system.

Code of Ethics Enforcement

Code of Conduct shall be obeyed by all employees including the Board of Commissioners and the Board of Directors. The Company is committed to continuously make efforts to enforce the Code of Ethic as one of the implementations of good corporate governance, while also developing employees' behaviour that are in accordance with the ethical standards. The efforts taken among others are socialization of the Code of Ethics through email blast to all Employees, then the Employees respond with acceptance and implementation of the Code of Ethics in the best way possible. Information related to the Code of Ethics is also communicated to executive employees and new hires during the Induction Program, while socialization of the latest updates is given periodically. The Company gives strict sanctions to any irregularities, misuse, and violations of the Code of Ethics

During 2025, there were no violations of the Company's Code of Conduct and sanctions are given to employees who violate in accordance with applicable regulations.

KEBIJAKAN PERUSAHAAN UNTUK MEMENUHI HAK KREDITUR

Company Policy on Creditor's Rights

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015, Perseroan telah menyusun Kebijakan Perusahaan untuk Memenuhi Hak Kreditur ("**Kebijakan**"). Perseroan berharap bahwa Kebijakan tersebut dapat menjadi pedoman bagi Perseroan dan entitas anak dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga dan pemenuhan atas hak- hak kreditur.

Perseroan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut ini sebelum mendapatkan fasilitas pinjaman dari pihak ketiga, antara lain:

1. Mematuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku termasuk mempertahankan izin-izin yang diperlukan Perseroan dan entitas anak dalam menjalankan kegiatan usahanya;
2. Mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, seperti persetujuan dari para pemegang saham;
3. Memperhatikan hak-hak kreditur dalam perjanjian pinjaman yang telah ada; dan
4. Memastikan kondisi keuangan Perseroan dalam kondisi yang sehat dengan memelihara Rasio atas Utang Bersih terhadap EBITDA yang Berjalan dan *Debt Services Coverage Ratio.*

Kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kepercayaan para kreditur, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In accordance with the implementation of good corporate governance as required by POJK 21/2015 the Company has established a Corporate Policy for Fulfilling Creditors' Rights ("**Policy**"). This Policy serves as a guideline for the Company and its subsidiaries in obtaining loans from third parties and ensuring the fulfillment of creditors' rights.

The Company shall consider the following factors prior to obtaining a loan facility from a third party, among others:

1. Complying with applicable laws and regulations as well as maintaining necessary licenses which are required by the Company and its subsidiaries to conduct their business activities;
2. Complying with the provisions on the Articles of Association, such as to obtain approval from the shareholders when required;
3. Respecting the rights of the creditors on loans; and
4. Ensuring the financial conditions is in a healthy condition by maintaining the Ratio on Net Debt to Running EBITDA and the Debt Services Coverage Ratio.

This Policy is intended to maintain trust from our creditors, investors and stakeholders and to address their rights.

KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN DAN ANTI KORUPSI

Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy

Dalam rangka menjalankan bisnis secara transparan, jujur, dan berintegritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari Grup SMN, Perseroan menerapkan kebijakan anti penyuapan dan anti korupsi ("**Kebijakan**") tanggal 6 Mei 2024. Kebijakan ini menjadi dasar dalam menjalankan bisnis dan hubungannya dengan seluruh pemangku kepentingan serta memastikan Perseroan mencapai bisnis yang lebih berkelanjutan.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan, serta mengikat mitra usaha Perseroan. Perseroan mewajibkan seluruh pihak terkait untuk mematuhi peraturan yang berlaku, menghindari konflik kepentingan, serta menolak segala bentuk penyuapan, gratifikasi, dan praktik tidak etis lainnya. Perseroan juga melarang pemberian maupun penerimaan hadiah atau fasilitas yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan, kecuali dalam batas kewajaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai wujud komitmen Perseroan dalam menjalankan bisnis secara transparan, jujur dan berintegritas, Perseroan telah mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan memperoleh sertifikasi ISO 37001 tentang Anti-Bribery Management System. Penerapan standar ini mencakup kebijakan dan prosedur seperti penilaian risiko, uji tuntas terhadap mitra usaha, pengendalian gratifikasi, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta program pelatihan bagi karyawan. Perseroan memastikan bahwa penggunaan aset Perseroan dilakukan secara bertanggung jawab, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalin hubungan bisnis dengan pihak ketiga. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini wajib dilaporkan dan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi secara berkala juga dilakukan oleh Perseroan untuk memastikan efektivitas sistem dan peningkatan berkelanjutan, sehingga dapat meminimalkan risiko penyuapan dan korupsi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Perseroan secara berkala menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan, serta meminta pernyataan pengakuan dan komitmen dari seluruh pihak terkait untuk memahami dan mematuhi kebijakan ini, ketentuan internal, dan peraturan yang berlaku.

In carrying out its business in a transparent, honest, and ethical manner in accordance with applicable laws and regulations, and as part of the SMN Group, the Company implements an anti-bribery and anti-corruption policy (the "**Policy**") dated May 6, 2024. This Policy serves as the foundation for conducting business and managing its relationships with all stakeholders, while ensuring that the Company achieves more sustainable business practices.

This Policy applies to all members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and employees, and is also binding on the Company's business partners. The Company requires all relevant parties to comply with applicable regulations, avoid conflicts of interest, and reject all forms of bribery, gratification, and other unethical practices. The Company also prohibits the giving or receiving of gifts or facilities that may influence decision-making, except within reasonable limits and in accordance with applicable provisions.

As part of the Company's commitment to conducting business in a transparent, honest, and ethical manner, the Company has implemented an Anti-Bribery Management System and obtained ISO 37001 certification on Anti-Bribery Management Systems. The implementation of this standard includes policies and procedures such as risk assessment, due diligence on business partners, gratification control, whistleblowing mechanisms, and employee training programs. The Company ensures that the use of its assets is carried out responsibly and applies a prudent approach in establishing business relationships with third parties. Any violations of this policy must be reported and will be followed up in accordance with applicable regulations. The Company also conducts periodic evaluations to ensure the effectiveness of the system and continuous improvement, thereby minimizing the risks of bribery and corruption while enhancing stakeholder trust.

The Company periodically conducts socialization and training, and requests statements of acknowledgment and commitment from all relevant parties to understand and comply with this Policy, internal provisions, and applicable regulations.

KEBIJAKAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK KETERBUKAAN INFORMASI

Policy on the Utilization of Information Technology for Information Transparency

Dalam rangka penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana disyaratkan melalui POJK 21/2015, Perseroan dengan ini menyusun Kebijakan Penggunaan Teknologi Informasi Untuk Keterbukaan Informasi ("**Kebijakan**"). Perseroan berharap dengan Kebijakan tersebut dapat memperluas pemberian informasi kepada para pemegang saham, pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial sehubungan dengan kinerja dan kegiatan usaha Perseroan.

Sebagai sebuah perusahaan publik yang tercatat, Perseroan wajib menyampaikan informasi material Perseroan sesuai dengan hukum pasar modal yang berlaku di Indonesia, antara lain, menyediakan informasi tersebut pada situs web Perseroan. Selain dengan situs web Perseroan, Perseroan juga mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan dan juga investor yang potensial setiap kali Perseroan merilis laporan keuangan kuartalan, dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Mengirimkan surat elektronik sehubungan dengan kondisi dan rencana kegiatan Perseroan; dan
2. Mengadakan pertemuan investor baik dalam bentuk tatap muka maupun konferensi telepon (bila diperlukan).

Perseroan berharap Kebijakan ini dapat menjaga kepercayaan para pemegang saham, investor, dan pemangku kepentingan terhadap Perseroan sekaligus memenuhi hak-hak mereka.

In line with requirements of Good Corporate Governance as stipulated in POJK 21/2015, the Company has prepared the Policy on Utilization of Information Technology for Disclosure Information (the **"Policy"**). By this Policy, the Company makes it a priority to share information broadly to shareholders and stakeholders as well as potential investors regarding the performance and business plan of the Company.

As a publicly listed company, the Company must disclose its material information in accordance with the prevailing capital market laws in Indonesia, among others, by publishing its information to public on the Company's website. Other than the Company's website, the Company is optimizing the use of information technology to spread information to shareholders and stakeholders as well as potential investors each time the Company release its quarterly financial report, by using the following methods:

1. Sending electronic mail regarding the Company's condition and business plan; and
2. Holding investor gatherings in the form of real meetings or conference calls (if needed).

The Company believes that this Policy will maintain the trust from our shareholders, investors and stakeholders towards the Company and to fulfill their rights.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN

Employee and/or Management Shares Option Programs

Selama tahun buku 2025, Perseroan tidak melaksanakan aksi Perseroan dalam hal pemberian program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

During fiscal year 2025, the Company did not conduct any Company action related to the employee and/or management shares option programs.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistleblowing System

STP telah menetapkan Whistleblowing System (WBS) sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan GCG, yang berfungsi sebagai mekanisme pelaporan resmi bagi pelapor untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran di lingkungan Perseroan. WBS dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memastikan bahwa setiap laporan diterima, diproses, dan ditindaklanjuti secara independen, objektif, dan profesional, serta dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Melalui penerapan WBS yang efektif, STP menegaskan komitmennya untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari praktik tidak etis serta menjunjung tinggi integritas bisnis di seluruh aktivitas operasional Perseroan.

STP has established a Whistleblowing System (WBS) as part of its commitment to implementing GCG, providing a formal reporting mechanism that enables whistleblowers to submit information regarding alleged violations within the Company. The WBS is designed to enhance transparency and accountability by ensuring that every report is received, processed, and followed up in an independent, objective, and professional manner, while safeguarding the confidentiality of whistleblowers. Through the effective implementation of the WBS, STP reinforces its commitment to maintaining a workplace free from unethical practices and upholding business integrity across all operational activities.

Tindakan pelanggaran dalam konteks WBS tersebut, antara lain:
a. Penipuan/kecurangan/penggelapan;
b. Pelanggaran hukum dan peraturan; dan Pelanggaran terhadap Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja, Kode Etik, dan kebijakan tertulis lainnya dari Perseroan.

The following are some of the violations within the WBS contexts:
a. Fraud/cheating/embezzlement;
b. Violation of laws and regulations; and Violation of Company Regulations, agreements work, Code of Ethics, and other written policies of the Company;

TATA CARA *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

WBS memberikan jalur komunikasi yang aman bagi karyawan, mitra bisnis, atau pihak eksternal untuk melaporkan dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan Perseroan, atau standar etika yang berlaku.

WHISTLEBLOWING SYSTEM MECHANISM

WBS provides a secure communication channel for employees, business partners, and external parties to report any suspected misconduct, regulatory violations, breaches of company policies, or unethical behavior.

Setiap laporan yang diterima melalui WBS akan melalui proses verifikasi dan investigasi yang transparan, dengan hasil yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang di dalam Perseroan.

All reports submitted through the WBS undergo a structured verification and investigation process, with findings reported to the relevant authorities within the Company.

Para pemangku kepentingan dapat menyampaikan pelaporannya melalui:

Stakeholders can submit the report via:

whistleblower.protelindogroup@protelindo.co.id

0817 492 2964, 0878 4453 0366

Selain itu, Perseroan juga dapat menggunakan berbagai sumber dalam menerima dan menindaklanjuti laporan.

In addition, the Company may use various sources in receiving and following up on reports.

Untuk menjaga kerahasiaan identitas pemangku kepentingan, Perseroan juga menyediakan fitur pelaporan secara anonim yang tersedia di website Perseroan:

To maintain the confidentiality of stakeholder identities, the Company also provides a feature for anonymous reporting available on the Company's website:

whistleblower.protelindogroup@protelindo.co.id

0817 4922 964/0878 4453 0366

ANONYMOUS LINK

https://www.ptsmn.co.id/contact-us/whistleblowing-system/form

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistleblowing System

PERLINDUNGAN BAGI *WHISTLE BLOWER*

Kerahasiaan identitas pelapor merupakan prioritas utama bagi Perseroan, yang disertai dengan komitmen kuat untuk memberikan perlindungan dari segala bentuk tindakan balasan. Setiap pihak yang melaporkan pelanggaran berhak memperoleh perlindungan sesuai dengan kebijakan Perseroan, dengan STP memastikan anonimitas pelapor serta menyediakan lingkungan yang aman dan bebas dari intimidasi, tekanan, maupun pembalasan. Melalui penguatan budaya pelaporan yang terbuka dan bertanggung jawab, Perseroan menegaskan komitmennya terhadap transparansi, akuntabilitas, dan praktik bisnis yang beretika.

PENANGANAN PENGADUAN

Pengelola penanganan pengaduan dalam WBS dilakukan oleh Komite *Whistleblower System* di Grup SMN, untuk memastikan bahwa setiap laporan yang diterima ditangani secara independen, transparan, dan profesional.

Setiap informasi yang disampaikan oleh pelapor akan diperlakukan dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi. Komite WBS bertanggung jawab untuk mengevaluasi seluruh laporan yang masuk, mencakup aspek administratif, operasional, dan yudisial. Jika informasi awal dianggap memadai, investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menilai validitas laporan tersebut. Jika laporan yang diterima berada di luar ruang lingkup WBS, Komite WBS akan meneruskannya kepada unit atau pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite WBS meliputi:
a. Menerima dan mendokumentasikan laporan yang masuk;
b. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis pelanggaran;
c. Melakukan investigasi;
d. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
e. Memberikan perlindungan kepada Pelapor; dan
f. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.

HASIL PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN

Pada tahun 2025, tidak terdapat laporan yang diterima melalui sistem pelaporan pelanggaran.

PROTECTION OF WHISTLE BLOWERS

The confidentiality of whistleblowers' identities is a key priority for the Company, accompanied by a firm commitment to protect whistleblowers from any form of retaliation. Individuals who report violations are entitled to protection in accordance with Company policies, with STP ensuring anonymity and providing a secure environment free from intimidation, pressure, or reprisal. Through the promotion of open and responsible reporting, the Company reinforces its commitment to transparency, accountability, and ethical business practices.

WHISTLEBLOWING SYSTEM HANDLING

The management of complaint handling in the WBS is carried out by the Whistleblowing System Committee of the SMN Group, to ensure that every report received is handled independently, transparently, and professionally.

All information submitted by whistleblowers is treated with the highest level of confidentiality. The WBS Committee is responsible for evaluating all incoming reports, covering administrative, operational, and judicial aspects. If the initial information is deemed sufficient, a further investigation will be conducted to assess the validity of the report. If the report falls outside the scope of the WBS, the Committee will forward it to the relevant unit or department for appropriate follow-up action.

The detailed roles and responsibilities of the WBS Committee include:
a. Receive and document incoming reports;
b. Identifying and classifying the type of violation;
c. Performing investigations;
d. Maintaining the confidentiality of whistleblower's identity;
e. Protecting the whistleblower; and
f. Prepare and submit reports to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

RESULTS OF HANDLING AND FOLLOW-UP

In 2025, there is no reports received through the whistleblowing system.

KESESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP ASEAN CORPORATE GOVERNANCE SCORECARD

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the Asean Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.	**Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham** **Rights and Equitable Treatment of Shareholders**	
A.1	**Hak Dasar Pemegang Saham** **Basic Shareholder Rights**	
A.1.1	Apakah perusahaan membayarkan dividen (interim dan final/tahunan) secara adil dan tepat waktu, di mana semua pemegang saham diperlakukan secara setara dan menerima pembayaran dalam waktu 30 hari setelah (i) dividen interim diumumkan dan (ii) disetujui oleh pemegang saham dalam rapat umum untuk dividen final? Jika perusahaan menawarkan dividen dalam bentuk Scrip, apakah perusahaan membayarkan dividen tersebut dalam waktu 60 hari? Does the company pay (interim and final/annual) dividends in an equitable and timely manner; that is, all shareholders are treated equally and paid within 30 days after being (i) declared for interim dividends and (ii) approved by shareholders at general meetings for final dividends? In case the company has offered Scrip dividend, did the company paid the dividend within 60 days.	12, 118–119, 166–167, 175
A.2	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** **Right to participate effectively in and vote in general shareholder meetings and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholder meetings.**	165–167
A.2.1	Apakah pemegang saham memiliki kesempatan, yang dibuktikan dengan adanya agenda dalam rapat, untuk menyetujui remunerasi (honorarium, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang, dan emolumen lainnya) atau peningkatan remunerasi bagi direksi/komisaris non-eksekutif? Do shareholders have the opportunity, evidenced by an agenda item, to approve remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) or any increases in remuneration for the non-executive directors/commissioners?	179
A.2.2	Apakah perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham non-pengendali untuk mencalonkan kandidat bagi dewan direksi/komisaris? Does the company provide non-controlling shareholders a right to nominate candidates for board of directors/commissioners?	161, 164, 184, 201, 221–226
A.2.3	Apakah perusahaan mengizinkan pemegang saham untuk memilih direksi/komisaris secara individual? Does the company allow shareholders to elect directors/commissioners individually?	161, 164, 184, 201, 221–226
A.2.4	Apakah perusahaan mengungkapkan prosedur pemungutan suara yang digunakan sebelum rapat dimulai? Does the company disclose the voting procedures used before the start of meeting?	171
A.2.5	Apakah risalah RUPS Tahunan (RUPST) terbaru mencatat bahwa pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, serta mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan jawaban yang diberikan? Do the minutes of the most recent AGM record that the shareholders were given the opportunity to ask questions and the questions raised by shareholders and answers given recorded?	169

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.2.6	Apakah perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara, termasuk suara setuju, tidak setuju, dan abstain untuk semua resolusi/setiap agenda dalam RUPST terbaru? Does the company disclose the voting results including approving, dissenting, and abstaining votes for all resolutions/each agenda item for the most recent AGM?	174–180
A.2.7	Apakah perusahaan mengungkapkan daftar anggota dewan yang menghadiri RUPST terbaru? Does the company disclose the list of board members who attended the most recent AGM?	169
A.2.8	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh anggota dewan dan CEO (jika bukan anggota dewan) menghadiri RUPST terbaru? Does the company disclose that all board members and the CEO (if he is not a board member) attended the most recent AGM?	169
A.2.9	Apakah perusahaan mengizinkan pemungutan suara secara absensi? Does the company allow voting in absentia?	N/A
A.2.10	Apakah perusahaan melakukan pemungutan suara dengan sistem *polling* (bukan dengan angkat tangan) untuk semua resolusi dalam RUPST terbaru? Did the company vote by poll (as opposed to by show of hands) for all resolutions at the most recent AGM?	171
A.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa telah menunjuk pihak independen (*scrutineers*/ inspektur) untuk menghitung dan/atau memvalidasi suara dalam RUPS? Does the company disclose that it has appointed an independent party (scrutineers/ inspectors) to count and/or validate the votes at the AGM?	168, 170
A.2.12	Apakah perusahaan membuat hasil pemungutan suara untuk semua resolusi dalam RUPST/ RUPSLB terbaru tersedia untuk publik pada hari kerja berikutnya? Does the company make publicly available by the next working day the result of the votes taken during the most recent AGM/EGM for all resolutions?	173–177
A.2.13	Apakah perusahaan memberikan pemberitahuan setidaknya 21 hari sebelum pelaksanaan RUPST dan RUPSLB? Does the company provide at least 21 days' notice for all AGMs and EGMs?	172
A.2.14	Apakah perusahaan menyediakan rasional dan penjelasan untuk setiap agenda yang memerlukan persetujuan pemegang saham dalam pemberitahuan RUPS/sirkular dan/atau pernyataan yang menyertainya? Does the company provide the rationale and explanation for each agenda item which require shareholders' approval in the notice of AGM/circulars and/or the accompanying statement?	172
A.2.15	Apakah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengusulkan agenda dalam rapat umum dan/atau meminta penyelenggaraan rapat umum dengan persyaratan persentase tertentu? Does the company give the opportunity for shareholders to place item/s on the agenda of general meetings and/or to request for general meetings subject to a certain percentage?	166, 187
A.3	**Pasar untuk pengendalian korporasi harus diizinkan berfungsi secara efisien dan transparan.** **Markets for corporate control should be allowed to function in an efficient and transparent manner.**	
A.3.1	Dalam kasus merger, akuisisi, dan/atau pengambilalihan yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah direksi/ dewan komisaris perusahaan menunjuk pihak independen untuk mengevaluasi kewajaran harga transaksi? In cases of mergers, acquisitions and/or takeovers requiring shareholders' approval, does the board of directors/commissioners of the company appoint an independent party to evaluate the fairness of the transaction price?	
A.4	**Pelaksanaan hak kepemilikan oleh semua pemegang saham, termasuk investor institusi, harus difasilitasi.** **The exercise of ownership rights by all shareholders, including institutional investors, should be facilitated.**	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan praktiknya dalam mendorong pemegang saham untuk berinteraksi dengan perusahaan di luar rapat umum? Does the company disclose its practices to encourage shareholders to engage with the company beyond general meetings?	N/A
A.5	**Saham dan hak suara** **Shares and voting rights**	
A.5.1	Jika perusahaan memiliki lebih dari satu kelas saham, apakah perusahaan mempublikasikan hak suara yang melekat pada setiap kelas saham (misalnya melalui situs web perusahaan, laporan, bursa saham, atau situs web regulator)? Where the company has more than one class of shares, does the company publicise the voting rights attached to each class of shares (e.g. through the company website / reports/ the stock exchange/ the regulator's website)?	N/A
A.6	**Pemberitahuan RUPS Tahunan** **Notice of AGM**	
A.6.1	Apakah setiap resolusi yang diajukan dalam RUPS Tahunan terbaru hanya membahas satu agenda, yaitu tidak ada penggabungan beberapa agenda dalam satu resolusi? Does each of the resolutions tabled at the most recent annual general meeting deal with only one item, i.e., there is no bundling of several items into the same resolution?	172–177
A.6.2	Apakah pemberitahuan RUPS Tahunan terbaru/sirkular perusahaan diterjemahkan sepenuhnya ke dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan pada tanggal yang sama dengan versi dalam bahasa lokal? Are the company's notice of the most recent AGM/circulars fully translated into English and published on the same date as the local-language version?	172
	Apakah pemberitahuan RUPS Tahunan/sirkular mencantumkan detail berikut: *Does the notice of AGM/circulars have the following details:*	
A.6.3	Apakah profil direksi/komisaris (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pertama kali diangkat, pengalaman, dan jabatan direksi di perusahaan tercatat lainnya) yang mencalonkan diri untuk pemilihan kembali/pengangkatan kembali disertakan? Are the profiles of directors/commissioners (at least age, academic qualification, date of first appointment, experience, and directorships in other listed companies) in seeking election/re-election included?	172
A.6.4	Apakah auditor yang mengajukan diri untuk pengangkatan kembali/pengangkatan baru diidentifikasi dengan jelas? Are the auditors seeking appointment/re-appointment clearly identified?	177
A.6.5	Apakah dokumen kuasa (proxy) tersedia dengan mudah? Were the proxy documents made easily available?	166, Website
A.7	**Perdagangan orang dalam dan transaksi pribadi yang merugikan harus dilarang** **Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited**	
A.7.1	Apakah direksi/komisaris diwajibkan untuk melaporkan transaksi mereka dalam saham perusahaan dalam waktu 3 hari kerja? Are the directors/commissioners required to report their dealings in company shares within 3 business days?	196, 211
A.8	**Transaksi Afiliasi oleh Direksi dan Eksekutif Utama** **Related party transactions by directors and key executives**	
A.8.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan komite direksi/komisaris independen untuk meninjau transaksi afiliasi material guna menentukan apakah transaksi tersebut sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham? Does the company have a policy requiring a committee of independent directors/ commissioners to review material RPTs to determine whether they are in the best interests of the company and shareholders?	119, 167, 198

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
A.8.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan yang mewajibkan anggota dewan (direksi/komisaris) untuk tidak berpartisipasi dalam diskusi dewan mengenai agenda tertentu jika terdapat konflik kepentingan? Does the company have a policy requiring board members (directors/commissioners) to abstain from participating in the board discussion on a particular agenda when they are conflicted?	251, 254
A.8.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan terkait pemberian pinjaman kepada direksi dan komisaris, baik dengan melarang praktik tersebut maupun memastikan bahwa pinjaman dilakukan secara wajar (*arm's length*) dan dengan suku bunga pasar? Does the company have policies on loans to directors and commissioners either forbidding this practice or ensuring that they are being conducted at arm's length basis and at market rates?	119–120, 198, 212
A.9	**Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Merugikan** **Protecting minority shareholders from abusive actions**	
A.9.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa transaksi afiliasi dilakukan dengan cara yang memastikan keadilan dan sesuai dengan prinsip transaksi wajar (*arm's length*)? Does the company disclose that RPTs are conducted in such a way to ensure that they are fair and at arms' length?	119–120
A.9.2	Dalam kasus transaksi afiliasi yang memerlukan persetujuan pemegang saham, apakah keputusan diambil oleh pemegang saham yang tidak memiliki kepentingan (*disinterested shareholders*)? In case of related party transactions requiring shareholders' approval, is the decision made by disinterested shareholders?	119, 167, 198
B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** **Sustainability and Resilience**	
B.1	**Pengungkapan terkait keberlanjutan harus konsisten, dapat dibandingkan, dan andal, serta mencakup informasi material baik retrospektif maupun prospektif yang dianggap penting oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi atau pemungutan suara** **Sustainability-related disclosure should be consistent, comparable and reliable, and include retrospective and forward-looking material information that a reasonable investor would consider important in making an investment or voting decision**	Sustainability Report
	Informasi material terkait keberlanjutan harus ditentukan secara spesifik *Material Sustainability-related information should be specified*	
B.1.1	Apakah perusahaan mengidentifikasi/melaporkan topik ESG yang material bagi strategi organisasi? Does the company identify/report ESG topics that are material to the organization's strategy?	Sustainability Report
B.1.2	Apakah perusahaan mengidentifikasi perubahan iklim sebagai isu yang relevan? Does the company identify climate change as an issue?	
B.1.3	Apakah perusahaan mengadopsi kerangka atau standar pelaporan keberlanjutan yang diakui secara internasional (seperti GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)? Does the company adopt an internationally recognized reporting framework or standard for sustainability (i.e. GRI, Integrated Reporting, SASB, IFRS Sustainability Disclosure Standards)?	Sustainability Report
	Jika perusahaan secara publik menetapkan tujuan atau target terkait keberlanjutan, kerangka pengungkapan harus memastikan bahwa metrik yang andal dilaporkan secara berkala dalam bentuk yang mudah diakses *If a company publicly sets a sustainability-related goal or target, the disclosure framework should provide that reliable metrics are regularly disclosed in an easily accessible form*	
B.1.4	Apakah perusahaan mengungkapkan target keberlanjutan dalam bentuk kuantitatif? Does the company disclose quantitative sustainability target?	Sustainability Report

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan kemajuan kinerja terkait keberlanjutan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya? Does the company disclose sustainability-related performance progress in relation to its previously set targets?	Sustainability Report
B.1.6	Apakah perusahaan mengonfirmasi bahwa Laporan Keberlanjutan/Pelaporan Keberlanjutan telah ditinjau dan/atau disetujui oleh Dewan atau Komite Dewan? Does the company confirm that its Sustainability Report / Reporting is reviewed and /or approved by the Board or Board Committee?	Sustainability Report
B.2	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memungkinkan dialog antara perusahaan, pemegang saham, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pandangan mengenai isu keberlanjutan** **Corporate governance frameworks should allow for dialogue between a company, its shareholders and stakeholders to exchange views on sustainability matters**	
B.2.1	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan internal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan masukan terkait isu keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage internal stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Sustainability Report
B.2.2	Apakah perusahaan melibatkan pemangku kepentingan eksternal untuk bertukar pandangan dan mengumpulkan masukan terkait isu keberlanjutan yang material bagi bisnis perusahaan? Does the company engage external stakeholders to exchange views and gather feedback on sustainability matters that are material to the business of the company?	Sustainability Report
B.3	**Kerangka tata kelola perusahaan harus memastikan bahwa dewan secara memadai mempertimbangkan risiko dan peluang keberlanjutan yang material dalam menjalankan fungsi utamanya, termasuk dalam meninjau, memantau, dan membimbing praktik tata kelola, pengungkapan, strategi, manajemen risiko, serta sistem pengendalian internal, termasuk yang terkait dengan risiko fisik dan transisi akibat perubahan iklim** **The corporate governance framework should ensure that boards adequately consider material sustainability risks and opportunities when fulfilling their key functions in reviewing, monitoring and guiding governance practices, disclosure, strategy, risk management and internal control systems, including with respect to climate-related physical and transition risks**	
	Dewan harus menilai apakah struktur permodalan perusahaan sejalan dengan tujuan strategis dan tingkat toleransi risikonya untuk memastikan ketahanan terhadap berbagai skenario. Boards should assess whether the company's capital structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite to ensure it is resilient to different scenarios	
B.3.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan meninjau secara tahunan bahwa struktur modal dan utang perusahaan sejalan dengan tujuan strategis dan tingkat toleransi risikonya? Does the company disclose that the board reviews on an annual basis that the company's capital and debt structure is compatible with its strategic goals and its associated risk appetite?	AR 116, 186, Sustainability Report
B.4	**Kerangka tata kelola perusahaan harus mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama serta mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja, dan keberlanjutan perusahaan yang sehat secara finansial** **The corporate governance framework should recognise the rights of stakeholders established by law or through mutual agreements and encourage active co-operation between corporations and stakeholders in creating wealth, jobs, and the sustainability of financially sound enterprises**	
	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan dan praktik yang mencakup: Does the company disclose a policy and practices that address:	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
B.4.1	Keberadaan dan cakupan upaya perusahaan dalam menjaga kesejahteraan pelanggan? The existence and scope of the company's efforts to address customers' welfare?	Sustainability Report
B.4.2	Prosedur seleksi pemasok/kontraktor? Supplier/contractor selection procedures?	AR 249–251, Sustainability Report
B.4.3	Upaya perusahaan untuk memastikan bahwa rantai nilainya ramah lingkungan atau sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan? The company's efforts to ensure that its value chain is environmentally friendly or is consistent with promoting sustainable development?	Sustainability Report
B.4.4	Upaya perusahaan dalam berinteraksi dengan komunitas di wilayah operasionalnya? The company's efforts to interact with the communities in which they operate?	Sustainability Report
B.4.5	Program dan prosedur anti-korupsi perusahaan? The company's anti-corruption programmes and procedures?	254
B.4.6	Bagaimana hak-hak kreditur dilindungi? How creditors' rights are safeguarded?	253
B.4.7	Apakah perusahaan memiliki laporan atau bagian terpisah yang membahas upaya terkait isu lingkungan, ekonomi, dan sosial? Does the company have a separate report/section that discusses its efforts on environment/economy and social issues?	Sustainability Report
B.5	**Dalam hal kepentingan pemangku kepentingan dilindungi oleh hukum, pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pemulihan yang efektif atas pelanggaran hak mereka** **Where stakeholder interests are protected by law, stakeholders should have the opportunity to obtain effective redress for violation of their rights**	
B.5.1	Apakah perusahaan menyediakan detail kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan (misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat umum, dll.) untuk menyampaikan kekhawatiran dan/atau keluhan terkait kemungkinan pelanggaran hak mereka? Does the company provide contact details via the company's website or Annual Report which stakeholders (e.g. customers, suppliers, general public etc.) can use to voice their concerns and/or complaints for possible violation of their rights?	AR 47, 87, Sustainability Report
B.6	**Mekanisme partisipasi karyawan harus diperbolehkan untuk berkembang** **Mechanisms for employee participation should be permitted to develop**	
B.6.1	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik terkait kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan? Does the company explicitly disclose the policies and practices on health, safety and welfare for its employees?	86, 241
B.6.2	Apakah perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan dan praktik terkait program pelatihan dan pengembangan bagi karyawan? Does the company explicitly disclose the policies and practices on training and development programmes for its employees?	36, 127, 134, 191, 220, 254
B.6.3	Apakah perusahaan memiliki kebijakan penghargaan/kompensasi yang mempertimbangkan kinerja perusahaan di luar ukuran keuangan jangka pendek? Does the company have a reward/compensation policy that accounts for the performance of the company beyond short-term financial measures?	256
B.7	**Pemangku kepentingan, termasuk karyawan individu dan perwakilan mereka, harus dapat secara bebas mengkomunikasikan kekhawatiran mereka tentang praktik ilegal atau tidak etis kepada dewan, dan hak mereka tidak boleh dikompromikan karena melakukannya** **Stakeholders including individual employee and their representative bodies, should be able to freely communicate their concerns about illegal or unethical practices to the board and their rights should not be compromised for doing this**	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
B.7.1	Apakah perusahaan memiliki kebijakan whistleblowing yang mencakup prosedur pengaduan oleh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya terkait dugaan perilaku ilegal dan tidak etis serta menyediakan detail kontak melalui situs web perusahaan atau Laporan Tahunan? Does the company have a whistle blowing policy which includes procedures for complaints by employees and other stakeholders concerning alleged illegal and unethical behaviour and provide contact details via the company's website or annual report?	256
B.7.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan/individu yang mengungkap dugaan perilaku ilegal/tidak etis dari tindakan balasan atau pembalasan? Does the company have a policy or procedures to protect an employee/person who reveals alleged illegal/unethical behaviour from retaliation?	258
C.	**Pengungkapan dan Transparansi** **Disclosure and Transparency**	
C.1	**Struktur kepemilikan yang transparan** **Transparent ownership structure**	
C.1.1	Apakah informasi kepemilikan saham mengungkap identitas pemilik manfaat *(beneficial owners)* yang memiliki 5% atau lebih saham? Does the information on shareholdings reveal the identity of beneficial owners, holding 5% shareholding or more?	47, 77
C.1.2	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung *(deemed)* dari pemegang saham utama dan/atau pemegang saham signifikan? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of major and/ or substantial shareholders?	47
C.1.3	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung *(deemed)* dari direksi dan komisaris? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of directors (commissioners)?	196, 211
C.1.4	Apakah perusahaan mengungkap kepemilikan saham langsung dan tidak langsung *(deemed)* dari manajemen senior? Does the company disclose the direct and indirect (deemed) shareholdings of senior management?	N/A
C.1.5	Apakah perusahaan mengungkap detail tentang perusahaan induk, anak perusahaan, perusahaan asosiasi, *joint ventures*, serta *special purpose enterprises/vehicles* (SPEs/ SPVs)? Does the company disclose details of the parent/holding company, subsidiaries, associates, joint ventures and special purpose enterprises/ vehicles (SPEs)/ (SPVs)?	47, 76
C.2	**Kualitas Laporan Tahunan** **Quality of Annual Report**	
	Apakah laporan tahunan perusahaan mengungkapkan hal-hal berikut: *Does the company's annual report disclose the following items:*	
C.2.1	Tujuan perusahaan Corporate objectives	48
C.2.2	Indikator kinerja keuangan Financial performance indicators	6
C.2.3	Indikator kinerja non-keuangan Non-financial performance indicators	156
C.2.4	Kebijakan dividen Dividend policy	118

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
C.2.5	Data biografi (setidaknya usia, kualifikasi akademik, tanggal pertama kali diangkat, pengalaman yang relevan, dan jabatan direksi di perusahaan tercatat lainnya) dari seluruh direksi/komisaris Biographical details (at least age, academic qualifications, date of first appointment, relevant experience, and any other directorships of listed companies) of directors/ commissioners	64–73
	Pernyataan Konfirmasi Tata Kelola Perusahaan *Corporate Governance Confirmation Statement*	
C.2.6	Apakah Laporan Tahunan memuat pernyataan yang mengonfirmasi kepatuhan penuh perusahaan terhadap kode tata kelola perusahaan, dan jika terdapat ketidakpatuhan, apakah laporan tersebut mengidentifikasi serta menjelaskan alasan untuk setiap ketidaksesuaian tersebut? Does the Annual Report contain a statement confirming the company's full compliance with the code of corporate governance and where there is non- compliance, identify and explain reasons for each such issue?	161
C.3.	**Remunerasi Anggota Dewan dan Eksekutif Utama** **Remuneration of Members of the Board and Key Executives**	
C.3.1	Apakah terdapat pengungkapan mengenai struktur honorarium untuk direksi/komisaris non-eksekutif? Is there disclosure of the fee structure for non-executive directors/commissioners?	210
C.3.2	Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan (melalui laporan tahunan atau dokumen publik lainnya) rincian remunerasi masing-masing direksi/komisaris non-eksekutif? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] details of remuneration of each non-executive director/commissioner?	210
C.3.3	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan atau praktik remunerasi (termasuk honorarium, tunjangan, manfaat dalam bentuk barang, dan emolumen lainnya) bagi direksi eksekutif dan CEO, termasuk penggunaan insentif jangka pendek dan jangka panjang serta ukuran kinerja? Does the company disclose its remuneration (fees, allowances, benefit-in-kind and other emoluments) policy/practices (i.e. the use of short term and long-term incentives and performance measures) for its executive directors and CEO?	210
C.3.4	Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan (melalui laporan tahunan atau dokumen publik lainnya) rincian remunerasi masing-masing direksi eksekutif dan CEO (jika bukan anggota dewan)? Does the company publicly disclose [i.e. annual report or other publicly disclosed documents] the details of remuneration of each of the executive directors and CEO [if he/ she is not a member of the Board]?	210
C.4.	**Pengungkapan Transaksi Afiliasi (RPT) / Transaksi Pihak Berelasi** **Disclosure of related party transactions (RPT)**	
C.4.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan yang mengatur proses peninjauan dan persetujuan untuk transaksi afiliasi / transaksi berelasi yang material? Does the company disclose its policy covering the review and approval of material RPTs?	119, Laporan Keuangan
C.4.2	Apakah perusahaan mengungkapkan nama, hubungan, sifat, dan nilai untuk setiap transaksi afiliasi/ transaksi berelasi yang material? Does the company disclose the name, relationship, nature and value for each material RPTs?	Laporan Keuangan
C.5	**Pengelolaan saham perusahaan oleh direksi dan komisairs** **Directors and commissioners' dealings in shares of the company**	
C.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan perdagangan saham perusahaan yang dilakukan oleh orang dalam? Does the company disclose trading in the company's shares by insiders?	N/A

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
C.6	**Auditor eksternal dan Laporan Auditor** **External auditor and Auditor Report**	
	Jika perusahaan menggunakan firma audit yang sama untuk layanan audit dan non-audit: Where the same audit firm is engaged for both audit and non-audit services	
C.6.1	Apakah biaya audit dan non-audit diungkapkan? Are the audit and non-audit fees disclosed?	85
C.6.2	Apakah biaya non-audit melebihi biaya audit? Does the non-audit fee exceed the audit fees?	85
C.7	**Media komunikasi** **Medium of communications**	
	Apakah perusahaan menggunakan media komunikasi berikut? *Does the company use the following modes of communication?*	
C.7.1	Pelaporan triwulanan Quarterly reporting	255
C.7.2	Situs web perusahaan Company website	47
C.7.3	*Briefing* analis Analyst's briefing	N/A
C.7.4	*Briefing* media/konferensi pers Media briefings /press conferences	229
C.8	**Penyampaian/Penerbitan Laporan Keuangan Tahunan Secara Tepat Waktu** **Timely filing/release of annual/financial reports**	
C.8.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah akhir tahun buku? Are the audited annual financial report / statement released within 120 days from the financial year end?	Website
C.8.2	Apakah laporan tahunan diterbitkan dalam waktu 120 hari setelah akhir tahun buku? Is the annual report released within 120 days from the financial year end?	Website
C.8.3	Apakah direksi/ dewan komisaris dan/atau pejabat terkait perusahaan menegaskan bahwa laporan keuangan tahunan mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan wajar? Is the true and fairness/fair representation of the annual financial statement/reports affirmed by the board of directors/commissioners and/or the relevant officers of the company?	Website
C.9	**Situs web perusahaan** **Company website**	
	Apakah perusahaan memiliki situs web yang mengungkapkan informasi terkini tentang hal-hal berikut: *Does the company have a website disclosing up-to-date information on the following:*	
C.9.1	Laporan/laporan keuangan (triwulan terakhir) Financial statements/reports (latest quarterly)	Website
C.9.2	Materi yang diberikan dalam *briefing* kepada analis dan media Materials provided in briefings to analysts and media	Website
C.9.3	Laporan tahunan yang dapat diunduh Downloadable annual report	Website
C.9.4	Panggilan RUPST dan/atau RUPSLB Notice of AGM and/or EGM	Website
C.9.5	Risalah RUPST dan/atau RUPSLB Minutes of AGM and/or EGM	Website

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
C.9.6	Konstitusi perusahaan (anggaran rumah tangga perusahaan, memorandum dan anggaran dasar) Company's constitution (company's by-laws, memorandum and articles of association)	Website
C.10	**Hubungan investor** **Investor relations**	
C.10.1	Apakah perusahaan mengungkapkan detail kontak (seperti telepon, faks, dan email) dari pejabat/kantor yang bertanggung jawab atas hubungan investor? Does the company disclose the contact details (e.g. telephone, fax, and email) of the officer/office responsible for investor relations?	247
D.	**Tanggung Jawab Dewan** **Responsibilities of the Board**	
	Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris **Board Duties and Responsibilities**	
	Tanggung jawab dewan dan kebijakan tata kelola perusahaan yang didefinisikan dengan jelas *Clearly defined board responsibilities and corporate governance policy*	
D.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan kebijakan tata kelola perusahaan atau piagam dewan? Does the company disclose its corporate governance policy / board charter?	184
D.1.2	Apakah jenis keputusan yang memerlukan persetujuan dewan direksi/komisaris diungkapkan? Are the types of decisions requiring board of directors/commissioners' approval disclosed?	24, 118, 167, 192, 207, 219, 231
D.1.3	Apakah peran dan tanggung jawab dewan direksi/komisaris dinyatakan dengan jelas? Are the roles and responsibilities of the board of directors/commissioners clearly stated?	185, 202
	Visi/Misi Perusahaan **Corporate Vision/Mission**	
D.1.4	Apakah perusahaan memiliki pernyataan visi dan misi yang diperbarui? Does the company have an updated vision and mission statement?	48
D.1.5	Apakah direksi berperan utama dalam proses pengembangan dan peninjauan strategi perusahaan setidaknya setiap tahun? Does the board of directors play a leading role in the process of developing and reviewing the company's strategy at least annually?	32–34
D.1.6	Apakah direksi memiliki proses untuk meninjau, memantau, dan mengawasi implementasi strategi perusahaan? Does the board of directors have a process to review, monitor and oversee the implementation of the corporate strategy?	32–34
D.2	**Struktur Dewan** **Board structure**	
	Kode Etik atau Perilaku **Code of Ethics or Conduct**	
D.2.1	Apakah rincian kode etik atau kode perilaku diungkapkan? Are the details of the code of ethics or conduct disclosed?	233, 251
D.2.2	Apakah semua direksi/komisaris, manajemen senior, dan karyawan diwajibkan untuk mematuhi kode tersebut? Are all directors/commissioners, senior management and employees required to comply with the code/s?	251–252
D.2.3	Apakah perusahaan memiliki proses untuk mengimplementasikan dan memantau kepatuhan terhadap kode etik atau kode perilaku? Does the company have a process to implement and monitor compliance with the code/s of ethics or conduct?	251–252

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
	Struktur & Komposisi Dewan **Board Structure & Composition**	
D.2.4	Apakah struktur direksi/komisaris independen mencapai setidaknya 50% dari direksi/ dewan komisaris? Do independent directors/commissioners make up at least 50% of the board of directors/ commissioners?	64–68, 181, 187
D.2.5	Apakah perusahaan memiliki batas masa jabatan sembilan tahun atau kurang, atau dua periode masing-masing lima tahun* untuk direksi/komisaris independen? *)Batas masa jabatan lima tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011. Does the company have a term limit of nine years or less or 2 terms of five years* each for its independent directors/ commissioners? *) The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011	181, 199
D.2.6	Apakah perusahaan menetapkan batas maksimal lima kursi dewan yang dapat dipegang secara bersamaan oleh seorang direksi/komisaris independen atau non-eksekutif? Has the company set a limit of five board seats that an individual independent/non-executive director/commissioner may hold simultaneously?	181, 199
D.2.7	Apakah perusahaan memiliki direksi eksekutif yang menjabat di lebih dari dua dewan perusahaan tercatat di luar grup? Does the company have any executive directors who serve on more than two boards of listed companies outside of the group?	200
	Komite Nominasi **Nominating Committee**	
D.2.8	Apakah perusahaan memiliki Komite Nominasi? Does the company have a Nominating Committee?	221–226
D.2.9	Apakah Komite Nominasi terdiri dari mayoritas direktur/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprised of a majority of independent directors/ commissioners?	221
D.2.10	Apakah ketua Komite Nominasi adalah direktur/komisaris independen? Is the chairman of the Nominating Committee an independent director/commissioner?	221
D.2.11	Apakah perusahaan mengungkapkan *terms of reference*, struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Nominasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Nominating Committee?	224
D.2.12	Apakah kehadiran rapat Komite Nominasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Nominasi mengadakan setidaknya dua kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Nominating Committee disclosed and if so, did the Nominating Committee meet at least twice during the year?	225
	Komite Remunerasi/Komite Kompensasi **Remuneration Committee / Compensation Committee**	
D.2.13	Apakah perusahaan memiliki Komite Remunerasi? Does the company have a Remuneration Committee?	221–226
D.2.14	Apakah Komite Remunerasi terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direksi/komisaris independen? Is the Remuneration Committee comprised entirely of non-executive directors/ commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	221
D.2.15	Apakah ketua Komite Remunerasi merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman of the Remuneration Committee an independent director/commissioner?	221

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.2.16	Apakah perusahaan mengungkapkan *terms of reference*, struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Remunerasi? Does the company disclose the terms of reference/ governance structure/charter of the Remuneration Committee?	224
D.2.17	Apakah kehadiran rapat Komite Remunerasi diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Remunerasi mengadakan setidaknya dua kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Remuneration Committee disclosed and, if so, did the Remuneration Committee meet at least twice during the year?	225
	Komite Audit **Audit Committee**	
D.2.18	Apakah perusahaan memiliki Komite Audit? Does the company have an Audit Committee?	213–220
D.2.19	Apakah Komite Audit terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris non-eksekutif dengan mayoritas direksi/komisaris independen? Is the Audit Committee comprised entirely of non-executive directors/commissioners with a majority of independent directors/commissioners?	214
D.2.20	Apakah ketua Komite Audit merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman of the Audit Committee an independent director/commissioner?	214
D.2.21	Apakah perusahaan mengungkapkan *terms of reference*, struktur tata kelola, atau piagam dari Komite Audit? Does the company disclose the terms of reference/governance structure/charter of the Audit Committee?	217
D.2.22	Apakah setidaknya satu dari direksi/komisaris independen dalam komite memiliki keahlian akuntansi (kualifikasi atau pengalaman di bidang akuntansi)? Does at least one of the independent directors/commissioners of the committee have accounting expertise (accounting qualification or experience)?	214
D.2.23	Apakah kehadiran rapat Komite Audit diungkapkan, dan jika ya, apakah Komite Audit mengadakan setidaknya empat kali pertemuan dalam setahun? Is the meeting attendance of the Audit Committee disclosed and, if so, did the Audit Committee meet at least four times during the year?	219
D.2.24	Apakah Komite Audit memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan rekomendasi terkait pengangkatan dan pemberhentian auditor eksternal? Does the Audit Committee have primary responsibility for recommendation on the appointment, and removal of the external auditor?	218
D.3	**Proses Dewan** **Board Processes**	
	Rapat Dewan dan Kehadiran **Board meetings and attendance**	
D.3.1	Apakah jadwal rapat direksi ditetapkan sebelum dimulainya tahun fiskal? Are the board of directors meeting scheduled before the start of financial year?	205
D.3.2	Apakah direksi/dewan komisaris mengadakan setidaknya enam kali pertemuan dalam setahun? Does the board of directors/commissioners meet at least six times during the year?	190
D.3.3	Apakah setiap direksi/komisaris menghadiri setidaknya 75% dari seluruh rapat dewan yang diadakan sepanjang tahun? Has each of the directors/commissioners attended at least 75% of all the board meetings held during the year?	190
D.3.4	Apakah perusahaan mensyaratkan kuorum minimum setidaknya 2/3 untuk pengambilan keputusan dewan? Does the company require a minimum quorum of at least 2/3 for board decisions?	189

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.3.5	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris mengadakan pertemuan terpisah setidaknya sekali dalam setahun tanpa kehadiran eksekutif? Did the non-executive directors/commissioners of the company meet separately at least once during the year without any executives present?	189
	Akses terhadap Informasi **Access to information**	
D.3.6	Apakah materi rapat direksi/dewan komisaris disediakan untuk dewan setidaknya lima hari kerja sebelum rapat dewan? Are board papers for board of directors/commissioners' meetings provided to the board at least five business days in advance of the board meeting?	189
D.3.7	Apakah sekretaris perusahaan memiliki peran signifikan dalam mendukung dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya? Does the company secretary play a significant role in supporting the board in discharging its responsibilities?	227
D.3.8	Apakah sekretaris perusahaan memiliki pelatihan di bidang hukum, akuntansi, atau praktik kesekretariatan perusahaan serta terus mengikuti perkembangan yang relevan? Is the company secretary trained in legal, accountancy or company secretarial practices and has kept abreast on relevant developments?	227–228
	Penunjukan dan Pemilihan Kembali Direksi dan Dewan Komisaris **Board Appointments and Re-Election**	
D.3.9	Apakah perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan dalam memilih direksi/komisaris baru? Does the company disclose the criteria used in selecting new directors/commissioners?	183, 188, 200
D.3.10	Apakah perusahaan menjelaskan proses yang diikuti dalam pengangkatan direksi/komisaris baru? Did the company describe the process followed in appointing new directors/commissioners?	184, 201
D.3.11	Apakah semua direksi/komisaris menjalani pemilihan ulang setiap 3 tahun, atau 5 tahun bagi perusahaan tercatat di negara yang peraturannya menetapkan masa jabatan 5* tahun? *)Masa jabatan 5 tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN *Corporate Governance Scorecard* pada tahun 2011. Are all directors/commissioners subject to re-election every 3 years; or 5 years for listed companies in countries whose legislation prescribes a term of 5* years each? *)The five years term must be required by legislation which pre-existed the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	67–73
	Remunerasi **Remuneration Matters**	
D.3.12	Apakah pemegang saham atau dewan direksi menyetujui remunerasi bagi direksi eksekutif dan/atau eksekutif senior? Do the shareholders or the Board of Directors approve the remuneration of the executive directors and/or the senior executives?	166, 176, 194, 209
D.3.13	Apakah perusahaan memiliki standar terukur untuk menyelaraskan remunerasi berbasis kinerja bagi direksi eksekutif dan eksekutif senior dengan kepentingan jangka panjang perusahaan, seperti ketentuan *clawback* dan bonus yang ditangguhkan? Does the company have measurable standards to align the performance-based remuneration of the executive directors and senior executives with long-term interests of the company, such as claw back provision and deferred bonuses?	192, 207
	Audit Internal **Internal Audit**	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.3.14	Apakah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang terpisah? Does the company have a separate internal audit function?	230
D.3.15	Apakah kepala audit internal diidentifikasi, atau jika dialihdayakan, apakah nama firma eksternal diungkapkan? Is the head of internal audit identified or, if outsourced, is the name of the external firm disclosed?	230
D.3.16	Apakah pengangkatan dan pemberhentian auditor internal memerlukan persetujuan dari Komite Audit? Does the appointment and removal of the internal auditor require the approval of the Audit Committee?	218
	Pengawasan Risiko **Risk Oversight**	
D.3.17	Apakah perusahaan menetapkan prosedur pengendalian internal yang kuat/kerangka manajemen risiko dan secara berkala meninjau efektivitas kerangka tersebut? Does the company establish a sound internal control procedures/risk management framework and periodically review the effectiveness of that framework?	237, 239
D.3.18	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tata Kelola Tahunan mengungkap bahwa direksi/dewan komisaris telah melakukan tinjauan terhadap pengendalian material perusahaan (termasuk pengendalian operasional, keuangan, dan kepatuhan) serta sistem manajemen risiko? Does the Annual Report/Annual CG Report disclose that the board of directors/ commissioners has conducted a review of the company's material controls (including operational, financial and compliance controls) and risk management systems?	237, 240, 243
D.3.19	Apakah perusahaan mengungkap risiko utama yang secara material dihadapi oleh perusahaan (misalnya keuangan, operasional termasuk IT, lingkungan, sosial, dan ekonomi)? Does the company disclose the key risks to which the company is materially exposed to (i.e. financial, operational including IT, environmental, social, economic)?	240
D.3.20	Apakah Laporan Tahunan/Laporan Tata Kelola Tahunan memuat pernyataan dari dewan direksi/komisaris atau Komite Audit yang memberikan komentar mengenai kecukupan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan? Does the Annual Report/Annual CG Report contain a statement from the board of directors/ commissioners or Audit Committee commenting on the adequacy of the company's internal controls/risk management systems?	238, 243
D.4	**Anggota Dewan** **People on the Board**	
	Ketua Dewan **Board Chairman**	
D.4.1	Apakah peran ketua dewan dan CEO dijabat oleh orang yang berbeda? Do different persons assume the roles of chairman and CEO?	63, 69
D.4.2	Apakah ketua dewan merupakan direksi/komisaris independen? Is the chairman an independent director/commissioner?	63
D.4.3	Apakah ada anggota dewan yang merupakan mantan CEO perusahaan dalam 2 tahun terakhir? Is any of the directors a former CEO of the company in the past 2 years?	63
D.4.4	Apakah peran dan tanggung jawab ketua dewan diungkapkan? Are the roles and responsibilities of the chairman disclosed?	100
	Direktur Independen Utama **Lead Independent Director**	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.4.5	Jika ketua dewan bukan direksi/komisaris independen, apakah dewan telah menunjuk Direktur Independen Utama/Senior dan apakah perannya telah ditetapkan? If the Chairman is not independent, has the Board appointed a Lead/Senior Independent Director and has his/her role been defined?	69, 202
	Keterampilan dan Kompetensi **Skills and Competencies**	
D.4.6	Apakah setidaknya satu direksi non-eksekutif/komisaris memiliki pengalaman kerja sebelumnya di sektor utama di mana perusahaan beroperasi? Does at least one non-executive director/commissioner have prior working experience in the major sector that the company is operating in?	69–73
D.5	**Kinerja Dewan** **Board Performance**	
	Pengembangan Direksi **Directors Development**	
D.5.1	Apakah perusahaan memiliki program orientasi bagi direksi/komisaris baru? Does the company have orientation programmes for new directors/commissioners?	191, 205
D.5.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan, praktik, dan program yang mendorong direksi/komisaris untuk mengikuti program pendidikan profesional berkelanjutan? Does the company have a policy and actual practice and programs that encourages directors/commissioners to attend on-going or continuous professional education programmes?	191, 206
	Penunjukan dan Kinerja CEO/Manajemen Eksekutif **CEO/Executive Management Appointments and Performance**	
D.5.3	Apakah perusahaan mengungkapkan proses bagaimana direksi/dewan komisaris merencanakan suksesi bagi CEO/Direktur Utama/Presiden dan manajemen kunci? Does the company disclose the process on how the board of directors/commissioners plans for the succession of the CEO/Managing Director/President and key management?	206
D.5.4	Apakah direksi/dewan komisaris melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap CEO/Direktur Utama/Presiden? Does the board of directors/commissioners conduct an annual performance assessment of the CEO/Managing Director/President?	22, 207
	Penilaian Dewan **Board Appraisal**	
D.5.5	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap direksi/dewan komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board of directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	22, 192, 207
	Penilaian Direktur **Director Appraisal**	
D.5.6	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap masing-masing direksi/komisaris dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the individual directors/commissioners and disclose the criteria and process followed for the assessment?	192, 207
	Penilaian Komite **Committee Appraisal**	

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
D.5.7	Apakah perusahaan melakukan penilaian kinerja tahunan terhadap komite dewan dan mengungkapkan kriteria serta proses yang digunakan dalam penilaian tersebut? Did the company conduct an annual performance assessment of the board committees and disclose the criteria and process followed for the assessment?	193
LEVEL 2 BONUS ITEMS **LEVEL 2 BONUS ITEMS**		
(B)A.	**Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham** **Rights and Equitable Treatment of shareholders**	
(B) A.1	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham** **Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting**	
(B) A.1.1	Apakah perusahaan menerapkan pemungutan suara elektronik yang aman dan real-time secara absensi dalam rapat umum pemegang saham? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	167, 170–171
(B)A.2	**Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham** **Equitable treatment of shareholders**	
(B)A.2	**Pemberitahuan RUPS Tahunan** **Notice of AGM**	
(B)A.2.1	Apakah perusahaan mengumumkan pemberitahuan RUPS Tahunan (dengan agenda rinci dan surat edaran penjelasan) sebagaimana diumumkan ke Bursa, setidaknya 28 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat? Does the company practice real time secure electronic voting in absentia at general meetings of shareholders?	172
(B).B.	**Keberlanjutan dan Ketahanan** **Sustainability and Resilience**	
(B).B.1		
(B).B.1.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bagaimana perusahaan mengelola risiko dan peluang terkait perubahan iklim? Does the company disclose how it manages climate-related risks and opportunities?	Sustainability Report
(B).B.1.2	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa Laporan Keberlanjutan atau Pelaporan Keberlanjutannya telah mendapat penjaminan eksternal? Does the company disclose that its Sustainability Report/ Sustainability Reporting is externally assured?	Sustainability Report
(B).B.1.3	Apakah perusahaan mengungkapkan saluran keterlibatan dengan kelompok pemangku kepentingan dan bagaimana perusahaan merespons kekhawatiran pemangku kepentingan terkait ESG? Does the company disclose the engagement channel with stakeholder groups and how the company responds to stakeholders' ESG concerns?	Sustainability Report
(B).B.1.4	Apakah perusahaan memiliki unit, divisi, atau komite yang secara khusus bertanggung jawab dalam mengelola isu keberlanjutan? Does the company have a unit / division / committee who is specifically responsible to manage the sustainability matters?	Sustainability Report
(B).B.1.5	Apakah perusahaan mengungkapkan pengawasan direksi/dewan komisaris terhadap risiko dan peluang yang terkait dengan keberlanjutan? Does the company disclose board of directors/commissioners' oversight of sustainability-related risks and opportunities?	Sustainability Report

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(B).B.1.6	Apakah perusahaan mengungkapkan keterkaitan antara remunerasi direksi eksekutif dan manajemen senior dengan kinerja keberlanjutan pada tahun sebelumnya? Does the company disclose the linkage between executive directors and senior management remuneration and sustainability performance for the previous year?	Sustainability Report
(B).B.1.7	Apakah Sistem *Whistle Blowing* perusahaan dikelola oleh pihak atau institusi independen? Is the company's Whistle Blowing System managed by independent parties / institutions?	280
(B).C.	**Pengungkapan dan transparansi** **Disclosure and transparency**	
(B).C.1	**Kualitas Laporan Tahunan** **Quality of Annual Report**	
(B).C.1.1	Apakah laporan keuangan tahunan yang telah diaudit diterbitkan dalam waktu 60 hari setelah akhir tahun buku? Are the audited annual financial report /statement released within 60 days from the financial year end?	304
(B).D.	**Tanggung Jawab Dewan** **Responsibilities of the Board**	
(B).D.1	**Kompetensi dan Keragaman Dewan** **Board Competencies and Diversity**	
(B).D.1.1	Apakah perusahaan memiliki setidaknya satu direksi/komisaris independen perempuan? Does the company have at least one female independent director/commissioner?	63–73
(B).D.1.2	Apakah perusahaan memiliki kebijakan dan mengungkapkan tujuan terukur untuk menerapkan keberagaman di dewan serta melaporkan kemajuan dalam mencapai tujuan tersebut? Does the company have a policy and disclose measurable objectives for implementing its board diversity and report on progress in achieving its objectives?	197
(B).D.2	**Struktur Dewan** **Board Structure**	
(B).D.2.1	Apakah Komite Nominasi terdiri sepenuhnya dari direksi/komisaris independen? Is the Nominating Committee comprise entirely of independent directors/commissioners?	221
(B).D.2.2	Apakah Komite Nominasi menjalankan proses untuk mengidentifikasi kualitas direksi yang selaras dengan arah strategis perusahaan? Does the Nominating Committee undertake the process of identifying the quality of directors aligned with the company's strategic directions?	224, 226
(B).D.3	**Pengangkatan Dewan dan Seleksi Ulang** **Board Appointments and Re-Election**	
(B).D.3.1	Apakah perusahaan menggunakan perusahaan pencarian profesional atau sumber eksternal lainnya (seperti basis data direksi yang disediakan oleh organisasi direksi atau pemegang saham) dalam mencari kandidat untuk dewan direksi/komisaris? Does the company use professional search firms or other external sources of candidates (such as director databases set up by director or shareholder bodies) when searching for candidates to the board of directors/commissioners?	224, 226
(B).D.4	**Struktur & Komposisi Dewan** **Board Structure & Composition**	
(B).D.4.1	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris independen membentuk lebih dari 50% dari dewan direksi/komisaris untuk perusahaan dengan ketua dewan independen? Do independent non-executive directors/commissioners make up more than 50% of the board of directors/commissioners for a company with independent chairman?	63–73
(B).D.5	**Pengawasan Risiko** **Risk Oversight**	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(B).D.5.1	Apakah perusahaan mengungkapkan bahwa dewan telah mengidentifikasi risiko utama terkait teknologi informasi, termasuk gangguan, keamanan siber, dan pemulihan bencana, untuk memastikan bahwa risiko tersebut dikelola dan terintegrasi dalam kerangka manajemen risiko secara keseluruhan? Does the company disclose that its Board identified key risk in relation to information technology including disruption, cyber security, and disaster recovery, to ensure that such risks are managed and integrated into the overall risk management framework?	240
(B).D.6	**Kinerja Dewan** **Board Performance**	
(B).D.6.1	Apakah perusahaan memiliki Komite Risiko di tingkat dewan yang terpisah? Does the company have a separate board level Risk Committee?	N/A
LEVEL 2 – PENALTY		
(P)A.	**Hak dan Perlakuan yang Setara bagi Pemegang Saham** **Rights and Equitable Treatment of shareholders**	
(P)A.1	**Hak Dasar Pemegang Saham** **Basic shareholder rights**	
(P) A.1.1	Apakah perusahaan gagal atau lalai untuk menawarkan perlakuan yang setara kepada semua pemegang saham dalam pembelian kembali saham? Did the company fail or neglect to offer equal treatment for share repurchases to all shareholders?	N/A
(P)A.2	Pemegang saham, termasuk pemegang saham institusional, harus diizinkan untuk berkonsultasi satu sama lain mengenai isu-isu yang berkaitan dengan hak dasar pemegang saham sebagaimana didefinisikan dalam Prinsip, dengan pengecualian untuk mencegah penyalahgunaan. Shareholders, including institutional shareholders, should be allowed to consult with each other on issues concerning their basic shareholder rights as defined in the Principles, subject to exceptions to prevent abuse.	167
(P)A.2.1	Apakah terdapat bukti adanya hambatan yang mencegah pemegang saham untuk berkomunikasi atau berkonsultasi dengan pemegang saham lainnya? Is there evidence of barriers that prevent shareholders from communicating or consulting with other shareholders?	N/A 172
(P)A.3	**Hak untuk berpartisipasi secara efektif dan memberikan suara dalam rapat umum pemegang saham serta harus diberitahu mengenai aturan, termasuk prosedur pemungutan suara, yang mengatur rapat umum pemegang saham.** **Right to participate effectively in and vote in general shareholders meeting and should be informed of the rules, including voting procedures, that govern general shareholders meeting.**	
(P)A.3.1	Apakah perusahaan menambahkan agenda tambahan yang tidak diumumkan sebelumnya ke dalam pemberitahuan RUPST/RUPSLB? Did the company include any additional and unannounced agenda item into the notice of AGM/EGM?	172
(P)A.3.2	Apakah Ketua Dewan, Ketua semua Komite Dewan, dan Direktur Utama tidak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham terbaru? Was the Chairman of the Board and the Chairmen of all Board Committees and the CEO absent from the most recent General Meeting?	169
(P)A.4	**Struktur permodalan dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kontrol yang tidak sebanding dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan.** **Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.**	

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
	Apakah perusahaan gagal mengungkapkan keberadaan: *Did the company fail to disclose the existence of:*	
(P)A.4.1	Perjanjian Pemegang Saham? Shareholders agreement?	165
(P)A.4.2	Batasan Hak Suara (*Voting cap*)? Voting cap?	165
(P)A.4.3	Hak Suara ganda (*multiple voting rights*)? Multiple voting rights?	165
(P)A.5	**Struktur permodalan dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh tingkat kontrol yang tidak sebanding dengan kepemilikan ekuitasnya harus diungkapkan.** **Capital structures and arrangements that enable certain shareholders to obtain a degree of control disproportionate to their equity ownership should be disclosed.**	
(P)A.5.1	Apakah terdapat struktur kepemilikan piramida dan/atau struktur kepemilikan silang yang terlihat? Is a pyramid ownership structure and/ or cross holding structure apparent?	47
(P)A.6	**Perdagangan orang dalam dan transaksi pribadi yang merugikan harus dilarang.** **Insider trading and abusive self-dealing should be prohibited.**	
(P)A.6.1	Apakah terdapat kasus hukum yang berujung pada vonis terkait perdagangan orang dalam yang melibatkan direksi/komisaris, manajemen, atau karyawan dalam tiga tahun terakhir? Has there been any conviction of insider trading involving directors/commissioners, management and employees in the past three years?	N/A
(P)A.7	**Perlindungan Pemegang Saham Minoritas dari Tindakan Merugikan** **Protecting minority shareholders from abusive action**	
(P)A.7.1	Apakah terdapat kasus ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan, dan regulasi yang berkaitan dengan transaksi afiliasi material dalam tiga tahun terakhir? Has there been any cases of non compliance with the laws, rules and regulations pertaining to material related party transactions in the past three years?	119
(P)A.7.2	Apakah terdapat transaksi afiliasi yang dapat dikategorikan sebagai bantuan keuangan (yaitu tidak dilakukan secara wajar atau *arm's length*) kepada entitas selain anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya? Were there any RPTs that can be classified as financial assistance (i.e not conducted at arm's length) to entities other than wholly-owned subsidiary companies?	119
(P)B.1	**Hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan oleh hukum atau melalui perjanjian bersama harus dihormati**. **The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected.**	
(P)B.1.1	Apakah terdapat pelanggaran terhadap hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, konsumen, kepailitan, perdagangan, persaingan usaha, atau isu lingkungan? Have there been any violations of any laws pertaining to labour/employment/ consumer/ insolvency/ commercial/competition or environmental issues?	246
(P)B.2	**Dalam hal pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses tata kelola perusahaan, mereka harus memiliki akses ke informasi yang relevan, memadai, dan andal secara tepat waktu dan berkala.** **Where stakeholders participate in the corporate governance process, they should have access to relevant, sufficient and reliable information on a timely and regular basis.**	
(P)B.2.1	Apakah perusahaan pernah menerima sanksi dari regulator karena gagal membuat pengumuman dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk peristiwa material? Has the company faced any sanctions by regulators for failure to make announcements within the requisite time period for material events?	246

Kesesuaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan Terhadap ASEAN Corporate Governance Scorecard

Conformity of the Implementation of Corporate Governance Towards the ASEAN Corporate Governance Scorecard

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(P)B.2.2	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan terlibat dalam aktivitas *greenwashing*? Is there any evidence that the company is engaging in greenwashing activities?	Sustainability Report
(P)C.	**Pengungkapan dan Transparansi** **Disclosure and transparency**	
(P)C.1	**Sanksi dari regulator terhadap laporan keuangan** **Sanctions from regulator on financial reports**	
(P)C.1.1	Apakah perusahaan menerima "opini wajar tanpa pengecualian" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "qualified opinion" in its external audit report?	237
(P)C.1.2	Apakah perusahaan menerima "pendapat merugikan" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive an "adverse opinion" in its external audit report?	N/A
(P)C.1.3	Apakah perusahaan menerima "*disclaimer opinion*" dalam laporan audit eksternalnya? Did the company receive a "disclaimer opinion" in its external audit report?	N/A
(P)C.1.4	Apakah perusahaan dalam setahun terakhir merevisi laporan keuangannya karena alasan selain perubahan kebijakan akuntansi? Has the company in the past year revised its financial statements for reasons other than changes in accounting policies?	N/A
(P)D.	**Tanggung Jawab Dewan** **Responsibilities of the Board**	
(P)D.1	**Kepatuhan terhadap Peraturan Pencatatan, Regulasi, dan Hukum yang Berlaku** **Compliance with listing rules, regulations and applicable laws**	
(P)D.1.1	Apakah terdapat bukti bahwa perusahaan tidak mematuhi peraturan pencatatan dan regulasi selain peraturan pengungkapan dalam setahun terakhir? Is there any evidence that the company has not complied with any listing rules and regulations apart from disclosure rules over the past year?	N/A
(P)D.1.2	Apakah terdapat kasus di mana direksi non-eksekutif/komisaris mengundurkan diri dan mengangkat isu terkait tata kelola perusahaan? Have there been any instances where non-executive directors/commissioner have resigned and raised any issues of governance-related concerns?	N/A
(P)D.2	**Struktur Dewan** **Board structure**	
(P)E.2.1	Apakah perusahaan memiliki direksi/komisaris independen yang telah menjabat lebih dari sembilan tahun atau dua periode masing-masing lima tahun* dalam kapasitas yang sama? *) Masa jabatan lima tahun harus merupakan ketentuan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum diperkenalkannya ASEAN Corporate Governance Scorecard pada tahun 2011. Does the Company have any independent directors/commissioners who have served for more than nine years or two terms of five years* each (whichever is higher) in the same capacity? *)The five years term must be required by legislation which pre-existed before the introduction of the ASEAN Corporate Governance Scorecard in 2011.	63–73
(P)D.2.2	Apakah perusahaan gagal mengidentifikasi secara tepat status semua direksi mereka sebagai independen, non-eksekutif, dan eksekutif? Did the company fail to correctly identify the description of all their directors as independent, non-executive, and executive?	199
(P)D.2.3	Apakah perusahaan memiliki direksi/komisaris independen atau non-eksekutif yang menjabat di lebih dari lima dewan perusahaan publik? Does the company have any independent directors/non- executive/commissioners who serve on a total of more than five boards of publicly-listed companies?	183, 200

LEVEL	PRINSIP DAN REKOMENDASI PRINCIPLES AND RECOMMENDATIONS	PENYAJIAN PRESENTATION
(P)D.3	**Audit Eksternal** **External Audit**	
(P)D.3.1	Apakah ada direksi atau manajemen senior yang merupakan mantan karyawan atau mitra dari auditor eksternal saat ini dalam dua tahun terakhir? Is any of the directors or senior management a former employee or partner of the current external auditor (in the past 2 years)?	N/A
(P)D.4	**Struktur dan Komposisi Dewan** **Board structure and composition**	
(P)D.4.1	Apakah ketua dewan pernah menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan dalam tiga tahun terakhir? Has the chairman been the company CEO in the last three years?	64
(P)D.4.2	Apakah direksi non-eksekutif/komisaris menerima opsi saham, saham kinerja, atau bonus? Do non-executive directors/commissioners receive options, performance shares or bonuses?	N/A

DAFTAR INDEKS SEOJK16/2021

SEOJK Index List 16/2021

KETERANGAN DESCRIPTION		HALAMAN PAGE
Ikhtisar Data Keuangan Penting **Key Financial Highlights**		
Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: The summary of important financial data contained financial information presented in the form of a comparison for 3 (three) financial years or since starting its business if the Issuer or Public Company had been running its business activities for less than 3 (three) years.		
1.	Pendapatan/penjualan Revenue/sales	8
2.	Laba bruto Gross profit	8
3.	Laba (rugi) Profit (loss)	8
4.	Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali Total profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests	8
5.	Total laba (rugi) komprehensif Total comprehensive profit (loss)	8
6.	Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests	8
7.	Laba (rugi) per saham Earnings (loss) per share	8
8.	Jumlah aset Total assets	8
9.	Jumlah liabilitas Total liabilities	8
10.	Jumlah ekuitas Total equity	8
11.	Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset Ratio of profit (loss) to total assets	9
12.	Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas Ratio of profit (loss) to equity	9
13.	Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan Ratio of profit (loss) to income/sales	9
14.	Rasio lancar Current ratio	9
15.	Rasio liabilitas terhadap ekuitas Ratio of liabilities to equity	9
16.	Rasio liabilitas terhadap jumlah aset Ratio of liabilities to total assets	9

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
17.	Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya Information and other financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry	9
	Informasi Saham **Stock Highlights**	
	Informasi saham bagi Perusahaan Terbuka paling sedikit memuat: Share information for a Public Company should at least contain:	
1.	Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jumlah saham yang beredar; b) kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; c) harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan d) volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek. Shares issued for each quarterly period were presented in the form of a comparison for the last 2 (two) financial years, at least containing: a) Number of outstanding shares; b) Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares were listed; c) The highest, lowest and closing share prices were based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and d) Trading volume on the stock exchange where the shares are listed. Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on the stock exchange.	10
2.	Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal, saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan, pengurangan modal, informasi saham sebagaimana, dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: a) tanggal pelaksanaan aksi korporasi; b) rasio pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; c) jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; d) jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan e) harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi. In the event of a corporate action causing changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) should be added with at least an explanation regarding: a) The date of implementation of the corporate action; b) The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares; c) Number of outstanding shares before and after the corporate action; d) Number of conversion effects executed (if any); and e) Share prices before and after corporate actions.	12

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3.	Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the financial year, the should be explained.	12
4.	Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (*delisting*) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau pembatalan pencatatan saham (*delisting*) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process was still ongoing until the end of the Annual Report period, it explained the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/ or cancellation of the share listing (delisting).	12
	Laporan Dewan Komisaris **Board of Commissioners Report**	
	Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report should at least contain a brief description of:	
1.	Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik yang dilakukan oleh Direksi; Assessment of the performance of the Board of Directors regarding the management of Issuers or Public Companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for Issuers or Public Companies carried out by the Board of Directors;	22
2.	Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi; dan Views on the business prospects of the Issuer or Public Company prepared by the Board of Directors; and	25
3.	Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Views on the implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	26
	Laporan Direksi **Board of Directors Report**	
	Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report should at least contain a brief description of:	
1.	Kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; b) peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik; c) proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik; d) perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Emiten atau Perusahaan Publik; dan e) kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik. Performance of Issuers or Public Companies, at least containing: a) Issuer's or Public Company's strategy and strategic policies; b) The role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of Issuers or Public Companies; c) The process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the Issuer's or Public Company's strategy; d) Comparison between the results achieved with those targeted by the Issuer or Public Company; and e) Constraints faced by Issuers or Public Companies;	35
2.	Gambaran tentang prospek usaha emiten atau Perusahaan Publik. Overview of the business prospects of the issuer or Public Company.	40

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3.	Penerapan Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik. Implementation of the governance of the Issuer or Public Company.	37
4.	Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memuat hal-hal sebagai berikut: a. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri; b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan; c. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; d. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perusahaan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham (UUPT). Signatures of members of the Board of Directors and Board of Commissioners It described: a) The signature is poured on a separate sheet; b) A statement that the Board of Commissioners and Board of Directors are fully responsible for the correctness of the contents of the annual report; c) Signed by all members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors stating their names and positions; and d) A written explanation in a separate letter from the person concerned in the event that there is a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors who does not sign the annual report, or a written explanation in a separate letter from another member in the event that there is no written explanation from the person concerned. The annual report shall be signed by all members of the Board of Directors and all members of the Board of Commissioners serving during the relevant financial year and shall be made available at the company's office from the date of the GMS invitation for inspection by shareholders (Company Law).	42–43
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik **Profile of Issuer or Public Company**	
	Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the Issuer or Public Company shall at least contain the following information:	
1.	Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku. Name of the Issuer or Public Company, including any change of name, the reason for the change, and the effective date of the name change during the financial year.	46
2.	Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi: a) alamat; b) nomor telepon; c) alamat surat elektronik; dan d) alamat situs web. Access to Issuers or Public Companies including branch offices or representative offices that allowed the public to obtain information about Issuers or Public Companies, including: a) Address; b) Telephone number; c) Electronic mail address; and d) Website address.	47

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3.	Riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik; Mencakup antara lain: riwayat singkat, tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan serta alasan perubahannya. Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan. Brief history of the Issuer or Public Company; It included: date/year of establishment, name, change of company name (if any), and effective date of change of company name. Note: if the company had never changed its name, it should be disclosed.	54–55
4.	Visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik serta budaya perusahaan atau nilai-nilai perusahaan; Vision and mission of Issuer or Public Company and its corporate culture or values;	
	Visi dan Penjelasan Visi. Vision and explanation of the Vision.	48
	Misi dan Penjelasan Misi. Mission and explanation of the Mission.	48
	Budaya Perusahaan. Corporate Culture.	49
5.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Business activities according to the latest article of association, business activities conducted within the financial year, and type of goods and/or services.	56
6.	Wilayah operasional Emiten atau Perusahaan Publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of Issuer or Public Company; operational area is an area or region for carrying out operational activities or the range of operational activities.	58–59
7.	Struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan. The organizational structure of the Issuer or Public Company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions.	60–61
8.	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan. List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance.	62
9.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; 2) dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 3) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan 4) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik.	64–68

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	g) hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; h) pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan i) perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Profile of the Board of Commissioners, at least contained: a) Name and position; b) Recent photos; c) Age; d) Citizenship; e) Educational history and/or certification; f) Position history, including information on: 1) Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners; 2) The legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who was an independent commissioner of the Issuer or Public Company concerned; 3) Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Commissioners did not have concurrent positions, then this should be disclosed; 4) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers, either directly or indirectly, to individual owners, including names of affiliated parties; In the event that a member of the Board of Commissioners had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; h) Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner had served more than 2 (two) terms; and i) Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter should be disclosed.	
10.	Profil Direksi, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; b) foto terbaru; c) usia; d) kewarganegaraan; e) riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; f) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. g) hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka Emiten atau Perusahaan Publik mengungkapkan hal tersebut; dan h) perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut.	70–73

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
10.	Profile of the Board of Directors, at least contained: a) Name and position in accordance with the duties and responsibilities; b) Recent photos; c) Age; d) Citizenship; e) Educational history and/or certification; f) Position history, including information on: 1) The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the Issuer or Public Company concerned; 2) Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the Issuer or Public Company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this was disclosed; and 3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; g) Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors had no affiliation, the Issuer or Public Company should disclose this matter; and h) Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there was no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter should be disclosed.	
11.	Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya. In the event there is a change in the composition of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners occurring after the financial year-end until the deadline for submission of the Annual Report, the composition presented in the Annual Report shall reflect both the latest and the previous composition of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.	63, 69
12.	Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the financial year; Disclosure of information could be presented in tabular form.	74–75
13.	Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: a) pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik; b) anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan c) kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik; Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. Name of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the financial year consisted of information regarding: a) Shareholders owning 5% (five percent) or more shares of the Issuer or Public Company; b) Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners owning shares of Issuers or Public Companies. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not own shares, then this matter should be disclosed; c) Community shareholder group, namely the group of shareholders who each owned less than 5% (five percent) of the shares of the Issuer or Public Company; The above information could be presented in tabular form.	76–77

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
14.	Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham Emiten atau Perusahaan Publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Percentage of indirect ownership of shares of Issuers or Public Companies by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the financial year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners; In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners did not have indirect ownership of the shares of the Issuer or Public Company, this matter should be disclosed.	76–79
15.	Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: a) kepemilikan institusi lokal; b) kepemilikan institusi asing; c) kepemilikan individu lokal; dan d) kepemilikan individu asing. Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the financial year based on classification: a) ownership of local institutions; b) ownership of foreign institutions; c) local individual ownership; and d) foreign individual ownership;	76–79
16.	Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan. Information regarding the main and controlling shareholders of the Issuer or Public Company, either directly or indirectly, to the individual owners presented in the form of a scheme or chart;	76–79
17.	Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. The name of the subsidiary, associated company, joint venture company where the Issuer or Public Company had joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company. For a subsidiary, information about the address of the subsidiary was added.	80–82
18.	Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (*stock split*), penggabungan saham (*reverse stock*), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada). Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the financial year as well as the name of the stock exchange where the shares of the Issuer or Public Company were listed, including stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	83

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
19.	Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada). Information on other listed securities in addition to the securities referred to in item 18), which have not matured during the financial year, shall at least include the name of the security, year of issuance, interest rate/yield, maturity date, offering value, and credit rating (if any).	84
20.	Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/ asosiasi/aliansinya meliputi: a) nama dan alamat; b) periode penugasan; c) informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; d) biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan e) dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan f) Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the use of public accounting services (AP) and public accounting firms (KAP) and their networks/associations/ allies included: a) name and address; b) assignment period; c) information on audit and/or non-audit services provided; d) audit and/or non-audit fees for each assignment given during the financial year; and e) in the event that AP and KAP and their networks/ associations/allies, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed. f) disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/ allies could be presented in tabular form.	85
21.	Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP. Name and address of capital market supporting institutions and/or professions other than AP and KAP.	85
	Analisis dan Pembahasan Manajemen **Management Discussion and Analysis**	
	Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management discussion and analysis includes analysis and discussion of financial reports and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the financial year, which at least contains:	
1.	Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai: a) produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; b) pendapatan/penjualan; dan c) profitabilitas. Operational review per business segment according to the type of industry of the Issuer or Public Company, at least regarding: a) production, which includes the process, capacity, and development; b) revenue/sales; and c) profitability	102–103
2	Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: a) aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; b) liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; c) ekuitas; d) pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan e) arus kas.	104–114

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2.	Comprehensive financial performance, including a comparison of financial performance over the last 2 (two) financial years, an explanation of the causes of changes and their impacts, shall at least cover: a) current assets, non-current assets, and total assets; b) short-term liabilities, long-term liabilities and total liabilities; c) equity; d) income/ sales, beban, profit (loss), other comprehensive income, and Total comprehensive profit (loss); and e) cash flow;	
3.	Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. The ability to meet debt or other obligations by presenting relevant ratio calculations.	114–115
4.	Tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan. The collectability level of receivables of the Issuer or Public Company by presenting relevant ratio calculations.	115
5.	Struktur modal (*capital structure*) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (*capital structure*) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud. Capital structure and management policy over such capital structure, including the basis for determining the policy.	116
6.	Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: a) tujuan dari ikatan tersebut; b) sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; c) mata uang yang menjadi denominasi; dan d) langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait. Discussion of material commitments for capital expenditure investments, at a minimum including: a) the purpose of the bond; b) the expected source of funds to fulfill these commitments; c) currency to be denominated; and d) measures planned by the Issuer or Public Company to protect the risk from the related foreign currency position.	117
7.	Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: a) jenis investasi barang modal; b) tujuan investasi barang modal; dan c) nilai investasi barang modal yang dikeluarkan. Discussion on investment in capital goods realized in the last financial year, at least containing: a) the purpose of the bond; b) the purpose of investment in capital goods; and c) the investment value of capital goods issued	117
8.	Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada). Material information and facts occurring after the date of the accountant's report (if any).	118
9.	Prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya. The business prospects of the Issuer or Public Company are related to industrial conditions, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources.	

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
10.	Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (*capital structure*); atau d) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik Comparison between targets/projections at the beginning of the year book with the results achieved (realization), regarding: a) revenue/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	120
11.	Target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: a) pendapatan/penjualan; b) laba (rugi); c) struktur modal (*capital structure*); d) kebijakan dividen; atau e) hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik. Targets/projections to be achieved by the Issuer or Public Company for the next 1 (one) year, about: a) revenue/sales; b) profit (loss); c) capital structure; d) dividend Policy; or e) other matters deemed important to the Issuer or Public Company.	120
12.	Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar. The marketing aspect of the goods and/or services of the Issuer or Public Company, at least regarding the marketing strategy and market share.	100
13.	Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: a) kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; b) tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; c) jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan d) jumlah dividen per tahun yang dibayar. Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Description of dividends for 2 (two) financial years last, at least: a) Dividend policy contained information of the percentage of total dividends distributed to net income; b) Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends; c) Total dividends per share (cash and/or non-cash); d) the amount of dividends per year paid. Disclosure of information may be presented in tabular form. In the event that the Issuer or Public Company did not distribute dividends in the last two (2) years, such fact shall be disclosed.	118–120
	Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: a) dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan b) dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut.	119

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
14.	Realization of the use of proceeds from public offerings, provided that: a) if during the financial year the Issuer is required to submit a report on the realization of use of proceeds, the cumulative realization of use of proceeds up to the end of the financial year shall be disclosed; and b) if there are changes in the use of proceeds as regulated under the Financial Services Authority Regulation concerning reports on the realization of use of proceeds from public offerings, the Issuer shall explain such changes.	
15	Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: a) tanggal, nilai, dan objek transaksi; b) nama pihak yang melakukan transaksi; c) sifat hubungan afiliasi (jika ada); d) penjelasan mengenai kewajaran transaksi; e) pemenuhan ketentuan terkait; dan f) dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), Emiten atau Perusahaan Publik juga mengungkapkan informasi: • pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); dan • peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (*arms-length principle*); g) untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. h) untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; i) dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Material information (if any), including but not limited to investment, expansion, divestment, merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions occurring during the financial year, shall at least include: a) transaction date, value, and object; b) name of the party conducting the transaction; c) the nature of the affiliation relationship (if any); d) explanation regarding the fairness of the transaction; e) compliance with the relevant provisions; f) in the event that there was an affiliation relationship, in addition to disclosing the information as referred to in number a) to number e), the Issuer or Public Company also disclosed information: • Statement of the Board of Directors that affiliated transactions had gone through adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, by complying with the arms-length principle; and • The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions were carried out in accordance with generally accepted business practices, among others, is carried out by complying with the arms-length principle;	119

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
15.	g) for affiliated transactions or material transactions which became business activities carried out in order to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation was added that the affiliated transactions or material transactions were business activities carried out in order to generate operating income and run regularly, repeatedly, and/or continuously; In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements was added. h) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added; i) in the event that there was no affiliated transaction and/ or conflict of interest transaction, this matter should be disclosed.	
16.	Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in laws and regulations that have a significant impact on the Issuer or Public Company and their impact on the financial statements (if any); and	121
17.	Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, Reasons for changes in accounting policies (if any).	121
	Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik **The Governance of the Issuer or Public Company**	
	Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: Governance of the Issuer or Public Company shall at least include a brief description of:	
1.	RUPS, paling sedikit memuat: a) Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: 1) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan 2) keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan. b) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. RUPS, at least contained: a) information regarding the resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year included: 1) resolutions of the GMS in the financial year and 1 (one) year before the financial year are realized in the financial year; and 2) resolutions of the GMS for the financial year and 1 (one) year before the financial year that have not been realized and the reasons for not realizing them; b) in the event that the Issuer or Public Company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed.	165–177

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
2. Direksi, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. b) pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: 1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan 2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); e) penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan f) dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. The Board of Directors, at least contained: a) duties and responsibilities of each member of the Board of Directors information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form. b) a statement that the Board of Directors had guidelines or charter for the Board of Directors; c) policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS; information on the level of attendance of members of the Board of Directors at the meeting of the Board of Directors, the meeting of the Board of Directors with the Board of Commissioners, or the GMS can be presented in tabular form. d) training and/or competency improvement of members of the Board of Directors: 1) policy on training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and 2) training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the financial year (if any); e) the Board of Directors' assessment of the performance of the committees supporting the implementation of the Board of Directors' duties for the financial year shall at least contain: 1) performance appraisal procedures; and 2) the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and f) in the event that the Issuer or Public Company did not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, then this should be disclosed.	199–212

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3. Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; b) pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (*charter*) Dewan Komisaris; c) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: 1) kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan 2) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada). e) penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: 1) prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan 3) pihak yang melakukan penilaian; dan f) penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: 1) prosedur penilaian kinerja; dan 2) kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat. The Board of Commissioners, at least contained: a) duties and responsibilities of the Board of Commissioners; b) a statement that the Board of Commissioners had guidelines or charter for the Board of Commissioners; c) policy and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings, including attendance at the GMS; d) information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form. 1) training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners: 2) policies on training and/or improving the competence of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and e) performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing: 1) performance appraisal implementation procedures; 2) the criteria used were performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings; and 3) the party conducting the assessment; and f) The assessment of the Board of Commissioners on the performance of the Committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the financial year includes: 1) performance appraisal procedures; and 2) the criteria used are performance achievements during the financial year, competence and attendance at meetings;	181–198

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
4.	Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan b) prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: 1) prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; 2) struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan 3) besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least it contained: a) the nomination procedure, including a brief description of the nomination policies and processes for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and b) Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including: 1) procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners; 2) the remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and 3) the amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners;	194–195, 209–210
5.	Dewan pengawas syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: a) nama; b) dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; c) periode penugasan dewan pengawas syariah; d) tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan e) frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik. The Sharia Supervisory Board, for Issuers or Public Companies conducting business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, which shall at least include: a) name; b) legal basis for the appointment of the Sharia Supervisory Board; c) term of office of the Sharia Supervisory Board; d) duties and responsibilities of the Sharia Supervisory Board; and e) frequency and manner of providing advice and supervision over compliance with sharia principles in the capital market by the Issuer or Public Company.	n.a
6.	Komite audit, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite audit; g) pernyataan independensi komite audit; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan j) pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (*charter*) komite audit.	213–220

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Audit committee, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) age; c) nationality; d) educational history; 1) legal basis for appointment as committee member; 2) concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and 3) Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; e) period and term of office of audit committee members; f) Statement of independence of the audit committee; g) training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any); h) policy and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members at the meeting; and i) implementation of the audit committee's activities for the financial year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;	
7.	Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*); k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan m) dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, Emiten atau Perusahaan Publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: 1) alasan tidak dibentuknya komite; dan 2) pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi. Committee or function of nomination and remuneration Issuers or Public Companies, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) age; c) nationality; d) educational history; e) position history, including information on: 1) legal basis for appointment as committee member; 2) concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and 3) Work experience and period of time both inside and outside the Issuer or Public Company; f) the period and term of office of the committee members; g) committee independence statement; h) training and/or competency improvement that have been followed in the financial year (if any); i) description of duties and responsibilities; j) a statement of having a guideline or charter (charter); k) policy and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting; l) brief description of the implementation of activities in the financial year; and	221–226

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	m) in the event that no nomination and remuneration committee is formed, the Issuer or Public company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose: 1) reasons for not forming the committee; and 2) the party carrying out the nomination and remuneration function;	
8.	Komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: a) nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; b) usia; c) kewarganegaraan; d) riwayat pendidikan; e) riwayat jabatan, meliputi informasi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; 2) rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan 3) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; f) periode dan masa jabatan anggota komite; g) pernyataan independensi komite; h) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan i) uraian tugas dan tanggung jawab; j) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) komite; k) kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan l) uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku. Other committees owned by the Issuer or Public Company in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that supported the functions and duties of the Board of Commissioners, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) age; c) nationality; d) educational history; e) position history, including information on: 1) legal basis for appointment as committee member; 2) Concurrent positions, either as a member of the board of commissioners, member of the board of directors, and/or committee member and other positions (if any); and 3) work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; f) the period and term of office of the committee members; g) committee independence statement; h) training and/or competency improvement followed in the financial year (if any); and i) description of duties and responsibilities; j) a statement that the committee has had guidelines or charters; k) Policy and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and l) Brief description of the committee's activities for the financial year;	n.a
9.	Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: a) nama; b) domisili; c) riwayat jabatan, meliputi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik; d) riwayat pendidikan; e) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan f) uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	227–229

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Company secretary, at least it contained: a) name and position in committee membership; b) domicile; c) position history, including: 1) legal basis for appointment as company secretary; and 2) work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; d) educational history; e) training and/or competency improvement that was followed in the financial year; and f) a brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the financial year;	
10.	Unit audit internal, paling sedikit memuat: a) nama kepala unit audit internal; b) riwayat jabatan, meliputi: 1) dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan 2) pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik. c) kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); d) pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; e) struktur dan kedudukan unit audit internal; f) uraian tugas dan tanggung jawab; g) pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (*charter*) unit audit internal; dan h) uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit. Internal Audit, at least it contained: a) name of the head of the internal audit; b) position history, including: 1) legal basis for appointment as head of internal audit; and 2) work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company; c) qualification or certification as an internal audit profession (if any); d) training and/or competency improvement that was followed in the financial year; e) the structure and position of the internal audit; f) description of duties and responsibilities; g) a statement that the internal audit unit had a guideline or charter; and h) a brief description of the implementation of the internal audit's duties for the financial year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the board of directors, board of commissioners, and/ or audit committee;	230–235
11.	Uraian mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; b) tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan c) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal. A description of the internal control system implemented by the issuer or public company, at least it contained: a) financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations; b) review of the effectiveness of the internal control system; and c) statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	237–238
12.	Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; b) jenis risiko dan cara pengelolaannya; c) tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik; dan d) pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko.	239–245

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	The risk management system implemented by the Issuer or Public Company, at least it contained: a) general description of the risk management system of the Issuer or Public Company; b) types of risks and how to manage them; c) overview of the effectiveness of the risk management system Issuer or Public Company; and d) statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	
13.	Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: a) pokok perkara/gugatan; b) status penyelesaian perkara/gugatan; dan c) pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau Perusahaan Publik. Legal cases that have a material impact faced by the issuer or public company, subsidiaries, members of the board of directors and members of the board of commissioners (if any), at least it contained: a) Principal case/lawsuit; b) Status of settlement of cases/claims; and c) The effect on the condition of the issuer or public company;	246
14.	Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada). Information on administrative sanctions/ sanctions imposed on issuers or public companies, members of the board of commissioners and members of the board of directors, by the financial services authority and other authorities in the financial year (if any)	246
15.	Informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi: a) pokok-pokok kode etik; b) bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan c) pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Information regarding the code of conduct of the Issuer or Public Company: a) the points of the code of ethics; b) form of code of conduct dissemination and enforcement efforts; and c) statement that the code of conduct applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Issuer or Public Company.	251–252
16.	Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP); Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (*management stock ownership program*/MSOP) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (*employee stock ownership program*/ESOP), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: a) jumlah saham dan/atau opsi; b) jangka waktu pelaksanaan; c) persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan d) harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan. A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (MSOP) and/or stock ownership program by employees (employee Stock ownership program/ESOP); In the case of providing compensation in the form of a management stock ownership program (MSOP) and/or an employee stock ownership program (ESOP), Information disclosed should, at least contain: a) Number of shares and/or options; b) Implementation period; c) Requirements for eligible employees and/or management; and d) Execution price or determination of exercise price.	256

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
17.	Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: a) kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Terbuka; dan b) pelaksanaan atas kebijakan dimaksud. Brief description of Information disclosure policy : a) Share ownership of members of the board of directors and members of the board of commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and b) Implementation of the policy;	256
18.	Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran di Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) cara penyampaian laporan pelanggaran; b) perlindungan bagi pelapor; c) penanganan pengaduan; d) pihak yang mengelola pengaduan; dan e) hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: 1) jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan 2) tindak lanjut pengaduan. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Description of the whistleblowing system at the Issuer or Public Company, at least contain: How to submit a violation report; a) Protection for whistleblowers; b) Handling of complaints; c) The party managing the complaint; and d) The results of the handling of complaints, at least: e) Number of complaints received and processed in the financial year; and 1) Follow-up on complaints; 2) In the event that the issuer or public company did not have a whistleblowing system, then this should be disclosed. If the Issuer or Public Company does not have a whistleblowing system, such condition shall be disclosed.	256–258
19.	Uraian mengenai kebijakan anti korupsi Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), *fraud*, suap dan/atau gratifikasi dalam Emiten atau Perusahaan Publik; dan b) pelatihan/sosialisasi anti korupsi kepada karyawan Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki kebijakan anti korupsi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. Description of the Issuer's or Public Company's anti-corruption policy, at least contain: a) Programs and procedures implemented in overcoming the practice of corruption, kickbacks, fraud, bribery and/ or gratuities in Issuers or Public Companies; and b) Anti-corruption training/socialization for employees of Issuers or Public Companies; In the event that the Issuer or Public Company did not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy should be explained.	254

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
20.	Penerapan atas pedoman tata kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi: a) pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau b) penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada) Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Implementation of Public Company governance guidelines for Issuers issuing equity securities or Public Companies, including: a) Statement of recommendations that had been implemented; and/or b) Explanation of recommendations that had not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any). disclosure of information can be presented in tabular form.	161–163
	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik **Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company**	
1.	Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, paling sedikit memuat: a) penjelasan strategi keberlanjutan; b) ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup); c) profil singkat Emiten atau Perusahaan Publik; d) penjelasan Direksi; e) tata kelola keberlanjutan; f) kinerja keberlanjutan; g) verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada; h) lembar umpan balik (*feedback*) untuk pembaca, jika ada; dan i) tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya. Information disclosed in the social and environmental responsibility section constitutes the Sustainability Report as referred to in Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, which shall at least include: a) explanation of sustainability strategy; b) overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental); c) brief profile of the Issuer or Public Company; d) statement from the Board of Directors; e) sustainability governance; f) sustainability performance; g) written verification from an independent party, if any; h) feedback sheet for readers, if any; and i) response of the Issuer or Public Company to feedback from the previous year's report.	Rincian mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini. Details of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs are presented in the Sustainability Report, which is published separately but remains an integral part of this Annual Report.
2.	Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. The Sustainability Report as referred to in item 1) must be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	

KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
3. Informasi Laporan Keberlanjutan pada angka 1) dapat: a) diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait Laporan Keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait Laporan Direksi; dan/atau b) merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini, seperti profil Emiten atau Perusahaan Publik; The Sustainability Report information referred to in item 1) may: a) be disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the Board of Directors' explanation related to the Sustainability Report disclosed in the relevant section of the Board of Directors' Report; and/or b) refer to other sections outside the social and environmental responsibility section while still referring to the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter, such as the profile of the Issuer or Public Company.	Rincian mengenai program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perseroan disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang diterbitkan secara terpisah namun tetap menjadi satu kesatuan dengan Laporan Tahunan ini. Details of the Company's Social and Environmental Responsibility (TJSL) programs are presented in the Sustainability Report, which is published separately but remains an integral part of this Annual Report.
4. Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan Laporan. The Sustainability Report as referred to in item 1) constitutes an integral part of the Annual Report but may be presented separately from the Annual Report.	
5. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan dimaksud harus: a) memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan b) disusun sesuai Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan Bagi Emiten dan Perusahaan Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; If the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the information disclosed in such Sustainability Report must: a) contain all information as referred to in item 1); and b) be prepared in accordance with the Technical Guidelines for the Preparation of Sustainability Reports for Issuers and Public Companies as set out in Appendix II, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	
6. Dalam hal Laporan Keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari Laporan Tahunan. If the Sustainability Report is presented separately from the Annual Report, the social and environmental responsibility section shall state that the information on social and environmental responsibility has been disclosed in a Sustainability Report presented separately from the Annual Report.	
7. Penyampaian Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) yang disajikan secara terpisah dengan Laporan Tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan. Submission of the Sustainability Report presented separately from the Annual Report must be made simultaneously with the submission of the Annual Report.	

	KETERANGAN DESCRIPTION	HALAMAN PAGE
	Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit **Audited Annual Financial Statements**	
1.	Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal Emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial statements presented in the Annual Report are prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and have been audited by a public accountant registered with the Financial Services Authority (OJK). The financial statements include a statement of responsibility for the financial statements as stipulated in the Financial Services Authority Regulation concerning the responsibility of the Board of Directors for financial statements, or in the prevailing laws and regulations in the capital market sector governing periodic reports of securities companies, in the event that the Issuer is a securities company.	304
	Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan **Statement Letter of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners on Responsibility for the Annual Report**	
1.	Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. The statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibility for the Annual Report shall be prepared in accordance with the format set out in Appendix I, which forms an integral part of this Financial Services Authority Circular Letter.	42–43

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT SOLUSI TUNAS PRATAMA TBK DAN ANAK PERUSAHAAN

Consolidated Financial Statements
PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA

Laporan Keuangan Konsolidasian
Dengan Laporan Auditor Independen
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal Tersebut
(Mata Uang Rupiah Indonesia)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES

Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
As of December 31, 2025 and
For The Year
Then Ended
(Indonesian Rupiah Currency)

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
DENGAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
(MATA UANG RUPIAH INDONESIA)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
WITH INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR
THEN ENDED
(INDONESIAN RUPIAH CURRENCY)

Daftar Isi / ***Table of Contents***

	Halaman/ *Page*	
Surat Pernyataan Direksi		*Board of Directors' Statement Letter*
Laporan Auditor Independen		*Independent Auditors' Report*
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	*Consolidated Statement of Financial Position*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	*Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	*Consolidated Statement of Changes in Equity*
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5 - 6	*Consolidated Statement of Cash Flows*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	7 - 110	*Notes to the Consolidated Financial Statements*

****

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Juliawati Gunawan Halim
   Alamat Kantor : Menara BCA Lantai 49, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Alamat Domisili : Perum Citra 3 Blok E-5/3A Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat
   Nomor Telepon : (021) 23585555
   Jabatan : Direktur Utama

2. Nama : Hartono Tanuwidjaja
   Alamat Kantor : Menara BCA Lantai 49, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Alamat Domisili : Jl. Sugih Waras Duri Utara, Tambora Jakarta Barat
   Nomor Telepon : (021) 23585555
   Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya;

2. Laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;

3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;

***BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
AS OF DECEMBER 31, 2025 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED***

We, the undersigned:

1. *Name : Juliawati Gunawan Halim*
   Office address : Menara BCA Lantai 49, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Residential address : Perum Citra 3 Blok E-5/3A Pegadungan, Kalideres Jakarta Barat
   Telephone : (021) 23585555
   Title : President Director

2. *Name : Hartono Tanuwidjaja*
   Office address : Menara BCA Lantai 49, Jl. M.H. Thamrin No. 1 Jakarta 10310, Indonesia
   Residential address : Jl. Sugih Waras Duri Utara, Tambora Jakarta Barat
   Telephone : (021) 23585555
   Title : Director

Declare that:

1. *We are responsible for the preparation and the presentation of the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries;*

2. *The consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*

3. a. *All information in the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries has been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. *The consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;*

PT Solusi Tunas Pratama Tbk
A subsidiary of PT Profesional Telekomunikasi Indonesia

Jl. Tanjung Karang No. 11
Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati
Kabupaten Kudus 59347

4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Solusi Tunas Pratama Tbk dan Entitas Anaknya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

4. *We are responsible for the internal control system of the PT Solusi Tunas Pratama Tbk and its Subsidiaries.*

Thus this statement is made truthfully.

Jakarta, 16 Maret 2026/*March 16, 2026*



Juliawati Gunawan Halim
Direktur Utama / *President Director*

Hartono Tanuwidjaja
Direktur / *Director*

Morison Global

TJAHJADI & TAMARA
Registered Public Accountants
License No. 486/KM.1/2011
Centennial Tower 15/F, Suite 15B
Jl. Gatot Subroto Kav. 25, Jakarta 12930, Indonesia
Phone : (62 -21) 2295 8350
Fax : (62 -21) 2295 8351

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00100/2.0853/AU.1/06/0264-4/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No. 00100/2.0853/AU.1/06/0264-4/1/III/2026

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("the Company") and its subsidiaries (collectively referred to as the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2025, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2025, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with Code of Ethics for Public Accountants established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants as applicable to audits of financial statements of public interest entities in Indonesia. We have also fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2025, Grup mencatat saldo piutang usaha sebesar Rp 41,36 miliar yang merupakan 0,4% dari total aset konsolidasian Grup. Seperti dibahas pada Catatan 2h, 2j, 3 dan 6 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian ("KKE") piutang usaha, dengan menetapkan matriks penyisihan yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historisnya, analisa umur piutang usaha, dan disesuaikan dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward looking*) yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi terkait.

Evaluasi penurunan nilai piutang usaha ini merupakan hal signifikan dalam audit kami karena melibatkan penerapan pertimbangan manajemen yang siginifikan dan nilainya yang material seperti disebutkan di atas.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

- Kami memperoleh pemahaman atas proses penilaian penurunan nilai piutang usaha Grup, termasuk pengendalian-pengendalian dalam proses reviu asumsi-asumsi signifikan yang dijabarkan di atas.
- Kami menguji evaluasi penurunan nilai piutang usaha Grup dengan melaksanakan prosedur-prosedur audit yang terutama meliputi penelaahan atas dasar yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan KKE yang mencakup metode, asumsi, dan data yang digunakan, pengujian variabel makroekonomi termasuk informasi masa depan yang digunakan oleh manajemen dengan melakukan verifikasi ke sumber data terkait dan memastikan hubungannya dengan kerugian historis piutang usaha.
- Kami melakukan pengujian keakuratan laporan umur piutang usaha dengan melakukan penelusuran ke dokumen pendukung dan catatan keuangan yang relevan serta menguji akurasi matematis atas laporan umur piutang usaha tersebut.
- Kami juga menilai kecukupan pengungkapan atas evaluasi penurunan nilai piutang usaha pada laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Impairment assessment of trade receivables

As of December 31, 2024, the Group recognized trade receivables of Rp 41.36 billion, which represents 0.4% of the Group's consolidated total assets. As discussed in Notes 2h, 2j, 3 and 6 to the accompanying consolidated financial statements, the Group applies the simplified approach in calculating expected credit losses ("ECL") on trade receivables, whereby the Group established a provision matrix based on its historical credit losses experience, aging analysis of trade receivables, and adjusted for forward-looking information specific to the debtors and the economic environment.

The impairment assessment of trade receivables is significant to our audit as it involves the exercise of significant management judgment and significant amount as described above.

How our audit addressed the key audit matter

- *We obtained an understanding of the Group's trade receivables impairment assessment process which includes control over management's review of the significant assumptions described above.*
- *We tested the Group's impairment assessment of trade receivables by performing audit procedures that primarily comprised of reviewing management's basis in determining ECL, which included method, assumptions and data used, testing the macroeconomic variables and forward-looking information used by management through verification to the source of data and corroboration of their relationship with historical losses of trade receivables.*
- *We tested the accuracy of the trade receivable aging schedule report by tracing to the relevant supporting document financial records and testing the mathematical accuracy of the trade receivables aging schedule report.*
- *We also assessed the adequacy of the impairment assessment of trade receivables disclosures in the consolidated financial statements.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan yang tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, merancang dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal Grup.

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- Merencanakan dan melaksanakan audit grup untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau unit bisnis dalam grup sebagai basis untuk merumuskan opini atas laporan keuangan grup. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan penelaahan atas pelaksanaan pekerjaan audit untuk tujuan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

- *Plan and perform the group audit to obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business units within the group as a basis for forming an opinion on the group financial statements. We are responsible for the direction, supervision and review of the audit work performed for the purposes of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

TJAHJADI & TAMARA





Riani
Registrasi Akuntan Publik No. AP.0264
Public Accountant Registration No. AP. 0264

16 Maret 2026/*March 16, 2026*

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
ASET				***ASSETS***
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan bank	2e,2g,2h, 4,38			*Cash on hand and in banks*
Pihak ketiga		49.578	16.590	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,34	1.652	1.682	*Related party*
Bank yang dibatasi penggunaannya	2g,2h,5,38	-	8	*Restricted cash in bank*
Piutang usaha - neto	2h,2j,6,38	41.359	616.530	*Trade receivables - net*
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	2h,2r,7,38	78.904	66.888	*Accrued income - net*
Piutang lain-lain	2h,2j,38	1.954	5.474	*Other receivables*
Persediaan - neto	2k,2p,8	2.946	2.458	*Inventories - net*
Beban dibayar di muka	2l,9	1.636	1.833	*Prepaid expenses*
Pajak dibayar di muka	2s,18a	56.499	55.576	*Prepaid taxes*
Uang muka	10	8.583	9.878	*Advances*
Piutang derivatif	2h,2x,16,22,38	29.396	-	*Derivative receivables*
JUMLAH ASET LANCAR		**272.507**	**776.917**	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset tetap - neto	2m,2p,11	8.406.769	7.757.970	*Fixed assets - net*
Aset hak-guna - neto	2n,2p,12a	1.375.542	1.242.228	*Right-of-use assets - net*
Goodwill	2c,2d,2p,13	17.257	17.257	*Goodwill*
Aset takberwujud - neto	2o,2p,14	6.286	7.334	*Intangible asset - net*
Aset tidak lancar lainnya	2h,2j,2p,15,38	77.960	633	*Other non-current assets*
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		**9.883.814**	**9.025.422**	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		**10.156.321**	**9.802.339**	***TOTAL ASSETS***

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
LIABILITAS DAN EKUITAS				***LIABILITIES AND EQUITY***
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang bank	2e,2h,16, 22,38			*Bank loans*
Pihak ketiga		1.534.644	1.842.000	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,34	-	4.000	*Related party*
Utang usaha	2h,17,38			*Trade payables*
Pihak ketiga		96.032	59.938	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,34	34.038	9.043	*Related parties*
Utang lain-lain	2h,38			*Other payables*
Pihak ketiga		6.766	6.859	*Third parties*
Pihak berelasi	2f,34	78	3	*Related parties*
Utang pajak	2s,18b	3.312	50.851	*Taxes payable*
Beban akrual	2h,19,38	135.132	89.251	*Accrued expenses*
Pendapatan ditangguhkan	2r,20	117.160	563.320	*Unearned revenues*
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2q,2w,21a	16.751	23.333	*Short-term employee benefits liabilities*
Utang derivatif	2h,2x,16, 22,38	7	-	*Derivative payable*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		**1.943.920**	**2.648.598**	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Provisi jangka panjang	2z,23	28.739	25.947	*Long-term provision*
Liabilitas pajak tangguhan - neto	2s,18c	131.519	406.618	*Deferred tax liabilities - net*
Liabilitas imbalan pasca kerja	2q,2w,21b	30.083	24.362	*Post-employment benefits liability*
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		**190.341**	**456.927**	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		**2.134.261**	**3.105.525**	***TOTAL LIABILITIES***
EKUITAS				***EQUITY***
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				***Equity attributable to owners of the parent entity***
Modal saham - nilai nominal Rp 100 (angka penuh) per saham Modal dasar - 2.000.000.000 saham Modal ditempatkan dan disetor penuh - 1.137.579.698 saham	1b,24	113.758	113.758	*Share capital - par value of Rp 100 (full amount) per share Authorized - 2,000,000,000 shares Issued and fully paid - 1,137,579,698 shares*
Tambahan modal disetor	2d,2t,25	4.913.101	4.909.611	*Additional paid-in capital*
Penghasilan komprehensif lain	2c,2q,26	16.304	19.076	*Other comprehensive income*
Saldo laba:				*Retained earnings:*
Telah ditentukan penggunaannya		22.900	22.900	*Appropriated*
Belum ditentukan penggunaannya		2.955.983	1.631.463	*Unappropriated*
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		8.022.046	6.696.808	*Total equity attributable to owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	2c	14	6	*Non-controlling interests*
JUMLAH EKUITAS		**8.022.060**	**6.696.814**	***TOTAL EQUITY***
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		**10.156.321**	**9.802.339**	***TOTAL LIABILITIES AND EQUITY***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia,
kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,* 2025	2024	
PENDAPATAN	2r,27	1.910.682	1.817.387	***REVENUES***
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2r,28			***COST OF REVENUES***
Penyusutan dan amortisasi		(436.376)	(417.518)	*Depreciation and amortization*
Beban pokok pendapatan lainnya		(59.544)	(55.898)	*Other cost of revenues*
Jumlah beban pokok pendapatan		(495.920)	(473.416)	***Total cost of revenues***
LABA BRUTO		**1.414.762**	**1.343.971**	***GROSS INCOME***
Beban penjualan dan pemasaran	2r,29	(3.381)	(3.070)	*Selling and marketing expenses*
Beban umum dan administrasi	2r,30	(58.506)	(84.515)	*General and administrative expenses*
LABA USAHA		**1.352.875**	**1.256.386**	***INCOME FROM OPERATIONS***
Pendapatan keuangan	2r,4	447	661	*Finance income*
Biaya keuangan	16,31	(88.690)	(132.536)	*Finance costs*
Beban lain-lain - neto	2p,2r,32	(44.383)	(137.482)	*Other expenses - net*
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PAJAK PENGHASILAN		**1.220.249**	**987.029**	***INCOME BEFORE FINAL TAX AND INCOME TAX***
PAJAK FINAL	2s,18c	(170.820)	(121.496)	***FINAL TAX***
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		**1.049.429**	**865.533**	***INCOME BEFORE INCOME TAX***
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	2s,18c	275.099	108.785	***INCOME TAX BENEFIT***
LABA TAHUN BERJALAN		**1.324.528**	**974.318**	***INCOME FOR THE YEAR***
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				***OTHER COMPREHENSIVE INCOME***
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				*Item that will not be reclassified to profit or loss:*
Pengukuran kembali program imbalan pasti	2q,21b, 26	(2.772)	1.959	*Remeasurement of defined benefit plans*
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		**1.321.756**	**976.277**	***TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR***
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	2c,33	1.324.520	974.315	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	2c	8	3	*Non-controlling interests*
Jumlah		**1.324.528**	**974.318**	***Total***
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				***Total comprehensive income for the year attributable to:***
Pemilik entitas induk	2c	1.321.748	976.274	*Owners of the parent entity*
Kepentingan nonpengendali	2c	8	3	*Non-controlling interests*
Jumlah		**1.321.756**	**976.277**	***Total***
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	2v,33	**1.164**	**856**	***Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (full amount)***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ *Equity Attributable to Owners of the Parent Entity*								
		Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Share Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Penghasilan Komprehensif Lain/ *Other Comprehensive Income*	Saldo Laba/ *Retained Earnings*		Jumlah/ *Total*	Kepentingan Nonpengendali/ *Non-Controlling Interests*	Jumlah Ekuitas/ *Total Equity*	
					Telah Ditentukan Penggunaannya/ *Appropriated*	Belum Ditentukan Penggunaannya/ *Unappropriated*				
Saldo 1 Januari 2024		**113.758**	**4.900.723**	**17.117**	**22.900**	**657.148**	**5.711.646**	**3**	**5.711.649**	***Balance, January 1, 2024***
Pembayaran berbasis saham	25	-	8.888	-	-	-	8.888	-	8.888	*Share-based payment*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	2q	-	-	1.959	-	974.315	976.274	3	976.277	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2024		**113.758**	**4.909.611**	**19.076**	**22.900**	**1.631.463**	**6.696.808**	**6**	**6.696.814**	***Balance, December 31, 2024***
Pembayaran berbasis saham	25	-	3.490	-	-	-	3.490	-	3.490	*Share-based payment*
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	2q	-	-	(2.772)	-	1.324.520	1.321.748	8	1.321.756	*Total comprehensive income for the year*
Saldo 31 Desember 2025		**113.758**	**4.913.101**	**16.304**	**22.900**	**2.955.983**	**8.022.046**	**14**	**8.022.060**	***Balance, December 31, 2025***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Year Ended December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,* 2025	2024	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				***CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES***
Penerimaan kas dari pelanggan		2.093.441	1.798.769	*Cash receipts from customers*
Pembayaran kas kepada pemasok		(71.075)	(78.303)	*Cash paid to suppliers*
Pembayaran kas kepada karyawan		(58.356)	(71.841)	*Cash paid to employees*
Kas dihasilkan dari operasi		1.964.010	1.648.625	*Cash generated from operations*
Penerimaan restitusi pajak		16.855	24.870	*Receipt from tax refund*
Penerimaan bunga		447	661	*Interest received*
Pembayaran pajak final dan pajak penghasilan serta pajak lainnya		(314.503)	(248.932)	*Payments of final tax, income tax and other taxes*
Pencairan bank yang dibatasi penggunaannya		8	-	*Release of restricted cash in bank*
Pencairan (penempatan) setoran jaminan		50	(54)	*Withdrawal (placement) of security deposits*
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		**1.666.867**	**1.425.170**	***Net Cash Provided by Operating Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				***CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES***
Hasil penjualan aset tetap	11	773	1.350	*Proceeds from sale of fixed assets*
Perolehan aset tetap	11	(778.704)	(96.353)	*Acquisition of fixed assets*
Pembayaran utang atas perolehan aset tetap		(53.508)	(37.342)	*Payments of payable for acquisition of fixed assets*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		**(831.439)**	**(132.345)**	***Net Cash Used in Investing Activities***
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				***CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES***
Penerimaan utang bank jangka pendek	16,41	7.439.629	4.351.836	*Receipts of bank loan short-term*
Pembayaran utang bank:				*Payments of bank loans:*
Jangka pendek	16,41	(7.783.364)	(4.717.728)	*Short-term*
Jangka panjang	16,41	-	(405.804)	*Long-term*
Pembayaran liabilitas sewa	12b,41	(385.339)	(382.776)	*Payments of lease liabilities*
Pembayaran biaya keuangan		(73.395)	(125.333)	*Payments of finance costs*
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		**(802.469)**	**(1.279.805)**	***Net Cash Used in Financing Activities***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS
KONSOLIDASIAN (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir
pada Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
CASH FLOWS (continued)
For The Year Ended
December 31, 2025
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,* 2025	2024	
KENAIKAN NETO KAS DAN BANK		**32.959**	**13.020**	***NET INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS***
DAMPAK NETO PERUBAHAN SELISIH KURS PADA KAS DAN BANK		(1)	(1)	***EFFECT OF EXCHANGE RATE CHANGES ON CASH ON HAND AND IN BANKS***
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		18.272	5.253	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT BEGINNING OF YEAR***
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**4**	**51.230**	**18.272**	***CASH ON HAND AND IN BANKS AT END OF YEAR***

Catatan:
Tambahan informasi arus kas atas transaksi non-kas diungkapkan dalam Catatan 40.

Note:
Supplementary cash flows information on non-cash activities is disclosed in Note 40.

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2025 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain)

PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2025 and
For The Year Then Ended
(Expressed in Millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris Ridjqi Nurdiani, S.H. No. 5 tanggal 25 Juli 2006. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. W8-00259HT.01. 01-TH.2006 tanggal 27 September 2006 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 Tambahan No. 9241/2007 tanggal 11 September 2007.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. No. 10 tanggal 1 Maret 2022 mengenai perubahan maksud dan tujuan Perusahaan. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 10 Maret 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup aktivitasnya adalah berusaha dalam bidang konstruksi sentral telekomunikasi, real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan aktivitas perusahaan *holding*. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Maret 2008.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") adalah entitas induk Perusahaan dan Entitas Anaknya (secara bersama-sama disebut "Grup").

Kantor Pusat Perusahaan berlokasi di Kabupaten Kudus di Jalan Tanjung Karang No. 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, Kudus, Jawa Tengah, Indonesia dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA, Lantai 49, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Solusi Tunas Pratama Tbk ("Company") was established based on Notarial Deed No. 5 of Ridjqi Nurdiani, S.H. dated July 25, 2006. The deed of establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. W8-00259HT.01.01-TH.2006 dated September 27, 2006 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 73 Supplement No. 9241/2007 dated September 11, 2007.

The Company's articles of association has been amended several times, the latest of which is covered by Notarial Deed No. 10 of Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn. dated March 1, 2022 concerning the changes of the Company's purposes and objectives. This amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022 dated March 10, 2022.

In accordance with article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its business activities involves in central telecommunication construction, self-owned or leased real estate and holding company activities. The Company started its commercial operations in March 2008.

PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") is the parent entity of the Company and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group").

The Company's head office is located in Kudus Regency at Jalan Tanjung Karang No. 11, Jati Kulon Village, Jati District, Kudus, Central Java, Indonesia and its branch office is located at Menara BCA 49th floors, Jalan M.H Thamrin No. 1, Jakarta 10310, Indonesia.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Penawaran Umum Perdana

Pada tanggal 29 September 2011, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-10636/ BL/2011 untuk melakukan penawaran umum perdana saham kepada masyarakat sejumlah 100.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) per saham dan harga penawaran sebesar Rp 3.400 (angka penuh) per saham. Pada tanggal 11 Oktober 2011, Perusahaan telah mencatatkan sebanyak 600.000.000 saham (terdiri dari 100.000.000 saham merupakan saham baru dan 500.000.000 saham milik pemegang saham lama) pada Bursa Efek Indonesia.

Penawaran Umum Terbatas I

Pada tanggal 8 Agustus 2012, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melalui Surat No. S-9825/BL/2012 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas ("PUT") I kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sejumlah 135.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 4.800 (angka penuh) per saham serta menerbitkan Waran Seri I sejumlah 59.400.000. Setiap pemegang saham yang memiliki 40 saham lama berhak mendapatkan 9 HMETD. Setiap pemegang saham yang memiliki 20 saham baru berhak untuk memperoleh 11 Waran Seri I dimana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perusahaan dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 4.800 per saham selama jangka waktu pelaksanaan dari tanggal 6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015.

Waran mengalami penyesuaian dengan adanya PUT II sehingga menjadi 59.415.534 waran dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 3.367 (angka penuh) per saham dan sampai dengan berakhirnya masa berlaku pelaksanaan, jumlah waran yang dilaksanakan adalah sejumlah 59.414.674 waran.

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Company's Shares

Initial Public Offering

On September 29, 2011, the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its Letter No. S-10636/BL/2011 to conduct initial public offering of 100,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) per share and with offering price of Rp 3,400 (full amount) per share. On October 11, 2011, the Company listed its 600,000,000 shares (consisting of 100,000,000 new shares and 500,000,000 current shares already owned by existing shareholders) in the Indonesia Stock Exchange.

Limited Public Offering I

On August 8, 2012, the Company obtained an effective statement from the Chairman of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) through its Letter No. S-9825/BL/2012 to conduct Limited Public Offering ("LPO") I to its shareholders with Pre-emptive Rights ("HMETD") of 135,000,000 shares with par value of Rp 100 (full amount) and with offering price of Rp 4,800 (full amount) per share and issued 59,400,000 Series I Warrant. Each shareholder in which owned 40 old shares is entitled to get 9 HMETD. Each shareholder in which owned 20 new shares entitles to get 11 Series I Warrant, and 1 Series I Warrant entitles the holder to buy 1 new share of the Company with exercise price of Rp 4,800 during the exercise period from March 6, 2013 until August 28, 2015.

Warrant has been adjusted in connection with LPO II to become only 59,415,534 warrants with exercise price of Rp 3,367 (full amount) per share and until the end of exercise period, total exercised warrants are 59,414,674 warrants.

1. UMUM (lanjutan) / *1. GENERAL (continued)*

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan (lanjutan) / *b. Public Offering of the Company's Shares (continued)*

Penawaran Umum Terbatas II / ***Limited Public Offering II***

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui Surat No. S-550/D.04/2014 untuk melakukan PUT II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan saham dengan HMETD sejumlah 343.165.024 saham dengan nilai nominal Rp 100 (angka penuh) dan harga penawaran sebesar Rp 7.000 (angka penuh) per saham. Setiap pemegang saham yang memiliki 125 saham lama berhak mendapatkan 54 HMETD.

On December 19, 2014, the Company obtained an effective statement from the Board of Commissioners of Financial Services Authority ("OJK") through its Letter No. S-550/D.04/2014 to conduct LPO II to its shareholders with HMETD of 343,165,024 shares with par value of Rp 100 (full amount) and with offering price of Rp 7,000 (full amount) per share. Each shareholder in which owned 125 old shares is entitled to get 54 HMETD.

Jumlah saham Perusahaan yang dicatat sejak penawaran umum perdana saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The Company's number shares listed since the initial public offering until December 31, 2025 is as follows:

Keterangan / *Description*	Jumlah Saham / *Number of Shares*	Tanggal / *Date*
Penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham Perusahaan pada Bursa Efek Indonesia / *Initial public offering and listing of the Company's shares in Indonesia Stock Exchange*	600.000.000	11 Oktober 2011 / *October 11, 2011*
Penawaran Umum Terbatas I / *Limited Public Offering I*	135.000.000	28 Agustus 2012 / *August 28, 2012*
Eksekusi Waran Seri I / *Execution of Series I Warrants*	59.414.674	6 Maret 2013 sampai dengan 28 Agustus 2015 / *March 6, 2013 until August 28, 2015*
Penawaran Umum Terbatas II / *Limited Public Offering II*	343.165.024	7 Januari 2015 / *January 7, 2015*
Jumlah / *Total*	**1.137.579.698**	

c. Entitas Anak / *c. Subsidiaries*

Perusahaan mempunyai pengendalian dan kepemilikan langsung lebih dari 50% saham pada entitas anak sebagai berikut:

The Company has control and direct ownership more than 50% of the shares in the following subsidiaries:

Entitas Anak / *Subsidiaries*	Domisili / *Domicile*	Kegiatan Usaha / *Business Activities*	Tahun Operasi Komersial / *Year of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2025	Persentase Kepemilikan / *Percentage of Ownership* 2024	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi / *Total Assets Before Elimination* 2025	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi / *Total Assets Before Elimination* 2024
PT Sarana Inti Persada ("SIP")	Kudus, Jawa Tengah / *Kudus, Central Java*	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS / *Management and leasing of BTS towers*	2005	99,87%	99,87%	122.958	127.855
PT Global Indonesia Komunikatama ("GIK")	Kudus, Jawa Tengah / *Kudus, Central Java*	Pengelolaan dan penyewaan menara BTS / *Management and leasing of BTS towers*	2010	99,99%	99,99%	87.102	89.446

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan dan Karyawan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan No. 31 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

d. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee, Corporate Secretary and Employees

Based on Deed of Statement of Resolution of the Company's Annual General Meeting of Shareholders No. 31 dated May 5, 2023, as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Dewan Komisaris:				*Board of Commissioners:*
Komisaris Utama				*President Commissioner*
(Komisaris Independen)	:	Kusmayanto Kadiman	:	*(Independent Commissioner)*
Komisaris Independen	:	Harry Mozarta Zen	:	*Independent Commissioner*
Komisaris	:	Eko Santoso Hadiprodjo	:	*Commissioner*
Direksi:				*Board of Directors:*
Direktur Utama	:	Juliawati Gunawan Halim	:	*President Director*
Direktur	:	Wong Tjin Tak	:	*Director*
Direktur	:	Hartono Tanuwidjaja	:	*Director*
Direktur	:	Wellington	:	*Director*

Susunan komite audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Composition of the Company's audit committee as of December 31, 2025 and 2024 is as follows:

Ketua	Harry Mozarta Zen	*Chairman*
Anggota	Stefanus Ginting	*Member*
Anggota	Jennywati Soewito	*Member*

Sekretaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Hartono Tanuwidjaja.

The Company's corporate secretary as of December 31, 2025 and 2024 is Hartono Tanuwidjaja.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup memiliki masing-masing sejumlah 147 dan 172 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has 147 and 172 employees (unaudited), respectively.

e. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, yang diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 16 Maret 2026.

e. Completion of the Consolidated Financial Statements

The Company's management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on March 16, 2026.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI") dan Peraturan-Peraturan serta Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 201, "Penyajian Laporan Keuangan". Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Grup memilih untuk menyajikan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dalam satu laporan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan Grup adalah selaras bagi tahun yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi keuangan baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Perusahaan akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION

a. Statement of Compliance and Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

Statement of Compliance

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which consists of the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK IAI") and the Regulations and Guidelines on Financial Statements Presentation and Disclosures issued by Financial Services Authority ("OJK").

Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 201, "Presentation of Financial Statements". The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.

The consolidated statement of cash flows is prepared based on direct method by classifying cash flows on the basis of operating, investing and financing activities.

The Group has elected to present the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in one linked statement.

The accounting policies adopted by the Group is consistently applied for the years covered by the consolidated financial statements, except for new and revised financial accounting standards as disclosed in Note 2b.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern entity.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

a. Pernyataan Kepatuhan dan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi:
- Penerapan kebijakan akuntansi;
- Jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- Jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama tahun pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil aktual mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula. Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada tahun dimana estimasi tersebut direvisi dan tahun yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

Estimasi, asumsi dan pertimbangan akuntansi yang signifikan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup diungkapkan pada Catatan 3.

Tahun buku Grup adalah dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Akun-akun yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian Grup diukur menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah Indonesia ("Rupiah") yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah Indonesia, kecuali dinyatakan lain.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

a. Statement of Compliance and Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements (continued)

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of judgments, estimates and assumptions that affects:
- *The application of accounting policies;*
- *The reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;*
- *The reported amounts of revenues and expenses during the reporting year.*

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the year which the estimate is revised and in any future year affected.

Significant accounting estimates, assumptions and judgments applied in the preparation of the Group's consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

The Group's financial reporting period is from January 1 to December 31.

The accounts included in the Group's consolidated financial statements are measured using the currency of the primary economic environment in which the entity operates (functional currency). The consolidated financial statements are presented in Indonesian Rupiah ("Rupiah") which is the functional currency of the Group.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Indonesian Rupiah, unless otherwise stated.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

b. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Penerapan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025 di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di tahun berjalan atau sebelumnya:

- PSAK 117: "Kontrak Asuransi"; dan
- Amandemen PSAK 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing".

Standar akuntansi keuangan baru dan amandemen yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, tapi penerapan dini diperkenankan, adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"; dan
- PSAK 118, "Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan".

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, manajemen sedang mengevaluasi dampak dari penerapan standar akuntansi keuangan baru dan amandemen tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya seperti diungkapkan pada Catatan 1c. Kendali diperoleh bila Perusahaan terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*.

Secara khusus, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Perusahaan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee,* dan
iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

b. Changes in Accounting Policies

The adoption of the following new financial accounting standards and amendments which are effective on or after January 1, 2025, did not result in changes to the Group's accounting policies and had no material impact on the amounts reported in the current or prior financial years:

- *PSAK 117: "Insurance Contract"; and*
- *Amendment to PSAK 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".*

New financial accounting standards and amendments that have been issued but are not yet effective for the financial year beginning on January 1, 2025, and for which early adoption is permitted, are as follows:

- *Amendments to PSAK 109, "Financial Instruments" and PSAK 107, "Financial Instruments: Disclosure"; and*
- *PSAK 118, "Presentation and Disclosure in Financial Statements"*

As of the completion date of the consolidated financial statements, management is presently evaluating and has not yet determined the effects of these new and amended financial accounting standards on its consolidated financial statements.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements comprise of the Company's financial statements and its subsidiaries as mentioned in Note 1c. Control is achieved when the Company is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has all of the following:

i) Control over the investee, that is existing rights that give the Company current ability to direct the relevant activities of investee,
ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Bila Perusahaan tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Perusahaan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee* termasuk:

i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan.

Perusahaan menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada periode tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Perusahaan memperoleh kendali sampai tanggal Perusahaan tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit.

Seluruh saldo akun, transaksi, pendapatan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi antar perusahaan yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Perusahaan menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas, KNP dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

When the Company has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,
ii) Rights arising from other contractual arrangements, and
iii) The Company's voting rights and potential voting rights.

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date of the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the parent of the Company and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance.

All significant intra-group balances, transactions, revenues and expenses, and unrealized profits or losses resulting from intra-group transactions and dividends are eliminated on consolidation.

A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Company loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any resulting gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill*

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur berdasarkan nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi.

Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Ketika melakukan akuisisi atas suatu bisnis, Grup mengevaluasi aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih serta mengklasifikasikan dan menentukan penyajian berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, pihak pengakuisisi mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi pos yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi dimana Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business Combination and Goodwill

Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets.

Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.

When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.

If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.

The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan *Goodwill* (lanjutan)

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh (termasuk aset takberwujud berupa hubungan pelanggan yang teridentifikasi dari hasil valuasi penilai independen) dan liabilitas yang diambil alih.

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") yang diharapkan akan bermanfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

d. Business Combination and Goodwill (continued)

The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable, but shall not exceed one year from the acquisition date.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired (including intangible assets in the form of customer relationships identified from the results of independent appraiser valuations) and liabilities assumed.

If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the acquired subsidiary, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.

After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of Cash Generating Unit ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan kurs tengah pada tanggal transaksi perbankan terakhir yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Laba atau rugi atas selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada usaha tahun berjalan.

Kurs yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 16.782 dan Rp 16.162 untuk setiap 1 Dolar Amerika Serikat.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Grup mempunyai transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 224, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak ketiga.

g. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan saldo rekening bank yang tidak dijaminkan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Kas di bank yang dijaminkan atau dibatasi penggunaannya disajikan sebagai "Bank yang dibatasi penggunaannya".

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

e. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah currency at the exchange rates prevailing at the time of transactions are made. At the consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Indonesian Rupiah using the middle exchange rates at the last bank transaction date as published by Bank Indonesia. Exchange rate gains or losses arising from the foreign currency transactions and from the translation of foreign currency denominated monetary assets and liabilities are recognized in the current year operations.

As of December 31, 2025 and 2024, the rates of exchange used were Rp 16,782 and Rp 16,162 for 1 United States Dollar, respectively.

f. Transactions with Related Parties

The Group has transactions with related parties as defined in PSAK 224, "Related Party Disclosures".

Transactions with related parties are carried out on the basis of terms agreed by both parties, which terms may not be the same as those of the transactions between third parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements herein.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the notes to the consolidated financial statements are third parties.

g. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks consists of cash on hand and bank accounts balance that are not used as collateral and are not restricted in use.

Cash in bank which is pledged and restricted for use is presented as "Restricted cash in bank".

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 115.

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL"), aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Aset keuangan pada NWLR.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 115.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income ("FVOCI"), it needs to give rise to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- *Financial assets at amortized cost (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),*
- *Financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and*
- *Financial assets at FVTPL.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

i. Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:
- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset tidak lancar lainnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

i. Financial assets at amortized cost (debt instruments)

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:
- *The financial asset is held within a business model with objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.*

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets measured at amortized cost includes cash on hand and in banks, restricted cash in bank, trade receivables, accrued income, other receivables, derivative receivables and other non-current assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

ii. Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di penghasilan komprehensif lain ("PKL"). Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang).

iii. Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas)

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang tak terbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 232 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

ii. Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments)

For debt instruments at FVOCI, interest income, foreign exchange revaluation and impairment losses or reversals are recognized in profit or loss and computed in the same manner as for financial assets measured at amortized cost. The remaining fair value changes are recognized in other comprehensive income ("OCI"). Upon derecognition, the cumulative fair value change recognized in OCI is reclassified to profit or loss.

The Group does not have financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments).

iii. Financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments)

Upon initial recognition, the Group can elect to classify irrevocably its investments in equity instruments at FVOCI when they meet the definition of equity under PSAK 232 and are not held for trading. The classification is determined on an instrument-by-instrument basis.

Gains and losses on these financial assets are never recycled to profit or loss, and these financial assets are not subject to impairment assessment. Dividends are recognized as other income in profit or loss when the right of payment has been established.

The Group has no financial assets at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments).

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini: (lanjutan)

iv. Aset keuangan pada NWLR

Aset keuangan pada NWLR dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar neto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Derivatif yang melekat dalam kontrak hibrida yang mengandung aset keuangan utama tidak dicatat secara terpisah. Aset keuangan utama bersama dengan derivatif melekat harus diklasifikasikan secara keseluruhan sebagai aset keuangan yang diukur pada NWLR.

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan '*pass-through*', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below: (continued)

iv. Financial assets at FVTPL

Financial assets at FVTPL are carried in the consolidated statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

A derivative embedded within a hybrid contract containing a financial asset host is not accounted for separately. The financial asset host together with the embedded derivative is required to be classified in its entirety as a financial asset at FVTPL.

Derecognition

A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement, and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan '*pass-through*', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutannya. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dimiliki oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

Penurunan Nilai

Grup mengakui cadangan kerugian kredit ekspektasian ("KKE") untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Derecognition (continued)

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

Impairment

The Group recognizes an allowance for expected credit losses ("ECL") for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai (lanjutan)

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, cadangan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain dan aset tidak lancar lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui cadangan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk pelanggan dan lingkungan ekonomi.

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Impairment (continued)

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its trade receivables, accrued income, other receivables and other non-currrent assets do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the customers and the economic environment.

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, seperti utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang derivatif.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

i. Liabilitas keuangan pada NWLR

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 109. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of financial liabilities are classified as loans and borrowings are recognized at fair value, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and derivative payable.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

i. Financial liabilities at FVTPL

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if those financial liabilities are acquired for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 109. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

i. Liabilitas keuangan pada NWLR (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 109 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman)

(i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan pada laba rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

i. Financial liabilities at FVTPL (continued)

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 109 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

ii. Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings)

(i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut: (lanjutan)

ii. Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (utang dan pinjaman) (lanjutan)

(ii) Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kadaluarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

h. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below: (continued)

ii. Financial liabilities at amortized cost (loans and borrowings) (continued)

(ii) Payables and Accruals

Liabilities for trade payables, other payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation under the contract discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another financial liability from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective financial liability carrying amounts is recognized in profit or loss.

Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Pengukuran Nilai Wajar

Grup mengukur aset keuangan dan liabilitas keuangan, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada NWPKL.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

a. Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
b. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomis dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fair Value Measurement

The Group measures financial assets and financial liabilities at fair value at each reporting date. The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. The Group also measures certain recoverable amounts of the Cash Generating Units ("CGU") using fair value less cost of disposal and certain financial assets at FVOCI.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

a. In the principal market for the asset or liability, or
b. In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible by the Group.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participants that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, by maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

i. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

i) Tingkat 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik.
ii) Tingkat 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
iii) Tingkat 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

j. Piutang Usaha dan Piutang Lain-lain

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif, kecuali efek diskontonya tidak material, setelah dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian. Piutang dihapusbukukan pada tahun saat piutang tersebut dipastikan tidak tertagih.

k. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan.

Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan karena keusangan, kerusakan, kehilangan dan lambatnya perputaran ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap masing-masing persediaan untuk mencerminkan nilai realisasi neto pada akhir tahun. Penyisihan kerugian penurunan nilai persediaan dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada tahun penurunan nilai atau kerugian terjadi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

i. Fair Value Measurement (continued)

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market price in active markets for identical assets or liabilities.
ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

j. Trade and Other Receivables

Trade and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, except where the effect of discounting is immaterial, less allowance for expected credit losses. Receivables are written-off during the year in which they are determined to be not collectible.

k. Inventories

Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Cost is determined by the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Provision for impairment losses of inventories due to obsolescence, damage, loss and slow movement is determined based on a review of the condition of individual inventory to reflect its net realizable value at end of the year. Provision for impairment losses of inventories and all losses of inventories are recognized as an expense in the year the impair or loss occurs.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

l. Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus.

m. Aset Tetap

Grup memilih model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Aset tetap, selain hak atas tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

Nilai sisa aset adalah estimasi jumlah yang akan diperoleh Grup dari pelepasan aset, setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan, jika aset tersebut sudah dalam kondisi yang diharapkan pada akhir masa manfaatnya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut:

	Tahun/ *Years*	
Menara dan sarana penunjang	40	*Towers and supporting equipments*
Bangunan	20	*Buildings*
Menara bergerak	8	*Transportable towers*
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	4 - 25	*Networks, fiber optic and infrastructures*
Peralatan dan perabotan kantor	4 - 8	*Office equipment and furnitures*
Kendaraan bermotor	4	*Motor vehicles*
Antena *indoor*	8	*Indoor antenna*

Jumlah tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dikreditkan atau dibebankan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

l. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited using the straight-line method.

m. Fixed Assets

The Group chooses the cost model as the accounting policy for measuring its fixed assets.

Fixed assets, except landrights, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the fixed assets when that cost is incurred, if the recognition criteria are satisfied. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the fixed assets as a replacement if the recognition criteria are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in profit or loss as incurred.

The residual value of an asset is the estimated amount that the Group would currently obtain from disposal of the asset, after deducting the estimated costs of disposal, if the asset were already in the condition expected at the end of its useful life.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the estimated useful life of the assets as follows:

An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognized.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Pada setiap akhir tahun pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan ditinjau kembali, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif. Perubahan dalam umur manfaat aset yang diharapkan menjadi pertimbangan untuk modifikasi periode depresiasi dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian merupakan akumulasi biaya bahan dan biaya lainnya sampai dengan tanggal dimana aset tersebut telah selesai dan siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan ketika aset tersebut telah selesai dan siap digunakan.

n. Sewa

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Grup sebagai *Lessee*

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

m. Fixed Assets (continued)

The residual values, useful life and methods of depreciation of fixed assets are reviewed, and adjusted prospectively if appropriate, at the end of each financial year. Changes in the expected useful life of assets are considered to modify the depreciation period and are treated as changes in accounting estimates.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of fair value less cost to sell and value in use.

Constructions in progress represents the accumulated costs of materials and other relevant costs until the date when the asset is completed and ready for use. These costs are reclassified to the respective fixed asset accounts when the asset has been completed and ready for use.

n. Leases

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as Lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognize lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai *Lessee* (lanjutan)

a. Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	Tahun/*Years*	
Tanah dan peralatan	2 - 20	*Land and equipments*
Bangunan	2 - 10	*Buildings*

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

b. Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dalam jaminan nilai residual.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Leases (continued)

Group as Lessee (continued)

a. Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

b. Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentive receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai *Lessee* (lanjutan)

b. Liabilitas sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa juga mencakup harga eksekusi opsi beli yang cukup pasti akan dieksekusi oleh Grup, dan pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada tahun di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

c. Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Leases (continued)

Group as Lessee (continued)

b. Lease liabilities (continued)

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the year in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses their incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

c. Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Grup sebagai *Lessor*

Sewa dimana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan disajikan pada pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada tahun perolehannya.

o. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan hubungan pelanggan yang diperoleh dari kombinasi bisnis yang diakui sebesar nilai wajar pada tanggal perolehannya. Hubungan pelanggan memiliki masa manfaat yang terbatas dan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi dihitung dengan menggunakan metode garis lurus untuk mengalokasikan harga perolehan hubungan pelanggan selama estimasi masa manfaatnya antara 5 sampai 11 tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan (yaitu, pada tanggal penerima memperoleh kendali) atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatat aset) dimasukkan dalam laba rugi.

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal atas jumlah terpulihkan aset tersebut.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

n. Leases (continued)

Group as Lessor

Leases in which the Group do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the year in which they are earned.

o. Intangible Asset

Intangible asset represents customer relationships acquired in a business combination which are recognized at fair value at the acquisition date. Customer relationships have a finite useful life and are carried at cost less accumulated amortization. Amortization is calculated using the straight-line method to allocate the cost of customer relationships over their estimated useful life of 5 to 11 years.

An intangible asset is derecognized upon disposal (i.e., at the date the recipient obtains control) or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising upon derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss.

p. Impairment of Non-Financial Assets

The Group assesses at each of reporting year whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e. goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

p. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan (lanjutan)

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilainya menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai laba rugi sesuai kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset.

Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan ketika keadaan yang mengindikasikan kemungkinan penurunan nilai tercatat. Penurunan nilai *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat setiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Ketika jumlah terpulihkan dari UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Kerugian penurunan nilai atas *goodwill* tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

p. Impairment of Non-Financial Assets (continued)

An asset's recoverable amount is the higher of an asset's fair value or Cash Generating Unit (CGU)'s fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses from continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as profit or loss under expense categories that are consistent with the functions of the impaired asset.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets.

These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

Goodwill is tested for impairment annually and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future year.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan berdasarkan metode akrual. Imbalan kerja jangka pendek termasuk upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan pasca kerja

Grup memberikan imbalan pasca kerja sesuai Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 ("PP 35/2021") dan Undang-Undang No. 6/2023 tentang Cipta Kerja ("UU-CK") yang menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, sehingga pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU-CK dan PP 35/2021 adalah program manfaat pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, biasanya berdasarkan beberapa faktor seperti usia, masa kerja atau kompensasi.

Liabilitas imbalan pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sehubungan dengan program pensiun imbalan pasti adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal pelaporan. Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung oleh aktuaris independen menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas keluar masa depan dengan menggunakan tingkat suku bunga Obligasi Pemerintah dalam mata uang yang sama dengan mata uang imbalan yang akan dibayarkan dan waktu jatuh tempo yang kurang lebih sama dengan waktu jatuh tempo pensiun yang bersangkutan.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laba atau rugi.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits are recognized when they accrue to the employees. Short-term employee benefits include wages, salaries, bonuses and incentive.

Post-employment benefits

The Group provides post-employment benefits in accordance with the Government Regulation No. 35 Year 2021 ("PP 35/2021") and Law No. 6/2023 concerning Job Creation ("UU-CK") which determined certain formula to calculate the minimum amount of benefits, in substance, pension plans under UU-CK and PP 35/2021 represent defined benefit plans.

A defined benefit plan is a pension plan program where the pension amount to be received by employees at the time of retirement will depend on some factors such as age, years of service or compensation.

The defined benefit liability recognized in the consolidated statement of financial position in respect of defined pension benefits plan is the present value of the defined benefits obligation at reporting date. The present value of defined benefits obligation is calculated by independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefits obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using interest rates of Government Bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid, and that have the terms to maturity approximating the terms of the related pension liability.

Past service costs are recognized immediately in profit or loss.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

q. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja (lanjutan)

Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan asumsi aktuarial segera diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lain dalam tahun terjadinya.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang material dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua liabilitas hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian barang atau jasa diterima oleh pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan akan menjadi hak Grup dalam pertukaran barang atau jasa tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa hal tersebut adalah yang utama dalam pengaturan pendapatannya.

Jumlah pendapatan yang diakui didasarkan pada pertimbangan yang diterima Grup sebagai imbalan untuk menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, setelah dikurangi potongan penjualan dan disesuaikan dengan pengembalian yang diharapkan serta penyesuaian harga.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

q. Employee Benefits (continued)

Post-employment benefits (continued)

Actuarial gains and losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are immediately recognized in other comprehensive income in the year in which they arise.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs.

A curtailment occurs when an entity either:

i. Demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
ii. Amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

r. Revenue and Expense Recognition

Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods or services are received by the customer at an amount that reflects the consideration to which Group expect to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

The amount of revenue recognized is based on the consideration that the Group received in exchange for delivering promised goods or services to the customers, net of the sales discount and adjusted for expected returns and price adjustments.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

r. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Untuk potongan harga, pengembalian dan penyesuaian harga, Grup menggunakan metode yang paling mungkin dalam memperkirakan jumlah tersebut. Manajemen mempertimbangkan pengalaman historisnya untuk mengembangkan estimasi.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Beban diakui pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual.

Penghasilan atau beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan dan beban bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskonto estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset dan liabilitas keuangan.

s. Perpajakan

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 212, pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK tersebut. Oleh karena itu, Grup memutuskan untuk menyajikan beban pajak final sebagai akun tersendiri.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

r. Revenue and Expense Recognition (continued)

For sales discount, returns and price adjustment, the Group use most likely method in estimating the amount. Management considers its historical experience to develop an estimate.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group perform under the contract.

Lease income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

Expenses are recognized when incurred using the accrual basis.

Interest income or expenses

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial assets or liabilities.

s. Taxation

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subjected to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Referring to revised PSAK 212, final tax is no longer governed by these PSAK. Therefore, the Group has decided to present final tax expense as separate line item.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak final (lanjutan)

Pada tanggal 6 September 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan dari Persewaan Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan peraturan tersebut, efektif sejak tanggal 2 Januari 2018, atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan, baik sebagian maupun seluruh bangunan, yang diterima oleh orang pribadi atau badan, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 5 ayat 1, penghasilan atas pelaksanaan sewa yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan berakhirnya jangka waktu sewa sesuai dengan perjanjian sewa tersebut. Manajemen berpendapat bahwa pendapatan sewa menara telekomunikasi dikenakan pajak penghasilan non-final sampai dengan selesainya periode sewa.

Selisih antara jumlah pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak final pada laba rugi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak.

Selisih nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Pajak kini

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Final tax (continued)

On September 6, 2017, Indonesian Government issued Government Regulation No. 34 Year 2017 related with Income Tax from Land and Building Lease. In accordance with those regulation, effective from January 2, 2018, income from land and/or building lease, either partly or all of the building, which received by individual or corporate, will be charged of final income tax by 10% from gross amount of the land and/or building lease value.

In accordance with Article 5 paragraph 1, income from rental which has started before this Government Regulation was enacted, will be charged with non-final income tax until the end of rental period in accordance with the rental agreement. Management believes that telecommunication tower rental income is charged by non-final income tax until the end of lease period.

The difference between the final tax paid and the amount charged as final tax expenses in profit or loss is recognized as prepaid tax or tax payable.

The differences between the carrying amounts of assets and liabilities related to final tax and their respective tax bases, are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Current tax

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using the tax rates and tax regulation that has been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Manajemen secara periodik melakukan evaluasi atas posisi yang diambil dalam pelaporan pajak sehubungan dengan situasi di mana peraturan pajak terkait menjadi subjek interpretasi dan menetapkan provisi bila diperlukan.

Perubahan terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat diterimanya surat ketetapan pajak atau, jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut ditetapkan.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari beban lain-lain pada laba rugi.

Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui berdasarkan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan atas aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan basis pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup meninjau kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui dan mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Current tax (continued)

Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions when appropriate.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed by the Group, when the result of the appeal is determined.

Underpayment/overpayment of income tax are presented as part of Current Income Tax Expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The Group also presented interest/penalty, if any, as part of other expenses in profit or loss.

Deferred tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax assets to be utilized. At each reporting date, the Group reassessed unrecognized deferred tax assets and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

s. Perpajakan (lanjutan)

Pajak tangguhan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang telah secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disaling-hapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Grup bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:
- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang berkaitan dengan transaksi dengan PPN disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

t. Biaya Emisi Saham

Biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan saham Perusahaan kepada masyarakat dan penawaran umum terbatas dikurangkan langsung dengan hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang akun tambahan modal disetor dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

s. Taxation (continued)

Deferred tax (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the assets is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

Value Added Tax ("VAT")

Revenues, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:
- *VAT incurred from a purchase of assets or services which not recoverable from the tax office, is recognized as part of the acquisiton cost of the asset or as part of the expense item as applicable; and*
- *Receivables and payables relating to transactions with VAT are presented including the amount of VAT.*

The net amount of VAT which recoverable from, or payable to, the tax office is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

t. Share Issuance Costs

Costs incurred in connection with the Company's issuance of new share to the public and limited shares offering or rights issues were offset directly with the proceeds and presented as deduction to additional paid-in capital account in the consolidated statement of financial position.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

u. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada tahun ketika dividen tersebut disetujui atau dideklarasikan oleh para pemegang saham.

v. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan oleh karenanya, laba per saham dilusian tidak dihitung dan disajikan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Apabila jumlah saham biasa yang beredar meningkat tanpa disertai peningkatan sumber daya, maka jumlah saham biasa yang beredar sebelum peristiwa tersebut disesuaikan dengan perubahan proporsional atas jumlah saham beredar seolah-olah peristiwa tersebut terjadi pada permulaan dari tahun sajian paling awal.

w. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar.

Suatu aset disajikan lancar bila:
i) Akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
ii) Untuk diperdagangkan,
iii) Akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) Kas dan bank kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

u. Dividend

Dividend to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated statement of financial position in the period in which the dividends are approved or declared by the shareholders.

v. Earnings per Share

Earnings per share is computed by dividing income for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of shares during the year.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2025 and 2024, and accordingly, no diluted earnings per share is calculated and presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the number of ordinary shares outstanding is increased without an increase in resources, the number of ordinary shares outstanding before the event is adjusted for the proportionate change in the number of ordinary shares outstanding as of the event had occurred at the beginning of the earliest year presented.

w. Current and Non-current Classification

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification.

An asset is current when it is:
i) Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
ii) Held primarily for the purpose of trading,
iii) Expected to be realized within 12 months after the reporting date, or
iv) Cash on hand and in banks unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date.

All other assets are classified as non-current.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

w. Klasifikasi Lancar dan Tidak Lancar (lanjutan)

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:
i) Akan dilunasi dalam siklus operasi normal,

ii) Untuk diperdagangkan,
iii) Akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
iv) Tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

x. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai

Grup menggunakan instrumen keuangan derivatif seperti swap atas perubahan kurs dan tingkat suku bunga untuk melindungi nilai masing-masing risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan jika nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan jika nilai wajarnya negatif.

Untuk tujuan akuntansi lindung nilai, lindung nilai diklasifikasikan sebagai lindung nilai atas nilai wajar, lindung nilai atas arus kas dan lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri.

Pada permulaan hubungan lindung nilai, Grup secara resmi menetapkan dan mendokumentasikan hubungan lindung nilai yang ingin diterapkan akuntansi lindung nilai serta tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melaksanakan lindung nilai.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

w. Current and Non-current Classification (continued)

A liability is current when it is:
i) Expected to be settled in the normal operating cycle,
ii) Held primarily for the purpose of trading,
iii) Due to be settled within twelve months after the reporting date, or
iv) There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after the reporting date.

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

x. Derivative Financial Instruments and Hedge Accounting

The Group uses derivative financial instruments, such as cross currency swap and interest rate swap to hedge the foreign currency risks and interest rate risks. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently remeasured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative.

For the purpose of hedge accounting, hedges are classified as fair value hedge, cash flows hedge and hedge of a net investment in foreign operation.

At the inception of a hedge relationship, the Group formally designate and document the hedge relationship to which it wishes to apply hedge accounting and the risk management objective and strategy for undertaking the hedge.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

x. Instrumen Keuangan Derivatif dan Akuntansi Lindung Nilai (lanjutan)

Dokumentasi tersebut mencakup identifikasi instrumen lindung nilai, item atau transaksi lindung nilai, sifat risiko yang dilindungi nilai dan bagaimana entitas akan menilai efektivitas perubahan nilai wajar instrumen lindung nilai dalam mengimbangi eksposur terhadap perubahan nilai wajar item lindung nilai. atau arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilainya. Lindung nilai tersebut diharapkan menjadi sangat efektif dalam mencapai saling hapus perubahan nilai wajar atau arus kas dan dinilai secara berkelanjutan untuk menentukan bahwa lindung nilai tersebut sebenarnya sangat efektif selama tahun pelaporan keuangan yang ditetapkan.

Lindung nilai arus kas

Lindung nilai arus kas digunakan untuk lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan pada risiko mata uang asing atau risiko tingkat suku bunga yang terkait dengan suatu aset atau liabilitas yang diakui.

Bagian efektif atas laba atau rugi instrumen lindung nilai atas arus kas diakui langsung pada penghasilan komprehensif lain, sementara bagian yang tidak efektif diakui segera dalam laba rugi.

Grup mempunyai kontrak swap antar mata uang yang digunakan sebagai lindung nilai atas eksposur perubahan dalam arus kas atas pembayaran bunga dan pinjaman. Kontrak swap tersebut dicatat dengan menggunakan akuntansi lindung nilai.

y. Informasi Segmen

Segmen adalah komponen yang dapat dibedakan dari entitas yang terlibat baik dalam menyediakan produk-produk tertentu dan jasa (segmen usaha), atau dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

x. Derivative Financial Instruments and Hedge Accounting (continued)

The documentation includes identification of the hedging instrument, the hedged item or transaction, the nature of the risk being hedged and how the entity will assess the effectiveness of changes in the hedging instrument's fair value in offsetting the exposure to changes in the hedged item's fair value or cash flows attributable to the hedged risk. Such hedges are expected to be highly effective in achieving offsetting changes in fair value or cash flows and are assessed on an ongoing basis to determine that they actually have been highly effective throughout the financial reporting years for which they were designated.

Cash flows hedge

Cash flows hedge is used to hedge the exposure to variability in cash flows that is attributable to foreign currency risk or interest rate risk associated with a recognized asset or liability.

The effective portion of the gain or loss on the cash flow hedging instrument is recognized directly in other comprehensive income, while any ineffective portion is recognized immediately in profit or loss.

The Group entered into cross-currency swap contracts that are used as a hedge for the exposure to changes in cash flows relating to interest payments and loans repayment due to changes in foreign exchange rates. Such swap contracts are accounted for under hedge accounting.

y. Segment Information

A segment is a distinguishable component of the entity that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

y. Informasi Segmen (lanjutan)

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar perusahaan dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 37.

z. Provisi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling akhir. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dipulihkan.

aa. Kontinjensi

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan, kecuali jika arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil (*remote*). Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian, tetapi diungkapkan jika terdapat kemungkinan besar (*probable*) arus masuk manfaat ekonomis.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

y. Segment Information (continued)

The amount of each segment element reported is the measure that is reported to the chief operating decision maker for the purpose of making decisions to allocate resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intragroup balances and intra-group transactions are eliminated.

The financial information reported is based on information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. Details of the segment information are disclosed in Note 37.

z. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of obligation.

Provisions are reviewed at each of end reporting year and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

aa. Contingencies

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote, contingent liabilities are disclosed. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)

ab. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa nonpenyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

2. MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)

ab. Events After the Reporting Period

Post reporting date events that provide additional information about the financial position of the Group as of consolidated statement of financial position date (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post reporting date events which are not adjusting events are disclosed in the notes to the consolidated financial statements when material.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang memengaruhi jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas serta pengungkapan liabilitas kontinjensi pada akhir tahun pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun pelaporan berikutnya.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Penentuan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional dari masing-masing entitas dalam Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana masing-masing entitas beroperasi. Mata uang tersebut adalah mata uang yang memengaruhi pendapatan dan beban dari jasa yang diberikan. Berdasarkan penilaian manajemen, mata uang fungsional Grup adalah Rupiah Indonesia.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at end of reporting year. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that require a material adjustment to the carrying amount of the asset and liability affected in future year.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determination of Functional Currency

The functional currency of each entity in the Group is the currency from primary economic environment where the entity operates. It is the currency that mainly influences revenue and cost of rendering services of each respective entity. Based on the management's assessment, the Group's functional currency is the Indonesian Rupiah.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah memenuhi definisi yang ditetapkan PSAK 109 terpenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti yang diungkapkan pada Catatan 2h.

Ketidakpastian Kewajiban Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Sewa

Grup menyewakan menara berdasarkan perjanjian sewa operasi, dengan sewa yang dinegosiasikan dalam jangka waktu tertentu. Grup telah menentukan, berdasarkan evaluasi dari syarat dan ketentuan dari perjanjian, bahwa tidak terjadi perpindahan atas semua risiko yang signifikan dan hak kepemilikan menara yang disewakan atas sewa operasi.

Opsi Pembaruan dan Penghentian dalam Kontrak - Grup sebagai *Lessee*

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa, jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group detemines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies as disclosed in Note 2h.

Uncertain Tax Exposure

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due.

Leases

The Group leases its towers under an operating lease arrangement, with the lease negotiated for a specific terms. The Group has determined, based on an evaluation of the terms and conditions of the arrangements, that it retains all the significant risks and rewards of ownership of the towers which are leased out on operating leases.

Renewal and Termination Options in the Contract - Group as Lessee

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Opsi Pembaruan dan Penghentian dalam Kontrak - Grup sebagai *Lessee (lanjutan)*

Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir tahun pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokkan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya berdasarkan tarif gagal bayar yang diamati Grup secara historis. Grup akan mengkalibrasi matriks tersebut untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi yang bersifat perkiraan masa depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi diperkirakan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar di sektor usaha Grup, tingkat gagal bayar historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi perkiraan masa depan dianalisa kembali.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Judgments (continued)

Renewal and Termination Options in the Contract - Group as Lessee (continued)

The Group applies judgment in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at end of reporting year that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for Expected Credit Losses of Trade Receivables

The Group uses a provision matrix to calculate Expected Credit Losses ("ECL") for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast for economic conditions are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the Group's industry sector, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analysed.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian Piutang Usaha (lanjutan)

Penilaian korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan KKE adalah estimasi yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan taksiran kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili aktual gagal bayar pelanggan yang sebenarnya di masa depan. Informasi tentang KKE pada piutang usaha Grup diungkapkan dalam Catatan 6.

Nilai tercatat piutang usaha Grup sebelum cadangan kerugian kredit ekspektasian pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 43.829 dan Rp 619.000. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 6.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Persediaan

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Nilai tercatat persediaan Grup sebelum cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 3.787 dan Rp 2.872. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 8.

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus dengan memperhitungkan nilai residu untuk aset tetap tertentu berdasarkan taksiran untuk masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 sampai 40 tahun. Ini adalah umur secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Allowance for Expected Credit Losses of Trade Receivables (continued)

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The information about ECLs on the Group's trade receivables is disclosed in Note 6.

The carrying amount of the Group's trade receivables before allowance for expected credit losses as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 43,829 and Rp 619,000, respectively. Further details are disclosed in Note 6.

Allowance for Impairment Losses of Inventories

Allowance for impairment losses of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices and estimated costs to sell. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. The carrying amount of the Group's inventories before allowance for impairment losses as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 3,787 and Rp 2,872, respectively. Further details are disclosed in Note 8.

Estimated Useful Life of Fixed Assets

The costs of fixed assets after considering residual value of certain fixed assets are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful life. Management properly estimates the useful life of these fixed assets to be within 4 to 40 years. These are common life expectations applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful life and the residual value of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap (lanjutan)

Nilai buku neto atas aset tetap Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 8.406.769 dan Rp 7.757.970. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 11.

Estimasi Biaya Pembongkaran Menara

Grup melakukan penelaahan atas estimasi biaya pembongkaran menara pada akhir tahun pelaporan. Estimasi dan asumsi yang signifikan dibuat dalam penentuan jumlah estimasi biaya tersebut karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah liabilitas pada akhirnya. Faktor-faktor tersebut mencakup estimasi untuk waktu dan jumlah biaya untuk aktivitas pembongkaran, perubahan teknologi, perubahan peraturan, peningkatan biaya karena tingkat inflasi dan perubahan tingkat bunga diskonto. Ketidakpastian tersebut dapat mengakibatkan jumlah pengeluaran aktual di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah yang dicadangkan saat ini. Jumlah estimasi biaya pada akhir tahun pelaporan merupakan estimasi terbaik manajemen atas nilai kini dari biaya restorasi masa mendatang yang diperlukan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 23.

Sewa - Memperkirakan suku bunga pinjaman tambahan

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan ("IBR") untuk mengukur liabilitas sewa. IBR adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dengan syarat yang sama, dan dengan jaminan serupa, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkup ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, IBR mencerminkan apa yang 'harus dibayar' oleh Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedianya tingkat suku bunga yang dapat diobservasi (seperti untuk entitas-entitas anak yang tidak mengadakan transaksi pembiayaan) atau ketika perlu disesuaikan untuk mencerminkan syarat dan ketentuan dari sewa.

Grup menetapkan estimasi IBR menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik jika diperlukan.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Useful Life of Fixed Assets (continued)

The net book value of the Group's fixed assets as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 8,406,769 and Rp 7,757,970, respectively. Further details are disclosed in Note 11.

Estimated Cost of Dismantling of Towers

The Group assesses its estimated cost of dismantling of towers at end of reporting year. Significant estimates and assumptions are made in determining the estimation cost of dismantling of towers as there are numerous factors that will affect the ultimate liability. These factors include estimates of the extent and costs of dismantling activities, technological changes, regulatory changes, cost increases due to inflation rates and changes in discount rates. Those uncertainties may result in future actual expenditure differing from the provision amounts currently provided. The estimated cost at end of reporting year represents management's best estimate of the present value of the future dismantling costs required. Further details are disclosed in Note 23.

Leases - Estimating the incremental borrowing rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, the Group use their incremental borrowing rate ("IBR") to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The IBR therefore reflects what the Group 'would have to pay', which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease (for example, the subsidiaries that do not enter into financing transactions).

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and make certain specific estimates as necessary.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Alokasi Harga Beli dan Penurunan Nilai *Goodwill*

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli berdasarkan nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Perusahaan menimbulkan *goodwill* dan aset takberwujud. Sesuai PSAK 103, *goodwill* tidak diamortisasi dan diuji penurunan nilai setiap tahunnya. Sedangkan aset takberwujud diamortisasi sesuai estimasi masa manfaat aset tersebut.

Uji penurunan nilai dilakukan apabila terdapat indikasi penurunan nilai. *Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen harus menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai.

Imbalan Pasca Kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial dan menggunakan asumsi termasuk tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji yang diharapkan. Perubahan asumsi ini akan memengaruhi nilai tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Grup menentukan tingkat diskonto yang sesuai pada setiap akhir tahun pelaporan dengan menggunakan tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini arus kas keluar masa depan estimasian yang diharapkan untuk menyelesaikan kewajiban pensiun.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Grup mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar karyawan dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi-asumsi penting lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini.

Nilai tercatat atas liabilitas imbalan pasca kerja Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 30.083 dan Rp 24.362. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 21b.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible asset. Certain business acquisitions of the Company have resulted in goodwill and also an intangible asset. Under PSAK 103, such goodwill is not amortized and subject to an annual impairment testing. While intangible asset is being amortized over the estimated useful life of the asset.

Impairment test is performed when certain impairment indicators are present. In case of goodwill, such assets are subjected to annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management has to use its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment.

Post-employment Benefits

The present value of post-employment benefits liability depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions including the discount rate and expected salary increment rate. Any changes in these assumptions will impact the carrying amount of post-employment benefits liability.

The Group determines the appropriate discount rate at the end of each reporting year using interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflow expected to be required to settle the pension obligations.

For the rate of future salary increases, the Group collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions are in part based on the current market conditions

The carrying amount of the Group's of post-employment benefits liability as of December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 30,083 and Rp 24,362, respectively. Further details are disclosed in Note 21b.

3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI OLEH MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Estimasi Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih lanjut diungkapkan pada Catatan 18c.

3. MANAGEMENT'S USE OF JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Estimated Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences are used. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profit together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 18c.

4. KAS DAN BANK

Kas dan bank terdiri dari:

4. CASH ON HAND AND IN BANKS

Cash on hand and in banks consists of:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kas	1.020	898	*Cash on hand*
Bank - pihak ketiga			*Cash in banks - third parties*
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	45.636	5.062	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.814	582	*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21	9.996	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 250)	56	21	*Others (each below Rp 250)*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	31	31	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Jumlah bank - pihak ketiga	48.558	15.692	*Total cash in banks - third parties*
Jumlah kas dan bank - pihak ketiga	49.578	16.590	*Total cash on hand and in banks - third parties*
Bank - pihak berelasi (Catatan 34)			*Cash in bank - related party (Note 34)*
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	1.652	1.682	*PT Bank Central Asia Tbk*
Jumlah	**51.230**	**18.272**	***Total***

Pendapatan bunga yang berasal dari saldo penempatan di bank disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Interest income from placement under cash in banks is presented as part of "Finance Income" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

4. KAS DAN BANK (lanjutan) / *4. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)*

Tingkat suku bunga tahunan untuk penempatan dana di bank dengan pihak ketiga adalah berkisar antara 0% sampai 1,25% untuk rekening Rupiah Indonesia dan 0% sampai 0,2% untuk rekening Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The annual interest rates for fund placements in third parties banks are ranging from 0% to 1.25% for Indonesian Rupiah accounts and 0% to 0.2% for United States Dollar accounts as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Tingkat suku bunga tahunan untuk penempatan dana di bank dengan pihak berelasi adalah sebesar 0,01% pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The annual interest rates for fund placement in related party bank is 0.01% as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kas dan bank tidak dijaminkan kepada pihak manapun dan tidak dibatasi penggunaannya.

As of December 31, 2025 and 2024, cash on hand and in banks are not pledged to any party and neither restricted in use.

5. BANK YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA / *5. RESTRICTED CASH IN BANK*

Bank yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

Restricted cash in bank consists of:

	31 Desember/ *December 31,*		
	2025	**2024**	
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	8	*PT Bank Mandiri (Persero) Tbk*

Akun ini merupakan uang jaminan yang diterima dari PT Perkebunan Nusantara IV yang telah dicairkan pada tanggal 14 Desember 2025.

This account represents guarantee received from PT Perkebunan Nusantara IV which was released on December 14, 2025.

6. PIUTANG USAHA - NETO / *6. TRADE RECEIVABLES - NET*

Rincian piutang usaha - neto adalah sebagai berikut:

Details of trade receivables - net are as follows:

a. Berdasarkan pelanggan / *a. By customers*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Indosat Tbk	19.821	141.750	*PT Indosat Tbk*
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)*	9.691	229.588	*PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)**
PT Telekomunikasi Selular	9.358	242.442	*PT Telekomunikasi Selular*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 5.000)	4.959	5.220	*Others (each below Rp 5,000)*
Jumlah	43.829	619.000	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2.470)	(2.470)	*Less allowance for expected credit losses*
Neto	**41.359**	**616.530**	***Net***

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/*On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*

6. PIUTANG USAHA - NETO (lanjutan) / *6. TRADE RECEIVABLES - NET (continued)*

b. Berdasarkan umur / *b. By aging*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Belum jatuh tempo	41.257	601.651	*Not yet due*
Telah jatuh tempo:			*Past due:*
1 - 30 hari	-	8.792	*1 - 30 days*
31 - 60 hari	-	6.002	*31 - 60 days*
61 - 90 hari	-	-	*61 - 90 days*
Lebih dari 90 hari	2.572	2.555	*More than 90 days*
Jumlah	43.829	619.000	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(2.470)	(2.470)	*Less allowance for expected credit losses*
Neto	**41.359**	**616.530**	***Net***

Seluruh piutang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia. / *All trade receivables are denominated in Indonesian Rupiah.*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat piutang usaha yang digunakan sebagai jaminan. / *As of December 31, 2025 and 2024, there are no trade receivables which are pledged as collateral.*

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for expected credit losses of trade receivables are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal tahun	2.470	2.187	*Balance at beginning of year*
Reklasifikasi dari pendapatan yang masih akan diterima (Catatan 7)	-	283	*Reclassification from accrued income (Note 7)*
Saldo akhir tahun	**2.470**	**2.470**	***Balance at end of year***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekpektasian adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. / *Management believes that allowance for expected credit losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of trade receivables.*

7. PENDAPATAN YANG MASIH AKAN DITERIMA / *7. ACCRUED INCOME*

Pendapatan yang masih akan diterima merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dan lainnya yang belum ditagih karena proses transaksi dan kelengkapan dokumen penagihan sedang dalam verifikasi persetujuan oleh pelanggan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Accrued income represents unbilled rental income of telecommunication towers and others due to the transaction process and completeness of administration of billing documents under approval verification process by its customers as of December 31, 2025 and 2024.

Rincian pendapatan yang masih akan diterima berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

Details of accrued income by customer is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)*	67.118	7.552	*PT XLSMART Telecom Sejahtera (formerly PT XL Axiata Tbk)**
PT Telekomunikasi Selular	12.090	10.765	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Smart Telecom*	-	25.831	*PT Smart Telecom**
PT Indosat Tbk	-	23.542	*PT Indosat Tbk*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	697	199	*Others (each below Rp 10,000)*
Jumlah	79.905	67.889	*Total*
Dikurangi cadangan kerugian kredit ekspektasian	(1.001)	(1.001)	*Less allowance for expected credit losses*
Neto	**78.904**	**66.888**	***Net***

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/*On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*

Mutasi cadangan kerugian kredit ekspektasian atas pendapatan yang masih akan diterima adalah sebagai berikut:

Movements of allowance for expected credit losses of accrued income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal tahun	1.001	1.284	*Balance at beginning of year*
Reklasifikasi ke piutang usaha (Catatan 6)	-	(283)	*Reclassification to trade receivables (Note 6)*
Saldo akhir tahun	**1.001**	**1.001**	***Balance at end of year***

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian kredit ekpektasian adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya pendapatan yang masih akan diterima.

Management believes that allowance for expected credit losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollected of accrued income.

8. PERSEDIAAN / *8. INVENTORIES*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,* 2025	2024	
Material konstruksi menara dan sarana penunjang, peralatan komunikasi dan suku cadang	3.787	2.872	*Construction materials for towers and supporting equipments, telecommunication equipment and spare parts*
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(841)	(414)	*Less allowance for impairment losses*
Neto	**2.946**	**2.458**	***Net***

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut: / *Movements of allowance for impairment losses of inventories are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,* 2025	2024	
Saldo awal tahun	414	2.108	*Balance at beginning of year*
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan (Catatan 32)	427	(1.694)	*Provision (recovery) during the year (Note 32)*
Saldo akhir tahun	**841**	**414**	***Balance at end of year***

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran, gempa bumi, pencurian, kerusakan dan risiko lainnya kepada PT Sunday Insurance Indonesia dan PT Chubb General Insurance, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 29 dan Rp 28 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko yang dipertanggungkan.

Inventories have been insured against fire, earthquake, thieves, damages and other risks to PT Sunday Insurance Indonesia and PT Chubb General Insurance, third parties, with total coverage amounted to Rp 29 and 28 as of December 31, 2025 and 2024, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses that may arise from the insured risks.

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai yang mungkin timbul.

Management believes that allowance for impairment losses of inventories is adequate to cover possible impairment losses that may arise.

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA / *9. PREPAID EXPENSES*

Akun ini terutama merupakan beban dibayar di muka untuk pemeliharaan perangkat lunak dan asuransi yang telah diamortisasi sesuai masa jatuh tempo dengan sisa saldo masing-masing sebesar Rp 1.636 dan Rp 1.833 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

This account mainly represents prepayment of software maintenance and insurance which is amortized according to maturity and has outstanding amounted to Rp 1,636 and Rp 1,833 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

10. UANG MUKA / *10. ADVANCES*

Akun ini terutama merupakan uang muka yang diberikan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pengurusan aktivitas operasional Grup masing-masing sebesar Rp 8.583 dan Rp 9.878 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

This account mainly represents advances to third parties in connection with processing of the Group's operations activities, which is amounting to Rp 8,583 and Rp 9,878 as of December 31, 2025 and 2024, respectively.

11. ASET TETAP / *11. FIXED ASSETS*

Rincian mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

Details of fixed assets movement are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/*Year Ended December 31, 2025*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Hak atas tanah	13.014	-	-	-	13.014	*Landrights*
Menara dan sarana penunjang	10.554.274	1.647 1.260 [1)]	75.122	866.409	11.348.468	*Towers and supporting equipments*
Bangunan	8.483	-	-	-	8.483	*Buildings*
Menara bergerak	23.161	557	952	400	23.166	*Transportable towers*
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	3.002	-	1.687	(1.315)	-	*Networks, fiber optic and infrastructures*
Peralatan dan perabotan kantor	59.995	738	17.046	3.135	46.822	*Office equipment and furnitures*
Kendaraan bermotor	4.157	650	325	-	4.482	*Motor vehicles*
Antena *indoor*	17.439	-	-	(178)	17.261	*Indoor antenna*
Sub jumlah	10.683.525	3.592 1.260 [1)]	95.132	868.451	11.461.696	*Sub total*
Aset dalam penyelesaian	25.917	775.112 98.310 [2)]	-	(868.451)	30.888	*Construction in progress*
Jumlah	10.709.442	778.704 1.260 [1)] 98.310 [2)]	95.132	-	11.492.584	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Menara dan sarana penunjang	2.725.667	184.627	21.192	(96)	2.889.006	*Towers and supporting equipments*
Bangunan	7.851	81	-	-	7.932	*Buildings*
Menara bergerak	17.597	2.707	952	74	19.426	*Transportable towers*
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	2.879	25	1.624	(1.280)	-	*Networks, fiber optic and infrastructures*
Peralatan dan perabotan kantor	51.884	2.806	16.201	1.302	39.791	*Office equipment and furnitures*
Kendaraan bermotor	2.197	727	135	-	2.789	*Motor vehicles*
Antena *indoor*	16.259	143	-	-	16.402	*Indoor antenna*
Jumlah	2.824.334	191.116	40.104	-	2.975.346	*Total*
Rugi penurunan nilai						***Impairment losses***
Menara dan sarana penunjang	122.413	-	16.669	-	105.744	*Towers and supporting equipments*
Menara bergerak	4.725	-	-	-	4.725	*Transportable towers*
Jumlah	127.138	-	16.669	-	110.469	*Total*
Nilai Buku Neto	**7.757.970**				**8.406.769**	***Net Book Value***

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian mutasi aset tetap adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Details of fixed assets movement are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/*Year Ended December 31, 2024*					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan						***Acquisition cost***
Hak atas tanah	4.907	-	-	8.107	13.014	*Landrights*
Menara dan sarana penunjang	10.437.271	1.701 88[1)]	65.544	180.758	10.554.274	*Towers and supporting equipments*
Bangunan	12.522	-	-	(4.039)	8.483	*Buildings*
Menara bergerak	22.016	1.145	-	-	23.161	*Transportable towers*
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	5.214	-	2.212	-	3.002	*Networks, fiber optic and infrastructures*
Peralatan dan perabotan kantor	56.978	792	2.781	5.006	59.995	*Office equipment and furnitures*
Kendaraan bermotor	4.072	1.244	1.159	-	4.157	*Motor vehicles*
Antena *indoor*	20.304	-	2.952	87	17.439	*Indoor antenna*
Sub jumlah	10.563.284	4.882 88[1)]	74.648	189.919	10.683.525	*Sub total*
Aset dalam penyelesaian	8.075	91.471 51.187[2)]	138	(124.678)	25.917	*Construction in progress*
Jumlah	10.571.359	96.353 88[1)] 51.187[2)]	74.786	65.241	10.709.442	*Total*
Akumulasi penyusutan						***Accumulated depreciation***
Menara dan sarana penunjang	2.507.983	172.318	19.818	65.184	2.725.667	*Towers and supporting equipments*
Bangunan	7.373	478	-	-	7.851	*Buildings*
Menara bergerak	15.379	2.218	-	-	17.597	*Transportable towers*
Jaringan, serat optik dan infrastruktur	4.899	-	2.035	15	2.879	*Networks, fiber optic and infrastructures*
Peralatan dan perabotan kantor	50.699	3.297	2.154	42	51.884	*Office equipment and furnitures*
Kendaraan bermotor	1.908	904	615	-	2.197	*Motor vehicles*
Antena *indoor*	18.876	297	2.914	-	16.259	*Indoor antenna*
Jumlah	2.607.117	179.512	27.536	65.241	2.824.334	*Total*
Rugi penurunan nilai						***Impairment losses***
Menara dan sarana penunjang	145.422	-	23.009	-	122.413	*Towers and supporting equipments*
Menara bergerak	4.725	-	-	-	4.725	*Transportable towers*
Jumlah	150.147	-	23.009	-	127.138	*Total*
Nilai Buku Neto	**7.814.095**				**7.757.970**	***Net Book Value***

Catatan/*Notes*:
[1)] Kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara (Catatan 23)/*Capitalization of the estimated cost of dismantling of tower (Note 23).*
[2)] Penambahan aset tetap melalui utang usaha/*Addition of fixed assets through trade payables.*

11. ASET TETAP (lanjutan) / *11. FIXED ASSETS (continued)*

Rincian rugi pembongkaran/penghapusan/pelepasan aset tetap - neto adalah sebagai berikut:

Details of loss on dismantling/written-off/disposal of fixed assets - net are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Harga perolehan	95.132	74.786	*Acquisition cost*
Akumulasi penyusutan	(40.104)	(27.536)	*Accumulated depreciation*
Akumulasi penurunan nilai	(16.669)	(23.009)	*Accumulated impairment*
Nilai buku neto	38.359	24.241	*Net book value*
Hasil penjualan aset tetap	(773)	(1.350)	*Proceeds from sale of fixed assets*
Penjualan aset tetap melalui piutang lain-lain	(2.370)	(1.211)	*Sale of fixed assets through other receivables*
Rugi pembongkaran/ penghapusan/pelepasan aset tetap - neto (Catatan 32)	**35.216**	**21.680**	***Loss on dismantling/ written-off/disposal of fixed assets - net (Note 32)***

Penyusutan aset tetap dibebankan pada operasi sebagai berikut:

Depreciation of fixed assets was charged to operations as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	188.197	175.282	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	2.919	4.230	*General and administrative expenses (Note 30)*
Jumlah	**191.116**	**179.512**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset tetap Grup dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset tetap yang dimiliki Grup dan tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

As of December 31, 2025 and 2024, the Group performed impairment testing on fixed assets by assessing the recoverable amount by calculating the value in use of fixed assets owned by the Group and did not provide provision for impairment losses.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai aset tetap cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul.

As of December 31, 2025 and 2024, management believes that allowance for impairment losses of fixed assets is adequate to cover possible losses.

11. ASET TETAP (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh aset tetap (kecuali hak atas tanah dan aset dalam penyelesaian) telah diasuransikan kepada PT Chubb General Insurance Indonesia, PT KSK Insurance Indonesia dan PT Lippo General Insurance Tbk, pihak ketiga, terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 2.685.134 dan Rp 2.482.050. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko tersebut.

Jumlah biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 47.912 dan Rp 49.448.

Rincian aset dalam penyelesaian dengan persentase penyelesaian terhadap nilai kontrak serta estimasi penyelesaiannya adalah sebagai berikut:

11. FIXED ASSETS (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the whole of fixed assets (except for landrights and constructions in progress) are insured with PT Chubb General Insurance Indonesia, PT KSK Insurance Indonesia and PT Lippo General Insurance Tbk, third parties, against fire, theft and other risks with total coverage of Rp 2,685,134 and Rp 2,482,050, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Total cost of fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized as of December 31, 2025 and 2024, which is amounted to Rp 47,912 and Rp 49,448, respectively.

Details of constructions in progress with percentage completion of the contract value and estimated of completion are as follows:

31 Desember 2025	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	***December 31, 2025***
Menara dan sarana penunjang	25% - 75%	**30.888**	2026	*Towers and supporting equipments*

31 Desember 2024	**Persentase penyelesaian/ *Percentage of completion***	**Akumulasi biaya/ *Accumulated costs***	**Estimasi penyelesaian/ *Estimated completion***	***December 31, 2024***
Menara dan sarana penunjang	25% - 75%	**25.917**	2025	*Towers and supporting equipments*

12. SEWA

a. Aset hak-guna

Akun ini merupakan aset hak-guna atas sewa tanah dan peralatan serta bangunan. Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama masa sewa.

12. LEASES

a. Right-of-use assets

This account represents right-of-use assets of land and equipments and buildings. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease period.

12. SEWA (lanjutan) / *12. LEASES (continued)*

a. Aset hak-guna (lanjutan) / *a. Right-of-use assets (continued)*

Rincian aset hak-guna adalah sebagai berikut: / *Details of right-of-use assets are as follows:*

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/ *Year Ended December 31, 2025*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pembatalan/ *Termination*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah dan peralatan	2.425.264	385.339	(19.030)	2.791.573	*Land and equipments*
Bangunan	922	-	(922)	-	*Buildings*
Jumlah	2.426.186	385.339	(19.952)	2.791.573	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah dan peralatan	1.173.207	247.461	(15.282)	1.405.386	*Land and equipments*
Bangunan	924	-	(924)	-	*Buildings*
Jumlah	1.174.131	247.461	(16.206)	1.405.386	*Total*
Rugi penurunan nilai					***Impairment losses***
Tanah dan peralatan	9.827	818	-	10.645	*Land and equipments*
Nilai buku neto	**1.242.228**			**1.375.542**	***Net book value***

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ *Year Ended December 31, 2024*

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pembatalan/ *Termination*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Harga perolehan					***Acquisition cost***
Tanah dan peralatan	2.051.968	382.740	(9.444)	2.425.264	*Land and equipments*
Bangunan	3.004	240	(2.322)	922	*Buildings*
Jumlah	2.054.972	382.980	(11.766)	2.426.186	*Total*
Akumulasi penyusutan					***Accumulated depreciation***
Tanah dan peralatan	941.046	241.415	(9.254)	1.173.207	*Land and equipments*
Bangunan	1.341	124	(541)	924	*Buildings*
Jumlah	942.387	241.539	(9.795)	1.174.131	*Total*
Rugi penurunan nilai					***Impairment losses***
Tanah dan peralatan	13.698	-	(3.871)	9.827	*Land and equipments*
Nilai buku neto	**1.098.887**			**1.242.228**	***Net book value***

Penyusutan aset hak-guna dibebankan pada operasi dengan rincian sebagai berikut: / *Depreciation of right-of-use assets was charged to operations with details as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan (Catatan 28)	247.461	241.415	*Cost of revenues (Note 28)*
Beban umum dan administrasi (Catatan 30)	-	124	*General and administrative expenses (Note 30)*
Jumlah	**247.461**	**241.539**	***Total***

12. SEWA (lanjutan)

a. Aset hak-guna (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup melakukan pengujian penurunan nilai terhadap aset hak-guna Grup dengan menentukan jumlah terpulihkan melalui perhitungan atas nilai yang dihasilkan dari penggunaan aset hak-guna yang dimiliki Grup dan membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 818 pada tanggal 31 Desember 2025 dan mengakui pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 3.871 pada tanggal 31 Desember 2024 yang dibukukan pada pendapatan (beban) lain-lain (Catatan 32).

b. Liabilitas sewa

Berikut adalah nilai tercatat neto dari liabilitas sewa dan mutasinya selama tahun berjalan:

12. LEASES (continued)

a. Right-of-use assets (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, the Group performed impairment testing on right-of-use assets by determining the recoverable amount by calculating the value in use of right-of-use assets owned by the Group and providing provision for impairment losses of Rp 818 as of December 31, 2025 and recognized recovery of impairment losses of Rp 3,871 as of December 31, 2024, respectively, which was charged to other income (expenses) (Note 32).

b. Lease liabilities

The following are the carrying amount of lease liabilities and its movements during current year:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	-	1.002	*Beginning balance*
Penambahan	385.339	382.980	*Addition*
Penambahan bunga (Catatan 31 dan 40)	-	20	*Additional of interest (Notes 31 and 40)*
Pembatalan	-	(1.226)	*Termination*
Pembayaran	(385.339)	(382.776)	*Payment*
Saldo akhir	**-**	**-**	***Ending balance***

Berikut adalah jumlah yang diakui dalam laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sehubungan dengan sewa Grup:

The following are the amounts recognized in profit or loss for the years ended December 31, 2025 and 2024 in connection with leases of the Group:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Penyusutan (Catatan 28 dan 30)	247.461	241.539	*Depreciation (Notes 28 and 30)*
Beban bunga (Catatan 31)	-	20	*Interest expense (Note 31)*
Jumlah	**247.461**	**241.559**	***Total***

13. *GOODWILL*

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian pihak pengakuisisi atas nilai wajar aset neto entitas yang diakuisisi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, *goodwill* disajikan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai, apabila ada.

Goodwill represents the excess of the acquisition cost over the acquirer's share of fair value of the acquired entity's net assets at the date of acquisition. Subsequently, goodwill measured at cost less accumulated impairment losses, if any.

Rincian *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of goodwill as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
PT Sarana Inti Persada	16.460	16.460	*PT Sarana Inti Persada*
PT Global Indonesia Komunikatama	797	797	*PT Global Indonesia Komunikatama*
Jumlah	**17.257**	**17.257**	***Total***

Manajemen melakukan uji penurunan nilai atas unit penghasil kas dari entitas yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya dengan menggunakan proyeksi arus kas yang didiskontokan.

Management performed impairment test on the cash generating unit of the acquired entity based on fair value less cost to sell and value in use using discounted cash flow projections.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada penurunan nilai atas *goodwill* tersebut.

As of December 31, 2025 and 2024, management believes that there was no impairment in the value of goodwill.

14. ASET TAKBERWUJUD / *INTANGIBLE ASSET*

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/ *Year Ended December 31, 2025*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Hubungan pelanggan	49.047	-	-	49.047	*Customer relationship*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Hubungan pelanggan	41.713	1.048	-	42.761	*Customer relationship*
Nilai Buku Neto	**7.334**			**6.286**	***Net Book Value***

14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan) / *14. INTANGIBLE ASSET (continued)*

Akun ini terdiri dari: (lanjutan) / *This account consists of: (continued)*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/ *Year Ended December 31, 2024*				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Harga perolehan					*Acquisition cost*
Hubungan pelanggan	49.047	-	-	49.047	*Customer relationship*
Akumulasi amortisasi					*Accumulated amortization*
Hubungan pelanggan	40.665	1.048	-	41.713	*Customer relationship*
Nilai Buku Neto	**8.382**			**7.334**	***Net Book Value***

Amortisasi aset takberwujud yang dibebankan sebagai beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 1.048 (Catatan 30).

Amortization of intangible asset charged to general and administrative expenses for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp 1,048, respectively (Note 30).

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud.

As of December 31, 2025 and 2024, management believes that there was no indication of impairment in the value of intangible asset.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *15. OTHER NON-CURRENT ASSETS*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Piutang usaha tidak lancar:			*Non-current trade receivables:*
PT Internux	299.466	299.466	*PT Internux*
PT Bakrie Telecom Tbk	123.797	123.797	*PT Bakrie Telecom Tbk*
PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	4.311	4.311	*PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia*
Biaya ditangguhkan	77.377	-	*Deferred costs*
Setoran jaminan	764	814	*Security deposits*
Jumlah	505.715	428.388	*Total*
Dikurangi: cadangan atas kerugian kredit ekspektasian	(427.755)	(427.755)	*Less: allowance for expected credit losses*
Neto	**77.960**	**633**	***Net***

Piutang usaha tidak lancar / *Non-current trade receivables*

Piutang usaha tidak lancar merupakan piutang kepada PT Internux, PT Bakrie Telecom Tbk dan PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia yang telah diputuskan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Pengadilan Niaga. Grup telah membentuk cadangan penuh atas kerugian kredit ekspektasian piutang usaha tidak lancar tersebut.

Non-current trade receivables represent receivables from PT Internux, PT Bakrie Telecom Tbk and PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia which has been decided by under Temporary Suspension of Payment by the Commercial Court. The Group has been provide full allowance for expected credit losses on those non-current trade receivables.

15. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (lanjutan) / *15. OTHER NON-CURRENT ASSETS (continued)*

Biaya ditangguhkan / *Deferred costs*

Biaya ditangguhkan merupakan insentif penjualan yang diberikan kepada pelanggan sehubungan dengan perolehan perpanjangan kontrak sewa menara telekomunikasi Grup. Biaya tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sewa terkait.

Deferred costs represent sales incentives provided to customers in connection with the extension of the Group's telecommunication tower lease agreements. These costs are amortized on a straight-line basis over the related lease period.

16. UTANG BANK / *16. BANK LOANS*

Rincian utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut: / *Details of short-term bank loans are as follows:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank Mizuho Indonesia	335.000	1.450.000	*PT Bank Mizuho Indonesia*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	356.000	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	-	36.000	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
Dolar Amerika Serikat			*United States Dollar*
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	729.681	-	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	469.963	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
Jumlah pihak ketiga	1.534.644	1.842.000	*Total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 34)			*Related party (Note 34)*
Rupiah Indonesia			*Indonesian Rupiah*
PT Bank Central Asia Tbk	-	4.000	*PT Bank Central Asia Tbk*
Jumlah	**1.534.644**	**1.846.000**	***Total***

a. Utang bank jangka pendek / *a. Short-term bank loans*

- PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") / *PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho")*

Fasilitas Pinjaman *Revolving* - 1 / *Revolving Loan Facility - 1*

Berdasarkan Perjanjian Perubahan No. 1319/ AMD/MZH/1221 tanggal 10 Desember 2021, yang telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 11 Juli 2025, Perusahaan, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"), PT Iforte Energi Nusantara ("IEN") dan PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST") sebagai para peminjam ("Para Peminjam") secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman revolving dari Mizuho sejumlah Rp 1.500.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 2026. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan Perusahaan dan Para Peminjam bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini serta dikenakan suku bunga tahunan sesuai dengan tingkat suku bunga yang disepakati.

Based on the Amendment Agreement No. 1319/ AMD/MZH/1221 dated December 10, 2021, which has been amended and extended several times, most recently on July 11, 2025, the Company, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo"), PT Iforte Solusi Infotek ("Iforte"), PT BIT Teknologi Nusantara ("BIT"), PT Energi Nusantara and PT Inti Bangun Sejahtera Tbk ("IBST"), as joint borrowers, obtained revolving loan facility from Mizuho with total amount of Rp 1,500,000 and will due on July 11, 2026. The loan is secured by corporate guarantees from Protelindo and the Company and the Borrowers shall be jointly and severally liable for all obligations under this loan facility and bears annual interest at an agreed rate.

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") (lanjutan)

Fasilitas Pinjaman *Revolving* - 1 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas pinjaman *revolving* yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar Rp 335.000 dan Rp 1.450.000.

Fasilitas Pinjaman *Revolving* - 2

Pada tanggal 30 Mei 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari Mizuho sebesar Rp 400.000 melalui Perjanjian Fasilitas No. 487/LN/MZH/0523. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 Mei 2025 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar JIBOR ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 11 Juli 2024, fasilitas pinjaman tersebut telah ditutup dan tidak lagi tersedia bagi Perusahaan.

- PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 8 Desember 2021, yang telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 20 Mei 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT, IBST, PT Varnion Technology Semesta ("VTS") dan PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI") sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari SMBC sebesar Rp 4.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2026 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar *Cost of Fund* ditambah margin tertentu. Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT, IBST, VTS dan IPI bertanggung jawab secara tanggung renteng atas fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas pinjaman *revolving* yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar USD 43.480.000 (setara dengan Rp 729.681) (Catatan 22) dan Rp 36.000.

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank Mizuho Indonesia ("Mizuho") (continued)

Revolving Loan Facility - 1 (continued)

As of December 31, 2025 and 2024, balance of revolving loan facility used by the Company amounting to Rp 335,000 and Rp 1,450,000, respectively.

Revolving Loan Facility - 2

On May 30, 2023, the Company obtained revolving loan facility from Mizuho amounting to Rp 400,000 under Facility Agreement No. 487/LN/MZH/0523. This loan facility will due on May 30, 2025 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of JIBOR plus certain margin.

On July 11, 2024, the loan facility was terminated and is no longer available to the Company.

- PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("SMBC")

Based on Facility Agreement dated December 8, 2021, which has been amended and extended several times, most recently on May 20, 2025, the Company, Protelindo, Iforte, BIT, IBST, PT Varnion Technology Semesta ("VTS") and PT Iforte Payment Infrastructure ("IPI") as joint borrowers, obtained revolving loan facility from SMBC of Rp 4,000,000. The facility will due on April 30, 2026 and bears annual interest rate of Cost of Fund plus certain margin. The Company, Protelindo, Iforte, BIT, IBST, VTS and IPI are jointly and severally liable for this loan facility.

As of December 31, 2025 and 2024, balance of revolving loan facility used by the Company amounting to USD 43,480,000 (equivalent to Rp 729,681) (Note 22) and Rp 36,000, respectively.

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 07 tanggal 9 Desember 2024, yang selanjutnya telah diperpanjang berdasarkan Perjanjian Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 30 Oktober 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan IBST sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari Niaga sebesar Rp 2.000.000 atau nilai yang setara dalam berbagai mata uang yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2026. Perusahaan, Protelindo, Iforte dan IBST bertanggung jawab secara tanggung renteng atas fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, saldo fasilitas yang digunakan oleh Perusahaan masing-masing adalah sebesar USD 28.004.000 (setara dengan Rp 469.963) (Catatan 22) dan Rp 356.000.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 44 tanggal 29 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp.Adm., M.Com, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya diubah dengan Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kredit No. 02 tanggal 2 November 2023 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama dan Perjanjian Perubahan tanggal 22 Februari 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman transaksi khusus dari Niaga sebesar Rp 441.667. Jangka waktu atas fasilitas tersebut adalah 48 bulan setelah tanggal penarikan pertama fasilitas. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7 hari - BI *Reverse Repo* ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 12 Desember 2024, fasilitas pinjaman tersebut telah ditutup dan tidak lagi tersedia bagi Perusahaan.

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Niaga")

Based on Credit Agreement Deed No. 07 dated December 9, 2024, which was subsequently extended based on the Amendment to the Credit Agreement dated October 30, 2025, the Company, Protelindo, Iforte and IBST, as joint borrowers, obtained short-term loan facility from Niaga amounting to Rp 2,000,000 or equivalents value under various currency, which will due on October 31, 2026. The Company, Protelindo, Iforte and IBST are jointly and severally liable for this loan facility.

As of December 31, 2025 and 2024, balance of facility used by the Company is amounting to USD 28,004,000 (equivalent to Rp 469,963) (Note 22) and Rp 356,000, respectively.

Based on Deed of Credit Agreement No. 44 dated May 29, 2023 as covered by Veronica Nataadmadja, S.H., M.Corp.Adm., M.Com., Notary in Jakarta, which subsequently amended by Deed of Amendment and Restatement of Credit Agreement No. 02 dated November 2, 2023 as covered by the same Notary and Amendment Agreement dated February 22, 2024, the Company obtained special transaction loan facility from Niaga of Rp 441,667. The term of the facility is 48 months from the date of the first drawdown of the facility. The loan facility is secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of 7-Day BI Reverse Repo Rate plus certain margin.

On December 12, 2024, this loan facility was terminated and is no longer available to the Company.

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 9 Desember 2021, Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan BCA telah menandatangani Surat Perubahan Perjanjian Kesepuluh sehubungan dengan penambahan Perusahaan dan BIT sebagai pihak peminjam pada Fasilitas Pinjaman *Money Market* sebesar Rp 750.000 sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan oleh Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN dan BIT ("Perjanjian Fasilitas BCA").

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo fasilitas pinjaman *money market* yang digunakan oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 4.000.

Selanjutnya, Perjanjian Fasilitas BCA ini telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Perubahan Kesembilanbelas atas Perjanjian Fasilitas tanggal 18 Desember 2025 sehubungan dengan pelepasan dan pembebasan Perusahaan sebagai pihak peminjam.

- JP Morgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta ("JPM")

Berdasarkan Surat Perubahan Ketujuh atas Fasilitas Perbankan tanggal 9 November 2021, yang telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 8 April 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan IBST sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman dari JPM sebesar Rp 700.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 April 2026 dan dikenakan suku bunga tahunan sebesar IndONIA ditambah tarif tertentu atau suku bunga sebagaimana diberitahukan oleh JPM dari waktu ke waktu yang disetujui oleh peminjam. Perusahaan, Protelindo, Iforte, KIN, BIT dan IBST bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelunasan fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

On December 9, 2021, the Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and BCA have signed the Tenth Amendment Agreement in connection with the addition of the Company and BIT as borrowers to the Money Market Loan Facility which amounting to Rp 750,000, therefore the facility can be used by the Company, Protelindo, Iforte, KIN and BIT ("BCA Facility Agreement).

As of December 31, 2024, balance of money market loan facility used by the Company amounting to Rp 4,000.

Furthermore, BCA Facility Agreement has been amended several times, most recently based on the Nineteenth Amendment Agreement to the Facility Agreement dated December 18, 2025 in coonection with the release and discharge of the Company as borrower.

- JP Morgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch ("JPM")

Based on the Seventh Amendment Letter to the Banking Facilities dated November 9, 2021, which has been amended and extended several times, most recently on April 8, 2025, the Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and IBST, as joint borrowers, obtained loan facility from JPM amounting to Rp 700,000. The loan facility will due on April 14, 2026 and bears annual interest rate of IndONIA plus certain margin or rate as notified by JPM from time to time and agreed by the borrowers. The Company, Protelindo, Iforte, KIN, BIT and IBST are jointly and severally liable for the repayment of this loan facility.

As of December 31, 2025 and 2024, the loan facility has not been used by the Company.

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- MUFG Bank Ltd., Cabang Jakarta ("MUFG")

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 4 Oktober 2023, yang telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 19 Desember 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan IBST sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman bergulir dari MUFG sebesar Rp 2.500.000 dan perpanjangan jangka waktu atas fasilitas pinjaman sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar ongkos pendanaan MUFG ditambah margin tertentu. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo fasilitas yang digunakan oleh Perusahaan adalah Rp Nihil dan pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

Pada tanggal 12 Desember 2023, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan BIT memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari Permata sebesar Rp 1.000.000 dan selanjutnya diubah berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Fasilitas tanggal 17 November 2025 sehubungan dengan perubahan jumlah fasilitas menjadi sebesar Rp 2.000.000 yang tersedia untuk Perusahaan, Iforte, BIT, Protelindo, IPI, VTS, IEN dan IBST ("Para Peminjam") sampai dengan tanggal 17 Desember 2028. Fasilitas pinjaman ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan berdasarkan suku bunga pinjaman Permata.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan (Catatan 42).

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- *MUFG Bank Ltd., Jakarta Branch ("MUFG")*

Based on the Facility Agreement dated October 4, 2023, which has been amended and extended several times, most recently on December 19, 2025, the Company, Protelindo, Iforte and IBST, as joint borrowers, obtained revolving credit facility from MUFG amounting to Rp 2,500,000 and to the extension of the term of the loan facility is until December 31, 2026 and bears annual interest rate of certain margin plus MUFG's cost of fund. This loan is secured by corporate guarantee from Protelindo.

As of December 31, 2025, balance of facility used by the Company is amounting to Rp Nil and as of December 31, 2024, this loan facility has not been used by the Company.

- *PT Bank Permata Tbk ("Permata")*

On December 12, 2023, the Company, Protelindo, Iforte and BIT obtained revolving loan facility from Permata amounting to Rp 1,000,000. The facility was subsequently amended based on the Amendment and Restatement of the Facility Agreement dated November 17, 2025 in connection with the change in the facility amount to Rp 2,000,000, which is available to the Company, Iforte, BIT, Protelindo, IPI, VTS, IEN and IBST (the "Borrowers") until December 17, 2028. The loan facility is secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate at Permata's lending rate.

As of December 31, 2025 and 2024, this loan facility has not been used by the Company (Note 42).

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan HSBC telah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/211884/U/230310 sehubungan perpanjangan jangka waktu fasilitas, peningkatan nilai fasilitas menjadi Rp 850.000 dan penambahan Perusahaan serta BIT sebagai pihak peminjam pada seluruh fasilitas pinjaman yang diperoleh dari HSBC yang selanjutnya telah diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/212059/U/230615 tanggal 14 September 2023. Jangka waktu atas fasilitas tersebut berdasarkan konfirmasi dari HSBC dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar *Compounded* IndONIA ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman tersebut belum digunakan oleh Perusahaan.

- PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

Pada tanggal 26 Maret 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN sebagai para peminjam secara bersama-sama memperoleh fasilitas pinjaman berulang dari QNB sebesar Rp 500.000 yang berlaku sampai dengan 26 Maret 2025. Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT dan IEN bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pelaksanaan seluruh kewajiban sesuai perjanjian fasilitas.

Pada tanggal 31 Desember 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan. Selanjutnya, berdasarkan Perubahan Perjanjian tanggal 24 Maret 2025, Perusahaan dan BIT tidak lagi tercakup sebagai para peminjam dan seluruh fasilitas yang diberikan berdasarkan perjanjian tersebut dihentikan.

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC")

On June 23, 2023, the Company, Protelindo, Iforte, BIT and HSBC have signed the Corporate Facility Agreement No. JAK/211884/U/230310 in connection with the extension of loan facility, additional of loan facility to become Rp 850,000 and also to include the Company and BIT as borrowers to the whole loan facilities obtained from HSBC which subsequently amended by the First Amendment to Corporate Facility Agreement No. JAK/212059/U/230615 dated September 14, 2023. The terms of this facility is based on confirmation from HSBC and bears annual interest rate of Compounded IndONIA plus certain margin.

As of December 31, 2025 and 2024, the loan facility has not been used by the Company.

- PT Bank QNB Indonesia Tbk ("QNB")

On March 26, 2024, the Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN, as joint borrowers, obtained revolving loan facility from QNB amounting to Rp 500,000, which is valid until March 26, 2025. The Company, Protelindo, Iforte, BIT and IEN are jointly and severally liable for the fulfillment of all obligations under the facility agreement.

As of December 31, 2024, the loan facility had not been used by the Company. Subsequently, based on the Amendment Agreement dated March 24, 2025, the Company and BIT were no longer included as borrowers and all facilities granted under the agreement were terminated.

16. UTANG BANK (lanjutan)

a. Utang bank jangka pendek (lanjutan)

- Citibank, N.A., Cabang Jakarta ("Citibank")

Berdasarkan Perjanjian Induk Fasilitas Kredit tanggal 8 Agustus 2022, yang telah diubah dan diperpanjang beberapa kali, terakhir pada tanggal 12 Maret 2025, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan BIT memperoleh pinjaman fasilitas pinjaman tanpa komitmen dari Citibank sebesar Rp 650.000. Fasilitas ini dijamin oleh jaminan perusahaan dari Protelindo dan jatuh tempo berdasarkan konfirmasi dari bank.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan.

b. Utang bank jangka panjang

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

Pada tanggal 13 Juni 2023, Perusahaan, Protelindo dan Iforte memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari BNI sebesar Rp 1.000.000 dan selanjutnya telah diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 2 Agustus 2024 sehubungan dengan perubahan beberapa klausa pada perjanjian kredit. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 2028 dan dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo serta dikenakan suku bunga tahunan sebesar 7 hari - BI *Reverse Repo* ditambah margin tertentu.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan (Catatan 42).

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

Pada tanggal 25 November 2024, Perusahaan, Protelindo, Iforte dan IBST ("Para Peminjam") memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari BSI sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal realisasi dan dikenakan nisbah bagi hasil yang dihitung berdasarkan parameter tertentu. Fasilitas ini dijamin dengan jaminan perusahaan dari Protelindo dan Para Peminjam akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas fasilitas ini.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, fasilitas pinjaman ini belum digunakan oleh Perusahaan (Catatan 42).

16. BANK LOANS (continued)

a. Short-term bank loans (continued)

- Citibank, N.A., Jakarta Branch ("Citibank")

Based on the Master Credit Facility Agreement dated August 8, 2022, which has been amended and extended several times, most recently on March 12, 2025, the Company, Protelindo, Iforte and BIT obtained uncommitted loan facility from Citibank amounting to Rp 650,000. The facility is secured by corporate guarantee from Protelindo and will due based on confirmation from the bank.

As of December 31, 2025 and 2024, this loan facility has not been used by the Company.

b. Long-term bank loans

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

On June 13, 2023, the Company, Protelindo and Iforte obtained long-term loan facility from BNI amounting to Rp 1,000,000 and subsequently amended by the Approval of Amendment to the Credit Agreement dated August 2, 2024 in connection with amendments of several clauses in the credit agreement. This facility is valid until June 13, 2028 and secured by corporate guarantee from Protelindo and bears annual interest rate of 7-Day BI Reverse Repo Rate plus certain margin.

As of December 31, 2025 and 2024, the loan facility has not been used by the Company (Note 42).

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

On November 25, 2024, the Company, Protelindo, Iforte and IBST ("Borrowers") obtained long-term loan facility from BSI amounting to Rp 1,000,000. This facility is valid until 60 (sixty) months after the realisation date and subject to a profit-sharing ratio calculated based on certain parameters. This facility is secured by coporate guarantee from Protelindo and the Borrowers are jointly and severaly liable for this facility.

As of December 31, 2025 and 2024, this loan facility has not been used by the Company (Note 42).

16. UTANG BANK (lanjutan) / *16. BANK LOANS (continued)*

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman.

As of December 31, 2025 and 2024, the Company has complied with the credit term and condition as stated in the loan agreement.

Perusahaan sebagai bagian dari Grup Protelindo telah menandatangani Perjanjian Penanggungan dan Ganti Rugi pada berbagai tanggal pada tahun 2025 dan 2024 sehubungan dengan jaminan perusahaan yang diterbitkan Perusahaan kepada para kreditur terkait pinjaman yang diperoleh Grup Protelindo dari para kreditur antara lain yaitu Bank of China (Hong Kong) Limited, Mizuho, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPM, SMBC, BNI, Niaga dan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

The Company as part of Protelindo Group has signed a Corporate Guarantee and Indemnity Agreements on various date during 2025 and 2024 concerning the corporate guarantee issued by the Company to the respective lenders for the loans facilities obtained by Protelindo Group from the lenders which are among others, Bank of China (Hong Kong) Limited, Mizuho, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPM, SMBC, BNI, Niaga and Oversea-Chinese Banking Corporation Limited.

Biaya transaksi merupakan biaya ditangguhkan yang berasal dari biaya komitmen, biaya perolehan pinjaman dan biaya provisi sehubungan dengan perolehan pinjaman dan diamortisasi selama masa pinjaman.

Transaction costs represents deferred charges arising from commitment fees, upfront fees and provision fees in relation to obtaining loans and is amortized over the respective life of the loan.

Amortisasi atas biaya transaksi yang dibebankan sebagai bagian "Biaya Keuangan" untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp Nihil dan Rp 14.919 (Catatan 31).

Amortization of transaction costs which charged as part of "Finance Costs" for the years ended December 31, 2025 and 2024 amounted to Rp Nil and Rp 14,919, respectively (Note 31).

17. UTANG USAHA / *17. TRADE PAYABLES*

Akun ini merupakan utang usaha dalam mata uang Rupiah Indonesia dari:

This account represent trade payables in Indonesian Rupiah currency from:

	31 Desember/*December 31*,		
	2025	**2024**	
Pihak ketiga			*Third parties*
PT Konstruksi Baja Cikande	16.434	19.787	*PT Konstruksi Baja Cikande*
PT Mega Langit Mandiri	5.390	474	*PT Mega Langit Mandiri*
PT Handal Karya Abadi	4.120	940	*PT Handal Karya Abadi*
PT Anugerah Putera Sembilan	2.812	3.023	*PT Anugerah Putera Sembilan*
PT Fajar Sempurna Dharma	2.458	3.343	*PT Fajar Sempurna Dharma*
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3.000)	64.818	32.371	*Others (each below Rp 3,000)*
Jumlah pihak ketiga	96.032	59.938	*Total third parties*
Pihak berelasi (Catatan 34)	34.038	9.043	*Related parties (Note 34)*
Jumlah	**130.070**	**68.981**	***Total***

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat jaminan yang diberikan Grup atas utang usaha tersebut di atas.

As of December 31, 2025 and 2024, there were no security provided by the Group on the trade payables above.

18. PERPAJAKAN / *18. TAXATION*

a. Pajak Dibayar di Muka / *a. Prepaid Taxes*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	2024	
Lebih bayar pajak penghasilan badan:			*Overpayment of corporate income tax:*
Perusahaan			*The Company*
Tahun 2025 (Catatan 18c)	3.043	-	*Year 2025 (Note 18c)*
Tahun 2024 (Catatan 18c)	13.550	13.550	*Year 2024 (Note 18c)*
Tahun 2023	-	14.531	*Year 2023*
Sub jumlah	16.593	28.081	*Sub total*
Klaim restitusi pajak:			*Claim for tax refund:*
Perusahaan			*The Company*
Pajak penghasilan pasal 26:			*Income tax article 26:*
Tahun 2015	19.777	19.777	*Year 2015*
Entitas Anak			*Subsidiaries*
Pajak penghasilan badan:			*Corporate income tax:*
Tahun 2021	1.002	1.002	*Year 2021*
Tahun 2020	-	93	*Year 2020*
Tahun 2019	308	308	*Year 2019*
Tahun 2018	345	345	*Year 2018*
Tahun 2016 (Catatan 42)	3.256	3.256	*Year 2016 (Note 42)*
Pajak penghasilan pasal 23:			*Income tax article 23:*
Tahun 2020	-	263	*Year 2020*
Pajak penghasilan pasal 4(2):			*Income tax article 4(2):*
Tahun 2020	-	115	*Year 2020*
Pajak pertambahan nilai:			*Value added tax:*
Tahun 2021	-	2	*Year 2021*
Tahun 2020	109	1.964	*Year 2020*
Sub jumlah	24.797	27.125	*Sub total*
Pajak penghasilan pasal 21			*Income tax article 21*
Perusahaan	1.333	365	*The Company*
Entitas Anak	5	5	*Subsidiaries*
Pajak pertambahan nilai			*Value added tax*
Perusahaan	13.771	-	*The Company*
Sub jumlah	15.109	370	*Sub total*
Jumlah	**56.499**	**55.576**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan

- Tahun 2024

Perusahaan telah mengajukan restitusi atas lebih bayar pajak penghasilan (“PPh”) badan tahun 2024. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan belum menerima surat perintah pemeriksaan pajak dari Kantor Pajak sehubungan dengan pengajuan restitusi tersebut.

- Tahun 2023

Pada tanggal 25 Maret 2025, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Lebih Bayar (”SKPLB”) atas restitusi PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp 14.531 yang menyesuaikan taksiran laba kena pajak Perusahaan dari Rp 525.801 menjadi Rp 581.591, sehingga akumulasi rugi fiskal Perusahaan berkurang sebesar Rp 56.150 (Catatan 18c). Pada tanggal 2 Mei dan 2 Juni 2025, Perusahaan telah menerima pengembalian SKPLB tersebut.

Pada tanggal 25 Maret 2025, Perusahaan juga menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (“SKPKB”) atas Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”) serta PPh pasal 21 dan 26 untuk tahun 2023 sejumlah Rp 11.935 yang telah dibebankan sebagai bagian dari beban lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 32).

- Tahun 2022

Pada tanggal 4 April 2024, Perusahaan menerima SKPLB PPh Badan tahun 2022 sebesar Rp 18.843 dan SKPKB PPh pasal 21 sebesar Rp 92.

Pada tanggal 2 Mei 2024, Perusahaan telah menerima pengembalian SKPLB tersebut sebesar Rp 18.751 (setelah dikurangkan dengan SKPKB sebesar Rp 92). SKPKB sebesar Rp 92 telah dibebankan sebagai bagian dari beban lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 32).

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The Company

- Year 2024

The Company has submitted claim for the refund of corporate income tax (“CIT”) overpayment for 2024. As of the completion date of the consolidated financial statements, the Company has not yet received tax audit instruction letter from the Tax Office in relation to the submission of claim for tax refund.

- Year 2023

On March 25, 2025, the Company received the Overpayment Tax Assessment Letter (“SKPLB”) for the refund of 2023 CIT of Rp 14,531 which adjusting the Company's estimated taxable income from Rp 525,801 to Rp 581,591, therefore the Company's accumulated fiscal loss reduced to become by Rp 56,150 (Note 18c). On May 2 and June 2, 2025, the Company received the refund of the SKPLB.

On March 25, 2025, the Company also received Underpayment Tax Assessment Letters (“SKPKB”) for Value Added Tax (“VAT”) and income tax articles 21 and 26 for 2023 amounting to Rp 11,935, which has been charged as part of other expenses in 2024 (Note 32).

- Year 2022

On April 4, 2024, the Company received the SKPLB for 2022 CIT of Rp 18,843 and SKPKB of income tax article 21 of Rp 92.

On May 2, 2024, the Company has received the refund of these SKPLB of Rp 18,751 (after deducted with SKPKB of Rp 92). SKPKB which amounting to Rp 92 which has been charged as part of other expenses in 2024 (Note 32).

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2016

Pada tanggal 29 Agustus 2018, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") menerbitkan SKPKB atas PPN dan PPh pasal 26 periode Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 45.945 (termasuk denda sebesar Rp 22.972) dan Rp 67.214 (termasuk denda sebesar Rp 19.204). Perusahaan telah membayar sebesar Rp 45.945 dan sisa atas SKPKB sebesar Rp 67.214 belum dibayar.

Pada tanggal 26 November 2018, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 2019, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Februari 2020.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan telah menerima hasil putusan banding yang menerima sebagian banding dan menyesuaikan nilai SKPKB PPh pasal 26 menjadi sebesar Rp 5.260 dan mengabulkan seluruhnya atas banding SKPKB PPN menjadi Rp Nihil.

Pada tanggal 15 September 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian atas SKPKB PPN sebesar Rp 40.635 (setelah dikurangkan dengan Surat Tagihan Pajak ("STP") dan hasil banding atas SKPKB PPh pasal 26).

Pada tanggal 28 Juli 2023, Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung atas putusan banding SKPKB PPh pasal 26 sebesar Rp 5.260.

Pada tanggal 13 November 2023, Perusahaan telah menerima Surat Pemberitahuan Peninjauan Kembali dan Pengiriman Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 November 2023 yang diajukan oleh DJP melalui Pengadilan Pajak atas hasil putusan banding PPN tahun 2016.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The Company (continued)

- Year 2016

On August 29, 2018, the Directorate General of Tax ("DGT") issued SKPKB of VAT and income tax article 26 for December 2016, which amounting to Rp 45,945 (include penalty of Rp 22,972) and Rp 67,214 (include penalty of Rp 19,204), respectively. The Company has paid of Rp 45,945 and the remaining balance of SKPKB of Rp 67,214 has not yet paid.

On November 26, 2018, the Company has submitted its objection letter for the SKPKB. Furthermore, on November 20, 2019, the Company received letter from DGT which rejected the objection of SKPKB.

For the tax objection rejection, the Company has submitted the request for appealing process to the Tax Court on February 18, 2020.

On July 28, 2023, the Company received the results of the appeal decision which partially approved the appeal and adjusting the amount of SKPKB of income tax article 26 to become of Rp 5,260 and fully approved the appeal on SKPKB of VAT to become of Rp Nil.

On September 15, 2023, the Company received a refund of the SKPKB of VAT amounting to Rp 40,635 (after deducted with Tax Collection Letter ("STP") and the appeal results on SKPKB of income tax article 26).

On July 28, 2023, the Company has submitted a Judicial Review to the Supreme Court on the appeal decision of SKPKB of income tax article 26 of Rp 5,260.

On November 13, 2023, the Company received a Notice of Judicial Review and Delivery of Judicial Review Memorandum dated November 10, 2023 which was submitted by the DGT through the Tax Court regarding the results of the 2016 VAT appeal decision.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan telah mengajukan Surat Kontra Memori Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 22 Agustus 2024, Perusahaan telah menerima salinan Putusan Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak yang menolak permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding PPN tahun 2016 yang diajukan oleh DJP.

Pada tanggal 5 September 2024, Mahkamah Agung menolak permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Banding SKPKB PPh pasal 26 yang diajukan Perusahaan dan Perusahaan telah membebankan SKPKB PPh pasal 26 sebesar Rp 5.260 sebagai bagian beban lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 32).

- Tahun 2015

Pada tanggal 28 Oktober 2019, DJP menerbitkan SKPKB atas PPh pasal 26 periode Maret sampai dengan Desember 2015 sebesar Rp 101.634 (termasuk denda sebesar Rp 32.963). Perusahaan telah melakukan pembayaran untuk SKPKB tersebut sebesar Rp 37.972 pada tanggal 16 Januari 2020.

Selain itu, Perusahaan juga menerima STP atas PPh pasal 26 bulan Agustus 2015 sebesar Rp 19.777 yang telah dibayar melalui pemotongan atas pengembalian SKPLB PPh Badan tahun 2011 sebesar Rp 34.972 sehingga jumlah pengembalian neto SKPLB PPh Badan tahun 2011 menjadi sebesar Rp 15.195.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perusahaan telah mengajukan keberatan atas SKPKB dan STP dengan jumlah sebesar Rp 57.749. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari 2021, Perusahaan menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPKB dan STP tersebut.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The Company (continued)

- Year 2016 (continued)

On December 8, 2023, the Company submitted a Letter of Counter-Review Memorandum to the Supreme Court through the Tax Court.

On August 22, 2024, the Company received a copy of the Supreme Court Decision through the Tax Court which rejecting the request for Judicial Review of the 2016 VAT Appeal Decision submitted by the DGT.

On September 5, 2024, the Supreme Court has rejected the request of Judicial Review of the income tax article 26 Appeal Decision submitted by the Company and the Company has charged the SKPKB of income tax article 26 of Rp 5,260 as part of other expenses in 2024 (Note 32).

- Year 2015

On October 28, 2019, the DGT issued SKPKB of income tax article 26 for period from March to December 2015 amounting to Rp 101,634 (including penalty of Rp 32,963). The Company has paid these SKPKB amounting to Rp 37,972 on January 16, 2020.

In addition, the Company also received the STP of income tax article 26 for August 2015 amounting to Rp 19,777 which has been paid through the deduction of 2011 CIT SKPLB refund of Rp 34,972 therefore the total net refund of 2011 CIT SKPLB become to Rp 15,195.

On December 31, 2019, the Company has submitted an objection to the SKPKB and STP with total amount of Rp 57,749. Subsequently, on January 7, 2021, the Company received a letter from the DGT which rejected the objection to those SKPKB and STP.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Perusahaan (lanjutan)

- Tahun 2015 (lanjutan)

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, Perusahaan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Maret 2021. Pada tanggal 29 Maret 2023, Perusahaan telah menerima hasil putusan banding yang menerima sebagian banding atas SKPKB sebesar Rp 37.972. Selanjutnya, Perusahaan telah menerima pengembalian hasil banding pada tanggal 25 Mei 2023 dan 13 Juni 2023 serta melakukan pembayaran sisa SKPKB yang tidak disetujui sebesar Rp 63.662 pada tanggal 5 April 2023.

Terhadap putusan penolakan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 23 Juni 2023. Selanjutnya, pada tanggal 22 April 2024 dan 15 Agustus 2024, Perusahaan telah menerima Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan Peninjauan Kembali Perusahaan dan Perusahaan telah membebankan sisa SKPKB PPh Pasal 26 sebesar Rp 63.662 sebagai bagian dari beban lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 32).

Pada tanggal 9 Oktober 2023, Perusahaan telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Pajak sehubungan dengan STP PPh pasal 26 bulan Agustus 2015 sebesar Rp 19.777.

Pada tanggal 23 April 2025, Perusahaan telah menerima hasil putusan pengadilan pajak yang menolak pengajuan gugatan Perusahaan.

Terhadap putusan penolakan tersebut, Perusahaan telah mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung pada tanggal 11 Juni 2025. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, hasil peninjauan kembali belum diterima oleh Perusahaan.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

The Company (continued)

- *Year 2015 (continued)*

For the tax objection rejection, the Company has submitted an appeal request to the Tax Court on March 10, 2021. On March 29, 2023, the Company received the results of the appeal decision which partially approved an appeal on SKPKB of Rp 37,972. Furthermore, the Company has received the refund on appeal result on May 25, 2023 and June 13, 2023 and paid the remaining unapproved SKPKB of Rp 63,662 on April 5, 2023.

In response to the rejection decision, the Company has submitted a Judicial Review to the Supreme Court on June 23, 2023. Furthermore, on April 22, 2024 and August 15, 2024, the Company has received the Supreme Court Decision which rejecting the Company's Judicial Review request and the Company has charged the remaining SKPKB of income tax article 26 of Rp 63,662 as part of other expenses in 2024 (Note 32).

On October 9, 2023, the Company has submitted a lawsuit to the Tax Court in connection with STP of income tax article 26 for August 2015 of Rp 19,777.

On April 23, 2025, the Company received the tax court decision which rejected the Company's lawsuit.

In response to the rejection decision, the Company filed a Judicial Review to the Supreme Court on June 11, 2025. As of the completion date of the consolidated financial statements, the result of the judicial review has not yet been received by the Company.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak

- Tahun 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, GIK dan SIP telah membebankan lebih bayar PPh Badan tahun 2023 sebesar Rp 82 sebagai bagian dari beban lain-lain pada tahun 2024 (Catatan 32).

- Tahun 2022

Pada tanggal 3 April 2024, GIK menerima SKPLB PPh Badan tahun 2022 sebesar Rp 275. Selanjutnya, GIK telah menerima pengembalian atas SKPLB tersebut pada tanggal 30 April 2024.

- Tahun 2021

Pada tanggal 26 April 2022, SIP telah melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2021 dengan jumlah lebih bayar sebesar Rp 209.

Pada tanggal 24 Juli 2023, SIP telah menerima hasil pemeriksaan pajak berupa SKPKB PPh Badan tahun 2021 sebesar Rp 1.624, SKPKB PPh pasal 23 sebesar Rp 423 dan SKPKB PPN sebesar Rp 2. Pada tanggal 22 Agustus 2023, SIP telah membayar seluruh SKPKB tersebut.

Pada tanggal 11 Oktober 2023, SIP telah mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh Badan tersebut. Kemudian, pada tanggal 16 Oktober 2023, SIP juga mengajukan surat keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan PPN.

Pada tanggal 10 Juli 2024, SIP telah menerima hasil keberatan SKPKB PPh Badan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan dan menyesuaikan kurang bayar PPh Badan dari Rp 1.624 menjadi Rp 793 serta mengabulkan keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23.

Atas keputusan keberatan tersebut, jumlah klaim atas SKPKB PPh Badan tahun 2021 menjadi sebesar Rp 1.002.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries

- Year 2023

As of December 31, 2024, GIK and SIP have charged the overpayment of 2023 CIT which amounting to Rp 82 as part of other expenses in 2024 (Note 32).

- Year 2022

On April 3, 2024, GIK received SKPLB of 2022 CIT amounting to Rp 275. Furthermore, GIK has been received refund on those SKPLB on April 30, 2024.

- Year 2021

On April 26, 2022, SIP has reported its Annual CIT Return year 2021 with overpaid amount of Rp 209.

On July 24, 2023, SIP has received the tax audit results of SKPKB of 2021 CIT of Rp 1,624, SKPKB of income tax article 23 of Rp 423 and SKPKB of VAT of Rp 2. On August 22, 2023, all the outstanding SKPKB has been fully paid by SIP.

On October 11, 2023, SIP has submitted a letter of objection regarding the SKPKB of CIT. Afterwards, on October 16, 2023, SIP also submitted a letter of objection over the SKPKB of income tax article 23 and VAT.

On July 10, 2024, SIP has received the objection result of SKPKB of CIT which partially approved the objection request and adjusting CIT underpayment from Rp 1,624 to Rp 793 and approved the objection of SKPKB of income tax article 23.

Based on this objection decision, the total claim of SKPKB for 2021 CIT become of Rp 1,002.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2021 (lanjutan)

Pada tanggal 21 Agustus 2024, SIP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas hasil keberatan PPh Badan yang ditolak sebagian. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding tersebut belum diterima oleh SIP.

- Tahun 2020

Pada tanggal 15 Agustus 2022, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2020 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 440 menjadi Rp 327 sehingga sisa restitusi pajak tersebut sebesar Rp 113 dan SIP juga menerima SKPKB PPN, STP PPN, SKPKB PPh pasal 23 dan 4(2) masing-masing sebesar Rp 1.903, Rp 109, Rp 263 dan Rp 150.

Pada tanggal 1 September 2022, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2020 sebesar Rp 218 setelah dikurangi STP PPN sebesar Rp 109. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2022, SIP telah melunasi seluruh SKPKB dan mengajukan keberatan atas SKPLB dan SKPKB tersebut pada tanggal 3 Oktober 2022.

Pada tanggal 5 Juli 2023, SIP telah menerima hasil keberatan SKPLB PPh Badan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan dan menyesuaikan lebih bayar PPh Badan dari Rp 327 menjadi Rp 347 dan menerima pengembalian sebesar Rp 20 pada tanggal 22 Agustus 2023.

Atas keputusan keberatan tersebut, jumlah klaim atas SKPLB PPh Badan tahun 2020 menjadi sebesar Rp 93.

Pada tanggal yang sama, SIP juga menerima hasil keberatan yang mengabulkan sebagian permohonan keberatan SKPKB PPh pasal 4(2) dari Rp 150 menjadi Rp 115 dan SKPKB PPN dari Rp 1.903 menjadi Rp 1.859 serta menolak keberatan atas SKPKB PPh pasal 23 dan STP PPN. Pada tanggal 22 Agustus 2023, SIP telah menerima pengembalian atas hasil keberatan tersebut.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries (continued)

- Year 2021 (continued)

On August 21, 2024, SIP has submitted an appeal to the Tax Court regarding the partially rejected of CIT objection. As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision has not been received by SIP.

- Year 2020

On August 15, 2022, SIP received SKPLB of 2020 CIT which adjusting claim of CIT refund from Rp 440 to Rp 327 thus the remaining tax refund is Rp 113 and SIP also received SKPKB of VAT, STP VAT, SKPKB of income tax articles 23 and 4(2) which amounting to Rp 1,903, Rp 109, Rp 263 and Rp 150, respectively.

On September 1, 2022, SIP received tax refund of CIT 2020 amounting Rp 218 after deducted with STP VAT amounting Rp 109. Afterwards, on September 8, 2022, SIP has fully paid the entire SKPKB and submitted objection on those SKPLB and SKPKB on October 3, 2022.

On July 5, 2023, SIP has received the result of objection on SKPLB CIT which partially approved the objection request and adjusting the overpayment of CIT from Rp 327 to become Rp 347 and received a refund of Rp 20 on August 22, 2023.

Based on this objection decision, the total claim of SKPLB for 2020 CIT become of Rp 93.

On the same date, SIP also received the result of objections which partially approved the objections of SKPKB of income tax article 4(2) from Rp 150 to become of Rp 115 and SKPKB of VAT from Rp 1,903 to become of Rp 1,859 and rejected the objection of SKPKB of income tax article 23 and STP VAT. On August 22, 2023, SIP has received the refund on the objection results.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2020 (lanjutan)

Pada tanggal 2 Oktober 2023, SIP mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak atas hasil keberatan yang ditolak dan diterima sebagian.

Pada tanggal 28 Oktober 2024, SIP telah menerima hasil putusan banding yang mengabulkan seluruh banding atas SKPLB PPh Badan dan SKPKB PPN serta mengabulkan sebagian banding atas SKPKB PPh pasal 23 dan 4(2). Pada bulan Januari 2025, SIP telah menerima pengembalian atas hasil banding tersebut.

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding atas STP PPN sebesar Rp 109 belum diterima oleh SIP.

- Tahun 2019

Pada tanggal 30 Juni 2021, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2019 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 1.931 menjadi Rp 1.623, sehingga sisa restitusi pajak tersebut sebesar Rp 308. Pada tanggal 23 Agustus 2021, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2019 sebesar Rp 1.602 setelah dikurangi utang pajak sebesar Rp 21. Pada tanggal 31 Agustus 2021, SIP telah mengajukan keberatan atas SKLPB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2022, SIP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan atas SKPLB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, SIP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Agustus 2022. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, keputusan banding belum diterima oleh SIP.

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries (continued)

- *Year 2020 (continued)*

On October 2, 2023, SIP has submitted an appeal to the Tax Court regarding the rejected and partially approved objections.

On October 28, 2024, the Company received the appeal decision which fully approved the appeal on the SKPLB CIT and SKPKB VAT and partially approved the appeal on SKPKB of income tax articles 23 and 4(2). In January 2025, SIP has received the refund on the appeal results.

As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision on STP VAT of Rp 109 has not been received by SIP.

- *Year 2019*

On June 30, 2021, SIP has received SKPLB of 2019 CIT which adjusting claim of CIT refund from Rp 1,931 to Rp 1,623, thus the remaining tax refund is Rp 308. On August 23, 2021, SIP has received refund of CIT 2019 amounted to Rp 1,602 after deducted with tax payable of Rp 21. On August 31, 2021, SIP has submitted its objection letter on the SKPLB. Furthermore, on July 1, 2022, SIP received letter from the DGT which rejected the objection of those SKPLB.

For the tax objection rejection, SIP has submitted an appeal request to the Tax Court on August 31, 2022. As of the completion date of the consolidated financial statements, the appeal decision has not been received by SIP.

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

a. Pajak Dibayar di Muka (lanjutan)

Entitas Anak (lanjutan)

- Tahun 2018

Pada tanggal 24 Juni 2020, SIP menerima SKPLB PPh Badan tahun 2018 yang menyesuaikan tagihan restitusi PPh Badan dari Rp 1.119 menjadi Rp 774. Pada tanggal 17 Juli 2020, SIP telah menerima pengembalian atas PPh Badan 2018.

Pada tanggal 1 September 2020, SIP telah mengajukan keberatan atas selisih nilai restitusi pajak sebesar Rp 345. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juli 2021, SIP menerima surat dari DJP yang menolak keberatan tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, SIP telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak pada tanggal 13 September 2021.

Pada tanggal 8 Desember 2025, SIP menerima putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding SKPLB PPh Badan tahun 2018 sebesar Rp 345. Selanjutnya, SIP telah menerima pengembalian atas SKPLB tersebut pada tanggal 24 Februari 2026.

- Tahun 2016

Pada tanggal 30 November 2021, GIK menerima SKPKB atas PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp 3.256. SKPKB tersebut telah dibayar oleh GIK pada tanggal 19 Januari 2022.

Pada tanggal 24 Februari 2022, GIK telah mengajukan keberatan atas SKPKB tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 22 Desember 2022, DJP menolak keberatan atas SKPKB tersebut.

Atas penolakan keberatan pajak tersebut, pada tanggal 21 Maret 2023, GIK telah mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 22 Januari 2026, GIK menerima putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding SKPLB PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp 3.256 (Catatan 42).

18. TAXATION (continued)

a. Prepaid Taxes (continued)

Subsidiaries (continued)

- *Year 2018*

On June 24, 2020, SIP received SKPLB of 2018 CIT which adjusting claim of CIT refund from Rp 1,119 to Rp 774. On July 17, 2020, SIP has received refund of CIT 2018.

On September 1, 2020, SIP has submitted its objection letter on the difference between claim and tax refund received amounting to Rp 345. Furthermore, on July 1, 2021, SIP received letter from DGT which rejected the above objection.

For the tax objection rejection, SIP has submitted an appeal request to the Tax Court on September 13, 2021.

On December 8, 2025, SIP received the Tax Court's decision which fully approved the appeal of SKPLB of 2018 CIT amounting to Rp 345. Subsequently, SIP has received the refund of the SKPLB on February 24, 2026.

- *Year 2016*

On November 30, 2021, GIK has received SKPKB of 2016 CIT which amounting to Rp 3,256. These SKPKB has been paid by GIK on January 19, 2022.

On February 24, 2022, GIK has submitted an objection on those SKPKB. Furthermore, on December 22, 2022, the DGT has rejected the objection on the SKPKB.

For the tax objection rejection, on March 21, 2023, GIK has submitted an appeal request to the Tax Court.

On January 22, 2026, GIK received the Tax Court's decision which fully approved the appeal of SKPLB of 2016 CIT amounting to Rp 3,256 (Note 42).

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

b. Utang Pajak / *b. Taxes Payable*

Akun ini merupakan utang pajak sebagai berikut: / *This account represents taxes payable as follows:*

	31 Desember/ *December 31,*		
	2025	**2024**	
Perusahaan:			*The Company:*
Pajak pertambahan nilai	-	45.600	*Value added tax*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 4(2)	2.997	4.255	*Article 4(2)*
Pasal 23	41	39	*Article 23*
Sub jumlah	3.038	49.894	*Sub total*
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
Pajak pertambahan nilai	267	822	*Value added tax*
Pajak penghasilan			*Income tax*
Pasal 4(2)	2	128	*Article 4(2)*
Pasal 21	5	-	*Article 21*
Pasal 23	-	7	*Article 23*
Sub jumlah	274	957	*Sub total*
Jumlah	**3.312**	**50.851**	***Total***

c. Pajak Penghasilan / *c. Income Tax*

Manfaat pajak penghasilan terdiri dari: / *Income tax benefit consists of:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Pajak kini:			*Current tax:*
Perusahaan	-	-	*The Company*
Entitas Anak	-	-	*Subsidiaries*
Jumlah pajak kini	-	-	*Total current tax*
Pajak tangguhan:			*Deferred tax:*
Perusahaan	275.099	108.090	*The Company*
Entitas Anak	-	695	*Subsidiaries*
Jumlah pajak tangguhan	275.099	108.785	*Total deferred tax*
Manfaat pajak penghasilan - neto	**275.099**	**108.785**	***Income tax benefit - net***

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

c. Pajak Penghasilan (lanjutan) / *c. Income Tax (continued)*

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan, seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income before final tax and income tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.220.249	987.029	*Income before final tax and income tax as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income*
Eliminasi	1.572	1.485	*Eliminations*
Laba konsolidasian sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.221.821	988.514	*Consolidated income before final tax and income tax*
Dikurang: laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Entitas Anak	(12.379)	(7.821)	*Less: income before final tax and income tax of Subsidiaries*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	1.209.442	980.693	*Income before final tax and income tax - the Company*
Beda temporer:			*Temporary difference:*
Penyusutan aset tetap	165.641	220.395	*Depreciation of fixed assets*
Beda temporer tanpa pajak tangguhan:			*Temporary differences with no deferred tax:*
Amortisasi dan penyusutan yang dapat dikurangkan	(36.357)	(112.906)	*Deductible amortization and depreciation*
Imbalan pasca kerja	5.471	6.527	*Post-employment benefits*
Sub jumlah	(30.886)	(106.379)	*Sub total*
Beda tetap:			*Permanent differences:*
Pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final	(1.687.533)	(1.195.575)	*Income subjected to final tax*
Beban atas pendapatan yang dikenakan pajak yang bersifat final	482.532	303.594	*Expenses related to income subjected to final tax*
Gaji dan kesejahteraan karyawan	(6.435)	159	*Salaries and employee welfare*
Lain-lain	8.533	119.491	*Others*
Sub jumlah	(1.202.903)	(772.331)	*Sub total*

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan, sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran laba kena pajak untuk tahun pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Income Tax (continued)

Current tax (continued)

Reconciliation between income before final tax and income tax, as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows: (continued)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Taksiran laba kena pajak tahun berjalan - Perusahaan	141.294	322.378	*Estimated taxable income for current year - the Company*
Akumulasi rugi fiskal awal tahun - Perusahaan	(339.139)	(717.667)	*Accumulated fiscal loss at at beginning of year - the Company*
Penyesuaian rugi fiskal (Catatan 18a)	197.845	56.150	*Adjustment on fiscal loss (Note 18a)*
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun - Perusahaan	-	(339.139)	*Accumulated fiscal loss at end of year - the Company*
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun - Entitas Anak	(10.383)	(10.702)	*Accumulated fiscal loss at end of year - Subsidiaries*
Beban pajak penghasilan	-	-	*Income tax expenses*
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka pasal 23: Perusahaan	3.043	13.550	*Less prepaid income tax article 23: The Company*
Lebih bayar pajak penghasilan badan (Catatan 18a): Perusahaan	**3.043**	**13.550**	*Overpayment of corporate income tax (Note 18a): The Company*
Pajak final:			*Final tax:*
Perusahaan	168.753	119.558	*The Company*
Entitas Anak	2.067	1.938	*Subsidiaries*
Jumlah	**170.820**	**121.496**	***Total***

18. PERPAJAKAN (lanjutan)

18. TAXATION (continued)

c. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. *Income Tax (continued)*

Pajak kini (lanjutan)

Current tax (continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan menggunakan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

Reconciliation between income tax expense as presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense calculated using prevailing tax rate on the income before final tax and income tax are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	1.220.249	987.029	*Income before final tax and income tax as presented in the consolidated statement comprehensive income*
Eliminasi	1.572	1.485	*Eliminations*
Laba konsolidasian sebelum pajak final dan pajak penghasilan	1.221.821	988.514	*Consolidated income before final tax and income tax*
Dikurang: laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan Entitas Anak	(12.379)	(7.821)	*Less: income before final tax and income tax of Subsidiaries*
Laba sebelum pajak final dan pajak penghasilan - Perusahaan	1.209.442	980.693	*Income before final tax and income tax - the Company*
Pajak penghasilan dihitung dengan tarif efektif	(266.077)	(215.752)	*Income tax expense at effective tax rate*
Pengaruh pajak penghasilan dari beda tetap	264.639	169.912	*Effect of income tax from permanent differences*
Pengaruh pajak penghasilan dari beda temporer tanpa pajak tangguhan	6.795	23.403	*Effect of income tax from temporary differences with no deferred tax*
Pengaruh pajak penghasilan dari beda temporer dengan pajak tangguhan	296.184	218.358	*Effect of income tax from temporary differences with deferred tax*
Kompensasi rugi fiskal	(26.442)	(87.831)	*Fiscal loss compensation*
Manfaat pajak penghasilan:			*Income tax benefit:*
Perusahaan	275.099	108.090	*The Company*
Entitas Anak	-	695	*Subsidiaries*
Manfaat pajak penghasilan - neto	**275.099**	**108.785**	***Income tax benefit - net***

18. PERPAJAKAN (lanjutan) / *18. TAXATION (continued)*

c. Pajak Penghasilan (lanjutan) / *c. Income Tax (continued)*

Pajak tangguhan / *Deferred tax*

Pajak tangguhan dihitung berdasarkan pengaruh dari perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Deferred tax is computed based on effect of temporary differences between the carrying amount of assets and liabilities in the consolidated financial statements with the tax bases of assets and liabilities.

Rincian aset (liabilitas) pajak tangguhan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Details of deferred tax asset (liability) of the Group as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	1 Januari/ *January 1,* 2025	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	31 Desember/ *December 31,* 2025	
Perusahaan				*The Company*
Penyusutan aset tetap	(433.060)	301.541	(131.519)	*Depreciation of fixed assets*
Rugi fiskal	26.442	(26.442)	-	*Fiscal loss*
Jumlah - neto	**(406.618)**	**275.099**	**(131.519)**	***Total - net***

	1 Januari/ *January 1,* 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ *Credited (charged) to profit or loss*	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Perusahaan				*The Company*
Penyusutan aset tetap	(628.981)	195.921	(433.060)	*Depreciation of fixed assets*
Rugi fiskal	114.273	(87.831)	26.442	*Fiscal loss*
Entitas Anak				*Subsidiaries*
Penyusutan aset tetap	(695)	695	-	*Depreciation of fixed assets*
Jumlah - neto	**(515.403)**	**108.785**	**(406.618)**	***Total - net***

Administrasi / *Administration*

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Grup menghitung, menetapkan, dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jenderal Pajak dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak saat terhutangnya pajak.

Based on prevailing Taxation Laws in Indonesia, the Group submits its tax returns on the basis of self assessment. The Directorate General of Tax may assess or amend the tax liabilities within 5 (five) years since the tax becomes due.

19. BEBAN AKRUAL / *19. ACCRUED EXPENSES*

Akun ini merupakan akrual untuk: / *This account represents accruals for:*

	31 Desember/ *December 31,* 2025	31 Desember/ *December 31,* 2024	
Estimasi biaya penyelesaian pembangunan aset tetap	107.983	8.102	*Estimated completion cost of construction of fixed assets*
Bunga dan biaya keuangan	13.875	515	*Interest and financing costs*
Pemeliharaan dan perbaikan	7.695	13.494	*Repairs and maintenance*
Honorarium tenaga ahli	3.230	2.233	*Professional fees*
Perpajakan	672	44.933	*Taxation*
Lain-lain	1.677	19.974	*Others*
Jumlah	**135.132**	**89.251**	***Total***

20. PENDAPATAN DITANGGUHKAN / *20. UNEARNED REVENUES*

Akun ini merupakan penerimaan dari pelanggan sehubungan dengan perjanjian sewa dan diakui sebagai pendapatan pada saat penyerahan jasa terkait kepada pelanggan dengan rincian sebagai berikut:

This account represents cash received from customers in connection with the tower lease agreement and recognized as revenue upon service provided to customers with details as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
PT Indosat Tbk	81.422	131.487	*PT Indosat Tbk*
PT Telekomunikasi Selular	34.742	223.311	*PT Telekomunikasi Selular*
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)*	996	204.685	*PT XLSMART Telecom Sejahtera (formerly PT XL Axiata Tbk)**
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 3.000)	-	3.837	*Others (each below Rp 3,000)*
Jumlah	**117.160**	**563.320**	***Total***

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/*On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*

21. IMBALAN KERJA / *21. EMPLOYEE BENEFITS*

a. Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 16.751 dan Rp 23.333 merupakan liabilitas atas gaji, bonus dan tunjangan.

a. Short-term employee benefits liabilities

Short-term employee benefits liabilities as of December 31, 2025 and 2024 and amounted to Rp 16,751 and Rp 23,333, respectively, which represents salaries, bonuses and allowances.

b. Liabilitas imbalan pasca kerja

Grup membukukan liabilitas imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel berikut ini merangkum komponen-komponen beban imbalan pasca kerja Grup yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan liabilitas imbalan pasca kerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebagaimana berdasarkan penilaian aktuaria independen yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, berdasarkan laporannya masing-masing 20 Februari 2026 untuk tahun 2025 dan 22 Januari 2025 untuk tahun 2024, dengan menggunakan metode *projected unit credit.*

b. Post-employment benefits liability

The Group records post-employment benefits liability to its entitled employees based on prevailing regulation.

The following tables summarize the Group's post-employment benefits expense recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and post employment benefits liability recognized in the consolidated statement of financial position, as determined by independent actuary, Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits, based on its report dated February 20, 2026 for 2025 and January 22, 2025 for 2024, respectively, using the projected unit credit method.

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liability (continued)*

Beban imbalan pasca kerja / *Post-employment benefits expense*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Biaya jasa kini	3.174	3.083	*Current service cost*
Biaya jasa lalu atas perubahan imbalan	1.958	(393)	*Past service cost due to plan amendment*
Biaya bunga	1.712	1.459	*Interest cost*
Keuntungan yang timbul dari penyesuaian pengalaman	580	2.534	*Gain from experience adjustment*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(1.630)	(126)	*Adjustment of transfer out liabilities*
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	131	*Adjustment of past services liabilities*
Jumlah	**5.794**	**6.688**	***Total***

Liabilitas imbalan pasca kerja / *Post-employment benefits liability*

	31 December/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Nilai kini kewajiban	**30.083**	**24.362**	*Present value of obligation*

Perubahan nilai kini kewajiban imbalan pasti untuk tahun berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movements of the present value of obligation for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	24.362	21.352	*Beginning balance*
Biaya jasa kini	3.174	3.083	*Current service cost*
Biaya jasa lalu	1.958	(393)	*Past service cost*
Biaya bunga	1.712	1.459	*Interest cost*
Keuntungan yang timbul dari penyesuaian pengalaman	580	2.534	*Gain from experience adjustment*
Pembayaran manfaat	(2.845)	(1.719)	*Benefits payment*
Penyesuaian liabilitas atas karyawan mutasi - keluar	(1.630)	(126)	*Adjustment of employees transfer out liabilities*
Penyesuaian liabilitas atas masa kerja lalu	-	131	*Adjustment of past services liabilities*
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti neto:			*Remeasurement of net defined benefits obligation:*
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	1.849	(816)	*Actuarial loss (gain) arising from change in financial assumptions*
Penyesuaian pengalaman	923	(1.143)	*Experience adjustment*
Saldo akhir	**30.083**	**24.362**	***Ending balance***

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / ***21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)***

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liability (continued)*

Perubahan liabilitas imbalan pasca kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Movements of post-employment benefits liability for the years ended December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	24.362	21.352	*Beginning balance*
Beban tahun berjalan (Catatan 30)	5.794	6.688	*Current year expense (Note 30)*
Pembayaran manfaat	(2.845)	(1.719)	*Benefits payment*
Kerugian (keuntungan) aktuaria	2.772	(1.959)	*Actuarial loss (gain)*
Saldo akhir	**30.083**	**24.362**	***Ending balance***

Keuntungan aktuarial kumulatif yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The accumulated actuarial gain which are recognized in other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	19.076	17.117	*Beginning balance*
Keuntungan (kerugian) aktuarial tahun berjalan	(2.772)	1.959	*Actuarial gain (loss) for current year*
Saldo akhir	**16.304**	**19.076**	***Ending balance***

Asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

The principal assumptions used in determining post-employment benefits liability as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Tingkat diskonto	6,40% - 6,60%	7,15%	*Discount rate*
Tingkat kenaikan gaji tahunan	6%	6%	*Annual rate of salary increase*
Usia pensiun normal	56 Tahun/*Years*	57 Tahun/*Years*	*Normal pension age*
Tingkat mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	*Mortality rate*
Tingkat cacat	10% TMI IV 2019	10% TMI IV 2019	*Disability rate*

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 11,87 sampai dengan 14,56 tahun.

The weighted average duration of the defined benefits obligation is 11.87 to 14.56 years.

21. IMBALAN KERJA (lanjutan) / *21. EMPLOYEE BENEFITS (continued)*

b. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan) / *b. Post-employment benefits liability (continued)*

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari nilai kini kewajiban imbalan pasti (tidak didiskontokan) adalah sebagai berikut:

The expected maturity analysis of the present value of defined benefits obligation (undiscounted) is as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kurang dari satu tahun	465	2.253	*Less than one year*
Antara satu dan lima tahun	10.709	7.493	*Between one and five years*
Antara lima dan sepuluh tahun	30.781	18.390	*Between five and ten years*
Lebih dari sepuluh tahun	116.405	133.602	*More than ten years*
Jumlah	**158.360**	**161.738**	***Total***

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini kewajiban pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table illustrates the sensitivity of a possible change in market interest rate, with other variables considered as constant, of present value of obligation as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kenaikan 1%	(2.418)	(1.938)	*Increase 1%*
Penurunan 1%	2.730	2.203	*Decrease 1%*

Grup telah mereviu asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut sudah memadai. Manajemen berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan pasca kerja tersebut telah memadai untuk menutupi liabilitas imbalan pasca kerja Grup sesuai dengan peraturan yang berlaku.

The Group has reviewed the assumptions used and believes that these assumptions are adequate. Management believes that the post-employment benefits liability is sufficient to cover the Group's post-employment benefis liability in accordance with the prevailing regulations.

22. DERIVATIF / *22. DERIVATIVE*

Pada tanggal 14 Agustus 2025, Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan PT Bank SMBC Indonesia Tbk sebagai sarana lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang asing sehubungan dengan saldo pinjaman bank sebesar USD 43.480.000 (Catatan 16a).

On August 14, 2025, the Company entered into cross currency swap contract with PT Bank SMBC Indonesia Tbk to hedge fluctuation on foreign currency in relation to its bank loan balance of USD 43,480,000 (Note 16a).

Pada tanggal 5 dan 19 Desember 2025, Perusahaan menandatangani kontrak swap valuta asing dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai sarana lindung nilai terhadap fluktuasi mata uang asing sehubungan dengan saldo pinjaman bank sebesar USD 28.004.000 (Catatan 16a).

On December 5 and 19, 2025, the Company entered into cross currency swap contract with PT Bank CIMB Niaga Tbk to hedge fluctuation on foreign currency in relation to its bank loan balance of USD 28,004,000 (Note 16a).

22. DERIVATIF (lanjutan) / *22. DERIVATIVE (continued)*

Di bawah ini adalah informasi sehubungan dengan kontrak swap valuta asing dan nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Information related to the cross currency swap contract and its fair values as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

Kontrak swap valuta asing	Jumlah nosional (USD)/ *Notional amount (USD)*	Nilai wajar/*Fair value* 31 Desember/*December 31,* 2025	2024	*Cross currency swap contract*
Piutang derivatif				***Derivative receivables***
PT Bank SMBC Indonesia Tbk	43.480.000	27.132	-	*PT Bank SMBC Indonesia Tbk*
PT Bank CIMB Niaga Tbk	21.446.000	2.264	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*
		29.396	-	
Utang derivatif				***Derivative payable***
PT Bank CIMB Niaga Tbk	6.558.000	(7)	-	*PT Bank CIMB Niaga Tbk*

23. PROVISI JANGKA PANJANG / *23. LONG-TERM PROVISION*

Grup mengakui liabilitas diestimasi atas biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi atas menara dan sarana penunjang pada saat berakhirnya periode sewa atas tanah dan bangunan, dimana menara milik Grup berada.

The Group recognized the estimated liability for dismantling, removing and site restoration costs of towers and supporting equipment at the end of the lease period of the land and building, where the Group's towers are located.

Mutasi provisi jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movements of long-term provision are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,* 2025	2024	
Saldo awal	25.947	24.407	*Beginning balance*
Provisi tahun berjalan (Catatan 11)	1.260	88	*Provision during the year (Note 11)*
Beban bunga (Catatan 31)	1.915	1.767	*Interest expense (Note 31)*
Realisasi tahun berjalan	(383)	(315)	*Realization during the year*
Saldo akhir	**28.739**	**25.947**	***Ending balance***

Provisi estimasi biaya pembongkaran menara masing-masing sebesar Rp 1.260 pada tanggal 31 Desember 2025 dan Rp 88 pada tanggal 31 Desember 2024 dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap (Catatan 11).

Provision of estimated cost of dismantling of towers which amounting to Rp 1,260 as of December 31, 2025 and Rp 88 as of December 31, 2024, respectively, are capitalized as part of the cost of fixed assets (Note 11).

Asumsi signifikan pada tanggal 31 Desember 2025 terdiri dari tingkat diskonto dan sisa periode sebelum pembongkaran dilakukan, yaitu masing-masing adalah 7,13% dan 32,94 tahun. Provisi jangka panjang akan direalisasi ketika pembongkaran menara.

The significant assumptions as of Desember 31, 2025 consists of discount rate and remaining periods before dismantling of 7.13% and 32.94 years, respectively. Long-term provision will be realized when the related towers have been dismantled.

24. MODAL SAHAM / *24. SHARE CAPITAL*

Sesuai dengan daftar pemegang saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perusahaan (PT Raya Saham Registra), susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

In accordance with the list of shareholders issued by the Share Administrator Bureau of the Company (PT Raya Saham Registra), the Company's shareholders and its ownership composition as of December 31, 2025 and 2024 are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2025

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/*Total*	*Shareholders*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.107.187.889	97,33%	110.719	*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT Iforte Solusi Infotek	29.411.765	2,58%	2.941	*PT Iforte Solusi Infotek*
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	980.044	0,09%	98	*Public (each below 5%)*
Jumlah	**1.137.579.698**	**100,00%**	**113.758**	***Total***

31 Desember/*December 31,* 2024

Pemegang Saham	Jumlah Saham/ *Number of Shares*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Jumlah/*Total*	*Shareholders*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	1.137.099.654	99,96%	113.710	*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	480.044	0,04%	48	*Public (each below 5%)*
Jumlah	**1.137.579.698**	**100,00%**	**113.758**	***Total***

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR / *25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL*

Akun ini terdiri dari: / *This account consists of:*

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Agio saham	3.589.495	3.589.495	*Share premium*
Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali	1.310.952	1.310.952	*Difference in value of transactions with entities under common control*
Pembayaran berbasis saham	12.378	8.888	*Share-based payment*
Aset pengampunan pajak	276	276	*Tax amnesty assets*
Jumlah	**4.913.101**	**4.909.611**	***Total***

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)

Pembayaran Berbasis Saham

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (entitas induk utama dari Protelindo, entitas induk Perusahaan) memberikan opsi saham (transaksi yang diselesaikan dengan ekuitas) kepada manajemen dan karyawan Perusahaan dalam Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Karyawan (MESOP).

Sesuai PSAK 102, "Pembayaran Berbasis Saham", Perusahaan mengukur jasa yang diterima dari karyawannya sesuai dengan persyaratan yang diterapkan terhadap transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas, dan mengakui kenaikan terkait pada akun tambahan modal disetor di bagian ekuitas sebagai kontribusi dari entitas induk.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, konversi opsi saham menjadi saham yang telah dilaksanakan masing-masing adalah sebesar Rp 3.490 dan Rp 8.888.

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL (continued)

Share-based Payment

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (ultimate parent entity of Protelindo, the Company's parent entity) granted share options (equity-settled transactions) to the Company's management and employees through the Management and Employees Stock Ownership Program (MESOP).

Under PSAK 102, "Share-based Payment", the Company measures the service received from its employees in accordance with the requirements applicable to equity-settled share-based payment transactions, and recognize a corresponding increase in additional paid-in capital account in equity section as a contribution from the parent entity.

For the years ended December 31, 2025 and 2024, the conversion of share options into shares amounted to Rp 3,490 and Rp 8,888, respectively.

26. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Rincian penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

26. OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Details of other comprehensive income are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Saldo awal	19.076	17.117	*Beginning balance*
Penambahan (pengurangan) tahun berjalan	(2.772)	1.959	*Addition (deduction) during the year*
Saldo akhir	**16.304**	**19.076**	***Ending balance***

27. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan sewa menara telekomunikasi dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 1.910.682 pada tahun 2025 dan Rp 1.817.387 untuk tahun 2024.

27. REVENUES

This account represents telecommunication tower lease revenues from third parties which amounting to Rp 1,910,682 for 2025 and Rp 1,817,387 for 2024, respectively.

27. PENDAPATAN (lanjutan) / *27. REVENUES (continued)*

Rincian pelanggan dengan nilai pendapatan melebihi 10% dari jumlah pendapatan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Details of customers with revenue value exceeding 10% of the total consolidated revenues are as follows:

	Pendapatan/*Revenues*		Persentase dari jumlah pendapatan/*Percentage of total revenues*		
	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*,		Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ *Year Ended December 31*,		
	2025	2024	2025	2024	
Pelanggan					*Customers*
PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk)*	886.267	677.183	46%	37%	*PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (formerly PT XL Axiata Tbk)**
PT Indosat Tbk	673.067	595.491	35%	33%	*PT Indosat Tbk*
PT Telekomunikasi Selular	343.079	343.329	18%	19%	*PT Telekomunikasi Selular*
PT Smart Telecom*	-	195.509	-	10%	*PT Smart Telecom**
Jumlah	**1.902.413**	**1.811.512**	**99%**	**99%**	***Total***

*) Pada tanggal 16 April 2025 PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom telah efektif bergabung menjadi PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk/*On April 16, 2025, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom officially merged into PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk.*

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN / *28. COST OF REVENUES*

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

Detail of cost of revenues are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	2024	
Penyusutan dan amortisasi:			*Depreciation and amortization:*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	247.461	241.415	*Depreciation of right-of-use assets (Note 12)*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	188.197	175.282	*Depreciation of fixed assets (Note 11)*
Lain-lain	718	821	*Others*
Sub jumlah	436.376	417.518	*Sub total*
Beban pokok pendapatan lainnya:			*Other cost of revenues:*
Pemeliharaan dan perbaikan	39.738	38.399	*Repairs and maintenance*
Jasa keamanan dan lain-lain	19.806	17.499	*Security services and others*
Sub jumlah	59.544	55.898	*Sub total*
Jumlah	**495.920**	**473.416**	***Total***

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak ada transaksi dari satu pemasok yang jumlah pembelian kumulatifnya melebihi 10% dari pendapatan konsolidasian.

For years ended December 31, 2025 and 2024, there were no purchases made from any single supplier with a total cumulative amount exceeding 10% of the consolidated revenues.

29. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN / *29. SELLING AND MARKETING EXPENSES*

Rincian beban penjualan dan pemasaran adalah sebagai berikut:

Details of selling and marketing expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Perjalanan dinas	1.860	877	*Business trip*
Jamuan dan representasi	1.521	2.193	*Entertainment and representation*
Jumlah	**3.381**	**3.070**	***Total***

30. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *30. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

Details of general and administrative expenses are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Gaji dan kesejahteraan karyawan	43.019	60.231	*Salaries and employee welfare*
Imbalan pasca kerja (Catatan 21b)	5.794	6.688	*Post-employment benefits (Note 21b)*
Honorarium tenaga ahli	4.608	5.299	*Professional fees*
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	2.919	4.230	*Depreciation of fixed assets (Note 11)*
Perlengkapan kantor	2.426	5.619	*Office supplies*
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	1.048	1.048	*Amortization of intangible asset (Note 14)*
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 12)	-	124	*Depreciation of right-of-use assets (Note 12)*
Lain-lain	(1.308)	1.276	*Others*
Jumlah	**58.506**	**84.515**	***Total***

31. BIAYA KEUANGAN / *31. FINANCE COSTS*

Rincian biaya keuangan adalah sebagai berikut:

Details of finance costs are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban bunga pinjaman bank:			*Interest expense on bank loans:*
Pihak ketiga	86.067	114.616	*Third parties*
Pihak berelasi (Catatan 34)	708	1.214	*Related party (Note 34)*
Beban bunga provisi jangka panjang (Catatan 23)	1.915	1.767	*Interest expense on long-term provision (Note 23)*
Amortisasi biaya transaksi (Catatan 16)	-	14.919	*Amortization of transaction costs (Note 16)*
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 12)	-	20	*Interest expense on lease liabilities (Note 12)*
Jumlah	**88.690**	**132.536**	***Total***

32. BEBAN LAIN-LAIN - NETO / *32. OTHER EXPENSES - NET*

Rincian pendapatan (beban) lain-lain - neto adalah sebagai berikut:

Details of other income (expenses) - net are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Rugi pembongkaran/ penghapusan/pelepasan aset tetap - neto (Catatan 11)	(35.216)	(21.680)	*Loss on dismantling/ write-off/disposal of fixed assets - net (Note 11)*
Laba (rugi) selisih kurs - neto	(3.092)	1.607	*Foreign exchange gain (loss) - net*
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai aset hak-guna (Catatan 12)	(818)	3.871	*Recovery (provision) of impairment losses of right-of-use (Note 12)*
Pemulihan (penyisihan) kerugian penurunan nilai persediaan (Catatan 8)	(427)	1.694	*Recovery (provision) of impairment losses on inventories (Note 8)*
Beban pajak (Catatan 18a)	-	(110.210)	*Tax expenses (Note 18a)*
Lain-lain - neto	(4.830)	(12.764)	*Others - net*
Jumlah - neto	**(44.383)**	**(137.482)**	***Total - net***

33. LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK / *33. BASIC EARNINGS PER SHARE ATTRIBUTABLE TO OWNERS OF THE PARENT ENTITY*

Perhitungan laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebagai berikut:

The computation of basic earnings per share attributable to owners of the parent entity are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.324.520	974.315	*Income for the year attributable to owners of the parent entity*
Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (lembar)	1.137.579.698	1.137.579.698	*Weighted average number of shares outstanding (shares)*
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	**1.164**	**856**	***Basic earnings per share attributable to owners of the parent entity (full amount)***

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi karena hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan. Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan persyaratan yang disetujui kedua belah pihak.

Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") adalah entitas induk Perusahaan.
b. PT Bach Multi Global ("BMG") adalah entitas asosiasi dari Protelindo Grup.
c. PT Bach Multi Infrastruktur adalah entitas anak dari BMG.
d. PT Bank Central Asia Tbk adalah entitas yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.
e. PT Iforte Payment Infrastructure adalah entitas di bawah pengendalian yang sama.
f. PT Iforte Solusi Infotek adalah entitas di bawah pengendalian yang sama.
g. Manajemen kunci meliputi Direksi Grup.

34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

In the normal course of business, the Group entered into transactions with related parties in view of their common ownership and management. All transactions with related parties are conducted based on policies and terms agreed upon by both parties.

Nature of relationship with related parties

a. PT Profesional Telekomunikasi Indonesia ("Protelindo") is the Company's parent entity.
b. PT Bach Multi Global ("BMG") is an associate entity of Protelindo Group.
c. PT Bach Multi Infrastruktur is a subsidiary of BMG.
d. PT Bank Central Asia Tbk is an entity under family relationship with ultimate shareholders.
e. PT Iforte Payment Infrastructure is an entity under common control.
f. PT Iforte Solusi Infotek is an entity under common control.
g. Key management includes the members of the Group's Board of Directors.

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi / ***Balances and transactions with related parties***

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Kas dan bank (Catatan 4)			*Cash on hand and in banks (Note 4)*
PT Bank Central Asia Tbk	**1.652**	**1.682**	*PT Bank Central Asia Tbk*
Persentase dari jumlah aset	**0,02%**	**0,02%**	***Percentage to total assets***
Utang bank (Catatan 16)			*Bank loans (Note 16)*
PT Bank Central Asia Tbk	**-**	**4.000**	*PT Bank Central Asia Tbk*
Persentase dari jumlah liabilitas	**-**	**0,13%**	***Percentage to total liabilities***
Utang usaha (Catatan 17)			*Trade payables (Note 17)*
PT Bach Multi Infrastruktur	29.279	5.750	*PT Bach Multi Infrastruktur*
PT Bach Multi Global	4.759	3.293	*PT Bach Multi Global*
Jumlah	**34.038**	**9.043**	***Total***
Persentase dari jumlah liabilitas	**1.59%**	**0,29%**	***Percentage to total liabilities***

34. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan) / *34. BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)*

Saldo dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan) / ***Balances and transactions with related parties (continued)***

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Utang lain-lain			*Other payables*
PT Profesional Telekomunikasi Indonesia	72	-	*PT Profesional Telekomunikasi Indonesia*
PT Iforte Payment Infrastructure	6	-	*PT Iforte Payment Infrastructure*
PT Iforte Solusi Infotek	-	3	*PT Iforte Solusi Infotek*
Jumlah	**78**	**3**	***Total***
Persentase dari jumlah liabilitas	**0,00%**	**0,00%**	***Percentage to total liabilities***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Beban pokok pendapatan lainnya (Catatan 28)			*Other cost of revenues (Note 28)*
PT Bach Multi Global	**43.957**	**35.313**	*PT Bach Multi Global*
Persentase dari jumlah beban pokok pendapatan lainnya	**73,82%**	**63,17%**	***Percentage to total other cost of revenues***
Beban umum dan administrasi			*General and administrative expenses*
PT Iforte Solusi Infotek	**-**	**30**	*PT Iforte Solusi Infotek*
Persentase dari jumlah beban umum dan administrasi	**-**	**0,04%**	***Percentage to total general and administrative expenses***
Biaya keuangan (Catatan 31)			*Finance costs (Note 31)*
PT Bank Central Asia Tbk	**708**	**1.214**	*PT Bank Central Asia Tbk*
Persentase dari jumlah biaya keuangan	**0,80%**	**0,92%**	***Percentage to total finance costs***
Kompensasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi:			*Compensation to Boards of Commissioners and Directors:*
Imbalan kerja jangka pendek			*Short-term employee benefits*
Dewan Komisaris	433	390	*Board of Commissioners*
Direksi	38	3.505	*Board of Directors*
Sub jumlah	471	3.895	*Sub total*
Imbalan kerja jangka panjang			*Long-term employee benefits*
Imbalan pasca kerja	-	324	*Post-employment benefits*
Jumlah	**471**	**4.219**	***Total***

Seluruh transaksi dengan pihak berelasi telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

All transactions with related parties have been disclosed in the consolidated financial statements.

35. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Perjanjian Sewa

- **PT Indosat Tbk ("Indosat")**

  Pada berbagai tanggal antara tahun 2010 sampai 2025, Grup mengadakan perjanjian dengan Indosat dimana Grup akan menyediakan lokasi dan fasilitas untuk pengoperasian peralatan komunikasi Indosat. Perjanjian ini berlaku selama 10 (sepuluh) tahun untuk infrastruktur *in building coverage* dan selama 10 sampai 13 (sepuluh sampai tiga belas) tahun untuk penyewaan menara dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- **PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")**

  Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2025, Grup dan Telkomsel menandatangani perjanjian sewa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menara milik Grup. Perjanjian-perjanjian ini memiliki jangka waktu selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

- **PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom) ("XLSmart")**

  a. Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2019, Grup dan XLSmart menandatangani perjanjian utama, sebagaimana telah diubah beberapa kali, mengenai sewa menyewa fasilitas infrastruktur telekomunikasi. Perjanjian ini memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun untuk infrastruktur in *building coverage* dan 10 (sepuluh) tahun untuk penyewaan menara terhitung sejak tanggal Berita Acara yang disepakati kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Lease Agreements

- ***PT Indosat Tbk ("Indosat")***

  On various dates between financial year 2010 to 2025, the Group entered into agreement with Indosat whereby as the Group shall provide locations and facilities to Indosat for the operations of its communication equipments. The agreement is valid for 10 (ten) years for in building coverage infrastructures and for 10 to 13 (ten until thirteen) years for tower leasing and can be extended with the consent of both parties.

- ***PT Telekomunikasi Selular ("Telkomsel")***

  On various dates between financial year 2009 to 2025, the Group and Telkomsel signed lease agreement, as amended several times, regarding the leasing of the Group's towers. These agreements are valid for 5 (five) to 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

- ***PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (previously PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom) ("XLSmart")***

  a. On various dates between financial year 2009 to 2019, the Group and XLSmart entered into master agreement, as amended several times, regarding lease of telecommunication infrastructure facilities. The agreement is valid for 5 (five) years for infrastructure in building coverage and for 10 (ten) years for tower leasing from the date of Agreed Minutes (Berita Acara) by both parties and can be extended with the consent of both parties.

35. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Perjanjian Sewa (lanjutan)

- **PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (sebelumnya PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk dan PT Smart Telecom) ("XLSmart") (lanjutan)**

  b. Pada berbagai tanggal antara tahun 2009 sampai 2022, Grup dan XLSmart mengadakan perjanjian, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dalam rangka sewa menyewa infrastruktur telekomunikasi milik Grup. Jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.

  c. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2025 antara Perusahaan (melalui PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) dan XLSMART, para pihak telah mengatur kesepakatan mereka mengenai jangka waktu sewa site tertentu yang disewa oleh XLSMART dari Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Juni 2025. Jangka waktu sewa site diatur dalam perjanjian sewa site terkait.

  d. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan tanggal 1 Desember 2025 antara Perusahaan (melalui PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) dan XLSMART, para pihak telah mengatur kesepakatan mereka mengenai jangka waktu sewa site tertentu yang disewa oleh XLSMART dari Perusahaan. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 23 Desember 2024. Jangka waktu sewa site diatur dalam perjanjian sewa site terkait.

- **PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel")**

  Berdasarkan Perjanjian Pembelian Aset pada tanggal 31 Desember 2014 antara Perusahaan dengan XLSMART, hak-hak XLSMART berdasarkan Perjanjian Utama Sewa Menyewa Infrastruktur *Tower* untuk menyewakan ruang kepada Mitratel dialihkan kepada Perusahaan. Jangka Waktu Perjanjian Sewa Site adalah selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tambahan selama 5 (lima) tahun sesuai kesepakatan dan persetujuan para pihak.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Lease Agreements (continued)

- ***PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (previously PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk and PT Smart Telecom) ("XLSmart") (continued)***

  b. On various dates between financial year 2009 to 2022, the Group and XLSmart entered into lease agreements, as amended several times, of telecommunication infrastructure owned by the Group. The agreements are valid for 10 (ten) years and can be extended with the consent of both parties.

  c. Based on Minutes of Agreement dated December 1, 2025 between the Company (represented by PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) and XLSMART, the parties have recorded their agreement on the lease period of certain sites leased by XLSMART from the Company. This agreement is effective on June 1, 2025. The site lease period is set out in the relevant site lease agreement.

  d. Based on Minutes of Agreement dated December 1, 2025 between the Company (represented by PT Profesional Telekomunikasi Indonesia) and XLSMART, the parties have recorded their agreement on the lease period of certain sites leased by XLSMART from the Company. This agreement is effective on December 23, 2024. The site lease period is set out in the relevant site lease agreement.

- ***PT Dayamitra Telekomunikasi ("Mitratel")***

  Based on Asset Purchase Agreement dated December 31, 2014 between the Company and XLSMART, XLSMART's entitlement based on its Master Lease Agreement for Tower Infrastructures to lease the space to Mitratel was assigned to Company. The Site Lease Agreement is for 10 (ten) years and can be extended for 5 (five) years additional period based on mutual consent of the parties.

35. PERJANJIAN PENTING, KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

Jumlah estimasi piutang sewa minimum di masa depan untuk perjanjian-perjanjian sewa di atas adalah sebagai berikut:

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

Total estimated future minimum rental receivables for the preceding lease agreements are as follows:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Sampai dengan satu tahun	1.819.774	1.663.703	*Within one year*
Lebih dari satu tahun sampai dengan lima tahun	6.662.618	3.546.492	*More than one year to five years*
Lebih dari lima tahun	9.200.725	1.342.243	*More than five years*
Jumlah estimasi piutang sewa minimum di masa depan	**17.683.117**	**6.552.438**	***Total estimated future minimum rental receivables***

36. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Grup mempunyai aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing sebagai berikut:

36. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCY

As of December 31, 2025 and 2024, the Group has monetary assets and liabilities denominated in foreign currency as follows:

		31 Desember/*December 31*, 2025		31 Desember/*December 31*, 2024		
	Mata Uang/ *Currency*	**Jumlah/ *Amount***	**Setara dengan Rupiah/ *Equivalent to Rupiah***	**Jumlah/ *Amount***	**Setara dengan Rupiah/ *Equivalent to Rupiah***	
Aset Moneter						*Monetary Assets*
Kas dan bank	USD	1.825	31	1.899	31	*Cash oh hand and in banks*
Piutang derivatif	USD	64.926.000	1.089.588	-	-	*Derivative receivables*
Jumlah aset moneter			1.089.619		31	*Total monetary assets*
Liabilitas Moneter						*Monetary Liabilities*
Utang bank	USD	(71.484.000)	(1.199.644)	-	-	*Bank loans*
Utang derivatif	USD	(6.558.000)	(110.056)	-	-	*Derivative payable*
Jumlah liabilitas moneter			(1.309.700)		-	*Total monetary liabilities*
Aset (liabilitas) moneter - neto			**(220.081)**		**31**	***Monetary assets (liabilities) - net***

37. INFORMASI SEGMEN

Untuk kepentingan pelaporan manajemen, Grup hanya terdiri dari satu segmen operasi yaitu penyewaan menara telekomunikasi. Seluruh aset produktif dan pelanggan Grup berada di Indonesia.

37. SEGMENT INFORMATION

For the purpose of management, the Group is organized as one operating segment, namely telecommunication tower rental. All of the Group's productive assets and customers are located in Indonesia.

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Instrumen keuangan yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dicatat sebesar nilai wajar, atau disajikan dalam jumlah tercatat baik karena jumlah tersebut adalah kurang lebih sebesar nilai wajarnya atau karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

Aset keuangan lancar dan liabilitas keuangan jangka pendek

Kas dan bank, bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain, utang bank, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual mendekati estimasi nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek.

Nilai wajar dari piutang dan utang derivatif berdasarkan nilai pasar.

Berikut ini adalah metode dan asumsi yang digunakan untuk memperkirakan nilai wajar setiap kelompok dari instrumen keuangan Grup:

Aset keuangan tidak lancar

Nilai wajar aset tidak lancar lainnya - setoran jaminan diasumsikan sama dengan nilai terutangnya karena tidak mempunyai persyaratan pembayaran yang pasti walaupun tidak diharapkan untuk dikembalikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan.

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS

Financial instruments presented in the consolidated statement of financial position are carried at fair values, otherwise, they are presented at carrying amounts as either these are reasonable approximation of fair values or their fair values cannot be reliably measured.

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Group's financial instruments:

Current financial assets and current financial liabilities

Cash on hand and in banks, restricted cash in bank, trade receivables, accrued income, other receivables, bank loans, trade payables, other payables and accrued expenses approximate their carrying values due to their short-term nature.

The fair value of derivative receivables and payable is based on mark-to-market value.

The following are the methods and assumptions used to estimate the fair value of each class of the Group's financial instruments:

Non current financial assets

The fair value of other non-current assets - security deposits are assumed to be the same as their original principal amounts because they have no fixed repayment terms although they are not expected to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period.

38. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

38. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

Tabel berikut menyajikan nilai wajar, yang mendekati nilai tercatat, atas aset keuangan dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table sets forth the fair values, which approximate their carrying amounts, of the Group's financial assets and financial liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Aset Keuangan			***Financial Assets***
Aset keuangan lancar			***Current financial assets***
Kas dan bank	51.230	18.272	*Cash on hand and in banks*
Bank yang dibatasi penggunaannya	-	8	*Restricted cash in bank*
Piutang usaha - neto	41.359	616.530	*Trade receivables - net*
Pendapatan yang masih akan diterima - neto	78.904	66.888	*Accrued income - net*
Piutang lain-lain	1.954	5.474	*Other receivables*
Piutang derivatif	29.396	-	*Derivative receivables*
Jumlah aset keuangan lancar	202.843	707.172	*Total current financial assets*
Aset keuangan tidak lancar			***Non-current financial asset***
Aset tidak lancar lainnya	583	633	*Other non-current assets*
Jumlah aset keuangan	**203.426**	**707.805**	***Total financial assets***
Liabilitas Keuangan			***Financial Liabilities***
Liabilitas keuangan jangka pendek			***Current financial liabilities***
Utang bank	1.534.644	1.846.000	*Bank loans*
Utang usaha	130.070	68.981	*Trade payables*
Utang lain-lain	6.844	6.862	*Other payables*
Beban akrual	135.132	89.251	*Accrued expenses*
Utang derivatif	7	-	*Derivative payable*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.806.697**	**2.011.094**	***Total financial liabilities***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Manajemen Risiko

Liabilitas keuangan utama Grup terdiri dari utang bank, utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan utang derivatif. Tujuan utama dari liabilitas keuangan tersebut adalah untuk mengumpulkan dana untuk mendukung operasi Grup. Grup memiliki kas dan bank, bank yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, pendapatan yang masih akan diterima, piutang lain-lain, piutang derivatif dan aset tidak lancar lainnya - setoran jaminan yang timbul dari kegiatan usahanya.

Grup terpengaruh terhadap risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Manajemen senior Grup mengawasi manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut. Manajemen senior Grup didukung oleh Komite Risiko Keuangan yang memberikan saran atas risiko keuangan dan kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk Grup. Komite Risiko Keuangan memberikan kepastian kepada manajemen senior Grup bahwa aktivitas keuangan Grup dikelola sesuai kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai dengan kebijakan dan profil risiko yang ada. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank dan pembiayaan dengan suku bunga mengambang. Eksposur terhadap risiko tingkat suku bunga dipantau secara berkelanjutan dan melakukan perjanjian untuk transaksi derivatif, jika diperlukan.

Tabel berikut menganalisis rincian liabilitas keuangan berdasarkan jenis bunga:

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Risk Management

The main financial liabilities of the Group include bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses and derivative payable. The main purpose of these financial liabilities is to raise funds for the Group's operations. The Group also has cash on hand and in banks, restrcited cash in banks, trade receivables, accrued income, other receivables, derivative receivable and other non-current assets - security deposits that raise directly from their operations.

The Group is exposed to interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Group's senior management oversees the management of these risks. The Group's senior management is supported by a Financial Risk Committee that advises on financial risks and the appropriate financial risk governance framework for the Group. The Financial Risk Committee provides assurance to the Group's senior management that the Group's financial activities are governed by appropriate policies and procedures and that financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk profile. The Board of Directors reviews and approves the policies for managing these risks which are summarized below.

a. Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate due to changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates related primarily to bank and financing loans with floating interest rates. Exposure to interest rate is monitored on an ongoing basis and entering into agreements for derivatives transactions, if needed.

The following table presents an analysis of financial liabilities by type of interest:

	31 Desember/*December 31,*		
	2025	**2024**	
Liabilitas keuangan			***Financial liabilities***
Tanpa bunga	272.046	165.094	*Non-interest bearing*
Bunga mengambang	1.534.651	1.846.000	*Floating interest bearing*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.806.697**	**2.011.094**	***Total financial liabilities***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Manajemen Risiko (lanjutan)

Risk Management (continued)

a. Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

a. Interest rate risk (continued)

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba konsolidasian sebelum pajak penghasilan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rates on that portion of loans. With all other variables held constant, the consolidated income before income tax is affected by the impact on floating rate loans as follows:

	Kenaikan/ penurunan dalam satuan poin/*Increase/ decrease in basis point*	Dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan/ *Effect on income before income tax*	
31 Desember 2025			***December 31, 2025***
Rupiah Indonesia	+100	(15.347)	*Indonesian Rupiah*
Rupiah Indonesia	-100	15.347	*Indonesian Rupiah*
31 Desember 2024			***December 31, 2024***
Rupiah Indonesia	+100	(18.460)	*Indonesian Rupiah*
Rupiah Indonesia	-100	18.460	*Indonesian Rupiah*

b. Risiko kredit

b. Credit risk

Risiko kredit adalah risiko dimana lawan transaksi tidak akan memenuhi liabilitasnya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup terkena risiko kredit dari kegiatan operasi yang berhubungan dengan sewa menara. Risiko kredit pelanggan dikelola oleh komite kredit sesuai kebijakan Grup, prosedur dan pengendalian yang telah ditetapkan yang berkaitan dengan manajemen risiko kredit pelanggan. Posisi piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima dari pelanggan dipantau secara teratur.

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group is exposed to credit risk from their operating activities related to tower rent. Customer credit risk is managed by a Credit Committe subject to the Group's established policies, procedures and controls relating to customer credit risk management. Outstanding customer trade receivables and accrued income are regularly monitored.

Maksimum risiko kredit yang dihadapi oleh Grup kurang lebih sebesar nilai tercatat neto dari piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 6 dan 7.

The Group's maximum exposure of the credit risk approximates net carrying amounts of trade receivables and accrued income as disclosed in Notes 6 and 7.

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Manajemen Risiko (lanjutan)

Risk Management (continued)

b. Risiko kredit (lanjutan)

b. Credit risk (continued)

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh Direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Credit risk arising from placements of current accounts is managed in accordance with the Group's policies. Investments of surplus funds are limited for each bank and reviewed annually by the Board of Directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Tabel berikut ini menyajikan piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima yang mengalami penurunan nilai, piutang usaha yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai dan piutang usaha dan pendapatan yang masih akan diterima yang belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai serta saldo di bank:

The following table presents the impaired trade receivables and accrued income, trade receivables past due but not impaired and trade receivables and accrued income neither past due nor impaired and cash in banks:

	31 Desember/*December 31*, 2025						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ ***Neither past due nor impaired***	**Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/** ***Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/** ***Impaired***	**Sub jumlah/** ***Sub total***	**Cadangan kerugian kredit ekspektasian/** ***Allowance for expected credit losses***	**Jumlah - neto/** ***Total - net***	
Saldo di bank	50.210	-	-	50.210	-	50.210	*Cash in banks*
Piutang usaha	41.257	102	2.470	43.829	(2.470)	41.359	*Trade receivables*
Pendapatan yang masih akan diterima	78.904	-	1.001	79.905	(1.001)	78.904	*Accrued income*
Jumlah	**170.371**	**102**	**3.471**	**173.944**	**(3.471)**	**170.473**	***Total***

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ ***Neither past due nor impaired***	**Telah jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/** ***Past due but not impaired***	**Mengalami penurunan nilai/*Impaired***	**Sub jumlah/** ***Sub total***	**Cadangan kerugian kredit ekspektasian/** ***Allowance for expected credit losses***	**Jumlah - neto/** ***Total - net***	
Saldo di bank	17.374	-	-	17.374	-	17.374	*Cash in banks*
Bank yang dibatasi penggunaannya	8	-	-	8	-	8	*Restricted cash in bank*
Piutang usaha	601.651	14.879	2.470	619.000	(2.470)	616.530	*Trade receivables*
Pendapatan yang masih akan diterima	66.888	-	1.001	67.889	(1.001)	66.888	*Accrued income*
Jumlah	**685.921**	**14.879**	**3.471**	**704.271**	**(3.471)**	**700.800**	***Total***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas timbul apabila Grup mengalami kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangan ketika liabilitas keuangan tersebut jatuh tempo.

Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank yang memadai untuk mendukung kegiatan bisnis secara tepat waktu. Grup menjaga keseimbangan antara kesinambungan penagihan piutang usaha serta melalui fleksibilitas penggunaan pinjaman bank dan pembiayaan untuk mengelola risiko likuiditas.

Grup memonitor risiko likuiditas dengan menggunakan alat perencanaan likuiditas. Kebijakan Grup adalah menjaga rasio-rasio sebagai berikut:
- *Net debt to running* EBITDA (maksimum 5,00)
- *Running* EBITDA *to interest expense* (minimum 1,5)

Tabel berikut ini menunjukkan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Grup berdasarkan pembayaran dalam kontrak.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Risk Management (continued)

c. Liquidity risk

Liquidity risk arise in situations where the Group has difficulties in fulfilling financial liabilities when they become due.

Conservative liquidity risk management implies maintaining sufficient cash on hand and in banks to support business activities on a timely basis. The Group maintains a balance between continuity of trade receivables collections and flexibility through the use of bank and financing loans in order to manage liquidity risk.

The Group monitors its risk of a shortage of funds by using a recurring liquidity planning tool. The Group maintains the following ratios:
- *Net debt to running EBITDA (maximum 5.00)*
- *Running EBITDA to interest expense (minimum 1.5)*

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments.

	31 Desember/*December 31*, 2025					
		Jatuh tempo/*Maturity period*				
	Jumlah/*Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Utang bank	1.534.644	1.534.644	-	-	-	*Bank loans*
Utang usaha	130.070	130.070	-	-	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	6.844	6.844	-	-	-	*Other payables*
Beban akrual	135.132	135.132	-	-	-	*Accrued expenses*
Utang derivatif	7	7	-	-	-	*Derivative payable*
Jumlah liabilitas keuangan	**1.806.697**	**1.806.697**	**-**	**-**	**-**	***Total financial liabilities***

	31 Desember/*December 31*, 2024					
		Jatuh tempo/*Maturity period*				
	Jumlah/*Total*	Dalam 1 tahun/ *Within 1 year*	1 - 3 tahun/ *1 - 3 years*	3 - 5 tahun/ *3 - 5 years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Utang bank	1.846.000	1.846.000	-	-	-	*Bank loans*
Utang usaha	68.981	68.981	-	-	-	*Trade payables*
Utang lain-lain	6.862	6.862	-	-	-	*Other payables*
Beban akrual	89.251	89.251	-	-	-	*Accrued expenses*
Jumlah liabilitas keuangan	**2.011.094**	**2.011.094**	**-**	**-**	**-**	***Total financial liabilities***

39. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Manajemen Modal

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Selain itu, Grup dipersyaratkan oleh Undang-Undang Perusahaan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk mengkontribusikan sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Grup pada Rapat Umum Pemegang Saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun berjalan.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

39. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

Capital Management

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders value.

In addition, the Group is also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute and to maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. These externally imposed capital requirements are considered by the Group at the Annual Shareholders' General Meeting.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes for managing capital for current year.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

40. TRANSAKSI NON-KAS

Rincian transaksi non-kas Grup adalah sebagai berikut:

40. NON-CASH TRANSACTIONS

Details of non-cash transactions of the Group is as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/*Year Ended December 31,*		
	2025	**2024**	
Aset tetap:			*Fixed assets:*
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	98.310	51.187	*Addition of fixed assets through trade payables*
Penjualan aset tetap melalui piutang lain-lain	2.370	1.211	*Sale of fixed assets through other receivables*
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi estimasi biaya pembongkaran menara	1.260	88	*Addition of fixed assets through capitalization of the estimated cost of dismantling of tower*
Liabilitas sewa:			*Lease liabilities:*
Penambahan aset hak-guna melalui liabilitas sewa	385.339	382.980	*Addition of right-of-use assets through lease liabilities*
Penurunan liabilitas sewa terkait pembatalan aset hak-guna	-	1.226	*Decrease in lease liabilities due to termination of right-of-use assets*
Penambahan liabilitas sewa melalui biaya keuangan	-	20	*Addition of lease liabilities through finance costs*
Utang bank:			*Bank loan:*
Kenaikan utang bank atas amortisasi biaya transaksi	-	14.919	*Increase bank loan through amortization transaction costs*

41. TAMBAHAN INFORMASI ARUS KAS

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas konsolidasian adalah sebagai berikut:

41. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025/*Year Ended December 31, 2025*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Arus kas neto/ *Net cash flows***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Perubahan lain/ *Other changes***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Utang bank jangka pendek	1.846.000	(343.735)	32.379	-	1.534.644	*Short-term bank loans*
Liabilitas sewa	-	(385.339)	-	385.339	-	*Lease liabilities*
Jumlah	**1.846.000**	**(729.074)**	**32.379**	**385.339**	**1.534.644**	***Total***

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024/*Year Ended December 31, 2024*					
	Saldo awal/ *Beginning balance*	**Arus kas neto/ *Net cash flows***	**Selisih kurs/ *Foreign exchange difference***	**Perubahan lain/*Other changes***	**Saldo akhir/ *Ending balance***	
Utang bank jangka pendek	2.202.580	(365.892)	9.312	-	1.846.000	*Short-term bank loans*
Utang bank jangka panjang	390.885	(405.804)	-	14.919	-	*Long-term bank loans*
Liabilitas sewa	1.002	(382.776)	-	381.774	-	*Lease liabilities*
Jumlah	**2.594.467**	**(1.154.472)**	**9.312**	**396.693**	**1.846.000**	***Total***

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/DIR-STP/I/2026 tanggal 8 Januari 2026, Direksi Perusahaan menyetujui pengangkatan Ardan Rasyid Wiradhatama sebagai Sekretaris Perusahaan.

Perpajakan

Pada tanggal 22 Januari 2026, GIK menerima putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruh permohonan banding SKPLB PPh Badan tahun 2016 sebesar Rp 3.256 (Catatan 18a).

Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan, GIK belum menerima pengembalian atas SKPLB tersebut.

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD

Corporate Secretary of the Company

Based on Board of Directors' Decision Letter No. 002/DIR-STP/I/2026 dated January 8, 2026, the Company's Board of Directors approved the appointment of Ardan Rasyid Wiradhatama as the Corporate Secretary of the Company.

Taxation

On January 22, 2026, GIK received the Tax Court's decision which fully approved the appeal of SKPLB of 2016 CIT amounting to Rp 3,256 (Note 18a).

As of the date of completion of these consolidated financial statements, GIK has not yet received the refund of the SKPLB.

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank

- Bank of China (Hong Kong) Limited, Cabang Jakarta ("BoC")

  Pada tanggal 25 Februari 2026, Grup Protelindo sebagai debitur dan BoC sebagai kreditur telah menandatangani Perjanjian Fasilitas No. 188 dan 189 yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perolehan fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp 1.400.000 dengan jangka waktu berlaku selama 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Fasilitas. Fasilitas tersebut dijamin dengan jaminan perusahaan dari Iforte.

- PT Bank SMBC Indonesia ("SMBC")

  Pada tanggal 3 Maret 2026, Protelindo selaku Peminjam, serta Iforte dan Perusahaan selaku Penanggung dengan SMBC sebagai Pemberi Pinjaman, telah menandatangani Perubahan Ketiga terhadap Perjanjian Fasilitas No. BTPN/NS/0131 tanggal 30 Maret 2022, sehubungan dengan pelepasan Perusahaan sebagai Penanggung (Catatan 16) dalam Perjanjian Fasilitas tersebut. Dengan demikian, selanjutnya pihak yang bertindak sebagai Penanggung dalam Perjanjian Fasilitas tersebut adalah Iforte.

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")

  Pada tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan, Protelindo, Iforte, IBST dan BSI telah menandatangani Adendum Perjanjian Bersama Pembiayaan No. 14 tanggal 25 November 2024 dengan nilai fasilitas sebesar Rp 1.000.000 (Catatan 16b) sehubungan dengan pelepasan Perusahaan dan IBST sebagai peminjam serta pelepasan tanggung renteng dalam Perjanjian Pinjaman.

42. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loans

- *Bank of China (Hong Kong) Limited, Jakarta Branch ("BoC")*

  On February 25, 2026, Protelindo Group as the debtor and BoC as the creditor have signed Facility Agreement No. 188 and 189 as covered by Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notary in Jakarta, in relation to the obtaining of a term loan facility amounting to Rp1,400,000 for 60 (sixty) months from the signing date of the Facility Agreement. The facility is secured by a corporate guarantee from Iforte.

- *PT Bank SMBC Indonesia ("SMBC")*

  On March 3, 2026, Protelindo as the Borrower, and Iforte and the Company as the Guarantors with SMBC as the Lender, entered into the Third Amendment to the Facility Agreement No. BTPN/NS/0131 dated March 30, 2022, in relation to the release of the Company as a Guarantor (Note 16) under the Facility Agreement. Following such release, the Guarantor under the Facility Agreement is Iforte.

- *PT Bank Syariah Indonesia Tbk ("BSI")*

  On March 9, 2026, the Company, Protelindo, Iforte, IBST and BSI have signed an Addendum of Joint Financing Agreement No. 14 dated November 25, 2024 with a facility amount of Rp 1,000,000 (Note 16b) in relation to release the Company and IBST as borrowers and from joint and several liability under the Loan Agreement.

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN (lanjutan)

Utang Bank (lanjutan)

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")

  Pada tanggal 9 Maret 2026, Protelindo dan Iforte sebagai debitur serta BNI sebagai kreditur telah menandatangani Persetujuan Perubahan Keempat atas Perjanjian Kredit sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit No. 17 tanggal 13 Juni 2023 dengan nilai fasilitas sebesar Rp 1.000.000 (Catatan 16b) sehubungan dengan pelepasan Perusahaan sebagai debitur serta pelepasan tanggung renteng Perusahaan dalam Perjanjian Kredit. Dengan demikian, selanjutnya pihak yang bertindak sebagai debitur sekaligus pihak yang bertanggung secara tanggung renteng dalam Perjanjian Kredit adalah Protelindo dan Iforte.

- PT Bank Permata Tbk ("Permata")

  Pada tanggal 9 Maret 2026, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN dan IBST sebagai penerima pinjaman serta Permata, sebagai kreditur telah menandatangani Adendum Perjanjian Fasilitas (Adendum Ketentuan Khusus) atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas tertanggal 17 November 2025 (Catatan 16a) sehubungan dengan konversi fasilitas Pinjaman Berulang menjadi Fasilitas Omnibus Pinjaman Berulang termasuk di dalamnya terdapat Fasilitas Bank Garansi/Fasilitas *Counter Guarantee* sesuai limit yang ditentukan dalam Perjanjian Fasilitas. Fasilitas Omnibus Pinjaman Berulang tersebut berlaku sampai dengan tanggal 17 November 2028.

  Pada tanggal 13 Maret 2026, Perusahaan, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN dan IBST selaku para Peminjam, bersama dengan Permata selaku Pemberi Pinjaman, menandatangani Surat Konfirmasi Perubahan Syarat dan Ketentuan Perjanjian atas Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berulang dan Pinjaman Berjangka tertanggal 17 November 2025, yang antara lain mengatur penambahan *sub-limit* sementara untuk IPI yang berlaku sejak tanggal 17 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026.

43. EVENTS AFTER REPORTING PERIOD (continued)

Bank Loans (continued)

- *PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI")*

  On March 9, 2026, Protelindo and Iforte as the debtors and BNI as the creditor executed the Fourth Amendment Approval to the Credit Agreement as set forth in the Deed of Credit Agreement No. 17 dated June 13, 2023 with a facility amount of Rp 1,000,000 (Note 16b) in relation to the release of the Company as a debtor and the release of the Company from joint and several liability under the Credit Agreement. Accordingly, following such release, the parties acting as debtors and jointly and severally liable under the Credit Agreement are Protelindo and Iforte.

- *PT Bank Permata Tbk ("Permata")*

  On March 9, 2026, the Company, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN and IBST as the borrowers and Permata as the creditor have signed an Addendum to the Facility Agreement (Addendum on Specific Provisions) to the Amendment and Restatement of the Facility Agreement dated November 17, 2025 (Note 16a) in relation to the conversion of the Revolving Loan Facility into an Omnibus Revolving Loan Facility, which also includes the Bank Guarantee Facility and/or Counter Guarantee Facility in accordance with the limits stipulated in the Facility Agreement. The Omnibus Revolving Loan Facility will remain effective until November 17, 2028.

  On March 13, 2026, the Company, Protelindo, Iforte, BIT, IPI, VTS, IEN and IBST as borrowers, together with Permata as the lender, signed a Confirmation Letter on the Amendment of Terms and Conditions in relation to the Amendment and Restatement of the Revolving Loan and Term Loan Facility Agreement dated November 17, 2025, which, among others, provides for the addition of a temporary sub-limit for IPI effective from March 17, 2026 until March 25, 2026.

PT Solusi Tunas Pratama Tbk

Head Office
Jl. Tanjung Karang No. 11
Jati Kulon, Jati, Kudus
Jawa Tengah, 59347
Phone : +62 291 431905
e-mail : marketing@stptower.com
corporate.secretary@stptower.com

Operational Office
Menara BCA, Lantai 49
Jl. M.H. Thamrin No. 1
Jakarta 10310, Indonesia
Phone : +62 21 2358 5555
e-mail : marketing@stptower.com
corporate.secretary@stptower.com